

**NARASI
LEMBAGA YANG UPAYANYA
DIPETAKAN**

**Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003
Kelompok Instansi Pemerintah**

No.	Item	Penjelasan
1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)		
1.1	Nama upaya	Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra)
	Deskripsi upaya	Upaya ini merupakan satu kesatuan dengan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), yang lebih dikenal dengan Takesra-Kukesra. Diantara kedua jenis upaya tersebut, Kukesra adalah yang berkaitan dengan upaya penguatan usaha mikro. Kukesra merupakan pemberian pinjaman modal secara bertahap dalam jumlah kecil kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif.
	Penanggung jawab	BKKBN
	Pelaksana	BKKBN (<i>executing program</i>); BNI dan PT Pos (penyalur)
	Instansi terkait	PT. Asuransi Jasindo, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM).
	Tujuan upaya	Umum: Membantu keluarga terutama Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I guna meningkatkan kemandirian melalui pelebagaan perilaku produktif dengan memanfaatkan pinjaman modal usaha untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan tahapan keluarga sejahtera. Khusus: <ul style="list-style-type: none"> - Membantu keluarga untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan, mudah dan cepat untuk kegiatan ekonomi produktif. - Menumbuh kembangkan kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha. - Membantu keluarga mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang dapat dimitrakan dengan pelaku ekonomi yang lain. - Membantu keluarga dalam mengembalikan KUKESRA apabila penerima KUKESRA meninggal dunia/menderita cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan - Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan, pelayanan pos dan asuransi untuk keluarga.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal secara bertahap. - Penyuluhan dan bimbingan kepada kelompok.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh desa non-IDT di Indonesia sejak tahun 1996. Sejak tahun 1998, desa IDT juga diikuti.
	Sasaran	Sasaran: Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Cara Menjaring: Hasil pendataan BKKBN data yang diverifikasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi Peserta KUKESRA: <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam kelompok UPPKS dan bersedia menanggung resiko bersama (tanggung renteng) dengan sesama anggota kelompok peminjam KUKESRA (dalam satu perjanjian kredit) sebagai konsekuensi atas pinjaman KUKESRA yang diterima. - Memiliki Takesra atas nama istri atau janda atau duda. - Mempunyai kegiatan atau rencana usaha ekonomi produktif baik yang sedang berjalan maupun akan berjalan yang selanjutnya akan dikembangkan sebagai sumber penghasilan untuk mengembalian pinjaman Kukesra. Syarat bagi kelompok UPPKS: <ul style="list-style-type: none"> - Sudah memiliki pengurus yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah - Kelompok UPPKS yang sudah memiliki kegiatan ekonomi produktif dan minimal melakukan pertemuan bulanan anggota.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Nilai: Rp. 754 miliar Sumber: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) Sifat: kredit
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1996 – Januari 2003.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan Kukesra diproses secara berkelompok - Ketua Kelompok UPPKS melakukan pendataan anggota kelompok yang berminat mengajukan KUKESRA. - Ketua kelompok UPPKS mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman KUKESRA dan daftar anggota kelompok - Tim Penilai yang terdiri dari PLKB dan Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB, PLKB tingkat kecamatan) melakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan verifikasi kebenaran data anggota kelompok UPPKS - Menetapkan besarnya pinjaman KUKESRA yang dapat dipertimbangkan per keluarga (nasabah) dan disesuaikan dengan kelayakan usaha serta penghasilan usaha bersih. - Formulir permohonan yang telah ditandatangani ketua kelompok dan telah disahkan oleh tim penilai diserahkan ke kantor pos setempat - Kantor pos setempat mencairkan pinjaman KUKESRA setelah melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Meneliti kebenaran administrasi surat permohonan pinjaman KUKESRA dan daftar anggota kelompok UPPKS - Memutuskan kredit langsung pada formulir permohonan kredit sampai dengan Rp. 5 juta - Membuat perjanjian pinjaman KUKESRA yang ditandatangani ketua kelompok dan Kantor Pos setempat. - Meneruskan berkas permohonan pinjaman KUKESRA di atas Rp. 5 juta beserta daftar anggota ke Kantor Cabang Bank BNI Padanan. - Jumlah, bunga dan jangka waktu pinjaman. <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman kepada anggota diberikan dalam lima tahap (Rp 20.000, Rp. 40.000, Rp. 80.000, Rp. 160.000, dan Rp. 320.000). - Jangka waktu kredit disesuaikan dengan tahapan kredit yang diperoleh dengan kisaran 4-16 bulan. - Bunga pinjaman adalah 6% per tahun flat.
	Pencapaian hasil	(per Juni 2002) Desa non-IDT: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok: 503.486 - Jumlah anggota: 9.097.595 - Jumlah dropping dana Rp. 690.423.420.000 - Jumlah angsuran Rp. 37.152.733.014 - Jumlah bunga diterima Rp. 984.414.396 - Jumlah tunggakan bunga Rp. 6.314.089.581 - Jumlah tunggakan angsuran Rp. 272.248.856.149 - Penyerapan Rp. 1.727.926.080.000 Desa IDT: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok: 54.456 - Jumlah anggota: 1.174.715 - Jumlah dropping dana Rp. 63.558.800.000 - Jumlah angsuran Rp. 2.058.131.921 - Jumlah bunga diterima Rp. 53.511.219 - Jumlah tunggakan bunga Rp. 258.807.828 - Jumlah tunggakan angsuran Rp. 14.915.120.741 - Penyerapan Rp. 66.529.060.000

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya dana dampingan untuk kegiatan pembinaan menyebabkan pengembangan kelembagaan dan individu peserta tidak maksimal, dan berdampak pada kelambanan pengembangan usaha serta munculnya tunggakan dari anggota - Sumber daya pengelola yang kurang profesional, terutama tenaga teknis lapangan yang merangkap sebagai PLKB. - Mata rantai yang panjang dalam pelaksanaan menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis baik dalam pengucuran maupun pengembalian dana.
	Status saat ini	Program sudah selesai, tapi pembayaran pinjaman dan tunggakan masih berjalan.
	Potensi	Berpotensi menggugah minat dan melihat kemampuan anggota UPPKS (terutama kaum ibu) untuk berusaha sehingga menjadi kelompok usaha yang mandiri sebagai proses pembelajaran keluarga-keluarga dari Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi.
1.2	Nama upaya	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU)
	Deskripsi upaya	Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang disediakan untuk membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam kelompok kegiatan UPPKS/kelompok lain guna mengembangkan usahanya melalui pola kemitraan usaha.
	Penanggung jawab	BKKBN
	Pelaksana	<p>Pusat: Ketua: Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN Anggota: Direktur terkait di BKKBN serta Instansi Terkait.</p> <p>Provinsi: Ketua: Kepala BKKBN Propinsi Anggota: Kabid terkait serta Instansi terkait tingkat Propinsi</p> <p>Kabupaten/kota: Ketua: Kepala BKKBN Kabupaten/Kota Anggota: Kabid terkait serta Instansi terkait tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Kecamatan: Ketua: Pengendali Program Lapangan keluarga Berencana (PPLKB) Anggota: Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), instansi terkait (jika ada)</p>
	Instansi terkait	Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM); Departemen Koperasi dan UKM; Depdagri/PMD; Dep. Pertanian; Dep. Perindustrian dan Perdagangan; Bank BNI, BRI, PKK
	Tujuan upaya	<p>Umum: Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan ketrampilan anggota kelompok kegiatan UPPKS/kelompok lain dan para pengusaha kecil, menengah atau koperasi dalam rangka mengembangkan jaringan ekonomi yang kuat dan memberikan dukungan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.</p> <p>Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kegiatan kemitraan antara kelompok kegiatan UPPKS/kelompok lain dengan pengusaha kecil, menengah atau koperasi. - Meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi produktif dan ketrampilan kelompok kegiatan UPPKS/Kelompok lain dan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. - Meningkatnya jaringan ekonomi antara kelompok kegiatan UPPKS/kelompok lain dan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. - Meningkatnya pemanfaatan KPKU oleh kelompok kegiatan UPPKS/kelompok lain.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Kredit (KPKU) - Pembinaan Pembinaan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh aparat BKKBN dan Depkop UKM serta lintas sektoral terkait seperti Deperindag, Deptan, PKK. Pembinaan juga dilakukan oleh Pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Biaya pembinaan operasional kelompok diperoleh dari YDSM dengan mengajukan proposal rencana pembinaan melalui Bank setempat yang terkait.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok kegiatan UPPKS/Kelompok lain yang bermitra dengan pengusaha kecil, menengah atau koperasi. - Pengusaha kecil, menengah atau koperasi yang bermitra dengan kelompok kegiatan UPPKS/Kelompok lain. Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil, menengah atau koperasi dan telah masuk dalam daftar yang diusulkan oleh Pokjanis KPKU. - Mempunyai usaha yang padat karya (labor intensif) - Bersedia melakukan promosi dalam bidang kemitraan usaha dan produknya. - Mempunyai usaha yang layak dengan produk yang mempunyai pasar yang baik untuk ekspor maupun kepentingan pasar setempat (domestik) serta termasuk jenis usaha prioritas. UPPKS/Kelompok Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota kelompok minimal 15 – 25 orang, diutamakan wanita. - Sebanyak mungkin mengikutkan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I diutamakan wanita. - Sudah melakukan atau sedang dalam proses melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan atau koperasi. Meskipun dalam kemitraan tersebut pihak perusahaan atau koperasi mitra usaha tidak mendapatkan kredit modal usaha, maka kelompok UPPKS/Kelompok lain yang bersangkutan tetap mendapatkan KPKU. - Memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan Sertifikat Kelayakan Usaha (SKU) - Memiliki usaha mandiri. - Sudah mendapat Kukesra - Tidak sedang menikmati fasilitas KPTTG.
	Pendanaan	Nilai: 240 M Sumber: YDSM Sifat: Kredit
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997 – Juni 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Pengajuan oleh UPPKS: <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Kelompok bersama PLKB/PKB menyusun rencana kebutuhan modal/membuat proposal dengan mempertimbangkan perhitungan biaya produksi, keuntungan dan modal yang dibutuhkan. - Pengurus mengajukan usulan kepada BKKBN Kabupaten/Kota setelah diketahui oleh PLKB dengan mengisi surat permohonan KPKU, dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian kerjasama (PKS) antara UPPKS dengan mitra UKM atau Koperasi. Bila belum ada dapat diganti dengan Surat keterangan BKKBN setempat tentang dalam proses melakukan mitra. - Surat kuasa dari para anggota kepada Ketua kelompok. - Surat pernyataan sanggup menanggung bersama (tanggung renteng) - Surat kuasa ketua kelompok kepada Bank untuk memindah bukukan dana - Persyaratan administrasi lainnya.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (sambungan)	<ul style="list-style-type: none"> - BKKBN bersama Tim Pokjanis Kabupaten/kota memutuskan usulan tersebut setelah diteliti, diamati dan diadakan pengecekan lapangan oleh petugas di jajaran fungsional yang tergabung dalam Pokjanis. - Apabila disetujui BKKBN Kabupaten/Kota membuat surat keputusan Kredit (SKK) - BKKBN Kabupaten/Kota membuat surat pengantar dan mengirimkan permohonan kredit kelompok berikut kelengkapannya ke Kantor Cabang Bank BNI/BRI untuk diproses lebih lanjut. <p>Pengajuan oleh Pengusaha Kecil, Menengah atau koperasi dengan mengajukan Surat Permohonan KPKU yang dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar usulan untuk mendapatkan KPKU yang telah ditandatangani oleh unsur BKKBN, DepKop UKM serta Bank setempat. - Surat-surat ijin usaha. - Laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. - Foto copy bukti-bukti kepemilikan barang jaminan. <p>Perjanjian kerjasama (PKS) antara pengusaha kecil, menengah atau koperasi dengan kelompok UPPKS.</p>
	Pencapaian hasil	<p>Rencana Droping Dana: Rp. 220.405.635.000 Jumlah Mitra UKM: 999 Jumlah UPPKS: 11.284 Jumlah Realisasi Dana: Rp. 174.050.057.000</p>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Mitra memperoleh kredit hanya dua tahun pertama. - Terjadi perebutan kepentingan dengan pemerintah Daerah (PEMDA) dengan alasan ketidak fokusan upaya KPKU dengan pola mitra, maka dibentuk juga pola KPTTG (Kredit Pengembangan Teknologi Tepat Guna) tahun 1997.
	Status saat ini	Sudah selesai (upaya pengucuran dana berhenti)
	Potensi	Mendorong anggota UPPKS mengaktualisasikan diri lebih lanjut dalam kegiatan usaha mikro melalui program kemitraan dengan modal yang lebih besar daripada modal Kukesra.
1.3	Nama upaya	Kukesra Mandiri
	Deskripsi upaya	<p>Kukesra Mandiri merupakan kelanjutan dari Kukesra dan merupakan kredit usaha ekonomi produktif yang diberikan melalui lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat (BPR), dan/atau bank lain yang ditunjuk, kepada kelompok UPPKS yang sudah berhasil dan/atau kelompok UPPKS baru yang potensial menjadi usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan kemampuan usahanya.</p> <p>LKM/LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) juga melakukan pembinaan dan berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha dan pemasaran produk.</p>
	Penanggung jawab	BKKBN
	Pelaksana	BKKBN, BNI, LKM/LPSM (YDBP, Koperasi BMM, Perbarindo, Yayasan Siti Khadijah, Yayasan Mitra Usaha, BPR Swadharma)
	Instansi terkait	YDSM
	Tujuan upaya	<p>Umum: Meningkatkan taraf hidup keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam Kelompok UPPKS melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.</p> <p>Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu para keluarga yang termasuk dalam keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I agar dapat meningkatkan tahapan keluarga sejahtera. - Mendidik masyarakat agar mengenal dan meningkatkan pemanfaatan jasa perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM) - Menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya (sambungan)	<ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun dana masyarakat untuk mendukung pembangunan keluarga sejahtera. - Mendorong LKM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga. - Meningkatkan kemudahan dan pelayanan kepada anggota kelompok UPPKS yang membutuhkan tambahan modal dengan peningkatan jumlah kelompok yang lebih luas. - Meningkatkan kualitas usaha keluarga atau kelompok UPPKS melalui peningkatan kemampuan manajerial dan ketrampilan teknis.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian modal - Pembinaan: dilakukan bersama-sama oleh BKKBN, Bank BNI, Koperasi, LKM, BPR dalam rangka turut serta membantu peningkatan usaha anggota/kelompok UPPKS sehingga fasilitas kredit dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dikembalikan tepat waktu. - Pemantauan: dilakukan bersama untuk memastikan bahwa kredit telah disalurkan dan diterima oleh anggota/kelompok UPPKS dan dipergunakan sesuai peruntukannya. Kegiatan berbentuk Laporan Pelaksanaan, Kunjungan dan Pertemuan pada setiap tingkatan. - Pendampingan: dilakukan dalam rangka pemantapan organisasi, pemanfaatan kredit secara optimal serta peningkatan kualitas dan kuantitas usaha. <p>Aspek-aspek dampingan: organisasi, permodalan, kemandirian usaha, baca tulis</p> <p>Pola pendampingan: kunjungan ke rumah, pertemuan mingguan, bantuan kepada anggota, pembangunan prasarana fisik, pertemuan umum anggota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - LKM membuat laporan pelaksanaan KUKESRA Mandiri setiap bulannya dan mengirimkan laporan tersebut ke BKKBN c/q Dir. Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan tembusan BNI Divisi Pembinaan Bisnis Ritel dan Menengah. - BNI membuat laporan perkembangan penyaluran KUKESRA Mandiri setiap bulan dan mengirimkan laporan tersebut ke BKKBN c/q Dir. Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. - Evaluasi: dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian pelaksanaan program baik secara kuantitas maupun kualitas. Dilakukan bersama-sama BKKBN, BNI, setiap 6 bulan sekali. <p>Indikator Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah anggota/kelompok UPPKS yang memperoleh KUKESRA Mandiri - Peningkatan produksi usaha anggota - Perluasan jangkauan pemasaran hasil produksi anggota
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon, Depok), Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah
	Sasaran	<p>Sasaran: Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam UPPKS</p> <p>Cara Menjaring: Rekomendasi dari petugas lapangan BKKBN (PKB, PLKB dan PPLKB).</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota kelompok UPPKS berjumlah antara 10 – 30 orang diutamakan wanita. - Sebanyak mungkin mengikutsertakan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. - Kelompok UPPKS dinilai mampu dan layak usahanya. - Pada saat pengajuan, calon anggota sedang menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif. - Memenuhi persyaratan Uji Kelayakan (UK). - Lulus Ujian Pengesahan pada saat Latihan Wajib Kimpul (LWK). - Bersedia mengembalikan pinjaman sesuai peraturan yang telah ditentukan dengan menandatangani perjanjian kredit dan jadwal pengembalian kredit. - Telah menerapkan administrasi keuangan dengan baik. - Melaksanakan pertemuan kelompok secara rutin minimal 3 bulan terakhir. - Direkomendasikan oleh PKB, PLKB atau PPLKB setempat.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Nilai: Rp 23,978 miliar (sesuai pengajuan kredit) Sumber: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) Sifat: Kredit modal kerja usaha ekonomi produktif
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – Januari 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Pengajuan Usulan dari UPPKS ke LKM/LPSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LKM/LPSM dan PPLKB/PLKB melakukan pendataan anggota/kelompok UPPKS yang mempunyai usaha ekonomi produktif dan membutuhkan modal kerja usaha dan berminat mengajukan Kukesra Mandiri. - Kelompok UPPKS yang membutuhkan mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan DNKA. - LKM/LPSM didampingi PPLKB/PLKB melakukan uji kelayakan kepada calon peminjam yang meliputi: indeks rumah, asset, tanah, pendapatan. - LKM/LPSM melakukan Pra-LWK untuk mengumumkan calon yang lulus seleksi UK sekaligus menginformasikan jadwal kegiatan selanjutnya. - Calon anggota yang telah terbentuk rembuk pusatnya wajib mengikuti kegiatan LWK dengan materi: Pembinaan Keorganisasian, Prosedur Pinjaman dan Tabungan. - Formulir pengajuan diteliti dan disahkan oleh LKM/LPSM serta diketahui oleh PPLKB/PLKB. - Proses Pencairan dilakukan satu minggu setelah pengajuan pada saat rapat anggota mingguan. <p>Pengajuan Usulan LKM/LPSM Ke BNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPSM/LKM mengirim surat permohonan kredit dengan dilampirkan rekapitulasi pengajuan pinjaman dari seluruh binaan, setelah mendapat persetujuan dari BKKBN setempat. Pemohon melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok UPPKS - Jumlah anggota kelompok - Jenis usaha - Jumlah pinjaman - Jangka waktu pinjaman - Bank BNI menyalurkan dana ke LPSM/LKM selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan kredit sepanjang dana tersedia dan selanjutnya LPSM/LKM menyalurkan kredit ke anggota.
	Pencapaian hasil	Jumlah anggota: 33.167 Jumlah kelompok: 5.697 Jumlah dana: Rp. 23.978.090.000
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Tunggakan yang masih besar hingga saat ini - Tidak fokusnya tenaga lapangan teknis dalam pembinaan anggota dan kelompok UPPKS.
	Status saat ini	Kucuran kredit dari YDSM ke LKM/LPSM sudah berhenti, namun pembayaran angsuran dari sasaran kepada LKM/LPSM dan dari LKM/LPSM kepada YDSM masih berjalan.
	Potensi	Mendorong anggota UPPKS berwirausaha secara mandiri dan profesional serta siap mendapatkan kredit komersial dari perbankan sekaligus menjadi teladan bagi kelompok sosial yang lain.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		
2.1	Nama upaya	Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID), Program Diseminasi Teknologi
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Usaha kecil (termasuk mikro), menengah dan koperasi (UKMK)
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Lihat masing-masing kegiatan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Lihat masing-masing kegiatan
2.1.1	Nama upaya	Budidaya Udang di Lahan Berpasir
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Budidaya Pertanian
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi budidaya udang
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Lamongan)
	Sasaran	Petani tambak udang
	Pendanaan	Rp. 193.766.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.2	Nama upaya	Penerapan Teknologi Budidaya Rumput Laut
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat KPPT2
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi budidaya rumput laut
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kota Mataram: Sekotong Tengah)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 200.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.3	Nama upaya	Udang Galah bagi Petani Sawah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat KPPTPW
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi udang galah bagi petani sawah
	Wilayah pelaksanaan	D.I Yogyakarta (Kab. Kulonprogo)
	Sasaran	Petani sawah
	Pendanaan	Rp. 199.929.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.4	Nama upaya	Tempe Skala Industri Kecil dan Rumah Tangga
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Bio Industri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi pembuatan tempe
	Wilayah pelaksanaan	D.I Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul)
	Sasaran	Industri kecil dan rumah tangga
	Pendanaan	Rp. 199.223.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.5	Nama upaya	Teknologi Pembuatan Briket Batubara untuk Usaha Kecil/Koperasi
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat KKE-UPT LSDE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi pembuatan briket batubara

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Semarang)
	Sasaran	Usaha kecil / koperasi
	Pendanaan	Rp. 200.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.6	Nama upaya	Pembuatan Alat Pengering Cabe Skala Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pembuatan alat pengering cabe
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Brebes: Bangsri, K. Wetan)
	Sasaran	Petani cabai
	Pendanaan	Rp. 204.530.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.7	Nama upaya	Pembuatan Peralatan Pengolah Gambir
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Agro Industri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pembuatan peralatan pengolah gambir
	Wilayah pelaksanaan	Riau (Koto Kari, Taluk Kuatan)
	Sasaran	Petani gambir
	Pendanaan	Rp. 202.736.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.8	Nama upaya	Penerapan Teknologi Besi Cor Nodular
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi besi cor nodular
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Klaten: Ceper)
	Sasaran	Usaha pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.9	Nama upaya	<i>Packaging</i> Pasca Panen Sayur Mayur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi <i>packaging</i> sayur mayur
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Bandung, Pengalengan)
	Sasaran	Petani sayur mayur
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.10	Nama upaya	Pemanfaatan Bahan Galian untuk Penjernih Minyak dan Bahan Kerajinan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agro Industri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi pemanfaatan bahan galian
	Wilayah pelaksanaan	D.I Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Industri kerajinan
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.11	Nama upaya	Paket Informasi Teknologi Pengecoran Logam
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat KPPUD
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi pengecoran logam
	Wilayah pelaksanaan	- Jawa Barat (Kab. Sukabumi) - Jawa Tengah (Tegal)
	Sasaran	Usaha pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		
2.1.12	Nama upaya	Penerapan Teknologi Aklimatisasi Terhadap Benur untuk Menunjang Budidaya Udang Windu pada Sawah Tambak
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah
	Instansi terkait	Universitas; pemda setempat; koperasi
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan petani sawah tambak di Kabupaten Lamongan melalui budidaya udang windu.
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi budidaya perikanan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Lamongan)
	Sasaran	Petani tambak udang
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00 dari APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - 5 – 11 Agustus 1999 dilakukan persiapan. - 11 Agustus 1999 dilakukan pengambilan benur udang windu PL 11 dari Cilacap. Pengangkutan dilakukan pada malam hari. - 12 – 20 Agustus 1999 dilakukan penyesuaian lingkungan (aklimatisasi) dengan lingkungan baru sebelum diperlakukan. Pada saat ini dilakukan pembiasaan benur memakan pakan pelet yang sebelumnya memakan pakan Artenia. - 21 Agustus 1999 dilakukan penebaran benur. - 21 Agustus – 20 September 1999 dilakukan penelitian - 20 September 1999 dilakukan pengamatan terakhir.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Aklimatisasi untuk menghasilkan benur yang tahan pada salinitas rendah sebagaimana yang dibutuhkan petani sawa tambak. - Pelatihan budidaya ikan dan udang pada sawah tambak. - Penelitian untuk menghasilkan metode aklimatisasi yang lebih efektif. - Perubahan dalam sikap masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan kualitas komoditas yang diusahakan. - Terjadi peningkatan wawasan dan ketrampilan pada diri petani dan juga petugas penyuluh lapangan di Kabupaten Lamongan.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu kegiatan - Kesiapan petugas lapangan - Ketersediaan bahan
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh para petani tambak udang, Koperasi "Tamyamsang", dan Pemda Tk. II Lamongan.
	Potensi	Kabupaten Lamongan memiliki sawah tambak lebih dari 18.000 hektar dan merupakan potensi yang cukup besar untuk budidaya udang windu. Peningkatan jumlah ini terutama dipicu oleh kondisi harga udang yang terus membaik.
2.1.13	Nama upaya	Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Efisiensi Penanganan Plastik Bekas di Bekasi
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	Memberikan bimbingan kepada dunia usaha/industri pengolahan plastik bekas dalam mengelola usahanya mulai dari potensi pasar, arus bahan baku, proses produksi sampai dengan penanganan limbah, agar proses produksinya lebih memenuhi efisiensi yang optimal, dan produknya berwawasan lingkungan, dengan memenuhi syarat International Standard Organisation. Produk tersebut selanjutnya merupakan program unggulan daerah yang dapat mendukung Pendapatan Anggaran Daerah dan Jaring Pengaman Sosial dengan memberdayakan pemulung.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Disain dan pembuatan peralatan pengolah plastik bekas - Pelatihan tentang teknologi dan pengembangan bisnis
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bekasi)
	Sasaran	Usaha / industri pengolahan plastik
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan peralatan pengolahan plastik bekas. - Penyusunan kerja sama dengan Koperasi Hijau untuk pengoperasian peralatan dan pengelolaan dana bergulir pada tahun berikut. - Monitoring pembuatan dan perakitan peralatan. - Penyiapan fondasi.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan peralatan dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. - Pelatihan terhadap usaha kecil bengkel pembuat dalam memodifikasi alat. - Pelatihan pengembangan bisnis plastik bekas kepada beberapa pengumpul.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan dalam menentukan bengkel pembuat yang mempunyai kemampuan yang cukup dengan biaya yang sesuai untuk pengembangan alat untuk industri kecil. - Proses pencarian bahan, pembuatan komponen dan perakitan alat membutuhkan waktu yang cukup lama. - Pendekatan terhadap penduduk sekitar lokasi pengolahan dan pengurusan perizinan.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan saat ini dikelola oleh "Koperasi Hijau" di Bekasi, Jawa Barat.
	Potensi	Penerapan IPTEKDA di daerah Bekasi disesuaikan dengan kondisi sosial maupun ekonomi dari daerah tersebut. Bekasi yang merupakan penyangga dari Kota Metropolitan Jakarta merupakan wilayah tempat tinggal sebagian pekerja Jakarta. Dengan demikian, daerah tersebut mempunyai potensi menghasilkan sampah plastik yang cukup banyak.
2.1.14	Nama upaya	Pemanfaatan dan Pemasarakatan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Rumput Laut di Kabupaten Serang
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan dan Pemasarakatan Teknologi
	Instansi terkait	Perguruan tinggi; Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memasyarakatkan teknologi budidaya rumput laut <i>Gracilaria sp</i> dan ikan bandeng di tambak sistem polikultur dan mengembangkan usaha budidaya rumput laut <i>Gracilaria sp</i> bagi masyarakat pesisir panta Teluk Banten, Serang dan meningkatkan nilai tambah rumput laut melalui pemasarakatan teknologi pengolahan agar-agar skala rumah tangga.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pendampingan - Diseminasi teknologi budidaya rumput laut, ikan bandeng, dan pengolahan agar-agar
	Wilayah pelaksanaan	Banten (Kab. Serang)
	Sasaran	Petani/nelayan di Kab. Serang
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00; APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan persiapan. - Pembuatan demplot dan pembentukan kelompok petani. - Alih teknologi budidaya dan pasca panen rumput laut. - Pengembangan usaha budidaya rumput laut dan ikan bandeng secara bertahap kepada petani/nelayan. - Pembuatan percontohan pengolahan agar-agar skala rumah tangga. - Alih teknologi pengolahan kepada petani, koperasi, pengusaha kecil. - Pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan pendampingan. - Evaluasi dan pelaporan

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memantapkan pelaksanaan program Iptekda tentang budidaya dan pengolahan rumput laut, telah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas Perikanan Tk. II Serang. Pada prinsipnya pihak pemda sangat mendukung kegiatan Iptekda ini karena rumput laut saat ini merupakan produk unggulan ekspor daerah. - Telah dilakukan kerjasama antara Direktorat Kebijaksanaan Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi dengan Balai Latihan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan pada tanggal 14 Juli 1999 di Serang yang acara penandatungannya disaksikan oleh Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi dan dihadiri oleh Pemda Kabupaten Serang, Dinas Perikanan TK II Serang, Kecamatan Kasemen dan Pontang, mahasiswa/i Sekolah Tinggi Perikanan, kelompok tani/nelayan, petugas penyuluh perikanan dan tokoh-tokoh masyarakat.
	Masalah	Sebagian besar tambak di Kabupaten Serang dimiliki oleh penduduk Jakarta sehingga agak sulit mencari tambak-tambak yang benar-benar dimiliki oleh petani berpenghasilan rendah dan memerlukan bantuan. Tetapi dengan koordinasi dengan aparat desa, tambak-tambak mana yang benar-benar dimiliki oleh petan/nelayan yang memerlukan bantuan dapat ditentukan.
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Rumput laut <i>Eucheuma Cottoni</i>: Walaupun produksinya belum banyak, sejak rumput laut dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat, serta mempunyai prospek yang baik, Dinas Perikanan Tk. II Serang menjadikan rumput laut sebagai salah satu produk unggulan ekspor. - Bandeng (<i>Chanos-chanos</i>) dari hasil budidaya: Kabupaten Serang dikenal dengan sate bandengnya yang merupakan salah satu oleh-oleh yang paling terkenal daerah tersebut, padahal produksi ikan bandeng setempat tidak mencukupi untuk memasok kebutuhan karena ikan bandeng masih dibudidayakan secara tradisional oleh masyarakat, sehingga ikan bandeng sering didatangkan dari luar daerah Serang.
2.1.15	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu (Ayam, Sapi, Kedelai, Jagung Hibrida) untuk Meningkatkan Usaha Tani Desa Pesantren di Jabotabek
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Budidaya Pertanian
	Instansi terkait	Pondok pesantren
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan dan kesempatan kerja santri, mengembangkan peran serta masyarakat pedesaan dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang pertanian terpadu antara herbada, ternak kambing dan cacing serta teknik pembuatan pupuk organik dan membuat unit percontohan guna memudahkan para santri/pesantren-pesantren lain untuk mencontohnya maupun setelah mereka terjun ke masyarakat.
	Jenis kegiatan	Pelatihan; Diseminasi teknologi budidaya pertanian terpadu.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Sukabumi: Kec. Baros)
	Sasaran	Pesantren; pemda dan masyarakat Kecamatan Baros, Sukabumi, Jawa Barat.
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi program dengan pesantren, pemda dan masyarakat - Pengolahan lahan, pembangunan kandang, dll - Pembelian bibit kambing dan cacing - Pelatihan kepada pesantren dan masyarakat - Budidaya pertanian terpadu - Laporan kemajuan dan penyusunan laporan akhir

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Dengan sistem pertanian terpadu, limbah hermada dapat diolah menjadi pakan ternak kambing PE, sedangkan limbah ternak dapat berfungsi sebagai media yang baik untuk budidaya cacing. Produk sampingan dari cacing adalah fermi kompos sebagai pupuk organik. Manfaat dari siklus biologi di atas adalah teratasinya krisis pakan ternak sehingga peningkatan produktifitas pertanian dan peternakan tidak hanya didasarkan pada luas lahan tetapi juga pada panjangnya mata rantai pakan yang dikembangkan pada siklus biologi yang ada.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan waktu tenaga kerja setempat memperlambat proses penanaman tanaman hermada - Lokasi yang kering/kurang air pada musim kemarau dan sistem pengairan yang kurang menunjang sehingga kegiatan ini harus menunggu musim hujan. - Keterbatasan dana sehingga model "pertanian terpadu" tidak dapat diterapkan pada tempat/pondok pesantren lain.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan dikelola oleh Kelompok Pondok Pesantren "Imaratul Masjid", "Pesantren Hayatan Thayyibah" di Kecamatan Baros, Sukabumi, Jawa Barat.
	Potensi	Konsep pertanian terpadu adalah penggalian semua potensi yang ada di suatu daerah untuk dipadukan secara optimal dengan mengacu kepada peningkatan produktivitas dan kualitas produksi. Komoditi yang dikembangkan ini sudah sesuai dengan stuasi pasar dan kondisi lingkungan setempat.
2.1.16	Nama upaya	Upaya Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Kerapu Ekspor dalam Keramba Jaring Apung di Wilayah Kabupaten Belitung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Pemda setempat, koperasi
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab. Belitung; Kepulauan Bangka Belitung)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.17	Nama upaya	Paket Peralatan Penyamak Kulit dan Bahan Penyamak Kulit Ramah Lingkungan untuk Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Bioindustri
	Instansi terkait	Pemda setempat, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang bangun peralatan penyamakan kulit dengan menggunakan bahan penyamakan kulit ramah lingkungan. - Memproduksi bahan penyamakan kulit ramah lingkungan berupa produksi enzim protease oleh bacillus megaterium dengan menggunakan bahan baku molases.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan penyamakan kulit - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Garut); Jawa Timur (Ponorogo)
	Sasaran	Pengrajin penyamakan kulit industri kecil di Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat (melalui pembinaan dari UP-Kulit Sukaregang) dan di Ponorogo Jawa Timur.
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Survey exolite 120 liter/bulan, survey lokasi peralatan, uji aktivitas dan uji kemampuan dan pembuatan peralatan. - Pemasangan peralatan di UPT Sukaregang, test run alat, pengoperasian/ <i>quality control</i> . - Evaluasi/laporan, kontrol kualitas. - Diseminasi di Ponorogo dan Garut.
	Pencapaian hasil	- Kegiatan ini diterapkan pada penyamakan kulit di Sukaregang melalui pembinaan dari UP-Kulit Sukaregang dan dapat menekan biaya proses penyamakan kulit. - Dikuasainya teknologi produksi enzim protease oleh BPPT dan aplikasi produk enzim pada proses penyamakan kulit yang dikelola melalui unit koperasi.
	Masalah	- Beberapa peralatan laboratorium pendukung proses produksi enzim protease, seperti alat <i>cool chamber</i> , <i>incubator shaker</i> , alat pH meter dan indikator suhu fermentor mengalami kerusakan. - Pada tahap pemasangan perangkat peralatan penyamakan kulit di UPT-Kulit Sukaregang Garut, terjadi kerusakan pada kedudukan <i>gear box</i> .
	Status saat ini	Sudah selesai dan diteruskan oleh pengrajin penyamakan kulit di Sukaregang Garut, Jawa Barat.
	Potensi	Pengembangan teknologi penyamakan kulit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengrajin kulit dalam mengembangkan profesinya untuk meningkatkan penghasilan tambahan dan membuka kesempatan kerja baru.
2.1.18	Nama upaya	Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Produksi Susu Steril di Pangalengan, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Bioindustri
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	Membuat peralatan produksi susu steril tepat guna yang akan didiseminasikan kepada produsen susu/peternak melalui koperasi. Pengolahan susu peternak menjadi susu steril diharapkan dapat menyediakan susu steril lebih murah dari harga ekuivalen susu bubuk serta memberikan kesempatan kerja rakyat kecil dan meningkatkan nilai tambah susu.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Pangalengan)
	Sasaran	Peternak di Pangalengan, Bandung
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lapangan/koordinasi kegiatan dengan KPBS, penandatanganan MoU. - Survey lokasi peralatan - Studi lapangan proses produksi/<i>quality control</i>, pembuatan peralatan, pemasangan peralatan di KPBS, test run alat, pengoperasian <i>quality control</i>. - Evaluasi / laporan - Pelatihan/demo kepada anggota
	Pencapaian hasil	Penerapan teknologi sederhana pengolahan susu membuka industri baru pada skala kecil dan menengah, dan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya produksi susu steril yang tinggi, diharapkan konsumsi susu nasional dan kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat dikembangkan teknik produksi susu steril dalam paket teknologi yang sederhana, sehingga dapat diimplementasikan/dioperasikan oleh industri kecil maupun KUD Susu.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahap percobaan peralatan pengolahan susu steril, terjadi masalah pada alat pasteurisasi. Susu yang keluar dari peralatan tersebut tidak mengalir lancar sehingga diperlukan perbaikan/modifikasi peralatan. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan peralatan pasteurisasi dan diharapkan dapat selesai pada saat Program IPTEKDA II berakhir. - Dana untuk membuat susu steril tidak cukup sehingga pengolahan susu yang dilakukan hanya sampai pada pengolahan susu pasteurisasi. Untuk memperoleh susu steril hanya diperlukan satu peralatan lagi yang berfungsi sebagai pemanas susu sehingga suhu steril bisa dicapai. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk dikembangkan oleh KPBS sendiri karena teknologi pembuatan peralatannya sama dengan yang telah dibuat.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh Koperasi Peternakan "Bandung Selatan" (KPBS)
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan menguasai teknologi produksi susu steril, produsen susu/peternak, dapat mengembangkan profesinya, mendapatkan penghasilan tambahan yang berarti akan meningkatkan pendapatan rakyat kecil dan membuka kesempatan kerja baru. - Perencanaan produksi susu steril ini membantu masyarakat pedesaan dalam penguasaan teknologi. - Apabila dikuasai, peralatan ini sangat bermanfaat karena sebagian besar peralatan pengolahan susu masih diimpor, sedangkan paket peralatan yang ini menggunakan teknologi yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak tempat dalam penggunaannya.
2.1.19	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pasca Panen Rempah-Rempah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	Menerapkan dan memasyarakatkan teknologi pengolahan bahan rempah-rempah untuk industri rakyat (kecil) dalam meningkatkan produksi, kualitas dan memperkuat daya saing produk.
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	D.I. Yogyakarta (5 kabupaten)
	Sasaran	Kelompok tani wanita di D.I. Yogyakarta
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Survey kelompok tani sasaran kegiatan telah dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kodya Yogyakarta. Survei ini bertujuan untuk mendapat data dan informasi primer mengenai status teknologi/alat yang digunakan dalam membuat produk olahan, khususnya minuman kesehatan tradisional instan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas produk kelompok sasaran kegiatan. - Membuka peluang bagi kelompok tersebut untuk menciptakan produk lain mengingat alat yang akan diterapkan dapat digunakan untuk mengolah berbagai produk. - Sertifikat SP dari Departemen Kesehatan dan kemasan yang memadai maka akan meningkatkan daya saing produk. - Menambah potensi produk khas Kodya Yogyakarta yang selama ini telah dikenal luas.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan alat terbentur pada penyesuaian kondisi dari kelompok sasaran. Alat yang tersedia saat ini harus dimodifikasi agar mudah digunakan dan tidak membebani kelompok tani sasaran. - Waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sangat singkat, terutama akibat tertundanya pencairan dana. - Tertundanya pencairan dana akibat beberapa kesalahan administrasi menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan segera setelah penandatanganan kontrak.
	Status saat ini	Sudah selesai dilaksanakan dan teruskan oleh pemda setempat saat ini sudah sampai ke kelompok tani.
	Potensi	Industri pengolahan di Yogyakarta mempunyai potensi untuk berkembang karena Yogyakarta merupakan daerah pemasaran/penampung dan distribusi produk-produk pertanian dari berbagai daerah disekitarnya seperti Purworejo, Kulon Progo, Magelang, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.
2.1.20	Nama upaya	Penerapan Teknologi Ekstraksi Minyak Jarak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan petani dengan tersedianya pasar biji jarak hasil pertanian.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Boyolali)
	Sasaran	Pemda Tk. II Kab. Boyolali; BIPP dan koperasi/pengolah biji Jarak
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan survey, Desain dan Kontruksi, Pembuatan peralatan pengolahan, Komisioning & Start UP. - Pelatihan dan Penyuluhan, Pembinaan Sistem Pengoahan Usaha. - Evaluasi, pelaporan dan rekomendasi.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersedian bahan baku. - Tempat/bangunan pengolahan ekstaksi minyak jarak. - Pelatihan proses pengolahan dan penggunaan peralatan.
	Masalah	Hingga saat ini belum ditemukan hambatan yang bersifat teknis. Namun dalam pengembangannya diperlukan alih teknologi kepada petani jarak atau koperasi pengolah biji jarak dan pelatihan agar petani pengolah atau koperasi tersebut dapat mandiri.
	Status saat ini	Sudah selesai kini dikelola oleh Koperasi Serba Usaha "Tiga Jaya"

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi tanaman jarak di Kabupaten Boyolali dan daerah sekitarnya seperti Wonogiri, dan Karang Anyar cukup besar. Pada umumnya di daerah tersebut, tanaman jarak ditanam sebagai tanaman pagar di pematang sawah atau perkarangan, atau ditanam dengan jarak longgar dalam pola tanam tumpang sari dengan palawija, sedangkan budidayanya hanya ada di beberapa lokasi karena harga jual biji jarak sangat rendah. - Pada saat ini Indonesia mengekspor biji jarak kering, terutama ke Jepang sedangkan impor minyak jarak masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal.
2.1.21	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pasca Panen Teripang, Di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	Meningkatkan taraf hidup nelayan/pengrajin teripang di Kabupaten Selayar melalui penerapan teknologi pasca panen teripang.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab Selayar)
	Sasaran	Nelayan dan pengrajin di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, survey, desain, kontruksi, pemasangan sarana produksi. - Ujicoba dan proses produksi, pelatihan, penyuluhan, pembinaan sistem pengelolaan usaha, moitoring, analisis pasar & produksi. - Evaluasi, pelaporan dan rekomendasi.
	Pencapaian hasil	Peningkatan produksi dan mutu sesuai standar, yang berdampak pada peningkatan keadaan sosial ekonomi para nelayan. Kesempatan kerja semakin luas karena jumlah unit usaha yang membutuhkan tenaga kerja meningkat. Sebagai komoditi laut yang potensial untuk ekspor bagi daerah pantai di kawasan timur Indonesia, teripang dapat dijadikan komoditas unggulan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dalam menerima informasi teknis operasional kegiatan. - Kondisi infrastruktur dan geografi tidak mendukung sehingga transportasi menjadi kendala utama, baik dari segi waktu maupun biaya. Transportasi laut ke Kabupaten - Keadaan faktual di lokasi tidak selalu sesuai dengan rencana sehingga komposisi per mata anggaran mengalami perubahan.
	Status saat ini	Sudah selesai dan selanjutnya dikelola oleh Koperasi Tani "Maju Mandiri"
	Potensi	Memiliki SDA disektor perikanan (teripang) di 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Luas lahan perairan pantai sekitar wilayah tersebut 64 hektar yang dapat dikelola untuk menghasilkan teripang komersial. Terdapat nelayan teripang tradisional sebanyak 1350 KK yang dapat dibina menjadi nelayan maju dan produktif dan lembaga profesi (a.l. koperasi) yang siap dijadikan mitra dalam pengembangan potensi teripang.

No.	Item	Penjelasan
2.1.22	Nama upaya	Penerapan Teknologi Proses Minyak Atsiri (Nilam) untuk Usaha Kecil di Muara Enim
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	Pemda setempat, koperasi
	Tujuan upaya	Meningkatkan perolehan devisa melalui pengembangan komoditas nilam dan peningkatan kualitas minyak nilam menjadi kualitas ekspor.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab Muara Enim)
	Sasaran	Petani dan masyarakat Muara Enim, Sumatera Selatan.
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan survei, evaluasi & penentuan teknologi, desain, konstruksi, pemasangan sarana produksi. - Uji coba & proses produksi & analisa. - Pelatihan & penyuluhan, pembinaan sistem pengelolaan usaha, monitoring. - Evaluasi & penyerahan alat, pelaporan dan rekomendasi.
	Pencapaian hasil	Kegiatan iptekda ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas minyak nilam sebagai komoditas ekspor, kesejahteraan petani, pengolah nilam dan buruh tani setempat, pendapatan daerah dari sub sektor perkebunan, maupun untuk pengetahuan / pengalaman/ ketrampilan.
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Sudah selesai kini diteruskan/dikelola oleh Koperasi "Selawi Jaya"
	Potensi	Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat besar berupa lahan luas yang subur sepanjang pegunungan Bukit Barisan yang belum dibudidayakan secara intensif
2.1.23	Nama upaya	Penerapan Teknologi untuk Pengolahan Kemiri di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	IKM
	Tujuan upaya	Tujuan dari kegiatan Iptekda Penerapan Teknologi untuk pengolahan kemiri di Kabupaten oppeng, Sulawesi Selatan adalah untuk mengoptimalkan tingkat pemanfaatan kemiri di Kabupaten Soppeng melalui penerapan teknologi pengolahan kemiri yang efektif, efisien dan mudah pengoperasiannya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Soppeng)
	Sasaran	Petani dan masyarakat setempat, khususnya CV. "Matahari Terbit " di Kabupaten Watansoppeng, Sulawesi Selatan.
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan identifikasi rancang bangun dan perkerayaan prototipe peralatan pengupas kemiri yang menggunakan teknologi tepat guna, efisien, efektif dan mudah dioperasikan oleh petani produsen kemiri. - Desain dan rancang bangun prototipe unit peralatan pengering dan pengupas kemiri. - Uji coba dan evaluasi peralatan untuk mendapatkan kinerja yang dikehendaki dan membentuk kemitraan dengan koperasi atau instansi lainnya serta dibuatnya laporan dan rekomendasi.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan keterampilan dan kemandirian petani dalam memproduksi, mengelola dan memasarkan secara komersial. - Dapat dibuatnya unit percontohan pengolahan kemiri di sentra produksi kemiri dan paket usaha mandiri yang berdaya saing tinggi, berteknologi tepat guna dan berprinsip agribisnis dalam perdagangan internasional.
	Masalah	Secara teknis pada awal pekerjaan konstruksi, tetapi pekerjaan secara keseluruhan tidak terhambat.
	Status saat ini	Sudah selesai kini dikelola oleh CV "Matahari Terbit"
	Potensi	Tersedianya areal kemiri seluas 2.735 ha dengan jumlah produksi sebanyak 534 ton/tahun
2.1.24	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pengolahan Mete Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	IKM
	Tujuan upaya	Memperkenalkan teknologi proses pengolahan mete yang sederhana dan efisien kepada masyarakat petani di pedesaan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara (Kendari)
	Sasaran	Petani, masyarakat dan koperasi di Kendari, Sulawesi Tenggara
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi program, perancangan peralatan, pembuatan peralatan, ujicoba peralatan. - Evaluasi kinerja peralatan - Produksi massal dan pelaporan
	Pencapaian hasil	Manfaat yang diperoleh dengan pemanfaatan teknologi ini adalah peningkatan mutu kacang mete serta penyerapan tenaga kerja di daerah.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Lambatnya pembangunan sarana serta pengadaan barang karena terbatasnya peralatan teknik di lokasi serta ketrampilan tenaga kerja. - Dana perjalanan sehingga sulit melaksanakan alih teknologi keterampilan serta bimbingan teknik pengolahan mete, mengingat biaya perjalanan ke lokasi cukup tinggi.
	Status saat ini	Sudah selesai dan saat ini diteruskan oleh koperasi setempat
	Potensi	Potensi dan sumber bahan baku kacang mete di Indonesia tersebar di beberapa wilayah yang mempunyai curah hujan rendah dan kering. Empat wilayah propinsi bagian timur yang sangat berpotensi adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Tapi tingkat pemanfaatan potensi ini sangat minim, hal ini tercermin dari tidak adanya proses pengolahan, dan mete diekspor berupa gelondongan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan teknologi proses pengolahan kacang mete. Akibatnya masyarakat tidak mendapat nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan.

No.	Item	Penjelasan
2.1.25	Nama upaya	Penerapan Teknologi Proses Fermentasi dan Pengeringan Kakao Rakyat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri.
	Instansi terkait	Koperasi Sumber Hasil Kec. Tiorang, Kab. Pinrang; Puslit Kopi dan Kakao Jember, Jatim.
	Tujuan upaya	Meningkatkan mutu kakao rakyat khususnya di Kabupaten Pinrang, agar daya saing, harga jual dan kesejahteraan petaninya dapat meningkat.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang)
	Sasaran	Petani dan masyarakat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999/2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dan periapan, desain alat, kontruksi alat, pengujian alat, proses produksi, pelatihan. - Evaluasi dan pelaporan.
	Pencapaian hasil	- Kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao untuk desain proses, uji coba, pengendalian mutu dan analisa, pelatihan, dan konstruksi alat mesin pengering tenaga tungku biomass. - Koordinasi dan kerjasama dengan Koperasi "Sumber Hasil" untuk pembuatan pondasi, rangka atap dan sarana utilitas unit proses pengolahan kakao. - Pembuatan unit pengering lorong tenaga surya tipe seri dan paralel, unit rumah surya I (kaps. 3 ton) dan II (5 ton).
	Masalah	Secara umum belum ada masalah atau hambatan yang berarti dan masih berjalan sesuai jadwal.
	Status saat ini	Sudah selesai saat ini dikelola oleh Koperasi "Sumber Hasil" di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
	Potensi	Terdapat perkebunan kakao rakyat seluas 19.289 ha dengan produktivitas 1.511 kg biji kering/ha/tahun.
2.1.26	Nama upaya	Penerapan Teknologi Biofertilizer dan Pengeringan Hijauan Makanan Ternak (HMT) untuk Peningkatan Produktivitas Pakan Ternak Sapi di Kab. Karangasem
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Pusat Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Industri dan Pertanian
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	Peningkatan kualitas dan kuantitas HMT per satuan luas melalui aplikasi teknologi biofertilizer endomikoba dan teknologi pengeringan HMT untuk menunjang ketersediaan pakan ternak sapi di Dati II Kabupaten Karangasem.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Karang Asem)
	Sasaran	Petani dan masyarakat di Dati II Kabupaten Karangasem Propinsi Bali
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, surey, <i>monitoring</i>, memproduksi pupuk hayati. - Desain dan membuat <i>green house</i> (rumah persemaian) bibit HM. - Aplikasi 20.000 tanaman HMT. - Penanaman bibit. - Desain dan pembuatan alat pengering HMT. - Penerapan teknologi pengering HMT. - Formulasi HMT kering dan baha baku lain untuk menghasilkan contoh produk pakan ternak sapi. - Serah terima hasil kegiatan Iptekda. - Evaluasi dan pembuatan laporan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi meliputi penentuan lokasi untuk pendirian <i>green house</i> sebagai rumah persemaian bibit, alat pengeing hijauan makanan ternak, lokasi penanaman bibit tanaman gamal dan turi.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Secara keseluruhan tidak ada hambatan signifikan, tetapi beberapa bahan harus dikirim dari Jakarta, seperti kompos yang berasal dari daun. Kompos ini tidak banyak digunakan di Kabupaten Karangasem, sehingga tidak mudah ditemukan dalam jumlah besar. Kompos daun ini akan digunakan sebagai campuran media tanam untuk pembibitan bibit tanaman HMT. - Pengantian atap <i>green house</i> dilakukan 2 kali karena daerah setempat mempunyai angin lembah yang sangat kuat.
	Status saat ini	Sudah selesai dan diteruskan oleh Dinas Peternakan setempat
	Potensi	Keberhasilan usaha ternak sapi di Dati II Kabupaten Karangasem, propinsi Bali terbesar dari seluruh nilai populasi yang ada. Di Dati II Kabupaten Karangasem, Bali, populasi ternak sapi sudah mengalami peningkatan.
2.1.27	Nama upaya	Pelatihan Kerja Santri tentang Sistem Tambak Ikan, Ayam dan Pisang
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Pondok pesantren
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta; Jawa Barat (Bogor, Bekasi); Banten (Tangerang)
	Sasaran	Guru – guru pesantren
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.28	Nama upaya	Pelatihan Manajemen Produksi dan Teknologi Fermentasi di Pondok Pesantren dan Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Pondok pesantren
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Madura & Jawa Timur (pelaksanaan di Lampung)
	Sasaran	Pondok pesantren dan masyarakat peternak/petani di Madura & Jawa Timur
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.29	Nama upaya	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Inditik (Integrasi Penanaman Padi dengan Pemeliharaan Itik)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Universitas, Pemda setempat, Kelompok Tani
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	- Budidaya pertanian - Pengembangbiakan itik
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Purworejo)
	Sasaran	Petani dan peternak itik
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.30	Nama upaya	Penerapan Teknologi Budidaya Kepiting Bakau di Pertambakan dalam Upaya Pemberdayaan Petani Tambak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Universitas, Pemda setempat, Kelompok Tani
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Demak)
	Sasaran	Petani tambak
	Pendanaan	Rp. 175.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
2.1.31	Nama upaya	Pembuatan dan Alih Teknologi Lemari Pengering Serba Guna dan Alat Pengupas Singkong
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Transportasi
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	Membantu mengatasi permasalahan pengeringan yang disebabkan oleh beberapa kendala (seperti cuaca, kondisi tempat dan lain-lain). Meningkatkan kontinuitas produksi komoditas perikanan, sehingga hasil dicapai dapat maksimal.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	- Jawa Barat (Sukabumi) - D.I. Yogyakarta (Gunung Kidul)
	Sasaran	Masyarakat pengolah ikan dan Pemda
	Pendanaan	Rp. 75.000.000,00, APBN habis gunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. - Studi kelayakan dan pencarian data. - Pengenalan dan pelatihan pembuatan alat, pengujian - Evaluasi dan pelaporan.
	Pencapaian hasil	- terselesaikannya prototipe lemari pengering serbaguna yang telah diselesaikan pengujian kelayakan pemakaiannya, sehingga siap untuk dipergunakan masyarakat dan dimasyarakatkan. - Masyarakat dapat secara mandiri membuat alat-alat tersebut, melalui proses pelatihan dan kerjasama berbagai pihak yang terkait.
	Masalah	Penyesuaian sumber energi lemari pengering yang direncanakan (listrik) dengan sumber energi yang biasa dipergunakan masyarakat sasaran (bahan bakar cair) mengharuskan perubahan desain lemari pengering. Hal ini mempengaruhi bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk membuat lemari.
	Status saat ini	Sudah selesai dilaksanakan kini diteruskan oleh pemda dan kelompok pengolah ikan setempat.
	Potensi	Daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi di pantai selatan Jawa Barat terkenal akan komoditas perikanan dan mensuplai berbagai jenis ikan beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan juga untuk pasar ekspor.
2.1.32	Nama upaya	Penerapan Teknologi untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis SDA di Kalimantan Timur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam (TISDA)
	Instansi terkait	Pemda setempat

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Tujuan dari program ini adalah terciptanya suatu sistem pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Kotamadya Balikpapan dan sekitarnya yang dapat menjadi tulang punggung bagi perekonomian masyarakat daerah.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)
	Sasaran	Masyarakat dan Pemda Tk. II Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur.
	Pendanaan	Rp. 75.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dan survei awal. - Implementasi kegiatan I. - Implementasi kegiatan II. - Dokumentasi, pembuatan laporan - Pelaporan dan penggandaan laporan.
	Pencapaian hasil	- Modernisasi sistem usaha pertanian, perikanan, dan pembuatan tempe melalui penerapan teknologi tepat guna, sesuai kondisi lingkungan, dan pada skala masyarakat (<i>community</i>). - Penyediaan alternatif alih usaha dan alih profesi bagi tenaga kerja dan pengusaha di sektor jasa yang terkena dampak krisis, misalnya melalui pelatihan dan pelibatan dalam investasi usaha pertanian dan perikanan yang diciptakan bersama. - Penyaluran tenaga sarjana dari berbagai disiplin sebagai tenaga ahli pendamping dan calon-calon manajer usaha pemanfaatan sumberdaya alam di masa mendatang. - Penyaluran dan pemanfaatan dana JPS, permodalan koperasi, dan dana pembangunan secara terarah, terkoordinir, sinergis, dan berorientasi pada perguliran kembali roda ekonomi nasional. - Penajaman program-program instansi terkait yang terlibat agar dapat mengorientasikan programnya ke arah sektor ekonomi yang harus dikembangkan untuk mengatasi dan dapat bertahan dari kemungkinan krisis di masa mendatang.
	Masalah	Hambatan yang bersifat teknis, boleh dikatakan hampir tidak ada yang berarti, terkecuali pada masalah mobilisasi dan demobilisasi peralatan untuk demo dan uji kaji di lapangan (daerah binaan) karena untuk memperkenalkan teknologi tepat guna pada masyarakat tidak bisa dengan sekedar penyuluhan, pelatihan, dan presentasi saja, namun diperlukan peragaan dan demonstrasi alat, agar masyarakat dapat dengan mudah menerimanya dan mengerti maksudnya, baik cara kerja maupun kegunaannya.
	Status saat ini	Sudah selesai kini dilanjutkan oleh pemda setempat
	Potensi	Survei di awal kegiatan IPTEKDA ini, pengamatan dan wawancara selama kegiatan ini berlangsung menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan. Potensi sumberdaya alam tersebut dapat segera dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan fisik di tahun-tahun yang akan datang
2.1.33	Nama upaya	Pemberdayaan IKM Karet-Majalengka Jawa Barat untuk Memproduksi Barang Teknik Karet Substitusi Impor
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	Koperasi

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Koperasi Pengrajin Bola "Sinar Jaya" Majalengka dalam mengatasi krisis ekonomi dengan memanfaatkan teknologi tepa guna - Mengurangi ketergantungan akan produk bola dalam (bladder ball) dari luar daerah Majalengka.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Majalengka)
	Sasaran	Koperasi pengrajin bola di Majalengka, Jawa Barat.
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dan pengumpulan data - Pemilihan produk dan lokasi - Pembuatan dan pengujian prototipe - Pembuatan dan pengujian peralatan - Pelatihan produksi - Supervisi dan konsultasi - Evaluasi dan pelaporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi ketergantungan akan bola dalam. Menciptakan unit usaha baru bagi koperasi, yaitu unit usaha pembuatan bola dalam yang dapat menampung tenaga kerja baru. - Menambah pendapatan koperasi dengan menjual bola dalam kepada para pengrajin. - Menciptakan tenaga kerja terampil dalam pembuatan bola dalam. - Mendapatkan pengetahuan dan teknologi serta peralatan untuk pembuatan bola dalam.
	Masalah	Selama dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan hambatan apapun.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan. Saat ini dikelola oleh koperasi pengrajin bola di Majalengka.
	Potensi	Kabupaten Majalengka memiliki berbagai industri yang menjadi sumber PAD, a.l. pembuatan bola yang berkembang sejak tahun 1990
2.1.34	Nama upaya	Pembuatan Mesin Pengolah Bambu untuk Usaha Kerajinan Rakyat di Sukabumi, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	Universitas, Pemda setempat, PT. Melu Bangun Wahana
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan pengrajin bambu. - Menciptakan lapangan kerja baru disekitar lingkungan kelompok usaha kerajinan bambu di desa Datanangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. - Meningkatkan produk kerajinan rakyat, baik kuantitas maupun kualitas dengan memanfaatkan mesin pengolah bambu seoptimal mungkin, Memanfaatkan program listrik masuk desa dan program Jaring Pengkaya Sosial (JPS)
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Sukabumi)
	Sasaran	Pengrajin dan Pemda TK. II Kabupaten Sukabumi Jawa barat.
	Pendanaan	Rp. 85.000.000,00, APBN habis digunakan

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan pelaksanaa - Survei data/Informasi - Koordinasi dan konsultasi teknis - Paradogma uji salah-benar (trial and error) - Pelatihan - Evaluasi dan pelaporan
	Pencapaian hasil	Mesin pengolah bambu yang dirancang dengan teknologi sederhana sangat mudah dioperasikan dan berbiaya rendah. Mesin ini diharapkan mampu menggantikan tenaga tangan (manual) yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan produksi kerajinan bambu baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga produk kerajinan bambu dapat bersaing harga dipasaran.
	Masalah	<p>Rencana pembuatan mesin pengolah bambu serba guna (sesuai proposal) tidak terlaksana karena kendala-kendala sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan ukuran mesin menjadi sangat besar dan tidak efektif. - Perancangan dan pembuatan membutuhkan ruang kerja (speace area) yang sangat rumit. - Bentuk mesin universal sangat sulit dan rumit pengoperasiannya. <p>Pada akhirnya, mesin pengolah bambu dibuat secara terpisah</p>
	Status saat ini	Sudah selesai dilaksanakan kini dilanjutkan oleh kelompok pengrajin bambu di Desa Datarnangka.
	Potensi	Sukabumi kaya akan potensi wisata dan hutan bambu sehingga mesin pengolah bambu berpotensi mendukung kerajinan bambu rakyat, menyerap hasil hutan bambu dan mendukung potensi wisata melalui produksi barang souvenir.
2.1.35	Nama upaya	Pengembangan Teknologi Proses di Sentra Industri Kecil Genteng-Klaten
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Koperasi, Balai Besar Keramik-Depperindag
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Klaten)
	Sasaran	Pengusaha genteng
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.36	Nama upaya	Peningkatan Kemampuan Industri Logam Kecil-Menengah di Sentra IKM Tegal untuk Pembuatan Komponen Otomotif
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	IKM
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan alternatif pengembangan poduk yang saat ini sangat memiliki peluang untuk dikembangkan, yaitu membuat berbagai komponen pengecoran di sektor transportasi darat dan laut. Produk-produk tersebut antara lain komponen otomotif dan kapal motor khususnya kapal nelayan. - Memberikan dukungan teknologi dalam menghasilkan produk-produk cor yang berkualitas baik, melalui program pelatihan serta alih teknologi. - Membantu meringankan biaya penelitian dan pengembangan yang diperlukan oleh IKM dalam usahanya mencari pasar maupun pengembangan produk barunya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Tegal)
	Sasaran	Pengrajin dan Pemda Tk. II Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
	Pendanaan	Rp. 130.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan pelaksanaan dengan instansi terkait - Pengumpulan data dan informasi - Pengadaan bahan baku/penolong - Pembuatan alat bantu, pembuatan desain dan pola - Proses produksi, pengujian/kendali mutu - Evaluasi dan pelaporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keuntungan bagi produsennya sehingga industri kecil pengecoran logam yang saat ini sebagian lumpuh dapat ditolong, dan kegiatan perekonomian di pedesaan pulih. - Pulihnya aktivitas armada angkutan umum yang akan memulihkan tingkat pendapatan pengusaha serta meningkatkan mobilitas penumpang dan barang. - Pulihnya kegiatan perekonomian akan mengurangitingkat pengangguran.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan dalam menentukan jenis propeler yang paling banyak dibutuhkan. Karena propeler jenis sedan dan besar ini sangat mahal (dan tidak mungkin dibeli sebagai <i>master pattern</i>), akhirnya diputuskan untuk mengambil model produk propeler senan besar yang pernah dibuat oleh para pengrajin di Tegal. - Kesulitan dalam mengubah kebiasaan para pengrajin dalam menggunakan pasir sungai sebagai pasir cetak tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan. Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dari pengolahan pasir cetak yang baik. Hampir semua pengrajin belum memiliki peralatan <i>sand mixer</i> yang berfungsi untuk homogenisasi campuran antara pasir dan bahan pengikatnya.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan kini diteruskan oleh pemda setempat
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pangsa pasar yang cukup sehingga memotivasi industri kecil untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. - Dengan ketrampilan yang telah mereka peroleh dari kegiatan ini, diharapkan mereka dapat mengembangkan kegiatan bisnisnya sebagai mitra kerja industri besar.
2.1.37	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pengering Gabah Skala Industri Pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	Pemda setempat; Balai Benih Tani Makmur

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Memperkenalkan, membuat dan memberikan pelatihan alat pengering gabah skala industri perdesaan pa kelompok tani dan IKM.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Cianjur)
	Sasaran	Petani dan kelompok tani Cianjur, Jawa Barat
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dan persiapan - Pemilihan lokasi - Rancangan model alat pengering - Pembuatan dan instalasi alat - Pelatihan - Pembuatan laporan
	Pencapaian hasil	- Hasil kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan penanganan hasilpasca panen gabah hingga 1%- 20%. - Kegiatan ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan di bidang pertanian, pembuatan peralatan, pemasaran dan sebagainya. - Alih teknologi tepat guna bagi masyarakat perdesaan, baik di bidang rancang bangun maupun di bidang perekayasaan, serta manajemen proyek. - Jasa pengeringan yang didapat akan dialokasikan untuk pengembangan alat pengering gabah pada kelompok tani lainnya.
	Masalah	Selama dalam pelaksanaan kegiatan Iptekda ini hampir tidak ditemui hambatan-hambatan.
	Status saat ini	Sudah selesai kini diteruskan oleh kelompok tani dan IKM di sekitar Cianjur dan dikelola oleh Balai Benih "Tani Makmur", Cihea, Cianjur, Jawa Barat
	Potensi	Kabupaten Cianjur yang merupakan sentra produksi padi di Jawa Barat yang memasok sebagian besar kebutuhan padi daerah lain seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.
2.1.38	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Penggiling Cabe Kering Skala Industri Pedesaan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	IKM, Koperasi
	Tujuan upaya	Meningkatkan nilai tambah komoditas cabe dan pendapatan petani di pedesaan serta merangsang pertumbuhan agroindustri skala pedesaan dalam rangka memperkuat struktur agroindustri nasional.
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Brebes)
	Sasaran	Petani dan masyarakat pedesaan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
	Pendanaan	Rp. 140.000.000,00, APBN habis digunakan

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dan koordinasi lapangan - Survey pasar cabe giling kering, pembuatan alat penggiling cabe di sentra produksi - Pelatihan alat penggiing cabe, supervisi dan konsultasi - Pembuatan laporan kemajuan - Pembuatan laporan akhir
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketrampilan petani cabe untuk membuat olahan cabe - Meningkatkan pendapatan petani - Meningkatkan ketrampilan IKM/UKM dalam bidang rancang bangun peralatan untuk pengolahan hasil pertanian - Megembangkan kegiatan IKM/UKM sehingga mampu memasarkan produksnya
	Masalah	Disain awal rotonya mempunyai sirip penghancur (sudut 0 ⁰) sehingga setiap selesai proses terdapat sisa di dalam penggiling
	Status saat ini	Sudah selesai kini dikelola oleh KUD "Sumber Makmur", Desa Kemurang Wetan dan KUD "Bangsri", Desa Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
	Potensi	Kabupaten Brebes merupakan daerah pertanian yang menghasilkan produk unggulan cabe merah dan bawang merah.
2.1.39	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pengolah Sabut Kelapa Skala Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	Pemda setempat; kelompok tani/karang taruna
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan limbah sabut kelapa - Membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat - Menciptakan lapangan kerja
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Ciamis)
	Sasaran	Karang taruna "Kelana Jaya"; petani dan masyarakat setempat; Pemda Jawa Barat; Depsos di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pelaksanaan - Disain produk - Pengadaan Bahan dan alat - Konstuksi - Uji coba dan modifikasi - Pelatihan - Evaluasi dan laporan akhir
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan limbah sabut kelapa - Membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat - Menciptakan lapangan kerja - Meningkatkan taraf hidup masyarakat - Menumbuhkan kembangkan pengusaha-pengusaha baru - Memasyarakatkan teknologi rancang bangun - Memasyarakatkan teknologi tepat guna
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasinya jauh di pelosok. - Transportasi dan sarana telekomunikasi tidak memadai.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Sudah selesai, dan kini diteruskan oleh Karang Taruna "Kelana Jaya", petani dan masyarakat setempat, Pemda Jawa Barat, dan Depsos Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
	Potensi	Potensi kelapa yang berlimpah dan tenaga kerja yang berasal dari anggota karang taruna sejumlah sekitar 60 orang, yang terdiri atas petani dan pengangguran.
2.1.40	Nama upaya	Rancang Bangun Peralatan Iodisasi Garam Rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	Universitas, IKM, Kandep Perindag Kab. Klaten
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan ekonomi masyarakat melalui implementasi teknologi - Mempersiapkan industri kecil yang kokoh dalam menghadapi globalisasi. - Mempersiapkan SDM yang mampu menyerap informasi teknologi dan mengembangkannya, khususnya bagi industri kecil. - Meningkatkan peran lembaga pemerintah, khususnya BPPT dalam membina masyarakat industri khususnya industri kecil.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Pati)
	Sasaran	Pemda Tk. II Pati; petani dan masyarakat Kabupaten Pati
	Pendanaan	Rp. 180.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan - Pengadaan bahan dan peralatan - Pelaksanaan kegiatan, kegiatan fisik terdiri dari konstruksi sipil dan peralatan - Instalasi, testing dan modifikasi peralatan - Laporan akhir
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha pertanian garam yang efektif dan memenuhi persyaratan mutu garam konsumsi melalui penerapan teknologi tepat guna - Memelihara dan mengembangkan potensi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan usaha pertanian garam - Mendorong pemberdayaan usaha kecil-menengah dan koperasi melalui kemudahan akses informasi teknologi, pasar, pelatihan dan bantuan teknis. - Meningkatkan program alih teknologi di bidang teknik produksi, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasa untuk pengembangan produk. - Mengembangkan usaha rakyat melalui manajemen yang profesional dan mampu mengembangkan usahanya sesuai dengan standar garam konsumsi - Memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya wilayah Kabupaten Pati dalam mengatasi pengangguran
	Masalah	Secara umum tidak ada hambatan yang berarti yang mengganggu kegiatan sehingga terjadi penyusunan ulang kegiatan. Pada <i>trial running</i> mesin pencuci garam muncul masalah, namun solusinya ditemukan, yaitu dengan menambahkan filter.
	Status saat ini	Sudah selesai kini dilanjutkan oleh Pemda Tk. II Pati dan petani, masyarakat setempat di Kabupaten Pati
	Potensi	Garam merupakan produk unggulan dan menjadi tumpuan produksi garam nasional. Secara umum masih terdapat resistensi masyarakat terhadap arus informasi dari luar khususnya, teknologi. Namun, dengan pendekatan sosioteknologi melalui diskusi, kendala-kendala tersebut lambat laun dapat diatasi. Ini terbukti dari keingintahuan, antusiasme dan kemauan masyarakat untuk berkembang dan menerima proses mekanisme peralatan yang semula menggunakan proses tradisional.

No.	Item	Penjelasan
2.1.41	Nama upaya	Rancang Bangun Pusat Penanganan Pasca Panen (<i>Packing House</i>) Sayur Mayur di Pedesaan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	PD. Agribisnis dan Pertambangan
	Tujuan upaya	Membangun pusat penanganan pasca panen (<i>packing house</i>) sayur-mayur dalam rangka pengembangan agribisnis di pedesaan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Malang)
	Sasaran	Kelompok Tani "Tani Mulya" Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Malang
	Pendanaan	Rp. 165.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan persiapan - Pemilihan lokasi - Pembangunan rumah kemasan di sentra produksi - Pelatihan kelompok tani - Supervisi dan konsultasi - Pembuatan laporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Telah selesai dibangun rumah kemas (<i>packing house</i>) di kelompok tani "Tani Mulya" Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Malang - SDM-nya yang telah mendapatkan pembinaan-pembinaan dan tambahan pengetahuan tentang aspek pengelolaan dan pemasaran produk.
	Masalah	Selama dalam kegiatan ini tidak ditemukan kendala/hambatan-hambatan, dari segi teknis maupun administratif.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan masih berjalan dan dikelola oleh kelompok tani "Tani Mulya".
	Potensi	Kecamatan Pujon dapat dijadikan pelopor dan penggerak kegiatan agribisnis. SDM-nya memiliki kemampuan yang baik. Terdapat berbagai jenis sayuran dan lokasinya tidak terlalu jauh.
2.1.42	Nama upaya	Pemanfaatan <i>Container</i> Bekas untuk Teknologi <i>Cold Storage</i> dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Hasil Tangkapan Nelayan di Bandar Lampung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Alat dan Mesin Industri
	Instansi terkait	Pemda setempat; Koperasi
	Tujuan upaya	Membuat ruang pendingin ikan dengan ukuran <i>countainer</i> 20 <i>feet</i> dan berkapasitas 8 – 10 ton, yang ditempatkan di TPI Bakauheni, Lampung Selatan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab. Lampung Selatan)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00; APBN; habis digunakan

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lapangan - Disain pendingin - Pembuatan pendingin - Penempatan - <i>Comissioning</i> - Penyerahan - Laporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai ekonomis ikan karena kondisi ikan yang tetap segar • Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan nelayan setempat • Meningkatkan kinerja KUD nelayan dengan adanya cold storage
	Masalah	Dalam pelaksanaannya tidak ditemui hambatan-hambatan teknis maupun administratif yang berarti.
	Status saat ini	Kegiatan ini telah selesai dan diteruskan oleh koperasi perikanan setempat yaitu Koperasi Perikanan "Sepakat", Jl. Pratu M Amin, Kalianda, Koperasi Perikanan "Candra Yudha" Kenyayan Bawah, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Lampung Selatan sangat strategis karena berada di Selat Sunda yang terletak pada Jaringan Belt Ekonomi Maritim. Belt Ekonomi Maritim adalah desain pembangunan ekonomi yang berorientasi maritim, dengan penekanan pada pembangunan jaringan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. - Teknologi yang diterapkan dalam proyek ini merupakan teknologi yang tidak baru dan disesuaikan terhadap keadaan setempat, termasuk kemampuan SDM-nya. Perubahan-perubahan atau modifikasi peralatan tersebut. Perubahan-perubahan atau modifikasi dari peralatan dan teknologi yang dirancang dapat diusulkan untuk patennya.
2.1.43	Nama upaya	Penerapan Teknologi <i>Cool Box</i> untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Tangkapan Nelayan Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Alat dan Mesin Industri
	Instansi terkait	Pemda setempat; Koperasi
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomis ikan karena ikan dapat tetap segar dan sehingga pembuangan ikan karena pembusukan dapat dikurangi - Meningkatkan pendapat/kesejahteraan nelayan setempat - Meningkatkan kinerja KUD nelayan dengan adanya pengelolaan cool box
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab. Lampung Selatan)
	Sasaran	Nelayan dan pemda Lampung Selatan, Lampung
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelaksanaan - Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan - Koordinasi, survey data nelayan - Desain konstruksi <i>cool box</i> - Re-desain konstruksi <i>cool box</i> - Pembuatan konstruksi <i>cool box</i> - <i>Comisioning</i>/uji performa - Penyerahan - Pelaporan

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Perbaiki sistem isolasi <i>cool box</i> memungkinkan nelayan dapat berlayar lebih lama sehingga jumlah tangkapan lebih banyak, membuat kualitas ikan tangkapan dapat dijaga sehingga harga jualnya tetap tinggi dan menambah posisi tawar nelayan terhadap pedagang saat pelelangan di lokasi TPI
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Hambatan teknis antara lain adalah munculnya porositas/gelembung udara pada proses pelapisan <i>fibre/resin</i> pada isolator <i>poliurethane</i>, sehingga porositas ditutup sebelum proses pelapisan. - Hambatan administratif muncul saat penempatan <i>cool box</i> di Bandar Lampung karena perselisihan antara koperasi yang ditunjuk sebagai pengelola <i>cool box</i> (KUD "Mina Jaya") dengan dinas teknis terkait (Dinas Perikanan).
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh KUD dan Pemda setempat.
	Potensi	Lampung merupakan lokasi penangkapan ikan yang sangat strategis karena berada di Selat Sunda. Nelayan dapat menangkap ikan ke wilayah Samudra Hindia, laut Jawa, atau ke laut Cina Selatan. Daerah ini ramai di datangi nelayan-nelayan pantai selatan Jawa jika musim angin Barat tiba.
2.1.44	Nama upaya	Pengembangan Industri Pakan Ternak dari Tepung Bongkol Jagung, di Kab. Garut, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Alat dan Mesin Industri
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan bongkol jagung yang terbuang agar menjadi produk yang mempunyai nilai tambah bagi petani untuk meningkatkan penghasilan. - Membuat mesin pembuat pakan ternak dengan mengoptimalkan potensi setempat (dalam hal ini tepung bongkol jagung) untuk keperluan sendiri atau ke wilayah sekitar untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Garut)
	Sasaran	Petani, KUD dan Pemda Garut, Jawa Barat
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelaksanaan - Koordinasi - Survey - Perancangan alat - Pembuatan prototyping - Pengujian dan perbaikan - Serah terima dan <i>monitoring</i> - Laporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Iptekda ini membuka hubungan dengan Pemerintah Daerah dan juga pihak-pihak industri di daerah. Hubungan ini perlu terus dikembangkan terutama untuk mengantisipasi belakunya undang-undang otonomi daerah. - Sebagai pilot proyek, peralatan yang dibuat akan dimanfaatkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD)

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Pada saat awal kegiatan, sebagai hasil dari kunjungan ke Kab. Garut, terjadi perubahan desain untuk memenuhi permintaan dari petani dan pemda di daerah. Dari masukan yang ada peralatan yang dikembangkan harus bersifat terpadu dan serbaguna. Dengan adanya perubahan desain ini, maka waktu perancangan menjadi 1 minggu.
	Status saat ini	Sudah selesai dan diteruskan oleh KUD "Suka Tani" Kecamatan Banyuresmi, Kab. Garut, Jawa Barat
	Potensi	Kabupaten Garut merupakan sentra industri jagung yang utama di Jawa Barat dan Jawa Barat adalah penghasil jagung terbesar keempat di Indonesia.
2.1.45	Nama upaya	Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselen
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Unit Pelayanan Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali.
	Instansi terkait	Universitas, IKM
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan jenis-jenis keramik ukir yang dapat dihasilkan pada perajin binaan serta prospek-prospeknya. - Perajin binaan mampu menguasai teknik eksploitasi bahan mentah sekitarnya dan teknologi proses produksi keramik ukir yang ekonomis. - Memperkaya jenis produk seni ukir yang berasal dari Bali dengan adanya keramik ukir ini serta memperkenalkan pada masyarakat umum keberadaannya sebagai salah satu produk seni dari Bali. - Menjadikan keramik ukir sebagai salah satu identitas daerah Bali pada khususnya maupun nasional pada umumnya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Kab. Tabanan: Pejaten)
	Sasaran	Pengrajin dan masyarakat sekitar Tabanan, Bali
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelaksanaan - Survey dan pendataan - Persiapan pelaksanaan - Pembukaan - Pembinaan - Pemantauan - Evaluasi dan pembuatan laporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Berubahnya orientasi perajin binaan dari pembuat keramik sederhana menjadi pembuatan keramik dengan dekorasi ukir. - Perajin untuk menguasai teknologi pembuatan keramik ukir - Terangkatnya eksistensi keramik seni khususnya keramik ukir dengan corak Bali. - Terjadinya peningkatan penghasilan perajin seiring dengan peningkatan harga jual dan pangsa pasar keramik yang dihasilkan oleh perajin.
	Masalah	Selama dalam kegiatan ini hampir tidak ditemui kendala atau hambatan-hambatan.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan diserahkan ke CV. "Keramik Pejaten".
	Potensi	Daerah Pejaten merupakan sentra produk gerabah yang dapat dikembangkan menjadi sentra kerajinan keramik karena SDM-nya memiliki keterampilan yang cukup, di samping muatan seni daerah yang ada, yang memiliki kekhasan bernilai tinggi. Hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan, di daerah ini telah memiliki 8 sentra perajin yang layak untuk dikembangkan.
2.1.46	Nama upaya	Pemasyarakatan Mesin Pengiris Serba Guna (PSG) untuk Terciptanya Peningkatan Kegiatan Ekonomi Rakyat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero – Gasdinamika dan Getaran
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	Meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan dengan memberikan mesin pemroses yang memadai (mesin PSG) untuk mencegah kerusakan dan memberikan nilai tambah komoditi pertanian, khususnya umbi-umbian seperti, singkong, ubi, pisang, kentang, talas/keladi, wortel, bawang merah/putih, juga bahan baku jamu tradisional seperti kunyi, jahe, kencur, dll. Mesin ini dapat menunjang usaha keripik, industri jamu tradisional, dan bawang merah goreng.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Pati)
	Sasaran	Petani/pengrajin dan Pemda Pati, Jawa Tengah.
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00, APBN habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Desain dan pembuatan mesin Pengiris Serba Guna - Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemda Tk.II. Pati, Magetan, Brebes, Tanggerang. - Penyerahan dan pelatihan penggunaan, serta perawatan Mesin Pengiris Serba Guna - Pembuatan laporan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian. - Efisiensi dana investasi dan tenaga manusia - Mempersingkat waktu proses pengirisan - Tidak mengurug pati akibat pengirisan - Faktor keamanan yang memadai - Mesin Pengiris ini mempercepat kerja, mudah pengoperasian dan perawatannya.
	Masalah	Hampir tidak ada karena bahan-bahan, teknologi dan fasilitas lainnya cukup tersedia di dalam negeri khususnya di Jakarta serta UPT – LAGG (penggunaan bahan baku impor prosentasenya sangat kecil dan sudah ada di Indonesia).
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan kini dilanjutkan oleh para petani/pengrajin dan Pemda Tk.II yang terkait (Pati, Magetan, Brebes, dan Tanggerang).
	Potensi	Setiap daerah mempunyai potensi-potensi hasil pertanian: <ul style="list-style-type: none"> - Pati memiliki 11.364 hektar tanaman ketela dan 5 Industri Kecil Menengah (IKM). - Magetan memiliki 5.528.151 hektar tanaman ketela ,1.167,33 hektar tanaman bawang merah, 3.946,13 hektar ubi jalar - Tanggerang memiliki 500 hektar tanaman ketela dengan jumlah pengrajin 50 pengrajin. Begitu juga dengan daerah Brebes.

No.	Item	Penjelasan
2.1.47	Nama upaya	Peningkatan Teknologi dan Pemberdayaan Industri Kecil Logam di Pasuruan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Perguruan tinggi, koperasi
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Pasuruan)
	Sasaran	Industri kecil logam
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.48	Nama upaya	Rancang Bangun Peralatan Pertanian Pasca Panen <i>Portable</i> untuk Tanaman Padi
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Unit Pelaksana Teknis – Laboratoria Uji Konstruksi
	Instansi terkait	Universitas, pemda setempat, koperasi
	Tujuan upaya	Memperkenalkan prototipe peralatan pertanian pasca panen untuk tanaman padi yang portabel, murah, mudah dioperasikan dan mudah dibuat sendiri, dan menghasilkan produk dengan kapasitas yang tinggi, hasil lebih utuh dan bersih dan menaikkan nilai jual hasil panen padi petani dalam bentuk beras, sehingga dapat menambah penghasilan petani.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Sukabumi)
	Sasaran	Petani/kelompok tani dan Pemda Sukabumi, Jawa Barat
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00, APB habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan pelaksanaan - Pengadaan peralatan penunjang penelitian, serta survey ke pedesaan dan penggilingan padi - Membuat desain alat perontok gabah dan alat pengupas gabah kering - Membuat kerangka atau dudukan - Produk prototipe dan uji coba, serta menganalisa dan mengevaluasi hasil rancangan - Peragaan atau memperkenalkan alat perontok gabah dan alat pengupas gabah kering ke daerah-daerah di pedesaan - Penyusunan laporan akhir hasil penelitian

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Pemanfaatan hasil kegiatan ini baru tampak setelah prototipe alat perontok padi dan pengupas gabah kering diserahkan dan digunakan oleh kelompok tani atau koperasi unit desa. Dengan adanya peralatan pertanian pasca panen tersebut, mengubah padi menjadi beras dapat dilakukan sendiri oleh petani atau kelompok tani dengan mudah dan praktis.
	Masalah	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, Masyarakat tani masih sangat sukar diberi pengertian untuk memanfaatkan rancangan atau memproduksi sendiri peralatan pertanian pasca panen tersebut. Dengan adanya krisis moneter dan dolar masih belum stabil mengakibatkan pengadaan bahan dan peralatan sangat sulit dicari, dan walaupun ada harganya sangat mahal.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dilanjutkan oleh para petani/kelompok tani dan KUD.
	Potensi	Sukabumi sangat potensial dengan hasil pertaniannya, padahal selama ini hasil panen padi oleh para petani di daerah dijual dalam bentuk gabah kering dengan harga relatif rendah. Dengan adanya peralatan pertanian pasca panen, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian gabah keringnya.
2.1.49	Nama upaya	Rancang Bangun Teknik Pandai Besi untuk Memproduksi Alat-alat Pertanian dan Disain Ergonomi
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Unit Pelaksana Teknis – Laboratoria Uji Konstruksi
	Instansi terkait	IKM, koperasi, kelompok tani
	Tujuan upaya	Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas industri kecil pandai besi dengan cara memperkenalkan teknologi tepat guna yang dapat dilakukan oleh industri kecil dan menengah dalam membuat peralatan pertanian tradisional yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga produk pengrajin mampu bersaing dengan produk impor, bahkan akan membuka peluang produk peralatan pertanian untuk diekspor ke luar negeri.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat
	Sasaran	Para pengrajin di daerah Jawa Barat
	Pendanaan	Rp. 75.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999/2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan lahan, pembangunan bengkel, pengadaan peralatan pandai besi, dll - Modifikasi, pengembangan dan optimasi peralatan pertanian, serta pembuatan prototype. - Mengadakan pembinaan dan pelatihan - Pelaporan
	Pencapaian hasil	Memproduksi peralatan pertanian di <i>workshop</i> dengan mempekerjakan orang dari Desa Setu, daerah sekitar Puspiptek. Ini membuka lapangan kerja. Untuk mensosialisasikan keberadaan <i>workshop</i> pandai besi ini, dalam jangka panjang dapat dijalin kerja sama dengan pemda-pemda lain seperti pemda Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana banyak terdapat sentra-sentra industri pandai besi.
	Masalah	Dalam mengadakan pelaksanaan pelatihan tidak dijumpai hambatan yang berarti kecuali beberapa pandai besi yang diundang tidak dapat datang.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan sekarang ini ada di belakang gedung UPT – LUK.
	Potensi	Potensi industri kecil pandai besi di daerah sangat besar namun belum tergarap secara optimal bahkan mulai ditinggalkan. Hal ini karena pasar lebih menyukai produk impor yang memiliki kualitas lebih baik sehingga para pengrajin cenderung untuk meninggalkan mata pencahriannya.

No.	Item	Penjelasan
2.1.50	Nama upaya	Pembuatan dan Pemasyarakatan Briket dan Tungku Gambut untuk Rumah Tangga
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi – TPSA
	Instansi terkait	IKM
	Tujuan upaya	Menggalakkan penggunaan produk baru tungku/kompur dan briket gambut hingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai energi alternatif untuk rumah tangga dan industr/usaha kecil yang murah.
	Jenis kegiatan	- Pembuatan peralatan - Pelatihan dan pembinaan
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Barat (Pontianak)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Perjanjian kerjasama dengan Pemda Kalbar, Kanwil PU Kalbar, surat izin penelitian, penyebaran kuesioner, SKE. - Pembangunan bengkel kerja, perbaikan rumah tinggal dan <i>basecamp</i> di Rasau Jaya Kalbar - Bahan baku serbuk, pengurangan, pembriketan - Pembuatan peralatan, pengiriman dan penerimaan kiriman tungku dan dan peralatan di lokasi stasiun lapangan Rasau Jaya. - Seremoni dan undangan. - Bahan: tungku, briket
	Pencapaian hasil	
	Masalah	- Hasil-hasil penelitian dan literatur masih terbatas - Kerjasama pemerintah dan swasta masih kurang - Kerjasama pemerintah dengan luar negeri belum ada - Belum memiliki laboratorium dan <i>workshop</i> sendiri - Tidak seimbang dana penelitian dengan kebutuhan yang dihadapi - Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kanwil Dep. PU. Kalimantan Barat dan Koperasi Karyawan “Eka Mutiara Sari” Pontianak.
	Potensi	- Koordinasi dengan Pemda Tk. I Kalimantan Barat dan pihak-pihak yang terkait menunjukkan hasil positif di mana partisipasi dan minat untuk memakai/membeli/memproduksi produk tungku/kompur dan briket gambut dan produk lainnya meningkat. Hal ini diperkuat oleh banyaknya permintaan dari masyarakat (Kel. Sungai Jawi Dalam Kodya Pontianak dan Kel. Rasau Jaya Unit Umum Kab. Pontianak) melalui surat kepala desa kepada Deputi Bidang TPSA. - Dari SKE tahun 1998, konsumsi energi (minyak tanah) untuk keperluan rumah tangga di Kalimantan Barat adalah 8.473.08 kca/kk/hari (=59.311.56 kca/kk/minggu), diharapkan dapat semakin banyak tergantikan oleh produk dan teknologi gambut.
2.1.51	Nama upaya	Teknologi Daur Ulang Logam Timbal/Timah Hitam (Pb) dari Aki Bekas di Temanggung, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Lingkungan
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	- Memperbaiki kondisi lingkungan - Memperbaiki kinerja kegiatan yang telah ada sekarang - Memberdayakan sumber daya manusia di daerah, khususnya di Temanggung
	Jenis kegiatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Temanggung)
	Sasaran	Masyarakat dan pengrajin di Temanggung, Jawa Tengah
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00, APBN habis gunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2000
	Mekanisme pelaksanaan	- Survey ke Temanggung - Koordinasi dan kerjasama - Survey penentuan lokasi, analisa bahan - Pembuatan <i>lay-out</i> dan perhitungan kapasitas produksi - Desain peralatan, pembuatan peralatan, konstruksi, instalasi, <i>commisioning</i> - Uji operasi - Pelaporan
	Pencapaian hasil	Hasil dari kegiatan teknologi daur ulang logam timbal / timah hitam (Pb) dari aki bekas ini diharapkan untuk mencapai kinerja efektif dan efisien yang meliputi: - Perbaikan kondisi lingkungan dengan melakukan minimilisasi limbah dan implementasi penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih. - Perbaikan kinerja proses dengan ivonasi-inovasi peralatan sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
	Masalah	Sampai saat ini hambatan teknis belum dirasakan secara serius, sedangkan hambatan non-teknis yang dirasakan antara lain : - Diperlukan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup karena kurangnya pemahaman tentang regulasi dan <i>law enforcement</i> . - Hambatan dalam sosialisasi penggunaan peralatan yang efisien dan efektif. Hambatan ini muncul karena upaya ini berarti merubah pola kebiasaan kerja para pengrajin, dan mereka menganggap bahwa pengelolaan lingkungan berarti biaya sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan biaya produksi.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan dan selanjutnya oleh para pengrajin pendaur ulang di Temanggung, Jawa Tengah
	Potensi	Di Temanggung, Jawa Tengah terdapat industri kecil pengolahan (daur ulang) aki bekas. Saat ini para pendaur melakukan kegiatan secara tradisional, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kegiatan IPTEKDA daur ulang aki bekas dapat dijadikan percontohan dan dapat diimplementasikan pada industri sejenis di daerah lain, terutama sekitar Temanggung.
2.1.52	Nama upaya	Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Industri Tahu-Tempe
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kota Bandung)
	Sasaran	Usaha tahu – tempe
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999/2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.53	Nama upaya	Penerapan Teknologi Destilasi Minyak Akar Wangi di Kab. Garut
	Deskripsi upaya	Penerapan Teknologi Destilasi Minyak Akar Wangi untuk meningkatkan mutu dan rendemen minyak akar wangi melalui inovasi/perbaikan teknologi proses yang lebih efisien. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan mutu dan rendemen minyak akar wangi melalui inovasi/perbaikan teknologi proses yang lebih efisien
	Jenis kegiatan	- Pembuatan sistem peralatan destilasi minyak akar wangi - Pelatihan penggunaan alat
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Garut)
	Sasaran	Petani penyuling minyak akar wangi
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Telah dibangunnya sistem peralatan destilasi minyak akar wangi - Telah dilakukan ujicoba dengan hasil terjadinya perbaikan mutu melalui peningkatan kadar vetiverol (47.98%) dan hasil minyak akarwangi yang tidak berbau gosong dan kental - Pada percobaan pertama rendemen yang diharapkan belum tercapai sehingga direncanakan kegiatan ujicoba akan dilakukan bersama dengan petani penyuling serta kegiatan pelatihan penggunaan peralatan tersebut
	Masalah	- Rancang bangun teknologi yang diterapkan masih bersifat ujicoba dan masih memerlukan kajian lebih lanjut - Masih belum terasanya manfaat langsung bagi mitra pengguna - Belum jelasnya pola kerjasama dengan mitra kerja - Penerimaan masyarakat terhadap teknologi (aspek sosial budaya masyarakat memerlukan penanganan khusus agar dapat menerima teknologi yang diterapkan)
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.54	Nama upaya	Penerapan Teknologi Fermentasi dan Formulasi Roti Pakan Sapi untuk Meningkatkan Kualitas Daging di Kab. Klungkung, Bali
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, PPP-BIOTEK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan persediaan pakan ternak yang bermutu sepanjang tahun, meningkatkan populasi ternak sapi potong, kualitas daging sapi serta pendapatan petani atau peternak sapi.
	Jenis kegiatan	- Pembuatan 1 unit mesin pencacah hijauan pakan, 2 unit alat cetak roti, 2 unit tungku pengering, dan produk jadi berupa roti pakan sapi - Pelatihan dan sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Kab. Klungkung)
	Sasaran	Peternak sapi
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida melalui pelatihan alih teknologi produksi roti pakan sapi kepada PPKL - Peningkatan nilai tambah limbah tempurung kelapa sebagai bahan bakar tungku - Pemasyarakatan produk roti pakan sapi - Peningkatan jumlah pakan ternak di musim kemarau - 1 unit mesin pencacah hijauan pakan, 2 unit alat cetak roti, 2 unit tungku pengering dengan kapasitas masing-masing 600 kg dan 800 kg per hari dan produk jadi berupa roti pakan sapi
	Masalah	- Sasaran kegiatan tidak dapat dicapai sekaligus dalam waktu 6 bulan. - Penerimaan masyarakat terhadap teknologi (aspek sosial budaya masyarakat memerlukan penanganan khusus agar dapat menerima teknologi yang diterapkan)
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Prospek kegiatan memberikan peluang untuk dikembangkan sebagai usaha bisnis
2.1.55	Nama upaya	Penerapan Teknologi Evaporasi dan Kristalisasi untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Garam di Lahan Pegaraman Jono-Grobogan, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani garam di daerah Jono, Grobogan pada khususnya serta peningkatan kegiatan industri di daerah TK II Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Farmasi dan Medika
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani garam - Meningkatkan kegiatan industri di daerah TK II Grobogan, Jawa Tengah
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Grobogan: Lahan Pegaraman Jono)
	Sasaran	Petani garam di daerah Jono, Kab. Grobogan
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Peningkatan kapasitas produksi garam sebesar 80% dari kapasitas semula yang mencapai lebih kurang 150 ton per tahun menjadi 275 ton per tahun
	Masalah	Target produksi belum tercapai karena masalah pasokan bahan baku, SDM dll. Hal ini dapat dipecahkan dengan melibatkan koperasi dan kelompok petani.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.56	Nama upaya	Perekayasaan Paket Peralatan dan Teknologi Produksi Nata de Soya
	Deskripsi upaya	Pelatihan pembuatan <i>Nata de Soya</i> dari limbah (sisa produksi) industri tahu dan tempe. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Bioindustri
	Instansi terkait	Kopti se-DIY sebagai mitra pengguna
	Tujuan upaya	- Memanfaatkan limbah (sisa produksi) industri tahu dan tempe menjadi produk baru - Membuka peluang bisnis baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Pendampingan dalam pengoperasian alat
	Wilayah pelaksanaan	D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul)
	Sasaran	Pengrajin tahu tempe
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Telah dilakukan pelatihan cara produksi nata kepada para pengrajin tahu dan tempe
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Teknologi ini membantu penciptaan produk baru yang memiliki prospek bisnis.
2.1.57	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pembuatan Kecap Ikan Secara Enzimatik Terkendali untuk Industri Skala Menengah dan Rumah Tangga
	Deskripsi upaya	Melakukan introduksi dan pengembangan teknik pembuatan kecap ikan secara enzimatik yang sederhana. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi BioIndustri
	Instansi terkait	Universitas Gajah Mada (UGM)
	Tujuan upaya	Menghasilkan kecap ikan berkualitas baik untuk pengrajin (petani nelayan) tradisional, industri rumah tangga dan industri menengah
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Tuban)
	Sasaran	Pengrajin (petani nelayan) tradisional, industri rumah tangga dan industri menengah
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Masyarakat dapat membuat sendiri kecap ikan dengan teknologi yang sederhana yang dapat dijangkau. Produk ini mulai dikenalkan pada masyarakat luas dan usaha diseminasi melalui berbagai pertemuan kelompok pameran, dll. Dengan biaya produksi yang relatif rendah (\pm Rp. 4.000,00/liter) memberikan gambaran tambahan nilai tambah yang tinggi karena harga pasaran berkisar antara Rp. 9.000,00 s/d Rp. 12.000,00/liter.
	Masalah	Diperlukan upaya pemasaran karena produk ini yang relatif baru dan belum banyak dikenal masyarakat.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha/bisnis
2.1.58	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pengeringan Bebas Lalat
	Deskripsi upaya	Mengkaji sistem pengeringan ikan secara tradisional, yang terbebas dari gangguan lalat, sehingga produk ikan kering berkualitas baik karena tidak mengandung kotoran telur lalat dan atau belatung. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Tuban)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Diproduksinya ikan asin yang berkualitas baik, higienis, sehingga masyarakat pengusaha ikan kering dapat meningkatkan usahanya dengan cara alih teknologi. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
	Masalah	- Pelaksanaan di lapangan tidak mencapai sasaran - Teknologi masih bersifat percobaan - Kurang memperhitungkan skala penerapan dan respon masyarakat yang terbiasa mengeringkan ikan dengan formalin
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Berpotensi untuk diterapkan dalam skala kecil
2.1.59	Nama upaya	Penerapan Teknologi Penggemukan Sapi dengan Menggunakan Pakan Ternak Organik Lactogrand dan Lactomin sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani-Peternak melalui Model Pertanian Terpadu Berwawasan Kewirausahaan di Kab. Boyolali
	Deskripsi upaya	Memasyarakatkan usaha penggemukan sapi dengan menggunakan teknologi <i>Lactogrand</i> dan <i>Lactomin</i> dalam upaya meningkatkan produktivitas daging sapi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Budidaya Pertanian
	Instansi terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan pola peternakan dengan menggunakan model pertanian terpadu - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada peternakan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kandang sapi koloni - Pengadaan 10 ekor bibit sapi jenis PO (Peranakan Ongole) - Pembentukan kelompok tani - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Boyolali)
	Sasaran	Peternak sapi
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibangun kandang sapi koloni (hotel sapi) yang merupakan swadaya kelompok (kapasitas 20 ekor) - Telah diadakan 10 ekor sapi bakalan jenis PO (Peranakan Onggole) untuk digemukkan menggunakan pakan organik yang didanai oleh proyek - Telah terbentuk kelompok tani - Kelompok telah dapat melakukan pengolahan limbah ternak
	Masalah	Kesulitan mendapatkan <i>lactogrand</i>
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Masyarakat banyak yang ingin terlibat di dalam kegiatan ini dan turut menerapkannya
2.1.60	Nama upaya	Pembuatan dan Pemasarakatan Tungku Berbahan Bakar Gas untuk Industri Kerajinan Keramik di Banjarnegara, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	<p>Melakukan peningkatan mutu keramik klompok melalui penerapan sistem pembakaran yang baik sehingga tercapainya suhu pembakaran yang stabil dan merata sehingga dapat memproduksi porselen, menurunkan biaya pembakaran dengan efisiensi pembakaran.</p> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).</p>
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Minimalisasi waktu dan biaya produksi untuk menghasilkan produk keramik yang bermutu yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pengrajin keramik
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan tungku berbahan bakar gas untuk memproduksi keramik - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Banjarnegara)
	Sasaran	Pengrajin keramik di Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Tungku berbahan bakar gas kapasitas 1 m³ yang dapat memproduksi berbagai macam produk keramik seperti terakota, glasur dan porselen - Penghematan waktu bakar sekitar 1 hari dibandingkan dengan menggunakan tungku konvensional bahan bakar minyak

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Kenaikan harga LPG pada saat kegiatan hampir selesai mengurangi nilai tambah/keuntungan ekonomis tungku berbahan bakar gas dibandingkan dengan tungku minyak yang selama ini dipakai pengrajin.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Pemasyarakatan tungku berbahan bakar gas perlu ditingkatkan dengan membuat kajian tekno-ekonomi.
2.1.61	Nama upaya	Aplikasi Mineral Alumino Silikat untuk Industri Pertanian
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengaplikasikan teknologi pemanfaatan mineral alumino-silikat serta memanfaatkannya untuk mencukupi kebutuhan penunjang pada sektor pertanian untuk keperluan industri pertanian di Kab. Ciamis, Jawa Barat
	Jenis kegiatan	- Bantuan 50 ton suplemen, 8 ton PNP 2000, dan 2 ton pakan ternak - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Ciamis)
	Sasaran	Petani peternak
	Pendanaan	Rp. 75.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Memperkecil pencemaran lingkungan air tambak dan timbulnya perilaku stress pada udang dalam air tambak. - Memperbesar telur bebek - Mempercepat pertumbuhan/menambah berat badan sapi dan meningkatkan produksi padi
	Masalah	- Sasaran kegiatan belum tercapai. - Upaya yang merupakan inovasi teknologi produk (formula pupuk, suplemen dan pakan ternak) ini belum dibuktikan secara ilmiah manfaat penerapannya di masyarakat - Aspek kemitraan sebagai tindak lanjut belum digarap dengan jelas
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.62	Nama upaya	Strategi Pemanfaatan Rumput Laut Melalui Pemasyarakatan Teknologi Pengolahan <i>Gracilaria sp</i> Menjadi Agar-Agar untuk Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi
	Instansi terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan alternatif pemasaran rumput laut dengan nilai jual yang lebih tinggi - Meningkatkan nilai tambah rumput laut dan mengurangi persentase ekspor bahan mentah - Diversifikasi produk rumput laut dari sekedar bahan baku menjadi produk olahan yang langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat - Menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat - Membantu pemerintah daerah merumuskan kebijaksanaan dalam pengelolaan rumput laut di daerah
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Sinjai)
	Sasaran	Masyarakat
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Berdirinya industri pengolahan agar skala rumah tangga yang mampu memproduksi agar sebanyak 25 kg/bulan dengan menyerap tenaga kerja yang terlibat langsung 5 orang - Nilai jual rumput laut kering meningkat dari Rp. 750,00 menjadi Rp. 1.500 - Rp. 5.000 tergantung dari kualitas yang dihasilkan oleh masyarakat. Usaha budidaya rumput laut menjadi salah satu mata pencaharian pokok lagi bagi masyarakat di Kab. Sinjai yang selama tahun 1999 sampai Juli 2000 terhenti karena tidak ada pembeli.
	Masalah	Target dan sasaran belum tercapai karena keterlambatan jadwal akibat adanya perubahan desain alat untuk mencari harga yang lebih murah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.63	Nama upaya	Peningkatan Kemampuan Tekno-Bisnis dalam Pengembangan Produk Unggulan Koperasi di Kab. Pasuruan-Jawa Timur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sumbangan kemampuan dan kapabilitas teknologi dan aplikasi manajemen bisnis yang dimiliki secara sinergis dan komplementer dalam rangka pengembangan potensi unggulan daerah. - Mensinergikan program, potensi teknologi dengan unit usaha di daerah guna mendiseminasikan teknologi tepat guna. - Menerapkan teknologi proses pengolahan kripik apel yang diproduksi KPSP "Setia Kawan" untuk memperoleh kualitas, rasa, standar kesehatan dan kemasan yang cantik - Mendorong dan memotivasi SDM dan kapabilitas teknologi budidaya apel serta pengembangan inovasi produk olahan buah apel yang dimiliki suatu koperasi setempat
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan 1 unit mesin penggorengan vacuum kripik dan buah-buahan - Bantuan teknis dan konsultasi.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Pasuruan)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Koperasi (KPSP) "Setia Kawan"
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibuat dan diinstalasi 1 unit mesin penggorengan <i>vaccum</i> keripik buah-buahan - Mesin telah diuji coba dan siap dioperasikan - Persiapan pengurusan perizinan dan pemasaran telah didapat contoh desain label produk dan konsep pemasaran keripik buah apel
	Masalah	Teknologi <i>vaccum frying</i> yang dikembangkan dan diterapkan bukan milik BPPT melainkan milik lembaga swasta/pihak kedua, yang lebih dominan.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Mempunyai prospek bisnis yang baik untuk dikembangkan
2.1.64	Nama upaya	Penerapan Teknologi Budidaya Jagung dan Sapi Perah Terpadu untuk Meningkatkan Bidang Agribisnis Pesantren di Daerah Jombang dan Penerapan Bioteknologi untuk Produksi Kelapa dan Sari Kelapa guna Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kab. Banyumas
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Biro Umum
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan aplikasi teknologi pengawetan limbah hijauan pertanian tanaman pangan (HPTP). - Memanfaatkan limbah HPTP sebagai Hijauan Makanan Ternak (HMT). - Mengembangkan agroindustri berbasis teknologi pemanfaatan limbah HPTP. - Mengembangkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi di daerah khususnya teknologi pengawetan limbah HPTP untuk HMT menuju Industri Kecil Pakan Ternak (IKPAT).
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Perguliran dana (awal tahun 2001 - akhir tahun 2003)
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab.Jombang); Jawa Tengah (Kab. Banyumas)
	Sasaran	Pesantren dan masyarakat
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000-2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dihasilkannya 27 ton HMT silase untuk pakan. - Dikuasainya teknik pembuatan HMT silase dengan baik dan benar. - Dipahaminya desain dan tata letak pola peternakan terpadu di halaman rumah peternak yang menerapkan teknologi silase untuk pakan ternaknya.
	Masalah	Untuk kegiatan pertanian terpadu, tidak terlihat konsep keterpaduan antara budidaya sapi dengan jagung karena tempatnya yang berjauhan dan tidak ada teknologi yang baru atau punya nilai tambah, sedangkan untuk kegiatan minyak kelapa cukup baik pelaksanaannya
	Status saat ini	Masih berlangsung (sampai akhir 2003)
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.65	Nama upaya	Pemanfaatan Teknologi Rancang Bangun pada Peralatan Pemroses Sirlac untuk Mengembangkan Industri Kecil Penghasil Politur di Kab. Cirebon
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Alat dan Mesin Industri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengembangkan peralatan pemroses sirlac untuk industri politur
	Jenis kegiatan	- Pembuatan peralatan pemroses sirlac untuk industri politur - Pendampingan.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Cirebon)
	Sasaran	Industri kecil penghasil politur.
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersedianya peralatan pemroses sirlac untuk industri politur - Tersedianya lapangan pekerjaan dan terberdayakannya potensi ekonomi masyarakat pedesaan
	Masalah	Saat ini pengoperasian alat belum berjalan karena pasokan bahan baku dari Perhutani belum berjalan. Kerjasama dengan Perhutani perlu segera direalisasikan dan perlu pemantauan lanjutan.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.66	Nama upaya	Penerapan Teknologi Proses Pembuatan Kompon di Koperasi Pengusaha Industri Kecil Suku Cadang Mesin Bandung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan program alih teknologi di bidang formulasi kompon, penggunaan karet alam sebagai dinamisator pemulihan perekonomian masyarakat industri kecil kompon dan barang jadi karet, serta mendorong pemberdayaan Koperasi dan Industri Kecil Menengah
	Jenis kegiatan	- Bantuan sarana prasarana - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bandung)
	Sasaran	Pengusaha industri kecil suku cadang mesin
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan: 1 buah <i>open mill</i> kapasitas 25 kg per <i>batch</i> dengan harga Rp. 50.175.000,00, <i>shoremeter</i> 1 buah, <i>termokopel</i> 1 buah, timbangan analitik 1 buah, dan timbangan biasa kap. 25 kg 1 buah, <i>desikator</i>, <i>beaker glass</i>, plastik dll. - Bangunan: pondasi, instalasi listrik, air, dan asesoris lainnya dibiayai 100% oleh mitra pengguna. - Formulasi 5 jenis kompon yaitu : Iptekda 1, Iptekda 2, Iptekda 3, Iptekda 4, dan Iptekda 5, dengan bahan baku karet alam dan sintetik - Pelatihan alih teknologi cara-cara membuat formula, pembuatan kompon dan barang jadi karet
	Masalah	Teknologi/formula yang dikembangkan masih didasarkan pada teknologi kompon di pasaran yang <i>high-risk</i> atau sangat beresiko.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.67	Nama upaya	Penerapan Alat Deteksi Ikan dalam Rangka Pra dan Penangkapan Ikan Terpadu untuk Nelayan Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Alat dan Mesin Industri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan jumlah produksi ikan melalui peningkatan teknologi penangkapan ikan dengan memperkenalkan teknologi alat deteksi ikan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan alat deteksi ikan (ADI) - Pelatihan.
	Wilayah pelaksanaan	Lampung
	Sasaran	Nelayan di bawah binaan KUD "Mina Jaya"
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Kegiatan ini bekerjasama dengan KUD "Mina Jaya" yang beralamat di Jl. Ikan Bawal 3/12, Teluk Betung Selatan. KUD tersebut nantinya akan mengelola ADI ini. Selain itu, pada tanggal 17-19 Oktober 2000 dilakukan pelatihan penggunaan ADI kepada nelayan di bawah binaan KUD Mina Jaya serta penyerahan 5 buah ADI dan 1 buah kepada KUD untuk digulirkan. Selain itu, 3 buah ADI juga diserahkan kepada sebuah koperasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan
	Masalah	Peralatan teknologi kunci (<i>fish finder</i> , GPS dan <i>transducer</i>) masih diimpor
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.68	Nama upaya	Pembuatan dan Pengembangan Teknologi Proses Produksi Pengolahan Kayu Karet (<i>Sawn Timber</i>) Skala Industri Rakyat dan Berkualitas Ekspor
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Pengembangan peluang berusaha produk kayu olahan bagi IKM dan masyarakat desa, memanfaatkan produk samping menjadi produk yang bernilai ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi melalui rekayasa dan rancang bangun peralatan, serta memasyarakatkan budaya teknologi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
	Jenis kegiatan	- Rekayasa dan rancang bangun peralatan - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Padalarang)
	Sasaran	Industri kecil menengah dan masyarakat desa
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Disain dan rekayasa 1 (satu) unit <i>dryer</i> yang terdiri dari 1 (satu) sistem tungku <i>force draft</i> , 1 (satu) sistem <i>dryer chamber</i> , 1 (satu) sistem sirkulasi udara, 1 (satu) sistem spray, sensor temperatur dan kelembaban - 1 (satu) unit <i>sawn Timber</i> - 1 (satu) unit <i>chemical treatment tank</i>
	Masalah	- Penerapan teknologi ini masih belum selesai, karena peralatan yang dibangun belum berfungsi secara optimal akibat tidak adanya sistem alat pengontrol. - Dana tidak mencukupi sehingga peralatan yang sangat dominan dalam menentukan kualitas produk tidak dapat dibeli
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.69	Nama upaya	Penerapan Teknologi Perlakuan Panas di Sentra Industri Pengecoran Logam Ceper-Klaten
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan penguasaan sistem dan teknologi industri pengecoran di Ceper agar pengrajin mampu membuat produk-produk cor yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu besi cor paduan tahan aus serta memacu kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan di wilayah kecamatan Ceper dengan memproduksi produk cor kebutuhan industri kimia dan pertambangan bernilai tambah tinggi di Kab. Klaten.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Klaten)
	Sasaran	Pengrajin pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Para pengrajin cor logam di Ceper Klaten dapat menyerap pengetahuan tentang teknologi pengecoran besi yang lebih tinggi dari besi cor kelabu, misalnya besi cor paduan khrom tinggi atau baja cor mangan yang dipakai sebagai bahan untuk komponen-komponen yang tahan aus. Tidak seperti teknologi pengecoran yang selama ini dikenal oleh kalangan pengrajin di Ceper, teknologi selanjutnya (perlakuan panas) sama sekali belum dikenal padahal teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan sifat-sifat mekanis produk cor, yaitu dengan cara memanipulasi perubahan-perubahan struktur mikro dari logam yang bersangkutan

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Koperasi yang bermitra belum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Penerapan teknologi memberikan manfaat dan peluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh IKM
2.1.70	Nama upaya	Pengembangan Bahan Baku Dasar Penunjang Industri Perikanan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Transportasi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Pengembangan metode budi daya <i>Artemia Salina</i> dengan cara semi intensif dengan menggunakan metode mono kultur di lahan tambak garam serta budi daya dengan menggunakan bak pemeliharaan.
	Jenis kegiatan	Pelatihan dan Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Rembang)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	Pengembangan dengan metode ini pada hakekatnya adalah melakukan manipulasi media alam dengan menggunakan air laut dan garam yang dikendalikan tingkat salinitasnya dan diusahakan agar tidak terjadi penimbunan bahan makanan. Untuk mengatasi fenomena tersebut, dalam kolam pemeliharaan ditambahkan air water lift sehingga terjadi turbulensi/ arus olakan di sekitar air water lift sehingga makanan dapat mengambang di permukaan.
	Pencapaian hasil	Hasil budidaya <i>Artemia salina</i> ini dapat diatur sesuai dengan produk yang diharapkan (berupa Biomassa Artemia atau kista), di mana Biomassa Artemia merupakan bahan baku utama untuk pembuatan Artemia Flake sebagai bahan pakan pada budidaya udang maupun ternak. Setelah dikeringkan, kista diperjualbelikan sebagai bahan pakan alami, Bio filtrasi pada tambak garam rakyat, serta dapat pula digunakan untuk indikator tingkat pencemaran pada perairan pelabuhan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.71	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pembuat Bubuk Tempurung Kelapa sebagai Bahan Baku Pembuatan Obat Nyamuk
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-LUK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menghasilkan satu prototipe mesin pembuat bubuk tempurung kelapa dengan kapasitas tinggi serta memberikan nilai tambah pada limbah tempurung kelapa, sehingga dapat menambah penghasilan petani.
	Jenis kegiatan	- Pembuatan alat pembuat bubuk tempurung kelapa - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Semarang)
	Sasaran	Petani kelapa

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Rp. 75.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Satu buah alat pembuat bubuk tempurung kelapa
	Masalah	- Daya tahan mesin belum diketahui karena belum pernah dibuat sebelumnya. - Pemasaran produk berupa bubuk kelapa harus dijamin sehingga kegiatan ini mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan hanya dibuat arang aktif
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.72	Nama upaya	Rancang Bangun Mesin Press (<i>Packaging</i>) Kapuk sebagai Komoditi Ekspor
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-LAGG
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, terutama pengusaha kapuk di desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kab. Pati.
	Jenis kegiatan	- Rancang bangun mesin press (<i>packaging</i>) - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Pati)
	Sasaran	Pengusaha kapuk
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Kualitas pengepresan meningkat dan produktivitas meningkat
	Masalah	Kegiatan ini mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik, aspek teknis tidak dikuasai, dan masih bersifat coba-coba.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.73	Nama upaya	Pemasyarakatan Teknologi Pengolahan Air Siap Minum Skala Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Lingkungan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memasyarakatkan teknologi pengolahan air siap minum tanpa dimasak untuk skala industri kecil (kapasitas 10.000-20.000 liter/hari) yang hasilnya dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan
	Jenis kegiatan	- Bantuan alat pengolahan air siap minum - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Sidoarjo)
	Sasaran	Pengusaha air minum skala kecil
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Satu buah unit alat pengolahan air siap minum skala industri kecil (kapasitas 20.000 liter/hari) - Analisa kimia, fisika dan biologi tentang kelayakan air produk yang langsung dapat dikonsumsi (minum) - Unit pengolahan air siap minum dikelola oleh suatu yayasan di desa Bluru, Sidoarjo, Jawa Timur - Hasil produksi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep kemitraan sudah ada namun pola kemitraan belum disepakati - Sarana produksi air belum diserahterimakan pengelolaannya (walaupun saat ini sudah berproduksi)
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memberikan prospek bisnis yang baik dengan catatan lokasi sarana memenuhi kriteria tertentu, yaitu merupakan alternatif utama untuk mendapatkan air minum siap pakai
2.1.74	Nama upaya	Aplikasi Teknologi Silase Limbah Hasil Pertanian Tanaman Pangan untuk Pakan Ternak pada Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong dan Pemeliharaan Ikan Patin Secara Terpadu di Pondok Pesantren Yayasan Al-Husna Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kab. Tulungagung, Jawa Timur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Lingkungan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi teknologi pengawetan limbah Hijauan Pertanian Tanaman Pangan (HPTP) - Memanfaatkan limbah HPTP sebagai Hijauan Makanan Ternak (HMT) - Mengembangkan agroindustri berbasis teknologi pemanfaatan limbah HPTP - Mengembangkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi pengawetan limbah HPTP untuk HMT menuju Industri Kecil Pakan Ternak (IKPAT)
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Perguliran dana (mulai awal tahun 2001 s/d akhir tahun 2003)
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Tulung Agung)
	Sasaran	Peternak sapi dan ikan patin
	Pendanaan	Rp. 92.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dihasilkannya 27 ton HMT silase (untuk pakan 10 ekor sapi berat 300 kg selama 6 bulan) - Dikuasainya teknik pembuatan HMT silase dan disain serta tata letak pola peternakan terpadu di halaman rumah peternak yang menerapkan teknologi silase untuk pakan sapi
	Masalah	Konsep keterpaduan antara selulosa, budidaya sapi dan ikan patin belum tercapai, karena ada perubahan alokasi anggaran untuk ikan patin ke produksi selulosa. Perubahan tersebut tidak dilaporkan kepada pengelola sebelumnya.
	Status saat ini	Masih berjalan sampai akhir 2003
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.75	Nama upaya	Rancang Bangun Krusibel untuk Peleburan Logam Skala Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Material
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memecahkan masalah rendahnya kualitas (termal dan mekanik) dan pendeknya masa pakai krusibel produk lokal serta masalah mahal dan tidak efisiennya krusibel produk impor bagi industri kecil pengecoran logam di Indonesia
	Jenis kegiatan	- Penelitian - Pembuatan tungku kokas dan pengujian - Pelatihan - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bandung)
	Sasaran	Industri kecil pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Pembuatan tungku kokas - Penelitian dan optimisasi kondisi proses pembuatan krusibel refraktori dan gerabah - Pengujian (bahan baku, <i>refractoriness</i> , kejut suhu, susut kemudian, kuat tekan, kuat lentur, <i>slag test</i> , keporian) - Pembuatan prototipe krusibel dan aplikasi di lapangan
	Masalah	Aspek kemitraan untuk memanfaatkan peluang bisnis dari inovasi yang dihasilkan masih belum jelas.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memberikan hasil inovasi produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai usaha bisnis
2.1.76	Nama upaya	Peningkatan Teknologi Proses dan Kualitas Keramik dari Desa Benoh, Denpasar-Bali
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-PSTKP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan teknologi proses pembuatan dan kualitas keramik dari desa Benoh, Denpasar, Bali.
	Jenis kegiatan	- Sarana dan prasarana (bantuan peralatan) - Bantuan teknis dan konsultasi - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Kota Denpasar)
	Sasaran	Pengrajin keramik
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Diperoleh 10 desain, 10 model dan 10 prototipe. - Diperoleh 1 rumusan formulasi: komposisi massa bodi merah Binoh suhu 1.250°C - Diperoleh 1 produk teknologi: 1 paket massa body merah Binoh - 1 proposal Peningkatan Teknologi Proses dan Kualitas Keramik dari Desa Ubung Kaja Banjar Binoh, Denpasar Bali - Kelengkapan fasilitas/peralatan berupa penyerahan bantuan peralatan: 2 set pahat ukir, 10 buah <i>handwheel</i> dan 6 buah <i>kickwheel</i> - Mulai membaiknya dekorasi dan ukir hias pada produk yang dihasilkan - Sudah didapatnya ukuran dan bentuk benda/produk yang simetris
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Program ini dapat dilanjutkan dengan mekanisme kerjasama dengan Sucofindo seperti yang telah dilakukan di tempat lain
2.1.77	Nama upaya	Penerapan Alat Pengering Tepung Tapioka Hemat Energi pada Industri Rumah Tangga di Kab. Temanggung, Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-LSDE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memasyarakatkan alat pengering tepung tapioka yang mampu mengoptimalkan sumber panas matahari. Dalam cuaca mendung, hujan atau malam hari, sumber panasnya bisa didapatkan dari pembakaran biomassa atau kompor, sehingga pengrajin tepung tapioka bisa tetap memproduksi tanpa terpengaruh perubahan cuaca. Dengan teknologi pengering yang sistem kerjanya sederhana ini diharapkan pengrajin dapat membuat dan mengembangkan sendiri peralatan tersebut
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan alat - Pembangunan gudang penampung - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Temanggung)
	Sasaran	Pengrajin tepung tapioka
	Pendanaan	Rp. 183.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - 2 unit alat pengering tepung tapioka berkapasitas 500 kg per unit per hari, 2 gudang penampung tapioka seluas 12 m² per unit, tercapainya waktu pengeringan 3 kali lebih cepat dari pengeringan biasa, tercapainya temperatur pengeringan di atas 50°C (dari 34°C), diperolehnya penurunan kadar air dari 16% menjadi 12,4%, diperolehnya penurunan kandungan koloni jamur dari 12,4 x 10² koloni/gram menjadi 7,5 x 10² koloni/gram (pengujian ke-1) dan dari 7,7 x 10³ koloni/gram menjadi 90 koloni/gram (pengujian ke-2) - Disepakatinya lokasi penempatan 2 unit alat pengering tapioka, terjalannya kerjasama antara UPT-LSDE dan dan koperasi setempat dengan ditandatanganinya MOU - Terbinanya anggota pengrajin tepung tapioka tentang pengetahuan akan teknologi pengeringan tepung tapioka yang hemat energi tanpa terpengaruh perubahan cuaca - Bertambahnya pengetahuan cara mengoperasikan peralatan pengering tapioka

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Alat ini perlu disosialisasikan ke masyarakat di lokasi lain yang membutuhkan. Selain itu, riset dan pengembangan perlu terus dilanjutkan agar kapasitas meningkat, harga makin rendah serta mutu meningkat.
2.1.78	Nama upaya	Peningkatan Produksi dan Mutu Kopra Rakyat dengan Pengering Berbahan Bakar Arang Tempurung Kelapa di Kabupaten Bengkalis
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Riau (Kab. Bengkalis)
	Sasaran	Produsen kopra
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.79	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pembuatan Briket Arang Tempurung Kelapa di Sentra Perkebunan Kelapa Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Riau (Kab. Indragiri Hilir)
	Sasaran	Petani kelapa
	Pendanaan	Rp. 195.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.80	Nama upaya	Penerapan Pendorong Air Berbaling-Baling untuk Pemberdayaan Petani Tambak Tradisional di Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan
	Sasaran	Petani tambak
	Pendanaan	Rp. 175.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.81	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pengolah Serat Alam Limbah Pabrik Kelapa Sawit
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Lampung
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 175.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.82	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pengering Gabah dengan Bahan Sekam di Kabupaten Sidrap-Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Sidrap)
	Sasaran	Petani
	Pendanaan	Rp. 165.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.83	Nama upaya	Penerapan Rancang Bangun Alat Proses Produksi Briket Arang Serbuk Gergajian di Lingkungan Industri Gergajian Kayu
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Proses dan Rekayasa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Sidrap)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 187.200.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.84	Nama upaya	Pemanfaatan Botol Plastik Bekas dan Limbah Kayu Gergajian untuk Pembuatan Papan Partikel
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT Laboratorium Uji Konstruksi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 109.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.85	Nama upaya	Teknologi Pemanfaatan Lumpur Limbah Pabrik Pulp sebagai Bahan Bangunan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Lingkungan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 110.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.86	Nama upaya	Peningkatan Mutu dan Produktivitas Industri Kecil Kerajinan Tembaga Ukir di Cepogo, Boyolali
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Material
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Boyolali: Cepono)
	Sasaran	Pengrajin tembaga ukir
	Pendanaan	Rp. 141.500.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.87	Nama upaya	Pengembangan Pasar Produk Agrobisnis Melalui Teknologi Informasi di Kabupaten Ponorogo
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Informasi dan Elektronika
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Ponorogo)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 139.600.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.88	Nama upaya	Proses Pembuatan Bubur Buah Mengkudu (<i>Morinda Citrifolia</i>) sebagai Bahan Baku Obat Alami di Desa Lawang Gintung, Kab. Bogor, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Farmasi dan Medika
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Bogor: Desa Lawang Gintung)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.89	Nama upaya	Penerapan Teknologi Industri Pengolahan Kopi Rakyat di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Desa Tanjung Menang, Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Desa Tanjung Menang)
	Sasaran	Pondok Pesantren Darul Muttaqien Desa Tanjung Menang
	Pendanaan	Rp. 182.000.000,00

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.90	Nama upaya	Penerapan Teknologi Produksi <i>Chips</i> dengan <i>Vacuum Frying</i> di DIY
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	D.I Yogyakarta
	Sasaran	Produsen keripik
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.91	Nama upaya	Penerapan Teknologi <i>Dry Klin</i> Skala Industri Rakyat dengan Kualitas Ekspor di Kabupaten Kampar Riau
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Riau (Kab. Kampar)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp. 178.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.92	Nama upaya	Pemasyarakatan Teknologi Pengolahan Sagu di Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Agroindustri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara (Kab. Kendari)
	Sasaran	Petani sagu
	Pendanaan	Rp. 160.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.93	Nama upaya	Pengembangan Teknologi Proses Produksi Tapioka Rakyat dan Pengolahan Limbah Secara Terpadu di Kabupaten Temanggung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT EPG
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Temanggung)
	Sasaran	Produsen tapioka
	Pendanaan	Rp. 200.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.94	Nama upaya	Pemberdayaan IKM di Sentra Industri Melalui Pengembangan <i>Collective Cybermarketing</i> di Sidoarjo, Tegal dan Klaten
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	- Jawa Timur (Sidoarjo) - Jawa Tengah (Tegal, Klaten)
	Sasaran	Industri kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.95	Nama upaya	Implementasi Pengering Tepung Tapioka Hemat Energi pada Industri Tepung Tapioka Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-LSDE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab. Lampung Tengah)
	Sasaran	Industri tepung tapioka rakyat
	Pendanaan	Rp. 200.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.96	Nama upaya	Aplikasi Teknologi Kelautan dalam Menunjang Manajemen Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Sekitar Perairan Kabupaten Dati II Serang
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT Baruna Jaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Banten (Kab. Serang)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.97	Nama upaya	Peningkatan Produktivitas Lahan Melalui Produksi Bibit Unggul Unggas, Ikan Lele dan Pelatihan untuk Mendukung Pemasyarakatan Teknologi Bio-Cyclofarming di Tuban
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Kawasan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Tuban)
	Sasaran	Peternak unggas dan ikan lele
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.98	Nama upaya	Aplikasi Teknologi Peralatan Penunjang Produksi pada Ladang Garam Sistem Semi Intensif
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Direktorat Teknologi Transportasi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta
	Sasaran	Petani garam
	Pendanaan	Rp. 125.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.99	Nama upaya	Pembuatan Alat Penyeimbang Propeller untuk Meningkatkan Kualitas Produk Pengrajin Propeller Konvensional
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat
	Sasaran	Pengrajin <i>propeller</i> konvensional
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.100	Nama upaya	Pelatihan Manajemen Produksi dan Teknologi Pembuatan Pakan Tambak dari Bahan Baku Lokal
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Pusklat
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur
	Sasaran	Petani tambak / produsen pakan tambak
	Pendanaan	Rp. 80.700.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.101	Nama upaya	Pelatihan Pembuatan Kompon dan Barang Karet untuk Industri Kecil
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Pusklat
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bandung)
	Sasaran	Produsen kompon dan barang karet
	Pendanaan	Rp. 64.354.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.102	Nama upaya	Pelatihan Penggunaan Teknologi <i>Fish Finder</i> untuk Nelayan Ikan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Puskdiklat
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 58.220.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.103	Nama upaya	Pelatihan Pengembangan Usaha Pengecoran Logam
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Puskdiklat
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Tegal)
	Sasaran	Pengrajin pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 59.120.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.104	Nama upaya	Aplikasi Biofertilizer Mikroriza Arbuskular dan Probiotik untuk Peningkatan Produktivitas Sapi Bali di Nusa Penida
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, Balai Pengkajian Bioteknologi (Direktorat)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan Prop. Bali
	Tujuan upaya	Peningkatan produktivitas Sapi Bali (<i>Bos sondaicus</i>) di Kecamatan Nusa Penida melalui penerapan teknologi biofertilizer mikoriza arbuskular dan probiotik
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Studi literatur - Diskusi dengan pakar - Pembuatan sarana dan prasarana
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Kec. Nusa Penida)
	Sasaran	Peternak Nusa Penida
	Pendanaan	Rp. 137.000.000,00 (PDT) Rp. 125.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi inokulum mikoriza arbuskular - Produksi probiotik untuk ternak sapi - Pembuatan rumah persemaian ukuran 6 x 17,5 m² - Aplikasi mikoriza pada tanaman hijauan makanan ternak - Aplikasi probiotik pada ternak sapi
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Produk mikoriza arbuskular dan probiotik siap diaplikasikan - Aplikasi mikoriza pada HMT meningkatkan pertumbuhan pada saat persemaian - Aplikasi probiotik selama 6 minggu meningkatkan bobot sapi rata-rata 6-7 kg
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala musim kemarau. - Aplikasi di <i>green house</i> kemungkinan berhasil cukup tinggi, tetapi membutuhkan waktu yang lama.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.105	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pengolahan Karet Alam menjadi Bahan Baku Industri di Muara Enim
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TA (Direktorat)
	Instansi terkait	Bappeda Kabupaten Muara Enim
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemakmuran petani karet rakyat dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang telah dimiliki - Meningkatkan pendapatan daerah setempat
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Desain dan pembuatan peralatan - Bantuan teknis penggunaan alat
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab. Muara Enim)
	Sasaran	KUD "Berkas" Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim
	Pendanaan	Rp. 157.700.000,00 (BPPT) Rp. 160.000.000,00 (Mitra)

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Desain peralatan pengolah karet - Pembuatan peralatan pengolah karet - Pemasangan peralatan pengolah karet - Uji coba pengolahan karet mentah menjadi karet lembaran
	Pencapaian hasil	Dihasilkan <i>prototype</i> alat pengolah karet lembaran kapasitas 2 ton karet kering / 8 jam operasi
	Masalah	Belum tersedia sumber air baku (belum adanya sumur yang seharusnya dibuat oleh pemda / Cipta Karya)
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.106	Nama upaya	Unit Pengelolaan Pasca Panen Hasil Laut dengan Teknologi Konservasi Energi Matahari di Pulau Sumbawa
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-LSDE (Direktorat)
	Instansi terkait	Universitas Samawa
	Tujuan upaya	Menyediakan dan alih teknologi pembuatan salah satu sarana produksi pasca panen bidang perikanan laut, yaitu alat pengering surya untuk memperbaiki cara pengeringan tradisional (penjemuran biasa) yang mempunyai banyak kelemahan dan hasilnya kurang sehat (higienis)
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan peralatan - Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kab. Sumbawa: Desa Teluk Santong, Sumbawa Besar)
	Sasaran	Koperasi "Mina Cahaya"
	Pendanaan	Rp. 182.000.000,00 (PDT) Rp. 45.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan alat pengering surya yang hemat energi dan higienis - Melatih dan menyiapkan tenaga terampil dalam penggunaan pengering tenaga surya - Melatih tenaga setempat untuk merawat dan membuat alat pengering tenaga surya
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatur di ruang pengering mencapai 430 °C dan ini merupakan temperatur ideal untuk pengeringan ikan. Proses pengeringan ikan memerlukan waktu sekitar 18 jam dari kadar air awal 65% sampai kekeringan 30% - Hasil pengeringan ikan 1000 kg tembang, pada akhir pengeringan menjadi 400 kg ikan kering. Hasil pengeringan ini tidak bisa dipastikan secara tepat karena tergantung jenis ikan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Peran masyarakat selaku pengguna terasa kurang. Untuk masa datang kegiatan ini lebih mempunyai prospek bagus apabila dilakukan di kawasan pesisir - Dalam kegiatan ini, perguruan tinggi lebih berperan sebagai perantara. Di masa datang, peran langsung IKM/UKM akan lebih bermanfaat - Manfaat teknologi tersebut di masyarakat belum terlihat. Perlu sosialisasi dari pihak perguruan tinggi.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.107	Nama upaya	Peningkatan Teknologi dan Pemberdayaan Industri Kecil Keramik di Desa Penunjak Lombok
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TM (Direktorat)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki sistem produksi keramik tradisional, memperkenalkan komposisi yang tepat, serta memperkenalkan efisiensi produksi melalui mekanisasi peralatan proses produksi - Mengembangkan keramik gerabah dengan sentuhan seni lokal yang berorientasi pasar pada para pengrajin binaan serta prospeknya
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana dan prasarana - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Lombok Tengah: Desa Penunjak)
	Sasaran	25 pengrajin keramik/gerabah
	Pendanaan	Rp. 164.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (6 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan modifikasi bahan baku dan disain yang akan dijadikan prototipe/percontohan pada pelaksanaan pembinaan - Melakukan pendampingan terapan teknologi bagi 25 orang pengrajin keramik mengenai proses pengolahan bahan baku. Penerapan komposisi bahan baku standar, penerapan desain baru dan pendampingan dalam pengoperasian peralatan pengolahan bahan baku serta modifikasi bentuk keramik dengan menggunakan alat putar hand wheel
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - 25 orang pengrajin keramik yang dibina telah mampu mengolah bahan baku dengan komposisi yang lebih tepat serta adanya peningkatan kualitas produk yang lebih simetris dengan dekorasi yang lebih beragam melalui teknik ukir dan tempel sehingga menambah peluang pasar - Telah dibuat 1 unit alat/mesin pengolah bahan baku serta 10 unit <i>handwheel</i> sehingga pengrajin dapat mengaplikasikan materi bentuk dan ukir yang telah diperoleh sekaligus kapasitas produksi meningkat
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.108	Nama upaya	Pembangunan Industri Kecil Daur Ulang untuk Menangani Sampah Pasar Tradisional di Desa Margaasih Kab. Bandung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TL (Pusat)
	Instansi terkait	Koperasi Swamandiri
	Tujuan upaya	Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, menciptakan peluang usaha di bidang daur ulang sampah dan memasyarakatkan teknologi tepat guna daur ulang sampah
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data - Desain dan pembuatan peralatan - Sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Bandung: Desa Margaasih)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Koperasi dan masyarakat
	Pendanaan	Rp. 64.500.000,00 (PDT) Rp. 15.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (7 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data jumlah sampah serta karakteristik sampah pasar - Pendisainan bangunan/<i>plant</i> IKDU dan peralatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kondisi pihak mitra - Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi <i>plant</i> IKDU - Proses pembuatan kompos, pembuatan kertas daur ulang, dan pengepresan plastik - Pemanfaatan hasil
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Tertanganinya sampah pasar sebanyak 1-3 m³ per hari - Produk kompos, kertas daur ulang dan pengepresan plastik - Terlatihnya 10 orang untuk menjalankan IKDU sampah
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.109	Nama upaya	Penerapan Teknologi Mikroba Probiotik untuk Pemulihan Kualitas Lingkungan Perairan Tambak Udang
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TL (Direktorat)
	Instansi terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemalang
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan teknik aplikasi mikrobaprobiotik pada lahan tambak yang rusak sebagai lokasi percontohan, sehingga petani setempat dapat belajar melalui mekanisme transfer pengetahuan - Memperbaiki kualitas perairan tambak yang selama ini menyebabkan turunnya produktivitas udang akibat tingginya beban lingkungan dari unsur kimia, sekaligus mengurangi biaya pemeliharaan tambak
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan peralatan - Pendampingan - Monitoring
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Pemalang: Desa Limbangan, Kec. Ulujami)
	Sasaran	Koperasi Perikanan Darat "Mino Rejo"
	Pendanaan	Rp. 83.400.000,00 (Iptekda) Rp. 10.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dan pengolahan lahan pratebar - Perancangan sistem sirkulasi air dingin dan biofertilizer - Aplikasi mikroba probiotik lokal - Monitoring kualitas air - Pemeliharaan udang - Panen dan pasca panen
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Turunnya parameter berbahaya: NO₃, NO₂, H₂S, SO₄, dan NH₃ - Survival rate udang rata-rata 80% - Turunnya pemakaian obat-obatan sampai 50% - Pada kepadatan tebar 10/m³ didapat size udang 35 ekor - Rekomendasi pola pemeliharaan udang yang ramah lingkungan
	Masalah	Kegiatan ini belum banyak melibatkan petani setempat dan lebih banyak melakukan uji produk-produk probiotek. Sebaiknya melakukan kerjasama dengan ITB (produsen) untuk dipertemukan dengan investor

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.110	Nama upaya	Otomasi Mesin <i>Punch/Stamping</i> Berbasis PLC pada Industri Logam di IKM Ngingas Sidoarjo
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIAM (Direktorat)
	Instansi terkait	PT. Sabaru, UKM "Ngingas", Sidoarjo, Jawa Timur
	Tujuan upaya	Merancang bangun alat otomasi mesin <i>punch/stamping</i> berbasis PLC pada industri logam di IKM "Ngingas", Sidoarjo
	Jenis kegiatan	- Pembuatan peralatan - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	- DKI Jakarta - Jawa Timur (Kab. Sidoarjo: Waru)
	Sasaran	Industri kecil menengah logam
	Pendanaan	Rp. 130.000.000,00 (BPPT)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	Persiapan: - Studi pustaka/kajian literatur - Survei industri-industri di lingkungan IKM - Koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan rancang bangun: - Identifikasi proses produksi - Disain sistem otomasi dan transmisi - Pembuatan model otomasi tanpa beban - Uji model peralatan - Persiapan pembuatan panel kontrol dan konstruksi sistem transmisi - Penempatan peralatan di lokasi serta test dan analisa kinerja peralatan - Pembuatan laporan
	Pencapaian hasil	Diperoleh alat otomasi mesin <i>punch/stamping</i> berbasis PLC pada Industri Logam di IKM Ngingas Sidoarjo
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.111	Nama upaya	Diseminasi Teknologi Konvensional untuk Rancang Bangun Kapal Nelayan di Daerah Cilacap
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIST (Pusat)
	Instansi terkait	Pemkab Cilacap
	Tujuan upaya	Mensosialisasikan teknologi konvensional untuk rancang bangun kapal nelayan bagi para pengrajin kapal kayu tradisional dan nelayan
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi (Sosialisasi)
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Cilacap)
	Sasaran	Masyarakat nelayan dan pengrajin kapal kayu tradisional
	Pendanaan	Rp. 93.000.000,00

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (6 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	Telah dilaksanakan diseminasi teknologi konvensional untuk rancang bangun kapal nelayan yang diikuti oleh 30 orang peserta terdiri dari nelayan maupun pengrajin kapal kayu tradisional, pada tanggal 18-19 September 2002, bertempat di Pemkab Cilacap
	Pencapaian hasil	Terlaksananya diseminasi teknologi konvensional untuk rancang bangun kapal nelayan bagi para pengrajin kapal kayu tradisional dan nelayan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.112	Nama upaya	Rancang Bangun Peralatan: Aplikasi Teknologi Pengolahan Produk Perikanan Laut
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIT
	Instansi terkait	Bappeda Kota Mataram
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh buangan limbah ikan dan limbah hasil pengolahan ikan - Memberikan nilai tambah secara ekonomis melalui pengolahan ikan atau limbah ikan yang sudah tidak dapat dikonsumsi atau diperdagangkan lagi menjadi produk yang bermanfaat - Menyediakan komponen alternatif pakan ternak atau pakan ikan buatan yang kandungan nutrisinya bisa dikontrol - Memungkinkan untuk dioperasikan sebagai kegiatan industri rumah tangga atau industri kecil untuk peningkatan pendapatan - Mempunyai rancangan yang relatif sederhana sehingga bisa dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat pengguna - Menyebarluaskan paket percontohan pengolahan secara mekanisasi, yang terhambat karena keengganan nelayan atau peternak melakukan investasi mekanisasi yang diantaranya disebabkan oleh tingginya harga alat dan suku cadang produksi. Selain itu alat buatan pabrik juga sering dianggap rumit dalam pengoperasian dan perawatannya
	Jenis kegiatan	Sarana dan prasarana (rancang bangun)
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kota Mataram: Ampenan Selatan)
	Sasaran	Dinas Pertanian Mataram, nelayan dan peternak
	Pendanaan	Rp. 135.000.000,00 (PDT) Rp. 500.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan mitra - Penyiapan lokasi dan layout plant - Modifikasi rancangan peralatan - Perakitan peralatan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan lokasi - Terelesaikannya pembuatan komponen internal - Terelesaikannya perakitan sebagian peralatan (unit pengering, unit penekan dan penggiling) - Tersusunnya rencana layout plant dan sistem utilitas di lokasi
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.113	Nama upaya	Rancang Bangun Sistem Pengering pada Skala Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bandung
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
	Pelaksana	BPPT, BTMP (Direktorat)
	Instansi terkait	Koperasi Usaha Bersama Mekarjaya (Mitra Kerja)
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat peralatan sistem pengering dengan memanfaatkan energi termal secara efektif dan efisien - Meningkatkan mutu anyaman dengan bahan baku yang memiliki mutu baik dalam jumlah maupun waktu
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Disain dan pembuatan peralatan - Pengujian alat
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Bandung: Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung)
	Sasaran	Kelompok pengrajin
	Pendanaan	Rp. 138.500.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (6 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelusuran data dan informasi baik di lapangan maupun referensi - Detail perancangan peralatan sistem pengering - Pengadaan peralatan seperti heat exchanger, blower dan source panas - Pembuatan ruang pengering dan ducting - Perakitan - Pengujian peralatan sistem pengering
	Pencapaian hasil	Terwujudnya sistem pengering yang mudah dalam pengoperasian dan perawatan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.114	Nama upaya	Rancang Bangun dan Rekayasa Peralatan Pembuatan Keramik untuk Industri Kecil di Gowa, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIP (Direktorat)
	Instansi terkait	Dinas Perindag Kab. Gowa
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penguasaan teknologi proses di sektor Industri Kecil Gerabah/Keramik agar mampu membuat produk-produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi - Mengintroduksi peralatan produksi utama berupa tungku pembakaran gerabah/keramik
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana dan prasarana - Uji coba alat
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Gowa: Desa Borongloe, Kec. Bontomarannu)
	Sasaran	Industri kecil gerabah/keramik dan KUB "Bontote'ne", Kab. Gowa
	Pendanaan	Rp. 145.262.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Uji bahan baku gerabah/keramik untuk kesempurnaan rencana produksi gerabah/keramik di lokasi - Konstruksi pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik - Uji coba peralatan untuk menentukan kinerja peralatan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Desain tungku pembakaran gerabah/keramik dengan sistem api balik, uji fisik tanah liat untuk bahan baku gerabah/keramik - Kerjasama riset, gambar teknik, tungku pembakaran gerabah/keramik dengan kapasitas 6 m³
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tungku kurang (masyarakat kurang antusias) - Kegiatan lebih ditekankan pada pembuatan alat, sedangkan kegiatan dan penggunaannya oleh pengguna kurang disosialisasikan.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.115	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Pengolah Serat Alam dari Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Pembuatan Papan Partikel
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini berupa rancang bangun alat pengolah limbah pabrik kelapa sawit yang berupa tandan kosong sawit menjadi <i>fiberboard</i> atau papan partikel. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIP (Direktorat)
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Coco Torus Mardalan - Pemda setempat
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Disain dan pembuatan peralatan - Monitoring
	Wilayah pelaksanaan	Banten (Kab. Pandeglang: Tanjung Lesung, Cigeulis)
	Sasaran	Industri <i>spring bed</i>
	Pendanaan	Rp. 109.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang bangun alat berupa mesin press (<i>sheet forming</i>) untuk pembentukan papan dari bahan serat - Membuat sistem kontrol pengatur panas dan tekanan untuk mengeraskan papan partikel - Menyiapkan lokasi pengolahan papan partikel
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Draft kerjasama antara BPPT dan PT. Coco Torus - Pengadaan mesin berupa mesin press (<i>sheet forming</i>) dan sistem kontrol pengatur panas - Produk yang dihasilkan berupa fiber board dengan ukuran 40 x 40 cm.
	Masalah	Perbedaan jenis bahan baku yang digunakan dengan bahan baku yang tercantum dalam perjanjian kerjasama: bahan baku yang dituju dalam perjanjian kerjasama adalah limbah tandan kosong sawit (TKS), padahal yang digunakan adalah limbah (sabut) kelapa biasa.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.116	Nama upaya	Rancang Bangun Sistem Apung Darat Guna Meningkatkan Produktivitas Tangkapan Kapal Ikan Tradisional di Kab. Cilacap
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT-BPPH (Direktorat)
	Instansi terkait	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cilacap
	Tujuan upaya	Meningkatkan waktu tangkap dan daerah jangkauan tangkapan yang potensial dengan menggunakan sistem apung yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan kapal dan nelayan
	Jenis kegiatan	- Disain dan pembuatan peralatan - Uji coba alat
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Cilacap)
	Sasaran	Kelompok nelayan
	Pendanaan	Rp. 115.000.000,00 (BPPT) Rp. 90.000.000,00 (Mitra)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (7 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	- Melaksanakan survei lapangan - Analisa teknis - Pembuatan prototipe dan uji coba
	Pencapaian hasil	- Meningkatkan jumlah tangkapan ikan per tahun - Meningkatkan pendapatan nelayan dan daerah - Memanfaatkan potensi ikan secara lestari pada daerah yang masih kurang terjamah
	Masalah	- Teknologi yang digunakan belum pernah diuji coba sebelumnya - Kepemilikan desain sistem - Pengelolaan prototype - Terlalu berat pada kegiatan penelitian
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.117	Nama upaya	Pemberdayaan IKM Logam untuk Pengecoran Komponen Motor Bakar Aluminium
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TM (Direktorat)
	Instansi terkait	PT. Silika Foundry
	Tujuan upaya	Peningkatan kemampuan teknologi pada IKM/UKMK untuk membuat komponen motor bakar maupun pola
	Jenis kegiatan	- Disain dan pembuatan peralatan, - Informasi proses pembuatan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bandung)
	Sasaran	Kelompok usaha pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 91.280.000,00 (PDT)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan potensi SDM di daerah dalam bidang desain komponen motor bakar maupun pembuatan pola dengan cara memberikan dukungan teknologi yang antara lain berupa informasi mengenai proses pembuatan pola baik untuk cetakan bentuk yang sederhana maupun untuk bentuk yang kompleks, agar dapat menghasilkan produk cor yang berkualitas - Pembuatan prototipe Pola Komponen motor bakar yang digunakan untuk pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir - Dukungan teknologi yang serupa dapat diberikan kepada IKM pola serta IKM logam di daerah lain sesuai dengan produk unggulan/kebutuhan daerah tersebut
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - SOP pembuatan pola - 1 buah prototype pola <i>blok engine</i> - 1 buah prototype pola <i>oil plan</i>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diketahui berapa potensi scrap aluminium daerah, apakah mampu mensuplai industri motor bakar yang dimaksud - Pelatihan yang direncanakan tidak dilakukan
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.1.118	Nama upaya	Optimalisasi Potensi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk Pembuatan Komponen Motor Bakar
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TM (Direktorat)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan kemampuan teknologi pada IKM/UKMK untuk membuat komponen motor bakar maupun pola
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi teknologi - Pembuatan prototipe
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bandung)
	Sasaran	Industri kecil pengecoran
	Pendanaan	Rp. 183.880.000,00 (PDT)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 (8 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan potensi SDM di daerah dalam bidang desain komponen motor bakar maupun pembuatan pola dengan cara memberikan dukungan teknologi yang antara lain berupa informasi mengenai proses pembuatan pola baik untuk cetakan bentuk yang sederhana maupun untuk bentuk yang kompleks, agar dapat menghasilkan produk cor yang berkualitas - Pembuatan prototipe Pola Komponen motor bakar yang digunakan untuk pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir - Dukungan teknologi yang serupa dapat diberikan kepada IKM pola serta IKM logam di daerah lain sesuai dengan produk unggulan/kebutuhan daerah tersebut
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - SOP pembuatan pola - 1 buah prototype pola <i>blok engine</i> - 1 buah prototype pola <i>oil plan</i>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang terlihat kerjasama dengan masyarakat - Kurang terlihat penerapan pada masyarakat luas/daerah setempat
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.119	Nama upaya	Strategi Pengembangan Usaha Peternakan di Kabupaten Wajo
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P2KDT
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Wajo)
	Sasaran	Peternakan
	Pendanaan	Rp. 115.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.120	Nama upaya	Fasilitas Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir Krawang
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, BIT
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Krawang)
	Sasaran	Masyarakat pesisir
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.121	Nama upaya	Pabrik Pengolahan <i>Crumb Rubber</i> Mini di Pesantren Al Islah Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Ilir)
	Sasaran	Pesantren
	Pendanaan	Rp. 123.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.122	Nama upaya	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengolahan Batang Padi untuk Pembuatan Dos Tempat Telur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)
	Sasaran	Usaha kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp. 95.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.123	Nama upaya	Teknologi Ekstraksi Minyak Kelapa dengan Cara Semi Mekanis
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Majene)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 145.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.124	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pengolahan Karet Alam Menjadi Bahan Baku Industri di Muara Enim
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT < P3TA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab. Muara Enim)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 70.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.125	Nama upaya	Penerapan Teknologi Penanganan Pasca Panen Gabah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Lamongan)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 92.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.126	Nama upaya	Pemberdayaan Peternakan Rakyat Terpadu Melalui Penerapan Teknologi Industri Pakan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TBP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)
	Sasaran	Peternak
	Pendanaan	Rp. 145.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.127	Nama upaya	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Limbah Jagung untuk Pakan Ternak dan Pupuk Organik di Gorontalo
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TBP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Gorontalo (Gorontalo)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.128	Nama upaya	Penerapan Teknologi dan Diseminasi Produksi Benih Ikan unggul di Kab. Bogor, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TBP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Bogor)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 105.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.129	Nama upaya	Penerapan Teknologi dan Rancang Bangun Peralatan Pengeringan dan Produksi Serbuk Minuman Berbasis Rimpang-Rimpangan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P2TFM
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kota Bekasi)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.130	Nama upaya	Pengurangan Penggunaan Air di Usaha Kecil Pencucian Botol untuk Menunjang Produksi Bersih
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
	Pelaksana	P3TL
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon)
	Sasaran	Usaha kecil
	Pendanaan	Rp. 90.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.131	Nama upaya	Pemanfaatan Teknologi Bambu Laminasi untuk Pengembangan UKM Furniture dan Kerajinan di Bogor, Jawa Barat
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TL
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bogor)
	Sasaran	Usaha kecil menengah furniture dan kerajinan
	Pendanaan	Rp. 90.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.132	Nama upaya	Pelatihan dan Bantuan Teknik Pembuatan Kokas Briket Batubara Kaway XVI Aceh Barat sebagai Kokas Metalurgi untuk Industri Pengecoran Logam
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TPSE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Nanggroe Aceh Darussalam (Kawai)
	Sasaran	Industri pengecoran logam
	Pendanaan	Rp. 100.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.133	Nama upaya	Penerapan Teknologi Pembakaran Kapur Menggunakan Dual Fuel sebagai Bahan Bakar
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TPSE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Barat (Kota Padang)
	Sasaran	Usaha pembakaran kapur
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.134	Nama upaya	Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengolahan Produk Buah Salak
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TPSE
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Wonosobo)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.135	Nama upaya	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Agroindustri Terpadu untuk Memberdayakan Lahan Pertanian di Kab. Soppeng
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TPSLK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 120.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.136	Nama upaya	Pemanfaatan Kawasan Pesisir Gorontalo untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut (<i>Eucheuma spp</i> dan <i>Gracilaria spp</i>)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TPSLK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Gorontalo (Gorontalo)
	Sasaran	Nelayan
	Pendanaan	Rp. 120.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.137	Nama upaya	Peningkatan Kualitas Teknologi Pembuatan Kapal Fibre Glass untuk Mendukung Pengembangan Masyarakat UKM Propinsi NTB
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIST
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	NTB
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 134.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.138	Nama upaya	Rancang Bangun Alat Proses Pemintalan dan Pewarnaan Benang Sutera di Kab. Soppeng
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Rancang bangun
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)
	Sasaran	Industri benang sutera
	Pendanaan	Rp. 105.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.139	Nama upaya	Penerapan Teknologi Peleburan Biji dengan <i>Devided Blast Cupola</i> di UPT Lab. Logam Ceper, Klaten
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIP
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Klaten)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 110.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
2.1.140	Nama upaya	Pelatihan Pembuatan Bagan Penangkap Ikan Tipe Semi Benam Beserta Alat Tangkapnya di Kab. Lombok Barat, NTB
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT BPPH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kab. Lombok Barat)
	Sasaran	Usaha kecil menengah
	Pendanaan	Rp. 92.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.141	Nama upaya	Disain Kapal dan Alat Tangkap yang Sesuai Kondisi Perairan di Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	UPT BPPH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Diseminasi teknologi
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan
	Sasaran	Industri kapal dan alat tangkap
	Pendanaan	Rp. 115.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.142	Nama upaya	Peningkatan Kemampuan Teknologi Pembuatan Paduan Perunggu sebagai Bahan Gamelan dan Uang kepeng untuk Para Perajin Kecil di kab. Klungkung, Bali
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT LUK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Kab. Klungkung)
	Sasaran	Perajin kecil perunggu
	Pendanaan	Rp. 150.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.143	Nama upaya	Penerapan Teknologi Tepat Guna Proses Pembuatan Baling- Baling Kapal di Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, UPT BPPH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan
	Sasaran	Industri baling-baling kapal
	Pendanaan	Rp. 135.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
2.1.144	Nama upaya	Rancang Bangun Alat <i>Hammer Mill</i> untuk Diaplikasikan di Tambang Kapur Rakyat di Desa Sumberejo, Kec Turen, Jawa Timur
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diseminasi Teknologi dalam bentuk Penerapan Iptek di Daerah (Iptekda) yang diimplementasikan dalam Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID).
	Penanggung jawab	BPPT
	Pelaksana	BPPT, P3TIAM
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Rancang bangun
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Malang: Desa Sumberejo, Kec. turen)
	Sasaran	Pertambangan kapur rakyat
	Pendanaan	Rp. 100.000.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
3. Departemen Dalam Negeri		
3.1	Nama upaya	Pengembangan Pelatihan Masyarakat
	Deskripsi upaya	<p>Upaya ini terdiri dari 2 komponen, yaitu Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat, serta Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan analisa dan pendataan - Identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan masyarakat - Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan analisis jenis kebutuhan pelatihan masyarakat - Penyiapan matrik kurikulum dan silabi pelatihan masyarakat - Penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat. <p>Sedangkan Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat - Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pola penetapan peserta dan fasilitator dalam penyelenggaraan pelatihan masyarakat - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kerjasama pelatihan dengan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga donor - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
	Instansi terkait	Balai PMD Malang, Balai PMD Yogyakarta dan Balai PMD Lampung, Pemerintah Daerah, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	Tujuan upaya	Untuk memberikan pembekalan kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
	Jenis kegiatan	<p>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan kelompok-kelompok. Kegiatan yang telah dilakukan di dalam pelatihan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun pedoman pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat. - Menyusun paket pelatihan, antara lain: matrik dan kurikulum pelatihan. Modul pelatihan terdiri dari 11 buku dengan 23 sub pokok bahasan. - Menyiapkan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masyarakat, yaitu: petunjuk penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan masyarakat, dan laporan pelaksanaan pelatihan. - Melaksanakan pelatihan pelatih kelompok masyarakat (POKMAS) Tingkat Nasional di Jakarta yang diikuti oleh pejabat yang menangani Pelatihan Masyarakat pada Kantor BPM seluruh Indonesia dan secara selektif mewakili peserta dari Kabupaten, masing-masing 2 (dua) orang dengan kriteria Kabupaten yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Fasilitas pelatih berasal dari berbagai unsur diantaranya dari: Ditjen PMD, Balai PMD Yogyakarta, GTZ. Seluruh peserta menerima Setifikat Pelatihan Pelatih Pokmas Tingkat Nasional tahun 2002.

No.	Item	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pelatihan Kelompok Masyarakat Tingkat Nasional Tahun 2002, sebagai berikut: bidang pelatihan pelatih kelompok masyarakat menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, selama Pelatihan Pelatih berlangsung telah tercipta suasana belajar bagi peserta pelatih dan saling tukar menukar informasi dalam upaya mewujudkan kemampuan masyarakat yang dapat menghasilkan peningkatan peran dalam pembangunan, koordinasi antara Pusat dan daerah masih mantap sesuai dengan yang diharapkan. <p>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan di 17 provinsi. Dari hasil monitoring dan Evaluasi telah disusun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumen/Kuesioner sebagai alat Bantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan masyarakat. - Jenis pelatihan yang diselenggarakan pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan hidup bagi seluruh kelompok masyarakat. - Pendekatan yang dilakukan dalam pelatihan secara partisipatif, sehingga tercipta dinamika pelatihan yang kondusif. - Penyampaian materi oleh para Fasilitator dan Narasumber cukup menambah wawasan yang akan dijadikan bahan materi dalam menindak lanjuti pelatihan terhadap sasaran di daerah masing-masing. - Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan di 17 Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yaitu diutamakan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga para kelompok masyarakat.
	Wilayah pelaksanaan	Beberapa provinsi di Indonesia.
	Sasaran	Utama: Aparat pemberdayaan masyarakat desa (PMD) propinsi dan kabupaten/kota yang secara langsung melakukan pelatihan masyarakat di wilayahnya.
	Pendanaan	Pembiayaan program ini bersumber dari APBN Tahun 2002 senilai Rp.198.638.000,- Pembiayaan ini dilakukan melalui Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengurus kelompok Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.
	Waktu pelaksanaan	Januari - Desember 2002.
	Mekanisme pelaksanaan	Memfasilitasi program-program yang dibiayai oleh APBN Tahun 2002 (program pengembangan masyarakat, program pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha ekonomi) melalui penetapan kebijakan seperti pedoman umum.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja di lingkungan Ditjen PMD guna mengoptimalkan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat. - Belum terinformasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan pelatihan masyarakat pada Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat. - Masih rendah dukungan program dari Pusat untuk Daerah setelah Pasca Pelatihan. - Belum terlaksananya pembinaan pelatihan yang berkesinambungan. - Belum adanya evaluasi dampak pasca pelatihan untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam prestasi kerja yang ditunjukkan oleh para alumni pelatihan. - Keterbatasan dana pendamping dan fasilitator untuk melakukan pelatihan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah mengagendakan kerjasama dengan daerah daam penyelenggaraan pelatihan termasuk dalam penyediaan dana dan fasilitator.

No.	Item	Penjelasan
		<p>Dengan adanya permasalahan tersebut, maka ditindaklanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dengan sektor terkait. - Subdit pelatihan masyarakat agar lebih proaktif dalam menyikapi situasi dan kondisi dalam mencari informasi program-program pelatihan khususnya dari BLN. - Penyatuan gerak langkah dalam peningkatan kualitas SDM dengan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lampung, Yogyakarta, dan Malang). - Dalam rangka peningkatan kualitas pelatih dan mengisi kekosongan pelatih yang sudah pensiun, diperlukan penyegaran kembali pelatihan metodologi melalui TOT di Jakarta. <p>Perlu menginventarisir jenis-jenis pelatihan masyarakat yang dilaksanakan oleh Ditjen PMD dengan nuansa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.</p>
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan "lembaga keuangan mikro" yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi "pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro", terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan. - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat: LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community development), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
3.2	Nama upaya	Program Pemberdayaan Perempuan
	Deskripsi upaya	<p>Program ini terdiri dari beberapa komponen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Rencana Teknis, antara lain mencakup identifikasi dan inventarisasi peran organisasi wanita di pedesaan serta pelaksanaan konsultasi teknis pemberdayaan perempuan. - Pemberdayaan dan Pemasarakatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender. - Pemantauan dan Evaluasi, mencakup: pemantauan Program P2MDBJ dan evaluasi akhir pelaksanaan Proyek INS 94/WO2 Pilot Model Gender Responsive.
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Sosial Budaya Masyarakat.
	Instansi terkait	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Kesehatan, dan Komnas Perempuan.

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam proses pembangunan, meningkatkan kemandirian perempuan, dalam rangka usaha pemberdayaan perempuan serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.
	Jenis kegiatan	Kegiatan yang dikembangkan dalam program pemberdayaan perempuan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi gender; - Pelaksanaan kegiatan temu konsultasi; - Penyusunan laporan evaluasi.
	Wilayah pelaksanaan	Beberapa propinsi di Indonesia.
	Sasaran	Pemda, masyarakat dan keluarga miskin pedesaan.
	Pendanaan	Pembiayaan program ini bersumber dari APBN Tahun 2002 senilai Rp.195.600.000,- Pembiayaan dilakukan melalui Proyek Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Pembangunan.
	Waktu pelaksanaan	Januari - Desember 2002.
	Mekanisme pelaksanaan	Memfasilitasi program-program yang dibiayai oleh APBN Tahun 2002 (program pengembangan masyarakat, program pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha ekonomi) melalui penetapan kebijakan seperti pedoman umum.
	Pencapaian hasil	Melalui program ini diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang berbagai pelaksanaan program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan. Seiring dengan hal tersebut maka tindak lanjut nya adalah melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pilot Project Manajemen Pemerintahan Desa yang Responsif Gender; - Melaksanakan konsultasi teknis bagi Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan; - Melakukan pelatihan Gender Analysis Pathway bagi perencana dan pelaksana program pemberdayaan perempuan; - Penyempurnaan Kepmendagri Nomor 17 Tahun 1996 tentang TPP2W; - Penyusunan Modul Perencanaan Pembangunan Berwawasan Jender bagi Aparatur; - Pertemuan dalam rangka peningkatan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengarusutamaan jender dalam pembangunan.
	Masalah	
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan "lembaga keuangan mikro" yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi "pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro", terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan.

No.	Item	Penjelasan
	Potensi (sambungan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat: LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community development), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
3.3	Nama upaya	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	Deskripsi upaya	<p>Dalam rangka mendukung upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat, maka dikembangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga untuk Keluarga Miskin di Banten dan Palangkaraya dan Sosialisasi Ketahanan Pangan Keluarga. - Penyusunan Pedoman Umum Perlindungan Pekerja Perempuan di sektor Informal, Pedoman Umum Usaha-usaha Ekonomi Produktif Keluarga di Perdesaan, Pedoman Umum Peran LSM dalam Pemberdayaan Keluarga di Perdesaan.
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Sosial Budaya Masyarakat
	Instansi terkait	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Pengerak PKK Pusat dan Daerah, dan Komnas Perempuan
	Tujuan upaya	Untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui gerakan 10 program pokok PKK
	Jenis kegiatan	<p>Kegiatan yang dikembangkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang dilaksanakan oleh Tim Pengerak PKK Pusat. - Penyusunan Rancangan Pedoman Umum tentang Perlindungan Pekerja Perempuan di Sektor Informal. - Penyusunan Rancangan Pedoman Umum tentang Pengelolaan Usaha-usaha Ekonomi Produktif Keluarga di Perdesaan. - Penyusunan Rancangan Pedoman Umum tentang Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Keluarga di Perdesaan. - Pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) pada tanggal 9 Juni 2003 di Lumajang, dalam rangka pemberian dukungan terhadap peningkatan kualitas keluarga sejahtera. - Pelaksanaan sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (NARKOBA).
	Wilayah pelaksanaan	Beberapa propinsi di Indonesia.
	Sasaran	Masyarakat, khususnya perempuan
	Pendanaan	Pembiayaan program ini bersumber dari APBN Tahun 2002 senilai Rp.747.000.000,- yang dilakukan melalui Bagian Proyek Peningkatan Ketahanan Keluarga.
	Waktu pelaksanaan	Januari - Desember 2002.
	Mekanisme pelaksanaan	Memfasilitasi program-program yang dibiayai oleh APBN Tahun 2002 (program pengembangan masyarakat, program pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha ekonomi) melalui penetapan kebijakan seperti pedoman umum.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak direncanakan sejak awal sehingga belum terprogram, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun penyediaan dananya antara lain kegiatan HARGANAS.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah (sambungan)	<p>Dengan permasalahan tersebut, maka saran tindak lanjut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan fungsi koordinasi penyelenggaraan, pembinaan, penggerakan dan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan metode pendampingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; - Meningkatkan koordinasi dan advokasi terhadap TP. PKK Pusat; - Melanjutkan dan meningkatkan upaya-upaya pelayanan sosial dasar yang meliputi aspek kesehatan dasar keluarga dan aspek pendidikan dasar keluarga, dan aspek peningkat pendapatan keluarga; - Pengembangan HARGANAS.
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan "lembaga keuangan mikro" yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi "pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro", terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan. - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat:LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community develoment), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
3.4	Nama upaya	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	Deskripsi upaya	<p>Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan usaha pertanian dan pangan. - (a) Dalam rangka penanggulangan dampak krisis multidimensional yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, khususnya persediaan bahan pangan lokal (rumah tangga), regional, dan nasional, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan perkotaan dengan menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat dengan pendekatan kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan ketahanan pangan. Berangkat dari konsepsi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagai upaya strategis untuk menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk bergerak di bidang pangan sekaligus mendorong berkembangnya lembaga kemasyarakatan, baik di perdesaan maupun di perkotaan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi khusus urusan ketahanan pangan yang diimplementasikan dalam bentuk Lumbung Pangan. Lumbung Pangan Masyarakat

No.	Item	Penjelasan
	Deskripsi upaya (lanjutan)	<p>Desa/Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan azas dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam pengembangannya memper-hatikan potensi dan budaya masyarakat setempat. Lumbung Pangan diharapkan ke depan memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang diaktualisasikan dalam kegiatan penyimpanan, distribusi, pemasaran dan pengolahan hasil produksi. Mengingat peranan Lumbung Pangan sangat strategis dari aspek ketahanan masyarakat di bidang pangan, dalam pengembangannya perlu suatu model/ pola pembinaan secara sistematis, terintegrasi dan terkoordinasi di setiap tingkatan pemerintahan, baik menyangkut aspek organisasi/ kelembagaan maupun pemantauan dan evaluasinya. Hal ini atas pertimbangan : belum ada kejelasan pada tingkat operasional siapa berbuat apa dalam membina Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; belum ada jaringan koordinatif pembinaan dari pusat sampai desa secara sinergis; belum ada manual pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa/kelurahan sebagai lembaga cadangan pangan, perkreditan dan kegiatan lainnya; belum ada keterpaduan sistem monitoring dan evaluasi sebagai bahan pembinaan berkelanjutan; Tujuan pengembangan Lumbung Pangan: mendorong berkembangnya lembaga kemasyarakatan dan badan-badan usaha desa di perdesaan yang khusus bergerak di bidang pangan; meningkatkan kegiatan gotong royong serta kerjasama antar warga masyarakat untuk bergerak dalam urusan ketahanan pangan yang diimplementasikan dalam bentuk Lumbung Pangan; mendorong terbentuknya Bank Pangan di kawasan perkotaan; menyusun sistem Monev Lumbung Pangan secara terintegrasi dan terkoordinasi.</p> <p>(b) Selanjutnya dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, dikembangkan usaha pertanian berwawasan agribisnis yang berorientasi global, dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah yang bersangkutan. Permasalahan strategis sebagai pertimbangan pengembangan usaha tani berwawasan agribisnis, antara lain: (a) Lahan pertanian yang ada semakin menunjukkan kecenderungan berkurang sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan, terjadinya degradasi kesuburan tanah dan semakin meluasnya lahan kritis sebagai akibat pengelolaan lahan tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan; (b) Rendahnya pendapatan penduduk di perdesaan, terutama yang bekerja di sektor pertanian sangat terkait dengan struktur pertanian/ perdesaan yang kurang kondusif bagi perkembangan agribisnis yang dinamis dan kompetitif; (c) Kemampuan manajerial kelompok masyarakat yang bergerak dibidang produksi pangan masih rendah; (d) Pemahaman dan motivasi sebagian besar aparatur pemerintah pada instansi yang terkait terhadap pembinaan kelembagaan masyarakat, khususnya di bidang pangan masih rendah. Demikian pula mekanisme kerja kelembagaan dan administrasi pemerintahan masih memerlukan penyesuaian dari pola pengarahannya kepada pola pemberdayaan; (e) Luas kepemilikan lahan petani pada umumnya sangat kecil, Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas rendah, terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan, teknologi, informasi pasar, sarana pemasaran menyebabkan kesulitan upaya peningkatan produktivitas. Sebagian besar komoditas hasil-hasil pertanian masih belum mampu bersaing di pasar global karena lemahnya pengembangan standar dan mutu produk, belum efisiennya usaha pertanian dan belum tertatanya jaringan pemasaran global produk/ hasil pertanian Indonesia. (f) Penanganan masalah pangan, khususnya usaha tani yang berorientasi pada bisnis mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan perubahan sistem politik dan pemerintahan, walaupun penanganannya telah dilaksanakan secara multisektoral, namun pelaksanaannya dirasakan masih bersifat parsial. Misi yang dilaksanakan oleh masing-masing sektoral belum sepenuhnya pada pelaksanaan visi. Koordinasi penanganan masalah antar berbagai sektor, sejak dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal belum berjalan secara optimal.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Deskripsi upaya (lanjutan)	<p>- Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat yang berorientasi bisnis usaha tani merupakan langkah strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat.</p> <p>(a) Hal ini didasarkan bahwa 80 % masyarakat Indonesia adalah masyarakat tani, maka pemberdayaan kelembagaan dalam bidang pertanian terutama Kelompok Tani, Koperasi Tani Andalan (KTA) dan Koperasi Tani (KT) yang mendasarkan pada pendekatan fungsional sistem agribisnis secara utuh dan berorientasi pengembangan wilayah berbasis usaha tani, sangat penting sebagai poros penggerak pembangunan ekonomi nasional. (b) Upaya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat tani tersebut dilakukan melalui pembinaan secara intensif dengan mengembangkan sistem dan usaha tani yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis; (1) Berdaya saing, dicirikan adanya peningkatan efisiensi, mutu, harga, dan biaya produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan produktivitas serta nilai tambah; (2) Berkerakyatan, dicirikan dengan berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas dengan peluang berusaha, kesempatan kerja, dan menikmati nilai tambah (pendapatan); (3) Berkelanjutan, yang dicirikan adanya peningkatan dan pemeliharaan kapasitas sumber daya alam, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan sistem distribusi keuntungan yang adil; (4) Desentralistis, diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat.</p> <p>(c) Tujuan Penguatan Kelembagaan: (1) Meningkatkan usaha tani berwawasan bisnis dan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi komoditas unggulan daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia daerah bersangkutan; (2) Meningkatkan kemampuan kelompok tani, baik aspek manajemen maupun teknis usaha tani melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan; (3) Mewujudkan hubungan kewirausahaan antara hulu dan hilir, melalui kegiatan temu usaha di bidang agribisnis secara terencana dan berkesinambungan; (4) Mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian, industri rumah tangga pengolahan hasil-hasil pertanian yang berdaya saing dan meningkatkan aksesibilitas pasar yang berkeadilan; (5) Mendorong dan menumbuhkan terbentuknya kelompok tani agribisnis berskala mikro yang berorientasi mutu dan nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6) Meningkatkan produksi yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal, melalui optimalisasi pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan (kawasan binaan Perum Perhutani, HPH, dan lain-lain) dan kawasan di luar kawasan hutan (Ex. Program penghijauan) serta kawasan pesisir pantai; (7) Mengembangkan pola pembinaan mutu dan standardisasi guna menjamin adanya kepastian akan wujud dan mutu produk hasil-hasil pertanian sesuai permintaan pasar.</p> <p>- Pengembangan usaha perkreditan dan Simpan Pinjam.</p> <p>(1) Sejak tahun 1995/1996 Ditjen PMD cq. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat telah melakukan fasilitasi tumbuhnya Lembaga Perkreditan di Tingkat Desa yang lebih dikenal dengan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan bagi masyarakat dengan persyaratan mudah, ringan dan cepat. Hingga saat ini Lembaga UED-SP telah berjumlah 52.222 unit yang tersebar di 67.694 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. (2) Dalam rangka upaya pembinaan ke depan diperlukan informasi dan data mengenai perkembangan UED-SP di masing-masing daerah, yang memenuhi criteria berprestasi, sehat, berkembang, pemula dan tidak sehat sehingga dapat mengetahui baik keberadaan (eksistensi) maupun tingkat kemampuan UED-SP yang dilihat dari aspek pinjaman, simpanan, laba usaha dan permodalan. (3) Dalam rangka pengembangan UED-SP, telah ditetapkan dasar pelaksanaannya yaitu Instruksi Presiden tentang Bantuan Desa atau Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) yang dikembangkan sejak tahun 1995/1996. Dengan kebijakan tersebut salah satunya Pemerintah memberikan bantuan dana untuk pengembangan UED-SP dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Sejalan dengan kebijakan reformasi di berbagai bidang pemerintahan, implikasi</p>

No.	Item	Penjelasan
	Deskripsi upaya (lanjutan)	<p>utama terhadap penataan kebijakan pembangunan diantaranya penghapusan kebijakan Instruksi Presiden tersebut pada tahun 2000. Praktis, kebijakan DPD/K yang dipandang sebagai program top-down berakhir pada tahun anggaran 1999/2000. Sehingga sejak berakhirnya program tersebut sampai dengan saat ini, pembinaan UED-SP Pasca Inpres mengalami kevakuman. Masing-masing daerah tidak memiliki padoman yang jelas tentang pengelolaan UED-SP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pemasaran produksi. Program-program pemerintah yang dikembangkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi Kelompok masyarakat (Pokmas). Kenyataan menunjukkan, masyarakat pedesaan masih mengalami hambatan dalam memasarkan produk hasil usahanya, karena kurang tersedianya prasarana dan sarana pemasaran yang cepat dan mudah dijangkau. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya upaya pengembangan pemasaran sebagai bagian dari paket program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan peluang pemasaran hasil produksi masyarakat desa, maka pengembangan Pasar Desa harus dijadikan salah satu prioritas program pembangunan masyarakat. Melalui pengembangan pasar desa, pendapatan masyarakat akan meningkat dari pemasaran hasil usahanya, sehingga akan turut mendorong peningkatan penerimaan keuangan desa. Saat ini, banyak pasar desa yang pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan agar dapat dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah desa. Pengelolaan Pasar Desa saat ini masih didasarkan pada Kepmendagri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa dan Inmendagri Nomor 30 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri Nomor 91 Tahun 1991. Sejalan dengan nuansa otonomi daerah, maka akan dilakukan penyempurnaan ketentuan tersebut dengan meningkatkan menjadi Keputusan Presiden. - Pengembangan usaha ekonomi keluarga. Dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, salah satu program pemerintah yang dikembangkan Ditjen PMD adalah pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi. Dalam pelaksanaannya, setiap keluarga dalam mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi masih mengalami kesulitan, karena tidak adanya pengetahuan terhadap mengakases potensi, kurangnya kemampuan dan keterampilan, manajemen, dan permodalan. Pemerintah perlu mengembangkan fasilitasi program keperpihakan kepada keluarga miskin melalui pembekalan pelatihan pengolahan potensi keluarga, bantuan permodalan, dan kemampuan manajemen pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatannya. - Pembinaan masyarakat tertinggal. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola melalui program sektoral maupun program regional dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin. Menteri Dalam Negeri sebagai berkedudukan sebagai Koordinator Asistensi Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari tugas asistensi tersebut maka Sekretariat berkedudukan pada Sub Direktorat Masyarakat tertinggal Ditjen PMD.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat
	Instansi terkait	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara BUMN, Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Departemen Pertanian.
	Tujuan upaya	<p>Pengembangan usaha ekonomi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Usaha Pertanian dan Pangan bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas usaha produksi pertanian pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. - Program Pengembangan usaha perkreditan dan simpan pinjam bertujuan untuk Penguatan kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat yang difokuskan pada upaya penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang ada di desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, serta memberikan dukungan bantuan permodalan melalui kredit perbankan. - Pengembangan Pasar Desa bertujuan memasarkan hasil produksi desa, meningkatkan kapasitas produksi berbagai produk yang dihasilkan desa, dan penyediaan informasi pasar. - Program Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan usaha masyarakat dalam bidang usaha jasa, industri kecil, dan kerajinan rakyat, agar tercipta peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan. - Penanganan masyarakat tertinggal bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memadukan program penanggulangan kemiskinan.
	Jenis kegiatan	<p>Kegiatan yang dikembangkan dalam program usaha ekonomi masyarakat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Usaha Pertanian dan Pangan : (a) Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Lumbung Pangan. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mencakup: (1) Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; (2) Analisis hasil identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; (3) Penyusunan Standardisasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; (4) Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa dan sosialisasi Pedum; (5) Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; (6) Penyusunan draft Modul Pelatihan bagi Pengelola Lumbung Pangan; (7) Konsultasi Tenis Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat Desa/ Kelurahan; - Kegiatan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha pertanian dan usaha agribisnis, mencakup: (a) Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, dikembangkan usaha pertanian berwawasan agribisnis yang berorientasi global, dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah yang bersangkutan. (b) Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat yang berorientasi bisnis usaha tani merupakan langkah strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat. Serangkaian pelaksanaan kegiatan tahun 2002 dalam penguatan kelembagaan, terimplementasikan dalam kegiatan: (1) Penyusunan Instrumen Identifikasi Kelompok Tani dengan jenis usaha tani berwawasan bisnis berskala nilai ekonomi tinggi; (2) Uji coba instrumen sekaligus dalam upaya identifikasi Kelompok Tani dan Pondok Pesantren yang bergerak di bidang agribisnis; (3) Analisis hasil identifikasi kelompok tani dan Pondok Pesantren yang bergerak di bidang usaha agribisnis.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan (lanjutan)	<p>- Pengembangan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam: (a) Sejak tahun 1995/1996 Ditjen PMD cq. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat telah melakukan fasilitasi tumbuhnya Lembaga Perkreditan di Tingkat Desa yang lebih dikenal dengan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan bagi masyarakat dengan persyaratan mudah, ringan dan cepat. Hingga saat ini Lembaga UED-SP telah berjumlah 52.222 unit yang tersebar di 67.694 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. (b) Identifikasi dan mengevaluasi perkembangan UED-SP di masing-masing daerah, dengan kriteria berprestasi, sehat, berkembang, pemula dan tidak sehat. (c) Penyusunan rencana tindakan (action plan) konkrit sebagai lembaga keuangan mikro non bank. (d) Penyusunan pedoman umum pembinaan UED-SP Pasca Inpres Bantuan Desa atau DPD/K (masa kevakuman), agar daerah memiliki padoman yang jelas tentang pengelolaan UED-SP, dalam bentuk Keputusan Presiden tentang Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang implementasi Kebijakan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan. (e) Melaksanakan kerjasama (Pemerintah Indonesia) dengan Asian Development Bank (ADB) dalam Program The Community Empowerment for Rural Development (CERD) atau Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD), Loan Agreement Nomor 1765-INO (SF) dan 1766-INO yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 15 Desember 2002. Salah satu komponen yang dikembangkan, Pengembangan Institusi Keuangan melalui pembentukan Community Based Save Loan Organization (CBSLO) atau Lembaga Simpan Pinjam Masyarakat Desa (LSP-MD) agar berfungsi sebagai lembaga keuangan simpan pinjam di pedesaan dan berperan dalam aspek penyaluran permodalan, menyalurkan dana pinjaman kepada para pengusaha kecil masyarakat miskin yang didahului dengan kegiatan penyimpanan. (f) Selanjutnya, fasilitasi pengembangan Bank Kredit Desa (BKD) dalam rangka penyaluran kredit kepada masyarakat miskin di wilayah Jawa. Berdasarkan data, BKD seluruhnya berjumlah 5.345 unit, terdiri atas 4.518 unit aktif dan 827 unit non-aktif. Berdasarkan data, Desember 2002 loektivitas pinjaman di masyarakat seluruhnya berjumlah Rp. 205.459.022.000,- sedangkan jumlah tabungan mencapai Rp. 47.193.057.000,- dari 592.087 orang.</p> <p>- Pengembangan Pemasaran Produksi : (a) Identifikasi Pasar Desa, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan Pasar Desa (data yang masuk lebih kurang 15 % dari 29 Propinsi dan 365 Kabupaten/Kota). (b) Melakukan supervisi peninjauan lapangan ke beberapa daerah: Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Denpasar, Manado, Semarang dan Surabaya. (c) Penyusunan draft Keputusan Presiden tentang Pasar Desa sebagai Pedoman Umum Pengembangan Pasar Desa bagi Pemerintah Daerah. (d) Penyusunan Konsep Modul Pelatihan Pengelola Pasar Desa. (e) Fasilitasi tata niaga minyak tanah, melalui penetapan dan pemantauan pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah. (f) Penanganan Dana Kompensasi Subsidi bahan bakar Minyak (BBM).</p> <p>- Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga : (a) Identifikasi kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. (b) Penyusunan pedoman umum Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat. (c) Penyusunan Modul Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. (d) Pelatihan Kewirausahaan/Usaha Ekonomi Keluarga dengan peserta pelatihan sebanyak 25 orang berasal dari Kab. Garut, Bantul, dan Kebumen.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan (lanjutan)	<p>Penanganan Masyarakat Tertinggal : (a) Mengidentifikasi masyarakat miskin di 16 Propinsi dengan sasaran masyarakat miskin di Kabupaten dan Kota, sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan. Adapun hasil identifikasi dimaksud, yaitu : NAD: 496.643 KK Miskin; Sumatera Utara: 500.291 KK Miskin; Riau: 17. 568 KK Miskin; Jambi: 128.572 KK Miskin; Bengkulu: 96.767 KK Miskin; Banten: 508. 623 KK Miskin; Jawa Tengah: 2. 649.656 KK Miskin; Jawa Timur: 2. 210. 059 KK Miskin; Kalimantan Barat: 632. 416 KK Miskin; Kalimantan Selatan: 144. 914 KK Miskin; Sulawesi Selatan: 144. 940 KK Miskin; Nusa Tenggara Barat: 76. 165KK Miskin; Nusa Tenggara Timur : 574. 086 KK Miskin; Sulawesi Utara: 166. 872 KK Miskin; Sulawesi Tengah: 33. 085 KK Miskin; Papua: 165. 295 KK Miskin; (b) Memfasilitasi pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Daerah (sesuai Kepres Nomor 124 Tahun 2002 tentang KPK), melalui Surat Edaran Mendagri No. 412.6/1648/SJ tertanggal 29 Juli 2002 perihal Pembentukan KPK di Daerah dengan keanggotaan : Unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Swasta, dan pihak terkait lainnya. Tujuan pembentukan KPK daerah adalah: (a) Mengkoordinasikan berbagai program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dari instansi terkait sehingga penanggulangan kemiskinan di daerah menjadi satu kesatuan gerak dan langkah yang sama. (b) Mengefektifkan dan menselaraskan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. (c) Mengembangkan kemampuan aparat daerah dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Sampai dengan Desember 2002 dari 30 Propinsi, yang sudah membentuk KPK Propinsi sebanyak 20 Propinsi (66,70%) dan yang masih dalam proses ada 10 Propinsi (33,30%), sedangkan dari 354 Kabupaten/Kota di Indonesia yang sudah membentuk KPK Kabupaten/Kota ada 193 Kab/Kota (54,50%) dan masih dalam proses pembentukan KPK Kabupaten/Kota ada 161 Kab/Kota (45,50%). (c) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka asistensi program penanggulangan kemiskinan (sesuai Surat Keputusan KPK tanggal 23 September 2002 Nomor : 01/KEP/KETUA/ KPK/IX/2002 tentang POKJA Penanggulangan Kemiskinan) dimana Departemen Dalam Negeri selaku Koordinator Asistensi Program. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh persamaan persepsi dan konsepsi mengenai program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah, sehingga arah dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dapat selaras, serasi dan menjadi satu kesatuan yang utuh. (d) Penyusunan Draft Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penyusunan draft Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan: (1) Mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan dalam kerangka satu kesatuan yang utuh dan terkoordinir oleh KPK Daerah. (2) Menyamakan konsepsi dan persepsi penanggulangan kemiskinan antara pemerintah dengan pemerintah daerah bersama kelembagaan masyarakat setempat. (3) Mengembangkan kapasitas pemda dalam rangka penanggulangan kemiskinan. (4) Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan potensi daerah dapat berkembang guna penanggulangan kemiskinan. (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. (6) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. (e) Penyusunan Draft Modul Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan menyusun draft Modul Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan: (1) Mengembangkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dalam mengelola kegiatan usahanya. (2) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan program kemiskinan melalui pelatihan kelompok masyarakat. (3) Mengembangkan usaha kelompok milik masyarakat yang sudah ada, sehingga ekonomi masyarakat miskin berkembang. (4) Memotivasi kelompok masyarakat miskin dalam mengelola usaha, sehingga usaha yang dikelola dapat berkembang dengan baik. (5) Sasaran pelatihan yang direncanakan dalam pelatihan penanggulangan kemiskinan adalah para pengelola program penanggulangan kemiskinan di daerah dan kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam pemanfaatan dana dari program yang sifatnya untuk</p>

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan (lanjutan)	penanggulangan kemiskinan. (f) Memfasilitasi Pemerintah Daerah melalui Surat Mendagri Nomor 412.6/2489/SJ tanggal 30 Oktober 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka: (1) Penyusunan Rencana Strategis Jangka Pendek dan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif dan integral; (2) Penyiapan Rancangan Strategis Penanggulangan Kemiskinan disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat; (3) Penyediaan dana melalui APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2003 guna mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah; (4) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah melalui KPK Daerah melakukan koordinasi berbagai program daerah dalam penanggulangan kemiskinan, baik program penyelamatan (rescue) maupun program Pemulihan (recovery) terutama berkaitan dengan pendataan keluarga miskin.
	Wilayah pelaksanaan	Beberapa propinsi di Indonesia.
	Sasaran	Keluarga dan kelompok masyarakat miskin pedesaan.
	Pendanaan	Pembiayaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga bersumber dari APBN tahun 2002, dengan perincian <ul style="list-style-type: none"> - Proyek Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, senilai Rp.298.200.000,- - Bagian Proyek Pengembangan Pasar Desa senilai Rp. 148.200.000,- - Bagian Proyek Penanggulangan Kemiskinan senilai Rp. 248.900.000,- - Bagian Proyek Analisis Penguatan Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha di Perdesan senilai Rp.197.600.000,- - Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa senilai 439.800.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari - Desember 2002.
	Mekanisme pelaksanaan	Memfasilitasi program-program yang dibiayai oleh APBN Tahun 2002 (program pengembangan masyarakat, program pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha ekonomi) melalui penetapan kebijakan seperti pedoman umum.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam program usaha ekonomi masyarakat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya perubahan struktur organisasi. Sebagai implikasi dari pergantian para pejabat diantaranya di lingkungan Direktorat UEM, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh para pejabat perlu ada penyesuaian. - Relatif masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia pada Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, dalam melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. - Belum tertatanya seluruh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan bidang usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. - Program yang diluncurkan tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini perlu ada sinkronisasi program usaha ekonomi masyarakat di daerah. - Adanya gangguan keamanan di beberapa daerah mempengaruhi pelaksanaan kebijakan usaha ekonomi masyarakat. - Namun karena panjangnya birokrasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri Naskah tersebut masih belum dapat direalisasi untuk segera ditandatangani oleh Pejabat bersangkutan. Naskah tersebut hingga saat ini masih berada di Direktorat Jenderal PMD, Cq. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat. Diharapkan permasalahan ini segera di upayakan penyelesaiannya di tingkat Pimpinan, mengingat Departemen Pertanian telah menunggu relatif lama dan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2003. - Terbatasnya alokasi dana sehingga pelaksanaan Kegiatan tidak optimal. - Belum optimalnya data Pasar Desa yang diperoleh untuk memperoleh gambaran perkembangan Pasar Desa. - Tidak ada alokasi dana penanganan Tata Niaga Minyak Tanah. - Belum optimalnya pendataan dan informasi tentang Peta Potensi Ekonomi Masyarakat dalam rangka Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

No.	Item	Penjelasan
		<p>Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pemecahan permasalahan tersebut di atas, antara lain yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan alokasi dana APBN Tahun 2003 dan Non APBN untuk kegiatan Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat seperti fasilitasi kebijakan pengembangan usaha pertanian dan pangan, kegiatan penguatan keuangan mikro pedesaan, kegiatan pengajuan rancangan Keppres tentang Pasar Desa untuk mendapatkan pengesahan Presiden melalui Sekretariat Negara, Program pembinaan dan pengawasan Tata Niaga Minyak Tanah, penyusunan Pedoman Umum (Pedum) tentang Pengembangan Pasar Desa; untuk inventarisasi hasil produk dan produksi masyarakat dipedesaan sebagai data Pusat Informasi Pasar serta kegiatan Komite Penanggulangan Kemiskinan. - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. - Membuat surat permintaan data Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat kepada daerah. - Fasilitasi program-program pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui buku Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. <p>Sinkronisasi program pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.</p>
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan "lembaga keuangan mikro" yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi "pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro", terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan. - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat:LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community develoment), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
3.5	Nama upaya	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
	Deskripsi upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan Inpres No. 5 Tahun 1993. Sebagai implementasi, Pemerintah memberikan bantuan dana bergulir dan pembangunan sarana prasarana serta bantuan pendampingan dalam paket Program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Dalam pelaksanaan, program IDT mengalami beberapa kendala di lapangan. Untuk itu, PKK Tahap I dirancang sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

No.	Item	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada hakekatnya merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui : 1) penyediaan bantuan modal usaha bagi keluarga miskin; dan 2) penyediaan prasarana pendukung pengembangan usaha perekonomian. - PPK adalah program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. PPK menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. PPK berupaya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan kegiatan pembangunan secara bebas dan mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang mereka miliki. Sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan jati diri serta harkat dan martabatnya, dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. - PPK juga merupakan upaya menumbuhkan tata nilai budaya yang kondusif bagi kemauan masyarakat melalui prinsip kompetisi, transparansi, tertib administrasi, dan sebagainya. Untuk itu, keberhasilan PPK tidak hanya diukur dari ketepatan pelaksanaan mekanisme program secara teknis prosedural setiap tahapan, tetapi dilihat juga apakah PPK telah menjadi wahana belajar bagi masyarakat. PPK berupaya mengembangkan kesadaran masyarakat dan potensi yang mereka miliki dan kemauan mengembangkannya. - Upaya tersebut disertai dengan tindakan nyata untuk melakukan penguatan (empowering) melalui peningkatan taraf pendidikan, pembekalan seperangkat keterampilan, peningkatan derajat kesehatan, serta perluasan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, sehingga dapat mengubah potensi masyarakat yang semula masih bersifat laten menjadi kemampuan riil yang siap digunakan.
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
	Instansi terkait	Bank Dunia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, BRI, PT, Pemda dan LSM.
	Tujuan upaya	Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan; memperluas kesempatan berusaha, dan pemanfaatan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin.
	Jenis kegiatan	<p>Kegiatan yang dikembangkan PPK tahun 2002, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan diputuskan sendiri oleh masyarakat –meskipun daftar pilihannya telah ditentukan-, sehingga variasi kegiatannya pun menjadi sangat beragam, 73 % berupa kegiatan pembangunan prasarana produktif seperti jalan, jembatan, irigasi dan drainase, air bersih serta prasarana desa lainnya. - Untuk kegiatan ekonomi, 25% dari dana PPK telah disalurkan untuk kegiatan pinjaman ekonomi bagi usaha kecil, perdagangan, pertanian, kelompok simpan pinjam dan industri rumah tangga. Untuk tahun pertama dan kedua, sejumlah Rp. 243 milyar atau 27.4 juta USD diperuntukan bagi pinjaman ekonomi. Pada tahun kedua, lebih dari 318.000 orang (atau 20.060 kelompok usaha) menerima pinjaman ekonomi, dan sebagian besar dari mereka (72%) adalah anggota masyarakat miskin. - Monitoring dan evaluasi ke seluruh lokasi PPK dari mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan. - Pertemuan dengan Tim Koordinasi pusat dan daerah dalam pemantapan kelancaran pelaksanaan program. - Pertemuan konsultasi regional bagi para konsultan pendamping dalam menyusun rencana kegiatan tindak lanjut pelaksanaan program. - Pertemuan dialog para Gubernur, Bupati, Ketua Bappeda dan Kepala PMD Propinsi untuk persiapan PPK fase II

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Meliputi 20 propinsi, 130 kabupaten, 990 kecamatan, dan 15.481 desa.
	Sasaran	<u>Utama:</u> Kelompok penduduk miskin pada lokasi kecamatan miskin. Penentuan lokasi kecamatan penerima bantuan PPK didasarkan atas peringkat keparahan kemiskinan yang disusun berdasarkan data Podes 2000 ditambah pertimbangan-pertimbangan lain dan konsisi aktual daerah serta tidak sedang menerima bantuan program sejenis (P2D dan P2KP).
	Pendanaan	Pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase I (Lanjutan) Tahun 2002, yaitu: alokasi bantuan kecamatan tahun 2002 seluruhnya senilai Rp. 438,402,953,000,- terdiri atas bantuan langsung masyarakat senilai Rp 434,956,365,000,- dan dikelola pusat senilai Rp. 3.446.588.000,-
	Waktu pelaksanaan	Waktu pelaksanaan program bersifat multiyears bagi program yang pembiayannya dilakukan melalui bantuan Luar Negeri (PPK dan CERD).
	Mekanisme pelaksanaan	Bagi program yang dibiayai melalui program khusus bantuan Luar Negeri (PPK dan CERD) mekanisme pelaksanaannya adalah melalui pemberian bantuan usaha/ permodalan langsung kepada masyarakat serta fasilitasi pelaksanaannya di daerah. Sedangkan proses pelaksanaan pengelolaan bantuan oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Kendala yang dihadapi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jenis kegiatan yang kurang tepat, karena kurang menyentuh secara langsung kepentingan kelompok masyarakat miskin sehari-hari. - Pemberian pinjaman modal dari dana hibah bergulir yang tidak tepat sasaran, sebagai akibat dari ketakutan konsultan dan aparat mendapatkan penilaian tidak berhasil jika pengembalian tidak lancar karena yang meminjam memang kelompok miskin. - Pengembalian pinjaman dana hibah bergulir yang kurang lancar dan cenderung macet, sebagai akibat dari rentannya usaha kelompok masyarakat miskin. - Proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh elit-elit desa. - Kurangnya kesempatan partisipasi orang miskin pada setiap tahapan kegiatan sebagai akibat dari kesibukan mereka bekerja mencari nafkah disamping rasa percaya diri yang kurang. - Adanya kendala-kendala sosio kultural untuk mengaktifkan keterlibatan kelompok perempuan pada setiap tahapan kegiatan. - Kurangnya kedisiplinan dan kemampuan masyarakat desa dalam administrasi keuangan dan kegiatan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. - Adanya sebagian masyarakat yang cenderung mempunyai toleransi yang tinggi dan sikap apatis dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan dana bantuan yang sebelumnya sudah dianggap sebagai suatu kelaziman. - Masih kuatnya budaya politik paternalistik pada masyarakat desa sehingga menghambat tumbuhnya partisipasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. - Sanksi yang tidak dapat diterapkan secara efektif karena terentur oleh kondisi riil masyarakat miskin yang memang betul-betul dalam kesulitan. - Terjadinya benturan antara tingginya semangat otonomi daerah dan sifat sentralistik dari proyek yang sering mengakibatkan lambatnya penanganan dan penyelesaian masalah di lapangan, sehingga yang terjadi adalah saling melempar tanggung jawab antara pusat dan daerah. - Belum efektifnya peralihan fungsi brokrasi pemerintah dari memerintah menjadi melayani, dari memberi instruksi menjadi melakukan pembinaan, dari melaksanakan menjadi mengendalikan, sehingga gejala-gejala intervensi dan instruksi dari birokrasi tidak dapat dihindari secara mutlak. - Masih adanya sikap apatis atau mau tak mau dari aparat birokrasi terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan akibat dari adanya rasa takut dituduh melakukan intervensi.

No.	Item	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih kuatnya ego sektoral dan belum adanya debirokratisasi dalam urusan koordinasi, sehingga menjadikan koordnasi antar instansi dalam kondisi “mati tak hendak hidup pun tak mau”. - Adanya perbedaan sistem anggaran antara dana yang bersumber dari pinjaman (loan) dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Sistem anggaran dana loan yang multi years dan dana APBN/APBD yang mono year, sering membuat kurang sinkronnya agenda-agenda kegiatan yang dikendalikan oleh pusat dengan yang dikendalikan oleh daerah, sehingga efektifitas dan efisiensi kegiatan pun menjadi kurang dapat dipenuhi secara maksimal.
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan “lembaga keuangan mikro” yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi “pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro”, terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan. - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat:LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community develoment), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
3.6	Nama upaya	Program Community Empowerment for Rural Development (CERD)/Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan desa (PMPD)
	Deskripsi upaya	<p>CERD/PMPD mengembangkan empat komponen kegiatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas kelembagaan; diantaranya difokuskan pada penguatan manajemen perencanaan berbasis pada masyarakat; mencakup pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan bantuan (hibah) desa; - Penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui pengembangan CBSLO (Community Based Saved Loan Organization); - Pembangunan prasarana pendukung usaha perekonomian pedesaan yang dibutuhkan masyarakat miskin pedesaan. - Manajemen dan monitoring meliputi kegiatan dukungan administrasi, bantuan teknis, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek secara keseluruhan.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
	Pelaksana	Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat.
	Instansi terkait	Asian Development Bank (ADB), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perguruan Tinggi, Pemda dan LSM.
	Tujuan upaya	Mengentaskan masyarakat miskin pedesaan, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di dekat pusat pertumbuhan.
	Jenis kegiatan	Kegiatan yang dilakukan dalam Program CERD/PMPD Tahun 2002, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi konsultan Central Consultant Team (CCT) dan Regional Consultant Team (CRT). - Persiapan dan Pelaksanaan pelatihan RCT, aparat lokal pengelola proyek dalam implementasi proyek. - Pengiriman aparat PMD mengikuti pendidikan formal, program S2 Dalam Negeri sebanyak 40 orang, S1 sebanyak 518 orang, dan Diploma sebanyak 1.116 orang. - Pembentukan mekanisme pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat diimplementasikan pada 51 Kabupaten CERD (11 Kabupaten wilayah Inti dan 40 kab Wilayah Perluasan). - Pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat. - Pelatihan masyarakat pedesaan tentang mekanisme pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat, sebanyak 4.500 orang. - Pembentukan Community Base Save Loan Organization (CBSLO) atau Kelompok Simpan Pinjam Berbasis pada Masyarakat. - Pelaksanaan seleksi design dan pembangunan prasarana sub proyek. - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan proyek. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
	Wilayah pelaksanaan	Lokasi sasaran Program CERD/PMPD menurut rencana akan dilaksanakan di 6 propinsi dan 11 Kabupaten, yaitu propinsi Kalimantan Tengah (Kab Kapuas, Kab Barito Selatan), propinsi Kalimantan Selatan (Kab Banjar, Kab Tanah Laut), propinsi Kalimantan Timur (Kab Pasir, Kab Kutai Kertanegara), propinsi Sulawesi Tengah (Kab Poso, Kab Donggala) propinsi Sulawesi Utara (Kab Minahasa, Kab Bolaang Mongondow) propinsi Sulawesi Tenggara (Kab Kendari)
	Sasaran	Sasaran utama adalah kelompok masyarakat miskin pedesaan dengan lebih memperhatikan kelompok perempuan. Kriteria masyarakat miskin yang digunakan berdasarkan kebijaksanaan masyarakat setempat yang diputusan dalam musyawarah desa. Anggota masyarakat lainnya diharapkan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kegiatan proyek untuk memberdayakan masyarakat miskin. Sasaran lokasi : tidak sedang menjadi lokasi proyek berbantuan luar negeri (PKK dan P2D), berada dalam satu kluster dengan pusat pertumbuhan, memiliki jumlah keluarga miskin dalam urutan terbanyak di kecamatan.
	Pendanaan	Pada tahun 2002 dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp. 14,831,150,000,- yang terdiri atas bantuan langsung masyarakat senilai Rp. 13.364.656.000,- dan dana yang dikelola pusat sebesar Rp. 1.466.494.000,-
	Waktu pelaksanaan	Waktu pelaksanaan program yang pembiayaannya dilakukan melalui bantuan Luar Negeri (PPK dan CERD), bersifat <i>multiyears</i>
	Mekanisme pelaksanaan	Bagi program yang dibiayai melalui program khusus bantuan Luar Negeri (PPK dan CERD) mekanisme pelaksanaannya adalah melalui pemberian bantuan usaha/ permodalan langsung kepada masyarakat serta fasilitasi pelaksanaannya di daerah. Sedangkan proses pelaksanaan pengelolaan bantuan oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Kendala yang dihadapi program ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Kutai Kertanegara yang tidak layak sebagai sasaran lokasi proyek; - Penjajagan kemungkinan BPD tidak bersedia sebagai executing bank.
	Status saat ini	Berlanjut pada tahun 2003

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi keuangan daerah: bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Penerimaan) yang ditetapkan di dalam APBD. - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah, dalam rangka kemudahan akses untuk memperoleh bantuan permodalan. - Pendayagunaan dukungan Lembaga Keuangan Mikro: Dalam rangka meningkatkan penyediaan dana modal usaha yang dapat diakses kelompok usaha mikro dan kelompok usaha kecil, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan “lembaga keuangan mikro” yang ada, seperti unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Kecamatan yang diintrodusir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)/Community Based Save Loan Organization(CBSLO) yang dikembangkan Program CERD/PMPD, atau koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. - Pendayagunaan dukungan dunia usaha, khususnya usaha besar dan usaha menengah: Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi “pengembangan pola kemitraan usaha antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha menengah dengan kelompok usaha kecil dan kelompok usaha mikro”, terutama dalam pembinaan manajemen usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan informasi pasar, dan penciptaan akses pemasaran hasil usaha mikro dan usaha kecil, dalam prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang saling menguntungkan. - Pendayagunaan dukungan perguruan tinggi: Perguruan Tinggi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. - Pendayagunaan dukungan lembaga swadaya masyarakat:LSM dengan berbagai pengalamannya dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat (community develoment), dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Departemen Kelautan dan Perikanan		
4.1	Nama Upaya	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
	Deskripsi Upaya	<p>Potensi sumber alam kelautan dan perikanan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, selain kekayaan sumberdaya alam tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan, masyarakat pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pedagang ikan skala kecil masih tertinggal dan miskin. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan atau program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat pesisir, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendidik mereka lebih mandiri dan lebih mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.</p> <p>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. Di dalam program ini, masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan. Demikian pula dengan pascaprogram, bersama-sama dengan pemerintah daerah dan mitra usaha, mereka diberikan tanggung jawab mengembangkan usaha yang dipilihnya.</p>
	Penanggung Jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi Terkait	Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi dan kabupaten/jkota terkait

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir. - Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumber daya perikanan dan kelautan. - Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan. - Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung pengembangan wilayahnya. - Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, kelompok sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir yang kurang berdaya (miskin), menetap di daerah pantai dan pulau-pulau kecil. - Masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, dan pariwisata bahari serta usaha/kegiatan yang terkait dengan perikanan dan kelautan.
	Wilayah Pelaksanaan	<p>Tahun 2000: Nanggroe Aceh Darussalam (Kab Aceh Barat, Pidie, Aceh Selatan), Riau (Kab Kepulauan Riau, Bengkalis, Indra Giri Hilir, dan Kota Batam), Jawa Barat (Cirebon), Banten (Kab Pandeglang, Lebak), Jawa Tengah (Kab Pati, Pekalongan, Jepara, Rembang, dan Cilacap), Jawa Timur (Kab Tuban, Gresik, Pasuruan, Situbondo, Sumenep), Sulawesi Utara (Kab Sangihetalaud, Bolaang Mongondow, dan Kota Bitung), Sulawesi Tengah (Kab Banggai, Banggai Kepulauan, dan Toli-Toli)</p> <p>Tahun 2001: Nanggroe Aceh Darussalam (Kab Aceh Barat, Pidie, Simeulu, Singkil, Aceh Selatan, dan Kota Sabang), Sumatera Utara (Kab Deli Serdang, Asahan, Nias, dan Kota Sibolga), Sumatera Barat (Kab Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Kota Padang), Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Riau (Kab Karimun, Kepulauan Riau, Bengkalis, Indra Giri Hilir, dan Kota Batam), Bangka-Belitung (Kab Bangka, Belitung), Sumatera Selatan (Kab Musi Banyu Asin), Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan), Lampung (Kab Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan), Jawa Barat (Kab Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Subang, Karawang, Bekasi, dan Kota Cirebon), Banten (Kab Serang, Pandeglang, Lebak), DKI Jakarta (Kota Jakarta Utara), Jawa Tengah (Kab Kebumen, Demak, Kendal, Pati, Pekalongan, Jepara, Brebes, Rembang, Pemalang, Batang), DI Yogyakarta (Kab Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul), Jawa Timur (Kab Banyuwangi, Tuban, Gresik, Pasuruan, Situbondo, Malang, Sumenep, Probolinggo, Trenggalek, Bangkalan, Lamongan, Pacitan), Bali (Klungkung, Tabanan, Karang Asem, Buleleng), NTB (Kab Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Bima, Dompu, Lombok Tengah), NTT (Kab Belu, Sumba Timur, Kupang, Lembata, Ende, Sikka, Manggarai), Kalimantan Barat (Kab Sambas, Pontianak, Bengkayang, Ketapang), Kalimantan Tengah (Kota Waringin Timur, Waringin Barat), Kalimantan Selatan (Kab Tanah Laut, Barito Kuala, dan Kota Baru), Kalimantan Timur (Kab Pasir, Kutai Timur, Berau, dan Kota Tarakan), Gorontalo (Kota Gorontalo), Sulawesi Utara (Kab Minahasa, Sangihetalaud, Bolaang Wongow, dan Kota Bitung), Sulawesi Tengah (Kab Banggai, Posso, Donggala, Banggai Kepulauan, Toli-Toli), Sulawesi Selatan (Kab Takalar, Pangkep, Luwu, Bantaeng, Gowa), Sulawesi Tenggara (Kab Buton, Muna, Kendari), Maluku (Kab Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat), Maluku Utara (Maluku Utara, Halmahera Tengah), Irianjaya (kab Fak-Fak, Biak, Manokwari, Yapen Waropen, Merauke, Kota Sorong, Jayapura).</p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah Pelaksanaan (lanjutan)	<p>Tahun 2002: Nanggroe Aceh Darussalam (Kab Singkil, Aceh Selatan, Aceh Besar), Sumatera Utara (Kab Nias, Kota Sibolga, dan Medan), Sumatera Barat (Kab Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Agam, Mentawai), Jambi (Kab Tanjung Jabung Barat), Riau (Kab Indra Hilir, Natuna, Kota Dumai), Bangka-Belitung (Kab Bangka, Kota Pangkal Pinang), Sumatera Selatan (Kab Musi Banyu Asin), Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu), Lampung (Kab Lampung Selatan, Tulang Bawang), Banten (Kab Serang, Pandeglang), Jawa Barat (Kab Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Subang, Karawang, Cianjur), DKI Jakarta (Jakarta Utara), Jawa Tengah (Kab Kebumen, Kendal, Pekalongan, Batang, Tegal), DIY (Kab Gunung Kidul, Kulon Progo), Jawa Timur (Kab Tuban, Pasuruan, Situbondo, Trenggalek, Lamongan, Pacitan, Pamekasan), Bali (Kab Klungkung, Buleleng, Jembrana), NTB (Kab Lombok Timur, Bima, Lombok Tengah, Kota Mataram), NTT (Kab Belu, Sumba Timur, Kupang, Ngada, Timur Tengah Utara), Kalimantan Barat (Kab Bengkayang, Sanggau), Kalimantan Tengah (Kab Kapuas), Kalimantan Selatan (Kab Tanah Laut, Barito Kuala, Kota Banjarmasin), Kalimantan Timur (Kab Berau, Samarinda), Gorontalo (Kab Gorontalo, Boalemo), Sulawesi Utara (Kab Sangihetalaud, Bolaang Mongondow, Kota Manado), Sulawesi Tengah (Kab Posso, Donggala, Buol), Sulawesi Selatan (Kab Takalar, Jeneponto, Sinjai, Majene, Selayar), Sulawesi Tenggara (Kab Kendari, Kota Kendari), Maluku (Kab Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Kota Ambon), Maluku Utara (Kab Maluku Utara, Halmahera Tengah), Irianjaya (Kab Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Kota Sorong)</p> <p>Tahun 2003: Nanggroe Aceh Darussalam (Kab Aceh Barat, Pidie, Simeulu, Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Sabang), Sumatera Utara (Kab Nias, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Kota Medan), Sumatera Barat (Kab Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, dan Kota Padang), Jambi (Kab Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat), Riau (Kab Karimun, Kepulauan Riau, Natuna, dan Kota Batam), .Bangka Belitung (Kab Belitung, dan Kota Pangkal Pinang), Sumatera Selatan (Kab Musi Banyu Asin), Bengkulu (Kab Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu), Lampung (Kab Lampung Timur, Lampung Tengah, lampung Barat), Jawa Barat (Kab Ciamis, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Karawang), Banten (Kab Serang, Lebak, Tangerang), DKI Jakarta (Kota/Kab Kepulauan Seribu), Jawa Tengah (Kab Kebumen, Demak, Kendal, Brebes, Purworejo, dan Kota Semarang), DIY (Kab Gunung Kidul, Bantul), Jawa Timur (Kab Gresik, Pasuruan, Situbondo, Malang, Sumenep, Tulung Agung, Lumajang, Jember), Bali (seluruh kota/kabupaten), NTB (seluruh kota/kabupaten kecuali, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram), NTT (Kab Belu, Kupang, Lembata, Alor, Flores Timur, dan Sumba Barat), Kalimantan Barat (Kab Sambas, Pontianak, Bengkayang, Ketapang) Kalimantan Tengah (Kota Waringin Barat, Kab Katingan), Kalimantan Selatan (Kab Tanah Laut, Barito Kuala, dan Kota Baru), Kalimantan Timur (Kab Pasisir, Nunukan, dan Kota Tarakan), Gorontalo (Seluruh kota/kabupaten), Sulawesi Utara (Seluruh kota/kabupaten kecuali Kota Manado), Sulawesi Tengah (Kab Banggai, Posso, Donggala, Banggai Kepulauan, Morowali), Sulawesi Selatan (Kab Jeneponto, Sinjai, Majene, Selayar, Pinrang, Luwu Utara, Mamuju, Polewali Mamasa, dan Kota Makassar), Sulawesi Tenggara (Seluruh kota/kabupaten kecuali Kota Kendari), Maluku (Seluruh kota/kabupaten), Maluku Utara (Seluruh kota/kabupaten), Irianjaya (Kab Fak-fak, Biak, Yapen Waropen, Merauke, Jayapura, Sorong, Mimika)</p>
	Jenis Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan - Pelatihan - Pembentukan lembaga perekonomian (LEPP/Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir) - Peningkatan akses modal melalui bantuan modal bergulir

No.	Item	Penjelasan
	Waktu Pelaksanaan	Tahun 2000-2003
	Mekanisme Pelaksanaan	<p>Pengelolaan program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan koordinasi - Fasilitas kegiatan kesekretariatan program - Fasilitas kegiatan program - Fasilitas kegiatan perjalanan dalam rangka konsultasi pusat, sosialisasi, lokakarya - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. <p>Penyaluran Dana Ekonomi Produktif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model Pengembangan Usaha dan Permodalan yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada kegiatan PEMP adalah Model Barev, yaitu model bagi hasil yang digabung dengan <i>revolving</i>/perguliran. - <i>Revolving</i> dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Dana yang digulirkan bukan berasal dari modal pokok melainkan dari keuntungan yang telah diperoleh kelompok. Bila disetujui, modal pokok dapat berubah menjadi penyertaan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) dalam Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai saham. <p>Pendampingan:</p> <p>Dalam organisasi dan kelembagaan PEMP ada 3 kelompok yang terlibat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah: Kelompok ini terdiri dari DKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Dinas/Subdinas Perikanan (dan Kelautan) kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/kelurahan. Pemerintah berfungsi memfasilitasi, membina, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan program PEMP. - Konsultan: Konsultan adalah Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya Tenaga Pendamping Desa (TPD). Konsultan berfungsi membantu pemerintah dan mendampingi pelaksanaan program PEMP. - Lembaga Ekonomi Masyarakat: Dalam Masyarakat ada dua organisasi Kelembagaan Ekonomi yang dibentuk yaitu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di desa dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP). Lembaga ini berfungsi untuk mawadahi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta mendukung pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayahnya. <p>Dana Pendampingan:</p> <p>Dana pendampingan program yang berasal dari dana subsidi BBM diperuntukkan bagi keperluan Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/kota dan pengalokasiannya dilakukan melalui kontrak dengan Pimbagpro. Untuk melaksanakan komponen-komponen pendampingan, selain dana yang bersumber dari APBN juga didukung dengan dana yang bersumber dari APBD.</p> <p>Dana pendamping program yang dialokasikan oleh masing-masing APBD digunakan utk mendukung kegiatan pengelolaan program, bila memungkinkan digunakan untuk menambah dana ekonomi produktif.</p> <p>Dana Pendampingan Program ini digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Manajemen Kab/Kota: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya ManajemenKonsultan (tenaga ahli, TPD dan lain-lain) - Pembiayaan operasional dan fasilitas pembentukan Mitra Desa, LEPP-M3 dan KMP - Pembiayaan pelatihan TPD ke Jakarta. - Sosialisasi Program PEMP ke Jakarta. - Lokakarya nasional ke Jakarta - Pembiayaan pelatihan KMP - Pembiayaan pelatihan LEPPP-M3 (2000-2003) - Identifikasi dan Inventarisasi potensi/analisa data dan penyusunan program - Pemantauan dan pengendalian - Pembinaan, monitoring dan evaluasi program PEMP - Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi program Tingkat kab/kota

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme Pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan laporan berkala setiap bulan - Pembuatan leaflet, brosur dan sejenisnya - Pembuatan profile KMP dan LEPP-M3 dalam bentuk VCD - Pembuatan Juklak - Pelayanan Pengaduan Masyarakat <p>Memfasilitasi pembuatan <i>Solar Packed Dealer</i> untuk Nelayan (SPDN) sentra nelayan.</p> <p>Dana Ekonomi Produktif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KMP dengan bimbingan TPD mengajukan permintaan penyediaan dana kepada LEPP sesuai dengan prioritas kelayakan usaha yang akan dikembangkan. - Usulan yang telah masuk kepada LEPP dibahas dan diverifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada Pimbagpro. - Pimbagpro menyiapkan dokumen Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh LEPP dan Pimbagpro yang diketahui oleh kepala dinas kabupaten/kota, dilampiri kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pimbagpro mengajukan permintaan dana ke KPKN dengan disertai LK (lembar kerja), RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk disalurkan ke rekening LEPP. LEPP diwajibkan membuka rekening di Bank lokal dengan nama "Rekening PEMP" dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada Pimbagpro PEMP kabupaten/kota dan KPKN setempat. - Berdasarkan surat Perjanjian Pemberian Dana Ekonomi Produktif dan kelengkapannya, KMP Desa mengajukan usulan penarikan dana kepada LEPP. - Ketua atau pengurus LEPP yang dikuasakan ketua mencairkan dana di Bank setempat atas rekening PEMP dengan pengawasan Pimbagpro. Selanjutnya LEPP menyampaikan dana yang telah dcairkan tersebut kepada KMP sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang disetujui. Masing-masing KMP diharapkan membuka rekening di Bank untuk menyimpan dana dari LEPP. - Revisi kegiatan dimungkinkan jika terjadi perubahan terhadap jenis kegiatan, dan modal usaha dan investasi ekonomi disebabkan oleh faktor alam (<i>force majeure</i>) dan perkembangan ekonomi makro. - Revisi kegiatan dimusyawarahkan oleh KMP Desa. Apabila usulan pertama kegiatan tidak layak, baik secara teknis maupun ekonomi, maka kegiatan yang akan dibiayai adalah usulan kegiatan berikutnya
	Pendanaan	<p>Tahun 2001: Rp 105.800.000.000,00 Tahun 2002: Rp 85.500.000.000,00 Tahun 2003: Rp 116.400.000.000,00 Sumber: Program Kompensasi Pengurangan Susidi BBM (PKPS-BBM) yang bersifat <i>block grant</i></p>
	Pencapaian hasil	Terbentuknya KMP dan LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina)
	Masalah	Penyerapan dana belum maksimal, dana masih belum sepenuhnya bergulir.
	Status saat ini	Kegiatan tahun sebelumnya terus berkembang dan masih terus berjalan sampai sekarang.
	Potensi	Sudah berjalan selama 4 tahun dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2004
4.2	Nama upaya	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Budidaya Laut di Merauke
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pemberian Bantuan Sarana Produksi
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Departemen Kelautan dan Perikanan

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	PT. Retracindo (sebagai konsultan)
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatannya. - Menggalakkan kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan komoditi yang berorientasi pasar. - Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. - Menerapkan manajemen kegiatan budidaya laut yang berbasis agribisnis yang menguntungkan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan lembaga usaha - Penyerahan <i>seed capital</i> - Penyerahan dana sosialisasi program - Sosialisasi program
	Wilayah pelaksanaan	Papua (Kab. Merauke: Kecamatan Kurik)
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Pesisir, khususnya 20 UPR (Unit Perikanan Rakyat) untuk Pembentukan Lembaga Usaha dan 7 UPR untuk Sosialisasi Program - Sudah ada lembaga usaha yang eksis yaitu Koperasi Jardin yang selama ini mengelola kegiatan budidaya air tawar di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Pengelolaan yang dilaksanakan meliputi penyediaan benih ikan, pemasaran sekaligus pembinaan yang intensif kepada semua kelompok usaha budidaya dari petani-petani ikan yang tergabung dalam Unit Perikanan Rakyat (UPR). Jumlah UPR atau kelompok yang dikelola koperasi adalah 20 UPR dengan jumlah anggota berjumlah 120 orang yang tersebar di wilayah pesisir (Kecamatan Kurik, Urik, Ewer, Merauke, dan Kimaan) serta kecamatan lainnya di luar pesisir Kabupaten Merauke.
	Pendanaan	APBN (Rp262.200.000,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Lembaga Usaha Karena sudah adanya koperasi yang beroperasi dan pertimbangan teknis yang menyangkut pengelolaan dana <i>seed capital</i> yang tetap (tidak berkurang) dan mengaktifkan kembali UPR-UPR yang tidak produktif karena tidak tersedianya benih dan modal yang cukup, maka tidak dilakukan pembentukan lembaga usaha yang baru. - Penyerahan <i>Seed Capital</i> <i>Seed capital</i> diserahkan langsung kepada Koperasi Jardin sebagai pihak kedua oleh Perusahaan Konsultan sebagai pihak pertama dengan dana total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) - Penyerahan Dana Sosialisasi Program Dana sosialisasi program yang terdiri dari kegiatan program penyuluhan dan program pelatihan kepada Kepala Dinas Perikanan sebagai pihak penyelenggara oleh Perusahaan Konsultan pada tanggal 19 November 2001 dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - Sosialisasi program penyuluhan Mengadakan kegiatan penyuluhan kepada petani-petani ikan yang menjadi anggota UPR/kelompok (7UPR dengan anggota sekitar 50 orang) di Balai Pertemuan Kecamatan Kurik selama 1 hari, yaitu penjelasan tentang program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat petani ikan patin yang mencakup tujuan, manfaat, ruang lingkup kegiatan, dan penekanan penggunaan dana <i>seed capital</i> dalam bentuk bantuan teknis kepada petani ikan yang merupakan dana bergulir melalui kegiatan budidaya ikan. <p>Program Pelatihan Program pelatihan meliputi pemberian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modul pelatihan tentang pengenalan aspek biologi ikan - Modul pelatihan tentang teknologi budidaya pembesaran ikan - Modul pelatihan tentang manajemen usaha dan kewirausahaan

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Terbentuknya lembaga usaha
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Mempunyai potensi untuk terus dikembangkan
4.3	Nama upaya	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Daerah yang Mengalami Tekanan Ekologis di Bali dan Maluku
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pemberian Bantuan Sarana Produksi
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	- Bali: PT. Wahana Reka Tekindo (sebagai konsultan) - Maluku: PT. Purnagama (sebagai konsultan)
	Tujuan upaya	- Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatannya - Menggalakkan kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan komoditi yang berorientasi pasar - Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat - Menerapkan manajemen kegiatan budidaya laut yang berbasis agribisnis yang menguntungkan - Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan secara optimal
	Jenis kegiatan	- Bali : penyuluhan, pelatihan, pendampingan - Maluku : penentuan lokasi, pembentukan kelompok, pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Bali (Desa Tanjung Benoa); Maluku (Kepulauan Kei)
	Sasaran	- Masyarakat pesisir, khususnya Kelompok Nelayan Lestari (Bali) dan KUM Mina Mandiri (Maluku) - Maluku: Lokasi ditentukan berdasarkan pada apakah sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan.
	Pendanaan	Sumber: APBN Bali: Rp. 252.956.000,- Maluku: Rp. 252.956.000,-
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Bali: - Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan dilakukan secara terstruktur dari Pemerintah Kabupaten Badung (Dinas Perikanan dan Kelautan) sampai pada masyarakat nelayan di Tanjung Benoa, Kecamatan Kutai. - Pembentukan Kelompok Hampir seluruh masyarakat nelayan yang mengikuti sosialisasi telah sepakat membentuk suatu kelompok penerima program budidaya ikan kerapu dalam karamba jaring apung, yang akan membantu dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kelompok ini akan mengelola bantuan yang diberikan dan akan menggulirkan kepada anggota-anggotanya dengan didampingi oleh konsultan. Dalam pembentukan kelompok budidaya ikan laut "LESTARI" ini juga telah dipilih pengurus kelompok yang akan mengelola administrasi dan keuangan. Kelompok nelayan ini akan membuat badan usahanya untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan/program-program perikanan lebih lanjut.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Survei lokasi Kegiatan survei dilakukan di Desa Tanjung Benoa maupun daerah lain sebagai perbandingan, meliputi daerah Sarangan, Sawangan, Nusa Dua, Jimbaran dan lain-lainnya. Berdasarkan hasil survei, ditetapkan bahwa lokasi budidaya ikan kerapu dalam karamba jaring apung di perairan teluk sebelah barat Desa Tanjung Benoa yang lokasinya cukup dalam, terlindung dari gelombang dan relatif aman dari alur pelayaran. - Survei Jaringan Pemasaran Survei jaringan pemasaran meliputi permintaan pasar, tempat penampungan serta rantai pemasaran dari komoditas yang akan dihasilkan (ikan kerapu). Survei dilakukan di dua perusahaan yang bergerak dalam penampungan dan pemasaran ikan kerapu. Selain survei jaringan pemasaran, survei juga dilakukan untuk mengetahui pusat-pusat pembenihan ikan kerapu. Pusat pembenihan ikan kerapu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen adalah di Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut, Gondol-Singaraja, Bali. Benih ikan kerapu yang telah tersedia adalah kerapu tikus, kerapu macan, dan kerapu lumpur. - Survei Bahan, Alat dan Sarana Produksi. Survei bahan, alat dan sarana produksi budidaya dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung keberhasilan usaha budidaya ikan kerapu dalam karamba jaring apung. Survei ketersediaan bahan dan alat meliputi bambu/kayu, paku, drum/pelampung, tali dan jaring, sedangkan sarana produksi meliputi benih ikan, pakan maupun obat-obatan. - Penyuluhan Pembuatan Karamba Jaring Apung Penyuluhan pembuatan karamba jaring apung dilakukan pada kelompok sasaran program, dengan tujuan agar kelompok sasaran memiliki pengetahuan dan ketrampilan terhadap teknologi yang akan diterapkan sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak menemui kesulitan dan proses budidaya dapat berjalan dengan lancar. Penyuluhan mencakup keseluruhan proses budidaya ikan meliputi pengenalan jenis ikan laut secara umum yang mempunyai nilai ekonomis tinggi terutama ikan kerapu, persyaratan untuk lokasi budidaya, komponen-komponen karamba jaring apung, bahan dan cara pembuatan karamba jaring apung, pemilihan benih ikan yang baik, pengelolaan pakan, pengendalian hama dan penyakit, perawatan karamba jaring apung serta pemanenan dan pemasaran. Untuk kelancaran kegiatan penyuluhan maka dibuat petunjuk teknis (juknis) yang mudah dipahami. - Pembuatan Karamba Jaring Apung Proses pembuatan karamba mencakup pembuatan rakit, merangkai jaring serta pemasangan di lokasi. Kegiatan yang dilakukan selama pembuatan karamba jaring apung adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan bahan baku rakit (kayu, drum, tali, paku). - Pengukuran kayu dan pembuatan design karamba - Pembuatan rakit dan memasang pelampung - Pembuatan pemberat/jangkar - Pemasangan jangkar/pemberat - Merangkai jaring untuk karamba/kurungan - Pemasangan Karamba Jaring Apung Karamba jaring apung yang telah selesai dibuat selanjutnya di bawa ke lokasi penempatan dan diberi tanda agar terhindar dari gangguan keamanan dan lalu lintas air. Agar kedudukan karamba jaring apung kokoh, pada tiap sudut karamba diberi jangkar/pemberat (\pm 75 kg) yang diperkirakan mampu menahan rakit dan pengaruh ombak dan arus pasang surut.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penebaran Benih Usaha budidaya ikan telah siap dilakukan setelah karamba jaring apung diletakkan pada lokasinya. Dalam kegiatan ini telah ditebar benih ikan kerapu tikus sebanyak 1300 ekor (ukuran 12,5-13 cm), dengan harga Rp 13.500,- per ekor, kerapu macan ukuran 7,5-8 cm sebanyak 1235 ekor dengan harga Rp 8.500,- per ekor dan kerapu macan ukuran 11,5 dengan harga Rp 11.500,- per ekor. Penebaran benih dilakukan setelah dilakukan aklimatisasi (penyesuaian kondisi) agar ikan tidak stres. Benih ikan kerapu diperoleh dari Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol-Singaraja, Bali. - Serah Terima dan Operasional KJA Serah terima pengoperasian KJA dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2001. KJA diserahkan oleh koordinator Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir kepada Bupati Kabupaten Badung (diwakili oleh Kadis Perikanan dan Kelautan) kemudian dari Kadis Perikanan dan Kelautan kepada Ketua Kelompok Nelayan Lestari yang disaksikan Kasubdin Produksi dan staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta anggota nelayan. - Panen dan Pemasaran Kegiatan pemanenan akan dilakukan setelah 4,5 bulan pemeliharaan. Survival rate (tingkat keberhasilan hidup) ikan diperkirakan 50 % dengan bobot rata-rata 300-400 gram/ekor atau 2-3 ekor/kg. Konversi pakan diperkirakan 1 : 8-12 dengan arti dibutuhkan 8-12 kilogram pakan untuk meningkatkan 1 kilogram bobot pertumbuhan ikan. Berdasarkan survei jaringan pemasaran di Bali, peluang pasar masih sangat terbuka lebar dan potensial untuk ekspor serta mempunyai harga yang tinggi. Untuk kerapu tikus harga mencapai Rp 500.000,- per kg sedangkan kerapu macan mencapai Rp 200.000,- per kg. <p>Maluku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Jenis Bantuan Jenis bantuan yang telah disepakati bersama <i>stakeholder</i> adalah berupa alat tangkap <i>bubu lego</i>, 2 (dua) buah perahu jukung bercadik ukuran panjang 12 m, lebar 1,75 m dan tinggi 0,80 m, serta 2 (dua) buah mesin out board yamaha dengan bahan bakar bensin. - Pembentukan Kelompok Usaha Sebagai langkah pertama untuk merealisasikan kegiatan ini, telah dibentuk "Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat Mina Mandiri Duroa" penerima bantuan dalam pengembangan usaha masyarakat melalui kemampuan manajerial usaha penangkapan ikan dengan <i>bubu lego</i>. Pembentukan kelompok usaha ini didasarkan pada hasil diskusi bersama dengan hasil susunan kepengurusannya berasal dari Tokoh Masyarakat, LSM, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kelompok Nelayan. Susunan kepengurusan yang telah dibentuk adalah sebagai berikut: Pada intinya lembaga ini berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Motivator berbagai kegiatan usaha perikanan secara umum, khususnya dalam hal pengembangan perikanan <i>bubu lego</i>. - Menerima dan menyalurkan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah maupun investor lainnya serta bertanggung jawab terhadap perguliran dana tersebut untuk keberlanjutan usaha. - Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut <i>Dana Bergulir:</i> Dana bergulir untuk kelompok nelayan binaan yang diberikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan telah disampaikan oleh pihak Konsultan kepada Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat (LKUM) Mina Mandiri Duroa selanjutnya pihak Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat (LKUM) Mina Mandiri Duroa menyalurkannya kepada kelompok nelayan penerima. Besarnya potongan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat (LKUM) Mina Mandiri Duroa dan dan kelompok nelayan binaan dengan mempertimbangkan jangka waktu pengembangan. Hasil pengembalian dana bergulir tersebut selanjutnya digulirkan kembali kepada kelompok nelayan lainnya berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p><i>Dana Modal Usaha:</i> Dana modal usaha digunakan untuk pembelian ikan dan pemasaran hasil produksi nelayan binaan. Dana modal usaha ini digunakan oleh lembaga untuk pengembangan usaha. Diharapkan nantinya modal usaha ini bisa bertambah dan lembaga bertambah besar.</p> <p><i>Dana Operasional:</i> Dana operasional untuk kegiatan Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat (LKUM) Mina Mandiri Duroa meliputi dana untuk kegiatan monitoring dan pelaporan serta kegiatan operasional lainnya selama masa binaan dari konsultan.</p> <p>Dana bergulir dan modal usaha yang diberikan untuk kegiatan pemberdayaan seperti yang tersebut pada butir (3) tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional Lembaga Kelompok Usaha Masyarakat (LKUM) Mina Mandiri Duroa. Untuk tahap awal, terdapat dana operasional dan selanjutnya dana operasional tersebut diambil dari selisih harga antara nelayan dan eksportir untuk kemandirian usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan pelatihan terdiri dari (1) Kewirausahaan dan Manajemen, dan (2) Teknis Penangkapan Ikan. Untuk merealisasikan aktivitas pelatihan di bidang perikanan, selanjutnya dilakukan implementasi <i>action plan</i> berupa kegiatan produktif produksi perikanan, yaitu usaha penangkapan ikan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan pelatihan diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pola sikap nelayan di Kepulauan Kei ke arah yang lebih positif, kreatif dan dengan motivasi meningkatkan kualitas hidup yang kuat. <p>Juga diupayakan pemecahan yang bersifat struktural dengan mengembangkan kelembagaan baru baik berupa pengembangan kelompok nelayan ikan maupun pembenahan aspek pemasaran ikan. Diharapkan melalui pemecahan secara struktural maupun kultural akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Secara umum kegiatan pelatihan kewirausahaan dan manajemen serta teknis penangkapan ikan adalah untuk mendukung dan mewujudkan tujuan program. Tujuan khusus kegiatan pelatihan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok usaha penangkapan dengan bubu yang kreatif, memiliki pola sikap dan pola perilaku positif serta memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. - Membentuk kelompok usaha penangkapan dengan bubu yang memiliki kemampuan untuk membangun, memelihara dan mengembangkan semangat bekerjasama dalam kelompok usaha yang dikelola. - Membentuk kelompok usaha perikanan bubu binaan program yang secara bertahap dapat memiliki dan mengembangkan jiwa wirausaha. Membentuk kelompok usaha nelayan bubu yang memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan usaha. - Membentuk kelompok usaha nelayan bubu binaan yang memiliki keterampilan teknis mengelola kegiatan penangkapan ikan. <p>Peserta pelatihan adalah masyarakat kawasan pesisir terutama kelompok nelayan, perwakilan LKUM Mina Mandiri Duroa dan para stake <i>holder</i> dengan kriteria yang telah ditentukan oleh tim program pengembangan yaitu dapat membaca dan menulis, berbadan sehat, mempunyai kemauan (motivasi) yang kuat untuk berkembang, dan bersedia mengikuti proses pelatihan hingga selesai.</p>
	Pencapaian hasil	Jumlah karamba yang dibuat adalah 3 buah: 2 buah berukuran 6x6 m ² dengan 8 unit jaring, sedangkan 1 buah lainnya berukuran 5x7 m ² dengan 2 unit jaring.
	Masalah	<p>Bali (budidaya ikan kerapu):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikan kerapu belum dapat dipasok secara berkelanjutan. - Ukuran ikan beragam karena mengandalkan tangkapan dari alam - Mutu produk sulit dijaga terutama saat pengepakan dan pengangkutan

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Bali: Hasil survei menunjukkan bahwa potensi pasar ikan kerapu sangat baik. Sampai saat ini semua produksi dapat terjual, terutama ke luar negeri (ekspor) dengan harga tinggi. Kegiatan ini layak dikembangkan di waktu mendatang di tempat lain.
4.4	Nama upaya	Pemberdayaan Masyarakat melalui Sistem Pengolahan Ikan
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ekonomi Keluarga/Peningkatan Akses Modal/Teknologi yang diimplementasikan dalam Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pemberian Bantuan Sarana Produksi.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan 2001: <ul style="list-style-type: none"> - Cirebon: Mitra Panutan Apresindo - Kendari: PT. Marina Widya Karsa - Gunung Kidul: LPM-UGM - Pekalongan: PT. Estekana Arspanindo Konsultan 2002: PT. Jagat Rona Semesta
	Tujuan upaya	Tahun 2001: Cirebon: Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir tentang gizi asal ikan, keterampilan tentang pengolahan ikan dan serta pemasarannya sebagai upaya peningkatan produksi perikanan. Kendari: <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat usaha dengan mencari solusi akses permodalan, untuk meningkatkan perekonomian dan sistem yang lebih baik. - Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, pengolahan dan pemasaran untuk tujuan meningkatkan teknologi, pengolahan, usaha. Gunung Kidul, DIY: Memperkuat kelembagaan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan SDM nelayan dalam konteks kegiatan usaha isteri nelayan serta keluarganya Pekalongan: <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat usaha dengan mencari solusi permodalan, meningkatkan sistem pengolahan yang lebih baik. - Meningkatkan kualitas SDM melalui fasilitas pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam hal ini adalah manajemen, pengolahan usaha, teknik pengolahan dan pemasaran. Tahun 2002: Memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks kegiatan usaha isteri nelayan beserta keluarganya. Secara rinci tujuannya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat usaha - Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui fasilitasi pelatihan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Pendampingan - Pelatihan - Peningkatan akses modal

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001: Jawa Barat (Cirebon), Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), DIY (Kab. Gunung Kidul), Jawa Tengah (Pekalongan) Tahun 2002: Jawa Timur (Kab Malang)
	Sasaran	Perempuan pesisir
	Pendanaan	APBN Tahun 2001: Cirebon Rp. 181.200.000; Kendari Rp. 182.830.000; Gunung Kidul Rp. 182.500.000; Pekalongan Rp. 182.635.000 Tahun 2002: Rp. 224.700.000
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001, 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<p>2001</p> <p>Cirebon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM. - Sosialisasi dan pelaksanaan program <p>Dimaksudkan agar kegiatan dapat dimengerti, diterima oleh peserta, dan agar peserta dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan dan dapat mengambil manfaatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan calon anggota kelompok. Dilakukan dengan beberapa kali pertemuan. Kegiatan ini merupakan proses awal pembelajaran dalam berorganisasi. - Pembentukan lembaga dan pengurus KUB "Darul Ulum - Mina Bahari" - Pelatihan teori SSOP, GMP, HACCP, mikrobiologi, kimia, keamanan olahan, manajemen usaha. Materi/modul dan teknik penyampaian disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan sehingga mudah dimengerti. Pelatihan dilakukan dengan sistem dua arah, dengan memperhatikan pengalaman peserta/ anggota. - Pelatihan praktek, ikan asin, abon ikan, <i>nugget</i>, bandeng presto, tekwan/bakso, burger. Kegiatan ini memerlukan pendampingan agar anggota menjadi terampil dan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, baik dalam proses produksi maupun pemasarannya - Sosialisasi dan perguliran dana Dana pengembangan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KUB dan anggota. Masih ada persepsi bahwa dana bantuan diterima oleh anggota tanpa pertanggungjawaban penggunaan dana. Mekanisme perguliran dana sudah didiskusikan dengan dinas, kelompok dan konsultan - Legalitas KUB Dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatannya, KUB mengikuti peraturan yang berlaku di dunia usaha dan agar peraturan yang ditetapkan bersifat mengikat anggota. - Pembuatan AD/ART - Pembuatan proposal usaha Pemanfaatan dana pengembangan sesuai lingkup usahanya. Perlu dilakukan bimbingan lebih lanjut agar KUB dapat berkembang secara mandiri - Pelatihan dan peningkatan mutu hasil pengolahan ikan - Kunjungan dan pembinaan ke pengolah Kegiatan ini memerlukan kesabaran dan keuletan karena pada awalnya pengolah ikan asin kurang responsif dan puas dengan hasil yang sudah ada. Diperlukan pendampingan agar materi yang telah diberikan dapat terus diterapkan secara konsisten. - Pelaksanaan pelatihan teori Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan dinas. Materi/ modul disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan dilakukan dengan sistem dua arah, dengan tetap memperhatikan pengalaman anggota.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pembuatan ikan asin dan olahan lain Agar lebih terampil, peserta membutuhkan pendampingan. Terdapat kendala berupa tidak adanya areal penjemuran yang luas. - Pengembangan kegiatan usaha <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan harga Komponen harga jual, antara lain mencakup bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja, kemasan dan pemasaran, masa kadaluarsa (<i>product life cycle</i>), nilai uang (<i>time value of money</i>) - Pembuatan label dan kemasan - Pendaftaran SP Pelatihan SP dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan sekitar bulan Februari 2002, tetapi KUB ini mendapat prioritas untuk didahulukan jika dalam waktu dekat ada pelatihan oleh Dinas Kota Indramayu - Legalitas Usaha <p>Kendari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kelompok <p>Untuk menunjang kelancaran pengelolaan usaha di dalam struktur dan pengurusan aksi kolektif KWPI Mandiri lestari, ditunjuk 2 orang pembina teknis dari Diskan Kotamadya Kendari dan Diskan Kabupaten Kendari. Pembentukan Lembaga Aksi Kolektif KWPI Mandiri Lestari tertuang dalam Berita Acara Pembentukan dengan ketentuan dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan teknis teknologi pengolahan, administrasi, dan manajemen. <p>Penataan administrasi dan manajemen kelembagaan dilaksanakan dengan menyediakan pendampingan teknis yang dilaksanakan oleh konsultan, bersama pembina teknis langsung di lapangan. Tujuan kegiatan ini adalah agar pengelola KWPI Mandiri Lestari dapat meningkatkan kerapihan dan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan lembaga yang dikelolanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pengolahan Hasil perikanan yang diolah mutunya meningkat dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, bersama konsultan dan ahli pengolahan hasil perikanan, diterapkan teknologi tepat guna yang mudah diterapkan oleh para pengolah hasil perikanan. - Administrasi Dalam meningkatkan kinerja usaha, lembaga pembenahan administrasi merupakan salah satu aspek yang masih memerlukan perhatian. Dalam pelaksanaan administrasi keuangan, beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengukur kinerja bidang administrasi adalah kemampuan lembaga dalam menangani prosedur pembuatan usahanya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pengarsipan dan validasi bukti-bukti transaksi. - Pencatatan transaksi di buku jurnal - Pemindahan data dari jurnal kebuku besar - <i>Posting</i> - Pembuatan neraca, dan lain sebagainya <p>Untuk meningkatkan kemampuan akutansi disetiap unit kelompok dan membantu mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, misalnya dalam pembuatan laporan rugi/ laba, neraca kas dan lain-lain, pembina teknis akan membimbingnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Upaya meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan lembaga, untuk pengurus lembaga maupun anggotanya dilakukan penjelasan-penjelasan bimbingan tentang:

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan aturan tertulis tentang pembagian dan prosedur kerja, penyusunan program kerja, pengelolaan dan peningkatan SDM. - Pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan organisasi dalam RAB/RAT untuk dapat dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan usaha KWPI Mandiri Lestari. <p>- Pengembangan Kerjasama Kemitraan</p> <p>Kegiatan bimbingan kemitraan dipusatkan pada kegiatan dampingan teknis dari konsultan dan pembina teknis dalam menjalin kerjasama usaha atau kemitraan dengan pihak ketiga. Pada saat merintis kerjasama usaha tersebut KWPI sudah memiliki proposal usaha yang diajukan ke pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan sekaligus pembinaan yang menyangkut pengembangan usahanya. Perintisan ke arah realisasi kemitraan oleh pihak KWPI yang telah dilakukan sebelumnya harus terus digalang, agar anggota / masyarakat lain pengolah hasil perikanan dapat mendistribusikan komoditi yang dihasilkan langsung kepedagang besar.</p> <p>Gunung Kidul, DIY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model Penguatan Kelembagaan Usaha Nelayan dan Keluarganya Bantuan Dana dan Manajemen Pada Perkumpulan Badri Manunggal. Bantuan ini berupa dana yang kemudian dikelola oleh lembaga keuangan mikro (<i>micro finance</i>) yang telah dimiliki oleh perkumpulan Badri Manunggal. Di samping bantuan dana, juga diberikan bantuan manajemen, pengetahuan manajemen/pengelolaan keuangan sederhana kepada para pengelola keuangan. Dalam kegiatan ini juga diersiapkan tim yang melakukan monitoring pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan ini diharapkan tidak akan terjadi penyelewengan penggunaan dana oleh para pengurus. Dengan demikian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat terwujud. Hal ini sangat penting di dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan yang ada. - Model Penyaluran Teknologi Tepat Guna (Pembuatan Box Penyimpanan Ikan dan Box Kaca/Display) Telah dibuat 10 box penyimpanan ikan dan box kaca/display, dan telah diberikan kepada perkumpulan Badri Manunggal. Pembuatan box penyimpanan ikan dan box kaca/display pada prinsipnya sama. Perbedaannya adalah bagian atas box kaca display terbuat dari bahan kaca. dan dindingnya terbuat dari kayu lapis. - Model Peningkatan Sumber Daya Manusia Masyarakat Pesisir Bantuan Teknis (Penyuluhan) Cara Pengolahan Ikan Bantuan teknis mengenai cara menggoreng dan menyaring ikan agar hasilnya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dalam kegiatan ini juga disampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (sanitasi). Bimbingan untuk Pengeringan Ikan Bantuan yang diberikan adalah pembinaan mutu pengeringan ikan dan pengepakan ikan hasil olahan. Untuk pengepakan/ pengemasan, digunakan pembungkus dari bahan plastik yang telah disablon, disertai ijin dari Departemen Kesehatan. <p>Pekalongan:</p> <p>Implementasi pengembangan sistem pengolahan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengembangan di Desa Mejasem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi JawaTengah. - Pengolah ikan yang dibina adalah anggota Kelompok Simpan Pinjam berjumlah 46 anggota. - Kegiatan pemantapan KSP Mina Jaya menjadi LSP Mina Jaya dengan penggunaan dana sebesar Rp. 4.900.000 untuk meningkatkan kemampuan pengrusnya. - Kegiatan pelatihan diselenggarakan dengan 3 pokok kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan, diskusi pengembangan usaha. Dan praktek teknologi. Pelatihan diikuti oleh 40 peserta yang merupakan anggota KSP Mina Jaya.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi dana perguliran adalah sebesar Rp. 45.100.000, terdiri dari Rp. 23.100.000 untuk modal kerja dan Rp. 22.000.000 untuk modal investasi. Dana perguliran pada tahap awal melibatkan 46 anggota dan digulirkan selama maksimal 10 wanita, beban administrasi 2,5% / bulan dan akan diangsur selama 10 kali. - Bimbingan teknis dilakukan untuk plus LSP Mina Jaya sedangkan pendampingan untuk anggota kelompok. <p>2002: Model Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan</p> <p>Penentuan model pengembangan usaha pengolahan ikan didahului dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menemukenal potensi spesifik lokal - analisis kebutuhan teknologi - analisis kelayakan usaha - analisis kebutuhan mitra LEPP-M3 dan anggota - formulasi usaha bersama pengolahan ikan - pembentukan kelompok <p>Terdapat tiga level pengorganisasian masyarakat pesisir yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir – Mikro Mitra Mina) - Kelompok pemanfaat - Keluarga nelayan. <p>Model usaha pengolahan ini perlu diorganisasikan dengan baik agar tumbuh partisipasi masyarakat yang melembaga dalam sebuah jaringan kerjasama yang berkelanjutan.</p> <p>Agar modal dapat berputar dengan baik sebagai modal usaha yang diperuntukkan sesuai rencana, maka LEPP-M3 tidak menyalurkan dana kepada anggota/kelompok pengolah ikan, namun memberikan bahan baku dan peralatan. Pengolah ikan mendapatkan uang setelah mereka memproses bahan baku (ikan) menjadi bahan setengah jadi. Sehingga dengan prinsip ini penggunaan dana dapat lebih terarah.</p> <p>Fungsi LEPP-M3 dalam memproduksi abon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membeli ikan sesuai kualitas yang dibutuhkan untuk membuat bahan pangan olahan dan ikan. - Melakukan pengeringan masal. - Menyalurkan bahan-bahan baku (ikan setengah kering) dan bahan tambahan. - Menerima abon setengah jadi untuk kemudian dipanggang dalam oven. - Menjaga kualitas produk. - Melakukan pengemasan. - Memasarkan produk. <p>Fungsi kelompok pengolah ikan dalam memproduksi abon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggoreng - Mengepres (mengeluarkan minyak) - Menyetor hasil kerjanya kepada LEPP-M3 <p>Fungsi LEPP-M3 dalam memproduksi pindang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membeli ikan sesuai kualitas yang dibutuhkan untuk membuat bahan pangan olahan dari ikan. - Menyalurkan bahan-bahan baku dan bahan tambahan. - Menjaga kualitas produk - Memasarkan produk

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>Fungsi kelompok pengolah ikan dalam memproduksi pindang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memotong ikan - Memberi bumbu - Menyetorkan hasil ke LEPP-M3 - Melakukan perebusan <p>Model Pengembangan SDM</p> <p>Tahap Pembentukan Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan divisi pengolahan ikan LEPP-M3 melalui diskusi dengan topik - Jenis usaha - Teknis pengolahan - Seleksi personil - Potensi pasar. - Pembentukan kelompok-kelompok pengolah ikan melalui penilaian usulan tokoh lokal dan diskusi partisipatif. - <i>Team building training</i> dengan topik: - Diagnosis tipe pribadi - Motivasi pengembangan diri - Mendengar dan menyampaikan pendapat - Konflik dan negosiasi - Perencanaan usaha bersama - Kontrak/perikatan. <p>Tahap Pengembangan Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek pengolahan ikan melalui perencanaan produksi, pengetahuan tentang alat, pengetahuan bahan baku, dan pengendalian mutu. - Pendampingan terhadap LEPP-M3 melalui aspek produksi dan aspek pemasaran
	Pencapaian hasil	Terbentuk kelompok usaha bersama dalam bidang pengolahan khususnya dan perikanan secara umum.
	Masalah	<p>Kendala pokok yang dihadapi oleh sebagian pengurus KUB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan, pengetahuan manajerial dan intepretasi di setiap KUB. - Tidak/belum adanya simpanan anggota yang tetap. - Keterbatasan keuangan/modal para anggotanya. - Masih rendahnya minat anggota untuk memanfaatkan/ mengembangkan aktivitas KUB. <p>Parsoalan yang dihadapi pengolah ikan di kabupaten Pekalongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal: modal dan manajemen - Eksternal: pemasaran dan sumber pembiayaan.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat dilanjutkan pada tahun mendatang dengan lokasi yang berbeda.
4.5	Nama upaya	Pemantapan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir melalui Kemampuan Manajerial Usaha Budidaya Rumput Laut
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Sosialisasi dan Koordinasi Pemantapan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan Dan Perikanan
	Pelaksana	Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Papua: Kab. Biak Numfor: KSM Bina Mandiri - Sulawesi Selatan: Kab. Bone: Koperasi Aliansi Tani dan Nelayan Nasional (KOPATNAS) dan PT. Banting Murung Indah <p>Konsultan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTT (Kupang): Institute for Empowerment and Development Studies (INFEDS) - Papua (Biak Numfor): PT. Wahana Santosa - Sulawesi Selatan (Bone): Koperasi Inti Mitra Mandiri (KOPIMMA) - DKI Jakarta (Kep. Seribu): WBBN - Banten (Serang): LAGOWA
	Tujuan upaya	<p>Kupang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks kegiatan usaha budidaya rumput laut. - Memperbaiki manajemen dan mengembangkan usaha budidaya rumput laut. - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan. <p>Supiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki manajemen dan mengembangkan usaha budidaya rumput laut. - Meningkatkan kualitas SDM melalui fasilitas pelatihan. <p>Bone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki manajemen dan mengembangkan usaha. - Meningkatkan kualitas SDM. - Mencari mitra dan pemasaran hasil usaha. <p>Kepulauan Seribu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat usaha budidaya rumput laut. - Peningkatan kualitas SDM melalui fasilitas pelatihan. - Penyaluran hasil-hasil budidaya rumput laut. <p>Serang:</p> <p>Memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil dalam konteks kegiatan usaha budidaya rumput laut.</p>
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kupang: pelatihan, bantuan teknis - Biak Numfor: pelatihan, pemasaran - Bone: identifikasi, pelatihan - Kep. Seribu: pelatihan, pengembangan manajerial dan pemasaran - Serang: pembentukan kelompok, pelatihan, pemberian bantuan, pembinaan rutin
	Wilayah pelaksanaan	NTT (Kupang); Papua (Kab. Biak Numfor); Sulawesi Selatan (Kab. Bone); DKI Jakarta (Kep. Seribu); Banten (Kab. Serang)
	Sasaran	Masyarakat pesisir
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kupang: Rp188.650.000,00 - Kab. Biak Numfor: Rp193.135.000,00 - Kab. Bone: Rp185.834.000,00 - Kepulauan Seribu: Rp193.500.000,00 - Kab. Serang: Rp193.537.900,00 <p>Sumber: APBN</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Kupang: Kegiatan yang dilaksanakan adalah Gerakan Masuk Laut di Kupang, melalui pengembangan usaha budidaya rumput laut, yang merupakan upaya pemerintah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rangsangan/stimulus bagi pengembangan usaha rumput laut. Pemilihan lokasi program sangat penting, agar tujuan program ini bisa tercapai. Dalam pemilihan lokasi, pihak terkait di daerah, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, dilibatkan. Berdasarkan analisis yang mendalam dan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta tokoh-tokoh lokal dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka Kecamatan Rote Timur terpilih menjadi basis lokasi pelaksanaan program tersebut. Lokasi ini berada dan termasuk dalam wilayah Pulau Rote.</p> <p>Supiori: - Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mina Mandiri Biak Telah dibentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mina Mandiri Biak yang diawali dengan diskusi dan pertemuan dengan berbagai unsur atau elemen terkait seperti tokoh masyarakat Supiori, perwakilan nelayan/petani rumput laut, LSM, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan tim konsultan. Pada intinya KSM ini berfungsi sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivator berbagai kegiatan usaha perikanan secara umum, khususnya dalam hal pengembangan usaha budidaya rumput laut sebagai pioner. - Menerima dan menyalurkan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah maupun investor lainnya serta bertanggung jawab terhadap perguliran dana tersebut untuk keberlanjutan usaha. - Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut: <i>Dana Bergulir</i> Dana bergulir untuk kelompok nelayan/petani binaan yang diberikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan akan disampaikan oleh konsultan kepada KSM Mina Mandiri, dan selanjutnya KSM Mina Mandiri menyalurkannya kepada kelompok nelayan/petani penerima. Pengembangan dana bergulir dari nelayan/petani penerima dilakukan dengan melakukan pemotongan langsung hasil penjualan rumput laut. Besarnya potongan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara KSM Mina Mandiri dengan nelayan/petani binaan, dengan mempertimbangkan jangka waktu pengembalian. Hasil pengembalian dana bergulir tersebut selanjutnya digulirkan kembali kepada kelompok nelayan/petani lainnya berdasarkan prioritas yang ditetapkan. <i>Dana Modal Usaha</i> Dana modal usaha digunakan untuk pembelian rumput laut dan pemasaran hasil produksi nelayan/petani binaan akan disampaikan oleh konsultan pada waktu bersamaan dengan penyerahan dana bergulir. <i>Dana Operasional</i> Dana operasional kegiatan KSM Mina Mandiri mencakup pembuatan Akta Notaris pendirian lembaga berbadan hukum, kegiatan monitoring dan pelaporan, serta kegiatan operasional lainnya selama masa binaan dari konsultan mulai September sampai Desember 2001. <ul style="list-style-type: none"> - Dana bergulir dan modal usaha yang diberikan untuk kegiatan pemberdayaan tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional KSM Mina Mandm. Untuk tahap awal, terdapat dana operasional yang diambil dari selisih harga antara petani dan eksportir untuk kemandirian usaha. - Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan/Petani Rumput Laut Pengembangan kelembagaan yang dilaksanakan dalam jangka pendek meliputi tiga kegiatan: pembentukan KSM, pembentukan kelompok petani rumput laut, dan pembentukan jaringan pemasaran melalui kerjasama dengan perusahaan eksportir rumput laut. Diharapkan dalam jangka panjang kelompok KSM itu akan semakin solid selungga dapat tumbuh menjadi bahan usaha.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>Pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk memecahkan problem struktural kemiskinan petani rumput laut. Pertama, melalui pembentukan kelompok KSM Mina Mandiri. Diharapkan kelompok usaha rumput laut dikelola dengan lebih baik melalui teknologi budidaya maupun teknologi pasca panen, sehingga menciptakan nilai tambah. Di samping itu, nelayan/petani rumput laut diharapkan terbiasa mencatat data-data produksi dan pemasaran, sehingga informasi tentang kondisi perikanan rumput laut di Supiori maupun Biak dapat digambarkan secara obyektif. Data dan informasi tersebut merupakan bahan bagi proses pengembangan selanjutnya.</p> <p>Kedua, pembentukan kelompok juga diharapkan menjadi embrio bahan usaha yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut melalui perannya dalam pemasaran hasil produksi. Selama ini petani rumput laut memasarkan hasil produksi ke tengkulak dan hubungan antara petani rumput laut dengan tengkulak tersebut masih terbatas pada kepentingan produksi seperti adanya pinjaman modal dari tengkulak kepada para petani rumput laut. Karena itu, hubungan di antara keduanya belum sampai pada bentuk hubungan <i>patron-klien</i> sebagaimana umumnya dalam komunitas masyarakat nelayan. Dengan demikian upaya pihak luar untuk membantu membenahi aspek pemasaran rumput laut masih dimungkinkan.</p> <p>Kegiatan pelatihan telah membentuk kelompok kecil usaha binaan dalam rangka pemantapan dan pengembangan masyarakat pesisir melalui kemampuan manajerial usaha budidaya rumput laut di Supiori. Kelompok tersebut dibentuk bulan September 2001. Sebagai upaya untuk tetap mewujudkan kebersamaan antar kelompok kecil dalam kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan lainnya, maka kelompok tersebut disatukan dalam sebuah kelompok besar. Kelompok yang terbentuk sebanyak 13 kelompok, dengan 5 orang anggota per kelompok.</p> <p>Kegiatan yang akan dilakukan kelompok meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya rumput laut dengan menggunakan teknologi yang disarankan oleh konsultan. - Kegiatan pasca panen, khususnya kegiatan pengeringan yang akan dilakukan dengan cara yang tepat untuk mengurangi kadar kotor rumput laut. - Kegiatan pemasaran bersama rumput taut yang telah dikeringkan, dengan tujuan untuk memperoleh harga yang relatif lebih baik dibandingkan dengan harga setempat. Kegiatan ini akan dibantu oleh KSM Mandiri - Pertemuan rutin antar kelompok untuk lebih meningkatkan kebersamaan dan saling tukar informasi serta memecahkan permasalahan bersama. <p>- Bantuan Langsung Masyarakat</p> <p>Mengingat bantuan modal usaha ini terbatas, maka bantuan ini ditujukan sebagai modal usaha bagi petani rumput laut yang belum mendapatkan bantuan modal usaha. Besarnya bantuan dan jenis bantuan yang diterima ditentukan berdasarkan kebutuhan setiap petani yang dilakukan bersama-sama dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping.</p> <p>Untuk mengkaji kebutuhan riil anggota penerima bantuan tersebut, telah dilakukan identifikasi kebutuhan modal usaha setiap anggota peserta program. Struktur permodalan usaha petani rumput laut terdiri dari komponen utama sarana produksi seperti: bambu, tambang, bibit, dan upah. Setiap petani rumput laut peserta pelatihan diberikan keempat sarana permodalan tersebut.</p> <p>Untuk memaksimalkan keberlanjutan bantuan, bantuan tersebut dinyatakan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dan pengembaliannya akan terus digulirkan untuk meningkatkan skala usaha peserta program. Bantuan telah diberikan pada bulan September 2001, dan petani rumput laut penerima bantuan telah menyatakan kesiapannya untuk menggulirkan dan mengembangkan dana bantuan tersebut.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>- Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen, dan Teknis Budidaya Rumput Laut.</p> <p>Dilakukan implementasi <i>action plan</i> berupa kegiatan produktif produksi perikanan, yaitu usaha budidaya rumput laut. Dalam memperoleh hasil yang optimal, kegiatan pelatihan diharapkan dapat mengubah pola pikir dan sikap nelayan/petani rumput taut di Supiori ke arah yang lebih positif, kreatif dan dengan motroasi meningkatkan kualitas hidup yang kuat.</p> <p>Secara umum, kegiatan pelatihan kewirausahaan dan manajemen serta teknis budidaya rumput laut bertujuan mendukung dan mewujudkan tujuan program. Sedangkan tujuan khusus kegiatan pelatihan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok usaha budidaya binaan program yang kreatif, memiliki pola sikap dan pola perilaku positif serta memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. - Membentuk kelompok usaha budidaya binaan program yang memiliki kemampuan untuk membangun, memelihara dan mengembangkan semangat bekerjasama dalam kelompok usaha yang dikelola. - Membentuk kelompok usaha budidaya binaan program yang secara bertahap dapat memiliki dan mengembangkan jiwa wirausaha. - Membentuk kelompok usaha budidaya rumput laut binaan yang memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan usaha. - Membentuk kelompok usaha budidaya rumput laut binaan yang memiliki keterampilan teknis mengelola kegiatan budidaya rumput laut. <p>Kegiatan pelatihan pengembangan potensi diri (<i>achievement motivation training</i>), kewirausahaan dan manajemen, dan teknis perikanan seluruhnya memakan waktu 4 hari, dari tanggal 17 September 2001 sampai 20 September 2001. Pelatihan dilaksanakan pada jam 10.00-15.00.</p> <p>Peserta pelatihan adalah masyarakat kawasan pesisir dengan kriteria yang telah ditentukan oleh tim program pengembangan.</p> <p>Jumlah peserta sebanyak 40 orang, yang seluruhnya nelayan dan petani nunput laut. Umur peserta berkisar antara 20-50 tahun. Pengalaman kerja peserta dalam usaha budidaya runput laut sekitar 1 tahun. Pelatihan diikuti secara penuh oleh peserta (dengan tingkat kehadiran 100%). Mereka antusias mengikuti pelatihan, seperti terlihat dari aktivitas tanya jawab selama kegiatan diskusi berlangsung.</p> <p>Bone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Petani dan Kelompok Tani Rumput Laut <p>Petani rumput laut yang telah yang melaksanakan budidaya rumput laut seluruhnya berjumlah 389 KK, yang telah tergabung dalam 20 kelompok tani nelayan. Walau mereka tergabung dalam kelompok, namun karena lemahnya manajemen, usaha kelembagaannya belum dinamis dan belum dapat menunjang keberhasilan usaha taninya. Hasil wawancara dengan beberapa petani rumput laut menyatakan bahwa mereka berminat sekali mengikuti pembinaan dan pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan Manajerial Tujuan Pelaksanaan <p>Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pembudidayaan rumput laut agar dapat menerapkan tekhnologi budidaya dan menangani hasilnya secara lebih baik dan berorientasi kepada pola kemitraan usaha.</p> <p><i>Waktu dan Tempat</i> Dilaksanakan hari Kamis dan Jumat, tanggal 4 -5 Oktober 2001, di gedung SKB JI. Jenderal Sudirman, Watampone.</p> <p><i>Peserta Pelatihan</i> Terhimpun dari 2 Koperasi dan 3 Kecamatan yaitu KUD Abadi dua Kecamatan, masing-masing: Kecamatan Tanete Riattang Timur 15 orang, kecamatan Barebbo 5 orang, KUD Siamasei Kecamatan Sibulue 20 orang.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p><i>Materi Pelatihan</i> 5 materi pokok dan 3 materi penunjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi pokok disampaikan oleh instruktur dari Dinas Perikanan dan Kelautan dengan materi: <ul style="list-style-type: none"> - Budidaya Rumput Laut di Tambak dan Laut - Pasca Panen Rumput Laut - Dinamika Kelompok - Rencana Kegiatan Usaha - Kemitraan Usaha - Materi Penunjang disampaikan oleh narasumber dari: <ul style="list-style-type: none"> - Materi Perkoperasian dari Dinas Koperasi dan PKM - Materi Perkreditan dari BRI Cabang Watampone - Materi Prospek Pemasaran dari Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Bone. <p><i>Hasil Pelatihan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para peserta pelatihan telah menguasai teknologi budidaya rumput laut mulai pra panen sampai pasca panen. - Para peserta pelatihan telah memahami pengetahuan tentang perkoperasian, perkreditan, kemitraan usaha, penyusunan rencana, kegiatan usaha dan dinamika kelompok pembudidayaan. - Telah menetapkan personil kelompok kerja independen dalam kaitan pengelolaan dukungan modal kerja melalui Proyek Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan. - Pemberian Bantuan Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan permodalan, berupa modal bergulir Rp. 15.000.000, - Bantuan sarana produksi berupa: bibit rumput laut dan rakit-rakit bambu, tali plastik dan pelambung - Bantuan sarana pasca panen berupa: para-para, karung plastik - Pemasaran <p>Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya rumput laut telah dilaksanakan suatu kerjasama melalui pola kemitraan antara koperasi rumput laut setempat dengan Koperasi Inti Mitra Mandiri (KOPIMMA) dan dengan Koperasi Allansi Tani dan Nelayan Nasional (KOPATNAS) melalui pola bagi hasil dari hasil peningkatan harga jual dari rumput laut.</p> <p>Juga telah dilaksanakan hubungan langsung dengan pabrik pengolahan rumput laut (PT. Banting Murung Indah) sehingga didapatkan harga jual yang lebih baik. Selain itu akan diupayakan pembentukan Induk Koperasi Rumput Laut yang pembentukannya diharapkan difasilitasi oleh DKP.</p> <p><i>Kepulauan Seribu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM bagi masyarakat pesisir pantai di Kepulauan Seribu Pelatihan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang telah dibentuk. Setiap kelompok diketuai oleh seorang ketua kelompok dan dari semua ketua kelompok dipilih seorang koordinator kelompok. Kelompok-kelompok yang terbentuk pada setiap daerah calon penerima bantuan sebanyak 10 kelompok dengan jumlah calon penerima bantuan sebanyak 100 orang per wilayah, sehingga jumlah keseluruhan calon penerima bantuan untuk tiga wilayah sebanyak 300 orang. - Pengembangan Manajerial Usaha Budidaya Rumput Laut Semua bantuan yang diberikan kepada calon penerima bantuan tidak diberikan dalam bentuk materi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa mereka dimanjakan dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab bahwa bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah dilakukan pelatihan dan bantuan teknis, diberikan bantuan modal awal untuk budidaya. Bantuan berupa bibit rumput laut dan sarana pendukungnya diharapkan dapat ditempatkan di lokasi pembudidayaan.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan/Pengembangan Pemasaran Rumput Laut <p>Semua hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat dipasarkan langsung kepada pembeli yang datang dengan harga pasar. LSM-WBBN memfasilitasi dan memberikan arahan/informasi tempat-tempat penampungan dan pembeli rumput laut. Di samping itu, LSM-WBBN berkewajiban menampung dan membeli hasil panen masyarakat bila ternyata harga di lapangan jauh dibawah harga pasar, selain untuk menghindari tengkulak yang dapat menekan harga petani rumput laut. Dengan demikian harga rumput laut hasil panen masyarakat tetap stabil.</p> <p>Serang: Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada tanggal 10-8 Oktober 2001 di Auditorium Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP₂TP) Bojonegara Serang dan dibagi dalam 2 angkatan (angkatan I dan II).</p>
	Pencapaian hasil	Meningkatnya pengetahuan masyarakat sasaran mengenai pengembangan usaha budidaya rumput laut hingga ke pemasaran.
	Masalah	Masyarakat kurang menguasai teknologi
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat terus dilaksanakan pada tahun mendatang melalui penerapan teknologi tepat guna budidaya rumput laut.
4.6	Nama upaya	Pemantapan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir melalui Pesantren dan Lembaga Agama lainnya
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Sosialisasi dan Koordinasi Pemantapan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Cirebon: PINBUK Kabupaten Cirebon - Sumenep: Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) Pondok Pesantren Annuqayah sebagai pengelola bantuan dana bergulir <p>Konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kab. Cirebon: Yayasan Lagowo - Kab. Klungkung, Bali : PT. Sewun Indo Konsultan - Kab. Probolinggo : Panca Trimas - Kab. Sumenep : PT. Saritama Purnama - Kab. Situbondo : PT. Biasreka Engineering Consultant - Kab. Manado : Cemara Muto - Kab. Lembata, NTT: PT. Indo Timur Utama
	Tujuan upaya	<p>2001</p> <p>Cirebon: Menyusun dan menetapkan alternatif-alternatif kegiatan pengembangan dan pemantapan ekonomi masyarakat pesisir, melalui optimalisasi peran dan fungsi pesantren dan lembaga agama (Islam) yang ada pada masyarakat pesisir, dengan membuat keterkaitan antara pengolahan, penerapan teknologi produktif dan pemasaran hasil produksi masyarakat pesisir.</p> <p>Bali: <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan teknologi produktif yang memberikan dampak ekonomi pada masyarakat pesisir pantai melalui lembaga adat setempat. - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan serta peremajaan sumberdaya alam kelautan. - Menerapkan pelatihan dan kerjasama yang produktif bagi nelayan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. </p>

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya (lanjutan)	<p>Probolinggo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan teknologi produktif yang memberikan dampak ekonomi pada masyarakat pesisir pantai melalui pesantren dan lembaga agama lainnya. - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguasaan teknologi. - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan. <p>Sumenep</p> <p>Mengembangkan daerah pesisir pantai yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah pesisir dengan metode-metode yang akan diterapkan.</p> <p>Situbondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi potensi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pengembangan ekonomi keluarganya. - Melakukan pendekatan kelembagaan sebagai motivator pembangunan, dalam hal ini, melalui lembaga pesantren. - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan yang pada akhirnya diharapkan dapat meremajakan sumberdaya alam kelautan yang ada. <p>Manado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan teknologi produktif yang memberikan dampak ekonomi pada masyarakat pesisir pantai melalui lembaga pesantren dan lembaga agama lainnya. - Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui penguasaan teknologi. - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan. <p>Lembata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan teknologi produktif yang memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat pesisir pantai melalui lembaga pesantren dan lembaga agama lainnya. - Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui penguasaan teknologi. - Memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya perikanan. <p>2003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kesadaran “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir” di pesantren dan lembaga agama lainnya. - Meningkatkan kapasitas manajemen dan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir.
	Jenis kegiatan	<p>2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kab. Cirebon: Sosialisasi Program, Pembentukan Kelompok, Identifikasi Kebutuhan, Pelatihan, Pemberian Bantuan Langsung, Pendampingan. - Kab. Klungkung: Identifikasi Potensi Daerah, Analisa dan Evaluasi Masalah, Pelatihan dan Pengembangan Potensi. - Kab. Probolinggo, Sumenep, Situbondo dan Manado : Pelatihan - Kab. Lembata : Pembentukan Kelompok, Pelatihan <p>2003: Sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, Pelatihan manajemen dan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir serta pembentukan kelompok dan Pelaporan.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	2001 Jawa Barat (Kab. Cirebon); Bali (Kab. Klungkung); Jawa Timur (Kab. Probolinggo, Kab. Sumenep, Kab. Situbondo); Sulawesi Utara (Kab. Manado); NTT (Kab. Lembata) 2003 Sumatera Barat (Kab. Agam); Jawa Timur (Kab. Sampang); Sulawesi Utara (Kab. Minahasa); Bali (Kab. Gianyar)
	Sasaran	Pondok pesantren dan masyarakat daerah pesisir
	Pendanaan	Sumber : APBN 2001: Cirebon: Rp 191.670.000,00; Klungkung: Rp 192.241.000,00; Probolinggo: Rp 192.296.000,00; Sumenep: Rp 192.296.000,00; Situbondo: Rp 184.536.000,00; Manado: Rp 192.280.000,00; Lembata: Rp 191.295.000,00 2003: Rp 491.232.500,00
	Waktu pelaksanaan	2001 dan 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Cirebon: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Program. - Pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren Darul Ulum pada 6 September 2001 dan Yayasan AI Muflihah pada tanggal 10 September 2001. - Sosialisasi dilakukan dengan memberi penjelasan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik formal maupun informal, agar mereka mengetahui tujuan, target dan sasaran program. Dengan pertemuan dan sosialisasi tersebut masyarakat dan pondok pesantren memahami posisinya sebagai pihak yang ikut terlibat secara pro aktif dalam kegiatan program. - Sosialisasi dengan pemerintahan desa dilaksanakan pada 19 September 2001. Sosialisasi ke pemerintah memudahkan pelaksanaan program. Pemerintah desa mengharapkan program ini dapat membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. - Sosialisasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon. Dilaksanakan pertama kali pada tanggal 3 September 2001. Sosialisasi dengan Kepala Diskanla Kabupaten Cirebon dilakukan sebelum Tim Pelaksana Program melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran. Dari hasil pertemuan dengan dinas perikanan dan kelautan kabupaten Cirebon, koordinasi dan kebutuhan pelaksanaan program terutama berkaitan dengan inventarisasi data dan layanan publik terpenuhi dengan baik. Artinya, respon instansi pemerintah daerah sangat besar dengan pelaksanaan program ini. - Pembentukan Kelompok Kelompok yang dibentuk adalah kelompok usaha bersama masyarakat pesisir dalam 1 (satu) kelompok saja tetapi memiliki 2 (dua) unit kegiatan yaitu Unit Pengolahan Perikanan dan Unit Pengelola Mikro Mina Ventura. Kelompok tersebut terdiri dari unsur pondok pesantren Darul Ulum, Yayasan AI Muflihah dan Masyarakat setempat. Kelompok yang dibentuk bernama "Kelompok Produktif Masyarakat Pesisir DAR AL MUFLIHIN". - Identifikasi Kebutuhan dan Perumusan Rencana Kerja Kelompok Identifikasi baik berupa kebutuhan fisik berupa pemberian dan penguatan permodalan, sarana prasarana kelompok, kebutuhan pengetahuan, manajemen ataupun peningkatan ketrampilan teknis produktif. Adapun identifikasi kebutuhan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana kerja kelompok adalah sebagai berikut: -

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok memiliki kemampuan dalam membangun permodalan usaha yang terkait dengan potensi kelautan dan pesisir baik nelayan tangkap, petani tambak maupun pengolahan dan industri hasil tangkap, sehingga ada upaya untuk mengalihkan keterikatan hutang dengan tengkulak kepada lembaga keuangan yang dikelola kelompok. - Pembentukan organisasi masyarakat pesisir yang memiliki basis produktif yang berorientasi pada fusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan - Peningkatan sumberdaya kepemimpinan masyarakat pesisir sebagai upaya membangun keteraturan sistem sosial dan budaya masyarakat pesisir. - Sedangkan rencana kerja yang akan dilakukan oleh kelompok adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan aktifitas ekonomi produktif kelompok dalam bentuk kegiatan pengolahan hasil tangkap dan kegiatan pengelolaan lembaga keuangan mikro. ▪ Mengembangkan aktivitas perekonomian produktif yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan anggota disamping sebagai model atau <i>pilot project</i> dalam mengembangkan aktivitas perekonomian produktif yang berbasis sumber daya lokal dengan pendapatan teknologi terapan yang ramah lingkungan. ▪ Memperkuat kemampuan pengelolaan organisasi (leadership) melalui pelatihan Achievement Motivation Training (AMT). ▪ Membekali anggota kelompok dengan ketrampilan mengolah hasil tangkap dengan mengadakan pelatihan pengolahan. ▪ Membekali anggota kelompok dengan kemampuan mengelola lembaga keuangan mikro yang berbasis Syari'at. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro. - Pelatihan Pelatihan dilaksanakan agar: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok menguasai manajemen usaha dan organisasi - Kelompok menguasai ketrampilan teknis dalam membuat produksi pengolahan ataupun produksi ekonomi lainnya - Kelompok menguasai penggunaan teknologi terapan (tepat guna) yang menunjang kualitas produksi - Kelompok menguasai memiliki wawasan manajerial, sikap kepemimpinan bisnis dan logika serta jaringan pasar - Pemberian bantuan langsung masyarakat Proses pemberian bantuan langsung masyarakat dilakukan secara transparan dalam bentuk dana segar langsung kepada kelompok sasaran yang telah terbentuk. Setelah dana tersebut diterima, maka pihak pelaksana program mendampingi kelompok dalam menyusun rencana anggaran belanja kelompok. Dana bantuan dikelola sepenuhnya oleh kelompok sasaran melalui unit pengelola mikro mina ventura. Oleh unit pengelola mikro mina ventura, dana tersebut didistribusikan kepada unit pengolahan dan produksi perikanan untuk dijalankan sebagai modal usaha dengan pendekatan pinjaman yang harus dikembalikan kepada unit pengelola mikro mina ventura untuk dikembangkan pada kegiatan produktif lainnya baik pengembangan usaha kelompok maupun yang bersifat melayani masyarakat. <p>Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelembagaan Lembaga kegiatan Kelompok Usaha Bersama yang dibentuk dan diefektifkan perannya sebagai wadah pengembangan masing-masing anggota kelompoknya dan masyarakat nelayan sekitar. -

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Model Implementasi Program - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Klungkung memiliki tugas memonitor jalannya program sekaligus berfungsi sebagai fasilitator teknologi aplikatif serta peningkatan akses pasar. Teknologi aplikatif yang amat diperlukan pada kelompok ini teknologi pasca panen, untuk mengatasi melimpahnya hasil panen ikan terutama pada saat musim panen. Mengingat di dalam satu desa administratif terdapat delapan desa adat, maka peran dinas tersebut amat penting terutama untuk mengawasi adanya perguliran dana tersebut sebab tanpa pengawasan yang diakukan oleh DPPK, maka program perguliran dana tidak akan terjadi, mengingat masing-masing desa adat memiliki aturan tersendiri yang tidak bisa diganggu oleh desa adat lainnya. - Konsultan lokal, berperan sebagai fasilitator dan sekaligus memonitor jalannya program tersebut. - Lembaga adat, berperan sebagai fasilitator dan sekaligus merupakan bagian yang terintegrasi dengan kelompok usaha bersama tersebut. Lembaga adat juga berperan sebagai sosial kontrol terhadap jalannya pengembalian dana tersebut. - Kelompok Usaha Bersama, selain berperan sebagai wadah anggota kelompok, sebagai tempat pertemuan, difusi teknologi inovatif juga sebagai media kontrol keberhasilan program tersebut. - Pembentukan Kelompok Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Nelayan Segara Mukti Berlokasi di Dusun Bias-Desa Kusamba, Kec. Dawan - Kabupaten Klungkung. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut selama ini antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Permodalan Kelompok. - Pengadaan kegiatan simpan pinjam. - Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Anggota Kelompok, melalui berbagai macam program pelatihan, pengadaan buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dan anggotanya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Armada Penangkapan Ikan. Sampai saat ini, anggota kelompok sudah memiliki tanpa motor (jukung) sebanyak 21 unit dan perahu dengan motor sebanyak 21 unit. ▪ Diversifikasi Alat Tangkap. Diversifikasi alat tangkap tersebut amat diperlukan karena di wilayah Kabupaten Klungkung sering terjadi pengadukan laut, sehingga diperlukan variasi alat tangkap untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapannya. Variasi dan pengembangan alat tangkap tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Saran pendukung Penangkapan, seperti pembuatan umpan tiruan dari bulu domba/kambing atau benang wooll), serta penyediaan obatobatan sebagai sarana untuk pertolongan awal, serta sarana pelampung. ▪ Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan ▪ Pengembangan usaha pengolahan diantaranya dengan membuat ikan pindang, sate ikan, pepes ikan. ▪ Konservasi lingkungan hidup (kelautan). Kegiatan ini meliputi kesadaran nelayan akan pentingnya konservasi mangrove, pelestarian terumbu karang, pelarangan penggunaan bom, potas, racun, liatrik untuk menangkap ikan. Pelanggaran ketentuan tersebut oleh salah satu anggotanya akan mengakibatkan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan dan desa adat. Aktivitas program lebih ditujukan pada anggota kelompok yang relatif baru bergabung dengan kelompok Segara Mukti. - Kelompok Pembuatan Ikan Pindang Kelompok ini bertempat di Pusat Pelelangan Ikan (PPI), Desa Kusamba. Jumlah anggota kelompok yang bernaung di PPI sebanyak 67 anggota, namun yang dipilih menjadi anggota kelompok untuk pengembangan masyarakat pesisir hanya sebanyak 10 kelompok, yang memiliki omset penjualan terkecil, yakni berkisar antara 50 - 150 kg ikan pindang / hari.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Nelayan Sarining Segara Kelompok ini berlokasi di Dusun Bingin - Desa Administratif Kusamba, Kecamatan Dawan. - Pelaksanaan Pelatihan <p>Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam usaha penangkapan dan pengolahan ikan laut, terutama dititikberatkan pada bidang kewirausahaan, manajemen usaha, pengembangan usaha serta pengetahuan tentang sistem pembiayaan dan analisis suatu usaha.</p> <p>Sasaran pelatihan adalah kelompok masyarakat yang merupakan komunitas masyarakat nelayan, kategori ekonomi lemah, serta memiliki kelompok dan tempat pertemuan</p> <p>Hasil yang ingin dicapai dalam pelatihan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan para peserta, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan, manajemen usaha, pengembangan usaha serta pengetahuan tentang sistem pembiayaan dan analisa suatu usaha. - Meningkatkan potensi para peserta, ditinjau dari aspek teknologi, ketrampilan serta motivasi pengembangan diri. <p>Peserta pelatihan adalah semua yang diikutkan dalam program pengembangan masyarakat pesisir tersebut. Materi pelatihan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok materi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moral berbisnis - Kegunaan berorganisasi/berkelompok - Teknologi serta analisa usaha <p>Probolinggo: Modal kerja diberikan 50% dari nilai bantuan, dan sisanya 50% diendapkan dalam bentuk tabungan beku atas nama masing-masing kelompok, sedangkan untuk modal investasi, bantuan langsung yang berbentuk peralatan kerja dijadikan jaminan kepada Kopontren. Bantuan langsung yang bersifat pinjaman, harus ditanggung renteng kepada masing- masing anggota kelompok.</p> <p>Sumenep: Dana Usaha Masyarakat merupakan dana bantuan langsung pada masyarakat (BLM) yang menjadi kelompok sasaran, akan digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan lainnya yang diusulkan oleh masyarakat kelompok sasaran. Dana bantuan ini bersifat bergulir, artinya bahwa bantuan ini setelah memasuki jangka waktu tertentu akan dikembalikan berikut jasanya untuk dipergunakan sebagai modal usaha (untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif) bagi kelompok sasaran lainnya pada pelaksanaan pengembangan masyarakat tahap berikutnya.</p> <p>Kegiatan-kegiatan pengembangan masing-masing anggota kelompok disusun pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta aspirasi yang dapat ditangkap sehubungan dengan permasalahan yang ada. Semua hal tersebut diatas kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemanfaatan bantuan serta rencana pengembangan berikutnya dari kelompok tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Ibu-Ibu Nelayan Anwarul Abrar <p>Kelompok nelayan ini melakukan aktivitas sehari-hari berbeda-beda antara masing-masing anggota kelompok. Ada dari anggota kelompok yang bertindak sebagai buruh di bagian penangkapan ikan pagan, ada yang melakukan aktivitas dagang bakulan secara kecil-kecil di pinggir pantai dan ada juga yang bertindak pada pemrosesan pasca panen, baik pada pengeringan ikan maupun pada pembuatan Wan pindang secara tradisional. Namun demikian, secara umum semua aktivitas dikendalikan oleh kegiatan utama yang dilakukan oleh para tengkulak dan pemilik modal lainnya.</p> <p>Bantuan dana dalam bentuk BLM ini diarahkan pada tahapan usaha, antara lain:</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatasi ketergantungan permodalan dengan tengkulak. - Mengatasi ketergantungan pasar (penjualan produk) pada tengkulak - Membentuk struktur permodalan sendiri untuk membantu para nelayan lainnya dari ketergantungan pada tengkulak. - Kelompok Nelayan Rajungan <p>Penggunaan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang diberikan kepada mereka direncanakan untuk mengatasi masalah permodalan pada pembelian alat tangkap dalam bentuk jaring. (catatan: masing-masing anggota kelompok sudah memiliki perahu yang digunakan secara berkelompok, dimana satu perahu di isi oleh dua nelayan). Dengan adanya bantuan tersebut, terdapat dua keuntungan yakni, harga jaring yang selama ini dijual dengan harga dua kali lipat dari harga pasar dapat diatasi.</p> <p>Situbondo: Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Situbondo yaitu pelatihan bagi masyarakat yang berkompeten terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah pesisir. Pelatihan ditujukan bagi masyarakat non-nelayan dari Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Situbodo sebagai perantara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat mendorong pola ekonomi kerakyatan di daerah pesisir dengan penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat nelayan di Situbondo.</p> <p>Manado: <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas ekonomi peserta program pengembangan masyarakat masih sesuai dengan rencana usulan yang diajukan, khususnya bagi komunitas masyarakat pedagang yang menjadi peserta. - Peserta yang berasal dari masyarakat nelayan yang menggunakan pinjaman untuk investasi mengalami sedikit hambatan karena iklim/cuaca laut yang kurang menguntungkan untuk penangkapan ikan. - Industri pengolahan ikan dengan pengasapan masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang baik dan masih konsisten terhadap kewajiban pengambilan pinjaman. Ada yang mengalami hambatan produksi karena berkurangnya bahan baku. </p> <p>Lembata: Pembentukan kelompok didasarkan pada kesamaan jenis usaha dan keyakinan bahwa masing-masing anggota kelompok akan dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok yang dibentuk. Pembentukan kelompok tidak didasarkan pada kesamaan agama. Terdapat tiga kelompok minat masyarakat untuk kegiatan ini, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya rumput laut - Usaha penangkapan - Usaha distribusi penjualan ikan </p> <p>Sistem pengawasan, dan pengembalian kredit selain dari monitoring pembayaran cicilan melalui LEPP-M3, juga dilakukan oleh kelompok –kelompok lainnya yang belum menerima perguliran. Artinya, kemacetan dalam pembayaran cicilan akan mengakibatkan terlambatnya realisasi penyaluran kredit untuk kelompok lain pada putaran selanjutnya. Dengan demikian, masing-masing kelompok harus mengawasi kelompok yang sedang memperoleh dana pinjaman BLM agar menyelesaikan angsuran tepat waktu, sehingga perguliran dana BLM dapat berjalan sesuai dengan rencana</p>
	Pencapaian hasil	Pengembangan usaha masyarakat di sekitar lembaga keagamaan
	Masalah	Iklim/cuaca laut menghambat aktivitas penangkapan ikan. Hal ini tidak menguntungkan bagi peserta/komunitas nelayan yang memanfaatkan pinjaman investasi.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memungkinkan untuk dikembangkan terus pada lokasi yang berbeda.

No.	Item	Penjelasan
4.7	Nama Upaya	Pengembangan Grameen Bank melalui Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir Mikro Mitra Mina (LKMP-M3)
	Deskripsi Upaya	Salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir untuk membangun dan mengembangkan usaha perikanan adalah permodalan. Oleh karena itu salah satu upaya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah penciptaan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro di masyarakat pesisir. Sistem lembaga keuangan mikro seperti "Grameen Bank" dilaporkan telah berhasil memberdayakan masyarakat kecil di Bangladesh dan hal tersebut telah dicoba diterapkan di Kepulauan Seribu dan Bekasi dengan respon masyarakat cukup baik. Untuk lebih meningkatkan keakuratan arah dan sasaran serta keberhasilan program ini maka dipandang perlu untuk dibuat suatu panduan program sistem Grameen Bank khusus masyarakat pesisir atau disingkat "GB Yasir", dan untuk menonjolkan kekhususan ini maka program ini dinamakan "Mikro Mitra Mina (M3)". Secara keseluruhan program ini merupakan replikasi dari Grameen Bank setelah mengalami modifikasi-modifikasi dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi daerah serta masyarakat setempat.
	Penanggung Jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi Terkait	Konsultan 2001: Subang: Yayasan Mitra Usaha (YMU) Brebes: PT. Bramuda Konsulindo Bekasi: CRESCENT Kupang: PT. Billpass Asri Kencana Saumlaki: PT. Pratiwi Adhiguna Konsultan Konsultan 2002: PT. Tulada Konsula Konsultan 2003: PT. Tulada Konsula
	Tujuan	Memberikan fasilitas kredit kepada orang-orang termiskin di pedesaan agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dalam rangka memanfaatkan sumber daya manusia yang belum atau kurang dimanfaatkan. 2003 - Mengembangkan Kelembagaan Mina Ventura dan Kelembagaan Mikro Mitra Mina melalui penguatan Kelembagaan dan Permodalan. - Menjadikan Mina Ventura dan Mikro Mitra Mina sebagai suatu gerakan nasional bagi terwujudnya konsep "Self Financing" pada masyarakat kecil. Tujuan Khusus: - Mengembangkan kapasitas ketrampilan usaha kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan usaha perikanan skala kecil, dengan teknologi tepat guna. - Revitalisasi program Mina Ventura yang telah dilaksanakan dan mencari alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bagi kemungkinan masalah yang dihadapi.
	Sasaran	Memusatkan pelayanan kepada orang-orang miskin berdasarkan kriteria standar keimiskinan yang digunakan oleh GB yaitu kriteria "pendapatan dan aset". Setiap replikator membuat definisi kemiskinan sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing berdasarkan kriteria standar tersebut. Model GB bukanlah bantuan kemanusiaan/sosial untuk orang miskin. Model ini membebaskan anggota dan keluarganya dari pembayaran sisa pinjaman dan bunga apabila anggota meninggal dunia.
	Wilayah Pelaksanaan	Tahun 2001: Jawa Barat (Kab. Subang, Bekasi); Jawa Tengah (Kab. Brebes); NTT (Kupang); Maluku (Kab. Maluku Tenggara: Saumlaki) Tahun 2002: Jawa Barat (Tangerang), Jawa Tengah (Semarang) Tahun 2003: Sumatera Barat (Kota Padang), Jawa Timur (Kab. Pacitan), Jawa Tengah (Semarang), Banten (Tangerang)

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Pendampingan, pelatihan, peningkatan akses modal (pinjaman modal) Pinjaman modal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman umum (<i>general loan</i>), yaitu pinjaman umum untuk menciptakan lapangan kerja mandiri. - Pinjaman perumahan (<i>housing loan</i>), yaitu pinjaman untuk pembuatan rumah atau perbaikan rumah. - Pinjaman untuk pembuatan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). - Pinjaman untuk usaha bersama (<i>group loan</i>). - Pinjaman untuk keperluan anak-anak (perawatan, sekolah dll).
	Waktu Pelaksanaan	Tahun 2001, 2002 dan 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Sosialisasi ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Menyiapkan para pelaksana program yang terdiri dari unsur pimpinan dan karyawan. Masyarakat yang dapat dicalonkan sebagai pemimpin harus memiliki (tingkat pendidikan) paling rendah Diploma 3 (D-3) dari berbagai disiplin ilmu. - Inventarisasi Potensi Wilayah Meliputi Survey potensi (kependudukan, potensi kelautan, matapencaharian, pendapatan, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan masalah yang dihadapi) dan pembuatan peta domisili "calon anggota" atau "anggota". - Pertemuan Umum Adalah rapat umum yang dihadiri pemuka masyarakat, pamong desa dan calon anggota. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberitahukan secara formal program LKMP-M3 yang akan dilaksanakan dan melihat respon dan minat mereka terhadap program. - Uji Kelayakan Kegiatan untuk 'memotret' kondisi sosial ekonomi calon anggota, yang meliputi keadaan rumah, aset rumah tangga, dan pendapatannya. - Latihan Wajib LKMP-M3 Setelah calon anggota yang dinyatakan layak berdasarkan hasil uji kelayakan, tahap berikutnya adalah latihan wajib LKMP-M3 (LWK). LWK merupakan suatu program latihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada calon anggota tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dan tujuan serta kegunaan dari program kredit LKMP-M3 - Sistem dan prosedur pelaksanaannya - Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota. - Ujian Pengesahan LKMP-M3 Setelah mengikuti latihan LWK, semua anggota diwajibkan mengikuti Ujian Pengesahan LKMP-M3 (UPK). Ujian ini bertujuan untuk menguji pemahaman anggota terhadap azas, syarat, dan prinsip-prinsip program. Ujian berbentuk tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh pemimpin atau petugas yang ditunjuk pimpinan lembaga. Apabila pimpinan merasa bahwa calon anggota telah memahami materi latihan, maka LKMP-M3 dianggap lulus dan siap untuk membentuk rembug pusat. Sebaliknya LKMP-M3 dinyatakan tidak lulus, apabila calon anggota tersebut masih belum memahami materi latihan. Dengan demikian latihan harus dilanjutkan sampai dapat dinyatakan lulus dari pelatihan ini. - Rapat Mingguan Rembug Pusat Merupakan wadah di mana semua LKMP-M3 yang tergabung bertemu setiap minggu pada hari dan tempat yang telah ditentukan guna mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan lembaga (penggunaan dan pemberian pinjaman, pembayaran pinjaman, dan tabungan serta masalah yang dihadapi)

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Besarnya pinjaman tergantung kepada keperluan peminjam, yang penting mereka mampu membayar angsuran setiap minggu, sesuai perjanjian. Bagi anggota LKMP-M3, pinjaman yang diterima sifat pengunannya adalah perorangan. Untuk meminjamnya proyek dapat mentapkannya sesuai dengan kemampuan (dana yang tersedia). Jangka waktu pengembalian 50 minggu. - Administrasi dan Pembukuan Buku-buku administrasi yang ada pada sistem LKMP-M3 adalah Buku Kas Harian, Buku Laporan Petugas Lapangan, Buku Biaya, Buku Barang-Barang Inventaris, Buku Bank, Buku Kas Tabelaris, Buku Angsuran Pinjaman, dan Buku Dana darurat.
	Pendanaan	<p>Sumber : APBN Tahun 2001: Subang: Rp198.800.000,00; Brebes: Rp195.215.000,00; Bekasi: Rp199.430.000,00; Kupang: Rp198.260.000,00; Saumlaki: Rp195.839.440,00</p> <p>Tahun 2002: Rp968.950.000,00</p> <p>Tahun 2003: Rp536.085.000,00</p>
	Pencapaian hasil	Terbentuknya Mikro Mitra Mina di daerah proyek.
	Masalah	Dana yang digulirkan kurang berkembang
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Sangat memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun mendatang pada lokasi sebelumnya ataupun lokasi baru yang berbeda.
4.8	Nama upaya	Pengembangan Mina Ventura
	Deskripsi upaya	Suatu upaya pengembangan usaha di lingkungan masyarakat pesisir dengan melibatkan lembaga permodalan non-bank
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Instansi terkait	<p>Konsultan (Th 2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan juklak, juknis: PT. Kencana Biru - Sumenep: Pusat Pengembangan Kelautan dan Perikanan (PPKP IPB) - Maumere: Konsindotama Persada Loka - Bali: PT Sugitek Patih Perkasa - Sangihe Talaud: PT Bhumi Mandiri Semesta - Cilacap: INNR-IPB
	Tujuan upaya	Meningkatkan lingkungan usaha kondusif dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) melalui sistem bagi hasil pada masyarakat pesisir melalui penguatan modal, teknologi dan pasar serta kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkelanjutan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan konsep juklak, juknis Mina Ventura - Sumenep: Pelatihan - Maumere: Pengadaan modal usaha (barang atau uang), pengembangan sistem bagi hasil, pengembangan pemasaran produk, pembinaan manajemen usaha dan teknologi pengembangan Mina Ventura di berbagai daerah - Bali: Pengumpulan Data, Identifikasi Lokasi, Pembentukan Kelompok dan Penguatan Kelembagaan, Perumusan Kegiatan, Pelatihan, Pendampingan dan Monitoring - Sangihe Talaud: Pengadaan Modal Usaha (barang atau jasa), Pengembangan Sistem Bagi Hasil, Pengembangan Pemasaran, Pembinaan Manajemen Usaha dan Teknologi - Cilacap: Pelatihan

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kemampuan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat pesisir melalui penyertaan modal sementara dalam bentuk barang modal atau uang tunai berdasarkan atas kebutuhan kelompok sasaran. Penyertaan modal mina ventura diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif yang digunakan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modal kerja untuk memperlancar kegiatan usaha yang diujalakan oleh UKMK dan KMP. ▪ Modal investasi untuk produksi guna meningkatkan kualitas dan produktifitas UKMK dan KMP - Pengembangan sistem bagi hasil antara pengelola Pemodalana Mina Ventura dengan kelompok sasaran <p>Pengembangan kemampuan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan teknologi, manajemen usaha dan pemasaran.</p>
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Sumenep); NTT (Kab. Sikka: Kec. Maumere); Bali; Sulawesi Utara (Kab. Sangihe Talaud); Jawa Tengah (Kab. Cilacap)
	Sasaran	Modal Mina Ventura diperuntukkan bagi usaha kecil menengah, koperasi dan kelompok masyarakat pemanfaat dengan batasan skala usaha sebagai ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jenis kegiatan Pasangan Usaha (PU) terdiri dari usaha penangkapan ikan, budidaya ikan dan usaha penunjang perikanan.
		<p>Kriteria Pasangan Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha yang dibiayai adalah usaha perikanan dalam bentuk UKMK dan KMP (Yayasan). Bentuk usaha PU terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Kelompok, terdiri dari KMP (Yayasan) dan Koperasi berbadan hukum - Usaha non kelompok, terdiri dari usaha perusahaan dan perorangan - PU yang dibiayai memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kinerja yang baik bagi usaha lama yang ditunjukkan dengan laporan keuangan maksimum 3 tahun terakhir. Bagi perusahaan perikanan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik - Bagi usaha baru menunjukkan laporan keuangan awal yang merupakan indikasi kemampuan keuangan untuk usaha <p>Usaha-usaha perikanan yang dikembangkan atau direncanakan melalui pola diversifikasi, yaitu untuk usaha penangkapan ikan diversifikasi alat, usaha budidaya ikan diversifikasi komoditi dan usaha penunjang perikanan diversifikasi produk</p>
	Pendanaan	<p>Sumber: Dana Pemerintah.</p> <p>Besarnya penyertaan modal LPMV untuk setiap penyertaan MMV pada PU adalah minimal sebesar Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 100 juta.</p> <p>Tahun 2001: Sumenep: Rp 233.555.000,00; Maumere: Rp 238.040.000,00; Bali: Rp 282.764.000,00; Sangihe Talaud: Rp 276.105.000,00 Cilacap: Rp 225.235.000,00 Tahun 2002: Rp 934.818.500,00</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 dan 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Modal Mina Ventura (MMV) bagi calon Pasangan Usaha (PU) yang memerlukan penyertaan modal dari LPMV dapat mengajukan permohonan melalui LPMV setempat atau yang terdekat. - Calon PU mengisi formulir yang wajib diisi yang selanjutnya diserahkan kembali sebagai data-data yang diperlukan LPMV. - Calon PU selanjutnya mengajukan proposal usaha atau proyek yang meliputi aspek-aspek legalitas usaha/ijin, pemasaran, penjualan/harga, produksi/proses, budidaya/teknologi, organisasi/manajemen dan keuangan. - LPMV melakukan analisa terhadap proposal usaha atau proyek yang sudah memenuhi syarat kelengkapan informasinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas proposal tersebut - 1 (satu) hari kerja setelah termuat dalam butir (4), LPMV harus memutuskan permohonan dari calon PU.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Terbentuknya Lembaga Mina Ventura
	Masalah	Dana bantuan sulit bergulir
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Sangat memungkinkan untuk terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang
4.9	Nama upaya	Program Pemberdayaan Wanita Nelayan
	Deskripsi upaya	Program pemberdayaan wanita nelayan pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri wanita nelayan sehingga mereka dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan laki-laki. Program-program yang dikembangkan meliputi bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, serta pendidikan dan kelembagaan.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Pusat Studi Ekonomi (Badan Litbang Departemen Pertanian), Lembaga Swadaya Masyarakat (Crescent). Konsultan (Th 2001) - Kab. Demak: Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) - Kab. Pasuruan: Gapura Nirwana - Kab. Tanggamus: PT. Tricon Inter Multijasa Konsultan Konsultan (Th 2003) - Probolinggo: PT. sco Prima Inovatindo - Banjar: PT. Transfera Infranus - Bone: PT. Insan Mandiri Konsula
	Tujuan upaya	- Meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi wanita nelayan mengembangkan usaha - Meningkatkan akses wanita nelayan terhadap sumberdaya, modal, pasar dan teknologi - Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian wanita nelayan terhadap kesehatan keluarga dan sanitasi lingkungan - Meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian kelembagaan wanita nelayan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam di kawasan perikanan - Meningkatkan kesejahteraan wanita dan keluarga nelayan
	Jenis kegiatan	- Pendampingan, - Pelatihan, - Permodalan, - Pengembangan usaha
	Sasaran	Wanita nelayan
	Wilayah pelaksanaan	2001 Jawa Tengah (Kab. Demak: Desa Purworejo, Morodemak, Wedung, Pleben, Boko, Margolinduk dan Bungo); Jawa Timur (Kab. Pasuruan: Desa Mlaten, Kedawang, Kapasan dan Watuprapat); Lampung (Kab. Tanggamus Desa Kapuran dan Pantai Laut) 2003 Jawa Timur (Probolinggo); Kalimantan Selatan (Kab. Banjar); Sulawesi Selatan (Kab. Bone)
	Sasaran	Wanita nelayan
	Pendanaan	Sumber : APBN Tahun 2001: Demak: Rp264.353.000,00; Pasuruan: Rp270.729.000,00 Tanggamus: Rp334.785.000,00 Tahun 2003: Probolinggo: Rp337.000.000,00; Banjar: Rp337.000.000,00 Bone: Rp338.865.000,00

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 dan 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Demak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keorganisasian <p>Pendamping memberikan motivasi kepada kelompok untuk membentuk keorganisasian yang baik harus ada komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi - Program Kerja - Kesekretariatan - Kelengkapan pengurus - Pembagian tugas dan fungsi pengurus - AD/ART - Pertemuan Rutin - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan <p>Kelompok diajak untuk membentuk komponen-komponen di atas. Tentu saja belum semua komponen di atas bisa terwujud dengan segera. Ada yang bisa dilakukan di masa mendatang, namun paling tidak yang harus dibentuk saat ini adalah kepengurusan, fungsi dan peran pengurus, kesekretariatan, pertemuan rutin, dan program kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kelompok <p>Administrasi atau pencatatan penting dilakukan. Fungsi administrasi adalah untuk memberikan data yang dipakai untuk penyusunan rencana kerja. Oleh karenanya, pendamping memberikan wawasan, memotivasi, dan secara langsung membantu kelompok dalam membuat administrasi kelompok. Ada banyak kelengkapan administrasi yang diupayakan untuk dapat dimiliki oleh kelompok, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Anggota - Notulen Rapat - Buku Kegiatan - Buku Simpan Pinjam - Buku Kas - Buku Inventaris - Agenda Rapat <p>Namun dari semua kelengkapan administrasi diatas, baru 3 kelengkapan saja yang sudah ada saat ini. Umumnya KSM-KSM dampingan sudah memiliki Buku anggota, buku simpan pinjam, buku kas, dan buku tamu/notulen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Permodalan Kelompok</i> <p>Permodalan merupakan fokus pendampingan yang mendapat perhatian besar. Bagi kelompok, permodalan merupakan hal selalu menjadi persoalan. Bisa dipahami mengingat bahwa kelompok yang ada saat ini merupakan Keompok usaha, bukan kelompok keagamaan atau sosial. Permodalan merupakan sumber penggerak utama usaha kelompok. Para pendamping dalam pendampingan dalam masalah permodalan dikonsentrasikan pada beberapa hal yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran bahwa modal bukan satu-satunya yang menentukan maju atau mundurnya usaha. Masih ada aspek lain yang harus mendapat perhatian selain modal misalnya mutu produk dan sebagainya. Jadi jangan diartikan maju mundurnya usaha hanya tergantung modal. - Penyadaran bahwa modal harus disediakan oleh anggota itu sendiri, dan tidak mengandalkan modal dari luar. Harus ada keswadayaan permodalan. Swadayaan permodalan bisa dilakukan oleh kelompok dengan mengembangkan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Jika jumlahnya masih belum mencukupi, memanfaatkan sumber dari luar. - Memberi pengetahuan dan keterampilan mengenai penyusunan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>- Memberikan pengetahuan bahwa ada sumber permodalan lain yang bisa dimanfaatkan jika permodalan swadaya belum mencukupi. Misalnya kredit perbankan tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang terlebih dahulu harus dimiliki kelompok, misalnya administrasi keuangan yang rapi dan tertib, analisa kelayakan usaha, agunan, dan sebagainya.</p> <p>Menghubungkan dengan sumber permodalan. Pendampingan dalam permodalan ini pada akhirnya menumbuhkan keinginan untuk keswadayaan permodalan di kelompok. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya simpanan wajib, pokok, dan sukarela. Seluruh kelompok memiliki ke tiga jenis simpanan tersebut walau dengan jumlah yang berbeda-beda. Rata-rata kelompok menentukan simpanan pokok Rp. 5000, dan simpanan wajib Rp. 1000, sedangkan simpanan sukarela tidak ditentukan jumlahnya. Simpanan pokok adalah simpanan yang diberikan oleh anggota sekali saja ketika ia menjadi anggota.</p> <p>Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang wajib disetor anggota dalam periode waktu tertentu secara rutin yang disepakati bersama. Umumnya simpanan pokok diberikan pada saat pertemuan anggota (seminggu sekali). Sedangkan simpanan sukarela tidak ditentukan waktunya.</p> <p>- <i>Pengembangan usaha</i></p> <p>Dalam pengembangan usaha, pendamping melakukan pendampingan dalam hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pengetahuan tentang usaha yang bisa dikembangkan (bagi yang belum memiliki usaha) dan sekaligus menggali potensi kelompok berkaitan dengan usaha yang akan dikembangkan tersebut. Usaha yang dipilih harus berorientasi pasar, anggota pernah melakukannya, menggunakan teknologi yang dapat dijangkau, dan ada potensi untuk mengembangkannya. ▪ Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan manajemen usaha yang sederhana. Pengetahuan ini diberikan dalam pelatihan dan dalam kunjungan rutin pendampingan pada pertemuan kelompok. ▪ Memberikan pengetahuan dan menggali potensi kelompok untuk menyelesaikan masalah teknis produksi yang dihadapinya. Masalah yang umumnya dihadapi oleh kelompok yang berkaitan dengan teknis produksi usaha adalah pengemasan yang masih kurang baik yang kurang sesuai dengan keinginan pembeli. Untuk membantu mengatasinya, pendamping memberikan pengetahuan tentang pengemasan yang baik, menunjukkan contoh kemasan yang sesuai dengan keinginan pasar, menunjukkan contoh peralatan pengemasan yang bisa dipergunakan, dan mengajarkan bagaimana mengoperasikan peralatan tersebut. ▪ Memberikan pengetahuan tentang pasar-pasar yang bisa dimasuki produk kelompok ▪ Mendampingi kelompok dalam mencari pasar ▪ Mendampingi kelompok dalam menghadapi masalah permodalan. Kelompok dimotivasi untuk senantiasa mengumpulkan modal swadaya dengan cara menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Wadah kelompok akan diciptakan untuk tempat menabung bagi anggotanya. Kumpulan tabungan ini akan dikembangkan untuk modal usaha anggotanya. Pengelolanya adalah pengurus kelompok itu sendiri. Cara lain adalah dengan membantu mencarikan modal stimulan dari pihak luar atau mencari pendanaan dari lembaga keuangan, semisal perbankan. Pendamping bersama-sama kelompok menjalin hubungan dengan lembaga keuangan atau mitra yang mau memberikan bantuan. Kegiatan ini harus dilakukan bersama-sama dengan kelompok itu sendiri, agar tumbuh kepercayaan diri bahwa mereka mampu mendapatkan dana stimulan. <p>Pendampingan yang berkaitan dengan materi pendampingan di atas tersebut telah membuat KSM yang memiliki keorganisasian yang hercirikan kepengurusan yang lengkap, permodalan swadaya yang mulai terkumpul dalam bentuk simpanan wajib, pokok, dan sukarela meski dalam jumlah yang relatif kecil, memiliki jadwal pertemuan rutin kelompok, serta memiliki administrasi kelompok yang memadai.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>Tabungan kelompok berupa simpanan pokok, wajib dan sukarela itulah yang kemudian menjadi modal yang bisa dipakai oleh anggotanya untuk memdanai usahanya. Tentunya dana yang ada dari simpanan kelompok belum mencukupi kebutuhan yang sebenarnya.</p> <p>Berikut ditampilkan data yang menunjukkan kelembagaan KSM yang memiliki kelengkapan kelembagaan yang sudah baik yang sebelumnya belum ada.</p> <p>Penyaluran BLN (Bantuan Langsung Masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip-prinsip penyaluran BLM: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa prinsip BLM yang diterapkan dalam penyalurannya, yaitu: - Bersifat pinjaman bukan hibah dari pemerintah dan harus dikembalikan. Penekanan pada prinsip ini sangat penting sebab berdasarkan pengalaman, apabila masyarakat tahu bahwa dana yang diberikan berasal dari pemerintah, umumnya masyarakat menganggap bahwa dana tersebut adalah hibah dan mereka lebih suka untuk menghabiskannya dan cenderung enggan untuk mengembalikan. Oleh karenanya para pendamping selalu menekankan pada kelompok bahwa dana ini bukan hibah dan harus dikembalikan. - Besarnya pinjaman sesuai dengan kebutuhan - Besarnya pinjaman yang diberikan bukan berdasarkan keinginan tetapi berdasarkan analisa kebutuhan modal yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dengan bantuan pendamping. - Tidak ada agunan, yang ada adalah kepercayaan. - Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab pada kelompok disamping untuk memupuk kepercayaan diantara anggota kelompok. - Ada kesepakatan kelompok. Di atas materai. <p>Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian diatas materai antara peminjam dengan pemberi pinjaman (dalam hal ini PPMA pada tahap awal dan kemudian anggota dengan kelompok pada tahap berikutnya). Prinsip ini ditetapkan mengingat kecenderungan bahwa wanita hiasanya takut untuk mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang ia tandatangani di atas materai. Dengan demikian kemungkinan mereka melanggar dari perjanjian bisa diperkecil.</p> <p>Bunga ditentukan sendiri atas dasar musyawarah kelompok</p> <p>Besarnya bunga ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Ada kesepakatan antara peminjam (anggota kelompok) dengan kelompoknya tentang kesanggupan anggota untuk memberikan bunga kepada kelompoknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok menentukan sendiri siapa yang berhak mendapatkan pinjaman. Anggota mana yang berhak mendapatkan pinjaman ditentukan sendiri oleh kelompok, bukan oleh pendamping berdasarkan prioritas. Penentuan ini dilakukan dalam musyawarah anggota - Peminjam terlebih dahulu harus memiliki simpanan di kelompok: - Sebelum anggota memberi pinjaman maka ia terlebih dahulu harus memiliki simpanan di kelompok. Fungsi simpanan ini selain untuk penyediaan modal bagi kelompok juga sebagai jaminan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran. <p>Angsuran dilakukan per tiga-hari, per minggu, dan per dua-minggu</p> <p>Frekuensi angsuran ini merupakan basil kesepakatan antara peminjam dengan kelompok. Pengembalian pinjaman diantar langsung oleh peminjam kepada penanggung jawab BLM di kelompok dalam pertemuan rutin kelompok, atau tidak dalam pertemuan rutin tetapi langsung diantarkan ke rumah penanggung jawab.</p> <p>Masa pengembalian berdasarkan kesepakatan</p> <p>Masa pengembalian memang berdasarkan basil kesepakatan namun diusahakan masa pengembalian paling lama 3 bulan saja.</p> <p>Tidak ada tanggung renteng</p> <p>Adanya tanggung renteng dikhawatirkan membuat peminjam memiliki tanggung jawab yang rendah terhadap pengembalian pinjamannya karena. Oleh karena tanggung renteng ini ditiadakan.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran Kelompok sasaran BLM adalah Masyarakat kecil yang telah bergabung dalam sebuah kelompok. Untuk mempermudah proses penerimaan kredit BLM, maka perlu dibentuk Lembaga Keuangan. Lembaga ini menurut rencana akan dinamakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rejo Mitra Mina. <p>Pada prinsipnya ada dua program yang akan dilaksanakan BLM: Program Pinjaman dan Program simpanan.</p> <p>Program ini mengajak masyarakat agar membiasakan diri menabung dengan simpanan sebagai cadangan jika paceklik atau keadaan sulit. Kredit dapat dimanfaatkan untuk modal atau peralatan, tergantung kebutuhan.</p> <p>Kriteria penerima program pinjaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota kelompok binaan - Mempunyai usaha - Perempuan - Memiliki KTP atau tanda pengenal lain yang menunjukkan warga desa - Ada jaminan orang (Personal guarantee) - Disetujui dan disahkan ketua kelompok - Ada jaminan, kalau disetujui anggota kelompok. Tapi kalau sudah berjalan satu periode, jaminan bisa juga tidak diperlukan. Intinya, jaminan hanya diperlukan untuk menjalin kepercayaan. <p>Proses pengajuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibahas di kelompok, diantaranya adalah besar jumlah pinjaman - Anggota datang ke LKMP (Lembaga Keuangan Masyarakat) Pesisir - Anggota mengisi formulir dengan menyertakan persyaratan (nama, umur, jenis usaha, tempat usaha, omzet usaha) - Diteliti LKMP - Keputusan pencarian Pencairan <p>Untuk menjamin bahwa kredit benar-benar digunakan untuk usaha, sebelum pencairan, anggota harus membawa bukti kegiatan usaha, seperti nota pembelian.</p> <p>Jumlah keseluruhan dana BLM yang harus disalurkan adalah Rp 96.200.000,00. Setelah dikurangi pajak 15% maka jumlah yang ada adalah Rp81.110.000,00. Penyaluran BLM dilakukan secara bertahap. Dana ini tersalurkan pada 12 kelompok, di mana 11 kelompok masing-masing mendapatkan Rp6.800.000,00 dan satu kelompok mendapatkan Rp6.970.000,00. Berikut adalah daftar penerima BLM. .</p> <p>Pasuruan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelembagaan Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menunjang pemberdayaan masyarakat lokal melalui pembentukan kelembagaan. Kelembagaan adalah institusi atau wadah beserta aturannya – baik formal maupun non-formal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi setempat. Kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat menjadi penting kedudukannya mengingat - Tidak adanya atau masih sedikitnya lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan walaupun ada, kemampuannya dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat masih terbatas. - Kurang eratnya hubungan antara lembaga yang ada karena lembaga tersebut kurang bahkan belum mampu mewakili aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. <p>Sehubungan dengan kondisi yang ada, maka pembentukan kelembagaan masyarakat hendaknya dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan wilayahnya, sehingga model pengembangan kelembagaan yang akan dilakukan hendaknya:</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan pengembangan individu atau kelompok-kelompok kecil secara sendiri-sendiri dan terpisah. - Peran serta Lembaga/instansi hanya yang fungsinya benar-benar dibutuhkan. - Pengembangan kelembagaan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Kelembagaan yang dibentuk bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Wanita Nelayan di Pasuruan akan dibentuk lembaga-lembaga kegiatan secara berjenjang antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pada tingkat kecamatan, dibentuk Forum Musyawarah (FM) tingkat Kecamatan. - Dibentuk Lembaga Keuangan Mikro sebagai pendukung aktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUB). - Pada tingkat masyarakat sebagai sasaran, akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). - Pembentukan Forum Musyawarah <p>Kelembagaan kegiatan Pemberdayaan Wanita Nelayan yang akan dibentuk di tingkat kecamatan adalah Forum Musyawarah (FM), Pembentukan Forum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Pembentukan Forum Musyawarah ini akan dilakukan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi persiapan awal pembentukan FM (sekaligus koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi kegiatan). - Pelaksanaan FM dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kegiatan tingkat kecamatan sekaligus pembentukan kelembagaan keuangan Mikro serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Rumusan Tugas dan Tanggung jawab dari Forum Musyawarah (FM), dimana secara umum sebagai berikut - Berperan untuk memberikan dukungan operasional kepada Pendamping, Lembaga Keuangan Mikro dan KUB. - Khususnya dalam fungsi mengetahui pengelolaan keuangan di kecamatan, koordinasi kegiatan, koordinasi berbagai sumber keuangan pembangunan di kecamatan. - Kelembagaan FM ini akan menjadi wadah diskusi pelaku pengembangan usaha di kecamatan untuk mengidentifikasi potensi daerah lokasi pelaksanaan kegiatan. - Membantu permasalahan yang dihadapi baik awal maupun akhir pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan permasalahan di Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hasil kesepakatan mengenai susunan anggota dan pengurusan FM serta pengelola/pengurus lembaga keuangan Mikro tersebut, selanjutnya akan disahkan oleh Camat dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. - Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro <p>Kelembagaan Keuangan Mikro ini merupakan wadah untuk pendukung aktivitas suatu kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUB), lembaga ini akan diupayakan sebagai wadah diskusi pelaku pengembang usaha. Sebagaimana dikemukakan diatas, pembentukan akan Lembaga Keuangan Mikro ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembentukan Forum Musyawarah (FM).</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Lembaga Keuangan Mikro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan. - Mengetahui dan merekomendasi permintaan dana. - Membukukan penggunaan dana bantuan langsung. - Melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan masyarakat, termasuk pembukuan dan pengembalian dana secara teratur - Membantu penyelesaian masalah terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bermasalah. - Secara berkala melakukan pemeriksaan pembukuan KUB. - Berperan sebagai tim verifikasi bagi usulan usaha ekonomi produktif demi kelangsungan lembaga dan pengguliran dana - Mengidentifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan teknis, dan sejenisnya sebagai dasar perencanaan strategis. - Melakukan perencanaan strategis baik jangka pendek, menengah, maupun panjang berdasarkan identifikasi potensi yang telah dilakukan

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Keuangan Mikro <ul style="list-style-type: none"> - Setiap usulan model usaha harus didasarkan pada keinginan untuk membangun, memajukan dan mengembangkan usaha kecil setempat yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. - Direncanakan dan diusulkan oleh suatu kelompok usaha, didiskusikan, disepakati dan diajukan oleh Perwakilan Masyarakat. - Tidak mengandung unsur-unsur KKN. - Setiap usulan model usaha harus diajukan secara lengkap berupa proposal yang terdiri dari: alasan, tujuan, pengelola, anggaran biaya, dan manfaatnya bagi masyarakat. - Pembentukan KUB <p>Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan wadah kelembagaan kegiatan pengembangan masyarakat yang akan dibentuk di tingkat masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Anggota Kelompok Usaha Bersama ini meliputi anggota masyarakat wanita nelayan/pengolah ikan/pedagang ikan dan lain-lain yang akan menjadi pemanfaat langsung dari program ini. Perlunya pembentukan kelompok dari individu-individu sasaran kegiatan ini didasari oleh kondisi bahwa secara individual mereka memiliki posisi tawar yang relatif lemah, baik dalam sumber daya manusia, permodalan, hingga pemasaran. Dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama tiap individu diharapkan dapat bekerja sama untuk menutupi kelemahan masing-masing sehingga dapat meningkatkan posisi tawar (<i>bargaining power</i>) mereka.</p> <p>Pembentukan KUB tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan FM, yaitu dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan di masing-masing tiap desa. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama dilakukan melalui mekanisme dan kriteria sebagai berikut:</p> <p>Koordinasi awal pembentukan Kelompok Usaha Bersama yang sekaligus juga merupakan koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi tingkat desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus terdiri dari wanita atau ibu-ibu nelayan yang mempunyai usaha kecil skala rumah tangga dan pedagang - Agar lebih efektif, jumlah anggota maksimum 10 orang. - Dipilih sendiri oleh masyarakat Kecamatan Nguling atas koordinasi Camat dan Kepala desa masing-masing. - Tidak memiliki hubungan keluarga langsung antara satu dengan yang lain. - Sehat jasmani dan rohani serta memiliki komitmen tinggi untuk memajukan usahanya. - Pemberitahuan/penyebaran informasi serta undangan akan pelaksanaan FM kepada pihak-pihak terkait meliputi kepala desa, masyarakat desa yang akan menjadi kelompok sasaran (baik dari kalangan buruh nelayan, kelompok nelayan tangkap, pedagang ikan, maupun pengolah ikan), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat setempat. - Pada pelaksanaan FM tersebut akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KUB seperti lingkup kegiatan, persyaratan, hak, dan kewajiban dari anggota.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah pemberian penjelasan tersebut, kemudian akan dilakukan pembentukan KUB - Hasil-hasil kesepakatan mengenai pembentukan KUB dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wanita nelayan di Pasuruan ini diserahkan kepada kelembagaan FM, untuk selanjutnya akan disahkan dan ditindaklanjuti. - Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana bantuan langsung pada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas SDM, sarana/prasarana pendukung ekonomi produktif, dan kegiatan lainnya yang diusulkan oleh masyarakat kelompok sasaran KUB. BLM merupakan dana bergulir, dalam arti bantuan ini setelah memasuki jangka waktu tertentu akan dikembalikan berikut jasanya, untuk dipergunakan sebagai modal usaha (membiayai kegiatan ekonomi produktif) bagi kelompok sasaran lain pada pelaksanaan kegiatan tahap berikutnya. <p>Secara umum, pencairan BLM dilakukan berdasarkan mekanisme kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KUB dengan didampingi Pendamping dan Tenaga Ahli menyampaikan permintaan penyediaan dana kepada Lembaga Keuangan Mikro, dalam wujud proposal usaha yang akan dibahas dalam forum FM guna menentukan prioritas usulan jenis kegiatan dan kelayakan jumlah dana yang diajukan. - Proposal usaha dari KUB yang telah disetujui kemudian diajukan kepada Lembaga Keuangan Mikro. - Rencana tindak kemudian diverifikasi dan selanjutnya oleh Lembaga Keuangan Mikro bersama FM. - Berkaitan dengan hal tersebut, KUB diwajibkan membuka rekening dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada LKM dengan diketahui FM. - Lembaga Keuangan Mikro mencairkan dana di Bank setempat, untuk kemudian diberikan kepada KUB. - Pengelolaan Dana BLM dalam program ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Lembaga Keuangan Mikro. <p>Tata cara pembayaran kembali dana BLM dalam kegiatan ini disesuaikan dalam kesepakatan yang diambil Forum Musyawarah (FM) bersama Lembaga Keuangan Mikro dan diberlakukan untuk semua KUB pada masing-masing desa dengan ketentuan hak dan kewajibannya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besar pinjaman - Waktu pengembalian - Bunga/jasa - Pembagian - Sanksi <p>Tanggungjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelompok Pembentukan kelompok dilaksanakan setelah para peserta proyek mendapat pelatihan. Selesai pelatihan, ada jeda waktu selama 1 minggu untuk proses pengendapan materi pelatihan sekaligus untuk mencermati inisiatif dan semangat para peserta. <p>Melalui beberapa kali musyawarah atau pertemuan yang sifatnya informal di antara anggota kelompok sendiri dan dihadiri oleh pihak konsultan maupun fasilitator maka dibentuklah kelompok usaha wanita nelayan.</p> <p>Atas kesepakatan anggota kelompok maka di Kecamatan Kotaagung Kelurahan Pasar Madang ini dibentuk 2 kelompok usaha wanita nelayan.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>Untuk para wanita nelayan dari Kapuran (RT 10) bernama: "Putri Bahari" dan untuk para wanita nelayan dari Pantai Laut (RT 8) bernama: "Sri Mulya". Kedua organisasi kelompok tersebut dalam satu RW 14. Sebagai organisasi induk (payung) mereka membentuk embrio Koperasi Wanita yang diberi nama Koperasi Wanita Nelayan MULYA BAHARI.</p> <p>Jumlah anggota Putri Bahari: 37 orang dan mayoritas adalah para isteri nelayan dari Indramayu Jawa Barat sedang jumlah anggota Sri Mulya sebanyak 27 orang, semua berasal dari Bugis. Tingkat kehidupan sosial ekonomi lebih tinggi pada kelompok Sri Mulya Pantai Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Usaha Kelompok merupakan kegiatan usaha bersama yang memiliki struktur tersendiri dan mempunyai otonomi usaha sendiri. Setelah beberapa kali musyawarah baik bersama konsultan, fasilitator ataupun intern mereka sendiri, maka disepakati masing-masing kelompok dan koperasi sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Putri Bahari Telah sepakat membuka usaha: 1) Pengolahan Wan 2) Waserda 3) Simpan Pinjam. Sebelum mereka membuka usaha, kelompok ini diharuskan membuat proposal. Dalam penyusunan proposal ini, langkah pertama untuk usaha waserda adalah memilih komoditi yang berkaitan dengan nelayan/perikanan, dan diperkirakan sangat prospektif. Proposal kemudian dikoreksi dan diseleksi oleh konsultan dan fasilitator sebelum akhirnya disetujui. Realisasinya didanai BLM tahap 1. Penyaluran dana BLM dilakukan oleh konsultan melalui rekening kelompok di Kantor Cabang BRI Pringsewu, Kantor Mikro Kotaagung. Nomer rekening kelompok Putri Bahari: 33-22-2234 yang dibuka pada tanggal 2 November 2001. Pada tanggal 6 November 2001 dana BLM tahap 1 telah disalurkan melalui rekening kelompok masing-masing. - Kelompok Sri Mulya Telah sepakat membuka usaha: 1) Waserda 2) Simpan Pinjam. Sebelum mereka membuka usaha, kelompok ini diharuskan membuat proposal. Dalam penyusunan proposal ini, langkah pertama untuk usaha waserda adalah memilih komoditi yang berkaitan dengan nelayan/perikanan dan diperkirakan sangat prospektif. Proposal kemudian dikoreksi dan diseleksi beberapa kali oleh konsultan dan fasilitator sebelum akhirnya disetujui. Realisasinya didanai BLM tahap 1. Penyaluran dana BLM dilakukan oleh konsultan melalui rekening kelompok di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Pringsewu, Kantor Mikro Kotaagung. Nomer rekening kelompok Putri Bahari: 33-22-2236 yang dibuka tanggal 2 November 2001, dan pada tanggal 6 November 2001 dana BLM tahap 1 telah disalurkan mereka rekening kelompok masing-masing. - <u>Koperasi Wanita Nelayan "Mulya Bahari"</u> Pada musyawarah pendirian Koperasi Wanita Nelayan, disepakati Simpanan Pokok sebesar Rp 20.000,- dan Simpanan Wajibnya adalah Rp 5.000,- Berhubung masing-masing kelompok telah mempunyai usaha dan Koperasi tidak mempunyai usaha, maka disepakati Koperasi hanya menerima 10% dana BLM dari masing-masing kelompok dan Uang Simpanan Pokok. Uang ini untuk waktu yang akan datang dipergunakan untuk simpan pinjam dan cadangan usaha. Simpan pinjam dikelola Pengurus Koperasi yang secara operasional dilaksanakan oleh Pengurus Kelompok. Bunga pinjaman per bulan 2% dan lama pinjaman maksimum 10 bulan. Status Badan Hukum akan diproses oleh Pendamping/Fasilitator yaitu Bapak Paing KS. Waktu pengajuan Badan Hukum setelah Idul Fitri atau awal bulan Januari 2002

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Terbentuknya kelompok-kelompok perempuan nelayan
	Masalah	Daerah yang dicakup terlalu luas
	Status saat ini	Upaya tahun 2001 telah selesai, sedangkan upaya tahun 2003 masih berjalan.
	Potensi	Sangat memungkinkan untuk terus dilanjutkan dan dibuat suatu model pemberdayaan perempuan nelayan
4.10	Nama upaya	Pengembangan Alternatif Pendapatan Masyarakat Pesisir di Lokasi Konservasi Terumbu Karang
	Deskripsi upaya	<p>Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan terumbu karang harus menjadi pihak yang paling berperan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus diarahkan pada kemandirian ekonomi, kemampuan pengelolaan dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi ekologis sehingga dapat tercapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam aspek pengelolaan, kejelasan hak-hak serta kewajiban masyarakat setempat harus dipertegas. Sedangkan untuk mengurangi ketergantungan pada terumbu karang, maka perlu dikembangkan berbagai usaha alternatif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tuntutan pasar. Namun dalam upaya mengembangkan usaha alternatif tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha alternatif yang dikembangkan harus memiliki pasar dan permintaan (<i>demand based</i>) yang kontinyu. Usaha tersebut juga harus mudah diadopsi oleh masyarakat setempat seperti adat istiadat, sosial budaya dan kebiasaan masyarakat. - Perlu adanya bantuan dana atau subsidi yang tidak mengikat sebelum alternatif tersebut menghasilkan. - Usaha alternatif yang dikembangkan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan secara umum. - Usaha alternatif yang akan dikembangkan harus dapat berjalan secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	PT. HSW International (sebagai konsultan) Ujung Kulon: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, World Wildlife Fund (WWF), Pemerintah Kecamatan Sumur
	Tujuan upaya	<p>Tujuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tinggal di sekitar terumbu karang. - Memberdayakan perempuan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui partisipasi kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. - Mewujudkan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi terumbu karang yang selaras dengan keberlanjutan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya terumbu karang. <p>Tujuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi kondisi dan karakter masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi terumbu karang. - Membuat konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat di lokasi terumbu karang. - Sosialisasi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat di daerah lokasi terumbu karang. Mengembangkan usaha alternatif masyarakat di lokasi terumbu karang. - Meningkatkan peran serta perempuan nelayan dalam program pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat di lokasi terumbu karang. - Mengembangkan kelembagaan Mikro Mitra Mina (M3) di daerah <i>pilot project</i> dengan cara pemberian dan pengembangan bantuan ekonomi produktif (BEM)

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman Pengembangan Ekonomi bagi Masyarakat Kecil di Lokasi Terumbu Karang - Sosialisasi dan Diseminasi Program - Pengembangan kapasitas kegiatan melalui lembaga keuangan Mikro Mitra Mina (M3) - Pemberian dana bergulir
	Wilayah pelaksanaan	Papua (Kab. Biak Numfor); Banten (Kab Pandeglang: Ujung Kulon); Maluku (Kab. Maluku Tengah)
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem terumbu karang - Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi merusak terumbu karang - Perempuan yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melakukan usaha
	Pendanaan	APBN: Rp553.590.000,00
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Para penerima bantuan dana bergulir diseleksi berdasarkan analisis usahanya dan kejujurannya untuk mengembalikan pinjaman. Pertimbangan lain adalah bahwa selama ini mereka belum pernah menerima bantuan dan dalam posisi tidak menjadi penunggang hutang pada peminjaman sebelumnya. Besar pinjaman disuakikan dengan kebutuhan usahanya, mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 1 juta lebih.</p> <p>Pengelolaan permodalan (dana bergulir) diberikan kepada pengurus secara bertahap, langsung ke rekening ketua kelompok dan bendahara, akan dikelola dengan menerapkan beberap prinsip lembaga permodalan Grameen Bank, terutama dalam hal tabungan dan pembentukan kelompok-kelompok kecil. Untuk kepentingan keamanan dan menjaga kepercayaan masyarakat, seluruh aset yang berupa uang dari lembaga ini dibuatkan rekening Bank.</p> <p>Untuk menjamin keberhasilan perputaran modal, maka disepakati beberapa persyaratan bagi calon peminjam, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon peminjam memiliki usaha yang jelas. - Bersedia menerima uji kelayakan ekonomi terhadap usahanya dari petugas. - Peminjaman diketahui oleh anggota keluarga yang lain, yaitu suami, isteri maupun orang tua jika peminjam belum berkeluarga. - Bersedia menandatangani surat perjanjian peminjaman di atas segel, dan rela menerima sanksi jika melanggar kesepakatan, misalnya diumumkan secara terbuka di tempat umum. - Membayar uang administrasi sebesar 2,5 persen dari besar peminjaman. <p>Calon peminjam sebelumnya membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, dan mengajukan permohonan secara kolektif. Setelah disampaikan hak dan kewajiban peminjam oleh pengurus, masing-masing seluruh pemohon pinjaman membuka tabungan minimal sebesar Rp10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp5000,00 setiap bulan. Peminjam tahap pertama terdiri dari sebagian pemohon (3-4 orang), dan peminjam berikutnya tergantung kelancaran pengembalian oleh peminjam tahap pertama.</p>
	Pencapaian hasil	Berkembang
	Masalah	Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan transportasi terbatas
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memungkinkan untuk diteruskan

No.	Item	Penjelasan
4.11	Nama upaya	Dana Ekonomi Produktif (DEP) Khusus Pengadaan Bahan Bakar Solar bagi Nelayan
	Deskripsi upaya	Upaya ini adalah salah satu kegiatan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). <i>Solar-Packed Dealer</i> untuk Nelayan (SPDN) istilah ini identik dengan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sangat sederhana dan diperuntukkan bagi nelayan dengan kapal penangkapan ikan bertonase dibawah 30 GT, SPDN merupakan suatu alternatif kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan untuk mereduksi dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada awal Januari 2003.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota terkait dan Propinsi, Pertamina, HNSI
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu nelayan agar mereka dapat membeli solar dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah (HET). - Membantu nelayan agar mereka dapat melaksanakan aktivitasnya dengan biaya produksi seminimal mungkin dan menjaga kelangsungan hidupnya. - Membangkitkan semangat dan keberdayaan mereka agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. - Membantu mereka agar dapat meningkatkan produksi tangkapan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi keluarganya, lokal dan nasional.
	Jenis kegiatan	Pengadaan bahan bakar solar bagi nelayan
	Wilayah pelaksanaan	Sama dengan PEMP, yaitu seluruh provinsi di Indonesia, sebagian kota/kabupaten.
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Nelayan tradisional yang berdomisili di sekitar SPD nelayan setempat. - Nelayan andon (nelayan pendatang) yang terdaftar pada dinas yang mengurus perikanan/nelayan.
	Pendanaan	APBN
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masuk LEPP - MoU LEPP dengan koperasi/KUD-Mina - Penyetoran proposal oleh koperasi ke Pertamina - LEPP sebagai pemilik modal memberikan jaminan pembayaran kepada Pertamina. - Verifikasi Pertamina - Kontrak koperaasi denga Pertamina diketahui Diskan dan HNSI - Konstruksi sarana BBM oleh koperasi dengan arahan Diskan - Pengelolaan bersama antara LEPP dengan koperasi - Pembelian lunas koperasi ke Pertamina - Pertamina mensuplay BBM ke SPDN - SPDN menyalurkan BBM ke nelayan <30 GT
	Pencapaian hasil	Terbentuknya SPDN di beberapa lokasi
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat terus berkembang
4.12	Nama upaya	Korporatisasi Nelayan
	Deskripsi upaya	Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang menuju ke arah kemandirian usaha melalui tahapan proses peningkatan wadah dan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan manajerial usaha, fasilitasi akses permodalan, pasar dan teknologi dalam suatu bentuk korporatisasi nelayan.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan: PT. Gemacitra Objeklestari

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Tujuan Umum: Merubah budaya usaha perikanan dari tradisional individual ke budaya koporasi Tujuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan wadah dan kapasitas kelembagaan, kemampuan manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan, pasar dan teknologi. - Meciptakan jaringan usaha nelayan dan hulu sampai hilir. - Memfasilitasi pembentukan usaha-usaha kecil nelayan secara terpadu berbasis sumberdaya lokal. - Membuat model badan usaha milik nelayan berbasis sumberdaya lokal
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi dan kelompok - Pelatihan manajemen usaha perikanan - Fasilitasi pembentukan badan usaha perikanan - Pendampingan manajemen - <i>Workshop</i> nasional - Pelaporan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon); Jawa Timur (Pasuruan); Sulawesi Selatan (Kab. Takalar); Lampung (Kab. Tulang Bawang); Sumatera Barat (Kab. Pesisir Selatan); Gorontalo (Gorontalo)
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Masyarakat Pemanfaat - Masyarakat pesisir yang melakukan kegiatan penangkapan, pengolahan produk perikanan, pemasaran ikan dan produk perikanan, perdagangan input produksi, dan perdagangan bahan pokok (pangan dan non-pangan) untuk kebutuhan harian keluarga.
	Pendanaan	APBN (Rp620.000.000,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan akan dilaksanakan di Cirebon, Pasuruan, Takalar, Tulang Bawang, Pesisir Selatan, Gorontalo. - Kegiatan Fasilitasi pembentukan jaringan usaha nelayan di Jakarta. - Lokakarya pembentukan model Badan Usaha Nelayan di Jakarta.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat terus dilaksanakan dalam tahun mendatang dengan lokasi yang berbeda
4.13	Nama upaya	Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan
	Deskripsi upaya	Usaha-usaha skala kecil atau mikro sulit dijangkau oleh fasilitas perbankan dan lembaga pendanaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti nilai dan volume usahanya yang kecil, manajemen usaha yang sangat sederhana (tidak tertulis/ tercatat), ketidaktahuan mengenai prosedur perbankan, dan tidak adanya jaminan (<i>collateral</i>) yang disyaratkan oleh perbankan. Akibatnya usaha kecil dan mikro sulit berkembang dan sering harus bergantung pada lintah darat (<i>informal moneylenders</i>) yang menyediakan persyaratan lebih mudah walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk mengatasinya perlu upaya yang mengarah pada peningkatan pengetahuan tentang lembaga-lembaga pendanaan yang dapat diakses (termasuk cara dan persyaratannya), peningkatan kemampuan manajerial usaha dan peningkatan fasilitasi kelembagaan ekonomi/keuangan yang dibentuk sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat setempat serta dapat diakses dengan persyaratan yang terjangkau. Pengalaman menunjukkan bahwa keengganan lembaga keuangan/perbankan dan lembaga pendanaan lain untuk berpartisipasi di bidang perikanan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang seluk-beluk usaha-usaha perikanan. Di pihak lain, ketidakberhasilan pihak nelayan untuk mengakses permodalan dari lembaga penyandang dana di antaranya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang fasilitas-fasilitas yang yang dapat diakses dari lembaga-lembaga penyandang dana termasuk cara dan persyaratannya.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan: PT Bakti Multi Persada
	Tujuan upaya	Tujuan Umum: Memberikan informasi dan fasilitasi akses permodalan kepada masyarakat pesisir Tujuan Khusus: - Menyiapkan informasi dan faslitasi permodalan kepada masyarakat pesisir - Memfasilitasi lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penyanggand dana lainnya untuk berkiprah di bidang usaha kecil perikanan (UKM perikanan), dalam bentuk informasi peluang, keunggulan, dan mekanisme usaha perikanan. - Memfasilitasi pertemuan <i>stakeholder (workshop)</i> yang terkait dengan permodalan masyarakat pesisir.
	Jenis kegiatan	- Identifikasi Permasalahan dan Sumber Permodalan - Penyusunan Buku dan Leaflet - Workshop Akses Permodalan - Sosialisasi Akses Permodalan kepada Masyarakat Pesisir - Fasilitasi Akses Permodalan - Monitoring dan Evaluasi - Pelaporan
	Wilayah pelaksanaan	Di lokasi nelayan/perikanan yang kegiatan ekonomi alternatifnya (usaha skala kecil) perlu dikembangkan, baik penangkapan ikan yang produktivitasnya rendah, pengolahan, maupun pedagang ikan yang saat ini permodalannya tergantung kepada bakul dan lintah darat (<i>informal money lenders</i>). Lokasi tersebut direncanakan di Riau (Kota Pekanbaru), Jawa Barat (Kab. Ciamis, Cirebon), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Selatan (Kota Ujung Pandang) dan NTB (Kota Mataram)
	Sasaran	- Lembaga perbankan dan lembaga penyanggand dana lainnya. - Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) M3. - Masyarakat pesisir yang melakukan kegiatan pengolahan produk perikanan secara tradisional, pemasaran ikan dan produk perikanan, perdagangan input produksi, dan perdagangan bahan pokok (pangan dan non-pangan) untuk kebutuhan harian keluarga. - Usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat pesisir skala kecil yang memiliki ciri <i>cash flow (inflow dan outflow)</i> secara harian.
	Pendanaan: nilai, sumber, sifatnya	APBN (Rp529.446.500,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat terus dilaksanakan pada tahun mendatang
4.14	Nama upaya	Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat
	Deskripsi upaya	Program Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat berupaya untuk mensinergikan berbagai komponen yang ada, dengan memadukan peran pemerintah dengan programnya dan masyarakat pedesaan sebagai sasaran program sekaligus pelaksana program utamanya (mereka yang masih produktif). Tujuannya adalah untuk dapat secara bersama-sama membangun kesejahteraan dengan pola pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta praktek langsung ke berbagai bidang usaha kegiatan ekonomis produktif dengan pemanfaatan potensi dan sumberdaya alam yang mendukung.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan: PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka
	Tujuan upaya	Tujuan Umum: Meningkatkan pendidikan dan usaha ekonomi produktif generasi muda nelayan. Tujuan Khusus: - Mengembangkan kapasitas keterampilan usaha kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan usaha perikanan skala kecil, dengan teknologi tepat guna. - Menerapkan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan bagi daerah yang menjadi target.
	Jenis kegiatan	- Sosialisasi program penguatan iptek melalui pendidikan dan latihan berbasis masyarakat - Praktek usaha ekonomis produktif - Persiapan dan pembentukan kelompok - Pendampingan - Pengadaan modal usaha - Pengembangan pemasaran produk - Pembinaan manajemen usaha dan teknologi tepat guna
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kab. Sumenep)
	Sasaran	- Masyarakat desa pesisir yang tergolong produktif dan mempunyai peluang/potensi untuk mengembangkan diri. - Perguruan tinggi lokal dan/atau lembaga riset dan lembaga lain (LSM) yang mempunyai relevansi dengan kegiatan dimaksud.
	Pendanaan: nilai, sumber, sifatnya	APBN
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dapat terus dilaksanakan dalam tahun mendatang pada lokasi yang berbeda
4.15	Nama upaya	Pemberdayaan Petani Garam
	Deskripsi upaya	Salah satu yang harus mendapat perhatian dari pemerintah adalah petani garam. Garam hasil proses para petani ini berbeda-beda mutunya dan masih belum siap sebagai garam konsumsi untuk kebutuhan makanan manusia dan pakan ternak. Melalui proses dengan penambahan yodium sebesar 30-80 ppm, garam tersebut baru siap dipasarkan. Proses yodisasi dilakukan oleh pengusaha garam yang mempunyai daya serap terhadap garam petani cukup besar. Semula garam krosok dimonopoli oleh PN Garam, namun setelah kebutuhan garam meningkat maka diberikan kesempatan kepada masyarakat mengolah garam. Namun sampai tahun 2000 kebutuhan tersebut masih belum cukup, untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus diimpor dari Luar Negeri.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan: PT. Tridaya cipta Mandiri

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Tujuan: membantu masyarakat pesisir, khususnya petani garam dalam kegiatan usaha mereka, baik secara kelembagaan maupun dalam permodalan Tujuan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan wadah kelembagaan petani garam - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam. - Meningkatkan kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pelatihan dan pengembangan usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok - Penguatan kelembagaan - Pelatihan dan peningkatan SDM - Fasilitasi dan pendampingan - Bantuan langsung masyarakat - Pembuatan buku pedoman umum
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon); Sulawesi Selatan (Kab. Jeneponto)
	Sasaran	Petani garam
	Pendanaan	APBN (Rp400.647.500,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memungkinkan untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dan terus berlanjut hingga dapat dibuat model pemberdayaan petani garam.
4.16	Nama upaya	Inventarisasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Deskripsi upaya	<p>Dominasi perikanan skala kecil menyebabkan rendahnya produktivitas sektor perikanan, yang akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan rata-rata nelayan dan petani ikan. Setelah bertahun-tahun, sebagian besar nelayan dan petani ikan terperangkap dalam kemiskinan struktural. Sementara itu, secara struktural pula, sebagian kecil nelayan skala besar dari tahun ke tahun meraih pendapatan yang tinggi sebagai hasil keunggulan mereka dalam teknologi, modal, pasar dan manajemen usaha.</p> <p>Upaya peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi tepat guna masih dirasakan sangat kurang, terutama terobosan teknologi baru yang lebih efisien dan efektif. Dalam menghubungkan nelayan sebagai pengguna dengan produsen alat usaha, diperlukan semacam temu bisnis berupa pameran dan seminar, pembentukan networking bidang teknologi, dan uji coba teknologi di daerah pilot.</p>
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	Konsultan: PT. Bernala Nirwana
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh informasi teknologi masyarakat pesisir saat ini (<i>existing condition</i>) yang ada dan tingkat kebutuhan teknologi tepat guna. - Meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir melalui penerapan teknologi tepat guna. - Meningkatkan efektifitas implementasi teknologi kepada masyarakat pesisir melalui pengembangan jaringan kerja (<i>net working</i>).

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan analisis tingkat penggunaan teknologi dan kemungkinan teknologi baru - Pertemuan/diskusi pakar, praktisi, dan LSM - Pembuatan buku panduan teknologi perikanan untuk rakyat - Pembuatan <i>pilot project</i> dengan temu usaha yang berbeda (pengolahan dan pembuatan kja) - Lokakarya/workshop - Peluncuran <i>web site</i> TTG
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
	Sasaran	Masyarakat pesisir
	Pendanaan: nilai, sumber, sifatnya	APBN (Rp750.375.000,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang pada lokasi yang berbeda
4.17	Nama upaya	Tindak Lanjut Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil T.A. 2000-2001
	Deskripsi upaya	Pengembangan Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/keterampilan, kemandirian, dan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan dan konsep Program PEMP, implementasi kegiatan PEMP, serta membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam aspek permodalan dan pemasaran. Ditinjau dari aspek sumberdaya alamnya, pengembangan program PEMP ini juga harus mampu menciptakan pola pemanfaatan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian sehingga proses pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	Departemen Kelautan dan Perikanan
	Pelaksana	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
	Instansi terkait	PT. Shiddiq Sarana Mulya (konsultan)
	Tujuan upaya	<p>Tujuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kepada sumberdaya lokal. - Menindaklanjuti pembinaan terhadap LEPP-M3 yang telah dibentuk pada kegiatan PEMP TA 2000-2001 <p>Tujuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pemegang kepentingan (<i>stakeholder</i>), khususnya anggota KMP dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara mandiri dan berkelanjutan. - Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pedagang/pengolah ikan. - Meningkatkan kualitas SDM pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. - Merumuskan model perguliran DEP dan model <i>Self Financing</i> untuk administrasi LEPP-M3 - Mengevaluasi dampak PEMP TA. 2000-2001

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Lapangan - Penguatan kelembagaan - Pelatihan - Lokakarya - Studi banding
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kab. Lombok Barat); Jawa Timur (Probolinggo); Sulawesi Selatan (Bantaeng); Maluku Utara (Ternate); NTT (Kupang, Kab. Sikka: Kec. Maumere); Bali (Kab. Buleleng, Klungkung); Sulawesi Tenggara (Kendari); Jakarta; Jawa Barat (Sukabumi)
	Sasaran	Masyarakat pesisir
	Pendanaan	APBN (Rp667.586.000,00)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Penguatan LEPP-M3 dan diketahuinya dampak PEMP
	Masalah	Penyerapan dana belum maksimal, dana belum sepenuhnya bergulir.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Memungkinkan untuk dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang berbeda.
13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)		
13.1	Nama upaya	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator (P2LK-MAP Inkubator)
	Deskripsi upaya	<p>Dana pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, untuk disalurkan kepada Pengusaha kecil-tenant melalui Inkubator yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Pengusaha kecil-tenant yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada pengusaha kecil-tenant lainnya dalam Inkubator tersebut atau kepada pengusaha kecil-tenant lainnya melalui Inkubator lainnya. Pengusaha kecil-tenant penerima dana MAP membukukan dana tersebut sebagai dana pinjaman.</p> <p>Catatan: Upaya ini adalah salah satu kegiatan dari Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP)</p>
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana di tingkat pusat adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM. - Pelaksana di tingkat wilayah adalah Inkubator (IPB Bogor, ITB Bandung, UNS Surakarta, ITS Surabaya)
	Instansi terkait	Bank Bukopin, Perguruan Tinggi (IPB Bogor, ITB Bandung, UNS Surakarta, ITS Surabaya)
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rintisan peningkatan inkubasi bisnis UKM melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi Pengusaha Kecil-tenant atau mitra binaan Inkubator, terutama Usaha Kecil yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada. - Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan wirausaha berbasis teknologi, atau berpendidikan tinggi melalui Inkubator. - Meningkatkan kemampuan usaha pengusaha kecil-tenant atau mitra binaan Inkubator
	Jenis kegiatan	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan kepada inkubator bisnis.
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2002: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Minimal 40 Pengusaha Kecil-tenant atau mitra binaan pada 4 Inkubator (IPB Bogor, ITB Bandung, UNS Surakarta, ITS Surabaya).</p> <p>Kriteria Pengusaha Kecil-tenant penerima dana MAP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki usaha yang akan dikembangkan dan dinilai layak serta sudah berjalan 1-3 tahun dengan produk yang sama. - Menandatangani akad pinjaman dan sanggup mengembalikan dana MAP - Menyediakan modal sendiri minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan untuk mengembangkan usaha dengan dana MAP dalam bentuk tunai atau <i>fixed asset</i> yang digunakan atau terkait langsung dengan usaha yang akan dibiayai - Mempunyai karakter, gagasan dan pengetahuan, serta wawasan yang memadai di bidang usaha yang akan dikembangkan - Menyusun rencana pelaksanaan usaha sesuai dengan jangka waktu pinjaman - Diprioritaskan bagi pengusaha kecil-tenant inkubator yang: - Memiliki jiwa kewirausahaan tinggi dan sebagai pengusaha yang telah berjalan lancar serta berbasis teknologi - Memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi dan mendapatkan proses inkubasi secara <i>in wall</i>. - Bersedia memberikan agunan baik berupa tunai, asset tetap atau bergerak, maupun asset lainnya - Sanggup mengembalikan dana MAP kepada Inkubator sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Inkubator yang bersangkutan <p>Kriteria Inkubator Penerima Dana MAP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian Inkubator : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki status yang jelas sehingga keberadaannya berkesinambungan - Memiliki tenaga tetap yang menangani Inkubator - Tersedia anggaran yang berkelanjutan untuk membiayai kegiatan rutin Inkubator - Telah berpengalaman dalam pengelolaan Inkubator minimal 3 tahun - Memiliki manajer Inkubator yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan memahami dunia usaha secara praktis - Pengalaman dan kompetensi dalam Inkubasi Usaha Kecil - Diprioritaskan kepada Inkubator yang bersedia bekerja sama dan mendapatkan dukungan dana padanan dari lembaga keuangan maupun pihak lainnya
	Pendanaan	<p>Tahun 2001: Rp 2 miliar, APBN, bergulir Tahun 2002 : Rp 2 miliar, APBN, bergulir</p> <p>Catatan: Dana yang dialokasikan kepada setiap Inkubator adalah sebesar Rp. 500 juta, yang harus disalurkan kepada minimal 10 Pengusaha Kecil-tenant Inkubator dengan pinjaman maksimal per-Pengusaha Kecil-tenant adalah sebesar Rp. 100 juta. Sumber dari Dana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Sifatnya adalah pinjaman (Total dana Rp. 2 miliar).</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001, 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	<p>Tahapan Penyaluran dan Pengembalian Dana MAP kepada Inkubator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan penetapan Inkubator serta Tenant binaan Inkubator calon penerima dana MAP - Penyaluran dana MAP kepada Inkubator - Penyaluran dana MAP kepada Tenant binaan Inkubator - Pengembalian dan perguliran dana MAP - Pembayaran jasa/bunga - Monitoring dan evaluasi

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme Pelaksanaan (lanjutan)	<p>Pengembalian Pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pengembalian pinjaman oleh Pengusaha Kecil-tenant penerima dana MAP maksimal 3 tahun dan dapat diberikan masa tenggang pembayaran pokok maksimal 6 bulan. Pengusaha Kecil-tenant menyusun jadwal pengembalian pokok MAP dan disetujui oleh Inkubator sehingga dana pokok MAP dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan arus kas berjalan dengan baik. - Dana pengembalian dari Pengusaha Kecil-tenant tersebut, selanjutnya dapat dipinjamkan kepada Pengusaha Kecil-tenant lainnya pada Inkubator yang bersangkutan - Jangka waktu pengelolaan dana MAP oleh Inkubator adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Tim P2LK-MAP. Apabila tidak diperpanjang, maka dana MAP selanjutnya digulirkan kepada Inkubator lainnya <p>Jasa/Bunga:</p> <p>Pengusaha Kecil-tenant penerima dana MAP dikenakan jasa/bunga sebesar 14% per-tahun efektif dari sisa pokok MAP yang dibayarkan setiap bulan dalam Rekening Pengusaha Kecil-tenant pada Bank Pelaksana. Setiap bulan Bank Pelaksana mengalokasikan pembayaran jasa/bunga tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebesar 2% per-tahun untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa manajemen yang meliputi penilaian kelayakan, supervisi dan pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana MAP - Sebesar 3% per-tahun dipindahbukukan kepada Rekening Pemupukan Modal dan MAP atas nama Inkubator - Sebesar 8% per-tahun dipindahbukukan kepada Rekening Pembayaran Bunga atas nama Inkubator sebagai biaya operasional Inkubator <p>Sebesar 1% per-tahun dipindahbukukan kepada Rekening Tim Koordinasi MAP Propinsi pada Bank Pelaksana sebagai biaya monitoring dan evaluasi</p>
	Pencapaian hasil	Meningkatnya produktivitas tenant-inkubator dan mengalami perkembangan. Usaha tenant-inkubator dan pengguliran antar usaha tenant.
	Masalah	Belum optimalnya Dinas Koperasi/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM dalam pembinaan inkubator bisnis di wilayahnya.
	Status saat ini	Masih berjalan, khususnya monitoring dan evaluasi
	Potensi	Konsentrasi terhadap pembinaan wirausaha-wirausaha baru. Inkubator bisnis dapat dikembangkan dan dibina.
13.2	Nama upaya	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (P2LK-MAP KSP/USP Koperasi)
	Deskripsi upaya	<p>Dana pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam ventura melalui KSP/USP Koperasi, penyalurannya bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Bukopin, BPD, BRI). Usaha Mikro dan Kecil serta KSP/USP Koperasi yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil lainnya dan atau KSP/USP Koperasi lainnya. KSP/USP Koperasi penerima dana MAP membukukan dana tersebut sebagai dana pinjaman.</p> <p>Catatan: Upaya ini adalah salah satu kegiatan dari Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP)</p>
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana di tingkat pusat adalah Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM. - Pelaksana di tingkat daerah adalah Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten / kota.

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	BUKOPIN, BPD, BRI (sebagai bank pelaksana)
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dukungan permodalan bagi UKMK terutama yang ada pada sentra/klaster Usaha Mikro dan Usaha Kecil potensial untuk mengembangkan usahanya, dan belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada - Menstimulasi pengembangan permodalan bagi UKMK melalui penyediaan modal awal (<i>seed capital</i>) dan atau dana padanan (<i>matching fund</i>) - Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan UKMK - Meningkatkan basis permodalan KSP/USP Koperasi yang anggotanya sedang atau akan mengembangkan usahanya
	Jenis kegiatan	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan (MAP) kepada UKM di sentra melalui KSP / USP koperasi
	Wilayah pelaksanaan	<p>Penyaluran dana MAP diprioritaskan kepada sentra/klaster UKM potensial di 30 propinsi/DI:</p> <p>Tahun 2001</p> <p>Sumatera Utara (Kota Medan, Kab Deli Serdang, Kota Binjai); Sumatera Barat (Kab Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab Agam); Jambi (Kab Kerinci, Kota Jambi, Kab Tanjung Jabung Barat); Bengkulu (Kota Bengkulu, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Serang, Kab Pandeglang); Jawa Barat (Kota/Kab Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kab Ciamis, Kota/Kab Bandung, Kota/Kab Sukabumi, Kab Garut, Kab Sanggau, Kota Pontianak); Jawa Tengah (Kab Sukoharjo, Kab Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab Pati, Kota Surakarta, Kab Klaten, Kab Demak, Kab Cilacap); NTB (Kab Lombok Barat, Kab Lombok Timur, Kota Mataram); Gorontalo (Kab/Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kab Malang, Kota/Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Bojonegoro, Kab Gresik, Kab Ngawi, Kota/Kab Malang, Kab Banyuwangi); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Tapin); Lampung (Kab Tanggamus, Kab Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab Tulang Bawang); NAD (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar); Maluku (Kota Ambon); Maluku Utara (Kab Maluku Utara, Kab Halmahera); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komering Ulu); Kalimantan Tengah (Kab Kotawaringin Barat, Kab Kapuas); Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kab Donggala); Sulawesi Utara (Kab Bolaang Mongondow, Kab Minahasa); Bali (Kab Gianyar, Kota Denpasar, Kab Tabanan); Kalimantan Timur (Kota Balikpapan, Kota Bontang); Sulawesi Selatan (Kab Maros, Kab Pangkep, Kab Enrekang, Kab Jeneponto, Kab Takalar, Kab Tana Toraja, Kab Soppeng); NTT (Kota Kupang); DIY (Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Gunung Kidul); Riau (Kota Pekanbaru); Papua (Kota/Kab Jayapura); DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan); Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang)</p> <p>Tahun 2002</p> <p>Sumatera Utara (Kab Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kab Tapanuli Selatan, Kab Toba Samosir, Kab Asahan, Kab Nias, Kab Mandailing Natal, Kab Labuan Batu, Kab Deli Serdang, Kota Binjai, Kab Dairi, Kab Simalungun, Kota Medan, Kab Langkat, Kab Karo, Kab Tapanuli Tengah); Sumatera Barat (Kab Tanah Datar, Kab Padang Pariaman, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab Pasaman, Kota Sawahlunto/Sijunjung, Kab Sawahlunto/Sijunjung, Kota Solok);</p> <p>Jambi : Kab Tanjung Jabung Barat, Kab Muaro Jambi, Kota Jambi, Kab Batang Hari, Kab Kerinci, Kab Merangin, Kab Tanjung Jabung Timur</p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan (lanjutan)	<p>Bengkulu : Kab Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang); Jawa Barat (Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Garut, Kab Bandung, Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kota Subang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Bekasi); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kab Kendari, Kab Buton, Kab Kolaka, Kab Muna</p> <p>Kalimantan Barat : Kab Sambas, Kab Pontianak, Kab Bengkayang, Kab Ketapang, Kab Sanggau, Kota Pontianak, Kab Sintang, Kab Landak, Kab Kapuas Hulu); Jawa Tengah (Kab Brebes, Kab Tegal, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab Demak, Kab Grobogan, Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang, Kab Blora, Kab Cilacap, Kab Banyumas, Kab Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kab Temanggung, Kab Semarang, Kab Purworejo, Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Karanganyar, kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Kebumen, Kab Kendal, Kab Jepara, Kota Magelang, Kab Magelang); NTB (Kab Bima, Kab Dompu, Kab Lombok Barat, Kota Mataram, Kab Sumbawa, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kota Bima); Gorontalo (Kab Gorontalo, Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kab Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kab Gresik, Kab Kediri, Kota Blitar, Kab Banyuwangi, Kab Pamekasan, Kab Bangkalan, Kab Blitar, Kab Pasuruan, Kab Nganjuk, Kab Sampang, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Malang, Kab Trenggalek, Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kab Madiun, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab Lamongan, Kab Pacitan, Kab Sumenep, Kab Situbondo, Kab Ngawi, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Ponorogo, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Tuban, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Magetan, Kota Batu, Kab Jombang, Kab Malang); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Banjarmasin, Kab Hulu Sungai Selatan, Kab Banjar, Kab Tabalong, Kab Kota Baru, Kab Barito kuala, Kab Tapin, Kab Tanah Laut, Kab Hulu Sungai Tengah); Lampung (Kab Lampung Selatan, Kab Lampung Utara, Kab Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kab Tanggamus, Kab Lampung Barat, Kab Way Kanan, Kota Metro, Kab Tulang Bawang, Kab Lampung Timur); NAD (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab Aceh Utara, Kab Aceh Timur, Kab Aceh Selatan, Kab Singkil, Kota Sabang, Kab Aceh Tenggara, Kab Bireun, Kab Pidie, Kab Aceh Tengah); Maluku (Kab Maluku Tenggara, Kab Maluku Tenggara Barat, Kab Huru, Kab Maluku Tengah); Maluku Utara (Kab Halmahera Tengah, Kab Maluku Utara, Kota Ternate); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Lubuk linggau, Kab Muba, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Muara Enim, Kab Musi Banyuasin, Kab Lahat); Kalimantan Tengah (Kab Kapuas, Kab Barito Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya); Sulawesi Tengah (Kab Toli-Toli, Kota Palu, Kab Poso, Kab Morowali, Kab Banggai, Kab Banggai Kepulauan, Kab Donggala); Sulawesi Utara (Kota Bitung, Kota Manado, Kab minahasa, Kab Bolaang Mongondow); Bali (Kab Klungkung, Kab Karang Asem, Kab Bangli, Kab Gianyar); Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kab Samarinda, Kab Kutai, Kab Kutai Kertanegara, Kab Balikpapan, Kota Tarakan); Sulawesi Selatan (Kab Barru, Kab Gowa, Kab Rangkep, Kab Sidrap, Kota Pare-Pare, Kab Tana Toraja, Kab Lubuk Utara, Kab Wajo, Kab Bulu Kumba, Kab Bantaeng, Kab Selayar, Kab Bone, Kab Mamuju, Kab Jeneponto, Kab Sindsrang, Kab Maros, Kota Makasar, Kab Sinjai, Kota Palopo, Kab Polmas, Kab Jeneponto, Kab Majene, Kab Pangkajene); NTT (Kab Kupang, Kota Kupang, Kab Flores Timur, Kab Sika, Kab Ende, Kab Timur Tengah Selatan); DIY (Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulon Progo, Kab Gunung Kidul); Riau (Kab Pelelawan, Kab Indragiri Hilir); Papua (Kab Sorong, Kab Jayapura, Kab Timika, Kab Biak Numfor); DKI Jakarta (Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur); Bangka Belitung (Kab Bangka)</p>

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Tersalurkannya dana MAP kepada sebanyak 113 KSP/USP Koperasi untuk melayani 2.260 unit Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi anggotanya (Tahun 2001) dan 332 KSP/USP (Tahun 2002).</p> <p>Kriteria KSP/USP Koperasi Penerima Dana MAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah berbadan hukum lebih dari 1 tahun harus telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dalam 1 tahun terakhir - Melayani anggota /calon anggota dalam sentra/klaster UKM yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja - Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana MAP 3 tahun yang memberikan indikasi layak dan dapat diwujudkan/diimplementasikan - Mendapat penilaian sehat atau cukup sehat dari Dinas yang menangani penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi - Mudah dijangkau oleh Usaha Mikro dan Kecil yang berada di dalam sentra (diprioritaskan bagi KSP/USP Koperasi yang berada di dalam sentra) - Bagi KSP harus melampirkan neraca dan laba/rugi, khusus untuk USP Koperasi melampirkan neraca laba/rugi tersendiri - Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 orang yang mempunyai usaha produktif/non konsumtif - Telah memiliki modal sendiri untuk Usaha Simpan Pinjam minimal sebesar 7,5% dari dana MAP yang akan diterima atau sekurang-kurangnya Rp. 15 juta - Diprioritaskan kepada KSP/USP Koperasi yang bersedia bekerja sama dan mendapatkan dukungan Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana padanan atau cadangan likuiditas - Pembinaan dan supervisi manajemen - Paket teknologi komputerisasi sistem manajemen KSP/USP Koperasi dengan Bank Pelaksana/ Lembaga Keuangan yang bersangkutan - Prioritas yang kedua diberikan kepada KSP/USP Koperasi yang telah bersedia dan mendapatkan dukungan dari pihak lain seperti Pemerintah Daerah, lembaga keuangan Bank maupun non-Bank terutama dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana padanan atau cadangan likuiditas - Pembinaan dan supervisi manajemen - Diutamakan yang belum mendapatkan bantuan sejenis dari APBN senilai Rp. 50 juta atau lebih selama 3 tahun terakhir, kecuali untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil berorientasi ekspor. <p>Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Penerima Dana MAP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki usaha yang layak dan akan dikembangkan - Sanggup mengembalikan dana MAP kepada KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSP/USP Koperasi yang bersangkutan - Diprioritaskan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki produk unggulan yang berdaya saing - Memiliki produk yang berbasis teknologi atau bernilai tambah tinggi - Menampung tenaga kerja produktif - Berada pada sentra/klaster UKM yang dikembangkan - Belum memperoleh fasilitas pendanaan yang memadai dari lembaga keuangan yang ada - Menyediakan modal sendiri minimal sebesar 20% dari dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang diajukan untuk memperoleh pendanaan MAP

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	<p>Tahun 2001: Rp 22,6 Miliar (113 KSP/USP Koperasi), APBN, bergulir.</p> <p>Catatan: Dana yang disalurkan kepada setiap KSP/USP Koperasi adalah sebesar Rp. 200 juta. Dana tersebut harus dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada minimal 20 usaha mikro dan kecil anggotanya, dengan pinjaman maksimal per usaha mikro dan kecil sebesar Rp.15 juta.</p> <p>Tahun 2002: Rp. 66,4 milyar (untuk 332 KSP/USP Koperasi), APBN, bergulir.</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001, 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Tahapan Penyaluran Dan Pengembalian Dana MAP Kepada KSP/USP Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan penetapan kluster usaha mikro dan kecil serta KSP/USP Koperasi penerima dana MAP - Penyaluran dana MAP kepada KSP/USP Koperasi - Penyaluran dana MAP kepada usaha mikro dan kecil anggotanya - Pengembalian dan perguliran dana MAP - Pembayaran jasa/bunga - Bimbingan teknis dan pendampingan <p>Pengembalian Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pengembalian dana MAP dari Usaha Mikro dan Kecil kepada KSP/USP Koperasi penerima dana MAP maksimal 2 tahun - Jangka waktu pengembalian pokok dana MAP dari KSP/USP Koperasi penerima dana MAP maksimal 6 tahun, termasuk waktu tenggang (<i>grace period</i>) 2 tahun, dengan tahapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pada awal tahun ke-3 s/d akhir tahun ke-4 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi mengembalikan sebesar 5% per triwulan dari pokok pinjaman dana MAP yang telah diterima atau sebesar Rp. 10 juta, sehingga kumulatif pengembalian s/d akhir tahun ke-4 sebesar 40% atau sebesar Rp. 80 juta - Pada awal tahun ke-5 s/d akhir tahun ke-6 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi mengembalikan sebesar 7,5% per-triwulan dari pokok pinjaman dana MAP yang telah diterima atau sebesar Rp. 15 juta, sehingga kumulatif pengembalian s/d akhir tahun ke-6 sebesar 60% atau sebesar Rp. 120 juta <p>Jasa/Bunga</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSP/USP Koperasi dana MAP diberikan keleluasaan dalam menetapkan jasa/bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan - KSP/USP Koperasi penerima dana MAP dikenakan jasa bunga sebesar 12% per tahun efektif dari sisa pokok MAP yang dibayarkan setiap bulan dalam rekening KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana, dengan alokasi pembayaran bunga yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Sebesar 4% untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa pembinaan manajemen yang meliputi bimbingan teknis simpan pinjam dan pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana MAP pada KSP/USP Koperasi penerima dana MAP - Sebesar 8% per tahun dipindahbukukan dalam Rekening Pembayaran Bunga KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana. Setiap akhir triwulan tahun kalender (Maret, Juni, September, Desember) Kepala Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Sebesar 1,5% per tahun dipindahbukukan dalam Rekening Pengembalian Pokok KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana sebagai pemupukan modal MAP - Sebesar 2% per tahun untuk Business Development Services (BDS) sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai fasilitator - Sebesar 1% per tahun untuk dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM propinsi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program P2LK-MAP - Sebesar 1,5% per tahun untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. - Sebesar 2% per tahun dibayarkan kepada KSP/USP Koperasi untuk selanjutnya dibukukan sebagai pemupukan modal KSP/USP Koperasi
	Pencapaian hasil	Meningkatnya produktivitas UKM di sentra
	Masalah	Setelah pelaksanaan Otonomi Daerah, koordnasi dan sinkronisasi pelaksanaan program P2LK MAP belum sepenuhnya tercapai.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Masih banyak UKM di sentra melalui KSP/USP-Koperasi yang membutuhkan dana MAP.
13.3	Nama upaya	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Keuangan Mikro (P2LK-MAP LKM)
	Deskripsi upaya	<p>Dana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada Usaha Mikro melalui LKM, yang penyalurannya bekerja sama dengan Bank Pelaksana. Usaha Mikro serta LKM yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada Usaha Mikro lainnya dan atau LKM lainnya.</p> <p>Catatan: Upaya ini adalah salah satu kegiatan dari Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP)</p>
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana di tingkat pusat adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM. - Pelaksana di tingkat daerah adalah dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM propinsi dan kabupaten/kota.
	Instansi terkait	Bukopin, BPD, BRI
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dukungan permodalan bagi Usaha Mikro diprioritaskan yang ada pada klaster/kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil potensial untuk mengembangkan usahanya dan belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada - Menstimulasi pengembangan permodalan bagi Usaha Mikro melalui penyediaan modal awal (<i>seed capital</i>) dan atau padanan (<i>matching fund</i>) - Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan LKM yang anggotanya sedang atau akan mengembangkan usahanya
	Jenis kegiatan	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan kepada UKM
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001 (27 Propinsi) Sumatera Utara (Kab Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai); Sumatera Barat (Kota Padang, Kab Pesisir Selatan, Kab Agam); Jambi (Kab Muaro Jambi); Bengkulu (Kota Bengkulu, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Serang, Kab Pandeglang); Jawa Barat (Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Garut, Kab Sukabumi, Kota Bandung, Kab Subang, Kab Cianjur, Kab/Kota Tasikmalaya, Kota Bogor); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari); Kalimantan Barat (Kota/Kab Pontianak, Kab Kapuas Hulu); Jawa Tengah (Kab Banjarnegara, Kab Klaten, Kab Karanganyar, Kab Pemalang); NTB (Kota Mataram, Kab Lombok Barat, Kab Lombok Timur); Gorontalo (Kota/Kab Gorontalo);

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan (lanjutan)	<p>Jawa Timur (Kab Jombang, Kab Bangkalan, Kab Pamekasan, Kab Sidoarjo, Kab Jember, Kab Magetan); Kalimantan Selatan (Kota Martapura, Kota Banjarbaru); Lampung (Kab Lampung Utara, Kota Bandar Lampung); Maluku (Kota Ambon); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Musi Banyuasin, Kab Ogan Komering Ilir); Kalimantan Tengah (Kab Barito Selatan, Kab Barito Utara, Kota Palangkaraya); Sulawesi Tengah (Kota Palu); Sulawesi Utara (Kab Bitung, Kab Bolaang Mongondow); Bali (Kab Jembrana, Kablungkung); Kalimantan Timur (Kota Balikpapan); Sulawesi Selatan (Kab Takalar, Kab Maros, Kab Tana Toraja, Kab Jeneponto); NTT (Kota Kupang); DIY (Kab Sleman, Kota Yogyakarta, Kab Kulon Progo, Kab Gunung Kidul); Papua (Kab/Kota Jayapura); DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara); Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang)</p> <p>Tahun 2002 (24 Propinsi)</p> <p>Sumatera Utara (Kota Medan, Kota Sibolga); Sumatera Barat (Kota Bukittinggi, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok); Bengkulu (Kab Bengkulu); Banten (Kab Pandeglang); Jawa Barat (Kota Bandung, Kab Kuningan, Kab Garut); Sulawesi Tenggara (Kab Buton); Kalimantan Barat (Kota Pontianak); Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab Semarang, Kab Blora, Kota Semarang, Kab Grobogan); NTB (Kab Lombok Timur, Kab Lombok Barat, Kota Mataram); Jawa Timur (Kab Jember, Kab Pacitan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kab Sampang, Kab Jombang); Lampung (Kab Lampung Timur, Kab Lampung Tengah); NAD (Kota Banda Aceh); Maluku (Kota Ambon); Maluku Utara (Kab Halmahera Tengah, Kota Halmahera Tengah); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komering Ulu); Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya); Sulawesi Tengah (Kota Palu); Bali (Kab Jembrana, Kab Badung); Kalimantan Timur (Kab Samarinda); Sulawesi Selatan (Kab Mamuju, Kab Bone); DIY (Kab Sleman, Kota Yogyakarta, Kab Bantul, Kab Kulon Progo); Papua (Kab Jayapura); DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara); Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang)</p>
	Sasaran	<p>Tersalurnya dana MAP kepada minimal sebanyak 100 LKM untuk melayani minimal 2.500 unit Usaha Mikro yang menjadi anggotanya (Tahun 2001), dan 60 LKM (Tahun 2002)</p> <p>Kriteria LKM penerima dana MAP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah beroperasi lebih dari 1 tahun - Telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) - Melayani anggota atau calon anggota dalam klaster Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja - Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana MAP selama 3 tahun yang memberikan indikasi dan dapat diwujudkan/diimplementasikan - Mudah dijangkau oleh Usaha Mikro - Melampirkan neraca dan laba/rugi untuk tahun buku terakhir - Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 25 orang yang mempunyai usaha produktif/non konsumtif - Telah memiliki modal sendiri untuk Usaha Simpan Pinjam minimal sebesar 7,5% dari dana MAP yang akan diterima atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3,75 juta - Diprioritaskan kepada LKM yang bersedia bekerja sama dan mendapatkan dukungan Bank Pelaksana/ Lembaga Keuangan/ Pemerintah Daerah dalam hal

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran (lanjutan)	<p>Penyediaan dana padanan atau cadangan likuiditas</p> <p>Pembinaan dan supervisi manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diutamakan yang belum mendapatkan bantuan sejenis dari APBN senilai Rp. 50 juta atau lebih selama 3 tahun terakhir - Sanggup dan bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebagai peserta program P2LK-MAP diantaranya mentaati Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana dan Tim Koordinasi MAP Propinsi <p>Kriteria Usaha Mikro Penerima Dana MAP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang dimiliki keluarga atau kelompok - Memiliki usaha yang layak dan akan dikembangkan - Sanggup mengembalikan dana MAP kepada LKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LKM yang bersangkutan - Diprioritaskan untuk Usaha Mikro yang : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki produk unggulan - Diprioritaskan pada kluster Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dikembangkan - Belum memperoleh fasilitas pendanaan yang memadai dari lembaga keuangan yang ada - Menyediakan modal sendiri minimal 20% dari dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang diajukan untuk memperoleh pendanaan MAP
	Pendanaan	<p>Tahun 2001: Rp5 Milyar, APBN, bergulir (dialokasikan pada 100 LKM, masing-masing sebesar Rp. 50 juta).</p> <p>Tahun 2002: Rp3 Milyar, APBN, bergulir (dialokasikan pada 60 LKM).</p> <p>Catatan : (Dana tersebut harus harus dipinjamkan oleh LKM kepada minimal 25 Usaha Mikro, dengan pinjaman maksimal per Usaha Mikro sebesar Rp. 5 juta.</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001, 2002, 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Tahapan Penyaluran Dan Pengembalian Dana MAP Kepada LKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan penetapan kluster usaha mikro dan kecil serta LKM penerima dana MAP - Penyaluran dana MAP kepada LKM - Penyaluran dana MAP kepada usaha mikro anggotanya - Pengembalian dan perguliran dana MAP - Pembayaran jasa/bunga - Monitoring dan evaluasi <p>Pengembalian Pokok</p> <p>Jangka waktu pengembalian dana MAP dari pengusaha mikro kepada LKM maksimal 2 tahun. Jangka waktu pengembalian pokok dana MAP dari LKM penerima dana MAP maksimal 5 tahun, termasuk waktu tenggang (<i>grace period</i>) 1 tahun, dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada awal tahun ke-2 s/d akhir tahun ke-3 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), LKM mengembalikan sebesar 5% per triwulan dari pokok pinjaman dana MAP yang telah diterima atau sebesar Rp. 2,5 juta, sehingga kumulatif pengembalian s/d akhir tahun ke-3 sebesar 40% atau sebesar Rp. 20 juta - Pada awal tahun ke-4 s/d akhir tahun ke-5 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), LKM mengembalikan sebesar 7,5% per-triwulan dari pokok pinjaman dana MAP yang telah diterima atau sebesar Rp. 3,75 juta, sehingga kumulatif pengembalian s/d akhir tahun ke-5 sebesar 60% atau sebesar Rp. 30 juta

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	Jasa/Bunga <ul style="list-style-type: none"> - LKM penerima dana MAP diberikan keleluasaan dalam menetapkan jasa/bunga kepada Usaha Mikro anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LKM yang bersangkutan - LKM penerima dana MAP dikenakan jasa bunga sebesar 12% per tahun efektif dari sisa pokok MAP yang dibayarkan setiap bulan sejak dana MAP ada pada Rekening LKM. Alokasi jasa/bunga tersebut adalah 4% untuk Bank Pelaksana, 1.5% per tahun untuk pemupukan modal LKM, 1% untuk Tim Koordinasi MAP Propinsi, 2% per tahun untuk Business Development Services, dan 2% per tahun untuk pemupukan modal LKM. 1.5% untuk Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan pemetaan usaha mikro yang produktif untuk dialokasikan program dana MAP. - Masih terdapat kelemahan sistem pola penyaluran sehingga masih diperlukan pengkajian kembali untuk memperoleh pencapaian hasil yang maksimal terhadap program penyaluran dana MAP melalui LKM.
	Status saat ini	Masih berjalan, khususnya monitoring dan evaluasi
	Potensi	Peningkatan pembinaan terhadap UMK-UMK untuk menjadi koperasi atau UKM yang tangguh, sehingga dana MAP dapat diprogramkan kembali oleh pemerintah melalui wadah koperasi.
13.4	Nama upaya	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura (P2LK-MAP Modal Ventura)
	Deskripsi upaya	Dana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada UKK-PPU dengan pola modal ventura melalui LMVD yang ditunjuk. UKK-PPU penerima dana MAP berkewajiban mengembalikan dana tersebut untuk diinvestasikan kembali kepada UKK-PPU lain dalam wilayah kerja LMVD yang bersangkutan atau UKK-PPU di wilayah kerja LMVD lainnya
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana di tingkat pusat adalah Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM - Pelaksana di tingkat wilayah adalah Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)
	Instansi terkait	Bukopin, BPD
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rintisan peningkatan Usaha Kecil dan Koperasi (UKK) terutama yang bernilai tambah tinggi dengan penyediaan MAP melalui Lembaga Modal Ventura dan pendampingan manajemen untuk meningkatkan kemampuan manajemen UKK - Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan UKK dan lembaga keuangan dengan pola modal ventura - Menstimulasi pengembangan permodalan bagi UKK melalui penyediaan dana padanan investasi (<i>matching fund</i>)
	Jenis kegiatan	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan (MAP) kepada UKK PPU
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001: Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara Lampung. Tahun 2002: Seluruh Indonesia kecuali Propinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Banten, Bangka Belitung, Riau, Aceh, DKI Jakarta.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Tersalurkannya dana MAP kepada minimal 48 Usaha Kecil dan Koperasi-Perusahaan Pasangan Usaha (UKK-PPU) melalui 4 Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD).</p> <p>Kriteria Lembaga Modal Ventura Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beroperasi di wilayah propinsi yang ditetapkan - Memiliki kinerja baik sesuai dengan rekomendasi PT. Bahana Artha Ventura (BAV) - Bersedia menyediakan dana padanan sebagai penyertaan modal atau pembiayaan kepada UKK-PPU - Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis <p>Kriteria UKK-CPPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian LMVD - Mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 20% dari total kebutuhan dana - Diprioritaskan kepada UKK-CPPU yang: <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keunggulan kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi ekspor) - Menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau bergerak di bidang produksi dan dapat menciptakan lapangan kerja - Menggunakan sumberdaya lokal - Berbasis teknologi dan inovasi
	Pendanaan	<p>Tahun 2001: Rp5 Milyar, APBN, bergulir. Catatan : Dialokasikan pada 4 LMVD @ Rp. 1,25 Milyar. Dana senilai Rp 1,25 Milyar per LMVD, harus disalurkan kepada minimal 12 UKK-PPU, dengan pembiayaan dari dana MAP maksimal Rp. 150 juta per UKK-PPU.</p> <p>Tahun 2002 : Rp35,5 milyar, APBN, bergulir Catatan : Dialokasikan pada 21 LMVD @ Rp. 1,25 Milyar. Dana senilai Rp 1,25 Milyar per LMVD, harus disalurkan kepada minimal 12 UKK-PPU, dengan pembiayaan dari dana MAP maksimal Rp. 150 juta per UKK-PPU.</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001, 2002, 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Tahapan Penyaluran Dan Pengembalian Dana MAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan penetapan LMVD - Seleksi dan penetapan UKK-CPPU Penerima Dana MAP - Penyaluran dana MAP kepada LMVD - Penyaluran dana MAP kepada UKK-CPPU - Pengembalian dan perguliran dana MAP - Bimbingan dan pendampingan manajemen - Monitoring dan Evaluasi <p>Pengembalian Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian pokok dana MAP oleh UKK-PPU disalurkan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal divestasi UKK-PPU, yaitu maksimal 5 (lima tahun ke Rekening Penampungan MAP atas nama LMVD yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk - Jangka waktu kerjasama BPS-KPKM/Tim P2LK-MAP dengan LMVD adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP. Sedangkan jangka waktu pembiayaan dan MAP kepada UKK-PPU penerima dana MAP melalui LMVD maksimal 5 tahun

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>Pola Pembiayaan</p> <p>Pembiayaan LMVD penerima dana MAP dengan UKK-PPU dilakukan dengan pola bagi hasil, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pinjaman/penyertaan modal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola bagi hasil murni yaitu suatu pola bagi hasil yang menggunakan prinsip-prinsip : <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan prosentase tertentu yang disepakati antara KUKM-PPU dengan LMVD dari pendapatan perusahaan yang dibiayai - UKK-PPU telah melaksanakan pencatatan sesuai prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) yang benar - Pola bagi hasil terkelola, yaitu pola bagi hasil yang menggunakan prinsip-prinsip: <ul style="list-style-type: none"> - KUKM-PPU wajib menyeteror bagi hasil sementara dengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan (<i>Internal Rate of Return/IRR</i>) LMVD yaitu prosentase tertentu dari tingkat bagi hasil yang dihitung dari saldo pembiayaan (outstanding) setiap bulannya - Perhitungan final baru diadakan setelah tutup buku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh LMVD, sesuai prinsip akuntansi yang benar. - Jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka LMVD wajib mengembalikan atau melakukan penurunan prosentase bagi hasil periode berikutnya - Jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka KUKM-PPU wajib menyeteror kekurangan tersebut atau melakukan peningkatan prosentase bagi hasil pada periode berikutnya. - Apabila perhitungan bagi hasil final tidak dimungkinkan karena tutup buku dan pemeriksaan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang diperlukan dan atau terdapa bukti yang mengindikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil sementara dinyatakan sebagai bagi hasil final - Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, LMVD tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada UKK-PPU <p>Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Modal Ventura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% dari bagi hasil untuk LMVD digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (due diligent), evaluasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi - 46% dari bagi hasil untuk pemupukan modal dana MAP yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening bersangkutan - 2.5% dari bagi hasil digunakan untuk biaya operasional Tim Koordinasi MAP Propinsi untuk kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan <p>1.5% dari bagi hasil digunakan untuk biaya supervisi, monitoring dan evaluasi Bahana Artha Ventura sebagai holding company.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Telah terjadi perguliran antar KUKM-PPU dan meningkatnya produktivitas KUKM-PPU dan LMVD
	Masalah	Koordinasi dan sinkronisasi antara tim yang ada di propinsi dan LMVD belum sepenuhnya tercapai.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Masih diperlukan pengembangan LMVD yang potensial dan bernilai tambah tinggi.
13.5	Nama Upaya	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Penjaminan (P2LK-MAP Penjaminan)
	Deskripsi upaya	Dana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan untuk menjamin kredit UKMK dalam bentuk fasilitas Penjaminan Bersama melalui Lembaga Penjamin yang ditetapkan. Dana MAP untuk penjaminan bersama disimpan dalam Rekening Penjaminan dari Dana MAP pada bank yang ditetapkan atas nama Lembaga Penjamin yang penggunaan dan pencairannya untuk keperluan pembayaran klaim bagi kredit terjamin yang mengalami kemacetan. Dana tersebut dapat dialihkan untuk keperluan penjaminan kredit bagi UKMK lainnya, setelah masa penjaminannya berakhir.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana di tingkat pusat adalah Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM - Pelaksana di tingkat wilayah adalah Lembaga Penjamin
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan usaha dan akses UKMK dalam memperoleh kredit dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank melalui penyediaan fasilitas Penjamin Kredit - Menstimulasi dan menggalang partisipasi Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait lainnya dalam penyediaan layanan penjamin kredit bagi UKMK
	Jenis kegiatan	Penyaluran dana Penjamin Kredit
	Wilayah pelaksanaan	Lokasi pengembangan fasilitas penjamin kredit UKMK meliputi Propinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta (Jabotabek), Jawa Tengah dan Jawa Timur
	Sasaran	<p>Tersalurnya dana MAP untuk penjaminan kredit bagi minimal sebanyak 200 UKMK yang layak mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari Bank dan Lembaga Keuangan non-Bank namun tidak memiliki atau belum memiliki agunan yang memadai.</p> <p>Kriteria UKMK Terjamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan kredit untuk membiayai kegiatan usaha produktif (non-konsumtif) - Layak usahanya namun belum memiliki agunan yang memadai sesuai dengan hasil analisis lembaga keuangan penerima jaminan dan lembaga penjamin - Sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Keuangan yang bersangkutan - Diprioritaskan bagi UKMK yang: <ul style="list-style-type: none"> - Belum memperoleh fasilitas pendanaan yang memadai dari lembaga keuangan yang ada - Sanggup menyediakan kekurangan agunan tambahan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Keuangan - Mengisi formulir aplikasi permohonan penjaminan kredit yang disediakan oleh Lembaga Penjamin <p>Kriteria Lembaga Keuangan Penerima Jaminan</p> <p>Lembaga keuangan penerima jaminan terbuka bagi lembaga keuangan bank dan non-bank yang bersedia memberikan kredit kepada UKMK dan mengikuti ketentuan penjaminan seperti tersebut di atas</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Rp5 milyar, APBN, bergulir Catatan : Dialokasikan pada 4 unit fasilitas penjaminan, masing-masing sebesar Rp. 1,25 Milyar. Pokok kredit atau kredit yang direalisasikan dengan jaminan dari fasilitas Penjamin Bersama ini adalah maksimum sebesar Rp. 200 juta per UKMK. Sifat pendanaan ini adalah pinjaman.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Besarnya Jaminan Kredit</p> <p>Prosentase Penjaminan Bersama adalah maksimal sebesar 85% dari pokok kredit atau kredit yang direalisasikan dengan komposisi penjaminan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga penjamin (Perum Sarana) menjamin maksimal 50% dari pokok kredit atau kredit yang direalisasikan - Dana dari Rekening Penjaminan MAP menjamin maksimal sebesar 35% dari pokok kredit atau kredit yang direalisasikan atau maksimum Rp 70 juta. - Prosentase jumlah penjaminan melalui Penjaminan Bersama dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan antara lembaga penjamin dan BPS-KPKM <p>Imbalan Jasa Penjaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imbalan Jasa Penjaminan menjadi beban terjamin (UKMK) dihitung dari pokok kredit atau kredit yang direalisasikan - Tarif Imbalan Jasa penjaminan ditetapkan oleh lembaga penjamin dan diberitahukan kepada Penerima Jaminan (Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank) dan Terjamin - UKMK membayar imbal jasa penjaminan sesuai lamanya masa penjaminan dengan ketentuan sebagai berikut: - Sebesar 1,50% dari nilai kredit yang direalisasikan untuk masa kredit sampai dengan 1 tahun - Sebesar 2,75% dari nilai kredit yang direalisasikan untuk masa kredit di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun - Sebesar 3,60% dari nilai kredit yang direalisasikan untuk masa kredit di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun. - Tarif Imbal Jasa penjaminan sebagaimana dimaksud di atas dapat ditinjau kembali oleh lembaga penjamin sesuai dengan perkembangan keadaan - Dari Imbal Jasa Penjaminan yang dibayar oleh Terjamin, sebesar 75% diberikan kepada lembaga penjamin, sedangkan 25% disimpan di dalam Rekening Penjaminan Dana MAP atas nama Lembaga Penjamin untuk pemupukan/penambahan Rekening Penjaminan Dana MAP. <p>Keputusan Klaim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Penjamin akan memproses klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan dan melakukan penelitian lapangan sebelum mengambil keputusan atas klaim - Dalam hal pengajuan klaim disetujui, maka lembaga penjamin menyampaikan salinan Surat Persetujuan Klaim kepada BPS-KPKM/Tim P2LK-MAP dalam waktu paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal persetujuan klaim yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan - Jumlah klaim yang dibayar oleh Lembaga Penjamin - Jumlah kewajiban/resiko yang ditanggung oleh Penerima Jaminan <p>Dalam hal pengajuan klaim ditolak, maka Lembaga Penjamin menyampaikan salinan surat penolakan klaim dalam waktu paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal surat penolakan klaim kepada BPS-KPKM/Tim P2LK-MAP</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila klaim disetujui, maka lembaga penjamin melakukan pembayaran klaim sebesar jumlah klaim yang disetujui sesuai dengan surat persetujuan klaim kepada Penerima Jaminan. Selanjutnya Lembaga Penjamin mendebet Rekening Penjaminan Dana MAP secara proporsional yaitu sebesar 35% dari jumlah kredit macet yang dijamin dikalikan jumlah klaim yang dibayar - Sejak klaim dibayar oleh Lembaga Penjamin, maka klaim tersebut beralih menjadi piutang subrogasi - Hasil penagihan piutang subrogasi akan dibayar kepada Lembaga Penjamin, dan lembaga penjamin mengalokasikan secara proporsional hasil penagihan piutang subrogasi dimaksud untuk disimpan ke dalam Rekening Penjamin Dana MAP <p>Perpanjangan Penjaminan Apabila Lembaga Penjamin menyetujui permintaan perpanjangan jaminan kredit yang diajukan Penerima Jaminan, maka Lembaga Penjamin akan memberitahukan kepada BPS-KPKM dalam waktu paling lambat 1 bulan sejak tanggal persetujuan perpanjangan penjaminan kredit.</p>
	Pencapaian hasil	Berkembang dengan terbentuknya lembaga Penjamin Keuangan Daerah yang memadai dalam upaya memfasilitasi UKM yang potensial yang memerlukan dana pinjaman kredit.
	Masalah	Sinkronisasi program antara program yang dikembangkan di pusat dengan pemerintah daerah yang masih perlu dikembangkan
	Status saat ini	Masih berjalan dan dikembangkan
	Potensi	Masih banyak UKM yang potensial, produktif dan layak yang memiliki keterbatasan modal yang perlu memperoleh fasilitas penjaminan kredit
13.6	Nama upaya	Pengembangan Lembaga Pengembangan Bisnis / <i>Business Development Services</i> (LPB/BDS)
	Deskripsi upaya	Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS) dengan menyediakan layanan bisnis secara langsung kepada KUKM
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pembina dalam memahami peran BDS untuk meningkatkan kinerja UKM - Meningkatkan peran BDS dalam memberikan layanan pengembangan bisnis kepada UKM dalam sentra dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga mampu memberikan layanan non-finansial - Memperkuat BDS sebagai lembaga non pemerintah yang berperan sebagai fasilitator langsung di lapangan dalam membangun kapasitas lokal
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program BDS - Identifikasi dan seleksi BDS oleh Lembaga Penilai Kinerja BDS bersama Tim Identifikasi, Seleksi dan Penetapan BDS - Penetapan BDS oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM - Penyaluran dukungan dana operasional BDS - Konsolidasi dan pemantapan program BDS

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	<p>Tahun 2001</p> <p>Sumatera Utara (Kota Medan, Kab Deli Serdang, Kota Binjai); Sumatera Barat (Kab Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab Agam); Jambi (Kab Kerinci, Kota Jambi); Bengkulu (Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Serang); Jawa Barat (Kota/Kab Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kab Ciamis, Kota/Kab Bandung, Kota/Kab Sukabumi, Kab Garut, Kab Bekasi); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari); Kalimantan Barat (Kab Sanggau, Kota Pontianak); Jawa Tengah (Kab Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab Pati, Kota Surakarta, Kab Klaten, Kab Cilacap); NTB (Kab Lombok Barat, Kab Lombok Timur, Kota Mataram); Gorontalo (Kab/Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kota/Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Gresik, Kab Ngawi, Kab Banyuwangi, Kota Surabaya); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Tapin); Lampung (Kab Tanggamus, Kota Bandar Lampung); NAD (Kota Banda Aceh); Maluku (Kota Ambon); Maluku Utara (Kab Maluku Utara, Kab Halmahera); Sumatera Selatan (Kota Palembang); Kalimantan Tengah (Kab Kotawaringin Barat); Sulawesi Tengah (Kota Palu); Sulawesi Utara (Kab Bolaang Mongondow, Kab Minahasa); Bali (Kab Gianyar, Kota Denpasar, Kab Tabanan); Kalimantan Timur (Kota Balikpapan, Kota Bontang); Sulawesi Selatan (Kab Maros, Kab Enrekang, Kab Jeneponto, Kab Takalar, Kab Soppeng, Kota Makassar); NTT (Kota Kupang); DIY (Kota Yogyakarta, Kab Sleman); Riau (Kota Pekanbaru); Papua (Kota/Kab Jayapura); DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan); Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang)</p> <p>Tahun 2002</p> <p>Sumatera Utara (Kab Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kab Tapanuli Selatan, Kab Toba Samosir, Kab Asahan, Kab Nias, Kab Mandailing Natal, Kab Labuan Batu, Kab Deli Serdang, Kota Binjai, Kab Dairi, Kab Simalungun, Kota Medan, Kab Langkat, Kab Karo, Kab Tapanuli Tengah); Sumatera Barat (Kab Tanah Datar, Kab Padang Pariaman, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab Pasaman, Kota Sawahlunto/Sijunjung, Kab Sawahlunto/Sijunjung, Kota Solok); Jambi (Kab Tanjung Jabung Barat, Kab Muaro Jambi, Kota Jambi, Kab Batang Hari, Kab Kerinci, Kab Merangin, Kab Tanjung Jabung Timur); Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang); Jawa Barat (Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Garut, Kab Bandung, Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kota Subang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Bekasi); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kab Kendari, Kab Buton, Kab Kolaka, Kab Muna); Kalimantan Barat (Kab Sambas, Kab Pontianak, Kab Bengkayang, Kab Ketapang, Kab Sanggau, Kota Pontianak, Kab Sintang, Kab Landak, Kab Kapuas Hulu); Jawa Tengah (Kab Brebes, Kab Tegal, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab Demak, Kab Grobogan, Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang, Kab Blora, Kab Cilacap, Kab Banyumas, Kab Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kab Temanggung, Kab Semarang, Kab Purworejo, Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Karanganyar, kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Kebumen, Kab Kendal, Kab Jepara, Kota Magelang, Kab Magelang); NTB (Kab Bima, Kab Dompu, Kab Lombok Barat, Kota Mataram, Kab Sumbawa, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kota Bima); Gorontalo (Kab Gorontalo, Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kab Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kab Gresik, Kab Kediri, Kota Blitar, Kab Banyuwangi, Kab Pamekasan, Kab Bangkalan, Kab Blitar, Kab Pasuruan, Kab Nganjuk, Kab Sampang, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Malang, Kab Trenggalek, Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kab Madiun, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab Lamongan, Kab Pacitan, Kab Sumenep, Kab Situbondo, Kab Ngawi, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Ponorogo, Kab Sidoarjo, Kab</p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan (lanjutan)	<p>Mojokerto, Kab Tuban, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Magetan, Kota Batu, Kab Jombang, Kab Malang); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Banjarmasin, Kab Hulu Sungai Selatan, Kab Banjar, Kab Tabalong, Kab Kota Baru, Kab Barito kuala, Kab Tapin, Kab Tanah Laut, Kab Hulu Sungai Tengah); Lampung (Kab Lampung Selatan, Kab Lampung Utara, Kab Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kab Tanggamus, Kab Lampung Barat, Kab Way Kanan, Kota Metro, Kab Tulang Bawang, Kab Lampung Timur); NAD (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab Aceh Utara, Kab Aceh Timur, Kab Aceh Selatan, Kab Singkil, Kota Sabang, Kab Aceh Tenggara, Kab Bireun, Kab Pidie, Kab Aceh Tengah); Maluku (Kab Maluku Tenggara, Kab Maluku Tenggara Barat, Kab Huru, Kab Maluku Tengah</p> <p>Maluku Utara : Kab Halmahera Tengah, Kab Maluku Utara, Kota Ternate); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Lubuk linggau, Kab Muba, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Muara Enim, Kab Musi Banyuasin, Kab Lahat); Kalimantan Tengah (Kab Kapuas, Kab Barito Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya); Sulawesi Tengah (Kab Toli-Toli, Kota Palu, Kab Poso, Kab Morowali, Kab Banggai, Kab Banggai Kepulauan, Kab Donggala); Sulawesi Utara (Kota Bitung, Kota Manado, Kab minahasa, Kab Bolaang Mongondow); Bali (Kab Klungkung, Kab Karang Asem, Kab Bangli, Kab Gianyar); Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kab Samarinda, Kab Kutai, Kab Kutai Kertanegara, Kab Balikpapan, Kota Tarakan); Sulawesi Selatan (Kab Barru, Kab Gowa, Kab Rangkep, Kab Sidrap, Kota Pare-Pare, Kab Tana Toraja, Kab Lubuk Utara, Kab Wajo, Kab Bulu Kumba, Kab Bantaeng, Kab Selayar, Kab Bone, Kab Mamuju, Kab Jeneponto, Kab Sindrang, Kab Maros, Kota Makasar, Kab Sinjai, Kota Palopo, Kab Polmas, Kab Jeneponto, Kab Majene, Kab Pangkajene); NTT (Kab Kupang, Kota Kupang, Kab Flores Timur, Kab Sika, Kab Ende, Kab Timur Tengah Selatan); DIY (Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulon Progo, Kab Gunung Kidul); Riau (Kab Pelelawan, Kab Indragiri Hilir); Papua (Kab Sorong, Kab Jayapura, Kab Timika, Kab Biak Numfor); DKI Jakarta (Kota jakarta Utara, Kota Jakarta Timur); Bangka Belitung (Kab Bangka)</p>
	Sasaran	<p>Terlaksananya Program Perkuatan 332 BDS dalam rangka pengembangan bisnis kepada UKM dalam sentra terpilih di 30 propinsi.</p> <p>Kriteria Penetapan BDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelas keberadaan lembaga dan reputasinya - Mempunyai riwayat yang baik sebagai BDS - Mempunyai komitmen, pengalaman dan kompetensi dalam pengembangan UKM - Mempunyai manajemen yang profesional - Mmpunyai pola pendanaan pembagian resiko yang jelas - Mempunyai kedekatan akses pada sentra - Mampu melakukan subsidi silang di antara para UKM yang dilayani, artinya menganut pendekatan kolektif, dimana penarikan fee kepada UKM diberlakukan tidak sama (UKM yang lebih besar atau perbedaan pembebanan fee antar jenis layanan) - Mampu menghidupi dirinya dari fee layanan kepada UKM - BDS telah memenuhi syarat administratif antara lain telah mengisi form aplikasi BDS dan membuat proposal pengembangan UKM dalam sentra
	Pendanaan	Total Dana Rp.16,6 Milyar dialokasikan pada 332 BDS masing-masing BDS sebesar Rp. 50 juta sebagai dukungan dana operasional,
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Mekanisme Penyaluran Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - BDS yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan 6 rangkap form aplikasi BDS yang sudah diisi dan proposal Pengembangan Sentra UKM - BDS melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama program BDS dengan Dinas Propinsi/DI yang membidangi Koperasi dan UKM diketahui oleh Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha serta kontrak penggunaan dukungan dana operasional dengan Pimpro dengan materai Rp. 6.000,- masing-masing dibuat rangkap dua - BDS telah melengkapi persyaratan administratif yang masing-masing dibuat rangkap enam yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pencairan dana - Kwitansi penerimaan dana - Foto copy buku/kartu rekening bank BDS (Bukan rekening pribadi) - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak - Akte Pendirian BDS (Notaris/Bupati/Walikota) - Pimpro melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administratif yang disampaikan oleh Dinas Propinsi/DI yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja BDS Propinsi - Pimpro mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) ke rekening BDS untuk pencairan dana sebesar Rp. 50 juta kepada KPKN Wilayah I Jakarta Pusat - KPKN Wilayah I Jakarta Pusat menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) ke BRI Pusat Jakarta - Berdasarkan SPM-LS tersebut Bank BRI Pusat Jakarta mentransfer/memindahbukukan dana tanpa dikurangi pajak ke rekening Bank BDS <p>Penggunaan Dana</p> <p>Dukungan dana operasional BDS digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas BDS serta kegiatan operasional seperti: Gaji/upah, biaya konsultasi, advokasi, pendampingan, biaya administrasi, pelatihan dan perjalanan. Selanjutnya penggunaan dana dilaporkan secara bertahap kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM dengan tembusan kepada Dinas Propinsi/DI yang membidangi Koperasi dan UKM dan Pimpro Serta Tim Identifikasi, Seleksi dan Penetapan BDS Pusat, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap I : pada saat pemanfaatan dana mencapai 40% - Tahap II : pada saat pemanfaatan dana mencapai 100% <p>Layanan Pengembangan Bisnis</p> <p>Merupakan layanan yang diberikan BDS kepada UKM yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan informasi - Layanan konsultasi - Layanan pelatihan - Melakukan bimbingan/pendampingan - Menyelenggarakan kontak bisnis - Fasilitasi dalam memperluas pasar - Fasilitasi dalam memperoleh permodalan - Fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen
	Pencapaian hasil	Belum melakukan Monev
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan BDS yang berkualitas - SDM kurang, jauh dibawah dari yang diharapkan (dalam membuat proposal, perencanaan untuk sentra)
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Banyak yayasan baru yang melakukan pemberdayaan.

No.	Item	Penjelasan
13.7	Nama upaya	Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM
	Deskripsi upaya	Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM merupakan satu kesatuan sinergi dengan perkuatan BDS, Perkuatan MAP, Penjaminan Kredit serta Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Bisnis.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Pelaksana	Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas.
	Jenis kegiatan	Menetapkan sejumlah UKM, dengan kapasitas produksi yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk berkembang menjadi UKM klaster dengan <i>market share</i> yang layak.
	Wilayah pelaksanaan	<p>Tahun 2001</p> <p>Sumatera Utara (Kota Medan, Kab Deli Serdang, Kota Binjai); Sumatera Barat (Kab Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab Agam); Jambi (Kab Kerinci, Kota Jambi, Kab Tanjung Jabung Barat); Bengkulu (Kota Bengkulu, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Serang, Kab Pandeglang); Jawa Barat (Kota/Kab Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kab Ciamis, Kota/Kab Bandung, Kota/Kab Sukabumi, Kab Garut, Kab Bekasi); Sulawesi Utara (Kab Kolaka, Kab Buton); Kalimantan Barat (Kab Sanggau, Kota Pontianak); Jawa Tengah (Kab Sukoharjo, Kab Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab Pati, Kota Surakarta, Kab Klaten, Kab Demak, Kab Cilacap); NTB (Kab Lombok Barat, Kab Lombok Timur, Kota Mataram); Gorontalo (Kab/Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kab Malang, Kota/Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Bojonegoro, Kab Gresik, Kab Ngawi, Kota/Kab Malang, Kab Banyuwangi); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Tapin); Lampung (Kab Tanggamus, Kab Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab Tulang Bawang); NAD (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar); Maluku (Kota Ambon); Maluku Utara (Kab Maluku Utara, Kab Halmahera); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komerling Ulu); Kalimantan Tengah (Kab Kotawaringin Barat, Kab Kapuas); Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kab Donggala); Sulawesi Utara (Kab Bolaang Mongondow, Kab Minahasa); Bali (Kab Gianyar, Kota Denpasar, Kab Tabanan); Kalimantan Timur (Kota Balikpapan, Kota Bontang); Sulawesi Selatan (Kab Maros, Kab Pangkep, Kab Enrekang, Kab Jeneponto, Kab Takalar, Kab Tana Toraja, Kab Soppeng); NTT (Kota Kupang); DIY (Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Gunung Kidul); Riau (Kota Pekanbaru); Papua (Kota/Kab Jayapura); DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan); Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang)</p> <p>Tahun 2002</p> <p>Sumatera Utara (Kab Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kab Tapanuli Selatan, Kab Toba Samosir, Kab Asahan, Kab Nias, Kab Mandailing Natal, Kab Labuan Batu, Kab Deli Serdang, Kota Binjai, Kab Dairi, Kab Simalungun, Kota Medan, Kab Langkat, Kab Karo, Kab Tapanuli Tengah); Sumatera Barat (Kab Tanah Datar, Kab Padang Pariaman, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab Pasaman, Kota Sawahlunto/Sijunjung, Kab Sawahlunto/Sijunjung, Kota Solok); Jambi (Kab Tanjung Jabung Barat, Kab Muaro Jambi, Kota Jambi, Kab Batang Hari, Kab Kerinci, Kab Merangin, Kab Tanjung Jabung Timur); Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Kab Rejang Lebong); Banten (Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang); Jawa Barat (Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Garut, Kab Bandung, Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kota Subang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Bekasi); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kab Kendari, Kab Buton, Kab Kolaka, Kab Muna);</p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan (lanjutan)	<p>Kalimantan Barat (Kab Sambas, Kab Pontianak, Kab Bengkayang, Kab Ketapang, Kab Sanggau, Kota Pontianak, Kab Sintang, Kab Landak, Kab Kapuas Hulu); Jawa Tengah (Kab Brebes, Kab Tegal, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab Demak, Kab Grobogan, Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang, Kab Blora, Kab Cilacap, Kab Banyumas, Kab Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kab Temanggung, Kab Semarang, Kab Purworejo, Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Karanganyar, kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Kebumen, Kab Kendal, Kab Jepara, Kota Magelang, Kab Magelang); NTB (Kab Bima, Kab Dompu, Kab Lombok Barat, Kota Mataram, Kab Sumbawa, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kota Bima); Gorontalo (Kab Gorontalo, Kota Gorontalo); Jawa Timur (Kab Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kab Gresik, Kab Kediri, Kota Blitar, Kab Banyuwangi, Kab Pamekasan, Kab Bangkalan, Kab Blitar, Kab Pasuruan, Kab Nganjuk, Kab Sampang, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Malang, Kab Trenggalek, Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kab Madiun, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab Lamongan, Kab Pacitan, Kab Sumenep, Kab Situbondo, Kab Ngawi, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Ponorogo, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Tuban, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Magetan, Kota Batu, Kab Jombang, Kab Malang); Kalimantan Selatan (Kab Hulu Sungai Utara, Kab Banjarmasin, Kab Hulu Sungai Selatan, Kab Banjar, Kab Tabalong, Kab Kota Baru, Kab Barito kuala, Kab Tapin, Kab Tanah Laut, Kab Hulu Sungai Tengah); Lampung (Kab Lampung Selatan, Kab Lampung Utara, Kab Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kab Tanggamus, Kab Lampung Barat, Kab Way Kanan, Kota Metro, Kab Tulang Bawang, Kab Lampung Timur); NAD (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab Aceh Utara, Kab Aceh Timur, Kab Aceh Selatan, Kab Singkil, Kota Sabang, Kab Aceh Tenggara, Kab Bireun, Kab Pidie, Kab Aceh Tengah); Maluku (Kab Maluku Tenggara, Kab Maluku Tenggara Barat, Kab Huru, Kab Maluku Tengah); Maluku Utara (Kab Halmahera Tengah, Kab Maluku Utara, Kota Ternate); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Lubuk linggau, Kab Muba, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Muara Enim, Kab Musi Banyuasin, Kab Lahat); Kalimantan Tengah (Kab Kapuas, Kab Barito Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya); Sulawesi Tengah (Kab Toli-Toli, Kota Palu, Kab Poso, Kab Morowali, Kab Banggai, Kab Banggai Kepulauan, Kab Donggala); Sulawesi Utara (Kota Bitung, Kota Manado, Kab minahasa, Kab Bolaang Mongondow); Bali (Kab Klungkung, Kab Karang Asem, Kab Bangli, Kab Gianyar); Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kab Samarinda, Kab Kutai, Kab Kutai Kertanegara, Kab Balikpapan, Kota Tarakan); Sulawesi Selatan (Kab Barru, Kab Gowa, Kab Rangkep, Kab Sidrap, Kota Pare-Pare, Kab Tana Toraja, Kab Lubuk Utara, Kab Wajo, Kab Bulu Kumba, Kab Bantaeng, Kab Selayar, Kab Bone, Kab Mamuju, Kab Jeneponto, Kab Sindrang, Kab Maros, Kota Makassar, Kab Sinjai, Kota Palopo, Kab Polmas, Kab Jeneponto, Kab Majene, Kab Pangkajene); NTT (Kab Kupang, Kota Kupang, Kab Flores Timur, Kab Sika, Kab Ende, Kab Timur Tengah Selatan); DIY (Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulon Progo, Kab Gunung Kidul); Riau (Kab Pelelawan, Kab Indragiri Hilir); Papua (Kab Sorong, Kab Jayapura, Kab Timika, Kab Biak Numfor); DKI Jakarta (Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur); Bangka Belitung (Kab Bangka)</p>
	Sasaran	<p>UKM dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai omset penjualan minimal mencapai Rp200 juta/bulan. - Mempunyai prospek pasra yang berkelanjutan - Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran. - Mampu menyerap tenaga kerja minimal 40 orang dalam sentra - Mengutamakan bahan baku lokal - Menggunakan teknologi yang berpotensi meningkatkan mutu produk. - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	APBN
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja Keuangan/Kota melakukan identifikasi dan menilai sentra calon peserta program baik yang akan difasilitasi oleh dana APBN maupun dana perguliran agar diusulkan secara terpadu dengan menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra. - Dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota menseleksi sentra yang telah diidentifikasi dan dinilai oleh Pokja Keuangan Kabupaten/Kota - Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi ke Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi untuk dikoordinir. - Pokja Keuangan Propinsi membantu Kemnterian Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelengkapan administrasi sentra yang diusulkan. - Dinas/Badan yang membidangi Kopersi dan UKM mengirim hasil seleksi sentra calon peserta program kepada Kementerian Koperasi dan UKM. - Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan verifikasi kembali dan menetapkan sentra calon peserta program sebagai sentra terpilih. - Penetapan Sentra ditetapkan dalam Keputusan Menteri secara tersendiri.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
13.8	Nama upaya	Proyek Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PUK)
	Deskripsi upaya	<p>Program pembinaan usaha kecil melalui proyek khusus telah dimulai sejak tahun 1976 dengan Program Pemberian Kredit Candak Kulak (P3KCK). Pada tahun 1993/1994 program tersebut kemudian disempurnakan menjadi Proyek Pengembangan Penyempurnaan Kredit Candak Kulak (P4KCK). Pada tahun 1997/1998 program tersebut disempurnakan lagi menjadi Proyek Pembinaan Usaha Kecil (PUK).</p> <p>Pada tahun 1999/2000 dilakukan penyempurnaan dan diversifikasi kegiatan dengan menambah sasaran binaan, mejadi PUK-KCK. Untuk Tahun Anggaran 2001 dilakukan penyempurnaan kegiatan, judul dirubah menjadi Proyek Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Kriteria koperasi dan Pokmas/LKM calon peserta program, mekanisme seleksi dan penetapan semakin disempurnakan.</p>
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Pembiayaan
	Instansi terkait	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan struktur keuangan lembaga keuangan Koperasi dan Pokmas/LKM - Memperkuat dan mengembangkan kemampuan pelayanan usaha simpan-pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi dan kelompok masyarakat/LKM kepada anggotanya. - Berkembangnya sistem pelayanan simpan-pinjam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan permodalan bagi para anggota masyarakat melalui unnit simpan-pinjam koperasidan kelompok masyarakat/LKM yang tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang produktif masyarakat yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat sendiri (mandiri) - Mendukung kelangsungan usaha produktif yang dilakukan oleh anggota koperasi dan kelompok masyarakat/LKM dari akibat krisis ekonomi. - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terutama di daerah yang terpengaruh oleh dampak krisis ekonomi, baik dipedesaan maupun dipertanian. - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi dan kelompok masyarakat/LKM yang melaksanakan usaha produktif.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian modal - Pembinaan kepada koperasi dan Kelompok Masyarakat/LKM
	Wilayah pelaksanaan	<p>Tahun Anggaran 1993/1994: Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur</p> <p>Tahun Anggaran 1994/1995: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timor-Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah.</p> <p>Tahun Anggaran 1995/1996: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timor-Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Tahun Anggaran 1996/1997: Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara.</p> <p>Tahun Anggaran 1997/1998: Nagroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, Papua.</p> <p>Tahun Anggaran 1998/1999: Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.</p> <p>Tahun Anggaran 1999/2000: Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT</p> <p>Tahun Anggaran 2000 Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon); Jawa Tengah (Kabupaten Salahtiga, Purwokerto); D. I. Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kulonprogo); Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto, Tuban); Propinsi Sumatera Utara (Kabupaten Medan, Tapanuli Utara); Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan, Sawah Lunto); NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende); Maluku (Kota Ambon, Kabupaten Masohi); Irian Jaya (Kabupaten Jayapura, Jaya Wijaya);</p> <p>Tahun Anggaran 2001 Banten (Kota Cilegon, Kabupaten Lebak); Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu); Jawa Tengah (Kabupaten Kebumen, Cilacap); Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Gunung Kidul); Jawa Timur (Kabupaten Jember, Banyuwangi); Sumatera Utara (Kabupaten Asahan, Kabupaten Sibolga); Sumatera Barat (Kabupaten Tanah Datar, Bukit Tinggi); NTT (Kabupaten Sikka, Lembata); Maluku (Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah); Papua (Kabupaten Sorong, Manukwari); Bali (Kabupaten Jembrana, Karangasem); NTB (Kabupaten Dompu, Bima); Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru); Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng); Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa, Sangir Talaut); Jambi (Kabupaten Muara Jambi, Tanjab Timur); Lampung (Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan); DKI Jakarta Kota Jakarta Utara)</p>
	Sasaran	<p>Usaha kecil yang mempunyai aktivitas utama menyediakan modal bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala kecil, baik yang tergabung dalam wadah koperasi maupun kelompok-kelompok masyarakat produktif (Pokmas pra produktif) dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar sebagai anggota koperasi dan Pokmas/LKM minimal 3 bulan - Mempunyai aktifitas usaha produktif dididang produksi, pemasaran dan jasa lainnya - Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada koperasi dan Pokmas/LKM - Mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi dan Pokmas/LKM sesuai kebutuhan

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Sumber: APBN; Sifat: bergulir Tahun 1993/1994 : Rp4,128 milyar Tahun 1994/1995 : Rp2,736 milyar Tahun 1995/1996 : Rp3,360 milyar Tahun 1996/1997 : Rp3,600 milyar Tahun 1997/1998 : Rp3,540 milyar Tahun 1998/1999 : Rp3,990 milyar Tahun 1999/2000 : Rp 6.341.874.000 Tahun 2000 : Rp12,900 milyar Tahun 2001 : Rp13,550 milyar
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1993 - 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Penetapan koperasi dan Pokmas/LKM oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten. Koperasi dan Pokmas yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota untuk menerima bantuan modal bergulir harus menandatangani surat pernyataan bersedia melaksanakan mengembangkan modal bergulir dan membuat laporan perkembangan setiap akhir bulan yang disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota. Besarnya dana bergulir yang diterima setiap koperasi Rp45 juta, dan Rp25 juta untuk setiap Pokkmas/LKM. 80% digunakan modal kerja dan 20% digunakan untuk investasi. Setelah 3 tiga pengembalian lancar maka koperasi tersebut dinilai mempunyai kinerja baik, sehingga bantuan dapat terus dikelola dan digulirkan kembali oleh koperasi dan Pokmas/LKM yang bersangkutan untuk dipinjamkan pada anggota. Apabila kinerja koperasi dinyatakan tidak baik, maka koperasi dan Pokmas/LKM tersebut harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima. Selanjutnya oleh bank akan dialihkan kepada rekening koordinator untuk digulirkan kepada koperasi dan Pokmas/LKM lainnya yang belum menerima atas dasar keputusan yang ditetapkan Tim pelaksana kabupaten/kota atau pemda kabupaten/kota setempat cq. Dinas yang membidangi koperasi dan UKM.
	Pencapaian hasil	Terbina dan berkembangnya kemampuan manajemen koperasi dan Kelompok Masyarakat/LKM untuk tumbuh sebagai lembaga ekonomi produktif masyarakat yang mandiri.
	Masalah	Secara umum tidak ada masalah. Pada beberapa kasus terdapat kelompok masyarakat/LKM yang kurang lancar dalam pengembalian.
	Status saat ini	Program sudah dilaksanakan dari Tahun Anggaran 1993/1994 sampai Tahun Anggaran 2001, perguliran dana untuk kelompok masyarakat/LKM yang lain masih berjalan sampai sekarang.
	Potensi	Masih banyak kelompok masyarakat/LKM yang masih memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
13.9	Nama upaya	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM)
	Deskripsi upaya	Program Jaring Pengaman Sosial Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
	Penanggung jawab	Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
	Pelaksana	Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
	Instansi terkait	Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB (LPM ITB)

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha di lapisan masyarakat yang paling bawah dari situasi krisis ekonomi - Menggerakkan roda perekonomian nasional pada masyarakat lapisan paling bawah - Mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan pengusaha kecil di berbagai sektor riil - Membangun sistem jaringan distribusi nasional kebutuhan bahan pokok - Mewujudkan lembaga ekonomi produktif masyarakat yang mengakar dan dimiliki oleh masyarakat - Meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan dana bergulir - Pendampingan (oleh fasilitator)
	Wilayah pelaksanaan	<p>Aceh (Kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie); Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara); Sumatera Barat (Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Kodya Padang); Riau (Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pekan Baru); Jambi (Kodya Jambi, Kabupaten Sarolangun Bangko, Tanjung Jabung); Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Utara); Sumatera Selatan (Kodya Palembang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu); Lampung (Kabupaten Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah); Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Tangerang, Kodya Bandung, Sukabumi); DI Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, Sleman); Jawa Tengah (Kabupaten Banyumas, Boyolali, Semarang, Cilacap, Grobogan, Kebumen, Magelang, Pabalingga, Pekalongan, Purwarejo, Sragen, Wonogiri).</p> <p>Propinsi Jawa Timur : Kabupaten Bangkalan, Madiun, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek); Bali (Kabupaten Buleleng); NTB (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur); NTT (Kabupaten Kupang, Belu); Timor-Timur (Kabupaten Dilli); Kalimantan Barat (Kabupaten Pontianak, Sambas, Kodya Pontianak); Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tanah Laut); Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas); Kalimantan Timur (Kabupaten Samarinda); Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala, Poso); Sulawesi Utara (Kabupaten Gorontalo, Kodya Gorontalo, Manado); Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone, Ujung Pandang, Gowa, Pangkep, Kodya Parepare); Sulawesi Tenggara (Kabupaten Buton); Maluku (Kabupaten Maluku Tenggara); Irian Jaya (Kabupaten Jayawijaya).</p>
	Sasaran	Sasaran pengembangan ini adalah lapisan masyarakat yang tidak lagi berada dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian bantuan dana tidak terserap untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Lapisan masyarakat yang mampu menabung dan mampu berusaha pada skala yang masih sangat terbatas, adalah sasaran yang diprioritaskan dalam pengembangan LEPMM ini.
	Pendanaan	Rp59 juta/LEPMM, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun Anggaran 1998/1999
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Jangka Pendek (Tahap I) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana bergulir yang diterima dari pemerintah masuk ke rekening LEPMM - Dana tersebut disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman - Anggota wajib mengembalikan pinjaman - LEPMM memberikan pinjaman kepada anggota yang lain atau anggota-anggota baru yang sedang memulai aktifitas usaha. <p>Jangka Panjang (Tahap II) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana bergulir yang diterima dari pemerintah masuk dalam rekening LEPMM - Dana tersebut disalurkan kepada anggota-anggota dalam bentuk pinjaman - Anggota wajib mengembalikan kepada LEPMM

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (sambungan)	<ul style="list-style-type: none"> - LEPMM memberikan pinjaman kepada anggota yang lain atau anggota-anggota yang baru yang sedang memuali aktifitas usaha - LEPMM yang sudah berkecukupan dan sudah berkembang modalnya memberikan sebagian modal tersebut kepada LEPMM yang lain - LEPMM yang baru tersebut meneruskan dengan memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya.
	Pencapaian hasil	Terselamatkannya beberapa kelompok usaha dari situasi krisis ekonomi dan mampu mengembangkan usahanya.
	Masalah	Secara umum tidak ada masalah. Karena dampak krisis ekonomi langsung dirasakan oleh kelompok usaha, sebagian kecil dari mereka mendapat kesulitan dalam pengembalian.
	Status saat ini	Kegiatan ini sudah dilaksanakan, tapi berguliran dana kepada kelompok usaha lainnya masih berjalan.
	Potensi	Dapat mengembangkan kelompok usaha dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
13.10	Nama upaya	Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER)
	Deskripsi upaya	Sejalan dengan era reformasi yang berlangsung dewasa ini, Lembaga Swadaya Daya Masyarakat (LSM)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mandiri dan potensial untuk berperan aktif melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, dan lain sebagainya, dimana LSM/KSM perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga menjadi Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
	Penanggung jawab	Depatemen Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, dilanjutkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Pembiayaan
	Instansi terkait	Bank Muamalah Indonesia
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan sistem perekonomian yang mandiri yang mengakar dan handal bagi masyarakat khususnya masyarakat dilingkungan Lembaga Mandiri yang mengakar di masyarakat diantaranya koperasi, pondok pesantren, BMT, majelis taklim dll. - Mengembangkan usaha produktif dan potensial, kemitraan jaringan usaha, pemantapan kelembagaan koperasi dan dunia usaha seerta meningkatkan kapasitas dan pendayagunaan masyarakat dalam rangka mendorong peran serta aktif masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bergulir untuk modal kerja - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Tahun Anggaran 1997/1998 Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman, Agam, Limapuluh Kota, Kota Padang); Lampung (Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah); DKI Jakarta (Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan); Jawa Barat (Kota/Kab. Bandung, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Cianjur, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Serang, Bekasi); Jawa Tengah (Kab/Kota Semarang, Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Demak, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal, Kendal, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Magelang, Purworejo, Surakarta, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Purwodadi, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Solo, Sukoharjo); DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Wonosari, Gunung Kidul); Jawa Timur (Kabupaten Jember, Probolinggo, Malang, Sidoarjo, Gresik, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Bangkalan, Pasuruan, Jombang, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Sampang, Nganjuk, Situbondo); Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur).

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan (sambungan)	<p>Tahun Anggaran 1998/1999 Aceh (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara); Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Tapanuli Selatan, Binjai, Deli Serdang, Kota Padang Sidempuan, Medan); Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman, Limapuluh Kota, Agam, Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang); Riau (Kabupaten Kampar, Bengkalis, Kota Pekanbaru); Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kabupaten Oku, Oki); Lampung (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Kota Bandar Lampung); DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat); Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Majalengka, Purwakarta, Subang, Kuningan, Sumedang, Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Ciamis, Cirebon, Bogor, Serang, Bekasi); Jawa Tengah (Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Blora, Pati, Rembang, Jepara, Kudus, Magelang, Temanggung, Salatiga, Tegal, Brebes, Wonosobo, Kendal, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Purworejo, Cialcap, Kebumen, Karanganyar, Wonogiri); D.I. Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman); Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Blitar, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Lamongan, Sampang, Pamekasan, Ponorogo); Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur); Kalimantan Selatan (Kota Banjar, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin); Kalimantan Timur (Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai); Sulawesi Selatan (Kota Ujungpandang, Palopo, Parepare, Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Polewali mamasa, Barru, Pinrang, Jeneponto, Benteng, Bulukumba, Sidrap, Wajo, Luwu)</p> <p>Tahun Anggaran 1999/2000 Aceh (Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Timur); DKI Jakarta (Jakarta Selatan); Jawa Barat; Jawa Tengah (Kabupaten Kendal, Temanggung, Wonosobo, Cialacap); D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman); Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi, Jember, Kediri, Pasuruan, Bangkalan, Tuban, Pamekasan, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Kota Bojonegoro); Nusa Tenggara Barat</p> <p>Tahun Anggaran Tahun 2000 Aceh; Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan); Sumatera Barat; Riau; Sumatera Selatan; Lampung (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan); DKI Jakarta; Jawa Barat (Kabupaten Lebak, Sukabumi, Majalengka, Purwakarta); Jawa Tengah (Purworejo, Demak, Jepara); D.I. Yogyakarta; Jawa Timur (Kota Malang, Kabupaten Blitar, Madiun, Magetan, Sumenep); NTB (Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Kalimantan Barat (Kota Pontianak); Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan (Kota Makassar).</p> <p>Tahun Anggaran 2001 Aceh (Kabupaten Aceh Pidie); Sumatera Utara (Kabupaten Labuhan Batu); Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman); Riau (Kabupaten Indragiri Hilir); Jambi (Kabupaten Batang Hari); Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin); Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Utara); Lampung (Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang); DKI Jakarta; Jawa Barat (Kabupaten Sumedang, Karawang, Sukabumi); Banten (Kabupaten Pandeglang); Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Surakarta); D.I. Yogyakarta (Kabupaten Bantul); Jawa Timur (Kabupaten Gresik, Lumajang, Bondowoso); NTB (Kabupaten Lombok Barat); Maluku Utara; Kalimantan Tengah; Kalimantan Barat (Kab/Kota Pontianak); Sulawesi Selatan (Kabupaten Takalar); Sulawesi Tengah (Kabupaten Banggai)</p>
	Sasaran	Koperasi, Pondok Pesantren, BMT, Majelis Tkalim (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat/LM3)

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	APBN, Bergulir Tahun Anggaran 1997/1998 : Rp9.800.986.000 Kopontren @ Rp15 juta, Prakoperasi/BMT @ Rp5 juta Tahun Anggaran 1998/1999 : Rp9.957.952.000 Kopontren @ Rp15 juta, Prakoperasi/BMT 5 juta, Prakop pengembang @ Rp10 juta, Pukoppontren @ Rp40 juta Tahun Anggaran 1999/2000 : Rp9.951.219.000 LM3 baru @ Rp43 juta Tahun Anggaran 2000 : Rp12.980.309.000 Prakop Pengembangan @ Rp10 juta, LM3 Baru @ Rp43 juta, Jaringan Usaha @ Rp25 juta. Tahun Anggaran 2001 : Rp18.969.974.000 LM3 baru @ Rp40 juta, jaringan usaha @ Rp50 juta.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997 - 2001
	Mekanisme pelaksanaan	LM3 sebagai peserta baru ditentukan melalui kompetisi dan penentuannya berdasarkan hasil penilaian dari formulir/blanko isian yang ditandatangani pengurus LM3 dan disampaikan kepada Tim Teknis tingkat kabupaten/kota. Penilaian LM3 berdasarkan form/blanko isian tersebut diatas melalui langkah-langkah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Nilai oleh TP - Dicek dan dinilai kembali oleh Tim Teknis/Pokja tingkat kab/kota - Presentase/penyajian oleh masing-masing pengelola/pengurus LM3 dihadapan Tim Teknis Pokja kab/kota - Ditetapkan pada rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Kkankop/Kadiskop dan UKM yang dihadiri oleh Tim Teknis/Pokja tingkat kab/kota - LM3 yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat kab/kota dapat segera ditetapkan sebagai LM3 peserta baru P2KER melalui SK pengesahan Kakankop/Kadiskop, dan UKM/Bupati setempat. Dan bagi propinsi/DI yang melaksanakan otonomi daerah masih dalam tarnsisi, SK pengesahan LM3 sebagai peserta dapat dipertimbangkan dengan SK Kakanwilkop dan UKM setempat. - Penetapan peserta tersebut diatas (point 5) disampaikan kepada Kanwil/Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk dikoordinasikan dengan Kantor Meneg Koperasi dan UKM up Asdep Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam - Tembusan SK pengesahan tersbut disampaikan kepada LM3 yang bersangkutan, Pemda, kakanwilkop, dan UKM dan untu Asdep Urusan Pengembangan dan Pengendalian selaku Ketua Tim Teknis tingkat pusat dan Pimpro P2KER pusat
	Pencapaian hasil	Sudah ada perguliran dana kepada Koperasi, pondok pesantren, BMT, dan Majelis Taklim yang lainnya.
	Masalah	Secara umum tidak ada masalah, pada beberapa kasus ada anggota belum terbiasa dengan pola syari'ah.
	Status saat ini	Program sudah dilaksanakan dari tahun 1998 sampai tahun 2001, tapi perguliran dana tetap berjalan kepada koperasi, pondok pesantren, BMT, Majelis Taklim yang lain.
	Potensi	Melalui penambahan modal, koperasi, pondok pesantren, BMT, Majelis Taklim, dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Masih banyak koperasi, pondok pesantren, BMT, Majelis Taklim lainnya yang sangat membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

No.	Item	Penjelasan
13.11	Nama upaya	Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM
	Deskripsi upaya (tahun 2000)	Sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan minyak sebesar rata-rata 12%, maka pemerintah berupaya mengalihkan subsidi tersebut dalam bentuk program-program reorientasi subsidi BBM yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat kurang mampu mendapat tambahan dana sebesar Rp800 milyar yang berasal dari pengurangan subsidi tersebut.
	Penanggung jawab	Bappenas sebagai koordinator
	Pelaksana	Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Bappenas, Kimpraswil, Depdagri
	Tujuan upaya	Memberdayakan pengusaha mikro dan pengusaha kecil melalui perkuatan struktur keuangan lembaga keuangan KSP/USP Kop dan Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mengakar di masyarakat serta meningkatkan kemampuan SDM-nya terutama dalam manajemen produksi dan pemasaran, dan pengelola keuangan.
	Jenis kegiatan	- Bantuan modal dana bergulir - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2003 Nanggroe Aceh Darussalam (Seluruh kabupaten); Sumatera Utara (Seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Nias Selatan); Sumatera Barat (Seluruh kabupaten); Riau (Seluruh kabupaten); Jambi (Seluruh kabupaten); Sumatera Selatan (Seluruh kabupaten); Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Bangka, Belitung, Kota Pangkal Pinang); Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kota Bengkulu); Lampung (Semua kabupaten); DKI Jakarta (Seluruh Kota); Jawa Barat (Seluruh kabupaten kecuali Kota Banjar); Jawa Tengah (Seluruh kabupaten); DI Yogyakarta (Seluruh kabupaten dan kota); Jawa Timur (Seluruh kabupaten dan kota); Banten (Seluruh kabupaten dan kota); Bali (Seluruh kabupaten dan kota); NTB (Seluruh kabupaten dan kota); NTT (Seluruh kabupaten dan kota kecuali Kabupaten Kupang); Kalimantan Barat (Seluruh kabupaten); Kalimantan Tengah (Seluruh kabupaten); Kalimantan Selatan (Seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Tanah Tumbu, dan Balangan); Kalimantan Timur (Seluruh kabupaten); Sulawesi Utara (Seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon); Sulawesi Tengah (Seluruh kabupaten kecuali Parigi Moutong); Sulawesi Selatan (Seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Mamuju Utara, dan Luwu Timur); Sulawesi Tenggara (Seluruh kabupaten kecuali Konawe Selatan); Gorontalo (Seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango); Maluku (Seluruh kabupaten); Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Kota Ternate); Papua (Kabupaten Biak Numfor, Fakfak, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Merauke, Timika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Sorong, Yapen Waropen, Kota Jayapura, Sorong)
	Sasaran	Lembaga Keuangan KSP/USP Kop dan Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mengakar di Masyarakat.
	Pendanaan	Tahun 2000 : Rp342,5 milyar, APBN, bergulir Tahun 2001 : Rp50 milyar, APBN, bergulir Tahun 2002 : Rp78.5 milyar, APBN, bergulir Tahun 2003 : Rp146.4 milyar, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000 - 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sbb: - Wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, atas nama KSP/USP-Kop dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah : - Ketua dan Bendahara koperasi untuk KSP - Ketua koperasi dan manager USP untuk USP koperasi.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat kuasa untuk pencairan dana cadangan likuiditas untuk dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya, yang disampaikan kepada bank pelaksana. - Ketua KSP/USP-Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja keuangan kabupaten/kota. - Atas dasar usulan kebutuhan dari KSP/USP-Koperasi, Pokja Keuangan kabupaten/Kota mengajukan kepada Pimbagpro Propinsi melalui Pokja Keuangan Propinsi. - Bedahara bagian Proyek Propinsi meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, selanjutnya membuat Surat Peemintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku. - Atas dasar SPP-LS diatas, KPKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) untuk memindahbukukan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada kantor cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Dana bergulir KSP/USP-Koperasi. - Pengajuan pencairan Dana Bergulir pertama kali oleh KSP/USP-Koperasi kepada bank pelaksana baik secara sekaligus maupun bertahap. - Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya.
	Pencapaian hasil	Sudah ada perguliran dana kepada KSP/USP-Koperasi yang lain. Berdasarkan laporan dan data yang ada, total dana perguliran dari tahun 2000-2003 sbb: Tahun 2000 : Rp672,937 milyar Tahun 2001 : Rp739,538 milyar Tahun 2002 : Rp818,038 milyar Tahun 2003 : Rp964,438 milyar
	Masalah	Secara umum tidak ada masalah. Pada beberapa kasus terdapat kesulitan dalam pengembalian, misalnya akibat gagal.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Kegiatan ini dapat mengembangkan usaha anggota KSP/USP-Koperasi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
13.12	Nama upaya	Diklat Manajemen Bisnis bagi Pengelola BDS-Provider
	Deskripsi upaya	Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sedang mengembangkan usaha "Business development Service atau disebut BDS-Provider, untuk membantu lebih meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dalam meningkatkan daya saing bisnisnya. Keberadaan Business Development Service Provider (BDS-Provider) dalam memberikan jasa layanan pengembangan bisnis menjadi sangat penting dan strategis. Terlebih dengan adanya kebijakan pengembangan UKM melalui sentra-sentra. Oleh karenanya sangatlah perlu diselenggarakan program pelatihan bagi pengelola BDS-Provider dalam meningkatkan kinerja BDS-Provider.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Instansi terkait	Lintas Deputi, Bank Indonesia, Swisscontact, Konsultan HRD Indonesia
	Tujuan upaya	Penyamaan persepsi dan pembekalan sertal ebih meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan manajerial bagi tenaga pelaksana/pengelola BDS-Provider peserta Diklat, dalam memberikan konsultasi, informasi, fasilitasi, pendampingan dan lainnya kepada koperasi, pengusaha kecil, dan menengah guna mengembangkan usaha, produktivitas dan daya saingnya.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Peserta pelatihan diprioritaskan bagi pengelola BDS-Provider yang telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan belum pernah mengikuti Diklat BDS-Provider yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Deputi Bidang Pengembangan SDM tahun 2003 telah memanggil 232 BDS untuk mengikuti Diklat Manajemen Bisnis yang dibagi menjadi 3 angkatan yaitu Angkatan I 80 orang, Angkatan II 80 orang, dan Angkatan III 72 orang.
	Pendanaan	APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	30 Juni s/d 6 Juli 2003 Angkatan I 20 Juli s/d 26 Juli 2003 Angkatan II 28 Juli s/d 3 Agustus Angkatan III
	Mekanisme pelaksanaan	Atas permintaan dari BDS, maka disusunlah kurikulum yang disesuaikan peserta Diklat.
	Pencapaian hasil	- Adanya peningkatan omset usaha KUKM - Akses ke sumber permodalan dan teknologi - Akses untuk pemasaran
	Masalah	Secara teknis tidak ada, tapi untuk penyelenggaraan Diklat selanjutnya harus memperhatikan batasan umur peserta.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Melalui Diklat konsultan yang tergabung dalam wadah BDS mendapat tambahan pengetahuan. Selanjutnya dapat mengimplementasikan dalam usaha KUKM, sehingga mampu meningkatkan volume usaha KUKM.
13.13	Nama upaya	Pengembangan Diklat Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pemuda
	Deskripsi upaya	Pemuda sebagai generasi bangsa yang mempunyai kegiatan bisnis di berbagai sektor, perlu mendapat tambahan pengetahuan manajemen usaha perkoperasian dan kewirausahaan.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Instansi terkait	Lintas Deputi, Kadin
	Tujuan upaya	Meningkatkan wawasan pengusaha muda dalam entrepreneurship, employability, dan creation of enterprise.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta
	Sasaran	270 pengusaha Indonesia yang tergabung sebagai pengusaha pemula dan sudah lama sebagai pengusaha dalam bidang : - Kelautan dan perikanan - Industri kecil dan kerajinan - Agribisnis kehutanan dan Perkebunan
	Pendanaan	APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	- Angkatan I, Bidang Kelautan dan Perikanan : 90 orang, 8 - 14 September 2003 - Angkatan II, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan : 90 orang, 21 - 27 September 2003 - Angkatan III, Bidang Agribisnis (Perkebunan dan Kehutanan) : 90 orang, 29 September -4 Oktober 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Bekerjasama dengan lembaga kepemudaan di pusat membuat kriteria peserta. Selanjutnya lembaga kepemudaan melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah menetapkan peserta Diklat.
	Pencapaian hasil	Dalam proses penilaian
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Belum dilaksanakan
	Potensi	Tambahan pengetahuan melalui Diklat, mampu meningkatkan volume usaha KUKM di berbagai sektor.

No.	Item	Penjelasan
13.14	Nama upaya	Workshop Optimalisasi Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan SDM Berkualitas, Bermoral, Berpengetahuan
	Deskripsi upaya	Menindaklanjuti penyelenggaraan workshop yang dihadiri tokoh masyarakat, jurnalis, LSM, Guru, dalam rangka mengoptimalkan peran mereka dalam mengembangkan KUKM.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Instansi terkait	Lintas Deputi, MUI, PWI, Asosiasi Jurnalis Indonesia, PGRI, dan LSM.
	Tujuan upaya	Berbagi pendapat atau memberikan sumbangan pemikiran dalam membentuk institusi yang beranggotakan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mengembangkan KUKM.
	Jenis kegiatan	Workshop
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta
	Sasaran	Seluruh Indonesia yang tergabung dalam kelompok usaha KUKM produktif.
	Pendanaan	APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Rencana 9 - 12 Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Bekerjama dengan MUI, PWI, Asosiasi Jurnalis Indonesia, PGRI, LSM, di tingkat pusat menentukan persyaratan peserta. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi KUKM didaerah menetapkan peserta Diklat. (umur maksimal 50 tahun)
	Pencapaian hasil	Belum diketahui
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Belum dilaksanakan
	Potensi	Belum terlihat
13.15	Nama upaya	Training of Trainer Pendidikan dan Latihan Ekspor (ToT Diklat Ekspor)
	Deskripsi upaya	<ul style="list-style-type: none"> - SKB antara Deputi Bidang Pengembangan SDM dengan Kepala BPEN - Menyiapkan SDM KUKM dalam era globalisasi - Pemahaman KUKM terhadap perdagangan internasional
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Pusat Pelatihan Export Indonesia, Praktisi di Bidang Export
	Tujuan upaya	Mememberikan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM KUKM di bidang perdagangan internasional.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001 : Banten, Jawa Barat, Jawa Timur Tahun 2002 : Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta Tahun 2003 : Seluruh Indonesia (di Jakarta)
	Sasaran	Tahun 2001: 90 KUKM yang berpotensi ekspor, tapi belum melakukan ekspor. Tahun 2002: 270 KUKM yang berpotensi ekspor, tapi belum melakukan ekspor. Tahun 2003: 60 KUKM yang berpotensi ekspor, tapi belum melakukan ekspor.
	Pendanaan	Rp 90 juta, APBN (Rp1 juta/peserta) Rp270 juta, APBN (Rp1 juta/peserta) Rp240 juta, APBN (Rp4 juta/peserta)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – 2003

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Tahun 2003: Pusat hanya memberikan kriteria peserta, dinas yang menetapkan peserta. Setelah peserta ditetapkan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti Diklat selama 6 hari efektif, dari tanggal 12 - 18 Oktober 2003. Kriteria yang diberikan pusat : - Aparat pembina KUKM daerah - SDM KUKM - KUKM yang berpotensi ekspor - Usia maksimal 50 tahun - Sehat jasmani dan rohani.
	Pencapaian hasil	Sebagian kecil (10%) dari peserta sudah mampu mengekspor, sebagian besar mampu memasarkan di regional dan nasional dan mengetahui prosedur ekspor.
	Masalah	Teknis bisnis antara lain Iptek, akses informasi, permodalan (keberhasilan KUKM tergantung dari SDM)
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Melalui diklat diharapkan peserta memperoleh keterampilan, mampu bersaing. Diklat ini diharapkan dilanjutkan dengan diklat yang terintegrasi dan berkesinambungan dan didukung oleh pemda
13.16	Nama upaya	<i>Member Education</i>
	Deskripsi upaya	Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara Diklat di daerah dengan dukungan tenaga dan dana pusat yang terbatas diupayakan suatu kegiatan untuk mamfasilitasi daerah sehingga dapat menyelenggarakan Diklat koperasi.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi
	Instansi terkait	Ikopin, Lembaga Manajemen IPB.
	Tujuan upaya	Memfasilitasi daerah untuk menyelenggarakan Diklat koperasi.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan selama satu minggu.
	Wilayah pelaksanaan	Banten
	Sasaran	Anggota koperasi yang terseleksi dan diharapkan mampu memotivasi anggota koperasi lainnya.
	Pendanaan	Rp60 juta, APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi memilih anggotanya untuk diusulkan ke Dina Koperasi. Selanjutnya Dinas Koperasi menetapkan sebagai peserta pelatihan
	Pencapaian hasil	Beberapa koperasi di Propinsi Banten mampu menyelenggarakan Diklat dengan dana sendiri. Di sini, pemerintah pusat hanya memfasilitasi desain dan modul diklat tersebut.
	Masalah	Tingkat pendidikan dari peserta mempengaruhi penerimaan materi yang diberikan saat diklat.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Kinerja koperasi akan meningkat apabila SDM anggotanya di tingkatkan.
13.17	Nama upaya	Pendidikan dan Latihan Keterampilan Otomotif
	Deskripsi upaya	- SKB antara Deputi Bidang Pengembangan SDM dengan Ditjen Bina Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja, Depnakertrans. - Kebutuhan akan pelayanan purna jual kendaraan roda empat dan dua yang meningkat. - Peluang pasar yang besar terhadap jasa otomotif bagi KUKM.
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM,
	Instansi terkait	Ditjen Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Depnakertrans.

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan teknis dan manajemen dalam memanfaatkan peluang bisnis perbengkelan roda dua dan empat.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan selama 48 jam (Jabotabek dan Sukabumi)
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta
	Sasaran	Tahun 2002: 40orang Tahun 2003: 120 orang Anggota koperasi, PKM yang mempunyai usaha bengkel, mekanik bengkel, dan sopir. Kriterianya : - Usia maksimal 50 tahun - Sehat Jasmani dan rohani
	Pendanaan	Tahun 2002 : Rp40 juta, APBN, habis digunakan Tahun 2003 : Rp120 juta, APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pusat dan Astra menetapkan kriteria peserta, sedangkan penentuan peserta dilakukan oleh dinas berdasarkan usulan koperasi dan PKM.
	Pencapaian hasil	Peserta baru memperoleh pengetahuan tentang otomotif. Peserta Diklat mendapat pengawasan dari Astra dan menjadi bengkel resmi.
	Masalah	Tidak semua peserta dapat mengembangkan usaha bengkelnya sesuai dengan yang diharapkan.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Meningkatkan pendapatan masyarakat.
13.18	Nama upaya	Pendidikan dan Latihan Pedagang Eceran (<i>Retail</i>)
	Deskripsi upaya	- Rendahnya kualitas SDM UKM dalam akses pasar. - Meningkatkan kualitas SDM di bidang perdagangan eceran. - Penciptaan lapangan kerja dan penyerapannya. - Pengelolaan ritel yang profesional
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Praktisi bisnis ritel
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM KUKM di bidang perdagangan eceran.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	30 koperasi di seluruh Indonesia, dengan kriteria : - Aparat pembina KUKM daerah - SDM koperasi - KUKM yang memiliki unit usaha ritel yang potensial untuk dikembangkan sebagai grosir.
	Pendanaan	+Rp120 juta, APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pusat hanya memberikan kriteria, penetapan peserta dilakukan Dinas Propinsi atas usulan KUKM setempat.
	Pencapaian hasil	Belum ada karena belum dilaksanakan
	Masalah	Belum ada karena belum dilaksanakan
	Status saat ini	Belum dilaksanakan
	Potensi	Belum terlihat karena belum dilaksanakan

No.	Item	Penjelasan
13.19	Nama upaya	Pendidikan dan Latihan Keterampilan Elektronik
	Deskripsi upaya	SKB antara Deputi Bidang Pengembangan SDM dengan Dirjen Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Depnakertrans.
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Dirjen Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Depnakertrans.
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM KUKMM di bidang elektronika agar mampu memanfaatkan peluang pasar jasa pelayanan purna jual produk elektronik.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta (Peserta Jabotabek + Sukabumi)
	Sasaran	Anggota Asosiasi Bengkel Elektronik dan koperasi (Jasa Service) Samsung (20 orang), Sanken (20 orang), Sharp (20 orang). Dengan kriteria : - KUKM yang bergerak di bidang jasa elektronik - Usia maksimal 45 tahun - Sehat jasmani dan rohani.
	Pendanaan	+Rp90 juta (Rp 1,5 juta/peserta), APBN, habis digunakan.
	Waktu pelaksanaan	15 - 20 September, 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pusat hanya memberikan kriteria, penetapan peserta dilakukan Dinas Propinsi atas usulan KUKM setempat.
	Pencapaian hasil	Belum terlihat (Diklat sedang dilaksanakan)
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Sedang dilaksanakan
	Potensi	Dengan tambahan pengetahuan melalui Diklat, peserta mampu megebangkan usahanya.
13.20	Nama upaya	Pendidikan dan Latihan di Bidang Agribisnis dan Pasca Panen
	Deskripsi upaya	- Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, yang didukung dengan kondisi geografis yang tepat. - Pemanfaatan lahan terbatas dan peningkatan produktivitas. - Pemberdayaan KUKM di bidang Agribisnis.
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Pusdiklat Karyanyata Sukabumi
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM KUKM dan meningkatkan produktivitas di bidang agribisnis, dengan memanfaatkan lahan dan peluang pasar yang ada.
	Jenis kegiatan	- Diklat Budidaya - Diklat Pasca panen
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta
	Sasaran	60 orang dari 15 pengurus Kopontren dan pengelola bidang usaha agribisnis Kopontren (Jabotabek + Sukabumi) Kriteria : - SDM KUKM yang bergerak dibidang agribisnis - KUKM yang mempunyai lahan untuk budidaya tanaman - Usia maksimal 45 tahun - Sehat rohani dan jasmani

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Rp 140 juta, APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pusat hanya memberikan kriteria, penetapan peserta dilakukan Dinas Propinsi atas usulan KUKM setempat.
	Pencapaian hasil	Diklat Budidaya: menambah pengetahuan mengenai budidaya tanaman. Diklat Pasca Panen: belum dilaksanakan
	Masalah	Skala usaha tergantung dari luas lahan
	Status saat ini	Diklat Budidaya: sudah dilaksanakan Diklat Pasca Panen: belum dilaksanakan
	Potensi	Pengelolaan Agribisnis ke depan melalui Kopontren sangat potensial karena dibantu santri.
13.21	Nama upaya	Pendidikan dan Latihan Pakan Ternak Sapi Potong
	Deskripsi upaya	- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan berbasis potensi daerah - Melanjutkan program bantuan penggemukan sapi potong tahun 2002. - Pemberdayaan peternak sapi potong dalam penyediaan dan produksi pakan ternak
	Penanggung jawab	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Kebijakan dan Pendidikan Koperasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberikan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peternak sapi potong dalam produksi dan pengolahan, serta penyediaan pakan ternak.
	Jenis kegiatan	Pendidikan dan Latihan
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ulu)
	Sasaran	60 anggota koperasi peternak penerima sapi Kriteria : - Anggota koperasi penerima program penggemukan sapi potong - Mempunyai motivasi untuk pendidikan - Dapat membaca dan menulis - Usia maksimal 50 tahun. - Sehat jasmani dan rohani
	Pendanaan	Rp140 juta, APBN, habis digunakan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pusat hanya memberikan kriteria, penetapan peserta dilakukan Dinas Propinsi atas usulan KUKM setempat.
	Pencapaian hasil	Tambahan pengetahuan melalui Diklat sudah dapat diterapkan di lapangan.
	Masalah	Belum ada kios pakan ternak sapi.
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Melalui Diklat ini peserta dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan SDA di daerah masing-masing.
13.22	Nama upaya	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan Diklat Koperasi dan UKM Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Non Pemerintah
	Deskripsi upaya	Banyak kegiatan Diklat yang sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui masalahnya dan diberikan solusinya.
	Penanggung jawab	Asdep Evaluasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Evaluasi, Deputy Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Deperindag, Depnakertrans, Dinas Koperasi Propinsi dan Dinas Koperasi Kabupaten
	Tujuan upaya	Meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggara Diklat.
	Jenis kegiatan	Evaluasi penyelenggaraan diklat. Penilaian meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Input Pelatihan - Proses Pelatihan - Output Pelatihan - Outcome Pelatihan - Impact Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Penyelenggara dan peserta Diklat UKM, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
	Pendanaan	Tahun 2002 : Rp1,2 milyar, APBN, habis digunakan. Tahun 2003 : Rp800 juta, APBN, habis digunakan.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Mengingat keterbatasan dana dan tenaga, wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah Diklat adalah wilayah yang mempunyai volume kegiatan UKM yang besar.
	Pencapaian hasil	Beberapa Diklat dilanjutkan dengan revisi dan beberapa Diklat dilanjutkan tanpa revisi.
	Masalah	Evaluator dan Dana penyelenggara terbatas untuk menjangkau seluruh propinsi di Indonesia.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Penyelenggaraan Diklat UKM dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggara Diklat, sehingga akan meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.
13.23	Nama upaya	Evaluasi melalui Lokakarya
	Deskripsi upaya	Ingin mengetahui efektivitas penyelenggaraan Diklat
	Penanggung jawab	Asdep Evaluasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Evaluasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Deperindag, Depnakertrans, Dinas Koperasi Propinsi dan Dinas Koperasi Kabupaten
	Tujuan upaya	Meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggara Diklat.
	Jenis kegiatan	Evaluasi penyelenggaraan Diklat
	Wilayah pelaksanaan	Beberapa propinsi
	Sasaran	Penyelenggara dan peserta Diklat UKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
	Pendanaan	Tahun 2002: Rp1,2 milyar, APBN, habis digunakan. Tahun 2003: Rp600 juta, APBN, habis digunakan.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Mengingat keterbatasan dana dan tenaga, wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah Diklat adalah wilayah yang mempunyai volume kegiatan UKM yang besar.
	Pencapaian hasil	Dalam proses penilaian (masih disusun)
	Masalah	Evaluator dan Dana penyelenggara terbatas untuk menjangkau seluruh propinsi di Indonesia.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Kegiatan ini sangat penting untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan latihan yang sudah dilaksanakan, minimal memperbaiki pola-pola Diklat sebelumnya. Saat ini, banyak permintaan dari daerah untuk melakukan evaluasi diklat.

No.	Item	Penjelasan
13.24	Nama upaya	Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Budidaya dan Agro Industri Serat Rami
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Produksi
	Instansi terkait	Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
	Tujuan upaya	Meningkatkan kesejahteraan petani
	Jenis kegiatan	- Dana bergulir (modal kepada petani) untuk budidaya tanaman rami - Modal bergulir kepada koperasi berupa alat <i>processing</i> dan bangunannya serta modal kerja.
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2001: Jawa Tengah (Kabupaten Wonosobo) (pilot project) Tahun 2002: Sumatera Selatan (Kabupaten OKU) (pilot project) Tahun 2003: Sumsel (Waku, Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat); Bengkulu (Rejang Lebong); Sumut (Toba Samosir); Lampung (Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Waikanan); Jawa Tengah (Wonosobo)
	Sasaran	Petani dan koperasi.
	Pendanaan	APBN, dana bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Ditawarkan kepada petani yang mau dan sanggup mengelola budidaya tanaman rami. Dalam satu tahun petani diharapkan dapat memanen 5-6 kali dengan penghasilan (tambahan) rata-rata Rp 1,5 juta per bulan. Melalui upaya ini petani dapat langsung menjual hasil panen mereka langsung kepada koperasi.
	Pencapaian hasil	Belum dievaluasi
	Masalah	SDM relatif kurang.
	Status saat ini	Sedang berjalan
	Potensi	Sangat cocok dengan iklim di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian diatas 300 m dari permukaan laut. Dapat digunakan sebagai pengganti bahan katun yang selama ini impor.
13.25	Nama upaya	Pengembangan Pengolahan Kopi
	Deskripsi upaya	Melalui upaya ini diharapkan petani dapat menjual kopinya langsung kepada koperasi. Sebelumnya petani menjual hasil penen kopinya ke pedagang pengumpul dan pengusaha penggilingan kopi, sehingga keuntungan ada di pihak pengusaha/pedagang.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Produksi
	Instansi terkait	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi dan Coklat
	Tujuan upaya	Meningkatkan kesejahteraan petani kopi melalui perkuatan koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan (pinjaman) berupa mesin <i>processing</i> kopi
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2002: Sumatera Selatan (Kabupaten Oku, Lahat) Tahun 2003: Lampung (Kabupaten Tanggamus); Sumatera Utara (Kabupaten Dairi); Jawa Timur (Kabupaten Jember)
	Sasaran	Koperasi
	Pendanaan	Tahun 2002: Rp 92 juta, APBN, dana bergulir. Tahun 2003: Rp 300 juta, APBN, dana bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Bantuan diberikan kepada koperasi yang ada di daerah penghasil kopi.
	Pencapaian hasil	Belum dievaluasi
	Masalah	SDM
	Status saat ini	Sedang berjalan
	Potensi	Sumatera dan Jawa Timur sangat potensial untuk produksi kopi.

No.	Item	Penjelasan
13.26	Nama upaya	Pengembangan Pengolahan Gambir
	Deskripsi upaya	Indonesia adalah negara pengekspor gambir terbesar di dunia. 90% gambir di dunia berasal dari Indonesia. Keuntungan dari usaha gambir ini hanya dirasakan oleh pengusaha, sementara kesejahteraan petaninya tidak ada peningkatan.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Deputi Produksi
	Instansi terkait	Pengusaha (swasta) dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota
	Tujuan upaya	Meningkatkan kesejahteraan petani gambir melalui perkuatan koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan kepada koperasi berupa mesin <i>processing</i> gambir dan modal kerja.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Barat Tahun 2002 : (1 koperasi) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 : (2 koperasi) di Kabupaten Limapuluh Kota.
	Sasaran	Koperasi
	Pendanaan	Rp2 milyar, APBN, bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Bantuan diberikan kepada koperasi yang mempunyai potensi produksi gambir.
	Pencapaian hasil	Sebelum ada upaya ini harga gambir dari petani berkisar Rp 6.000,00-Rp 7.000,00/kg kepada pengumpul, setelah ada upaya, petani menjual ke koperasi dengan harga Rp 10.000,00-Rp12.000,00/kg.
	Masalah	SDM
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	90% kebutuhan gambir dunia dari Indonesia.
13.27	Nama upaya	Bantuan Perkuatan Peralatan Penginderaan Jauh untuk Usaha Penangkapan Ikan terhadap Koperasi Perikanan
	Deskripsi upaya	Dalam upaya ini usaha kecil adalah berat kapal dibawah 30 GT (Gross Ton), usaha menengah adalah berat kapal 30 – 60 GT, dan usaha besar adalah berat kapal diatas 60 GT.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM, secara Teknis Asdep Perikanan dan Peternakan
	Pelaksana	Deputi Produksi (secara teknis Asdep Perikanan dan peternakan)
	Instansi terkait	Lapan (Lembaga Pusat Antariksa)
	Tujuan upaya	Meningkatkan hasil produksi nelayan melalui penggunaan peralatan (teknologi) modern
	Jenis kegiatan	Bersama perusahaan yang memproduksi peralatan tersebut melakukan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, - Pelatihan tentang penggunaan peralatan dan - Pemberian bantuan kepada nelayan berupa peralatan penginderaan jauh sebagai stimulan.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab. Indramayu: KUD Mina, Eretan); Jawa Tengah (Kab. Pekalongan: KUD Makario Mino, Kab. Cilacap: KUD Mino Saroyo); Jawa Timur (Kab. Banyuwangi: KUD Blambangan); Bali (Kab. Gianyar: KUD Gianyar)
	Sasaran	Koperasi nelayan
	Pendanaan	APBN, sifatnya bergulir. Tahun 2002: Rp60 juta per koperasi (per paket)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi mengusulkan kepada Dinas Koperasi di kabupaten atau langsung ke pusat (Asdep Perikanan dan Peternakan). Koperasi yang langsung mengusulkan ke pusat harus mendapat dukungan dari Dinas Koperasi setempat. Setelah usulan sampai di pusat, Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan koperasi yang akan mendapatkan bantuan melalui SK. Sifat dari bantuan ini bergulir. Bagi kelompok nelayan anggota koperasi yang mendapat bantuan, 10% dari kelebihan penghasilannya setelah mendapat bantuan peralatan disalurkan ke koperasi, 25% untuk anak kapal, 25% untuk pemiliknya, dan 40% disisihkan sebagai modal bergulir untuk anggota lainnya. Modal bergulir ini diberikan setelah dana yang terkumpul seniali dengan harga peralatan yang baru.
	Pencapaian hasil	Berdasarkan laporan secara tertulis dan lisan, kelompok nelayan yang mendapat bantuan peralatan mengalami peningkatan penghasilan.
	Masalah	Banyak nelayan yang membutuhkan peralatan penginderaan jauh.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu masih banyak nelayan kecil yang membutuhkan peralatan dan adanya peningkatan penghasilan nelayan setelah menggunakan peralatan, maka upaya ini mempunyai potensi sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.
13.28	Nama upaya	Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Perikanan dengan Peralatan Penginderaan Jauh
	Deskripsi upaya	Dalam upaya ini usaha kecil adalah berat kapal dibawah 30 GT (Gross Ton), usaha menengah adalah berat kapal 30 - 60 GT, dan usaha besar adalah berat kapal diatas 60 GT.
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM, secara Teknis Asdep Perikanan dan Peternakan
	Pelaksana	Deputi Produksi (secara teknis Asdep Perikanan dan peternakan)
	Instansi terkait	Lapan (Lembaga Pusat Antariksa)
	Tujuan upaya	Meningkatkan hasil produksi nelayan melalui penggunaan peralatan (teknologi) modern
	Jenis kegiatan	Bersama perusahaan yang memproduksi peralatan tersebut melakukan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, - Pelatihan tentang penggunaan peralatan dan - Pemberian bantuan kepada nelayan berupa peralatan penginderaan jauh sebagai stimulan.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah); Sumatera Barat (Kabupaten Riau Kepulauan, Kota Padang, Kota Riau); Bangka Belitung (Kabupaten Belitung); Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Utara); NTT (Kota Kupang); Sulawesi Selatan (Kabupaten Bulu Kumbu); Sulawesi Utara (Kota Belitung); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)
	Sasaran	Koperasi nelayan
	Pendanaan	APBN, sifatnya bergulir. Tahun 2003 : Rp80 juta per koperasi (per paket)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi mengusulkan kepada Dinas Koperasi di kabupaten atau langsung ke pusat (Asdep Perikanan dan Peternakan). Koperasi yang langsung mengusulkan ke pusat harus mendapat dukungan dari Dinas Koperasi setempat. Setelah usulan sampai dipusat, selanjutnya menteri negara koperasi dan UKM menetapkan koperasi yang akan mmendapatkan bantuan melalui SK. Diharapkan 10% dari kelebihan penghasilan pengelolanya disalurkan kepada koperasi, 20% untuk anak kapal, 20% untuk pemilik kapal, dan 10% untuk evaluasi.
	Pencapaian hasil	Berdasarkan laporan secara tertulis dan lisan, kelompok nelayan yang mendapat bantuan peralatan mengalami peningkatan penghasilan.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Banyak nelayan yang membutuhkan peralatan penginderaan jauh.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu masih banyak nelayan kecil yang membutuhkan peralatan dan adanya peningkatan penghasil nelayan setelah menggunakan peralatan, maka upaya ini mempunyai potensi sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.
13.29	Nama upaya	Pengembangan Usaha Sapi Perah kepada Beberapa Koperasi di Jawa Barat
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputy Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi melalui usaha sapi perah
	Jenis kegiatan	Bantuan 1.810 ekor bibit sapi perah
	Wilayah pelaksanaan	Propinsi Jawa Barat
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Pendanaan	+ Rp21 milyar, sumber APBN, dengan pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi susu di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
13.30	Nama upaya	Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Kepada Koperasi OKU Cipta Mandiri di Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputy Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi melalui usaha penggemukan sapi potong
	Jenis kegiatan	Bantuan 2.400 sapi potong dan sarana pendukungnya
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ulu)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi
	Pendanaan	+ Rp16 milyar, APBN, sifatnya pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.

No.	Item	Penjelasan
13.31	Nama upaya	Pengembangan Usaha Ternak Domba kepada Koperasi Pondok Pesantren Usaha Ternak Domba kepada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di Jawa Barat
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi melalui usaha ternak domba
	Jenis kegiatan	Bantuan 450 ekor domba, terdiri 400 ekor betina dan 50 ekor pejantan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Garut)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi
	Pendanaan	Rp 216 juta, APBN, pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.32	Nama upaya	Pengembangan Usaha Pembibitan Itik kepada Koperasi Sumber Rejeki Di Jawa Barat dan Jawa Tengah
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi melalui usaha pembibitan itik.
	Jenis kegiatan	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana pendukungnya.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab Cirebon: Koperasi Sumber Rejeki); Jawa Tengah (Kab Tegal: Koperasi Purwa Diwangsa, Kab Brebes: Koperasi Peternak Itik).
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi yang telah mempunyai usaha pembibitan itik.
	Pendanaan	± Rp100 juta per koperasi, APBN, pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging dan telur di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.33	Nama upaya	Pengembangan Usaha Budidaya Itik kepada Beberapa Koperasi
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi melalui usaha budidaya ternak itik.
	Jenis kegiatan	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana pendukungnya, pola bergulir
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan); Kalimantan Barat (Kota Pontianak); NTB (Kabupaten Lombok Barat: Koperasi Pondok Pesantren Musa'adah); Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto); Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur); Banten (Kabupaten Lebak); Lampung (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat); Sumatera Selatan (Kabupaten Oku); Jambi (Kabupaten Kerinci); Sumatera Utara (Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan).
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi, yang layak mendapat bantuan.
	Pendanaan	Rp1,8 milyar, APBN, pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Pengetahuan peternak mengenai teknik beternak itik masih kurang.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging dan telur di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.34	Nama upaya	Pengembangan Usaha Budidaya Ternak Itik di Sumatera Selatan
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Dinas Koperasi Propinsi Sumatera Selatan
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana, pola bergulir
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi
	Pendanaan	Rp1,9 milyar, sumber APBN melalui Dekon, pola bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Produksi daging dan telur di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.

No.	Item	Penjelasan
13.35	Nama upaya	Memberdayakan Masyarakat melalui Usaha Budidaya Sapi Perah
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan 2.400 ekor bibit sapi perah
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Garut); Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Sleman); Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Batu)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi
	Pendanaan	Rp34 milyar, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	Belum ada
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi susu di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.36	Nama upaya	Memberdayakan Masyarakat melalui Penggemukan Sapi Potong Impor
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan 5.666 ekor sapi potong, sarana dan prasarana pendukungnya.
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Pasir Utara: 1200 ekor); Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah laut: 600 ekor); NTB (Kabupaten Lombok Barat: 600 ekor); Jawa Timur (Kabupaten Trenggalek: 1200 ekor); Bangka Belitung (Kabupaten Bangka: 600 ekor); Sumatera Selatan (Kabupeten Oku: 1466 ekor)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi.
	Pendanaan	Rp 33,9 milyar, APBN, bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.

No.	Item	Penjelasan
13.37	Nama upaya	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Lokal Jenis Bali dan PO (Peranakan Ongol)
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan 3.200 ekor bibit sapi lokal dan sarana pendukungnya.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kabupaten Muara Enim: 1000 ekor, Musi Banyu Asin: 1000 ekor); Bengkulu (Kota Bengkulu: 1200 ekor)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Pendanaan	Rp 3,2 milyar, APBN, bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.38	Nama upaya	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan bibit domba/kambing
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto); Jawa Tengah (Kabupaten Wonosobo); Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi); Lampung (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus); Sumatera Selatan (Kabupaten Oku, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas); Bengkulu (Kabupaten Rejang Lebong); Sumatera Utara (Kabupaten Toba Samosir)
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Pendanaan	Rp 3,2 milyar, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Sedang berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.

No.	Item	Penjelasan
13.39	Nama upaya	Memberdayakan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Pembibitan Itik di 12 Koperasi Primer
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan permodalan untuk pengembangan pembibitan itik.
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan); Kalimantan Barat (Kota Pontianak); NTB (Kabupaten Lombok Barat); Jawa Timur (Kabupaten Mojokerto); Banten (Kabupaten Lebak); Sumatera Selatan (Kabupaten Oku); Sumatera Utara (Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara).
	Sasaran	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Pendanaan	Rp1,2 milyar, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.
13.40	Nama upaya	Memberdayakan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Budidaya Itik
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Perikanan dan Peternakan, Deputi Produksi
	Instansi terkait	Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Departemen Pertanian
	Tujuan upaya	Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.
	Jenis kegiatan	Bantuan itik dan sarana pendukungnya.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Utara (Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah); Sumatera Selatan (Kabupaten Oku, Oki, Musi Banyu Asin, Lahat, Muara Enim, Banyu Asin, Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Pagar Alam); Bangka Belitung (Kabupaten Belitung); Lampung (Kabupaten Lampung Utara); Bengkulu*; Jawa Barat*; Jawa Tengah*; Bali*; NTB*; Sulawesi Selatan* Catatan: * s/d 20-8 -3003, daftar nominasi kabupaten dan koperasi primer belum ditetapkan.
	Sasaran	Petani peternak yang taegabung dalam wadah koperasi.
	Pendanaan	Rp 4,8 milyar, APBN, bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koperasi meminta bantuan kepada badan/lembaga yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM di wilayahnya (kabupaten setempat) untuk mengusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM/pejabat yang ditunjuk menetapkan koperasi penerima bantuan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Sedang berjalan
	Potensi	Produksi daging dan telur di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor.

No.	Item	Penjelasan
13.41	Nama upaya	Pemantapan Usaha Koperasi Industri Garam
	Deskripsi upaya	Impor garam Indonesia mencapai 1,2 -1,5 juta ton per tahun. Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi impor garam.
	Penanggung jawab	Asdep Inkratam, Deputy Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Induk Koperasi Garam Indonesia (Bandung)
	Instansi terkait	IDKM-Deperindag, Pemda propinsi dan Kabupaten, dinas koperasi.
	Tujuan upaya	- Mengurangi impor garam - Meningkatkan pendapatan daerah (petani garam)
	Jenis kegiatan	- Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendukungnya kepada petani garam (renovasi saluran) - Bantuan peralatan <i>processing</i> garam dan pembuatan tambak garam.
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2002: NTT (Kabupaten Ngada) Tahun 2003: NTT (Kabupaten Ngada); NTB
	Sasaran	Koperasi yang berpotensi untuk mengolah garam
	Pendanaan	Tahun 2002 : Rp175 juta Tahun 2003 : - Kabupaten Ngada Rp825 juta - Kabupaten Bima Rp225 juta Sumber APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Dinas koperasi kabupaten mengusulkan ke propinsi, dilanjutkan ke pusat. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM memverifikasi dari segi teknis dan administrasinya.
	Pencapaian hasil	Ada peningkatan produksi, kualitas, dan pendapatan petani garam.
	Masalah	- Pengolahan lahan dan rancangan lahan garam masih sederhana/tradisional. - Produksi sangat tergantung pada musim dan belum menggunakan peralatan teknologi.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Produksi saat ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri.
13.42	Nama upaya	Bantuan Mesin Yodisasi Garam kepada Kopontren Nurul Jannah
	Deskripsi upaya	Secara nasional, persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium baru mencapai 65,43%, jauh dari target Universal Salt Iodization (USI) yaitu minimal 90% rumah tangga.
	Penanggung jawab	Asdep Inkratam, Deputy Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Jannah
	Instansi terkait	Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan, dan PT Kimia Farma
	Tujuan upaya	- Memenuhi kebutuhan garam beryodium dalam negeri - Masyarakat terhindar dari penyakit gondok - Meningkatkan pendapatan daerah (petani garam)
	Jenis kegiatan	Bantuan mesin Yodisasi dan sarana pendukungnya.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bandung: Majalaya)
	Sasaran	Koperasi yang berpotensi mengolah garam
	Pendanaan	Rp170 juta, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Dinas koperasi kabupaten mengusulkan ke propinsi, dilanjutkan ke pusat. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM memverifikasi dari segi teknis dan administrasinya.
	Pencapaian hasil	Sudah mampu memproduksi garam beryodium yang memenuhi standar
	Masalah	Belum semua garam yang beredar di masyarakat mengandung yodium.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi karena produksi saat ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri.

No.	Item	Penjelasan
13.43	Nama upaya	Rintisan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Agro Industri Sutera dengan Pola Dana Bergulir
	Deskripsi upaya	Hingga saat ini Indonesia masih mengimpor bahan baku industri sutera. Perlu diupayakan suatu program yang dapat mengurangi kebutuhan bahan baku industri tekstil.
	Penanggung jawab	Asdep Inkratam, Deputi Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Asdep Inkratam, Deputi Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Instansi terkait	Deperindag, dan Departement Kehutanan
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan petani sutera melalui perkuatan koperasi
	Jenis kegiatan	- Budi daya murbey kepada petani - Mesin prosesing kepada koperasi. Beberapa koperasi diberikan bantuan mesin prosesing produksi benang, sebagian berupa alat pengering.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kabupaten OKU); NTB (Kabupaten Lombok Barat); Jawa Tengah (Kabupaten Semarang); Jambi (Kabupaten Kerinci); Sulawesi Selatan (Kabupaten Wajo)
	Sasaran	Koperasi/KUD yang berpotensi dalam usaha pengolahan sutera.
	Pendanaan	Rp2,2 milyar, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Dinas koperasi kabupaten mengusulkan ke propinsi, dilanjutkan ke pusat. Koperasi yang diusulkan adalah koperasi yang sudah menjalan usaha industri sutera dan daerahnya ccocok untuk budidaya. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM memverifikasi dari segi teknis dan administrasinya.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	- Koordinasi di lapangan - Persyaratan untuk pencairan dana, program tersebut sudah harus mempunyai juknis yang ditandatangani menteri.
	Status saat ini	Belum dilaksanakan
	Potensi	Saat ini indonesia baru mampu memproduksi 7% bahan baku sutera dari kebutuhan bahan baku sutera dunia (1000 ton benang).
13.44	Nama upaya	Industri Perak untuk Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Pengrajin di Yogyakarta dan Bali
	Deskripsi upaya	Banyak pengrajin perak di Kota Gede dan Gianyar kesulitan dalam memperoleh bahan baku. Melalui upaya ini diharapkan dapat membantu para pengrajin dalam mendapatkan bahan baku.
	Penanggung jawab	Asdep Inkratam, Deputi Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Induk Koperasi Industri dan Kerajina (Inkopinkra)
	Instansi terkait	PT. Aneka Tambang dan Logam Mulia
	Tujuan upaya	Memenuhi kebutuhan bahan baku industri perak KUKM
	Jenis kegiatan	Memfasilitasi antara pengrajin perak untuk memperoleh bahan baku dengan BUMN.
	Wilayah pelaksanaan	Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Gede Propinsi); Bali (Kabupaten Gianyar)
	Sasaran	Pengrajin perak.
	Pendanaan	Sumber dana BUMN, Rp500 juta, bergulir.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Inkopinkra mengajukan kredit dana bergulir dari BUMN (PT. Aneka Tambang dan Logam Mulia), tembusan ke Deputi Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM - Kementerian Koperasi dan UKM merespon usulan Inkopinkra, mengadakan rapat dan menyetujui pinjaman sebesar Rp500 juta. - Inkopinkra membeli bahan baku dari PT Aneka Tambang dan Logam Mulia, kemudian menjualnya kepada koperasi, dan koperasi menjual kepada pengrajin atau anggota.
	Pencapaian hasil	Sebagian pengrajin perak sudah terbantu dalam memperoleh bahan baku.
	Masalah	Tidak mudah meyakinkan BUMN untuk melihat potensi
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Masih banyak bahan baku yang dibutuhkan pengrajin.
13.45	Nama upaya	Mesin Pengering Kayu
	Deskripsi upaya	Banyak pengrajin kayu yang mengeringkan kayunya dengan cara tradisional, sehingga hasilnya tidak sebanyak dan sebaik dengan menggunakan mesin.
	Penanggung jawab	Asdep Inkratam, Deputi Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
	Pelaksana	Koperasi Tani Mulyo
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koperasi dan UKM dalam mengeringkan kayu sesuai standar - Meningkatkan pendapatan anggota dan mengembangkan usaha koperasi dan UKM
	Jenis kegiatan	Bantuan mesin pengering kayu
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kabupaten Jepara)
	Sasaran	Kelompok sebagai anggota koperasi mengusulkan ke bupati. Usulan tersebut diteruskan ke Kementrian Koperasi dan UKM. Selanjutnya, Kementeriannya Koperasi dan UKM meninjau kesiapan koperasi penerima berupa tanahnya (lokasi).
	Pendanaan	Rp 220 juta, APBN, bergulir
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh koperasi dan diarahkan oleh Dinas Koperasi Daerah. Bahan baku diperoleh dari Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Inkopinkra.
	Pencapaian hasil	Koperasi penerima mampu mengeringkan kayu lebih banyak.
	Masalah	Kesulitan bahan baku
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi karena kapasitas mesin yang relatif besar, 100 m ³
5. Departemen Pendidikan Nasional		
5.1	Nama upaya	Proyek Peningkatan Peranan Wanita (P2W) di Pendidikan
	Deskripsi upaya	<p>Proyek ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Peranan Perempuan sebagai stimulan bagi departemen lain dan pemerintah daerah. Dana untuk proyek ini dialokasikan di semua sektor.</p> <p>Untuk Depdiknas, pada tahun 1980-an, proyek ini dikelola oleh Subdit Pendidikan Kewanitaan dan dilakukan dengan sistem bertahap dan bergulir, bergantian setiap provinsi. Satu propinsi hanya mendapatkan alokasi untuk satu kabupaten dan satu kecamatan sebanyak satu kali. Proyek ini terdiri dari dua kegiatan yaitu Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW) dan Latihan Ketrampilan Usaha Wanita (LKUW). Sebagai kelanjutan dari LKW, didirikan Kegiatan Wanita (Pusginita) sejak tahun 1996. Sedangkan kegiatan LKUW adalah membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang, setiap kelompok mendapatkan bantuan berupa hibah sebesar Rp. 2 juta.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Direktorat Pendidikan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda - Departemen Pendidikan Nasional.
	Pelaksana	Direktorat Pendidikan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda - Departemen Pendidikan Nasional.
	Instansi terkait	- Dinas Pendidikan Provinsi (sebelum otonomi daerah disebut Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (sebelum otonomi daerah disebut Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
	Tujuan upaya	Untuk meningkatkan peranan wanita di bidang pendidikan, diantaranya melalui latihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membuat wanita agar bisa memimpin dan berani berbicara di depan umum.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan (Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW) dan Latihan Ketrampilan Usaha Wanita (LKUW)). - Dana bergulir.
	Wilayah pelaksanaan	- 1997/1998 - 1998/1999: di 9 wilayah, yaitu Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura, Dili Pusat. - 1999: di 4 provinsi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung.
	Sasaran	- Sasaran LKUW: wanita miskin dan tidak berdaya. - Sasaran LKW/Pusginita: Dharma Wanita Depdiknas tingkat kecamatan. Kriteria: peserta ditunjuk oleh pimpinan proyek di tingkat provinsi
	Pendanaan	- 1997/1998: Rp. 1.019.334.000,- - 1998/1999: Rp. 1.083.297.000,- - 1999: Rp. 400.000.000,- Bersumber dari APBN dengan sifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	1997/1998 - 1999
	Mekanisme pelaksanaan	Untuk pelatihan: Setiap provinsi mengirimkan satu orang wakil untuk mengikuti pelatihan di tingkat pusat. Setelah itu, wakil tersebut akan memberikan pelatihan di daerah masing-masing untuk para anggotanya. Pemilihan wakil dari masing-masing provinsi dilakukan oleh pimpinan proyek tingkat provinsi atas rekomendasi dari tingkat kabupaten. Untuk dana bergulir: Jumlah dana yang digulirkan senilai Rp. 10 juta dan dibagi kepada 5 kelompok. Sistem pembagian dan perguliran dana tersebut diserahkan kepada pihak provinsi.
	Pencapaian hasil	Data mengenai hal ini tidak tersedia di tingkat pusat baik untuk LKW/Pusginita maupun LKUW
	Masalah	- Dari sisi manajemen, proyek ini tidak sustainable (berkelanjutan) karena bersifat bertahap dan bergulir. - Untuk kegiatan LKW/Pusginita: peserta pelatihan adalah para istri pejabat, sehingga bila suami pindah, maka istri ikut pindah pula. - Untuk kegiatan LKUW: tidak ada pembinaan, sehingga usaha mikro menemui kendala dalam pemasaran. Akibat kebuntuan di bidang pemasaran tersebut maka terjadi over produksi.
	Status saat ini	Proyek sudah selesai pada tahun 1999, tetapi pada tingkat kelompok masih berjalan.
	Potensi	Relatif, ada usaha yang meningkat dan ada pula yang tidak. Peningkatan usaha tergantung dari peranan setiap pengusaha. Sebagai contoh, di Jambi (Tanggung Jabung), ketua kelompok usaha pembuat terasi berperan cukup aktif, sehingga usahanya bisa mengakses Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan. Dengan akses ini, apabila ada ikan yang tidak laku dijual di TPI bisa dijual kepada ibu-ibu anggota kelompok untuk dibuat terasi atau kerupuk.

No.	Item	Penjelasan
2.	Nama upaya	Proyek Subsidi BBM - <i>Life Skill Education</i>
	Deskripsi upaya	Proyek ini merupakan proyek Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta LSM untuk meningkatkan kecakapan hidup kaum perempuan.
	Penanggung jawab	Direktorat Pendidikan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda - Departemen Pendidikan Nasional
	Pelaksana	Direktorat Pendidikan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda - Departemen Pendidikan Nasional
	Instansi terkait	- Dinas Pendidikan Provinsi - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota - LSM/organisasi perempuan
	Tujuan upaya	Meningkatkan kecakapan hidup perempuan.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Bantuan modal
	Wilayah pelaksanaan	- 2002: dilaksanakan oleh 15 organisasi perempuan (LSM) yang tersebar di 11 propinsi yaitu DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, NTT dan NTB - 2003: dilaksanakan oleh 30 LSM/organisasi perempuan di seluruh provinsi.
	Sasaran	Pada tahun 2002, proyek ini ditujukan kepada 750 orang perempuan. Perempuan peserta proyek diseleksi oleh LSM terpilih dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu menganggur, miskin dan berada dalam usia produktif.
	Pendanaan	- 2002: 15 LSM x Rp. 100 juta = Rp. 1,5 milyar - 2003: 30 LSM x Rp. 60 juta = Rp. 1,8 milyar Dana bersumber dari pengalihan dana subsidi BBM yang bersifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	2002 - 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Organisasi perempuan (LSM) yang berminat, mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya instansi tersebut menyeleksi proposal yang masuk berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. LSM yang terpilih untuk menjalankan proyek ini di masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 juta pada tahun 2002, dan Rp. 60 juta pada tahun 2003 yang digunakan untuk biaya pendidikan, pendampingan dan bantuan usaha. Rincian penggunaan dananya sbb; 15% untuk biaya manajemen/pengelolaan program, 20% untuk biaya pengadaan alat praktek ketrampilan hidup, 2,5% untuk pembelian buku-buku referensi/bahan belajar, 30% untuk penyelenggaraan proses pembelajaran/pelatihan ketrampilan hidup, 30% untuk pemberian dana bantuan modal usaha, dan 2,5% untuk biaya lain yang mendukung.
	Pencapaian hasil	Tahun 2002 ada 15 organisasi perempuan dan tahun 2003 ada 30 organisasi perempuan yang mengikuti proyek ini.
	Masalah	Tidak ada masalah
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Dari laporan yang diterima, proyek ini sangat bermanfaat bagi peningkatan usaha mikro.

No.	Item	Penjelasan
6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag)		
6.1	Nama upaya	Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang <i>Software</i>
	Deskripsi upaya	Upaya ini berupa pelatihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika Aneka (Ditjen ILMEA) bagi calon wirausaha baru terutama mahasiswa tingkat akhir dan yang baru lulus. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di bidang <i>information technology</i> , dalam hal ini <i>Incubator Business Center (IBC)</i> Universitas Gunadarma.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Universitas Gunadarma Jakarta
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan pasokan <i>software</i> dalam rangka pengembangan industri teknologi informasi melalui pelatihan wirausaha baru di bidang <i>software</i> di IBC Universitas Gunadarma, Jakarta.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta (IBC Gunadarma)
	Sasaran	Mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa yang baru lulus di Universitas Gunadarma. Pemilihan peserta atau mahasiswa dilakukan oleh Universitas Gunadarma.
	Pendanaan	Tahun 2002: Rp. 180 juta Tahun 2003: Rp. 132 juta Sumber: APBN dan bersifat habis dipakai.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 dan 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Ditjen ILMEA mengadakan kontrak kerjasama dengan Universitas Gunadarma selama satu bulan. Kemudian Ditjen ILMEA memberikan pelatihan kepada mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa yang baru saja lulus dari universitas tersebut di bidang <i>information technology</i> . Mahasiswa yang terpilih membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Pelatihan dibagi dalam dua tahap yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Pelatihan dasar yang bersifat umum diikuti oleh semua peserta secara bersama-sama. Sedangkan pada pelatihan lanjutan peserta sudah dibagi-bagi sesuai spesifikasi kelompok masing-masing. Dari pelatihan ini diharapkan masing-masing kelompok bisa berkembang dan mengembangkan diri di bidang teknologi informasi.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Pada tahun 2002 pihak Ditjen ILMEA mengalami kesulitan dalam menempatkan peserta sesuai spesifikasinya setelah mereka menempuh pelatihan tingkat dasar.
	Status saat ini	Sudah selesai.
	Potensi	Kegiatan ini berpotensi mengembangkan masing-masing kelompok di bidang teknologi informasi.
6.2	Nama upaya	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Industri Software Skala Kecil dan Menengah
	Deskripsi upaya	Ditjen ILMEA bekerjasama dengan PT INTI memberikan pelatihan kepada usaha kecil dan menengah di bidang <i>software</i> . Para pengusaha kecil ini membuat animasi dengan menggunakan komputer dan dilakukan di rumah-rumah.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	PT INTI Bandung

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Pengusaha kecil dan menengah di bidang <i>software</i> , yang membuat animasi dengan menggunakan komputer.
	Pendanaan	Pendanaan berupa 10 komputer (tahun 2002)
	Waktu pelaksanaan	Bulan Juni 2002 dan Juli 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pada tahun 2002 Ditjen ILMEA memberikan 10 komputer untuk membangun Regional Information Center of Excellence (RICE) yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pirnti Lunak Indonesia (ASPILUKI) dengan PT INTI. Pada tahun 2003 PT INTI mengadakan pelatihan bagi usaha kecil dan menengah di bidang <i>software</i> .
	Pencapaian hasil	Hasil yang dicapai dari pemberian 10 buah komputer di PT INTI pada tahun 2002 adalah terjadinya peningkatan jasa layanan di bidang <i>software</i> bagi usaha kecil dan menengah.
	Masalah	Tidak ada masalah.
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	Meningkatkan jasa layanan UKM yang bergerak di bidang <i>software</i> .
6.3	Nama upaya	Pelatihan Teknologi Produksi Industri Alas Kaki
	Deskripsi upaya	Upaya ini dilakukan untuk peningkatan kemampuan usaha UKM alas kaki.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Depperindag, Ditjen IDKM (Industri Dagang Kecil dan Menengah) dan Balai Industri Kulit Yogya
	Tujuan upaya	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi proses produksi alas kaki.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Tahun 2002: Yogyakarta Tahun 2003: Indonesian Footwear Service Center (IFSC) Sidoarjo, Bogor, Tangerang, Bekasi
	Sasaran	UKM Penjaringan dilakukan atas kerjasama Ditjen IDKM dengan Balai Industri Kulit Yogyakarta
	Pendanaan	Tahun 2002: Rp. 548 juta (Rp. 137 juta x 4 wilayah) Tahun 2003: Rp 137 juta (1 wilayah) Sumber: APBN dan bersifat habis dipakai
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 dan September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Dalam melaksanakan pelatihan, Ditjen ILMEA bekerjasama dengan Balai Industri Kulit Yogyakarta dan (IFSC). Mereka secara bersama-sama memberikan pelatihan terhadap para pengusaha kecil di bidang proses produksi alas kaki.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Peralatan IFSC yang merupakan bantuan dari Italy belum tersedia hingga Agustus 2003.
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	Membantu dan meningkatkan usaha kecil dan menengah yang memproduksi alas kaki.

No.	Item	Penjelasan
6.4	Nama upaya	Peningkatan Kemampuan SDM Bengkel Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perbengkelan alsintan (alat dan mesin pertanian) bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah Palu, NTB, Lampung (tahun 2002) dan Aceh (tahun 2003). Kegiatan ini berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh ATIAMI (Assistance Technical to the Agriculture Machinery Industry) di Padang.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Depperindag, Ditjen IDKM, ATIAMI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat.
	Tujuan upaya	Melaksanakan pelatihan untuk tenaga kerja bengkel alsintan guna mendukung kegiatan usaha sektor pertanian.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Padang
	Sasaran	UKM yang ada di Palu, NTB, Lampung (tahun 2002) UKM yang ada di Aceh (tahun 2003) Yang menjangkau UKM adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
	Pendanaan	Tahun 2002: Rp 260 juta Tahun 2003: Rp 260 juta Sumber: APBN dan bersifat habis dipakai
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 dan September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	UKM diseleksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Ditjen ILMEA bekerja sama dengan ATIAMI mengadakan pelatihan terhadap UKM yang sudah terpilih tersebut.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	Selama ini tidak ada masalah
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Peningkatan UKM di daerah yang berpotensi menghasilkan permesinan, khususnya alat-alat pertanian sesuai dengan potensi daerahnya.
6.5	Nama upaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemeliharaan Mesin Sederhana
	Deskripsi upaya	Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi mengalami <i>idle capacity</i> dan mesin-mesinnya tidak digunakan. Mesin-mesin yang tidak digunakan ini harus dirawat oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan. Pihak Ditjen ILMEA memberikan pelatihan bagaimana cara merawat mesin-mesin tersebut kepada karyawan masing-masing perusahaan.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Melaksanakan pelatihan tenaga kerja teknik di bidang pemeliharaan mesin-mesin sederhana guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan membantu agar mesin-mesin yang ada dapat bekerja dengan performa ideal.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kota Bekasi)
	Sasaran	Karyawan perusahaan-perusahaan yang mesinnya <i>idle capacity</i> .
	Pendanaan	Rp. 26 juta Dana APBN dan bersifat habis dipakai

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pelatihan ini dilakukan di perusahaan masing-masing oleh Ditjen ILMEA. Pelatihan diberikan kepada karyawan yang merawat mesin-mesin yang <i>idle capacity</i> . Materi pelatihan mencakup teori dan praktek perawatan mesin-mesin <i>idle tersebut</i> .
	Pencapaian hasil	Belum ada
	Masalah	Belum ada karena belum dilakukan
	Status saat ini	Belum dilaksanakan
	Potensi	Membuat mesin yang <i>idle capacity</i> dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
6.6	Nama upaya	Pengembangan Disain Alsintan di Kalimantan Selatan
	Deskripsi upaya	Ditjen ILMEA bekerjasama dengan Balai Besar Industri Logam Mesin (BBILM) Bandung dan Dinas Perindustrian Propinsi Kalimantan Selatan membuat cetak biru alsintan (alat dan mesin pertanian). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah perbengkelan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	BBILM Bandung, Dinas Perindustrian Propinsi Kalimantan Selatan
	Tujuan upaya	Mempersiapkan cetak biru alsintan untuk dikembangkan di Kalimantan Selatan yang terpadu dengan program pengembangan alsintan pola ATIAMI.
	Jenis kegiatan	Membuat cetak biru prototype alsintan
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Selatan (Banjar Baru)
	Sasaran	UKM perbengkelan yang ada di Banjar Baru, Kalimantan Selatan yang diseleksi oleh Dinas Perindustrian dan BBILM.
	Pendanaan	Rp. 50 juta APBN, bersifat habis dipakai.
	Waktu pelaksanaan	September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	BBILM membuat cetak biru alsintan berdasarkan kontrak kerjasama dengan Ditjen ILMEA. Cetak biru yang dihasilkan kemudian diserahkan kepada Dinas Perindustrian untuk disosialisasikan kepada UKM perbengkelan.
	Pencapaian hasil	Cetak biru alat dan mesin pertanian.
	Masalah	Tidak ada
	Status saat ini	Sudah dilaksanakan
	Potensi	Pengembangan UKM perbengkelan di Banjar Baru.
6.7	Nama upaya	Meningkatkan Pemahaman tentang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
	Deskripsi upaya	Ditjen ILMEA bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri di Bandung, Surabaya, dan Jawa Tengah mengadakan workshop untuk mensosialisasikan peraturan tentang HaKI pada UKM ILMEA di wilayah masing-masing.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Klinik HaKI - Ditjen IDKM - Depperindag Perguruan tinggi negeri di Bandung (ITB), Surabaya (ITS), dan Jawa Tengah
	Tujuan upaya	Meningkatkan pemahaman tentang HaKI baik kepada pelaku usaha maupun kepada aparat pembina industri agar industri dalam negeri terlindungi dari pelanggaran yang dapat merugikan pengembangan produk.
	Jenis kegiatan	Sosialisasi melalui workshop

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Tegal); Jawa Barat (Bandung); Banten (Tangerang); Jawa Timur (Surabaya).
	Sasaran	UKM di lingkungan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka yang diseleksi oleh dinas perindustrian wilayah masing-masing.
	Pendanaan	Rp. 80 juta (Rp. 20 juta per wilayah)
	Waktu pelaksanaan	Agustus 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Dilakukan secara swakelola atau dilaksanakan sendiri oleh Ditjen ILMEA. Pelaksanaan workshop ini dilakukan Ditjen ILMEA bekerja sama dengan Klinik HaKI yang ada di Ditjen IDKM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan perguruan tinggi negeri setempat.
	Pencapaian hasil	Sosialisasi telah dilakukan
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Sosialisasi telah dilakukan
	Potensi	Hasil workshop ini, apabila diterapkan oleh masing-masing pengusaha kecil dan menengah, bisa meningkatkan mutu dan kepercayaan industri di bidang HaKI.
6.8	Nama upaya	Temu Usaha Kemitraan Industri Besar dengan Industri Alat Olah Raga Skala Kecil-Menengah
	Deskripsi upaya	Ditjen ILMEA bekerjasama dengan Dinas Perindustrian di wilayah masing-masing membuat pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil menengah di bidang alat-alat olah raga. Penjajakan dilakukan bersama Ditjen ILMEA, Dinas Perindustrian, industri besar, dan industri kecil untuk melakukan kemitraan. Setelah aspek-aspek disepakati maka dibuat MoU kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah di bidang alat-alat olah raga.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Dinas Perindustrian daerah sasaran
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan industri alat olah raga skala kecil dan menengah melalui peningkatan kemitraan dengan industri besar.
	Jenis kegiatan	Temu usaha
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Tegal, Solo); Jawa Barat (Sukabumi, Bogor, Bekasi); Banten (Tangerang)
	Sasaran	UKM yang membuat <i>shuttle cock</i> di wilayah Tegal, Solo, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Bekasi Seleksi dilakukan oleh Dinas perindustrian di masing-masing wilayah.
	Pendanaan	Rp. 96 juta (Rp. 16 juta per wilayah) APBN
	Waktu pelaksanaan	Akan dilakukan Oktober 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan penjaringan <i>memorandum of understanding</i> antara industri besar dan industri kecil menengah. Setelah hal ini terjadi, kemudian dilakukan kemitraan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.
	Pencapaian hasil	Belum dilakukan
	Masalah	Belum ada
	Status saat ini	Belum dilakukan
	Potensi	Meningkatkan industri olah raga, dalam hal ini pembuatan <i>shuttle cock</i> .

No.	Item	Penjelasan
6.9	Nama upaya	Pengembangan Kemitraan Industri Besar dengan IKM Kapal Nelayan
	Deskripsi upaya	Upaya ini merupakan kerjasama antara Ditjen ILMEA dengan pemerintah daerah Maluku Utara untuk membentuk kemitraan antara industri besar dan industri kecil-menengah kapal nelayan kecil.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen ILMEA
	Instansi terkait	Dinas Perindustrian Propinsi Maluku Utara, IPB
	Tujuan upaya	Mengembangkan kemitraan dan pengadaan motor tempel guna meningkatkan kegiatan usaha IKM nelayan
	Jenis kegiatan	Kajian tentang nelayan Menyusun pola kemitraan antara industri besar dan industri kecil-menengah kapal nelayan di Maluku Utara. Memberikan bantuan kapal nelayan senilai Rp. 50 juta
	Wilayah pelaksanaan	Maluku Utara
	Sasaran	-Nelayan kecil Industri kecil-menengah kapal nelayan Pemilihan nelayan dilakukan oleh Pemda Maluku Utara
	Pendanaan	Rp. 200 juta (berupa paket, termasuk bantuan kapal senilai Rp. 50 juta) Sumber: APBN, hibah kepada nelayan melalui Pemda.
	Waktu pelaksanaan	September - November 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan kajian tentang nelayan yang ada di provinsi Maluku Utara. Dari hasil kajian ini kemudian disusun pola kemitraan antara industri besar dan industri kecil-menengah kapal nelayan kecil yang ada di Maluku Utara. Setelah itu Ditjen ILMEA memberikan bantuan kapal nelayan kepada nelayan-nelayan tersebut melalui Dinas Perindustrian Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan paket kegiatan.
	Pencapaian hasil	-
	Masalah	Belum ada, karena upaya ini masih dalam tahap kajian
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Meningkatkan pendapatan para nelayan di wilayah tersebut
6.10	Nama upaya	Klinik Konsultasi Pembiayaan Ekspor ke UKM/Bimbingan Tata Laksana Konsultasi Ekspor bagi UKM
	Deskripsi upaya	Tahun 1999-2001 kegiatan ini dinamakan "Klinik Konsultasi Pembiayaan Ekspor ke UKM". Kemudian pada tahun 2002-2003 berubah menjadi "Bimbingan Tata Laksana Konsultasi Ekspor Bagi UKM". Kegiatan ini ditujukan untuk membantu UKM memecahkan masalah di bidang pembiayaan, dengan mengundang perbankan (Bank Mandiri dan BRI) untuk membantu bidang pembiayaan, dan bekerjasama dengan Sucofindo untuk membantu di bidang manajemen.
	Penanggung jawab	Depperindag, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (PLN), Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen PLN, Dit Fasilitas Ekspor dan Impor
	Instansi terkait	- Bank Rakyat Indonesia - Bank Mandiri - PT Sucofindo
	Tujuan upaya	Membantu usaha kecil dan menengah di bidang pembiayaan dan manajemen.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Bimbingan - Konsultasi
	Wilayah pelaksanaan	2003: 11 kota/kabupaten (Jayapura, Mataram, Denpasar, Manado, Palu, Banjarmasin, Pontianak, Medan, Aceh, Yogya, Batam) 2002: 7 kota/kabupaten (Batam, Yogya, Palangkaraya, Pontianak, Samarinda, Kendari, Sorong) 2001: 5 kota/kabupaten (Manado, Semarang, Medan, Denpasar, Banjarmasin) 2000: 4 kota/kabupaten (Makassar, Padang, Mataram, Pekanbaru) 1999: 2 kota/kabupaten (Palembang, Yogyakarta)
	Sasaran	Usaha-usaha kecil dan menengah di masing-masing wilayah.
	Pendanaan	2003: Rp. 1.100.000.000,- (termasuk konsultasi teknis pembiayaan ekspor dan bimbingan tata laksana); APBN 2002: Rp. 320.000.000,- ; APBN 1999: bantuan dari PUKK
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Usaha-usaha kecil dan menengah mendapatkan penyuluhan dari Depperindag, Bea Cukai, dan perbankan tentang teknis pelaksanaan ekspor. Penyuluhan ini dilakukan 11 kali dalam setahun.
	Pencapaian hasil	Sulit diukur karena tidak ada tanggapan dari UKM-UKM, walaupun Depperindag sudah memberikan kartu monitor.
	Masalah	- Peserta tidak paham prosedur ekspor walaupun sudah diberi penyuluhan - UKM sulit mengakses perbankan karena terbentur agunan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.11	Nama upaya	Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000
	Deskripsi upaya	Secara umum, manajemen mutu UKM tergolong lemah. Untuk itu, Depperindag membangkitkan kesadaran UKM terhadap manajemen mutu dan memberikan pelatihan di bidang ini, agar UKM dapat memperoleh sertifikat ISO 9000.
	Penanggung jawab	Depperindag, Ditjen PLN, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor
	Pelaksana	- Depperindag, Ditjen PLN, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor - SPRINT (Sucofindo Prima International) Consultant
	Instansi terkait	-
	Tujuan upaya	UKM mampu menghasilkan produk dengan mutu yang konsisten dan sesuai dengan standar internasional.
	Jenis kegiatan	- Seminar peduli mutu - Pelatihan - Konsultasi
	Wilayah pelaksanaan	2001 di 5 daerah 2002 di 4 daerah: Medan, Jabotabek, Yogyakarta, dan Bali 2003 di 2 daerah: Surabaya dan Semarang
	Sasaran	Sasaran: UKM Penjaringan: dilakukan oleh SPRINT Consultant Kriteria: - Memenuhi kriteria sesuai UU No. 9 tentang usaha kecil - Pelaku ekspor - Produsen atau pedagang
	Pendanaan	2001: Rp. 2,2 miliar 2002: Rp. -- 2003: Rp. 1,35 miliar Sumber: APBN, bersifat habis dipakai

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Setelah UKM dipilih oleh konsultan, kemudian UKM mengikuti seminar.
	Pencapaian hasil	Yang mendapatkan sertifikat ISO 9000 sebanyak 11 UKM (2001), 15 UKM (2002), dan 10 UKM (2003)
	Masalah	- Kualitas UKM (seperti manajemen dan produknya) masih kurang - Banyak UKM yang mengundurkan diri di tengah pelaksanaan upaya
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Apabila ISO 9000 tercapai UKM akan mampu bersaing dalam hal mutu dan pemasaran sesuai dengan standar pasar internasional
6.12	Nama upaya	Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita (P2W) di Bidang Perdagangan
	Deskripsi upaya	Peningkatan peran serta wanita di sektor industri dan perdagangan diarahkan pada wanita pedagang kecil-eceran di pasar tradisional.
	Penanggung jawab	Depperindag (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri PDN) – Direktorat Bina Program
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen PDN, Direktorat Bina Program
	Instansi terkait	Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka membina kehidupan keluarga sehat sejahtera dengan membudayakan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan.
	Jenis kegiatan	- Penataran/penyuluhan - Temu usaha - Konsultasi usaha - Partisipasi dalam Pameran Hari Ibu (PHI)
	Wilayah pelaksanaan	- Desa/kecamatan yang ada di Pulau Jawa - Di ibukota kabupaten untuk propinsi yang berada di luar pulau Jawa
	Sasaran	- Perempuan golongan ekonomi lemah pada suatu keluarga, diutamakan pedagang yang belum mempunyai legalitas usaha. - Perempuan yang merupakan tokoh masyarakat setempat yang diharapkan dapat menyebarkan kepada perempuan pedagang lainnya - Wakil-wakil dari kelompok perempuan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menjadi binaan P2W departemen sektoral yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
	Pendanaan	-
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1992/1993 - 1998/1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Jumlah wanita yang mengikuti penataran/penyuluhan sampai dengan 1998/1999 sebanyak 34.352 - Jumlah wanita yang mengikuti temu usaha sampai dengan 1998/1999 sebanyak 19.860 - Jumlah wanita yang mengikuti konsultasi usaha 1996/1997 sebanyak 850.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.13	Nama upaya	Proyek Pengembangan Industri Kecil dan menengah (dilanjutkan dengan Proyek Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil / LPT INDAK)
	Deskripsi upaya	Merupakan program JPS pemerintah yang dilakukan melalui Depperindag (Ditjen IKDK). Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan oleh Ditjen IKDK dalam menyalurkan dana bergulir yang dimulai tahun 1998/1999 s/d 1999. Setelah dua tahun penyaluran dana bergulir, IKDK membentuk LPT INDAK Pusat dan LPT propinsi-propinsi yaitu dengan Keputusan Menteri Perindag No. 253/1999. LPT ini merupakan lembaga non-pemerintah yang membantu melakukan pelaksanaan perguliran dana yang telah disalurkan. LPT ini membina dan mengembangkan industri kecil dan dagang kecil dengan memberikan modal dan pembinaan.
	Penanggung jawab	1998/1999-1999: Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil. 2000 - sekarang: pemimpin proyek daerah
	Pelaksana	1998/1999 - 1999: Depperindag, Ditjen IKDK. 2000 - sekarang: LPT INDAK Pusat dan LPT provinsi
	Instansi terkait	- Dinas Perindustrian tingkat provinsi - Tim teknis daerah (perguruan tinggi, perbankan/BRI, LSM)
	Tujuan upaya	- Memberdayakan industri kecil dan dagang kecil - Membina dan mengembangkan industri kecil dan dagang kecil.
	Jenis kegiatan	1998/1999 - 1999: penyaluran dana (pinjaman/dana bergulir) 2000 - sekarang: -Pembinaan (pelatihan) - Pemberian/bantuan modal berupa dana bergulir
	Wilayah pelaksanaan	23, sekarang yang aktif 15 propinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau
	Sasaran	Industri kecil dan pedagang kecil. Penjaringan dilakukan oleh tenaga pendamping dari swasta dengan kriteria yang ditetapkan oleh LPT provinsi, yaitu: - Administrasi lengkap (SIUP, izin industri) - tidak sedang menerima bantuan dari bank lain - mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas perindustrian kabupaten.
	Pendanaan	Jumlah: 1998/1999: Rp 17,7 miliar 1999: Rp 20 miliar 2000 - sekarang: perguliran dari dana tersebut di atas. Sumber: APBN Sifat: 1998/99 - 1999: habis 2000 -sekarang: merupakan dana bergulir dan dikembalikan ke LPT INDAK
	Waktu pelaksanaan	- Tahun anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran 1999 untuk penyaluran - Tahun 2000 sampai sekarang untuk perguliran
	Mekanisme pelaksanaan	- Dari APBN, dana disalurkan ke Depperindag, diteruskan ke Ditjan IKDK, LPT, LPT tingkat provinsi, untuk kemudian diberikan kepada pengusaha kecil, KUB atau perorangan. LPT tingkat provinsi mendapat dana pembinaan sebesar 10% dari dana yang digulirkan sedangkan LPT pusat mendapat 1% untuk biaya operasional. - Bagi perusahaan penerima dana bergulir maksimum pinjaman adalah Rp 50 juta per perusahaan, dengan bunga 10% per tahun, <i>grace period</i> 6 bulan, dan jangka waktu pengembalian pinjaman 2 tahun. Peminjaman hanya boleh dua kali, setelah itu dimitrakan dengan Bank Danamon.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Di beberapa daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Barat), upaya ini cukup berhasil, seperti ditunjukkan oleh tingkat pengembalian yang baik.
	Masalah	Beberapa pengusaha tidak disiplin mengembalikan pinjaman. Kendala teknis dihadapi oleh masing-masing LPT provinsi.
	Status saat ini	Masih berjalan di 15 propinsi
	Potensi	Potensinya cukup besar untuk pengembangan usaha kecil dan mikro asalkan disertai pembinaan.
6.14	Nama upaya	Pengembangan Kerjasama Pasar Modern dengan Pedagang Informal dalam Rangka Memperluas Sarana Tempat Usaha Pedagang Kecil (UDK) (Proyek Pengembangan Dagang Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Dagang Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai suatu solusi bagi pedagang kecil yang memiliki keterbatasan sarana pemasaran dan pemasaran produk serta koordinasi dan kerjasama dalam pemasaran dan pengelolaan pasar dengan unit terkait belum optimal
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	Depperindag, Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil-Menengah (IDKM), Direktorat Bina SDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka secara luas kesempatan pedagang kecil non-produsen untuk memperoleh sarana tempat usaha yang layak - Terbukanya peluang pasar pedagang kecil non produsen secara kontinue - Adanya koordinasi dan kerjasama dan pengelolaan pasar dengan unit terkait
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi sarana dagang non produsen - Koordinasi dalam rangka pemanfaatan sarana dagang non produsen - Penyusunan pedoman dalam rangka pemanfaatan sarana dagang bagi pedagang kecil non-produsen.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	- Pedagang kecil non-produsen
	Pendanaan	Rp.75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemasaran bagi pedagang kecil non produsen - Tersusunnya pedoman dalam pelaksanaan kerjasama dengan unit terkait - Terwujudnya koordinasi dalam rangka meningkatkan pemasaran dan pengelolaan pasar.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.15	Nama Upaya	Pengembangan Kelembagaan Pembinaan UDK (Proyek Pengembangan Dagang Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Dagang Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Pembinaan terhadap pedagang kecil belum ditangani secara spesifik dan terkoordinasi. Adanya Lembaga independen Pembina UDK belum mampu mengkoordinasikan pembinaan bagi pedagang kecil. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penguatan terhadap kelembagaan yang membina UDK

No.	Item	Penjelasan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina UDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Untuk menumbuhkan dan memperkuat lembaga pembina UDK di daerah yang mampu berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam pembinaan UDK
	Jenis kegiatan	Pembentukan forum konsultasi lembaga pembina UDK
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: lembaga pembina UDK Tidak langsung: usaha dagang kecil
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	- Inventarisasi Lembaga Pembina UDK - Kunjungan lapangan - Persiapan pembentukan forum konsultasi Lembaga Pembina UDK
	Pencapaian hasil	Terbentuknya lembaga pembina UDK yang profesional dan mandiri
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.16	Nama Upaya	Peningkatan Mutu Sarana Pasar Hasil Industri untuk Mendukung Perluasan Pasar Produsen (Proyek Pengembangan Dagang Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Dagang Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat kondisi sarana dagang kecil yang ada kurang mampu mendukung dan menunjang pemasaran bagi produsen kecil, serta masih rendahnya kemampuan teknis dalam mutu layanan pasar bagi produsen kecil.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina SDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknis dalam mutu sarana pasar bagi produsen kecil - Meningkatkan pengetahuan produsen tentang penataan dan kesadaran dalam pemasaran.
	Jenis kegiatan	- Identifikasi sarana dagang yang potensial untuk dikembangkan. - Koordinasi dalam penataan dan penyusunan sarana dagang dengan instansi terkait.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Produsen kecil
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Terciptanya profil sarana dagang sebagai ajang pemasaran dan perluasan bagi produsen industri kecil - Terciptanya koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan dan pembuatan sarana dagang.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.17	Nama Upaya	Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil Pertanian di DKI Jakarta (Proyek Pengembangan Dagang Kecil)
	Deskripsi Upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Dagang Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Sistem pemasaran yang bersifat monopoli dan monopsoni, serta panjangnya jalur distribusi menyebabkan margin yang diterima petani produsen kecil dan harga yang sampai ke konsumen menjadi tinggi. Oleh karena itu kegiatan pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian dilaksanakan guna menciptakan satu sistem pemasaran alternatif yaitu warehouse untuk memperpendek jaringan mata rantai pemasaran, sehingga petani dan pedagang kecil memperoleh keuntungan yang memadai.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina UDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan jalur pemasaran yang efektif dan efisien - Harga yang tercipta tidak terlalu tinggi dan merupakan harga yang ditentukan oleh semua pelaku pasar - Memberikan keuntungan semua pihak pelaku pasar yang terkait dengan mutu yang memadai
	Jenis kegiatan	Penetapan sistem pemasaran melalui warehouse
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Petani kecil Pedagang kecil
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi petani dan pedagang eceran kecil. - Analisis data - Penentuan wilayah pemasaran
	Pencapaian hasil	Terciptanya sistem pemasaran yang efektif dan efisien agar produsen (petani dan pedagang eceran kecil) memperoleh keuntungan yang layak.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.18	Nama Upaya	Bantuan Tenaga Ahli untuk Pengembangan UKM (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Penguasaan teknologi produksi, manajemen dan informasi pasar mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Namun hal ini belum mendapat perhatian serius dari IKDK. Untuk itu bantuan tenaga ahli sangat diperlukan bagi IKDK agar efisiensi dan produktivitas usaha dapat tercapai.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui perbaikan teknologi, manajemen dan keterampilan - Meningkatkan keterampilan operator/perajin IKDK dalam upaya penanganan mesin/peralatan dengan budaya - Meningkatkan efektifitas program pembinaan dan pengembangan

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Penyempurnaan program UDK - Penyusunan kebijakan IKDK
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: IKDK Tidak langsung: usaha kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp 150.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Terwujudnya peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui perbaikan proses dan penataan hasil produksi. - Meningkatnya pemahaman dan ke-terampilan perajin/operator IKDK - Tersedianya konsepsi program dan masukan kebijakan IKDK.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.19	Nama Upaya	Assesment Kemampuan Penerapan Teknologi Tepat Guna / Teknologi Maju UKM-INDAG, Kerjasama dengan Perguruan (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Tingkat penerapan teknologi dan inovasinya pada UKM-Indag masih terbatas, sehingga efisiensi dan produktivitas produksi UKM-Indag secara umum masih belum kompetitif. Peralatan produksi pada UKM-Indag masih menggunakan teknologi tepat guna yang sangat sederhana, oleh karena itu waktu yang diperlukan cukup lama dan kualitas yang dihasilkan kurang memadai. Untuk itu diperlukan restrukturisasi mesin / peralatan untuk meningkatkan daya saing.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk peningkatan daya saing UKM-Indag dengan peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas perusahaan melalui restrukturisasi peralatan
	Jenis kegiatan	- Penyusunan matrik penerapan teknologi pada UKM-Indag per komoditi.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Tidak langsung: UKM
	Pendanaan	Rp 750.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	- Menentukan 10 komoditi ekspor - Identifikasi ke perusahaan - Analisa hasil identifikasi
	Pencapaian hasil	Diketahuinya tingkat kemampuan penerapan teknologi tepat guna/ maju pada UKM-Indag untuk dapat pelaksanaan restrukturisasi.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.20	Nama Upaya	Pengembangan Industri Kulit Pendukung Pendirian IFTC Bantuan Italia (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Industri kulit dan produk kulit merupakan industri padat karya dan menghasilkan produk-produk unggulan ekspor, sehingga perlu terus didorong agar mampu bersaing di pasaran global. Salah satu upaya untuk mendorong industri kulit dan produk kulit (IKPK) adalah mendirikan IFTC melalui bantuan pemerintah Italia.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Sanlita
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mendampingi tenaga ahli Italia dalam rangka pendirian IFTC. - Pelaksanaan pendirian IFTC tidak menyimpang dari FS yang telah diusulkan.
	Jenis kegiatan	Pemantauan Evaluasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Usaha kecil
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Pendirian IFTC sesuai dengan hasil FS
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.21	Nama Upaya	Pembinaan dan Pengembangan GKM ** (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, industri kecil harus meningkatkan mutu dan daya saing secara terus menerus. Salah satu cara adalah dengan penerapan dan pengembangan GKM. Agar penerapan program GKM terus meningkat maka perlu dilakukan workshop dan monitoring kegiatan pelaksanaan GKM di berbagai daerah
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-LME
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan dan mengembangkan penerapan GKM di lingkungan IKDK guna meningkatkan mutu secara luas.
	Jenis kegiatan	- Workshop - Pemantauan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Usaha kecil
	Pendanaan	Rp 200.000.000,-

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Terlaksananya dengan baik program pengembangan GKM di lingkungan IKDK. - Meningkatkan daya saing unit-unit usaha IKDK yang menerapkan GKM serta mampu menghadapi persaingan bebas.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.22	Nama Upaya	Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang Prioritas dan Strategis bagi Usaha Industri Kecil Pangan (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini didasari oleh kurangnya pemahaman industri kecil terhadap peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengan usahanya. Di samping itu industri kecil pangan banyak berkaitan dengan keselamatan/kesehatan konsumen, sehingga penting bagi industri kecil (IK) memahami peraturan /kebijakan yang dapat melindungi konsumen
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina Industri Kecil-Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan pemahaman IK pangan tentang peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan usahanya - Meningkatkan perlindungan konsumen
	Jenis kegiatan	- Lokakarya lintas sektoral - Sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Industri kecil pangan
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Pengusaha IK pangan semakin memahami peraturan/kebijakan pemerintah yang terkait dengan usahanya.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.23	Nama Upaya	Pengembangan UKM-INDAG (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi Unit usaha UKM-Indag di Indonesia telah mencapai 1.488.891 unit dan tersebar di 15 propinsi. Kendala yang dihadapi oleh unit usaha tersebut adalah sulitnya memperoleh sumber pembiayaan. Untuk itu sejak TA 1998/1999 - 1999/2000 pemerintah telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 35.070 milyar. Namun jumlah ini dirasakan kurang memadai, sehingga hanya 1.268 unit saja yang mendapatkan bantuan. Oleh karena itu Ditjen IKDK memandang perlu menambah alokasi dana bergulir untuk 4 propinsi.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : - Pemberdayaan agro UKM-Indag yang berorientasi ekspor - Pemberdayaan UKM-Indag sektor kerajinan yang berorientasi ekspor - UKM-Indag substitusi impor - Pemberdayaan pedagang melalui pembinaan kelompok usaha bersama (KUB)
	Jenis kegiatan	- Bantuan dana bergulir kepada UKM-Indag tertentu baik individual, maupun kelompok yang memenuhi syarat. - Bantuan dampingan kepada UKM-Indag yang menerima bantuan dana bergulir dengan menempatkan konsultan pendamping di perusahaan UKM-Indag. - Bantuan sarana kelembagaan (UPK dan LPT Indag-Propinsi).
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bengkulu.
	Sasaran	Usaha kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp 5.000.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- 92 UKM-Indag dapat diberi bantuan dana bergulir - Tersedianya lembaga pendamping UKM-Indag di 6 propinsi - Tumbuh dan bangkitnya UKM-Indag di 6 propinsi yang terkena dampak krisis. - Tersedianya lapangan usaha dari lapangan kerja pada UKM-Indag. - Meningkatnya ekspor hasil UKM-Indag dari wilayah tersebut.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.24	Nama Upaya	Bimbingan Penyusunan Proposal Kelayakan Usaha (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan program UKM, hal ini dapat dilihat dari besarnya kredit UKM yang disediakan yaitu Rp 10 trilyun, yang disalurkan melalui perbankan dan lembaga lainnya. Dengan berkembangnya UKM, pemerintah berharap UKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terbukti UKM dapat bertahan dari krisis yang melanda Indonesia. Namun demikian, UKM memiliki keterbatasan dalam hal penyusunan proposal usaha yang memenuhi norma dan standar yang lazim dan dapat diterima oleh Perbankan. Untuk itu diperlukan komitmen dan kepedulian untuk membantu UKM dalam memanfaatkan skema kredit melalui bantuan penyusunan proposal usaha yang baik.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Untuk membantu UKM-Indag agar mampu memanfaatkan dengan skema kredit yang disediakan oleh perbankan. - Mendorong pengembangan usaha UKM-Indag yang memiliki bisnis yang prospektif

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan UKM-Indag yang prospektif - Pemilihan konsultan penyusun proposal - Pengumpulan data/informasi - Penyusunan proposal usaha - Diseminasi kepada perbankan.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Usaha kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp 4.000.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Tersusunnya proposal usaha bagi 2000 UKM-Indag pada 12 propinsi terpilih
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.25	Nama Upaya	Penguatan Kelembagaan Pembina UKM-INDAG (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	<p>Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Guna mengatasi masalah permodalan bagi UKM-Indag, Depperindag sudah memperkenalkan skim dana bergulir yang mudah diakses oleh UKM-Indag. Pengelolaan dana bergulir ini dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yaitu LPT-Indag yang tersebar di 15 propinsi.</p> <p>Agar pelaksanaan penyaluran dana bergulir tersebut dapat berjalan sesuai pedoman maka diperlukan kegiatan penguatan bagi lembaga pengelola (Lembaga Pembinaan UKM-Indag) berupa bimbingan dan arahan serta monitoring pelaksanaan dana bergulir.</p>
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan konsultasi kepada Lembaga Pembinaan UKM-Indag. - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai sasaran, mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan - Meningkatkan kelangsungan UKM-Indag.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program dana bergulir di 6 propinsi. - Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan melalui pelatihan dan bantuan tenaga ahli (<i>resident consultant</i>) yang ditempatkan di lokasi. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi penyaluran dana bergulir, perkembangan kelembagaan (UPK dan LPT Indag), dan perkembangan UKM-Indag penerima bantuan pinjaman dana bergulir.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: lembaga pembina UKM-Indag Tidak langsung: UKM-Indag
	Pendanaan	Rp 240.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya efektivitas penyaluran dana. - Meningkatnya kemampuan pengelolaan dana bergulir UPK dan LPT-Indag Propinsi - Adanya masukan untuk bahan pengendalian dan perumusan kebijakan.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.26	Nama Upaya	Penumbuhan Kewirausahaan pada Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren (Pontren) melalui ToT AMT (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan peningkatan kemampuan SDM diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan UKM. Salah satu prioritas pengembangan UKM-Indag adalah melalui pontren.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Agar UKM-Indag dapat lebih ber-kembang melalui Pontren. - Melalui TOT AMT diharapkan mampu lebih meningkatkan kemampuan SDM UKM-Indag.
	Jenis kegiatan	- Pelaksanaan TOT AMT
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: pondok pesantren
	Pendanaan	Rp 200.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Juli-September 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kemampuan SDM pontren dalam usahanya.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.27	Nama Upaya	Inisiasi Wira Usaha Baru (WUB)** (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Krisis moneter mengakibatkan terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya akibat krisis moneter. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. PHK tidak hanya menimpa buruh tetapi juga pekerja yang lebih terdidik seperti yang diakibatkan oleh likuidasi beberapa bank. Pengangguran karena PHK dari kalangan perbankan atau pegawai/perkantoran yang memiliki latar pendidikan yang cukup tinggi, mempunyai potensi untuk diarahkan pada kegiatan produksi yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah melakukan beberapa program guna mengatasi masalah tersebut. Salah satu usaha yang diprogramkan oleh Dit. Bina Usaha Dagang Kecil untuk TA 2001 adalah Inisiasi Wirausaha Baru.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina Usaha Dagang Kecil

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Penyiapan wirausaha baru yang terdidik yang dikaitkan dengan pemberian jaminan modal awal oleh lembaga/ bank penjamin.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	80 peserta tenaga kerja yang mengalami PHK
	Pendanaan	Rp 500.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Terdidiknya tenaga kerja PHK dan mereka yang belum pernah bekerja untuk menjadi wirausaha baru.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.28	Nama Upaya	Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan UKM (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong era kompetisi global, dimana diperlukan pematapan UKM-Indag agar menjadi WUB mandiri. Guna tercapainya kemandirian usaha maka perlu pembekalan kemampuan pengetahuan bagi para WUB terpilih.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina Usaha Dagang Kecil
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberikan pembekalan kemampuan kewirausahaan menghadapi era pasar bebas tahun 2002.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	80 WUB terpilih
	Pendanaan	Rp 300.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	Pelatihan dilaksanakan dua kali
	Pencapaian hasil	- Terlatihnya WUB sebanyak 80 orang - Terwujudnya WUB mandiri
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.29	Nama Upaya	Penguatan Kelembagaan UPK Kabupaten / Kota dalam Penyaluran Dana Bergulir (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini didasari hasil laporan pemantauan pelaksanaan proyek pengembangan industri kecil-DPKK di daerah-daerah, di mana penyaluran dana bergulir yang berjumlah Rp 43 milyar dan tersebar di 400 kabupaten / kota di 26 propinsi telah mencapai lebih kurang 90%. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatannya bagi UKM-Indag, maka diperlukan penguatan kelembagaan perguliran dana.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Sesditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Terbentuknya lembaga yang mampu melaksanakan perguliran dana DPKK yang telah tersalur di masyarakat. - Lebih meningkatnya kemampuan permodalan UKM-Indag.
	Jenis kegiatan	- Sosialisasi UPK ke kabupaten / kota - Penyusunan panduan lembaga UPK kabupaten / kota
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: UPK Tidak langsung: UKM-Indag
	Pendanaan	Rp 450.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Terbentuknya lembaga UPK di kabupaten / kota
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.30	Nama Upaya	Pemutakhiran Informasi Hasil Litbang Perindag dalam Pemecahan Masalah Teknologi (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek pengembangan kemandirian Usaha Kecil, Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajemen dan bisnis UKM yang masih terbatas. Dengan adanya layanan pengembangan bisnis, teknologi dan manajemen dari lembaga profesional, diharapkan UKM mampu mandiri dan berdaya saing global.
	Penanggungjawab	Depperindag
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil litbang yang telah dilakukan oleh lembaga litbang Perindag untuk mendukung peningkatan daya saing UKM
	Jenis kegiatan	- Penyebarluasan hasil-hasil litbang untuk UKM.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	UKM
	Pendanaan	Rp 200.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dengan lembaga litbang Perindag terkait. - Inventarisasi hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh UKM - Pembahasan sistem informasinya - Penyusunan sistem informasi hasil litbang untuk UKM
	Pencapaian hasil	Tersedianya informasi hasil litbang dari seluruh lembaga litbang Perindag yang dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk peningkatan kemampuan produksinya.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.31	Nama Upaya	Fasilitasi Pengembangan Minyak Atsiri Nasional (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan produksi dan mutu minyak atsiri di Indonesia.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina Industri Kecil - Kimia Agro dan Hasil Hutan (IK-KAHH)
	Instansi terkait	Dunia Usaha, Pemda, Kadinda, Koperasi, Dephutbun, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, balai industri
	Tujuan upaya	Meningkatkan efisiensi, mutu dan produktivitas untuk mampu bersaing di pasar global dalam rangka peningkatan devisa negara.
	Jenis kegiatan	Fasilitasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Produsen minyak atsiri
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Buku panduan pengembangan minyak atsiri nasional.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.32	Nama Upaya	Fasilitasi Pengembangan Gambir Nasional (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	Dunia Usaha, Pemda, Kadinda, Koperasi, Dephutbun, perguruan tinggi, lembaga keuangan, balai industri
	Tujuan upaya	Meningkatkan efisiensi, mutu dan produktivitas untuk mampu bersaing di pasar global dalam rangka peningkatan devisa negara.
	Jenis kegiatan	Fasilitasi
	Wilayah pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Produsen gambir
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Buku panduan pengembangan gambir nasional
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.33	Nama Upaya	Pengembangan Industri Kelapa Sawit Terpadu (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengaplikasikan teknologi tepat guna pengolahan minyak goreng kelapa sawit skala kecil - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri minyak goreng kelapa sawit - Memenuhi pasokan minyak goreng kelapa sawit khususnya di sekitar produsen TBS. - Meningkatkan pendapatan petani produsen. Koordinasi pengembangan komoditi.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi informasi teknologi pengolahan minyak goreng kelapa sawit terintegrasi berskala kecil. - Bantuan tenaga ahli teknologi pengolahan. - Bantuan promosi dan informasi pasar - Fasilitasi / koordinasi pihak - pihak terkait. - Monitoring dan evaluasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Produsen minyak goreng kelapa sawit skala kecil.
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya sinergi pada kebijaksanaan pengembangan komoditi kelapa sawit dan instansi terkait dalam bentuk MOU (bentuk lain). - Mengirim tenaga ahli pengolahan ke lokasi industri kecil pengolahan kelapa sawit. - Mengikutsertakan pengusaha IK pengolahan kelapa sawit dalam misi dagang dan memberikan informasi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. - Membantu IK pengolahan kelapa sawit terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral. - Diperolehnya informasi perkembangan IK pengolahan kelapa sawit terpadu.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.34	Nama Upaya	Pengembangan Industri Garam Rakyat (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan supply garam dan kualitas yang diharapkan. - Memperluas partisipasi UKM garam melalui KUB. - Memperluas lapangan kerja dan berusaha.
	Jenis kegiatan	Pembuatan modul pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	DI. Aceh; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; Bali; NTB; NTT; Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
	Sasaran	UKM garam
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersedianya modul pelatihan peningkatan kualitas garam . - Tersedianya modul pelatihan peningkatan KUB/KUT
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.35	Nama Upaya	Pengembangan UKM Barang Karet (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk membantu UKM barang-barang karet dalam mengembangkan produknya terutama dalam meningkatkan kualitas dan peluang pasar.
	Jenis kegiatan	Penyusunan buku panduan pengembangan mutu barang-barang karet.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Utara; Lampung; Jawa Barat; Jawa Timur; Kalimantan Selatan.
	Sasaran	UKM produsen barang-barang karet
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Februari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersusunnya informasi untuk meningkatkan usaha dan mutu barang-barang karet. - Kerjasama antara UKM, industri otomotif dengan instansi-instansi ter-kait.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.36	Nama Upaya	Pengembangan UKM Pestisida Organik (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu UKM agar mempunyai peluang usaha baru di bidang pestisida organik
	Jenis kegiatan	
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Utara; Sumatera Barat; Lampung; Jawa dan Sulawesi Selatan.
	Sasaran	Wirausaha
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Februari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tumbuh dan berkembangnya UKM di bidang pestisida organik - Kerjasama antara formulator, UKM, Deptan, dan Depperindag.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.37	Nama Upaya	Pengembangan UKM Pupuk (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam dalam pembuatan pupuk, sehingga pupuk yang diproduksi oleh UKM dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tanah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk membantu UKM pupuk agar mampu berproduksi dengan kualitas yang baik dan konsisten.
	Jenis kegiatan	Mengadakan temu usaha
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	UKM pupuk
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Februari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.38	Nama Upaya	Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri Kecil Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pasar yang semakin bersaing, sejalan dengan meningkatnya tuntutan konsumen.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memasyarakatkan teknologi produksi dan kemasan bagi produk IK Pangan dan meningkatkan mutu produk serta kemasan IK Pangan.
	Jenis kegiatan	- Bimbingan - Bantuan bahan dan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Industi kecil pangan
	Pendanaan	Rp 150.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Meningkatkan mutu kemasan produk IK Pangan. - Meningkatkan pengetahuan pengusaha IK Pangan dalam menggunakan bahan dan desain.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.39	Nama Upaya	Bantuan Tenaga Ahli dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan IK-LME (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-LME
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Membantu pengusaha IK dalam mengatasi masalah teknis dan-non teknis dalam pengembangan usaha - Meningkatkan kemampuan wawasan perajin dalam proses desain dan penjualan - Memberdayakan potensi ekonomi daerah dalam menghadapi pasar global
	Jenis kegiatan	- Konsultasi bimbingan/pelatihan - Monitoring dan evaluasi - Menentukan komoditas unggulan IK-LME
	Wilayah pelaksanaan	14 propinsi
	Sasaran	IK LME (Industri Kecil Logam, Elektronika dan Mesin)
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.40	Nama Upaya	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Pertanian untuk Pengembangan Industri Pulp (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan limbah pertanian
	Jenis kegiatan	- Penyusunan draft pemanfaatan limbah pertanian - Workshop - Uji coba lapangan - Sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Masyarakat peminat industri pulp skala kecil
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersedianya buku pemanfaatan limbah pertanian untuk pengembangan industri pulp skala kecil. - Terserapnya informasi tersebut oleh masyarakat peminat industri pulp skala kecil.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.41	Nama Upaya	Kegiatan Pemasarakatan Kemitraan Usaha IK SANLITA dengan Usaha Besar (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK Sanlita
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemitraan antara IK-Sanlita dengan industri besar.
	Jenis kegiatan	- Identifikasi dan inventarisasi kelompok sasaran pelaksanaan kemitraan. - Temu usaha/bisnis
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK sanlita
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kemitraan antara IK-Sanlita dengan pengusaha besar dan berkelanjutan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.42	Nama Upaya	Pengembangan Aliansi Usaha Produk Kayu Olahan Pasar Ekspor (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAAH
	Instansi terkait	Dunia usaha, Pemda, Kadinda, Asosiasi, Koperasi, Eksportir, Depperindag, PT. Perhutani, Dep. Hutbun, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan.
	Tujuan upaya	Meningkatkan efisiensi, mutu dan produktivitas untuk mampu bersaing di pasar global dalam rangka peningkatan devisa negara.
	Jenis kegiatan	- Pembuatan buku panduan - Pembentukan aliansi usaha
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM produsen kayu
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Buku panduan pengembangan aliansi usaha produk kayu olahan pasar ekspor. - Terbentuknya aliansi usaha produk kayu olahan pasar ekspor.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.43	Nama Upaya	Pengembangan Aliansi Usaha Produk Barang Jadi Rotan Pasar (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAAH
	Instansi terkait	Dunia Usaha, Pemda, Kadinda, Asosiasi, Koperasi, Eksportir, Depperindag, PT. Perhutani-Dep. Hutbun, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan.
	Tujuan upaya	Meningkatkan efisiensi, mutu dan pro-duktivitas untuk mampu bersaing di pasar global dalam rangka peningkatan devisa negara.
	Jenis kegiatan	Pembuatan buku panduan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM produsen barang jadi rotan pasar
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Buku panduan pengembangan aliansi usaha produk barang jadi rotan pasar ekspor.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.44	Nama Upaya	Pengembangan Distribusi Pengadaan Bahan Baku untuk Mendukung Pusat Pemasaran (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina Usaha Dagang Kecil
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk hasil rotan. - Mengembangkan jaringan informasi yang mendukung pengembangan produk-produk rotan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor
	Jenis kegiatan	Identifikasi kemampuan daerah penghasil rotan (bahan baku) dan jenis rotan yang dihasilkan.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM produsen rotan
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Terciptanya pengaturan distribusi pengadaan bahan baku rotan.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.45	Nama Upaya	Peningkatan Pemanfaatan Skim Kredit UKM / Permodalan UKM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memanfaatkan dana kredit program UKM-Indag secara optimal.
	Jenis kegiatan	- Workshop - Penyusunan sistem perguliran dana Industri Kecil / Industri Rumah Tangga kabupaten / kota - Pemasarakatan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	UKM Indag
	Pendanaan	Rp 120.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Terinformasinya akses kredit program kepada UKM - Tersusunnya sistem perguliran dana Industri Kecil/Industri Rumah Tangga kabupaten / kota - Teridentifikasinya masalah permodalan UKM-Indag. - Adanya analisis masalah permodalan UKM-Indag.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.46	Nama Upaya	Kegiatan Fasilitasi Kelancaran Pengadaan Bahan Baku (Kayu, Emas, Perak) (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memfasilitasi kelancaran pengadaan bahan baku UKM-Indag.
	Jenis kegiatan	- Temu usaha - Penyusunan kerjasama
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	UKM Indag
	Pendanaan	Rp 90.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Adanya kebijakan pemerintah dalam menjamin kelancaran bahan baku kayu, emas/perak dan loga baja, untuk UKM-Indag.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.47	Nama Upaya	Pengembangan Pola Kerjasama UKM-Indag antar Negara ASEAN (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen IKDK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan wawasan global dari UKM - Meningkatkan daya saing UKM - Merealisasikan kerjasama UKM dalam bentuk klaster. - Mengevaluasi kesiapan UKM menghadapi AFTA
	Jenis kegiatan	- Pemasyarakatan pola kerjasama UKM antar ASEAN - Analisis tingkat kemampuan UKM representatif - Penyusunan hasil evaluasi kesiapan UKM menghadapi AFTA
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	UKM Indag
	Pendanaan	Rp 80.000.000
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Terjalannya kerjasama antar UKM Indonesia dengan UKM ASEAN dalam bentuk klaster yang berorientasi ekspor - Termanfaatkannya teknologi yang telah dikuasai oleh UKM ASEAN - Terevaluasinya kesiapan UKM Indonesia menghadapi AFTA.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.48	Nama Upaya	Penyusunan Informasi Peralatan dan Mesin Industri Kecil Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menyusun informasi berbagai jenis mesin dan peralatan IK-Pangan.
	Jenis kegiatan	Penyusunan informasi mesin dan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK Pangan
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Tersusunnya informasi mesin peralatan yang dibutuhkan IK-Pangan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.49	Nama Upaya	Penyusunan Modul Pelatihan Pembuatan Arang Briket (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-KAHH
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan SDM dalam pembuatan arang tempurung menjadi arang briket.
	Jenis kegiatan	Pembuatan modul peningkatan teknologi pembakaran
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Bekasi), Banten (Tangerang), Lampung, Jatim, NTT dan Maluku
	Sasaran	IKM produsen arang briket
	Pendanaan	Rp 75.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Tersusunnya modul pelatihan arang briket
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.50	Nama Upaya	Penyusunan Materi Bimbingan Penerapan Sikap Kerja 5-K/5-S (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-LME
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Memberikan ilmu pengetahuan kepada pembina di daerah di dalam upaya mentrasfer pengetahuan kepada pengrajin dalam hal aktivitas kerja 5-K/5-S - Mendorong pengrajin meningkatkan kerjasama dalam kelompok kerja/tim kerja dalam meningkatkan efisiensi usaha serta peningkatan produktivitas.
	Jenis kegiatan	Penyusunan materi 5-K/5-S
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Tidak langsung: IK LME Langsung: pembina pengrajin
	Pendanaan	Rp 70.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Meningkatnya ilmu pengetahuan aparat pembina di daerah di dalam mentrasfer pengetahuan 5-K/5-S kepada perajin. - Terciptanya kerjasama kelompok perajin di dalam meningkatkan efisiensi usaha dan produktivitas kerja di tempat kerjanya.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.51	Nama Upaya	Penyusunan Katalog Mesin dan Peralatan Pengolah Hasil Produk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-LME
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Memberikan gambaran mengenai kebutuhan pengusaha (user) akan mesin/peralatan UKM serta lokasi pembuatannya (<i>manufacturing</i>). - Mendukung akselerasi sektor IK dan menengah dalam membangkitkan kembali usaha yang ada/kadaluwarsa, untuk bangkit lagi akibat dari dampak krisis.
	Jenis kegiatan	- Menyusun katalog. - Menyebarkan dan mengadakan diseminasi ke sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. - Menyusun laporan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Tersusunnya buku katalog mesin / peralatan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menyangkut lokasi pabrikan, kapasitas, spesifikasi, proses maupun harga.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.52	Nama Upaya	Penyusunan Katalog Pakaian Jadi Wanita Dewasa (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Sanlita
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk menyusun katalog pakaian wanita dewasa dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi secara lengkap tentang mode-mode yang terbaru serta metode dan teknik pembuatan secara baik dan benar.
	Jenis kegiatan	- Mengumpulkan data dan informasi melalui survey lapangan dan kerjasama dengan tenaga ahli. - Menyiapkan dan menyusun katalog mesin/peralatan. - Distribusi katalog ke daerah.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM produsen pakaian jadi wanita dewasa
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersedianya katalog pakaian jadi wanita dewasa yang dapat digunakan sebagai sarana usaha dan pendirian usaha baru. - Meningkatnya perkembangan IK pakaian jadi khususnya untuk pakaian jadi wanita dewasa.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.53	Nama Upaya	Penyusunan Informasi Pakaian Jadi (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat Bina IK-Sanlita
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membuat suatu desain produk pakaian jadi yang <i>up-to-date</i> dan mempunyai prospek pasar yang baik.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Inventarisasi dan identifikasi pola dan desain - Pemberian informasi mengenai pola, teknik pengerjaan bahan/tekstil yang harus digunakan, serta warna yang cocok.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM pakaian jadi
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tersusunnya informasi desain pakaian jadi - Tersebaranya informasi desain pakaian jadi yang <i>up-to-date</i> dan laku di pasaran
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.54	Nama Upaya	Peningkatan Promosi Pasar Hasil Ikra (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri Kecil Pedesaan dan Industri Kecil Rumah Tangga dan Kerajinan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit.Bina Usaha Dagang Kecil
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan peranan sarana dagang kecil sebagai pemasar hasil IKRA. - Mendorong perkembangan hasil pemasaran produk IKRA.
	Jenis kegiatan	- Pengiriman tenaga ahli - Supervisi/evaluasi - Penyusunan laporan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Ikra (Industri kecil rumah tangga dan kerajinan)
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari-Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	- Tertatanya outlet, pasar industri dan artshop secara artistik, menarik dan representatif. - Terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengusaha UKM. - Meningkatnya hasil pemasaran produk UKM.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.55	Nama Upaya	Pelatihan Peningkatan Pemanfaatan Minyak Atsiri (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, khususnya dalam pemanfaatan limbah minyak atsiri . Limbah minyak atsiri baik berupa padat ataupun cair belum dimanfaatkan, sedangkan penyebaran industri minyak atsiri hampir di seluruh Indosnesia. Diharapkan produk sampingan minyak atsiri dapat menambah penghasilan produsen minyak atsiri.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. KKB
	Instansi terkait	Dinas Perindag propinsi
	Tujuan upaya	- Mengembangkan industri-industri yang menggunakan bahan-bahan penyulingan minyak atsiri - Menumbuhkan usaha baru berupa industri pengolahan produk sampingan minyak atsiri, seperti industri sabun, bedak dingin dan lain-lain.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Produsen minyak atsiri
	Pendanaan	Rp 60.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kemampuan produsen minyak atsiri dalam pemanfaatan limbah minyak atsiri
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.56	Nama Upaya	Percepatan Peningkatan Daya Saing Minyak Atsiri (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pengembangan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya nilai ekspor minyak atsiri, yaitu hanya sebesar US\$ 56 juta. Seyogyanya nilai ini bisa lebih besar dari US\$ 100 juta, karena industri minyak atsiri Indonesia sepenuhnya menggunakan bahan baku dalam negeri.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. KKB
	Instansi terkait	Koperasi Minyak Atsiri, KADIN
	Tujuan upaya	- Meningkatkan kerjasama dalam bentuk kemitraan - Mendorong para pengusaha dan eksportir meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor
	Jenis kegiatan	Workshop
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat
	Sasaran	Petani/perajin (60 orang)
	Pendanaan	Rp 95.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kerjasama kemitraan dalam usaha peningkatan ekspor
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.57	Nama Upaya	Bantuan Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk (Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita Bidang Industri dan Perdagangan)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita bidang Industri dan Perdagangan, Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kelompok Usaha Bersama melalui pengembangan dan diversifikasi produk industri kecil yang dikelola wanita, dengan komoditi kerajinan, sandang, pangan dll. Kegiatan ini merupakan program lanjutan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	Lembaga litbang Industri, tenaga ahli bidang desain
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	- Bimbingan dan penyuluhan - Bantuan peralatan - Penyebaran informasi perkembangan desain dan diversifikasi produk
	Wilayah pelaksanaan	20 propinsi
	Sasaran	Wanita perajin di pedesaan yang tergabung dalam KUB
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.58	Nama Upaya	Pelatihan Pedagang Ecerah di Daerah (Proyek Peningkatan Peranserta Wanita Bidang Industri dan Perdagangan)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita bidang Industri dan Perdagangan, Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini ditujukan bagi wanita yang terkena PHK dan putus sekolah yang memiliki keterampilan dasar yang dapat diberdayakan di bidang usaha perdagangan eceran sebagai alternatif usaha baru.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Memberi bekal pengetahuan praktis tentang cara berdagang yang baik dan benar - Mempercepat pemberdayaan kaum wanita di bidang usaha ekonomi
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	1 propinsi
	Sasaran	Wanita terkena PHK dan putus sekolah
	Pendanaan	Rp 60.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.59	Nama Upaya	Partisipasi Pameran dan Uji Coba Pasar dalam Rangka Promosi Pasar Hasil Produksi KUB P2W Indag (Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita Bidang Industri dan Perdagangan)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita bidang Industri dan Perdagangan, Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini untuk mempromosikan hasil produksi KUB binaan secara luas dan berkesinambungan serta untuk meningkatkan pemasaran. Kegiatan ini merupakan program lanjutan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mempromosikan hasil produksi KUB kepada masyarakat luas - Mengembangkan pemasaran hasil produksi KUB binaan
	Jenis kegiatan	Mengikuti pameran
	Wilayah pelaksanaan	10 Propinsi
	Sasaran	KUB dari desa binaan
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.60	Nama Upaya	Pameran Produk Industri Kecil Pangan yang Telah Diproduksi dengan Baik (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mendorong perluasan pasar - Mendorong peningkatan mutu produk IKM Pangan
	Jenis kegiatan	- Pameran - Temu usaha
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK pangan
	Pendanaan	Rp 66.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	- Semakin dikenal dan diminatinya produk IKM Pangan dalam negeri - Meningkatnya pasar termasuk ekspor bagi IKM Pangan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.61	Nama Upaya	<i>Training of Trainer</i> Bidang GMP untuk Aparat Lembaga Pembina IDKM Pangan dan LSM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Menyediakan tenaga instruktur atau fasilitator GMP yang handal dan tersebar di Daerah masing-masing - Mendorong penerapan GMP pada IDKM Pangan yang semakin cepat - Meningkatkan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: aparat lembaga pembina IDKM pangan dan lsm Tidak langsung: IDKM pangan
	Pendanaan	Rp 85.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Rekrutmen peserta - Rekrutmen instruktur - Penyiapan akomodasi - Pelatihan - Evaluasi - Laporan
	Pencapaian hasil	- Bertambahnya 60 orang instruktur GMP yang tersebar di Daerah - Semakin meningkatnya mutu pelatihan GMP yang dilakukan Daerah
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.62	Nama Upaya	Peningkatan Keamanan Pangan dan Pencanangan Gerakan yang Baik dan Benar Industri Kecil Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong kalangan IKM Pangan menerapkan cara berproduksi yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk olahan pangan yang bermutu baik dan aman bagi konsumen.
	Jenis kegiatan	- Sosialisasi dan bimbingan - Penyusunan pedoman penerapan GMP

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM pangan
	Pendanaan	Rp 159.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi
	Pencapaian hasil	- Terbentuknya Tim Terpadu Peningkatan Keamanan Produk Pangan - Tersusunnya legalitas penerapan GMP - Meningkatnya kesadaran produsen IK Pangan menghasilkan produk olahan yang baik dan bermutu
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.63	Nama Upaya	Pelatihan Produksi Bersih bagi IKM Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IDKM Pangan
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Survei lapangan - Pelatihan cleaner production - Monitoring
	Pencapaian hasil	Terinventarisasinya data pengelolaan limbah, meningkatnya kemampuan dan kesadaran dunia usaha dibidang teknologi produksi bersih.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.64	Nama Upaya	Fasilitasi Peningkatan Kemasan Produk Industri Kecil Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan. Kegiatan fasilitasi ini terutama ditujukan pada industri kecil makanan ringan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mendorong tumbuhnya pusat konsultasi pengemasan. - meningkatkan desian kemasan dan citra produk IK Pangan
	Jenis kegiatan	- Bimbingan dan konsultasi - Bantuan bahan-alat pengemasan

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK pangan
	Pendanaan	Rp 66.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi - Bimbingan - Perbaikan desain
	Pencapaian hasil	- Adanya perbaikan kemasan - Tumbuhnya packing house
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.65	Nama Upaya	Penyusunan Konsepsi Sertifikasi Peningkatan Sistem Keamanan Pangan Produk Industri Kecil (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Memberikan pengakuan dari suatu pihak yang berwenang kepada usaha produksi dan/atau pedagang pangan dalam bentuk sertifikat keamanan pangan. - Mendorong peningkatan mutu sistem produksi dan layanan dagang pangan, sekaligus daya saing.
	Jenis kegiatan	- Penyusunan konsep sertifikasi - Sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	5 ibu kota propinsi
	Sasaran	Rumah makan, pedagang dan industri pengolahan
	Pendanaan	Rp 67.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi masalah - Evaluasi dan perumusan
	Pencapaian hasil	- Mendorong peningkatan mutu sistem produksi dan layanan dagang pangan, sekaligus daya saing. - Tersosialisasi kepada 50 usaha IDKM Pangan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.66	Nama Upaya	Peningkatan Kemitraan Bisnis IK Pangan dengan Supermarket / Eksportir dan Perhotelan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	- Memfasilitasi kemitraan bisnis antara PIK dengan supermarket, eksportir, dan agen dengan maksud membuka kesempatan pemasaran. - Merangsang persaingan sehat dalam rangka peningkatan efisien dan produktivitas IDKM Pangan.
	Jenis kegiatan	Temu usaha
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK pangan
	Pendanaan	Rp 66.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi perusahaan IK-Pangan - Identifikasi pasar
	Pencapaian hasil	- Meningkatnya pemasaran produk-produk IK Pangan. - Meningkatnya mutu produk pangan. - Meningkatnya popularitas produk-produk IK Pangan baik didalam negeri maupun keluar negeri.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.67	Nama Upaya	Fasilitasi Pembinaan dan Kerjasama IDKM Pangan dengan BUMN dan Perusahaan Besar (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan. Beberapa BUMN dan perusahaan swasta besar memiliki program pembinaan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan kerjasama atau bantuan dari departemen terkait. Bantuan yang diberikan BUMN dan perusahaan kepada industri kecil tergantung dari program perusahaan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	PT. Sucofindo, Pertamina, PT.Telkom, PT.BAT, PT.Unilever, PT Bogasari
	Tujuan upaya	- Meningkatkan efektivitas dan dan efisiensi bantuan pembinaan dari BUMN dan perusahaan besar. - Mengoptimalkan sumberdaya yang diberikan perusahaan besar kepada IK Pangan. - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha IK Pangan.
	Jenis kegiatan	Pembinaan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IDKM
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Pengumpulan data - Identifikasi IDKM Pangan - Koordiinasi dengan instansi terkait - Rekrutmen IDKM-Pangan
	Pencapaian hasil	150 perusahaan IDKM Pangan yang dibina oleh perusahaan besar.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.68	Nama Upaya	Pengembangan IDKM melalui Pondok Pesantren (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan koordinasi pembinaan IDKM melalui pondok pesantren. - Menumbuh-kembangkan wira usaha baru di pedesaan melalui para santri dan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi setempat.
	Jenis kegiatan	Pelatihan kewirausahaan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren
	Pendanaan	Rp 80.000.000
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dan proyek/kegiatan - Monitoring dan evaluasi pembinaan di pesantren
	Pencapaian hasil	- Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dinamis. - Meningkatnya kemampuan wirausaha para santri.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.69	Nama Upaya	Pelatihan Teknik Pencelupan dan Pewarnaan dengan Menggunakan Zat Warna Nabati (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Melatih pengusaha dan penyuluh di daerah. - Meningkatkan pengetahuan industri kecil sandang untuk dapat memanfaatkan zat warna nabati secara benar dan baik.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Pengusaha industri kecil sandang
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi daerah yang memiliki potensi industri kecil yang telah memanfaatkan zat warna nabati. - Penyusunan modul / silabi pelatihan.
	Pencapaian hasil	Pengusaha industri kecil sandang dapat menerapkan teknologi zat warna nabati.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.70	Nama Upaya	Pelatihan ToT Fasilitator Teknologi Produksi Bersih (TPB) pada Industri Pencelupan dan Industri Penyamakan Kulit (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menyiapkan tenaga penyuluh di bidang TPB, untuk mengantisipasi isu lingkungan.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Workshop
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: tenaga penyuluh di bidang TPB Tidak langsung: IK pencelupan dan penyamakan kulit
	Pendanaan	Rp 106.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Inventarisasi peraturan-peraturan. - Identifikasi penerapan kebijakan tersebut pada industri sandang.
	Pencapaian hasil	- Tersedianya tenaga penyuluh di bidang TPB.. - Meningkatnya kesadaran lingkungan dari para pengusaha IKM Sandang.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.71	Nama Upaya	Magang Kerja Pengusaha Penyamakan Kulit (Non-konvensional) dalam Rangka Pengembangan IKM Penyamakan Kulit (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan kemampuan SDM melalui magang kerja di industri yang lebih maju.
	Jenis kegiatan	Magang kerja
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM penyamakan kulit
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Penyusunan materi magang - Penentuan komoditi - Penentuan tempat magang
	Pencapaian hasil	- Tumbuh dan berkembangnya IKM penyamakan kulit. - Tersedianya lapangan usaha dan lapangan kerja.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.72	Nama Upaya	Pilot Project Peningkatan Mutu Persuteraan di Sulawesi Selatan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk meningkatkan mutu produk persuteraan di Sulawesi Selatan.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK produsen sutera
	Pendanaan	Rp 159.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Survey potensi - Koordinasi dengan balai pelatihan , tenaga desainer
	Pencapaian hasil	- Meningkatnya mutu produk persuteraan di Sulawesi Selatan. - Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang persuteraan
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.73	Nama Upaya	Pemasyarakatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Industri Barang Jadi Kulit (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong perusahaan IKM penyamakan kulit menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9000 dan ISO-14000.
	Jenis kegiatan	Bimbingan dan Sosialisasi
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM penyamakan kulit
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi IKM penyamakan kulit - Persiapan bahan, tenaga ahli dan sumber
	Pencapaian hasil	- IKM penyamakan kulit siap menerapkan ISO-9000 dan ISO-14000. - Efisiensi produksi lebih meningkat dan mendapat pengakuan nasional dan internasional.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.74	Nama Upaya	Pelatihan Pengembangan Industri Kecil Sabut Kelapa (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. KBB
	Instansi terkait	Dinas Perindag propinsi
	Tujuan upaya	- Mendorong masyarakat mengembangkan potensi industri sabut kelapa. - Menumbuhkan WUB - Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor sabut kelapa.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM produsen sabut kelapa.
	Pendanaan	Rp 78.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Sepuluh bulan dalam tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Koordinasi dengan instansi terkait pusat / daerah. - Seleksi calon peserta pelatihan oleh daerah. - Penyusunan materi pelatihan seleksi calon pengajar/instruktur. - Pelatihan dan pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.75	Nama Upaya	Peningkatan Kemampuan SDM dalam Pembuatan Arang Briket (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. KBB
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk meningkatkan pengetahuan para perajin arang tempurung sehingga mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam pembuatan arang briket yang lebih baik.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa barat, DI Yogyakarta
	Sasaran	Perajin arang tempurung
	Pendanaan	Rp 81.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Instruktur pelatihan berasal dari Balai Industri dan tenaga ahli dari perusahaan.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.76	Nama Upaya	Pelatihan Desain dan Peningkatan Mutu Produk Barang Jadi Rotan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. KBB

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Dinas Perindag propinsi
	Tujuan upaya	Meningkatkan mutu dan desain produk barang jadi rotan
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon)
	Sasaran	Perajin rotan
	Pendanaan	Rp 67.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi perajin produk barang jadi rotan - Identifikasi bahan baku rotan di 6 wilayah
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.77	Nama Upaya	Pengembangan Pola Distribusi Pengadaan Bahan Baku untuk Mendukung Pusat Pemasaran Hasil Rotan di Cirebon (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. KBB
	Instansi terkait	Dinas Perindag propinsi
	Tujuan upaya	- Menjamin pasokan bahan baku kebutuhan pengrajin IK dalam mendukung pusat pemasaran hasil rotan di Cirebon. - Menghasilkan produk memenuhi selera konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri.
	Jenis kegiatan	- Identifikasi kemampuan daerah penghasil rotan (bahan baku) di 6 wilayah. - Identifikasi industri kecil barang jadi rotan di Cirebon.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon)
	Sasaran	IK rotan
	Pendanaan	Rp 40.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.78	Nama Upaya	Fasilitasi Penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) pada Industri Kecil (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. KBB
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatnya keterampilan petani produsen tentang proses produksi dan mutu pengetahuan gambir

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	30 orang petani gambir
	Pendanaan	Rp 45.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Identifikasi - Rekrutmen - Pelatihan - Pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.79	Nama Upaya	Pengembangan E-Trade Industri dan Dagang Kecil Menengah (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. L & E
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menyusun studi kelayakan E-Trade Industri dagang Kecil Menengah.
	Jenis kegiatan	Pembuatan program/ software market place dan model bisnis pengoperasian untuk IDKM Pangan, Sandang, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika serta Kerajinan.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Industri dan dagang kecil dan menengah
	Pendanaan	Rp 106.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi dan analisis kelayakan pembangunan portal dan webhosting
	Pencapaian hasil	Hasil kajian/ studi kelayakan pembangunan E-Trade IDKM.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.80	Nama Upaya	Peningkatan Kemampuan Bengkel Kendaraan Bermotor Kecil Menengah (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. L & E
	Instansi terkait	PT. Sucofindo, PT. Sawu Indonesia
	Tujuan upaya	Mendorong perbengkelan umum kendaraan bermotor kecil menengah masuk dalam klasifikasi yang ditetapkan, pada akhirnya mampu meningkatkan perbengkelan mereka.
	Jenis kegiatan	Workshop peningkatan kemampuan

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Perbengkelan umum kendaraan bermotor kecil menengah
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi dan survey Penyebarluasan informasi klasifikasi dan sertifikasi bengkel
	Pencapaian hasil	Tersebar nya kebijakan Menperindag di perbengkelan umum kendaraan bermotor kecil menengah. Timbulnya motivasi peningkatan kemampuan bengkel sehingga masih dalam klasifikasi yang diinginkan.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.81	Nama Upaya	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Peralatan Proses Minyak Kelapa Sawit, Kelapa dan Sutera (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir.L & E
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengaplikasi teknologi tepat guna pengolah sawit, kelapa dan sutera terintegrasi berskala kecil.
	Jenis kegiatan	Temu usaha
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK minyak sawit, kelapa dan sutera
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Konsultasi dengan Pemda Tk. II dan Nara Sumber Kerjasama dengan Eng.Company
	Pencapaian hasil	Tumbuhnya bengkel-bengkel pembuat komponen dan perakitan peralatan proses. Berdirinya industri kecil terintegrasi di wilayah potensi.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.82	Nama Upaya	Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO-9000 Pada Industri Mesin Pertanian (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir.L & E
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong perusahaan IKM menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO-9000 melalui bimbingan konsultasi dan sertifikasi Modul A atau B.
	Jenis kegiatan	Bimbingan konsultasi/Sosialisasi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Industri mesin pertanian
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Pemilihan IDKM Penyiapan bahan dan penunjukkan tenaga ahli/nara sumber
	Pencapaian hasil	Perusahaan IKM semakin siap menerapkan ISO-9000, efisiensi produksi lebih meningkat sehingga produk yang dihasilkan semakin mendapat pengakuan dari konsumen baik nasional maupun internasional.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.83	Nama Upaya	Partisipasi IDKM Logam dan Elektronika Dalam Pameran Pusat (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir.L & E
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberikan peluang pasar dalam mempromosikan produk IK Logam dan Elektronika yang berpotensi. Mengikutsertakan dan membantu pengusaha kecil dalam memperoleh informasi pasar dan keinginan konsumen sekaligus dapat memperluas cakrawala pandang pengusaha. Membantu pengusaha untuk mempromosikan produksinya dalam meningkatkan penjualan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan.
	Jenis kegiatan	Pameran
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IDKM logam dan elektronika
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Konsultasi Pemilihan IDKM Fasilitasi
	Pencapaian hasil	Meningkatnya pasar dan pemasaran produk IK Logam dan Elektronika baik dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya informasi pasar dan peluang pasar bagi pengusaha IK Logam dan Elektronika.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.84	Nama Upaya	Pengembangan Perangkat Lunak dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh IKM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Direktorat L & E
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong IDKM termotivasi dalam penggunaan TI pada bisnis mereka. Meningkatkan kemampuan penyuluh dan staf dalam pendampingan kepada IDKM.
	Jenis kegiatan	
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IKM
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Terciptanya <i>software</i> praktik masing-masing dilingkungan Ditjen. IDKM, sesuai prioritas dan kebutuhan IDKM masing-masing. Meningkatnya kemampuan SDM IDKM dan sektor pembina.
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.85	Nama Upaya	Pamrean ICRA 2002 (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dir. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan kepedulian dan apresiasi masyarakat luas terhadap kerajinan Indonesia. - Meningkatkan pemasaran produk industri kerajinan di tanah air, baik domestik maupun ekspor.
	Jenis kegiatan	Pameran
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK interior dan kerajinan
	Pendanaan	Rp 720.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Persiapan dan administrasi perjalanan dinas untuk mengetahui kemampuan produk interior dan craft (kerajinan). - Evaluasi dan pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.86	Nama Upaya	Penyusunan Direktori <i>Handycraft</i> Indonesia (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu pengusaha IDKM kerajinan dalam memperluas jaringan kerjanya sekaligus merupakan media yang menjembatani keperluan antara produsen dan konsumen.
	Jenis kegiatan	Penyusunan directory
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Pengusaha IDKM kerajinan yang potensial
	Pendanaan	Rp 140.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Pengumpulan dan pengolahan data Pembuatan dummy Pencetakan dan pendistribusian
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.87	Nama Upaya	Ujicoba Pasar Produk Kerajinan Unggulan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit.Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Meningkatkan kepedulian dan apresiasi masyarakat luas terhadap kerajinan Indonesia. - Meningkatkan pemasaran produk industri kerajinan di tanah air.
	Jenis kegiatan	Pameran
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK kerajinan
	Pendanaan	Rp 110.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Persiapan dan administrasi - Perjalanan dinas untuk mengetahui perajin di daerah - Pameran produk kerajinan - Evaluasi dan pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.88	Nama Upaya	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Tenun Tradisional (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Pegangan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dan perajin di bidang teknologi dan desain tenun tradisional.
	Jenis kegiatan	Penyusunan manual teknologi dan desain tenun tradisional
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK tenun
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Penyusunan kuesioner Pengumpulan data/bahan Penyusunan draft Workshop Pencetakan dan pengiriman
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.89	Nama Upaya	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Batik (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag , Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Pegangan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dan perajin di bidang teknologi dan desain batik.
	Jenis kegiatan	Penyusunan manual teknologi dan desain batik
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK batik
	Pendanaan	Rp 40.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Penyusunan kuesioner Pengumpulan data/bahan Penyusunan draft Workshop Pencetakan dan pengiriman
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.90	Nama Upaya	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Anyaman (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Pegangan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dan perajin di bidang teknologi dan desain anyaman.
	Jenis kegiatan	Penyusunan manual teknologi dan desain anyaman
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK anyaman
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Penyusunan kuesioner Pengumpulan data/bahan Penyusunan draft Workshop Pencetakan dan pengiriman
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.91	Nama Upaya	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Perhiasan Perak (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Pegangan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dan perajin di bidang teknologi dan desain perak .
	Jenis kegiatan	Penyusunan manual teknologi dan desain perhiasan perak
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	IK perhiasan perak
	Pendanaan	Rp 53.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Penyusunan kuesioner Pengumpulan data/bahan Penyusunan draft Workshop Pencetakan dan pengiriman
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.92	Nama Upaya	Pelatihan Fasilitator HAKI IKDM bagi Pemula (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Agar para peserta pelatihan mengetahui aturan-aturan hukum dan perlindungan hukum serta sanksi-sanksi dalam penerapan HAKI. Agar peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru bidang desain industri, paten sederhana dan merek produk/ jasa perusahaannya
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Aparat dan pengusaha industri pedagang kecil menengah, asosiasi.
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Rekrutmen dan seleksi peserta Rekrutmen dan seleksi instruktur/nara sumber Penyusunan materi pelatihan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.93	Nama Upaya	Pelatihan Penulisan Dokumen Paten Tingkat Menengah (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pemahaman tentang tata cara penulisan dokumen paten maupun paten sederhana dengan baik dan benar Peserta dapat membantu dan memfasilitasi penulisan dokumen paten maupun paten sederhana Minimal 10 pengusaha UKM
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	30 orang peserta UKM
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Penentuan kriteria peserta Penyusunan materi pelatihan Penentuan instruktur/nara sumber
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.94	Nama Upaya	Pelatihan Penerapan Sistem Mutu (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag , Ditjen. IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan pengusaha industri dan dagang kecil menengah dan aparat pembina dalam penerapan sistem mutu ISO-9000. Mendorong dan meningkatkan kemampuan para pengusaha industri dan dagang kecil menengah dalam pengelolaan usaha yang memenuhi penerapan sistem mutu ISO-9000.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Langsung: aparat pembina pengusaha industri dan dagang kecil-menengah Tidak langsung: pengusaha industri dan dagang kecil-menengah
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Koordinasi antar instansi Rekrutmen dan seleksi peserta Penjajagan lokasi pelatihan Penyusunan kurikulum dan panduan Penyelenggaraan pengajaran Pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.95	Nama Upaya	Peningkatan Teknis Proses Produksi dan Bantuan Tungku bagi Industri Kecil Keramik (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag , Ditjen. IDKM, Dir. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan teknologi proses produksi Memberikan bantuan tungku sebagai modal produksi dalam rangka diversifikasi produk dan peningkatan kapasitas produksi.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan tungku dan bantuan teknik produksi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa barat, DI Yogyakarta
	Sasaran	IK keramik
	Pendanaan	Rp 100.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.96	Nama Upaya	Peningkatan Teknis Proses Produksi melalui Bantuan Alat Pengering Kayu (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mensosialisasikan alat pengering hasil penelitian Balai dengan tujuan membantu pengusaha meningkatkan mutu melalui bantuan alat pengering yang dapat digunakan pengusaha secara bersama-sama.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan alat pengering kayu
	Wilayah pelaksanaan	DI Yogyakarta; Jawa Tengah (Klaten, Jepara); Jawa Timur (Pasuruan)
	Sasaran	
	Pendanaan	Rp 115.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.97	Nama Upaya	Peningkatan Teknis Proses Produksi melalui Bantuan Alat Pengering Bambu (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk mengupayakan kelancaran penyediaan bahan baku. Tersedianya mesin/ peralatan pengering bambu. Memberdayakan industri anyaman bambu.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan alat pengering bambu
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
	Sasaran	Industri kecil anyaman bambu
	Pendanaan	Rp 80.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.98	Nama Upaya	Sosialisasi HAKI bagi UKM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen.IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengingatkan dan sekaligus memotivasi para UKM akan pentingnya penerapan dan penggunaan HAKI, guna peningkatan dan pengembangan usahanya di pasar internasional. Mendorong dan sekaligus meningkatkan kreativitas UKM untuk menciptakan karya-karya intelektual yang dilindungi secara hukum.
	Jenis kegiatan	Apresiasi Penyebaran booklet / leaflet Bimbingan
	Wilayah pelaksanaan	20 propinsi
	Sasaran	UKM
	Pendanaan	Rp 106.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	
6.99	Nama Upaya	Temu Usaha Kemitraan Pengusaha Kerajinan dalam Rangka Ekspor (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil, Program Pembangunan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Kerajinan
	Instansi terkait	Lembaga keuangan, retailer/eksportir, pengusaha kerajinan
	Tujuan upaya	- Fasilitasi pelaksanaan temu usaha dengan pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah permodalan dan pemasaran - Menumbuhkan sistem kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
	Jenis kegiatan	Fasilitasi kemitraan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Pengusaha kerajinan
	Pendanaan	Rp 56.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2002
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi dan rekrutmen Pelaksanaan temu usaha Fasilitasi kemitraan Pelaporan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sudah selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.100	Nama Upaya	Fasilitasi Restrukturisasi Mesin/Peralatan Peningkatan Teknologi Tepat Guna (Sutera Alam) (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan restrukturisasi dan peningkatan teknologi tepat guna dilakukan guna mengatasi rendahnya kualitas produk IKM yang disebabkan oleh kondisi mesin/peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2002 akan dilakukan bisnis matching antara produsen barang modal dan pengguna, serta memberikan bantuan untuk UPT di Jabar dan Sulsel.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengidentifikasi dan menseleksi serta fasilitasi peremajaan mesin-peralatan/peningkatan teknologi tepat guna pada IKM sandang
	Jenis kegiatan	Penyusunan kelayakan Sentra Bimbingan penyuluhan Bantuan mesin/peralatan pemintalan/pertununan.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Garut, Kab.Bandung; Majalaya); Jawa Timur (Gresik)
	Sasaran	IKM di bidang pemintalan dan pertununan
	Pendanaan	Rp 150.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi kebutuhan mesin/peralatan Penyusunan kelayakan sentra yang akan direstrukturisasi oleh TA Pengadaan mesin/peralatan pemintalan/pertununan Pelaporan
	Pencapaian hasil	Tersusunnya kelayakan sentra
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.101	Nama Upaya	Pilot Project Pengembangan Pemanfaatan Waste (Limbah) Kokon Sutera (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit.Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membuat pilot project pengembangan hand spun silk untuk memanfaatkan kokon cacat agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan peralatan hand spun dan rewinding tangan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan
	Sasaran	Perajin pemintalan sutera
	Pendanaan	Rp 166.081.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Sosialisasi teknik pengolahan kokon cacat Bimbingan/pelatihan
	Pencapaian hasil	Meningkatnya pendapatan perajin melalui pemanfaatan pengolahan kokon cacat menjadi benang pintal tangan.
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.102	Nama Upaya	Pengembangan Teknologi Preservasi Ikan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit.Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan kemampuan pengolahan unit usaha tepung ikan dibidang produksi dan pemasaran Mendorong peningkatan mutu dan produksi ikan olahan Mendorong terwujudnya industri pengolahan ikan
	Jenis kegiatan	Bimbingan langsung Pengembangan preservasi ikan (bantuan peralatan, fasilitasi)
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (kab.Sukabumi)
	Sasaran	Pengelola/pengusaha tepung ikan (8 unit usaha)
	Pendanaan	Rp 754.965.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi aspek-aspek kebutuhan pengusaha tepung ikan Penyusunan materi dan bimbingan Bimbingan teknis dan manajemen
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kemampuan pengelola/pengusaha tepung ikan Meningkatnya tepung ikan dalam negeri Pendirian outlet hasil produksi IKM hasil laut
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.103	Nama Upaya	Pengembgan Business Development Service (BDS)/LP-IDKM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Business Development Service memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan teknis dan pemasaran. Salah satu layanan IDKM yang dapat diarahkan menjadi BDS adalah UPT. Untuk itu diperlukan pemberdayaan UPT dalam bidang teknologi maupun manajemennya.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kinerja dan layanan UPT terpilih Mampu memberikan layanan teknis dan jasa pemasaran kepada IDKM

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Bimbingan pengelolaan
	Wilayah pelaksanaan	Jabar, Sumut, Sumbar, Lampung, Jateng, Yogya, Jatim, Kalsel, Kaltim, Sulsel
	Sasaran	UPT di bidang pertenunan dan pemintalan
	Pendanaan	Rp 200.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Identifikasi kondisi UPT dan kebutuhan layanan IDKM
	Pencapaian hasil	Terwujudnya BDS melalui peningkatan peran UPT
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.104	Nama Upaya	Pengembangan Kelaikan Kapal dan Motorisasi Kapal Nelayan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dimana telah dilakukan sosialisasi program pengembangan klaster ikan di propinsi kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara. Kedua propinsi tersebut telah sepakat mendorong pengembangan industri kapal kayu yang mampu menghasilkan kapal yang laik laut. Kegiatan motorisasi kapal nelayan sudah diujicobakan di Pelabuhan Ratu.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Logam
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menumbuh kembangkan bengkel kapal sesuai kelaikan BKI Meningkatkan jangkauan operasi penangkapan ikan
	Jenis kegiatan	Penyusunan panduan Magang
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bali
	Sasaran	Usaha kecil perbaikan kapal nelayan
	Pendanaan	Rp 183.490.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Tersedianya panduan dan juknis pembuatan kapal dan pemasangan / pemeliharaan motor. Tersedianya SDM terampil Tumbuhnya bengkel kapal kayu yang mampu memproduksi kapal sesuai standar BKI Meningkatnya penggunaan motor kapal kayu
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.105	Nama Upaya	Peningkatan Keterampilan Teknis Batu Mulia (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dir. Kerajinan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan mengasah batu mulia Mengembangkan wawasan perajin tentang jenis-jenis batu permata yang laku di pasaran dunia Membantu perajin menyiapkan mesin dan alat yang diperlukan (masih dipinjamkan) Menciptakan jaringan kerjasama para perajin pengasah batu mulia Menyiapkan batu mulia/permata siap pakai dan berdaya saing
	Jenis kegiatan	Pelatihan Pemberian bantuan mesin/alat
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Perajin batu mulia (20 orang)
	Pendanaan	Rp 251.276.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari
	Pencapaian hasil	Tersedianya desain siap pakai Tersusunnya buku panduan cara memproduksi batu permata yang abik dan benar Tersedianya mesin dan alat facet
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.106	Nama Upaya	Pengembangan IKM di Provinsi NAD (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Dir. Kimia dan Bahan Bangunan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menggerakkan perekonomian daerah NAD melalui pengembangan IKM Tumbuh dan berkembangnya IKM di wilayah NAD dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah
	Jenis kegiatan	Pelatihan Magang Pemberian bantuan peralatan/mesin Studi banding Di bidang : Pengembangan kerajinan bordir Pengembangan industri minyak nilam Peningkatan kemampuan SDM bengkel Alsintan, mesin dan karoseri Pengembangan industri dodol dan bantuan alat penggiling kopi Pengembangan kelapa terpadu Pemanfaatan kulit kayu untuk pewarna dan pengembangan bahan pewarna dari buah jernang Pengembangan produk kayu karet Pengembangan sutera Pengembangan pontren

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Kab. Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Pidie, Bireun, Sabang,
	Sasaran	IKM
	Pendanaan	Rp 1.000.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya keterampilan SDM IKM Meningkatnya mutu desain, produktivitas dan efisiensi Tumbuhnya usaha perbengkelan yang tersertifikasi oleh pemegang merk Diperolehnya informasi lengkap mengenai kemungkinan pengembangan kawasan industri dan bentuk UPT yang lengkap serta meningkatkan SDM yang ada
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.107	Nama Upaya	Peningkatan Mutu Produk IKM Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan SDM IK pangan dalam penerapan teknologi bersih (cleaner production)
	Jenis kegiatan	Temu konsultasi uji BTP Pelatihan TOT Cleaner production
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Aparat dan lembaga pembina IKDM
	Pendanaan	Rp 615.138.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya kesadaran dan kemauan pengusaha untuk menerapkan manajemen mutu Adanya hasil uji laboratorium untuk mutu produk IK pangan, khususnya untuk penggunaan bahan pengawet dan pewarna.
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.108	Nama Upaya	Fasilitasi Sertifikasi SNI Pupuk IKM (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. KBB
	Instansi terkait	Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	Memfasilitasi IKM pupuk terpilih melalui bimbingan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikasi SNI, agar dapat menghasilkan produk pupuk yang memenuhi persyaratan SNI
	Jenis kegiatan	Fasilitasi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan
	Sasaran	IKM pupuk
	Pendanaan	Rp 800.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Bertambahnya jumlah IKM pupuk yang dapat memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI Meningkatnya IKM pupuk dalam memproduksi pupuk yang memenuhi standar
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.109	Nama Upaya	Pelatihan Pengembangan Desain Mebel Kayu (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Kimia dan Bahan Bangunan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan SDM mebel kayu untuk berkreatif dalam membuat desain baru
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah, Jawa Timur
	Sasaran	Perajin mebel kayu (50 orang)
	Pendanaan	Rp 148.071.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Terlatihnya 50 orang SDM mebel kayu untuk pembuatan desain
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.110	Nama Upaya	Forum Komunikasi Pengembangan IKM Pupuk dalam Mengatasi Hambatan Pemasaran (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Kimia dan Bahan Bangunan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan keterampilan pengusaha IKM pupuk agar terjamin mutu dan efektifitasnya Memberikan peluang kepada IKM pupuk untuk meningkatkan produksinya sehingga dapat memenuhi permintaan pasar

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	
	Wilayah pelaksanaan	DI Yogyakarta
	Sasaran	IKM pupuk
	Pendanaan	Rp 99.939.000,-
	Waktu pelaksanaan	Januari – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya pemahaman IKM pupuk dalam mengatasi masalah produksi, distribusi dan pemasaran Adanya kerjasama sinergi antara IKM pupuk dengan instansi terkait dalam pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan pengawasan.
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.111	Nama Upaya	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Gula Merah (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan hasil produk yang berkualitas Memfasilitasi kebutuhan daerah dalam pengembangan industri gula merah Meningkatkan penggunaan gula merah (substitusi)
	Jenis kegiatan	Bantuan teknis berupa peralatan pengolahan gula merah
	Wilayah pelaksanaan	Lampung, Sulawesi Selatan
	Sasaran	IKM gula merah
	Pendanaan	Rp 143.538.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya mutu dan pemasaran usaha industri kecil gula merah Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.112	Nama Upaya	Bantuan Langsung Peningkatan IKM "at Company Level" (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan ini ditujukan pada IKM yang potensial dengan jenis komoditi : pengolahan ikan, kerupuk, barang jadi kulit, alas kaki/sepatu, pakaian jadi, barang jadi tekstil, minyak atsiri, arang kayu/tempurung, furniture kayu, furniture rotan, batik, perhiasan, sulaman/bordir, mainan anak, gerabah, kerajinan kayu, kerajinan anyaman dan supporting industri.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Sandang
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan daya saing global Meningkatkan perolehan devisa/ekspor Meningkatkan produksi komponen dalam negeri, mengurangi impor dan meningkatkan keterkaitan industri-kecil-menengah-besar
	Jenis kegiatan	Pembinaan
	Wilayah pelaksanaan	Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB
	Sasaran	Perusahaan-perusahaan IKM yang berorientasi ekspor, dengan kriteria : Mempunyai asset 200 juta s/d 5 milyar Orientasi pemasaran ekspor dan supporting industri
	Pendanaan	Rp 2.138.261.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatkan daya saing dengan meningkatnya QCD dan aspek lainnya Meningkatnya pemasaran ekspor dan pemasaran industri komponen ke industri besar
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.113	Nama Upaya	Pengembangan IKM Pengolahan Jamur Pangan (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit.Pangan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan jamur skala kecil.
	Jenis kegiatan	Bimbingan teknis dan manajemen
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab.Karawang)
	Sasaran	IKM pengolahan jamur pangan
	Pendanaan	Rp 437.406.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Berdirinya unit percontohan jamur skala kecil
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.114	Nama Upaya	Partisipasi Pengembangan IKDM melalui Pondok Pesantren (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Seditjen
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan usaha IDKM melalui pembinaan langsung ke unit bisnis pontren Memperluas jangkauan promosi dan informasi pemasaran Penumbuhan wira usaha baru motivator pontren
	Jenis kegiatan	TOT CEFE
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, NAD.
	Sasaran	Pondok pesantren yang prospektif
	Pendanaan	Rp 519.934.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Meningkatnya promosi, informasi dan pemasaran produk yang dihasilkan Pontren Penumbuhan wira usaha baru motivator Pontren Meningkatkan profesionalisme para santri
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
6.115	Nama Upaya	Pengembangan Pasar Spesifik Produk Pangan Ciamis (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2003, direkomendasikan adanya sarana khusus untuk pemasaran produk pangan. Menindaklanjuti kajian tersebut, maka Pemda Ciamis menyediakan tanah seluas 3 ha untuk pembangunan Pusat Pemasaran Bersama Produk Pangan.
	Penanggungjawab	
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen. IDKM, Dit. Pangan
	Instansi terkait	Pemda setempat
	Tujuan upaya	Menyediakan sarana penjualan produk pangan di Ciamis berupa kios/outlet sebagai rintisan dan stimulan dimulainya pembangunan kios Meningkatkan produk IKM pangan dari sentra produksi Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
	Jenis kegiatan	Pembangunan Pusat Pemasaran Bersama Produk Pangan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab.Ciamis)
	Sasaran	IK pangan
	Pendanaan	Rp 140.000.000,-
	Waktu pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pelelangan pekerjaan konstruksi Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis Pengawasan pembangunan Rekrutmen IKM pengisi kios/outlet
	Pencapaian hasil	Tersedianya kios / outlet pemasaran produk pangan dari 3 kab. Meningkatnya jumlah penjualan produk pangan di 3 kab
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
6.116	Nama Upaya	Lokakarya Fasilitasi Pengembangan P2W IDKM
	Deskripsi Upaya	Semakin meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di kalangan kaum wanita di daerah, semakin meningkat pula upaya pengembangan sumber daya yang ada. Pengembangan KUB P2W perlu disertai dengan fasilitasi pembinaan pasar yang melibatkan dunia usaha. Masih terbatasnya kemampuan pasar KUB P2W IDKM
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	Koordinasi dengan: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
	Tujuan Upaya	Memfasilitasi kerjasama usaha KUB P2W dengan dunia usaha Mendorong peningkatan pemasaran KUB P2W IDKM Tercapainya suatu persamaan persepsi dalam pelaksanaan program antar pembina pusat dan daerah
	Jenis Kegiatan	Lokakarya
	Wilayah Pelaksanaan	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	Para aparat pembina P2W provinsi dan kabupaten/kota KUB Para pelaku ekonomi baik BUMN maupun UKM
	Pendanaan	Jumlah dana: Rp. 98.584.000 Sumber: APBN Sifat: habis terpakai
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Tumbuhnya kesadaran dan komitmen para pengusaha besar dan menengah untuk membantu KUB P2W IDKM di bidang pemasaran dan permodalan Meningkatnya usaha kecil yang tergabung dalam KUB P2W IDKM Adanya suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
	Masalah	Masalah proyek: Dengan adanya otonomi daerah, dinas perindustrian dan perdagangan pemda tidak mengetahui jumlah KUB di wilayahnya. Misalnya di Gianyar (Bali), saat UKM perak dipertemukan dengan PT Tambang Timah untuk berdialog dan mengadakan MoU, Pemda tidak mengetahuinya.
	Status saat ini	Merupakan program baru, masih berjalan dan berlanjut pada tahun 2003 dengan nama Pertemuan Teknis Program Pengembangan proyek P2W IDKM
	Potensi	
6.117	Nama Upaya	Pendidikan dan Latihan Motivator KUB bidang IDKM
	Deskripsi Upaya	Perlunya mengembangkan usaha ekonomi kaum wanita pedesaan melalui KUB Masih kurangnya tenaga penggerak usaha ekonomi bagi kelompok wanita di pedesaan.
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	Koordinasi dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
	Tujuan Upaya	Menciptakan tenaga motivator baru sebagai ujung tombak penggerak kegiatan ekonomi di pedesaan. Mempercepat tumbuhnya KUB bidang industri dan perdagangan yang baru.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis Kegiatan	Pelatihan sebanyak satu kali
	Wilayah Pelaksanaan	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	25 wanita calon motivator
	Pendanaan	Jumlah dana: Rp. 114.329.000 Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Terciptanya 25 orang tenaga motivator baru yang terlatih untuk menggerakkan pertumbuhan KUB di daerah pedesaan Tumbuhnya 25 KUB P2W IDKM baru
	Masalah	
	Status saat ini	Merupakan program lanjutan
	Potensi	
6.118	Nama Upaya	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama P2W bidang IDKM
	Deskripsi Upaya	Pengembangan peran serta wanita di pedesaan merupakan upaya pengembangan masyarakat daerah yang lebih efektif melalui penumbuhan dan pengembangan KUB Pengembangan KUB di daerah perlu terus dilakukan dorongan dan motivasi melalui pembinaan yang terarah. Pada saat ini masih ada kecenderungan pasang-surutnya kegiatan dan semangat berusaha di kalangan wanita di pedesaan
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	Koordinasi dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota
	Tujuan Upaya	Memberikan penyuluhan dan bantuan pembinaan bagi kaum wanita yang tergabung dalam kelompok usaha bersama di bidang ekonomi, khususnya bidang IDKM Membimbing usaha kelompok wanita agar berkembang menjadi unit usaha ekonomi yang tangguh dalam sebuah wadah kelompok usaha bersama Mendorong kelompok wanita di pedesaan agar dapat berusaha memperbaiki kehidupan ekonominya
	Jenis Kegiatan	Penyuluhan dan bimbingan Konsultasi
	Wilayah Pelaksanaan	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	KUB P2W IDKM di daerah
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 135.362.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret – Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Terbentuknya KUB yang kuat yang mampu meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya Tumbuhnya semangat wanita putus sekolah dan wanita terkena PHK untuk melakukan kegiatan ekonomi di bidang industri dan dagang kecil

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Merupakan program lanjutan dan masih berjalan
	Potensi	
6.119	Nama Upaya	Diklat Ketrampilan Teknis
	Deskripsi Upaya	Tingkat keterampilan wanita perajin yang tergabung dalam KUB di daerah masih terbatas Untuk menjembatani peningkatan permintaan pasar, maka perlu ditingkatkan kemampuan para perajin di bidang produksi agar mereka dapat melakukan kegiatan produksi sesuai tuntutan pasar.
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Memberikan bekal kepada para wanita perajin di daerah mengenai teknik pembuatan barang secara praktis Meningkatkan ketrampilan para perajin dalam pembuatan barang Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi
	Jenis Kegiatan	Pendidikan keterampilan Bantuan bahan Bantuan peralatan
	Wilayah Pelaksanaan	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	KUB binaan baru dengan komoditi kerajinan, sandang, pangan.
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 171.331.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret s/d Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Meningkatnya kemampuan para wanita anggota KUB dalam membuat barang yang sesuai selera pasar Meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan KUB P2W IDKM
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6.120	Nama Upaya	Pengembangan Desain
	Deskripsi Upaya	Masih banyak hambatan yang dihadapi para anggota KUB di daerah dalam memasarkan hasil produksinya Keragaman desain dan jenis produk yang dihasilkan para perajin anggota KUB masih terbatas Kemampuan dan daya kreasi para perajin untuk mengembangkan hasil produksinya masih relatif rendah
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan Upaya	Memberikan bantuan bimbingan pengembangandesain dan diversifikasi produk bagi para wanita yang tergabung dalam KUB di daerah Agar para wanita perjin dapat menghasilkan barang dengan ragam jenis dan desain yang sesuai dengan perkembangan pasar Mendorong pengembangan pasar hasil produksi KUB
	Jenis Kegiatan	Bantuan bimbingan pengembangan desain dan diversifikasi produk
	Wilayah Pelaksanaan	15 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	25 KUB binaan dengan komoditi kerajinan, sandang, pangan.
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 92.802.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan kreativitas para perajin wanita dalam menciptakan desain-desain produk baru komoditi kerajinan, sandang dan pangan Meningkatnya ragam jenis dan desain produk hasil KUB P2W IDKM sesuai selera pasar
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6.121	Nama Upaya	Uji Coba Pasar dan Partisipasi Pameran Hari Ibu
	Deskripsi Upaya	Keberadaan KUB kaum wanita masih menghadapi kendala dalam pengembangan pasar Tidak adanya kemampuan kalangan KUB untuk melakukan kegiatan promosi dalam lingkup yang luas
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Membantu mempromosikan produk KUB industri dan dagang melalui partisipasi pamern di tingkat nasional Memacu semangat kelompok wanita di daerah untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha ekonomi Merangsang minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan usaha, khususnya di bidang IDKM
	Jenis Kegiatan	Inventarisasi KUB yang layak untuk diikuti dalam pameran Seleksi barang untuk pameran Pengiriman barang ke lokasi pameran Monitoring selama pameran
	Wilayah Pelaksanaan	15 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	25 KUB binaan, instansi pembina P2W IDKM
	Pendanaan	Jumlah dana: Rp. 101.346.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian Hasil	Meningkat dan menguatnya pasar produk hasil KUB yang telah dibina Terhimpunnya informasi pasar dalam negeri dan luar negeri
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6.122	Nama Upaya	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program P2W Bidang IDKM di Daerah
	Deskripsi Upaya	Hasil pembinaan P2W selama ini harus terus dilanjutkan, dipantau dan dievaluasi mengenai tingkat keberhasilannya.
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Mengetahui tingkat kemajuan pembinaan P2W industri dan dagang di daerahnya Mendorong peranserta wanita secara berkesinambungan dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan
	Jenis Kegiatan	Pemantauan Penilaian Pelaksanaan program pengembangan P2W indag di daerah
	Wilayah Pelaksanaan	15 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	Instansi pembina di daerah dan KUB binaan
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 51.088.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret – Desember 2002
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Terhimpunnya informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program P2W IDKM di daerah Terkumpulnya bahan/masukan bagi penyusunan program pengembangan P2W IKM selanjutnya
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6.123	Nama Upaya	Pengembangan Wirausaha Baru melalui Pembentukan dan Pembinaan KUB P2W Bidang IDKM
	Deskripsi Upaya	Pengembangan peranan perempuan di pedesaan merupakan upaya pengembangan masyarakat daerah yang lebih efektif melalui penumbuhan dan pengembangan KUB Adanya pasang surut kegiatan ekonomi di kalangan perempuan di pedesaan
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Agar usaha kelompok perempuan di pedesaan dapat berkembang menjadi unit usaha ekonomi yang tangguh
	Jenis Kegiatan	Bimbingan pengelolaan KUB di 15 provinsi

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah Pelaksanaan	15 desa binaan di 15 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua.
	Sasaran	KUB
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 159.280.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Tumbuhnya 15 KUB P2W IDKM baru di bidang industri: kerajinan, sandang, dan makanan
	Masalah	Masalah proyek: Dengan adanya otonomi daerah, dinas perindustrian dan perdagangan pemda tidak mengetahui jumlah KUB di wilayahnya. Misalnya di Gianyar (Bali), saat UKM perak dipertemukan dengan PT Tambang Timah untuk berdialog dan mengadakan MoU, Pemda tidak mengetahuinya.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang/lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan manajemen usaha, dan pengembangan wirausaha baru.
6.124	Nama Upaya	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Latihan Motivator KUB Bidang IDKM
	Deskripsi Upaya	Perlunya mengembangkan usaha ekonomi kaum perempuan di pedesaan melalui kelompok usaha bersama (KUB) Masih kurangnya tenaga penggerak usaha ekonomi kaum perempuan di pedesaan.
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	Koordinasi dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
	Tujuan Upaya	Untuk mempercepat tumbuhnya KUB baru di bidang IDKM.
	Jenis Kegiatan	Pelatihan sebanyak satu kali bagi 15 wanita calon motivator KUB P2W IDKM daerah
	Wilayah Pelaksanaan	Peserta dari 15 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua.
	Sasaran	15 calon motivator KUB P2W IDKM daerah
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 131.944.000 Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Terlatihnya 15 motivator KUB P2W IDKM baru
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang/lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan/ pengembangan SDM.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 158.030.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan kreativitas para perajin perempuan dalam menciptakan aneka ragam jenis dan desain produk
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang /lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan/pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan desain.
6.127	Nama Upaya	Fasilitasi Ketersediaan Pasar dan Informasi melalui Penyusunan Rencana Teknis Program Pengembangan P2W Bidang IDKM
	Deskripsi Upaya	Potensi sumber daya alam dan perempuan di pedesaan sangat besar untuk diberdayakan dalam kegiatan ekonomi di daerah. Fasilitasi pengembangan kaum perempuan belum optimal
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Agar pelaksanaan pembinaan peranserta perempuan di daerah berjalan secara efektif
	Jenis Kegiatan	Workshop
	Wilayah Pelaksanaan	15 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua.
	Sasaran	Aparat pembina IDKM provinsi/kabupaten/kota
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 125.824.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Tumbuhnya kesadaran dan komitmen daerah untuk membina kaum perempuan melalui wadah kelompok usaha bersama bidang IDKM Diperolehnya rumusan/persepsi yang sama tentang pembinaan perempuan di daerah
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Merupakan program lanjutan yang diarahkan untuk menambah jumlah tenaga fasilitator di daerah Menunjang program pokok pengembangan IKM yaitu penyusunan program pendukung
6.125	Nama Upaya	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Diklat Ketrampilan Teknis
	Deskripsi Upaya	Untuk membentuk KUB yang tangguh maka para anggota kelompok usaha harus memiliki tingkat ketrampilan yang tinggi. Ketrampilan para perajin masih rendah dan perlu ditingkatkan.
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	Koordinasi dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan Upaya	Untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk
	Jenis Kegiatan	Pendidikan ketrampilan Bantuan peralatan dan bahan Bagi 15 KUB di 15 provinsi
	Wilayah Pelaksanaan	KUB di 15 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua
	Sasaran	15 KUB di 15 provinsi
	Pendanaan	Jumlah dana Rp. 153.440.000,- Sumber: APBN
	Waktu Pelaksanaan	Maret - Desember 2003
	Mekanisme Pelaksanaan	
	Pencapaian Hasil	Meningkatnya kemampuan para anggota KUB dalam membuat barang yang sesuai dengan perkembangan pasar Meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan KUB P2W bidang IDKM
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang /lintas sektoral, yaitu peningkatan/pengembangan SDM
6.126	Nama Upaya	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pengembangan Desain
	Deskripsi Upaya	Masih banyak hambatan yang dihadapi oleh anggota KUB di daerah dalam memasarkan produknya Keragaman jenis dan desain produk yang dihasilkan masih terbatas Kemampuan kreativitas para perajin untuk mengembangkan produknya masih rendah
	Penanggung Jawab	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Pelaksana	Depperindag, Ditjen IDKM, Dit Kerajinan
	Instansi Terkait	
	Tujuan Upaya	Agar para perajin dapat menghasilkan barang dengan ragam jenis dan desain yang tinggi sesuai dengan tuntutan pasar
	Jenis Kegiatan	Bantuan bimbingan pengembangan desain dan diversifikasi produk bagi 500 perajin yang tercakup dalam 15 KUB di 15 provinsi
	Wilayah Pelaksanaan	15 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua.
	Sasaran	500 perajin di 15 KUB

**Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003
Kelompok Organisasi Non-Pemerintah**

No.	Item	Penjelasan
1. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)		
1.1	Nama upaya	Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan Usaha Kecil-Mikro
	Deskripsi upaya	Program ini dirancang tidak hanya sebagai sarana penguatan perempuan yang semata-mata bersandar pada perhitungan bisnis, namun merupakan gabungan antara kegiatan yang berorientasi advokatif dan manajemen kredit mikro. Diharapkan program ini mampu memacu pertumbuhan PUK yang mandiri dan tangguh.
	Penanggung jawab	ASPPUK
	Pelaksana	Ornop Anggota ASPPUK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses Perempuan Usaha Kecil-Mikro pada sumber daya modal dan kemampuan melakukan kegiatan advokasi di tingkat wilayah. - Menyediakan kredit untuk usaha dan pemenuhan kebutuhan perempuan. - Meningkatkan kemampuan Ornop dan PUK dalam mengelola <i>Revolving Fund</i> (RF). - Meningkatkan kemampuan PUK dalam mengelola dan memupuk modal berjalan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Pemberian Kredit - Advokasi - Penerbitan Buletin - Perintisan pembentukan Jaringan PUK
	Wilayah pelaksanaan	<p>Wilayah kabupaten dan kota di mana KPUK pengakses kredit mikro (KM) berasal meliputi (14 propinsi, 43 kabupaten), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Sumatra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propinsi NAD: Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya, dan Aceh Utara. - Propinsi Sumatra Utara: Kabupaten Dairi, Deli Serdang, Karo, Kotamadya Medan, dan Tarutung. - Propinsi Sumatra Selatan: Kota Palembang. - Propinsi Sumatra Barat: Padang Pariaman, dan Kota Padang. - Propinsi Bengkulu: Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan. <p>Jawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jawa Barat: Kabupaten Sukabumi. - Jawa Tengah: Kabupaten Klaten, Solo, Boyolali, Banyumas, Kota Semarang, Sragen, Kota Yogyakarta, Blitar, Kota Surabaya, Pacitan, Tulungagung, dan Lamongan. <p>Wilayah Nusa Tenggara: Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, dan Kota Kupang.</p> <p>Wilayah Kalimantan Barat: Kota Pontianak, dan Bengkayang.</p> <p>Wilayah Sulawesi: Kota Kendari, Unaha, Muna, Buton, Kolaka, dan Kota Palu.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Perempuan Usaha Kecil-Mikro (PUK) yang tergabung dalam Kelompok simpan pinjam Perempuan Usaha Kecil (KPUK) binaan Ornop anggota ASPPUK. Kelompok ini memiliki pengurus, dan mempunyai jadwal pertemuan rutin, menerapkan sistem pembukuan yang memadai, memiliki peraturan kelompok secara tertulis, telah melakukan pemupukan modal swadaya, dan menganut sistem “tanggung renteng”.</p> <p>Kriteria peminjam bagi KPUK untuk mendapatkan kredit merupakan wewenang KPUK.</p>
	Pendanaan	<p>Dana program bernilai Rp 623.700.000,- berasal dari Tere des Hommes, Kedutaan Besar Selandia Baru dan Canada Fund.</p> <p>Sifat dana ini adalah hibah dari lembaga dana untuk ASPPUK yang akan digunakan sebagai dana bergulir kredit mikro. Dana yang diberikan ASPPUK kepada Ornop anggota bersifat pinjaman dengan bunga tetap 11% per tahun untuk kredit usaha, sementara untuk kredit kebutuhan perempuan ditetapkan tanpa bunga. Sedangkan dana dari Ornop ke KPUK bersifat pinjaman dengan bunga 2 - 3% per bulan; dari KPUK ke PUK bersifat pinjaman dengan bunga 2-2.5% per bulan, dengan periode pinjaman berkisar dari 6 -12 bulan.</p>
	Waktu pelaksanaan	1998-2002.
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Kredit mikro yang ditawarkan pada program ini terdiri dua jenis kredit, yakni kredit untuk usaha dan kredit untuk kebutuhan perempuan seperti pendidikan (anak dan perempuan), kesehatan (melahirkan), perumahan, dan pemilikan aset produktif.</p> <p>Mekanisme alur kredit adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertama, KPUK mengajukan kredit dengan melampirkan profil anggota, kelayakan usaha, dan rencana penggunaan kredit kepada Ornop pendamping. - Kedua, permohonan kredit dan angsuran dari Ornop harus ditembuskan kepada Korwil (koordinator wilayah). - Ketiga, permohonan kredit akan ditanggapi minimal 3 hari dan maksimal 1 bulan oleh sekretariat ASPPUK. - Keempat, Ornop tersebut harus memiliki agunan berupa tabungan soliditas di rekening bank ASPPUK. - Kelima, penandatanganan akad kredit dilakukan oleh wakil ASPPUK dan Ornop dengan diketahui oleh wakil masing-masing KPUK. - Keenam, jika disetujui, ASPPUK mentransfer dana kredit untuk KPUK melalui Ornop anggota. - Ketujuh, tenggang waktu KPUK dalam mengangsur kredit melalui Ornop ke ASPPUK adalah 1 bulan dihitung dari saat penandatanganan, dan 6 bulan waktu angsuran kredit dari KPUK ke ASPPUK melalui Ornop. - Kedelapan, Ornop anggota melaporkan perkembangan penggunaan kredit dan profil pemanfaat kredit. Jika diperlukan Korwil membantu melakukan pemantauan ke lapangan.
	Pencapaian hasil	<p>Mulai tahun 1998 – 2002, dana yang sudah disalurkan sebesar Rp1.337.950.000, kepada 38 Ornop anggota, 330 kelompok (KPUK), dan 3545 orang PUK.</p> <p>Ornop pengakses kredit mikro (KM) antara lain: Sumatera Flower Aceh, CCDE, LPSLH, Y. Sada Ahmo, Yapidi, Hapsari, Soripada, Kemasda, LP2M, dan PKBI Bengkulu (catatan: Hapsari kini bukan anggota ASPPUK lagi). Jawa PPSW, Persepsi, YPP, LPPSLH, YKP, YIS, LSPPA, Blitar Sejahtera, dan YLWD (catatan: Blitar Sejahtera dan LSPPA kini bukan anggota ASPPUK lagi).</p>

No.	Item	Penjelasan
		Nusa Tenggara LPSED, LPMP, Y. Sambirio, Y. Santai, Y. Putra Nusantara, Madafaku, PSP, Yasema, YBC, YKKS, LP2SD, Sanlima, dan Bahaeti (catatan: Yasema kini bukan anggota ASPPUK lagi). Sulawesi Lebmas, Y. Asasi, Lappam, dan Evergreen. Kalimantan YSSN, YSKM.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Program ini tidak berjalan sesuai dengan waktu pinjaman di daerah seperti Aceh. - Jangkauan wilayah ASPPUK yang luas menyulitkan sekretariat untuk memantau perkembangan KM lewat Ornop anggotanya secara teratur dan sistematis. Walaupun dalam hal ini dibantu oleh tenaga lapangan dari Ornop anggota, namun kegiatan Ornop tidak terfokus pada kegiatan kredit mikro saja. - Minimnya dana pendampingan dari ASPPUK untuk Ornop anggota, membuat pendampingan di tingkat Ornop dalam memantau kredit di tingkat KPUK menjadi tidak rutin. Bahkan terkadang, Ornop anggota harus mensubsidi dana pendampingan dari lembaganya.
	Status saat ini	Program sudah selesai, namun kegiatan dana bergulir ASPPUK masih berjalan.
	Potensi	Program ini berpotensi membuat kelompok simpan pinjam menjadi koperasi, bahkan untuk menjadi Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), yang sahamnya bisa dimiliki secara bersama, baik bagi KPUK maupun Ornop, dan juga ASPPUK sebagai jaringan Ornop. Namun program ini masih dalam pembahasan yang intensif.
1.2	Nama upaya	Pengembangan Kapasitas Perempuan Usaha Kecil-Mikro dalam Ekonomi
	Deskripsi upaya	<p>Untuk mendorong peningkatan kemampuan perempuan usaha kecil-mikro dalam mengelola ekonominya, khususnya yang berada di pedesaan. Untuk itu, ASPPUK melalui Ornop anggotanya bekerja sama dengan The British Embassy dalam melakukan penguatan terhadap PUK yang menjadi dampingan Ornop, dalam hal manajemen bisnis, kemampuan teknis usaha, dan keterampilan lain yang berhubungan dengan usaha.</p> <p>Program ini didesain untuk meneruskan kapasitas yang selama ini belum dimiliki oleh PUK-PUK yang tergabung dalam KPUK, yang selama ini didampingi oleh Ornop anggota ASPPUK.</p>
	Penanggung jawab	ASPPUK
	Pelaksana	Ornop anggota ASPPUK
	Instansi terkait]
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai upaya untuk mendorong perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil-mikro agar bisa mandiri dan profesional dalam berusaha. - Meningkatkan kemampuan jaringan Ornop dalam melakukan penguatan kepada Ornop anggotanya yang mempunyai program pendampingan usaha dengan PUK. - Meningkatkan kemampuan Ornop anggota dalam melakukan penguatan kepada Perempuan Usaha Kecil-Mikro yang menjadi dampingannya. - Bisa mengintegrasikan perspektif gender dalam pola pendampingan Ornop anggota ASPPUK terhadap PUK-Mikro (yang menjadi dampingannya).
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan manajemen dan pembukuan usaha - Pelatihan pengembangan produk usaha - Pelatihan integrasi gender dalam pendampingan - Promosi produk-produk PUK - Penerbitan buletin dan modul usaha - Studi banding

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	<p>Dilaksanakan pada 10 propinsi, 20 kabupaten:</p> <p><u>Sumatera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NAD: Kabupaten Aceh Selatan dan Banda Aceh. - Sumatra Utara: Kabupaten Dairi. - Sumatra Selatan: Kota Palembang. <p>Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Dompu, Sumbawa, Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kodya Mataram, dan Sumba Timur.</p> <p><u>Jawa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jawa Timur: Kota Surabaya, - Jawa Barat: Kabupaten Pandeglang, Boyolali, Pati, Sragen, dan Blitar. <p><u>Kalimantan</u>: Pontianak,</p> <p><u>Sulawesi</u>: Kendari.</p>
	Sasaran	<p>Perempuan Usaha Kecil-Mikro (PUK) yang tergabung dalam KPUK, yang selama ini menjadi dampingan Ornop anggota ASPPUK. Selain itu, kegiatan ini juga mengarah kepada peningkatan kapasitas tenaga pendamping lapangan (TPL) Ornop anggota sebagai pendamping PUK dan KPUK. Namun begitu, dalam pelatihan TOT, terkadang ada juga Ornop lain (selain anggota) yang ikut di dalamnya.</p>
	Pendanaan	<p>Dana program sebesar Rp430.935.281,- yang berasal dari The British Embassy (dana itu adalah untuk seluruh pembiayaan yang ada dalam proposal program tersebut). Sifat dana bantuan ini adalah hibah.</p>
	Waktu pelaksanaan	<p>1996 – 1998</p>
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Pelatihan peningkatan kapasitas usaha PUK ini dilakukan melalui TOT kepada para Ornop anggota ASPPUK yang melakukan pendampingan. Pelatihan untuk Ornop pendamping dilakukan sebanyak tiga kali, di mana pelatihan diawali dengan integrasi pemahaman kesadaran gender dalam usaha.</p> <p>Dari pelatihan TOT tentang peningkatan usaha tersebut, para pendamping Ornop anggota melakukan pelatihan di tingkat KPUK. Setelah itu, biasanya secara informal kemudian para Ornop pendamping melakukan pendampingan, baik secara kelompok dalam pertemuan kelompok (KPUK) maupun secara individual dalam hal usahanya.</p>
	Pencapaian hasil	<p>Untuk pelatihan manajemen bisnis dan konsultan diikuti oleh 31 Ornop, di antaranya: Y. Sada Ahmo, Y. Bina Insani, YLWD, LP3ES NTB, LPSED, LP2SD, LPMP, PSP, YPK, PPSW, Y. Sambirio, Madafaku, YPN, YBC, Annisa, LPTP, Flower Aceh, Pekerti, YWKW, YKP, CCDE, LPSW, Kemasda, YPP, Lebbmas, Blitar Sejahtera, PKBI Bengkulu, YSSN, Persepsi, YIS, dan LP2M.</p> <p>Dalam hal pemasaran produk diikuti oleh 12 Ornop, di antaranya: Pekerti, LP2SD, YSSN, YIS, Persepsi, LP2M, LPSED, YLWD, KSU Annisa, CCDE, P3D, dan PPSW.</p> <p>Pelatihan TOT untuk pengembangan produk usaha diikuti sebanyak 28 Ornop, di antaranya: Y. Sada Ahmo, Y. Bina Insani, YLWD, LP3ES NTB, LPSED, LP2SD, LPMP, PSP, YPK, PPSW, Y. Sambirio, Madafaku, YPN, YBC, Annisa, LPTP, Flower Aceh, Pekerti, YWKW, YKP, CCDE, LPSW, Kemasda, YPP, Lebbmas, Blitar Sejahtera, PKBI Bengkulu, dan YSSN.</p> <p>Sedangkan pada tingkat PUK-Mikro, pelatihan yang berkenaan dengan manajemen usaha, pengembangan produk, pembukuan dan peningkatan kapasitas usaha lainnya diikuti oleh 703 orang, pelatihan pengembangan pasar diikuti oleh 45 orang, pelatihan peningkatan motivasi dalam mengelola kelompok diikuti oleh 149 orang, serta peningkatan teknik produk usaha yang diikuti oleh 135 orang.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Karena saat itu jaringan ini (ASPPUK) baru beberapa tahun berdiri, maka pengelolaan program pun belum begitu sistematis, khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasinya. Hal ini, mengingat sumber daya yang ada terbatas (khususnya di sekretariat ASPPUK) dan kesibukan pengurus ASPPUK yang sudah habis waktunya untuk mengurus lembaganya masing-masing.
	Status saat ini	Program ini sudah selesai pada tahun 1998, dan menjadi program awal ASPPUK sebagai jaringan (waktu itu bernama YASPPUK).
	Potensi	Program ini menjadi inspirasi bagi ornop pendamping maupun KPUK dalam melakukan "sharing" pengetahuan bagi kelompok-kelompok perempuan usaha kecil-mikro yang baru berdiri.
1.3	Nama upaya	Lokakarya berseri " Dampak Krisis dan Kebijakan IMF terhadap Usaha Kecil-Mikro"
	Deskripsi upaya	Tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada kondisi usaha kecil-mikro. Para perempuan yang menjalankan usaha ini, khususnya mengalami berbagai masalah. Pada tahun itu pula pemerintah Indonesia membuat kesepakatan dengan IMF yang hasilnya ternyata juga membawa dampak bagi usaha kecil-mikro. Dengan kondisi itu, ASPPUK (YASPPUK saat itu) sebagai jaringan LSM dengan dana bantuan dari The Asia Foundation, berusaha untuk mendorong tumbuhnya iklim yang kondusif bagi penguatan perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil-mikro, melalui advokasi. Selain itu, dengan kegiatan ini ingin diketahui sejauh mana dampak krisis dan kebijakan IMF terhadap usaha kecil, terutama perempuan usaha kecil-mikro.
	Penanggung jawab	ASPPUK
	Pelaksana	Forum Wilayah ASPPUK Untuk Wilayah Jawa, dikoordinasi oleh Persepsi (Yuni Pristiwati). Wilayah Sumatera, dikoordinasi oleh BITRA. Wilayah Nusa Tenggara, dikoordinasi oleh LP2SD. Wilayah Sulawesi, dikoordinasi oleh LML.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	- Mengetahui sejauh mana dampak krisis ekonomi dan kebijakan IMF terhadap usaha kecil, khususnya bagi perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil-mikro. - Menyebarluaskan informasi melalui media massa tentang dampak kebijakan IMF terhadap kelompok perempuan usaha kecil-mikro.
	Jenis kegiatan	- Lokakarya berkala. - Dialog dengan pejabat daerah tentang kebijakan usaha kecil.
	Wilayah pelaksanaan	- Sumatera Utara (Medan) - DIY (Yogyakarta) - NTB (Mataram, Lombok) - Sulawesi Selatan (Ujung Pandang)
	Sasaran	<u>Sasaran utama:</u> Kalangan Ornop anggota dan beberapa PUK yang menjadi dampingan Ornop. Kegiatan ini juga diikuti oleh kalangan pengusaha kecil di daerah sekitar wilayah pelaksanaan, Ornop (khususnya anggota) dari wilayah tersebut, Kakandekop, Deperindag, Kanwil Kop setiap propinsi, perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah itu, serta kalangan media cetak dan radio.
	Pendanaan	Dana program sebesar Rp74.263.600,- yang berasal dari The Asia Foundation (dana itu untuk seluruh pembiayaan yang ada dalam proposal program). Sifat dana bantuan ini adalah hibah.

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Juni 1998 - Juli 1998 November 1998.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh pengurus forum wilayah bekerja sama dengan anggota Ornop ASPPUK di wilayah tersebut. - Kegiatan diawali dengan presentasi makalah tentang isu krisis dan kebijakan IMF oleh para ahli, dan kebijakan pemda mengenai usaha kecil oleh pejabat pemda setempat. - Kemudian diteruskan dengan pengungkapan pengalaman pengusaha kecil yang berada di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Ujung Pandang dalam menghadapi krisis. - Terakhir pengamat media mempresentasikan prespektif media tentang usaha kecil.
	Pencapaian hasil	<p><u>Secara kualitatif, hasil dari kegiatan ini, adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersosialisasikannya kemungkinan dampak dari 50 butir kebijakan IMF terhadap usaha kecil (peserta lokakarya). - Dipahaminya dampak krisis dan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap usaha kecil, terutama PUK, serta pembuatan rekomendasi bersama untuk mengatasinya. - Terkampanyekannya hasil lokakarya Dampak Krisis dan Kebijakan IMF terhadap Usaha Kecil melalui media cetak dan radio di daerah. - Terjalinnnya kerja sama antara Ornop di wilayah dengan media cetak dan radio. <p><u>Secara kuantitatif, hasil dari kegiatan ini:</u> Kegiatan ini diikuti sebanyak 271 orang terdiri dari kalangan pengusaha kecil di daerah-daerah sekitar wilayah tersebut, Ornop (khususnya anggota) dari wilayah tersebut, Kakandekop, Deperindag, Kanwil Kop setiap propinsi, perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah itu, serta kalangan media cetak dan radio.</p> <p><u>Daftar lembaga peserta adalah sebagai berikut:</u></p> <p>Jawa Kadepkop PLKM Klaten, USC Satunama, KKB Unika Soetjapranata, YLWD, KSM YLWD, KSM YIS, YIS, Simpati (dampingan Pekerti), Kanwil Deperindag, Granada, PPSW, Yabinkas, Kanwil Deppang, Apikri, Konsorsium Fair trade, PSWUGD, Kanpebri, YBS, sekretariat ASPPUK, LSPPA, LP3Y, Kanwil Depkop PKM Jateng, Persepsi, Konveksi, IDEA, HIPMI, Kanwil Depkop DIY, Rumpun Bambu, dan Limpad. Dari media: Yogya Post, Wedi, Bernas, RB FM, Kedaulatan Rakyat, RRI, Bikimia, dan UNICI.</p> <p>Sumatera Sintesa, Satelit, Forda UK, Jaker SU, PUK, CCDE, LP2M, LAWKI, Pondokan, KSMM, LAAI, Gemini, PKBI, Akatiga, Waspada, ITM, Kemasda, PT Dwi citra Indonesia, Nomensen, YPRK, Forsolima, Unika st Thomas, Bitra, Kadin, Flower, Hapsari, PUK, Posko, SIB, KPS, Walhi-su, Kanwil, Media tama, Konfeksi, Jasa, YKPS, LBH Apik, CK, Kotamas, PT Ram, Yapidi, UISU, Kandepkop SU, dan Antara.</p> <p>Nusa Tenggara BSC Mataram, koperasi, LPSED, Sambirio, YPN, Tafs, Plan Internasional, Annisa, P2K Unram, Madafaku, LPLSM, YBI, YPK, GTZ-NT, YKSSI, LPMP, Suara Pembaruan, Suara Nusa, TPSP P3KCK, LP2SD, P2W Kanwil Depkop NTB, LP3ES, PW NU NTB, PSP, Nusa, Kadin, LPSW, Cess, KKI, Kopentren, PUK, Bali Post, Far Eastern Economic Review, LDM, dan ASPPUK.</p> <p>Sulawesi PUK, PSW IKIP, Lekmas, Yapta, PSW-UMI, YTMI, HIPKEMI, Kanwil Depkop, CV Trimatra, Jati, LIPKEM, PPMA, Yapsdamdes, Evergreen, Baratama, Lekmas, Yalpindo, Asasi, FIK, LKPM, BLPM, USC-satunama, LPUKM, PKBI, Lepsem, dan PT Dhamala, Formati. Dari media: Pedoman rakyat, Bharata FM, Kompas, HR Binabaru, Hr Fajar, RRI, TVRI, RCTI, dan Pedoman Rakyat.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Jumlah peserta dari kalangan PUK dampingan Ornop masih relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka yang masih terbatas untuk memahami materi lokakarya, sehingga ada keengganan untuk hadir.
	Status saat ini	Program ini sudah selesai, namun aliansi dengan media cetak dan radio serta kegiatan pemantaun terhadap kebijakan pemda yang berkenaan dengan usaha kecil masih berjalan.
	Potensi	Melalui program ini kegiatan advokasi yang berkenaan dengan kebijakan usaha kecil di wilayah masing-masing dapat berjalan, dan bisa menjadi kegiatan awal bagi pengembangan upaya advokasi.
4.4	Nama upaya	Lokakarya berseri "Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil-Mikro Mengantisipasi Era Globalisasi Ekonomi"
	Deskripsi upaya	Program lokakarya ini dirancang untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pemerintah era reformasi memberikan dampak pada pembangunan ekonomi rakyat, dan juga sektor-sektor usaha kecil-mikro apa yang bisa menjadi andalan, serta strategi yang tepat pemberdayaan ekonomi rakyat menyongsong era globalisasi.
	Penanggung jawab	ASPPUK
	Pelaksana	Forum Wilayah ASPPUK, dengan perincian: -Di Kalimantan dilaksanakan oleh Y. Madanika. -Di Jawa dilaksanakan oleh LPTP -Di Sulawesi dilaksanakan oleh Y. Asasi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan PUK-Mikro, instansi pemerintah, tentang sejauh mana kebijakan era reformasi ini memberikan dampak pada pengembangan ekonomi rakyat. - Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor andalan dan strategi pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil-mikro menyongsong era globalisasi. - Bekerjasama dengan media untuk mensosialisasikan upaya-upaya pemberdayaan PUK-mikro dan sektor andalan ekonomi rakyat.
	Jenis kegiatan	Lokakarya berseri
	Wilayah pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Barat (Pontianak) - Sulawesi Tenggara (Kendari) - Jawa Tengah (Solo)
	Sasaran	<p>Kegiatan ini diikuti PUK-Mikro di ketiga wilayah tersebut, instansi pemerintah setempat, Ornop (khususnya lembaga anggota) lembaga pengembangan usaha kecil-mikro, serta kalangan pers.</p> <p>Pesertanya juga terdiri dari para pelaku yang telah ikut dalam kegiatan lokakarya sebelumnya. Namun ada juga kalangan lain, khususnya dari pengusaha, yang baru mengikuti kegiatan ini.</p>
	Pendanaan	Dana program sebesar Rp 51.614.707,- yang berasal dari Fredrich Ebert Stiftung, Jerman. Sifat dana bantuan ini adalah hibah.
	Waktu pelaksanaan	9 – 24 Juli 1999.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh pengurus forum wilayah dengan bekerja sama dengan Ornop anggota ASPPUK di wilayah tersebut. - Alur kegiatannya diawali dengan presentasi makalah oleh narasumber yang berpengalaman. - Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai dua topik, yaitu pertama, kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam pengembangan PUK. Kedua, pembahasan mengenai sektor-sektor andalan dan strategi penguatan PUK. - Terakhir adalah diskusi pleno yang membahas masalah-masalah tersebut dalam kerangka sosial-ekonomi yang sensitif gender dan rangkuman lokakarya.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<p><u>Secara kualitatif, hasil dari kegiatan ini adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergambarkannya dampak krisis terhadap perempuan usaha kecil-mikro, dibanding dengan pria pelaku usaha, mengingat karakteristiknya berbeda. - Dipahaminya dampak globalisasi terhadap usaha kecil, terutama PUK, apakah hal tersebut menjadi peluang atau ancaman. - Diperolehnya gambaran mengenai beberapa kebijakan pemda mengenai usaha kecil-mikro di daerah masing-masing. - Terkampanyekannya hasil lokakarya melalui media cetak di daerah. - Terjalinnnya kerja sama antara Ornop di wilayah dengan media cetak dan radio. <p><u>Secara kuantitatif, hasil dari kegiatan ini adalah:</u></p> <p>Kegiatan ini diikuti sebanyak 145 orang, terdiri dari kalangan pengusaha kecil, khususnya PUK-Mikro di daerah-daerah sekitar wilayah tersebut, Ornop (khususnya anggota) dari wilayah tersebut, instansi pemerintah daerah, serta kalangan media cetak dan radio.</p> <p>Daftar lembaga pengikut kegiatan ini:</p> <p>Kalimantan Barat LEPMM PRK PSPKB, Y. Maranatha, LEPM Budi Asih, Y. Aksi anak bangsa, PSE – usaba Ketapang, YSKM, PUK dampingan YSKM, Institut Dayakologi, Y. Pipka, YPSD, Dinas Perindustrian, Forda UK, BMT Insan Cita, PEK Pancur Kasih, KUD serbaguna, Kanwil Depkop, Bappeda, IWAPI, Tabloid Paradigma, RRI, TVRI, Pontianak Post, Suaka, Suara Pembaruan, dan Tabloid Setia.</p> <p>Sulawesi Depkop, Depsos, Bappeda, Lakamali, Yasnawan, YPMP, Lebkemas, KADL, Lepmasalh, YAI, Yasinta, Drupadi, Lebbmas, Deperindag, Swami, Binar, MPP, IWAPI, Sintesa, Lebmali, Lappam, PUK, Pelita, Leppsek, GPY, Yapeltra, Sama, YNDN, Yadi, Kesuma, Yapli, RRI, Kendari Ekspres, Pedoman Rakyat, Naspal, Suray, Kendri Post, Pro Demokrasi, dan Fajar.</p> <p>Jawa PUK binaan PPSW, Persepsi, PPSW, Kop. Setara, YPP, YLWD, YPI, YPAM, YKP, PUK binaan LSPPA, PUK binaan YPP, LPTP, PUK binaan LPTP, YIS, Asperama, LPPSLH, Taman Kartini, Akatiga, Susdec, RRI, TVRI, Volare FM, Pontianak Post, Hr Suaka, Paradigma, Suara Pembaruan, Kapuas, dan Tablodi Setia.</p>
	Masalah	Kegiatan ini belum banyak mengikutsertakan PUK yang menjadi dampingan Ornop anggota sehingga terkadang PUK mendapat informasi secara tidak langsung dari para pendamping yang mengikuti kegiatan tersebut. Sementara kemampuan para pendamping masih beragam dalam penyampaian pengetahuan seputar permasalahan.
	Status saat ini	Program ini sudah selesai, namun beberapa kegiatan yang dirumuskan dalam rencana tindak lanjut, seperti diskusi kebijakan secara rutin dan kerja sama dengan media, masih berlanjut.
	Potensi	<p>Dengan adanya kegiatan itu, rencana tindak lanjut yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang langsung atau tidak langsung berdampak pada PUK secara berkala. - Lokakarya perencanaan strategis bisnis PUK. - Merintis jaringan PUK sebagai wadah untuk penguatan bisnis dan advokasi. - Pengintegrasian perspektif gender dalam program pengembangan PUK, baik yang dilakukan Ornop maupun lembaga lain. - Menindaklanjuti kerjasama dengan media cetak dan elektronik sebagai media untuk advokasi PUK.

No.	Item	Penjelasan
1.5	Nama upaya	Studi dan Advokasi Penguatan Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Kecil-Mikro
	Deskripsi upaya	<p>Upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pemahaman PUK di tingkat basis perlu dilakukan, bahwa persoalannya bukan hanya modal, tetapi juga kemampuan pendamping lapangan dalam melakukan identifikasi persoalan PUK (yang menjadi dampingannya) ASPPUK bekerja sama dengan Pusat Analisis Sosial, Akatiga, mengadakan kegiatan bersama dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan PUK-Mikro di rantai produksi dan perdagangannya.</p> <p>Dengan pengenalan terhadap persoalan yang menyangkut relasi PUK-Mikro di rantai produksi dan perdagangan, maka pendekatan lain akan digunakan dalam upaya pemecahannya.</p> <p>Program ini didesain agar Ornop pendamping, peneliti (Akatiga), dan kader KPUK (dan juga jarpuk), dapat secara partisipatif ikutserta dalam penggalian persoalan PUK-Mikro di lapangan.</p>
	Penanggung jawab	ASPPUK dan Yayasan Akatiga, Bandung
	Pelaksana	Tim gabungan antara Sekretariat ASPPUK, Akatiga, dua Ornop anggota ASPPUK (LPPSLH, Purwokerto dan Persepsi, Klaten)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi persoalan-persoalan relasi PUK-Mikro dengan aktor-aktor lainnya yang menyebabkan PUK-Mikro tidak dapat melakukan akumulasi modal - Mendorong advokasi terutama di tingkat kelompok-kelompok PUK-Mikro
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian - Analisis persoalan PUK-Mikro. - Melakukan pencatatan dan analisis proses. - Advokasi pada permasalahan strategis.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kabupaten Purwokerto dan Klaten)
	Sasaran	<p>Perempuan Usaha Kecil (PUK) yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam Perempuan Usaha Kecil (KPUK) binaan Ornop anggota ASPPUK, dan juga para pendamping Ornop anggota ASPPUK (LPPSLH dan Persepsi).</p> <p>Kriteria bagi Ornop anggota dan wilayah yang dijadikan lokasi kegiatan adalah yang berada di Jawa (mengingat keterbatasan dana, yang berasal dari kontribusi masing-masing lembaga), dan juga jenis usaha PUK-Mikro yang sedang ditekuni di wilayah program.</p>
	Pendanaan	Dana program ini diperkirakan hanya sekitar Rp 50.000.000,- yang berasal dari kontribusi lembaga masing-masing.
	Waktu pelaksanaan	2001 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Kegiatan ini merupakan kerjasama Akatiga dengan ASPPUK. Akatiga terutama membantu ASPPUK dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap persoalan-persoalan relasi yang dihadapi PUK-Mikro di dalam rantai produksi dan perdagangan, melakukan proses pencatatan terhadap proses, serta melakukan analisis terhadap proses tersebut.</p> <p>Ornop-ornop yang tergabung dalam ASPPUK dan menjadi mitra di dalam kegiatan ini kemudian menindaklanjuti dengan kegiatan advokasi pada permasalahan-permasalahan yang strategis, serta tetap melakukan analisis dari proses advokasi tersebut.</p> <p>Dengan wilayah cakupan jaringan ASPPUK yang hampir melingkupi seluruh wilayah Indonesia, pada awalnya dipilih dua wilayah sebagai <i>pilot project</i>, dan nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya (advokasi) dari hasil temuan pada <i>pilot project</i> tersebut.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<p><u>Hasil yang didapat secara langsung adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi berupa buku/<i>working paper</i> yang merupakan laporan dari seluruh rangkain kegiatan ini. - Panduan pemetaan masalah bagi upaya penguatan PUK-Mikro <p><u>Hasil secara tidak langsung:</u> Peningkatan kemampuan, baik pada tingkat Kader dari KPUK-Mikro maupun pada tenaga pendamping lapangan Ornop anggota ASPPUK dalam hal penggalian persoalan kebutuhan PUK-Mikro.</p> <p>Adapun jumlah pendamping dari LPPSLH sebanyak 4 orang, dan anggota kelompoknya sekitar 60 orang. Sedangkan di Klaten, jumlah pendamping dari Persepsi sebanyak 4 orang, dengan anggota kelompok sekitar 50 orang.</p>
	Masalah	<p>Kurangnya dana, karena dana masih didukung oleh lembaga masing-masing. Oleh karena itu, alokasi untuk kebutuhan di lapangan (seperti bisa melibatkan PUK lebih besar) menjadi persoalan. Karena keterbatasan itu pula, program ini hanya bisa dilakukan di dua wilayah di pulau Jawa, sehingga persoalan usaha-mikronya pun “khas” Jawa.</p> <p>Selain itu, keterlibatan kader PUK masih kurang dalam penggalian, karena mereka sibuk dengan usahanya.</p>
	Status saat ini	Program sudah selesai, kini dilanjutkan dengan advokasi atas hasil temuan di dua lokasi tersebut dengan melibatkan masyarakat basis.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi untuk menggali kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh PUK-Mikro yang tidak diketahui selama ini. Sebagai contoh, dari hasil penggalian persoalan usaha, ternyata KPUK mempunyai solusi-solusi untuk mengatasi persoalannya sendiri dalam menghadapi problem usaha yang melilitnya selama ini. - Proses dan metode dalam mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan PUK bisa menjadi sumber pembelajaran bagi Ornop anggota ASPPUK yang lainnya. - Merupakan “pilot project” yang hasilnya bisa menjadi inspirasi (baik dalam metode maupun isi) bagi anggota ASPPUK di wilayah lain.
2. Bina Desa		
2.1	Nama upaya	Pengembangan dan advokasi ekonomi rakyat
	Deskripsi upaya	Melakukan pengembangan ekonomi rakyat serta melakukan advokasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat.
	Penanggung jawab	Bina Desa
	Pelaksana	Bina Desa bekerja sama dengan Koperasi Karya Insani, dan kelompok swadaya masyarakat (KSM)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Tujuan besar dari Program Pengembangan dan Advokasi Ekonomi Rakyat adalah pengorganisasian di tingkat rakyat dan pengembangan usaha-usaha bersama di tingkat kelompok serta melakukan advokasi yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dikembangkan kelompok.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan studi kelayakan dan penggalian potensi usaha - Studi pasar dan kelayakan usaha (SKU) - Pelatihan pembukua, pengelolaan atau manajemen usaha dan keorganisasian - Fasilitasi kredit
	Wilayah pelaksanaan	Propinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKU-Belitang, OKI-Tanjung Batu); Lampung (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan); Jawa Tengah (Kabupaten Kudus, Batang, Wonosobo); DIY (Kabupaten Bantul, Gunung Kidul); Jawa Timur (Kabupaten Tuban-Montong, Ngawi-Paron, Malang, Banyuwangi) Jawa Barat (Kabupaten Karawang, Sukabumi, Cianjur).

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Kelompok masyarakat baik yang sudah ada, maupun yang baru terbentuk karena ada kasus/program. Umumnya penerima manfaat adalah petani yang belum memiliki usaha (80%), dalam kelompok yang beranggotakan 10-30 orang, dengan jumlah KSM 55.
	Pendanaan	Dana berasal dari Misereor German (tahun 1994), berupa pinjaman tanpa bunga sebesar Rp600 juta. Sampai 31 Mei 2003, posisi keuangan simpan pinjam adalah sbb: Jumlah pinjaman : Rp1.625.474.000 Jumlah angsuran : Rp694.610.463 Sisa pinjaman : Rp930.863.937 Total simpanan : Rp96.93.618
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1994-sekarang. Tahun 1994 dikelola langsung oleh Bina Desa, sejak tahun 1997 dikelola dengan bekerja sama dengan Koperasi.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok yang hendak mengajukan pinjaman membuat SKU. - Panitia kredit koperasi kemudian rapat mengenai SKU-SKU yang masuk, yang dilanjutkan dengan survey ke lapangan. - Kemudian diputuskan apakah kredit ini disetujui, setelah disetujui dibuatlah Surat Perjanjian Pinjaman (SPPU) antara kelompok dan koperasi. Dalam surat tersebut diatur jangka waktu, besarnya cicilan, serta besarnya bunga. Besarnya bunga berkisar 1.5%/bulan menurun. - Pengelolaan pinjaman dari kelompok ke anggota ditentukan masing-masing kelompok. Pinjaman ada yang digunakan untuk usaha bersama, ada yang dipinjamkan ke masing-masing anggota kelompok.
	Pencapaian hasil	Dari dana awal Rp600.000 juta, dana yang dipinjamkan kelompok saat ini sudah mencapai Rp1,6 milyar. Salah satu faktor keberhasilan adalah karena keterlibatan perempuan yang relatif lebih kuat dalam mendorong pembentukan modal. Karena keberhasilan ini, saat ini dalam program diberikan kuota 30% untuk perempuan dalam pengorganisasian dan kader. Kelompok yang sudah berkembang menjadi embrio perluasan pengorganisasian.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran cicilan tidak lancar. - Anggota kurang memahami apa yang ingin mereka usahakan, sehingga usaha yang dilakukan sifatnya sementara. - Pendamping lokal yang tidak disiplin. Anggota yang sudah membayar sering tidak dilaporkan dan pembayarannya sering tidak disetorkan. Pendamping adalah orang lokal yang diberi honor/dana transpor oleh Bina Desa.
	Status saat ini	Kegiatan simpan pinjam masih berjalan dan dikelola oleh Koperasi Karya Insani.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha dengan basis pertanian. - Meningkatkan kapasitas kelompok melalui pelatihan studi pasar, analisis untung rugi, dan pendidikan pasca panen.
3. Bina Masyarakat Sejahtera (BMS)		
3.1.	Nama upaya	Baithul Mal Waltamwil Keluarga (BMT Al Inayah Unit I)
	Deskripsi upaya	Latar belakang lahirnya upaya ini adalah kesadaran bahwa tingkat kemampuan ekonomi masyarakat sangat beragam dan banyak keluarga yang secara ekonomi masih lemah. Pembentukan BMT ini bermula dari arisan dan simpan pinjam keluarga di pengajian ibu-ibu desa Setia Mekar Tambun Bekasi pada tahun 1995. BMT tersebut didirikan oleh 15 orang peserta arisan keluarga yang masing-masing menyumbang dana sebesar Rp50 ribu sebagai modal awal. BMT itu kemudian dinamakan BMT Al Inayah (nama ini selanjutnya digunakan untuk menyebut semua program BMT dari BMS, sedangkan spesifikasinya menjadi nama unit). Dalam perkembangannya kemudian disebut BMT keluarga atau BMT Al-Inayah Unit I. Dalam upaya ini, BMS pada awalnya berperan sebagai fasilitator dan pelaksana operasional, namun sekarang hanya sebagai penasehat dan penanggung jawab.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS dan BMT Al Inayah Unit I
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu perekonomian masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan stimulus kepada mereka yang telah memiliki usaha ataupun yang mau mengembangkan usaha. - Meningkatkan kapasitas keluarga dalam memperbaiki kesejahteraannya masing-masing.
	Jenis kegiatan	<p><u>Penyaluran kredit</u> Kredit diberikan kepada individu-individu yang benar-benar miskin menurut komunitas lokal (antara lain dilihat dari kondisi rumahnya dan pendapatan keluarga di bawah rata-rata penduduk di komunitas tersebut). Mereka bisa telah memiliki usaha, namun bisa juga baru mau melakukan usaha dan menunjukkan minat kuat untuk itu. Besarnya kredit yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu-4 juta, dengan masa pengembalian 10 bulan, dan menerapkan sistem bagi hasil.</p> <p><u>Pendampingan</u> Pendampingan bertujuan untuk membantu manajemen pengelolaan BMT dan anggotanya dalam mengembangkan usaha, khususnya manajemen usaha kelompok dampingan. Terdapat satu orang pendamping, berasal dari BMS. Namun saat ini BMS sudah tidak mendampingi kelompok lagi oleh karena dianggap sudah cukup mampu mengelola manajemennya sendiri.</p> <p><u>Simpan pinjam</u> Simpan pinjam dilakukan oleh anggota BMT. Salah satu syarat menjadi anggota BMT adalah harus menyimpan uang terlebih dahulu. Sistemnya bagi hasil.</p>
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
	Sasaran	<p>Pada mulanya sasaran program hanya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki warung di lingkungannya masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya, program ini juga menargetkan laki-laki, para pedagang kecil (pedagang sayuran, buah, kelontong) yang masuk dalam kategori keluarga miskin.</p> <p>Penjaringan dilakukan melalui media arisan keluarga dan pengajian ibu-ibu di daerah Tambun Bekasi. Adapun kriterianya adalah merupakan penduduk asli (mempunyai KTP), miskin menurut standar komunitas lokal, sudah memiliki usaha ataupun menunjukkan minat yang kuat untuk melakukan usaha.</p>
	Pendanaan	Modal awal Rp1 juta, saat ini sudah mencapai Rp20 juta. Bersumber dari swadaya anggota. Sifatnya hibah dan kepemilikan saham.
	Waktu pelaksanaan	1995-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum pemberian kredit, BMS terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang sistem kredit, memberikan penguatan secara informal tentang pengenalan usaha, cara menentukan pilihan usaha, serta manajemen usaha kepada para calon anggota. Ini dilakukan dalam pertemuan-pertemuan di BMS. - Setelah itu, dilakukan analisis usaha dan penentuan kesepakatan bagi hasil. - Kemudian kredit dikucurkan kepada individu-individu yang benar-benar miskin dengan sistem bagi hasil. Persentase pembagian ditentukan bersama setelah menganalisis kelayakan usaha. - Pada setiap periode akhir masa kredit dilakukan evaluasi bersama.
	Pencapaian hasil	Nasabah sudah berjumlah 62 orang dengan tingkat pengembalian 93%.
	Masalah	Kurangnya tenaga pendamping sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi menambah anggota dan asset, yang berarti pedagang kecil yang dilayani semakin banyak.
3.2.	Nama upaya	BMT Pemberdayaan Masyarakat Miskin (BMT Al Inayah Unit II)
	Deskripsi upaya	Keprihatinan terhadap makin meningkatnya angka pengangguran karena PHK dan meningkatnya masyarakat miskin ketika krisis moneter melanda Indonesia mendasari lahirnya program ini. Dalam hal ini, BMS berperan membantu mereka dalam hal permodalan, baik bagi yang sudah mempunyai usaha maupun baru akan melakukan usaha.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS dan BMT Al hinayah Unit II dengan kelompok dampingan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu meningkatkan penghasilan keluarga. - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran kredit. Besar kredit yang disalurkan sekitar Rp500 ribu – 1 juta. - Pendampingan. - Simpan pinjam.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
	Sasaran	Target penerima adalah masyarakat miskin di kabupaten Bekasi. Jumlah awalnya 25 orang, sekarang sudah mencapai 120 orang. Kriteria penerima adalah mereka yang merupakan penduduk asli (memiliki KTP), miskin menurut standar komunitas lokal, sudah punya usaha ataupun menunjukkan minat yang kuat untuk melakukan usaha.
	Pendanaan	Rp7,5 juta dari Kedutaan New Zealand, bersifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	1997-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum pemberian kredit, BMS terlebih dahulu melakukan penguatan informal kepada calon peserta selama 2 bulan. - Penguatan itu dilakukan dengan cara diskusi informal di BMS tentang BMT, sistem pengelolaannya, aturan main, hasil yang didapat, dan cara menjalankan BMT. - Kemudian diperkenalkan juga soal manajemen usaha dan pemilihan usaha. - Selanjutnya BMS akan melakukan analisis kelayakan usaha kelompok dampingan. - Setelah kelompok dampingan dianggap siap, maka kredit akan diberikan kepada individu-individu yang benar-benar miskin dengan sistem bagi hasil, di mana persentase pembagiannya ditentukan bersama. - Pada setiap periode akhir masa kredit, dilakukan evaluasi bersama.
	Pencapaian hasil	Tingkat pengembalian 90%. Jumlah jangkauan telah mencapai 120 orang dari jumlah awal sebanyak 25 orang. Saat ini BMT telah mampu melayani pinjaman Rp20 juta per bulan dengan total aset sebesar Rp70,5 juta.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan tidak intensif karena kurangnya dana operasional. - Kesadaran masyarakat ntuk mengembalikan pinjaman masih kurang (pinjaman terlalu lunak, tanpa syarat atau jaminan)
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi dalam mengembangkan wilayah kerja dan meningkatkan jumlah aset, yang berarti meningkatkan usaha kecil yang dapat dilayani.

No.	Item	Penjelasan
3.3	Nama upaya	BMT Komunitas Orang Tua Anak Jalanan (BMT AI Inayah Unit III)
	Deskripsi upaya	Ide dasar dikembangkannya BMT ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa jumlah anak jalanan tidak akan dapat berkurang jika ekonomi keluarganya tidak kunjung membaik. Pendorong utama anak-anak turun ke jalan adalah tuntutan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penguatan ekonomi orang tua anak jalanan. Peran BMS masih sama seperti pada kedua BMT. Hanya sampai sekarang BMS masih terus mendampingi operasional program.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS dan BMT Komunitas Orang Tua Anak Jalanan
	Instansi terkait	Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki kondisi ekonomi keluarga anak jalanan. - Mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga akan mengurangi jumlah anak yang turun ke jalan.
	Jenis kegiatan	<p><u>Penyaluran kredit</u> Besarnya pinjaman modal beraneka ragam sesuai dengan kelompok usaha. Kelompok tukang becak Rp300-500 ribu; kelompok petani Jamur Rp800 ribu; kelompok pedagang keliling Rp150 ribu; kelompok pedagang kue Rp300 ribu; kelompok warung desa Rp300 ribu; kelompok lele karpet Rp500 ribu; kelompok pedagang sayur Rp150 ribu; kelompok peternak itik Rp500 ribu. Semuanya dicicil selama 10 bulan. Saat ini terdapat empat pendamping yang berasal dari BMS .</p> <p><u>Simpan pinjam</u></p> <p><u>Pelatihan</u> Pelatihan dilakukan secara informal oleh BMS dengan bertempat di Cikarang, dengan peserta sejumlah 25 orang. Delapan orang di antaranya ibu-ibu, sementara lainnya adalah bapak-bapak. Metode yang digunakan adalah berbagi pengalaman dan informasi. Pelatihan dilakukan selama 2 bulan. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan kelompok dampingan. Materi yang diberikan: pengenalan usaha, cara melakukan analisis usaha, pemilihan usaha, sistem pengelolaan keuangan, sosialisasi BMT dan manfaatnya. <i>Out put</i> dari pelatihan ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok berdasarkan minat dan keinginan usaha. Kelompok yang telah berdiri yaitu: kelompok warung desa, kelompok pedagang makanan keliling (mie ayam dan bakso), kelompok pedagang kue, kelompok Itik, kelompok lele karpet, kelompok tukang becak, kelompok pedagang sayur.</p>
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
	Sasaran	Sasaran penerima program adalah orang tua anak jalanan baik yang telah memiliki usaha atau belum. Strateginya adalah memperkenalkan keberadaan program kepada kelompok orang tua anak jalanan yang menjadi dampingan BMS dan menjaringnya berdasarkan kriteria dasar yang sama, yaitu penduduk asli di wilayah kerja BMT, dan memiliki itikad baik untuk memperbaiki kehidupan keluarganya dan kesejahteraan anak-anaknya.
	Pendanaan	Jumlah dana berkisar Rp7, 5 juta berasal dari hibah Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat. Kemudian didukung pula oleh Terre des Hommes Netherland sebesar Rp25 juta di tahun 2000.
	Waktu pelaksanaan	1999- sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - BMS mensosialisasikan program kepada orang tua anak jalanan yang menjadi dampingan BMS - Kemudian orang tua anak jalanan tersebut dijaring sesuai dengan kriteria untuk selanjutnya diberikan pelatihan. - Setelah itu dibentuklah kelompok berdasarkan minat usaha, dan diberikan kredit usaha per individu. - BMS tetap mendampingi mereka dalam hal manajemen pengelolaan keuangannya.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Program ini awalnya hanya mendampingi 25 orang, sekarang sudah mendampingi 105 orang dengan tingkat pengembalian 90%.
	Masalah	Kurangnya tenaga pendamping sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara optimal.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi jumlah anak jalanan karena membaiknya kondisi ekonomi orang tuanya - Mendapat pendanaan baru dari lembaga yang peduli dengan pengentasan anak jalanan.
3.4	Nama upaya	BMT Masyarakat Miskin Korban Banjir (BMT Al hinayah Unit IV)
	Deskripsi upaya	Banjir besar yang terjadi pada tahun 2002 telah menyebabkan penderitaan masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi bertambah. Banyak petani dan peternak gagal panen dan kehilangan asetnya. Jika pun ada, hasilnya tidak seberapa. Oleh karena itu, mereka didorong untuk mengembangkan usaha pertanian dan peternakan alternatif selain menggantungkan diri pada padi dan palawija. Demi membantu permodalan mereka, kemudian didirikanlah BMT Masyarakat Korban Banjir.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS dan BMT masyarakat korban banjir
	Instansi terkait	Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, selaku penyandang dana.
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu korban banjir memulihkan kondisi keuangannya. - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin korban banjir.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran Kredit. Besarnya kredit Rp300 ribu- Rp2 juta. - Pendampingan.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
	Sasaran	Sasarannya adalah 49 kelompok atau 105 orang anggota yang merupakan petani dan peternak korban banjir di daerah Kabupaten Bekasi. Cara menjaringnya secara prinsip sama seperti unit BMT sebelumnya.
	Pendanaan:	Modal berjumlah Rp 40 juta, merupakan dana hibah dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
	Waktu pelaksanaan	2002- sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Pada prinsipnya sama seperti unit-unit BMT sebelumnya, yaitu bagi hasil. Hal yang berbeda dalam program ini adalah pada sarannya, yakni kelompok dan bukan individu.
	Pencapaian hasil	Tingkat pengembalian 90% yang diserap oleh 105 orang.
	Masalah	Kurangnya biaya operasional untuk tenaga pendamping lapangan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi unit koperasi yang produktif - Menambah anggota - Menjadi pendorong berkembangnya usaha-usaha alternatif bagi petani dan peternak di daerah perkotaan.
3.5	Nama upaya	BMT Komunitas Kelurahan Bugis (BMT Al hinayah Unit V)
	Deskripsi upaya	BMT unit V ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari BMT II di mana didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi masyarakat perkotaan yang miskin. Saat ini program memang masih dalam tahap perintisan untuk dikembangkan di Jakarta.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS dan BMT Komunitas Kelurahan Bugis.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat miskin kota. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Rencananya akan dilakukan kredit, pendampingan, dan simpan pinjam
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Kampung Bugis)
	Sasaran	Masyarakat miskin kota yang bekerja sebagai pedagang atau memiliki usaha rumah tangga. Cara menjaringnya adalah dengan mengidentifikasi kelompok sasaran, melakukan sosialisai serta merekrutnya sebagai anggota. Kriteria masyarakat miskin adalah mereka yang merupakan penduduk di Kampung Bugis, baik yang sudah mempunyai usaha maupun belum.
	Pendanaan	Masih dalam tahap peninjauan dengan MCI, rencananya bersifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	2003
	Mekanisme pelaksanaan	Sama seperti BMT sebelumnya, tetapi sasarannya adalah individu.
	Pencapaian hasil	Belum bisa diketahui karena masih pada tahap perintisan.
	Masalah	Belum ada kepastian dana.
	Status saat ini	Masih berjalan (dalam tahap perintisan)
	Potensi	
3.6	Nama Upaya	Pelatihan Pendamping Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM)
	Deskripsi Upaya	Bertolak dari realitas kurang pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Masyarakat di Bekasi, baik yang dikelola oleh BMS maupun organisasi sosial lainnya di Bekasi, yang berhimpun dalam Koordinator Kesejahteraan Sosial (K3S) Kab. Bekasi, dengan pusat kegiatan di kantor pusat Program BMS di Cikarang. Berdasarkan pengalaman BMS, salah satu faktor penyebab lambannya perkembangan LKM di Bekasi adalah karena kurangnya tenaga pendamping. Oleh karena itu BMS dengan didukung oleh Forum Peningkatan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta mengadakan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) pada tanggal 21-24 November 2000.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS
	Instansi Terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan wawasan dan keterampilan metodologis para pendamping lapangan LKM dalam meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam pengelolaan lembaga keuangan. - Memberikan wawasan yang lebih luas tentang konsep, prinsip, pendekatan, dan tujuan Lembaga Keuangan Masyarakat. - Memberikan kemampuan metodologis dalam peningkatan partisipasi masyarakat di lembaga keuangan, baik dalam perumusan aturan operasional, pelayanan pinjaman, penggalangan dana maupun dalam melakukan pengawasan bersama. - Disepakatinya kegiatan lanjutan untuk saling membagi pengalaman antara peserta.
	Jenis kegiatan	Pelatihan Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan diikuti oleh 25 orang peserta dari pendamping LKM.
	Wilayah Pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
	Sasaran	Penerima atau peserta pelatihan adalah anggota K3S dan koperasi/LKM di Bekasi. Penjaringan dilakukan dengan menyebarkan formulir melalui jaringan anggota K3S, LSM, dan organisasi sosial lainnya. Mereka kemudian dinyatakan terdaftar melalui konfirmasi via telpon dan atau langsung mengembalikan formulir peserta. Adapun kriteria seleksi adalah pendamping yang telah memberikan asistensi kepada LKM minimal 1 tahun.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Total dana yang digunakan dalam pelatihan sebesar Rp8.775.000, bersumber dari FPPM sebesar Rp8.992.000 dan sisanya ditanggung BMS. Sifat dana hibah.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000
	Mekanisme Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - BMS mensosialisasikan bahwa akan diselenggarakan pelatihan pendamping LKM melalui jaringan LSM dan organisasi sosial di Bekasi. - Setelah itu BMS mencatat peserta yang telah mendaftar, yang sesuai dengan kriteria. - Dilanjutkan dengan pelatihan yang dilakukan selama 2 hari di BLKM Bekasi. <p>Adapun materi pelatihannya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kajian pengalaman peserta dalam pendampingan LKM - Wawasan dan konsep LKM - Studi lapangan LKM - Metode pengalaman partisipasi anggota dan masyarakat dalam LKM - Model kontrol partisipatif dalam LKM - Keuangan praktis LKM - Potensi mitra dalam pengembangan LKM - Perumusan rencana tindak lanjut <p>Pelatihan diberikan dengan menggunakan metode partisipatif dengan mengakomodasi pengalaman peserta. Hal tersebut terwujud dalam bentuk diskusi kelompok, diskusi pleno di kelas dan lapangan.</p>
	Pencapaian hasil	Tingkat kehadiran peserta sebesar 100% selama pelatihan berlangsung. Peserta pelatihan kemudian meneruskan pekerjaannya sebagai pendamping LKM.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peserta yang telah mendaftar (sebanyak 2 orang) tetapi tidak muncul dalam pelatihan karena alasan kesibukan internal dalam lembaganya masing-masing. Sebenarnya jika mereka hadir maka peserta menjadi 27 orang. - Latar belakang dan tingkat pendidikan peserta yang beragam; sebagian besar tamatan SLTA sedangkan sisanya S1.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Menciptakan kerja sama antara BMT dan Koperasi se- Bekasi
3.7	Nama upaya	Pelatihan Manajemen Usaha
	Deskripsi upaya	Latar belakang BMS melakukan pelatihan ini bertolak dari kenyataan bahwa para anggota BMT maupun calon anggota BMT kebanyakan masih belum tertib dalam manajemen usaha. Bahkan masih ada yang sama sekali belum mengetahui tentang manajemen usaha karena mereka baru akan melakukan usaha. Oleh karena itu, dengan dukungan dana dari Tere Des Hommes (TDH), BMS menyelenggarakan pelatihan manajemen dengan tujuan memperkuat kapasitas para anggota dalam melakukan usaha.
	Penanggung jawab	BMS
	Pelaksana	BMS
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan rasa kepedulian yang besar tentang pentingnya tertib dalam manajemen pengelolaan keuangan usaha dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha. - Menumbuhkan kepedulian untuk menyisihkan sebagian dari hasil usaha untuk menabung di BMT.
	Jenis kegiatan	Pelatihan Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti 37 peserta. Mereka merupakan dampingan BMS dan sekaligus anggota BMT unit III.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Semua orang tua anak jalanan (kelompok dampingan BMT) yang jumlahnya sekitar 105 orang. Namun yang ikut pelatihan hanya 37 orang. Cara menjaring: Penjaringan didahului dengan mengundang semua anggota BMT orang tua anak jalanan, baik yang sudah sukses melakukan usaha maupun masih dalam perintisan. Kriteria peserta Merupakan orang tua anak jalanan dampingan BMS, anggota BMT orang tua anak jalanan, dan bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai.
	Pendanaan	Untuk menyelenggarakan pelatihan diperoleh dana Rp4 juta dari Tere Des Hommes Netherland, bentuknya hibah.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Pelatihan dilakukan selama 2 hari berturut-turut di mana fasilitatornya berasal dari BMS. Para peserta sama sekali tidak dipungut biaya. Adapun materi yang diberikan adalah: pengetahuan soal usaha rumah tangga, pengelolaan keuangan usaha, efisiensi dan efektifitas produksi dan pengelolaan usaha.
	Pencapaian hasil	Peserta yang mengikuti pelatihan hari I dan II tetap 100 persen, yakni 37 orang.
	Masalah	- Banyak anggota kelompok dampingan tidak mengikuti pelatihan karena sibuk mencari nafkah. - Peserta tidak melakukan usaha dan kehilangan penghasilan selama 2 hari mengikuti seminar.
	Status saat ini	Selesai.
	Potensi	- Mempermudah akses modal melalui BMT - Mengembangkan usaha mikro pada setiap peserta pelatihan.
4. Bina Sumberdaya Mitra (BISMI)		
4.1.	Nama upaya	Karib Ikhtiar BISMI
	Deskripsi upaya	Upaya ini lahir dengan latar belakang keprihatinan BISMI pada kondisi masyarakat ekonomi lemah yang semakin terpuruk sebagai dampak dari krisis moneter yang menghantam Indonesia sejak tahun 1997. Program ini semula ditujukan kepada masyarakat kelompok dampingan BISMI yang berada di sekitar Cimanggis, Depok dengan mengandalkan dana dari donatur individu. Namun pelaksanaannya kemudian meliputi beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Brebes dan Lampung yang didukung oleh beberapa lembaga internasional.
	Penanggung jawab	Bina Sumber Daya Mitra (BISMI)
	Pelaksana	BISMI dan kelompok dampingan
	Instansi terkait	Dalam melaksanakan program, BISMI bekerja sama dengan beberapa instansi terkait antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM), serta mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dalam membantu kelompok dampingan meningkatkan keterampilannya.
	Tujuan upaya	- Memfasilitasi masyarakat agar dapat keluar dari persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi akibat krisis ekonomi. - Meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan berbagai keterampilan
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Kredit - Pendampingan

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	1998: DKI Jakarta (Kalibaru), Jawa Barat (Cimanggis-Depok) 1999: DKI Jakarta (Kalibaru) 2000: DKI Jakarta (Bantaran Kali Ciliwung) 2001: Jawa Tengah (Brebes), Maluku (Saumlaki) 2002: Jawa Barat (Bekasi)
	Sasaran	<p><u>Tahun 1998:</u> 40 orang nelayan di Kalibaru, Jakarta; 10 orang pedagang sembako dan pedagang sayur di depok, 5 orang pedagang ayam goreng di Bekasi. Adapun cara menjaringnya pada tahap awal tahun 1998 adalah dengan menggunakan model jaminan dari seorang tokoh masyarakat dari kalangan agamawan yang dijadikan tokoh kunci. Pada waktu itu pelaku usaha mikro yang dibantu adalah mereka yang benar-benar tergolong usaha yang sangat kecil. Mereka dibentuk dalam kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok terdiri rata-rata 5 orang anggota.</p> <p><u>1999 – sekarang:</u> Mulai tahun 1999 untuk kegiatan Karib Ikhtiar BISMI, digunakan model Grameen Bank yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Grameen Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan untuk masyarakat miskin. Filosofi dasar dari Grameen Bank adalah: - Kegiatan ini untuk perempuan dan orang miskin - Peserta harus mempunyai usaha</p> <p>Dasar bagi penetapan wilayah kerja yang dikembangkan BISMI adalah bila suatu daerah (biasanya batas wilayah adalah desa atau kelurahan) terdapat sedikitnya 100 orang miskin.</p>
	Pendanaan	<p><u>Tahun 1998:</u> - Pemberian Kredit Mikro Pada awal pengembangan kegiatan ini, dana berasal dari donatur-donatur perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. Dana tersebut bersifat hibah. Dana sebesar Rp30 juta untuk masyarakat nelayan Kalibaru dengan keterlibatan sebanyak 40 orang, dibagi dalam 8 kelompok. Untuk pedagang sembako dan sayur di Depok, sebesar Rp6 juta dan sebanyak 12 orang yang terbagi dalam 2 kelompok. Untuk 5 orang pedagang ayam goreng di Bekasi, sebanyak Rp2 juta.</p> <p><u>Tahun 1999:</u> Dana pada tahun ini bersumber dari Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) sebesar Rp114 juta untuk membantu masyarakat nelayan terutama untuk pedagang kecil dan pengasin ikan yang terdiri dari 150 orang perempuan dan 40 orang laki-laki.</p> <p><u>Tahun 2000:</u> Dana untuk kegiatan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp120 juta, berasal dari Mercy Corporation Institute (MCI). Dana ini untuk membantu 110 perempuan pengusaha mikro (umumnya pedagang makanan dan warungan) di daerah Ciliwung Jakarta Timur.</p> <p><u>Tahun 2001:</u> Bantuan dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp100 juta untuk masyarakat nelayan Brebes yang berjumlah 110 orang (perempuan) dan Maluku yang berjumlah 50 orang (laki-laki),</p> <p>Dana yang berasal dari lembaga dana sifatnya hibah kepada BISMI dan dana dari BISMI kepada peserta kegiatan bersifat pinjaman tanpa bunga.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	1998 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Tahun 1998:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BISMIL bersama dengan pemerintahan kelurahan dan tokoh kunci (biasanya tokoh agama) mengadakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. - BISMIL mengadakan identifikasi peserta kegiatan, kemudian membentuk kelompok peserta kegiatan. Terbentuk 8 kelompok dengan anggota berjumlah 5 orang. Delapan kelompok digabung menjadi 2 rempug. - Setelah kelompok terbentuk, dana disalurkan melalui ketua kelompok dan tokoh kunci sebagai penjamin kelompok. Pinjaman berkisar Rp 300 ribu – Rp600 ribu yang dicicil setiap minggu. - Pengembalian langsung dari peserta ke staf lapangan BISMIL. <p><u>Tahun 1999- sekarang:</u> Kegiatan ini menggunakan model Grameen Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila teridentifikasi 100 orang miskin dalam satu wilayah diadakan pertemuan umum (di Balai Desa) untuk mengadakan sosialisasi program Grameen Bank. Diadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat untuk dijadikan mediator dan kontak. - Ditunggu sampai satu minggu; bila terkumpul sedikitnya 10 orang yang berminat menjadi peserta model Grameen Bank, diadakan uji kelayakan (fisik, keluarga, pendapatan) dengan mendatangi satu per satu ke rumah masing-masing peminat. - Uji kelayakan diteruskan dengan kegiatan pra-latihan. Pra-latihan adalah penjelasan awal tentang program Grameen Bank. - Langkah selanjutnya adalah Latihan Wajib selama 5 hari. Pelatihan ini wajib dihadiri setiap hari oleh setiap peserta. Bila ada salah satu yang tidak hadir meski satu hari, latihan harus diulang dari mula. Tujuan sanksi ini adalah untuk menanamkan disiplin kepada setiap peserta. Isi pelatihan terdiri dari pembentukan kelompok, kelembagaan, bagaimana mengubah nasib, mengisi absen, berdisiplin, dan program itu sendiri. Pada hari terakhir diadakan juga ujian bagi peserta latihan. Materi yang diberikan adalah pengenalan program kredit, skema pembiayaan kredit, memperkenalkan prinsip ekonomi dan ajaran Islam. Metode pelatihan adalah ceramah dan <i>role play</i>. - Setelah latihan wajib, diadakan pertemuan mingguan secara berkala. - Setelah diadakan pertemuan mingguan, diadakan kelayakan usaha bagi yang ingin meminjam ke BISMIL. Pinjaman langsung diberikan kepada orang yang meminjam. Pinjaman ini berjangka waktu 6-12 bulan, dicicil secara mingguan. Cicilan pinjaman diserahkan kepada orang setempat yang ditunjuk oleh BISMIL. - Berdasarkan kesepakatan bersama antara BISMIL dan peserta, setiap cicilan akan ditambahkan Rp2000,- per minggu sebagai biaya administrasi. Uang administrasi tersebut diberikan kepada petugas yang menerima cicilan kredit. Cicilan tersebut akan diambil secara berkala oleh staf lapangan BISMIL. <p><u>Pelatihan</u></p> <p><u>Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ikan</u> Selain memberikan kredit, BISMIL juga mengirim 10 orang peserta kegiatan dari Kalibaru untuk mengikuti pelatihan Pemanfaatan Limbah Ikan selama 2 hari. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindag Jakarta Utara. Pelatihan ini merupakan salah satu usulan dari para anggota untuk dapat memiliki keterampilan dalam mengelola ikan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan alternatif usaha yang bisa dikembangkan oleh kelompok dampingan. Cara menjaring peserta adalah dengan mensosialisasikan keberadaan pelatihan. Kriteria seleksi adalah mereka yang merupakan anggota dampingan BISMIL, berminat, dan sedang tidak ke laut. Pelatihan dilakukan pada bulan September 1999 di Gedung Dinas Perindag Jakarta Utara, Muara Angke. Adapun materi yang diberikan adalah berkisar pada tehnik pembuatan makanan ternak dari limbah ikan.</p>

No.	Item	Penjelasan
		<p><u>Pelatihan Peternakan Cacing</u> BISMI juga mengirimkan 20 orang peserta kegiatan dari Kalibaru untuk mengikuti pelatihan peternakan cacing. Dalam penyelenggaraannya, BISMI bekerja sama dengan Yayasan Permata Hati Tangerang. Tempat pelaksanaannya di aula RW 06 Kalibaru, pada bulan November 1999. Materinya seputar jenis-jenis cacing yang bernilai jual, cara pemilihan bibit, pemeliharaan dan pemasarannya. Pesertanya 25 orang, dengan mekanisme pemilihan dan kriteria yang sama dengan pelatihan sebelumnya. Meskipun kemudian masyarakat setempat mengembangkan usaha peternakan cacing setelah pelatihan, namun usaha gagal karena setiap hampir masuk waktu panen, cacing mati. Penyebabnya adalah suhu di Kalibaru tidak cocok untuk pengembangbiakan cacing.</p> <p><u>Pendampingan</u> Ada dua jenis pendampingan. Pertama pendampingan kelompok yang dilakukan setiap minggu/mingguan. Pada waktu pendampingan kelompok dilakukan transaksi keuangan dan pemberian materi. Materinya bisa tentang keagamaan maupun gender, usaha dan lain- lain. Tujuannya untuk mengembangkan wawasan anggota.</p> <p>Kedua, pendampingan individual. Pendampingan ini dilakukan langsung kepada anggota. Hal ini dilakukan di tempat usaha atau rumah anggota. Pendampingan individual dilakukan jika ada yang menunggak atau jarang hadir di pertemuan mingguan.</p> <p>Saat ini BISMI memiliki 15 orang pendamping: Bekasi 10 orang, BMT 3 orang, Kalibaru 1 orang, dan Brebes 1 orang.</p>
	Pencapaian hasil	Program awal tahun 1998 menggunakan mekanisme model kader (jaminan pribadi) dan modal yang kembali hanya 20% dari total. Mulai Tahun 1999 – sekarang, dengan model Grameen Bank, tingkat pengembalian modal 90%. Khusus Kalibaru 99 %.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit mengumpulkan calon penerima kredit untuk mengikuti pelatihan awal. - Budaya nelayan yang bebas dan melaut sering menyebabkan pengembalian kredit terlambat karena mereka tidak di tempat. - Adanya ancaman penggusuran (Ciliwung) dan kemungkinan pindah rumah sehingga menyulitkan pada saat penagihan.
	Status saat ini	Karib Ikhtiar BISMI secara umum masih terus berjalan kecuali untuk “proyek” tahun 1998, dan dengan kelompok dampingan nelayan hanya bertahan sampai 3 tahun.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota/kelompok dampingan masih bisa bertambah - Membentuk usaha bersama - Tumbuhnya koperasi
4.2	Nama Upaya	Baithul Mal Waltamwil (BMT) BISMI
	Deskripsi Upaya	BMT merupakan model kredit mikro dengan sistem koperasi Islam. Upaya ini dikembangkan BISMI sebagai jawaban dari beberapa kelemahan sistem Grameen Bank. BMT pada dasarnya merupakan perkawinan sistem Grameen Bank dan Syariah.
	Penanggung jawab	Bina Sumberdaya Mitra (BISMI)
	Pelaksana	BISMI dan kelompok dampingannya.
	Instansi Terkait	Bappeda Kota Bekasi sebagai pemberi modal.
	Tujuan Upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. - Membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha.
	Jenis Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit - Pendampingan - Pelatihan - Simpan pinjam

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah Pelaksanaan	Jawa Barat (Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bantar Gebang dan Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi)
	Sasaran	Individu maupun kelompok pedagang kecil. Pada tahap pertama berjumlah 100 orang (rencananya 300 orang). Setiap peserta terlebih dahulu telah memiliki usaha, telah diuji kelayakannya dan mengikuti pelatihan.
	Pendanaan	Dana berasal dari Bappeda Kotamadya Bekasi, sebesar Rp150 juta. Sifatnya hibah.
	Waktu Pelaksanaan	2003 – sekarang
	Mekanisme Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksinya menggunakan model syariah sedangkan pengorganisasiannya menggunakan pola Grameen Bank. - Dalam transaksi digunakan istilah akad jual beli (Baithul Bisanal Mal – BBA) dan <i>profit sharing</i> (Musyorakah). - Akad dilakukan dengan individu maupun kelompok. - Sedangkan untuk <i>profit sharing</i> dalam tahap awal belum bisa diterapkan karena para peserta belum mempunyai sistem pembukuan laporan keuangan yang memadai.
	Pencapaian hasil	Belum diketahui karena masih dalam proses awal (saat ini masih dalam proses penjangkaran).
	Masalah	Para pedagang belum memiliki sistem pembukuan yang baik.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan dapat diterapkannya sistem bagi hasil. - Jumlah peserta dapat bertambah.
5. Bina Swadaya		
5.1	Nama upaya	Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)
	Deskripsi upaya	Konsep program ini disusun oleh Bina Swadaya, BI dan GTZ. <i>Pilot Project</i> dilaksanakan pada tahun 1990-1992.
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	Bina Swadaya LSM partisipan lain
	Instansi terkait	Perbankan (BRI dan BPR)
	Tujuan upaya	Membantu masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses pelayanan keuangan dari bank karena tidak mampu menyediakan agunan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan KSM - Pelatihan dasar-dasar KSM - Pelatihan Pembukuan KSM - Pendampingan, meliputi aspek organisasi, administrasi, permodalan, usaha produktif, dan jejaring untuk KSM - Penyaluran kredit bagi KSM - Monitoring dan evaluasi
	Wilayah pelaksanaan	Dilaksanakan pada 5 propinsi dan 15 kabupaten, yakni: Lampung (Kab Lampung Tengah); Jawa Barat (Kab Bandung, Kab Indramayu, Kab Subang); Yogyakarta (Kab Bantul); Jawa Tengah (Kab.Boyolali, Kab.Banjarnegara, Kab.Kendal, Kab.Semarang, Kab Bantul); Jawa Timur (Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kota Surabaya, Kab.Blitar, Kab.Banyuwangi)
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan yang umumnya memiliki usaha mikro. - Laki-laki dan perempuan.
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1990 – 1998 (<i>Pilot Project</i> 1990-1992)

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Terdapat dua model pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank memberikan kredit secara langsung kepada KSM dengan melibatkan LSM sebagai pendamping. - Bank memberikan kredit kepada LSM untuk dipinjamkan kembali kepada KSM. <p>Pada model (1), Bank menetapkan suku bunga sekitar 30% per tahun efektif, dan LSM memperoleh fee 0,5% per tahun.</p> <p>Pada model (2), Bank menetapkan bunga 15 – 18% per tahun efektif kepada LSM dan LSM menetapkan 30 – 33% kepada KSM.</p> <p>Utk memperoleh kredit ini KSM harus menyimpan tabungan beku dengan perbandingan tabungan dan pinjaman 1:4 sampai 1:6.</p> <p>Kredit kepada anggota berupa kredit mikro, tanpa jaminan (<i>colateral substitute</i>) dengan jumlah pinjaman maksimal Rp1.000.000 per anggota KSM.</p>
	Pencapaian hasil	Terlayannya masyarakat yang semula tidak bisa mengakses bank.
	Masalah	Pengembalian kredit kurang lancar
	Status saat ini	Di tingkat Bina Swadaya pusat program sudah selesai, namun di tingkat Bina Swadaya cabang kegiatan masih berjalan, karena Bina Swadaya melakukan kegiatan keuangan mikro sebagai program dan bukan dengan pendekatan proyek. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam memisahkan dampak proyek per proyek, karena semua kegiatan selalu ditindaklanjuti dengan kegiatan keuangan mikro Bina Swadaya. (Untuk informasi, saldo kredit seluruh Guswil Bina Swadaya per 30 Juni 2003 sebesar Rp8.8 milyar dari berbagai sumber dan berbagai model).
	Potensi	
5.2	Nama upaya	Pendampingan Kelompok IDT untuk Pengembangan Usaha Mikro
	Deskripsi upaya	Proyek IDT yang dilaksanakan pemerintah berlangsung dari tahun 1993-1994. Pada pasca proyek, kelompok-kelompok yang sudah dibentuk menjadi terlantar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan penguatan terhadap kelompok-kelompok eks-IDT tersebut.
	Penanggung jawab	Yayasan Bina Swadaya
	Pelaksana	Yayasan Bina Swadaya dan Guswil Bina Swadaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu permodalan bagi kelompok eks-IDT di 10 lokasi binaan Bina Swadaya dengan cara memperkuat kelompok agar mampu berhubungan dengan Bank.
	Jenis kegiatan	Pelatihan Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	DIY (Kabupaten Wonosari) Jawa Tengah (Kabupaten Bayat-Klaten, Boyolali (2 lokasi), Pekalongan) Jawa Timur (Kabupaten Srono-Banyuwangi, Widang-Lamongan, Seputih-Surabaya) Jawa Barat: (Kabupaten Citeureup-Bogor)
	Sasaran	Kelompok pengusaha mikro; dengan anggota laki-laki dan perempuan
	Pendanaan	Lembaga dana dan Bina Swadaya
	Waktu pelaksanaan	1997-2000
	Mekanisme pelaksanaan	Koordinator Bina Swadaya Pusat Pelaksana wilayah Guswil Bina Swadaya
	Pencapaian hasil	Telah mendampingi 211 KSM di sepuluh lokasi dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 3.461 orang dan perempuan 1.756 orang.
	Masalah	
	Status saat ini	Proyek sudah selesai tetapi di Bina Swadaya cabang masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
5.3	Nama upaya	Development of Environmentally Oriented Cattle Husbandry and Sustainable Agriculture
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Dampingan teknis,
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur
	Sasaran	Usaha mikro/kecil binaan Bina Swadaya.
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	1997-1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
	5.4	Nama upaya
Deskripsi upaya		
Penanggung jawab		
Pelaksana		
Instansi terkait		
Tujuan upaya		
Jenis kegiatan		- Pendampingan teknis - Dana simultan
Wilayah pelaksanaan		Kalimantan Timur
Sasaran		Usaha mikro/kecil binaan Bina Swadaya.
Pendanaan		
Waktu pelaksanaan		1998-1999
Mekanisme pelaksanaan		
Pencapaian hasil		
Masalah		
Status saat ini		Selesai
Potensi		
5.5		Nama upaya
	Deskripsi upaya	Meningkatkan taraf hidup masyarakat minoritas di Lembah Baliem.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	Yayasan Bina Swadaya – Guswil Wamena
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pertanian dan peternakan
	Jenis kegiatan	-Pelatihan -Pendampingan dana stimulan untuk bibit pertanian, babi, dan kredit untuk modal

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Papua (Lembah Baliem)
	Sasaran	Masyarakat lembah Baliem
	Pendanaan	Lembaga dana dan Bina Swadaya
	Waktu pelaksanaan	1998-2003
	Mekanisme pelaksanaan	Koordinator Bina Swadaya Pusat, Pelaksana Guswil Wamena
	Pencapaian hasil	Telah melayani 87 KSM (dari 108 KSM yang ditumbuhkan)
	Masalah	- Kehidupan masyarakat di Irian yang sering pesta adat dan sistim denda untuk menyeter ternak membuat kekayaan tidak bertambah. - Pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak baik
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
5.6	Nama upaya	Pengembangan Masyarakat melalui KSM di Kel. Kamal Muara Jakarta Utara
	Deskripsi upaya	Penumbuhan kelompok di Kamal Muara
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	Bina Swadaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dengan pemberian kredit.
	Jenis kegiatan	Pelatihan Pendampingan Pemberian dana bergulir
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Jakarta Utara: Kel. Kamal Muara)
	Sasaran	Masyarakat Kamal Muara
	Pendanaan	UNESCO
	Waktu pelaksanaan	1998-2001 (2 tahap proyek)
	Mekanisme pelaksanaan	Koordinator Bina Swadaya Proyek lanjutan dikelola oleh Guswil DKI Jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp10 juta.
	Pencapaian hasil	Terbentuk 10 KSM (ada tambahan 4 KSM baru) Terbentuk Forum KSM
	Masalah	Masyarakat yang dilayani kebanyakan bukan nelayan, karena para nelayan yang berada di lokasi bukan penduduk setempat.
	Status saat ini	Program ini sudah selesai namun kegiatan kelompok tetap berjalan dan menjadi bagian KSM binaan Guswil DKI.
	Potensi	
5.7	Nama upaya	Village Social Safety Net in Cope with Economic Crisis
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	Yayasan Bina Swadaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu masyarakat mengatasi krisis
	Jenis kegiatan	- Penumbuhan KSM - Pelatihan dasar-dasar KSM - Pelatihan Pembukuan KSM - Pendampingan, meliputi aspek organisasi, administrasi, permodalan, usaha produktif, dan jejaring untuk KSM - Penyaluran kredit bagi KSM

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	DKI, Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Bekasi, Garut); Jawa Tengah (Kabupaten Kebumen, Magelang, Klaten); Kalimantan Tengah (Palangka Raya); Sulawesi Selatan (Kabupaten Takalar); NTT (TTU, TTS), Irian (Kabupaten Wamena); Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi); Lampung (Kabupaten Metro).
	Sasaran	Menumbuhkan 1300 KSM baru.
	Pendanaan	Lembaga dana dan Bina Swadaya
	Waktu pelaksanaan	1999-2001
	Mekanisme pelaksanaan	Koordinator Yayasan Bina Swadaya Pusat
	Pencapaian hasil	Terbentuk 13 Gugus Wilayah Bina Swadaya (kantor cabang)
	Masalah	Dana operasional pembentukan Guswil tinggi
	Status saat ini	Program ini sudah selesai tetapi kegiatan kredit mikro di masing-masing Guswil masih berjalan.
	Potensi	
5.8	Nama upaya	Development of Appropriate Waste Water Treatment for Small Scale Industry in Semanan, West Jakarta
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan - Pelatihan - Monitoring dan evaluasi
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Jakarta Barat)
	Sasaran	Usaha kecil
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	1998 – 1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
5.9	Nama upaya	Proyek ASA
	Deskripsi upaya	Peningkatan pendapatan melalui pelayanan keuangan mikro.
	Penanggung jawab	Yayasan Bina Swadaya
	Pelaksana	Bina Swadaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberikan pelayanan keuangan secara mudah dan berkelanjutan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi proyek - Penumbuhan kelompok - Penggalangan tabungan - Pencairan kredit - Penarikan angsuran

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Bogor, Cileungsi) dan DKI Jakarta (Cakung, Johar Baru, dan Pademangan)
	Sasaran	Kelompok usaha mikro, 95% adalah perempuan, memiliki penghasilan keluarga maksimal Rp1juta, dan tinggal di kelurahan yang sama dengan lokasi kantor.
	Pendanaan	Yayasan Bina Swadaya
	Waktu pelaksanaan	November 2002-April 2003 (<i>pilot project</i>) 2003 – seterusnya
	Mekanisme pelaksanaan	Dikelola sebagai lembaga keuangan
	Pencapaian hasil	Berhasil mencapai jumlah kelompok sebanyak 348 dan jumlah anggota 7.224 orang (per juli 2003) Dana beredar per 30 Juni 2003: 4.989 milyar rupiah.
	Masalah	Kekurangan sumber dana yang murah
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi menjangkau usaha mikro dalam jumlah banyak karena beroperasi di wilayah padat penduduk yang banyak terdapat usaha mikro dan secara kelembagaan, cabang ASA diberi target tertentu.
6. Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia (Formasi Indonesia)		
6.1	Nama upaya	Formasi Development Fund (FDF)
	Deskripsi upaya	FDF merupakan bagian dari program INCODAP-Formasi (Indonesian Co-operative Development Assistance Program-Formasi) tahun 1996-1999, 2000-2002. FDF merupakan kerja sama Formasi dan CCA (Canadian Co-operative Association) dalam upaya merintis pengembangan percontohan usaha koperasi atau KUB (Kelompok Usaha Bersama) melalui pembiayaan usaha (kredit dan penyertaan) dengan pendekatan "hunting" kepada lembaga-lembaga peserta/anggota Formasi.
	Penanggung jawab	Direktur Eksekutif Formasi
	Pelaksana	Koordinator Program FDF Formasi
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Melayani permodalan usaha (melalui kredit dan penyertaan modal) kepada koperasi/prakoperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga dapat berkembang dan menjadi model percontohan bagi pengembangan usaha di koperasi/prakoperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di tempat lain.
	Jenis kegiatan	Kunjungan lapangan untuk studi kelayakan usaha, pemberian kredit, penyertaan modal investasi, pelatihan, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB berdasarkan sebaran dampingan/mitra anggota Formasi .
	Sasaran	Koperasi/prakoperasi dan kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menjadi mitra dampingan Anggota Formasi. Cara menjaringnya: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program FDF melalui anggota Formasi di wilayah pelaksanaan program. - Pengajuan proposal pinjaman atau penyertaan permodalan usaha oleh koperasi/prakoperasi atau KUB dengan rekomendasi Anggota Formasi sebagai pendampingnya ke Formasi - Seleksi proposal oleh Tim FDF Formasi sesuai persyaratan administrasi - Kunjungan lapangan untuk studi kelayakan usaha bagi proposal yang lulus persyaratan administrasi oleh petugas lapangan FDF. Kriterianya adalah: Usaha kecil/mikro (sektor informal) dalam bentuk koperasi/prakoperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menjadi mitra dampingan anggota Formasi.
	Pendanaan	Rp623,000,000-, sumber dari CCA (Canadian Co-operative Association), sifat pendanaan dari CCA ke Formasi sebagai dana bergulir (<i>grant</i>) dan dari Formasi ke /KUB sebagai pinjaman lunak (bunga 1,5%) untuk kredit modal usaha dan deviden (bagi hasil) untuk penyertaan modal.

No.	Item	Penjelasan																																													
	Waktu pelaksanaan	1996-1999, 2000-2002																																													
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program FDF - Pendaftaran proposal pinjaman atau penyertaan permodalan usaha - Seleksi kelayakan proposal - Seleksi kelayakan usaha melalui survei lapangan bagi koperasi/KUB yang lulus seleksi adm proposal - Membuat kesepakatan kerja sama (pinjaman/penyertaan modal usaha) antara koperasi/prakoperasi dan KUB yang lulus seleksi kelayakan usaha dengan Formasi. - Pelatihan bagi mitra FDF berupa: Manajemen koperasi Manajemen kewirausahaan Manajemen keuangan Manajemen pemasaran dan produksi Manajemen SDM - Pemantauan dan konsultasi dilakukan secara berkala, sedikitnya setiap 3 bulan sekali. 																																													
	Pencapaian hasil	<p>Periode 1996-1999 terjaring 19 <i>pilot project</i> Koperasi/KUB (14 melalui proyek permodalan kredit usaha dan 5 proyek penyertaan modal usaha), yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB</th> <th>LSM Anggota/Pendamping</th> <th>Jumlah Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KUB Pawai Jakarta (Penyewaan alat pesta)</td> <td>HP2M, Jakarta</td> <td>Rp 37.475.600 (penyertaan)</td> </tr> <tr> <td>KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)</td> <td>PPMA, Jakarta</td> <td>Rp14.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)</td> <td>PPMA, Jakarta</td> <td>Rp17.850.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KUB Tileuleutik (Pernakan itik telur)</td> <td>PPMA, Jakarta</td> <td>Rp24.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KOPKAR PIP (Jasa setting dan percetakan)</td> <td>PIP, Jakarta</td> <td>Rp14.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>Yayasan Bina Umah Subang (Budidaya ikan air deras)</td> <td>Bina Desa, Jakarta</td> <td>Rp. 23.500.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>Yayasan Bina Sektor Informal (Penggemukan sapi)</td> <td>LP3ES, Jakarta</td> <td>Rp33.700.000 (penyertaan)</td> </tr> <tr> <td>KSU Wanita Hemat (Toserba)</td> <td>KSU Wanita Hemat Probolinggo, Jawa Timur</td> <td>Rp10.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KSU Wanita Kartini (Usaha Pedagang Kecil)</td> <td>KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur</td> <td>Rp20.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Keliling)</td> <td>KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur</td> <td>Rp30.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KSU Wanita Kartini (Usaha Simpan Pinjam)</td> <td>KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur</td> <td>Rp35.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Sembako)</td> <td>KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur</td> <td>Rp50.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>KPBS Mataram (Pembiayaan usaha pedagang keliling)</td> <td>YBS Mataram</td> <td>Rp20,000,000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td>Kopontren Nurul Yaqin (Distribusi BBM)</td> <td>YBSL Mataram</td> <td>Rp20.000.000 (penyertaan)</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB	LSM Anggota/Pendamping	Jumlah Dana	KUB Pawai Jakarta (Penyewaan alat pesta)	HP2M, Jakarta	Rp 37.475.600 (penyertaan)	KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp14.000.000 (kredit)	KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp17.850.000 (kredit)	KUB Tileuleutik (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp24.000.000 (kredit)	KOPKAR PIP (Jasa setting dan percetakan)	PIP, Jakarta	Rp14.000.000 (kredit)	Yayasan Bina Umah Subang (Budidaya ikan air deras)	Bina Desa, Jakarta	Rp. 23.500.000 (kredit)	Yayasan Bina Sektor Informal (Penggemukan sapi)	LP3ES, Jakarta	Rp33.700.000 (penyertaan)	KSU Wanita Hemat (Toserba)	KSU Wanita Hemat Probolinggo, Jawa Timur	Rp10.000.000 (kredit)	KSU Wanita Kartini (Usaha Pedagang Kecil)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp20.000.000 (kredit)	KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Keliling)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp30.000.000 (kredit)	KSU Wanita Kartini (Usaha Simpan Pinjam)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp35.000.000 (kredit)	KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Sembako)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp50.000.000 (kredit)	KPBS Mataram (Pembiayaan usaha pedagang keliling)	YBS Mataram	Rp20,000,000 (kredit)	Kopontren Nurul Yaqin (Distribusi BBM)	YBSL Mataram	Rp20.000.000 (penyertaan)
Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB	LSM Anggota/Pendamping	Jumlah Dana																																													
KUB Pawai Jakarta (Penyewaan alat pesta)	HP2M, Jakarta	Rp 37.475.600 (penyertaan)																																													
KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp14.000.000 (kredit)																																													
KUB Bina Wangi (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp17.850.000 (kredit)																																													
KUB Tileuleutik (Pernakan itik telur)	PPMA, Jakarta	Rp24.000.000 (kredit)																																													
KOPKAR PIP (Jasa setting dan percetakan)	PIP, Jakarta	Rp14.000.000 (kredit)																																													
Yayasan Bina Umah Subang (Budidaya ikan air deras)	Bina Desa, Jakarta	Rp. 23.500.000 (kredit)																																													
Yayasan Bina Sektor Informal (Penggemukan sapi)	LP3ES, Jakarta	Rp33.700.000 (penyertaan)																																													
KSU Wanita Hemat (Toserba)	KSU Wanita Hemat Probolinggo, Jawa Timur	Rp10.000.000 (kredit)																																													
KSU Wanita Kartini (Usaha Pedagang Kecil)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp20.000.000 (kredit)																																													
KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Keliling)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp30.000.000 (kredit)																																													
KSU Wanita Kartini (Usaha Simpan Pinjam)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp35.000.000 (kredit)																																													
KSU Wanita Kartini (Usaha Dagang Sembako)	KSU Wanita Kartini, Sidoarjo Jawa Timur	Rp50.000.000 (kredit)																																													
KPBS Mataram (Pembiayaan usaha pedagang keliling)	YBS Mataram	Rp20,000,000 (kredit)																																													
Kopontren Nurul Yaqin (Distribusi BBM)	YBSL Mataram	Rp20.000.000 (penyertaan)																																													

No.	Item	Penjelasan														
	Pencapaian hasil	KUB UJIL (Usaha jasa instalasi listrik)	HP2M, Jakarta	Rp6.000.000 (kredit)												
		KUB Wanita Penjaringan (Pembiayaan usaha warungan)	PPSW, Jakarta	Rp30.000.000 (kredit)												
		Koperasi Tekad Solo (Toserba)	LPTP, Solo	Rp48.000.000 (kredit)												
		Asosiasi Perajin Pati/SIMPATI (Usaha produksi kerajinan)	Pekerti, Jakarta	Rp21.000.000 (kredit)												
		KPGS (Usaha dagang nasi kotak)	HP2M, Jakarta	Rp64.500.000 (penyertaan)												
		<p>Jumlah dana FDF yang tersalurkan periode 1996-1999 adalah Rp519.025.600,- Tingkat pengembalian dana sampai dengan tahun 1999 sekitar 40-50% dari total dana yang tersalur (kredit macet sekitar 50-60%) Pada periode 2000-2002 terjaring hanya 3 <i>Pilot Project</i> Koperasi melalui proyek kredit permodalan usaha, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="528 815 1495 1133"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 815 839 882">Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB</th> <th data-bbox="839 815 1150 882">LSM Anggota/Pendamping</th> <th data-bbox="1150 815 1495 882">Jumlah Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 882 839 949">BMT Ikhtira, Jakarta (Simpan Pinjam)</td> <td data-bbox="839 882 1150 949">Formasi</td> <td data-bbox="1150 882 1495 949">Rp10.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 949 839 1039">Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)</td> <td data-bbox="839 949 1150 1039">Formasi</td> <td data-bbox="1150 949 1495 1039">Rp5.000.000 (kredit)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1039 839 1133">Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)</td> <td data-bbox="839 1039 1150 1133">Formasi</td> <td data-bbox="1150 1039 1495 1133">Rp20.000.000 (kredit)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah dana FDF yang tersalurkan periode 2000-2002 adalah Rp35.000.000,- Tingkat pengembalian dana pada periode 2000-2002 ini sampai akhir 2002 cukup lancar, sekitar 90% dari total dana yang tersalurkan.</p> <p>Jumlah dana FDF yang disalurkan selama periode 1996-2002 seluruhnya adalah Rp 554.025.600,-</p>			Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB	LSM Anggota/Pendamping	Jumlah Dana	BMT Ikhtira, Jakarta (Simpan Pinjam)	Formasi	Rp10.000.000 (kredit)	Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)	Formasi	Rp5.000.000 (kredit)	Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)	Formasi	Rp20.000.000 (kredit)
Nama Pilot Project Usaha Koperasi/KUB	LSM Anggota/Pendamping	Jumlah Dana														
BMT Ikhtira, Jakarta (Simpan Pinjam)	Formasi	Rp10.000.000 (kredit)														
Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)	Formasi	Rp5.000.000 (kredit)														
Koptan Multi Mandiri, Cirebon (pembelian gabah anggota)	Formasi	Rp20.000.000 (kredit)														
Masalah		<p>Krisis moneter tahun 1997-1998 memberi dampak pada program FDF dalam periode 1996-1999. Krisis ini mengakibatkan sebagian besar usaha pada pilot project FDF bangkrut dan tidak berjalan lagi sehingga pengembalian dana macet lebih dari 50%, dan kemudian program ini vakum untuk sementara (selama 1 tahun, yakni tahun 1999-2000).</p> <p>Pada periode 2000-2002 program dilanjutkan kembali, tetapi kurang berhasil dan hanya dapat menjaring 3 <i>pilot project</i> usaha koperasi saja karena persyaratan pinjaman yang terlalu ketat (belajar dari kredit macet periode 1996-1999). CCA juga memberikan dukungan dana pengelolaan FDF yang sangat minim dan manajemen pengelolaan FDF yang dilakukan oleh pengelola FDF Formasi belum optimal.</p>														
Status saat ini		<p>Program FDF ini sejak awal 2003 diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi bersama Formasi dan CCA yang menunjukkan bahwa program tersebut kurang berhasil. Pengurus Formasi dan CCA kemudian mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan program.</p>														

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	Masih dianggap cukup strategis sebagai alternatif akses permodalan usaha bagi koperasi/prakoperasi dengan persyaratan pengelolaan yang lebih profesional, manajemen yang otonom dari Formasi dan memposisikan LSM anggota Formasi sebagai penjamin dari koperasi/prakoperasi dampungannya. Dengan demikian, tanggung jawab dalam menjamin kelancaran penyaluran dan pengembalian dana dari dampungannya cukup besar sehingga kredit macet lebih dapat diatasi bersama.
6.2	Nama upaya	Program Pengembangan “Kepemimpinan yang Transformatif” dalam Koperasi
	Deskripsi upaya	<p>Selama ini koperasi berjalan dengan model kepemimpinan yang hanya mengurus persoalan teknis usaha koperasi, akses pengambilan keputusan antar laki-laki dan perempuan masih belum adil dan praktek demokrasi belum sesungguhnya dilaksanakan. Sementara saat ini koperasi dihadapkan pada arus globalisasi ekonomi. Dalam kondisi seperti itu koperasi harus dapat mempertahankan visi gerakannya yang seimbang antara tujuan ekonomi dan sosialnya yang menjadi prinsip dan tujuan dasar koperasi.</p> <p>Kepemimpinan dalam koperasi adalah masalah mendasar dan strategis yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan koperasi. Kepemimpinan transformatif adalah model kepemimpinan yang partisipatoris dan demokratis, serta mengintegrasikan jati diri koperasi, peka gender, berorientasi pengembangan dan memperhatikan isu utama atau akar persoalan koperasi dalam arus globalisasi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Formasi Indonesia bekerja sama dengan AWCF (Asian Women in Co-operative Development Forum) mengembangkan program kepemimpinan transformatif dalam koperasi.</p>
	Penanggung jawab	Formasi Indonesia
	Pelaksana	LSM Anggota Formasi Indonesia
	Instansi terkait	-
	Tujuan upaya	Mengembangkan model kepemimpinan yang transformatif dalam koperasi
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptasi manual <i>assessment</i> dan manual TOT kepemimpinan transformatif bagi koperasi. - Pelatihan penggunaan manual <i>assessment</i> “Kepemimpinan yang transformatif” bagi koperasi. - Penilaian terhadap koperasi pilot dampingan anggota Formasi. - TOT “Kepemimpinan yang Transformatif” dalam koperasi. - Pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif” bagi komunitas koperasi pilot dampingan anggota Formasi Indonesia. - Advokasi atas kebijakan-kebijakan koperasi yang tidak peka gender.
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta, Jawa Tengah (Solo/Klaten) dan Lombok berdasarkan sebaran wilayah dampingan LSM anggota Formasi saat ini.
	Sasaran	<p>Sasaran TOT “Kepemimpinan yang Transformatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kader fasilitator dari 14 LSM anggota dan beberapa calon anggota Formasi Indonesia. - Kader dari pengurus/pelaksana koperasi pilot dari dampingan anggota Formasi Indonesia. <p>Sasaran <i>Assesment</i> dan Pelatihan Kepemimpinan yang Transformatif bagi komunitas adalah pengurus, pelaksana dan anggota dari koperasi pilot dampingan PPSW, Bina Swadaya dan BK3I (Jakarta), koperasi pilot dampingan Persepsi (Klaten), LPTP (Solo) dan YBSL (Lombok).</p> <p>Cara menentukan sarannya adalah melalui sosialisasi program kepada seluruh LSM anggota Formasi Indonesia, berdasarkan kriteria peserta pelatihan dan kriteria koperasi pilot, rekomendasi peserta dan koperasi pilot dari LSM anggota Formasi dengan melampirkan data peserta dan koperasi pilot, serta seleksi peserta oleh tim pelaksana program.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	US\$13,900, dana hibah dari AWCF-Misereor
	Waktu pelaksanaan	Februari 2002-Januari 2005
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama, proses adaptasi manual <i>assessment</i> dan manual pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi” dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang mudah dipahami. - Kedua, sosialisasi kriteria dan penentuan koperasi pilot dampingan LSM anggota Formasi. - Ketiga, pelatihan mekanisme <i>assessment</i> berdasarkan manual “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi” bagi pendamping koperasi dari LSM anggota Formasi. - Keempat, penilaian terhadap koperasi <i>pilot</i> dampingan anggota Formasi oleh pendamping koperasi yang telah dilatih di atas. - Kelima, TOT “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi” bagi kader pendamping (fasilitator) dari 14 LSM Anggota Formasi dan kader dari pengurus/pelaksana koperasi <i>pilot</i> dampingan anggota Formasi. - Keenam, pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif” untuk komunitas di koperasi pilot oleh fasilitator yang telah mengikuti TOT - Ketujuh, pendampingan dalam implementasi penerapan kepemimpinan yang transformatif di koperasi <i>pilot</i> oleh masing-masing LSM anggota Formasi. - Kedelapan, pengembangan modul dan model penerapan kepemimpinan yang transformatif di koperasi-koperasi lain (di luar koperasi pilot).
	Pencapaian hasil	<p>Sampai saat ini program masih berjalan (Februari 2002-Juli 2003):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersusunnya modul <i>assessment</i> dan modul pelatihan untuk “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi”. - Telah dilatihnya kader-kader pendamping dari LSM anggota Formasi dalam melakukan <i>Assessment</i> “Kepemimpinan yang Transformatif” bagi koperasi dampingannya. - Telah dilatihnya kader-kader pendamping Koperasi dari 14 LSM anggota Formasi dan pengurus/pelaksana sebagai fasilitator pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi”. - Telah dilakukannya pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif” bagi 3 koperasi pilot dampingan PPSW, Bina Swadaya dan BK3I di Jakarta. - Telah adanya proses penyempurnaan manual (modul) <i>assessment</i> dan modul pelatihan “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi” berdasarkan hasil masukan dan evaluasi selama proses di atas, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan bagi koperasi-koperasi lain.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kesulitan penyesuaian/adaptasi manual <i>assessment</i> “Kepemimpinan yang Transformatif” dalam hal menerapkan indikator ideal koperasi yang dikembangkan di negara lain terhadap keberagaman model koperasi pilot dampingan LSM anggota Formasi. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak bisa langsung diterapkan dan harus melalui uji coba yang terus-menerus dalam proses penyesuaian dan penyederhanaan manual. - Model desain pengembangan koperasi/prakoperasi pada dampingan LSM anggota Formasi selama ini belum seluruhnya menerapkan perspektif gender dalam modelnya, sehingga model “Kepemimpinan Transformatif” yang antara lain mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pengembangan koperasi, masih menjadi persoalan.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Model Program “Kepemimpinan yang Transformatif dalam Koperasi” ini merupakan program baru di Indonesia, khususnya dalam model pengembangan koperasi. Kepemimpinan transformatif adalah model kepemimpinan yang partisipatoris dan demokratis dan mengintegrasikan jati diri koperasi, peka gender, berorientasi pengembangan dan memperhatikan isu utama atau akar persoalan koperasi dalam arus globalisasi ekonomi saat ini. Model kepemimpinan ini sangat tepat untuk dikembangkan dalam menghadapi perkembangan saat ini, khususnya bagi pengembangan koperasi yang berperspektif gender.
7. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)		
7.1	Nama upaya	Proyek Pembangunan Wilayah Bengkulu (<i>Bengkulu Regional Development Project/BRDP</i>)
	Deskripsi upaya	<p>Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di Propinsi Bengkulu, Pemerintah melaksanakan Proyek Pembangunan Wilayah Bengkulu (<i>Bengkulu Regional Development Project/BRDP</i>) yang sebagian dananya dibiayai dari pinjaman Bank Dunia.</p> <p>Komponen utama BRDP adalah kegiatan desa yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak diterbitkannya “Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pekerjaan Sarana/Prasarana dan Adopsi Teknologi Pertanian Desa” pada bulan November 1999. Namun pada saat supervisi Maret 2000 hasil diskusi dengan masyarakat desa peserta program mengindikasikan perlunya fleksibilitas dalam lingkup kegiatannya agar dapat merespons kebutuhan riil masyarakat desa.</p> <p>Untuk itu melalui supervisi bulan Agustus 2000, telah dirumuskan konsep dasar modifikasi desain BRDP yang mengacu pada “open menu option” (menu pilihan sendiri). Pada saat kunjungan misi Bank Dunia bulan November 2000, acuan dasar perumusan tersebut telah disepakati sebagai desain BRDP yang baru. Desain baru ini (open menu option) adalah menu pilihan kegiatan desa yang merupakan penyederhanaan/penggabungan dari kegiatan sub-komponen (bagian)</p> <p>A1: Sarana/Prasarana Desa (<i>Village Infrastructure Component/VIC</i>) dan kegiatan sub-komponen Part (bagian)</p> <p>B1: Adopsi Teknologi Pertanian Desa (<i>Village Based Technology adoption/VBAT</i>) serta kegiatan tambahan Usaha Ekonomi Produktif (<i>Income Generating Activity</i>) yang dikenal sebagai Program Kegiatan Desa (PKD) .</p>
	Penanggung jawab	<p>Tim Koordinasi Propinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Propinsi Bengkulu - Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu - Dinas-dinas lingkup Pertanian Tingkat Propinsi Bengkulu (Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) - Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian - Biro Penyusunan Program - Biro Keuangan - Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) - Kantor Pembangunan Masyarakat Desa - Unsur Universitas
	Pelaksana	PT. Budi Cakra Consultant LP3ES
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan pedesaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan di Propinsi Bengkulu yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	Mengkoordinir dan memberikan asistensi teknis kepada fasilitator lapangan yang bekerja mendampingi masyarakat dalam program kredit mikro pedesaan.
	Wilayah pelaksanaan	Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan)
	Sasaran	Prioritas sasaran penerima program BRDP adalah keluarga/individu (KK) atau kelompok masyarakat (Pokmas) miskin, baik laki-laki maupun perempuan di desa peserta program kegiatan desa BRDP
	Pendanaan	Sebagian dana dibiayai dari pinjaman Bank Dunia.
	Waktu pelaksanaan	2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<p>LP3ES memberikan asistensi teknis kepada fasilitator dan petugas penyuluh lapangan /PPL di dalam kegiatan proyek dan pembinaan di lapangan yang meliputi :</p> <p><u>Tahap Persiapan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memandu kegiatan pelatihan Participatory Rural Appraisal (PRA) atau pengkajian desa secara partisipatoris yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. - Menyelenggarakan pembahasan pada tahap awal untuk merencanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk RKD (Rencana Kegiatan Desa) secara partisipatoris . - Membantu mengumpulkan data umum yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa termasuk survey pasar yang meliputi tersedianya input pertanian, dan bahan-bahan yang dapat dibeli atau peralatan yang dapat disewa dan fasilitas angkutanyang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. - Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang layak/paling membutuhkan - Mengidentifikasi usaha kecil dari kelompok masyarakat prasejahtera dan sejahtera I di desa sasaran yang membutuhkan modal untuk mengembangkan/melestarikan usahanya. - Menyusun laporan-laporan kegiatan persiapan <p><u>Tahap Perencanaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi terbentuknya Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) melalui musyawarah desa. - Membantu merumuskan aspirasi dan keinginan masyarakat desa ke dalam sebuah rancangan kegiatan yang layak diusulkan untuk mendapatkan pinjaman. - Membantu kelompok masyarakat dalam memilih jenis dan lokasi kegiatan. - Membantu UPKD dalam menseleksi proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat - Membantu Tim Pelaksana Desa (UPKD) dalam membuat jadwal pelaksanaan kegiatan desa. - Memberikan dukungan pelatihan ketrampilan, manajemen keuangan maupun ketrampilan teknik kepada kelompok masyarakat. - Menyusun laporan-laporan kegiatan perencanaan - Bersama UPKD menandatangani berbagai formulir yang telah ditetapkan dalam lampiran –lampiran juklak dan juknis BRDP. <p><u>Tahap Pengawasan Pelaksanaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. - Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk dilaporkan kepada TKK. - Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proyek/kegiatan dan memberikan saran pemecahan. - Membantu mengestimasi kemajuan fisik dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan penggunaan dana.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu menjaga kualitas fisik, melalui pendampingan kepada kelompok secara berkala. - Menginformasikan perubahan-perubahan yang diperlukan kepada Pimpro dan Pimbagro <p><u>Tahap Pemantauan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu UPKD/TP-SPD menyiapkan laporan berkala untuk disampaikan kepada Pimpro/Pimbagro. - Melakukan dokumentasi dan menyusun laporan kegiatan tahap pemantauan
	Pencapaian hasil	<p>Jumlah Peminjam UPKD sampai Desember 2002</p> <p><u>Kabupaten Bengkulu Selatan:</u> Jumlah Peminjam: 4.700 orang (535 perempuan dan 4.081 laki-laki) Jumlah Pinjaman: Rp 5.326.991.858,- terdiri dari pinjaman pokok Rp 4.501.135.516,- dan bunga Rp 825.856.342,- Pengembalian pinjaman bulan Dec 2002: Rp 912.060.339,-</p> <p><u>Kabupaten Bengkulu Utara:</u> Jumlah Peminjam: 4.979 orang (1.259 perempuan dan 3.720 laki-laki) Jumlah Pinjaman: Rp 5.8686.785.500,- terdiri dari pinjaman pokok Rp 5.553.487.650,- dan bunga Rp133.297.850,- Total pengembalian pinjaman sampai akhir bulan Desember 2002: Rp2.215.806.950,-</p> <p><u>Kabupaten Rejang Lebong:</u> Jumlah peminjam:1.648 orang (379 perempuan dan 1.269 laki-laki) Jumlah pinjaman: Rp1.032.599.170,- terdiri dari pinjaman pokok Rp911.819.00,- dan bunga Rp120.780.170,- Jumlah pengembalian pinjaman sampai akhir bulan Desember 2002: Rp150.805.775,-</p>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pinjaman. - Masih munculnya pemahaman yang keliru tentang dana BRDP yang dianggap sebagai dana hibah dan bukan dana pinjaman. - Pembinaan dan kontrol kurang efektif karena luasnya cakupan wilayah kegiatan fasilitator kecamatan - Sistem pencatatan di tingkat UPKD kurang terorganisir dengan baik, petugas belum mampu karena masih merupakan pekerjaan sukarela /sampingan. - Adanya konflik internal antar kepala desa dengan petugas UPKD. - Analisis usaha yang disiapkan oleh pengelola proyek sangat kaku dan formal, tidak mudah untuk dijalankan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya fasilitas "Open Menu" , sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. - Kegiatan ini dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi masyarakat. - Kegiatan ini dapat disebarakan di wilayah lain (pemekaran wilayah kegiatan).
7.2	Nama upaya	Perluasan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) DKI Jakarta
	Deskripsi upaya	PPMK merupakan sebuah pendekatan baru yang diperkenalkan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembangunan pada tataran komunitas kelurahan . Prinsip PPMK adalah kemandirian, partisipasi, demokrasi dan transparansi pembangunan pada tataran komunitas. Kegiatan ini adalah suatu percobaan pengalaman pemberian bantuan pembangunan pemerintah terhadap masyarakat dengan pola <i>Block-grant</i> . Kegiatan ini berasumsi bahwa masyarakat mempunyai hak, kewenangan dan memiliki kemampuan untuk membangun wilayahnya sendiri secara lebih efisien dan tepat sasaran. Peran dan fungsi pemerintah hanya memfasilitasi dengan menciptakan kebijakan dan mengalokasikan dananya setiap tahun dalam bentuk <i>block grant</i> .

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Pemerintah DKI
	Pelaksana	Pemerintah Kelurahan di DKI Jakarta Pusat dan LP3ES
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menanggulangi kemiskinan masyarakat DKI
	Jenis kegiatan	Pendampingan dan pemberian bantuan teknis kepada masyarakat kelurahan di DKI dalam pemanfaatan maupun pengontrolan pelaksanaan kegiatan.
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (39 kelurahan di Jakarta Pusat)
	Sasaran	Masyarakat miskin di DKI
	Pendanaan	Dana berasal dari pemerintah DKI (APBD) dari pemerintah DKI kepada LP3ES bersifat balas jasa. Dana untuk masyarakat adalah hibah.
	Waktu pelaksanaan	2002 (12 bulan)
	Mekanisme pelaksanaan	Ha-hal yang dilakukan LP3ES: <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan asistensi teknis kepada Dewan Kelurahan dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dan prioritas program. - Membuat persiapan dan melakukan penguatan kelembagaan komunitas dan SDM baik sebagai pelaksana (unsur Dewan Kelurahan dan RW) maupun dalam penyediaan lembaga kontrol (forum warga) - Memberikan asistensi teknis untuk pengembangan pengelolaan dana masyarakat - Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPMK di lapangan
	Pencapaian hasil	Seluruh Dewan Kelurahan DKI Jakarta Pusat telah memperoleh dana <i>blokgrant</i> masing-masing Rp250 juta rupiah. Jumlah dana <i>blokgrant</i> seluruhnya untuk wilayah Jakarta Pusat adalah Rp9.750.000.000,- Dari jumlah tersebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp9.603.750.000 dan untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) Dewan Kelurahan sebesar Rp146.250.000,-. Jumlah pemanfaat 14.019 orang. Dana BLM disalurkan ke masyarakat dengan sistim dana bergulir (revolving fund). Sampai bulan Nopember 2002 tercatat pengembalian masyarakat dengan perincian angsuran pokok dan jasa sebesar Rp1.396.930.127,-, tunggakan sebesar Rp785.438.441,- dan yang terkumpul di rekening sebesar Rp492.468.888,-. Perguliran baru mencapai Rp777.392.870 dengan jumlah peminjam sebanyak 1.374 orang.
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Model ini bisa dikembangkan di propinsi lain
7.3	Nama upaya	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Pengusaha Mikro dan Sektor Informal di Jakarta
	Deskripsi upaya	LP3ES dan BKPAI mengadakan pelatihan manajemen pemasaran bagi pengusaha mikro dan sektor informal dengan harapan agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara lebih optimal.
	Penanggung jawab	LP3ES dan BKPAI
	Pelaksana	LP3ES dan BKPAI
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kemampuan manajerial pengusaha mikro dan sektor informal di Jakarta
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	200 pengusaha mikro dan sektor informal yang sudah terdaftar di Pemda DKI
	Pendanaan	Dana sebesar Rp125 juta berasal dari Pemda DKI sifatnya balas jasa
	Waktu pelaksanaan	1997
	Mekanisme pelaksanaan	LP3ES memberikan pelatihan secara formal yang dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok pelatihan berjumlah 40 orang. Lama pelatihan 3 hari. Materi pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembukuan - Membuat hubungan dengan penjual material - Perencanaan strategis usaha - Informasi tentang Perda DKI yang berkaitan dengan usaha mikro dan sektor informal serta koperasi
	Pencapaian hasil	Sejumlah 200 pengusaha mikro dan sektor informal (20% perempuan) telah mendapat pelatihan ini. Rekomendasi untuk pelatihan ini: <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha mikro dan sektor informal seharusnya diberi pelatihan dengan cara informal - Peserta pelatihan diupayakan untuk usaha yang sejenis atau tidak terlalu beragam jenis usahanya, sehingga memudahkan pembuatan <i>need assessment</i> pelatihan. - Pemerintah DKI seharusnya membuat perencanaan kebutuhan pelatihan yang berkesinambungan. - Lama pelatihan seharusnya 7 hari, sehingga pelatihan ini tidak sekedar memberi tahu tetapi juga melakukan kegiatan praktek
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan peserta pelatihan menjadi kebutuhan umum karena kebutuhan peserta sangat beragam. - Manfaat pelatihan tidak efektif karena yang datang bukan pengambil keputusan. - Durasi pelatihan terlalu pendek - Tingkat pendidikan peserta beragam.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
7.4	Nama upaya	Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Perempuan
	Deskripsi upaya	Di Kabupaten Subang, sebagian para lelaki pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah sehingga banyak pekerjaan pertaniannya dilakukan oleh buruh perempuan. Para buruh ini bekerja cukup intensif di lapangan dan ini membuat mereka memiliki banyak waktu luang. Untuk meningkatkan pendapatannya, LP3ES memberikan ketrampilan tambahan agar dapat memperoleh pendapatan lain di luar kegiatan menanam. .
	Penanggung jawab	LP3ES
	Pelaksana	LP3ES
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan dan kesadaran gender di antara buruh tani perempuan di Kabupaten Subang.
	Jenis kegiatan	Pelatihan ketrampilan berbisnis Pendampingan Pemberian dana penyertaan modal
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Subang)
	Sasaran	Buruh tani perempuan di daerah binaan proyek irigasi LP3ES. LP3ES menunjuk tokoh buruh tani perempuan untuk memilih buruh perempuan berkisar 20-30 orang untuk dikelompokkan
	Pendanaan	Rp400 juta, berasal dari Ford Foundation Indonesia yang bersifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	1996-1998

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Buruh tani perempuan yang terpilih berjumlah 240 orang dan dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Masing-masingnya mendapat pelatihan secara informal mengenai ketrampilan usaha dan penyadaran gender.</p> <p>Pelatihan ketrampilan usaha mencakup: dinamika kelompok, simpan pinjam dengan dana bergulir, pengenalan usaha yang bisa dikembangkan.</p> <p>Pelatihan penyadaran gender: Aspek pengetahuan gender, hak-hak perempuan, dan pengembangan diri.</p> <p>Dari 240 orang peserta pelatihan, 70 % diantaranya membentuk kelompok usaha (6 kelompok dengan masing-masing anggota berjumlah 20-25 orang). Ada kelompok usaha bersama seperti kelompok penyewaan tanah, ternak ayam (petelur dan pedaging). Ada kelompok usaha sejenis namun kegiatannya dilakukan oleh masing-masing anggota yaitu kelompok penjual telur asin. Masing-masing kelompok diberi dana penyertaan modal sebesar Rp40 juta rupiah yang dikembangkan secara bergulir (revolving fund).</p>
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Buruh tani sangat sukar untuk mengembangkan usaha. - Kurangnya tenaga fasilitator di lapangan yang memberikan dampingan.
	Status saat ini	Proyek tersebut telah selesai, namun di tingkat masyarakat kelompok usaha tersebut masih berjalan
	Potensi	
8. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi (LPPSE)		
8.1	Nama upaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kodya Jakarta Timur Tahun Anggaran 2001-2002
	Deskripsi upaya	<p>Latar belakang lahirnya PPMK ini, antara lain: adanya tuntutan masyarakat terhadap penerapan <i>Good Governance</i>, HAM, dan demokrasi; terjadinya krisis ekonomi dan moneter sehingga masyarakat perkotaan mengalami krisis berkepanjangan. Selain itu, Jakarta dilanda banjir yang cukup berat dan parah, maka Pemda mencari solusi untuk menanggulangi masalah yang diakibatkan oleh banjir, seperti banyaknya usaha mikro yang hancur karena peralatan dan barang dagangan yang hanyut. Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan agar usaha masyarakat dibangkitkan kembali secepatnya melalui PPMK sebagai bentuk pemberdayaan yang juga sekaligus ada unsur pertolongan daruratnya. Atas dasar itu, lahirlah Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang melandasi <i>good governance</i>, yakni demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Pendekatan tribina yang digunakan difokuskan kepada bidang ekonomi saja. Model pemberdayaan untuk menghadapi masalah banjir yang ditangani BPM DKI Jakarta melibatkan unsur-unsur terkait, yakni seluruh unit sektoral di Pemda DKI yang berkaitan dengan Pembinaan Masyarakat. Proyek ini mengalokasikan dana untuk BLM sebesar Rp15 milyar kepada 60 Kelurahan (di luar 5 Kelurahan <i>pilot project</i>), per kelurahan mendapatkan BLM Rp250 juta sesuai SK Gob. No. 42.</p> <p>Proyek yang digagas BAPEDA DKI Jakarta ini melibatkan 5 LSM rekomendasi World Bank, Perguruan Tinggi UI – Lab Sosio UI, serta seluruh unit sektoral di Pemda DKI yang berkaitan dengan Pembinaan Masyarakat. Dewan Kelurahan menjadi penanggung jawab pelaksanaan di tingkat Kelurahan. Hal ini ditetapkan setelah dilakukan berbagai pertimbangan kondisi Kelurahan yang ada di DKI Jakarta. (DK pembentukannya lebih demokratis dibanding lembaga-lembaga yang sudah ada).</p>

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	Pemda DKI Jakarta
	Pelaksana	Pendamping Lapangan LPPSE
	Instansi terkait	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kodya Jakarta Timur dan Dewan Kelurahan di 60 Kelurahan Jakarta Timur
	Tujuan upaya	Mempercepat usaha pertolongan bagi penanggulangan masalah ekonomi, perbaikan dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat kelurahan, serta kondisi sosial, sarana dan prasarana lingkungan, dalam rangka menghadapi krisis ekonomi dan moneter.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kelembagaan masyarakat melalui pelatihan dan asistensi serta konsultasi dengan pendampingan oleh Fasilitator Kelurahan (personil LPPSE) pada institusi kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan, antara lain: Dewan Kelurahan, Unit Pengelola Keuangan (UPK-DK), dan Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat RW. - Pelatihan Pembukuan/Administrasi Keuangan untuk UPK dan TPK-RW. - Pelatihan Forum Warga (sebagai Pelaksana Pengawas di tingkat RW) - Pendampingan pembuatan proposal dari kegiatan komponen bidang sosial dan fisik lingkungan. - Pemanfaatan dana bergulir sebagai implementasi bidang ekonomi. - Pendampingan untuk mengidentifikasikan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama masyarakat.
	Wilayah pelaksanaan	<p><u>Tahun 2001</u> Lima kelurahan pilot proyek di Kodya Jakarta Timur yaitu Kelurahan Kelender, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kayu Manis, dan Palmeriam.</p> <p><u>Tahun 2002</u> 60 Kelurahan di Kodya Jakarta Timur</p>
	Sasaran	<p><u>Tahun 2001:</u> Seluruh masyarakat yang berdomisili di kelurahan program atau ber-KTP DKI Jakarta. Diprioritaskan kepada mereka yang memiliki usaha dan masih berjalan, khususnya usaha mikro, dan kepada usaha kecil/menengah yang dapat menyerap tenaga kerja baru dari lingkungannya.</p> <p><u>Tahun 2002:</u> Masyarakat miskin (KS dan Pra KS) pada umumnya dan masyarakat korban banjir tahun 2002.</p> <p>Cara menjaring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertama-tama dilakukan sosialisasi dan identifikasi di tingkat RW. - Selanjutnya mereka diminta untuk mengisi/membuat proposal sesuai dengan format serta melampirkan persyaratan yang diminta antara lain fotokopi KTP, KK bagi usaha mikro dan bagi usaha kecil menengah, mengingat jumlah pinjaman yang cukup besar. Persyaratan lainnya, yaitu: memiliki NPWP, SIUP, serta jaminan pinjaman. - Seluruh kelengkapan tersebut ini akan menjadi data atau masukan bagi proses evaluasi. - Selain itu mereka juga harus mendapat rekomendasi dari RT/RW setempat sebagai dasar <i>cross check</i> atau koordinasi dengan lembaga-lembaga sebelumnya yang pernah memberikan pinjaman seperti BKM/P2KP, JPS/PDMDKE, apakah pihak yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman atau tunggakan yang belum lunas/tidak. Bagi yang mempunyai tunggakan, pinjaman baru tidak akan diberikan sebelum mereka melunasi pinjaman lama.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	<p>Pilot Project ini mengalokasikan dana untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp50 milyar kepada 25 Kelurahan (5 Kelurahan per Wilayah Kota).</p> <p>Total pendanaan untuk 5 kelurahan sebesar Rp10.000.000.000 (Rp2 milyar masing-masing kelurahan) Setiap kelurahan menetapkan 50% untuk dana bergulir yaitu Rp1 milyar, dan 50% untuk komponen kegiatan fisik lingkungan serta komponen kegiatan sosial. Dana bersumber dari APBD dan dialokasikan dalam dua tahap, yaitu pada T.A 2001 (50%) dan TA 2002 (50%) dengan menggunakan model DIPDAL. Sifat dananya adalah BLM dan merupakan hibah kepada masyarakat kelurahan bersangkutan untuk dikelola dan dijadikan masukan bagi investasi yang berkelanjutan. Pola penyampaiannya melalui proposal yang sebelumnya dibuat oleh Dewan Kelurahan (DK) melalui hasil musyawarah dan penyerahan dana melalui pengajuan kepada BAPEKO. Selanjutnya, dana tersebut ditagih kepada Kas Daerah dan ditransfer melalui rekening Dewan Kelurahan dengan syarat yaitu penarikannya menggunakan cek/ giro yang ditandatangani oleh 3 di antara 5 anggota DK yang ditetapkan bersama melalui musyawarah dan termuat dalam Berita Acara.</p> <p>Untuk APBD T.A 2002, jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000.</p>
	Waktu pelaksanaan	<p>Tahap I Mei-Desember 2001 Tahap II Maret -Desember 2002</p>
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat Propinsi, Kotamadya, Kelurahan, sampai tingkat RW. - Penyiapan dan pembentukan institusi perangkat pelaksana yang dibutuhkan dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat RW sampai tingkat Kelurahan. Untuk tingkat RW pembentukan TPK RW dan Forum Warga (FORWA-RW), anggotanya adalah perwakilan dari masing-masing RT dan terdiri dari 2 orang yang telah disepakati melalui musyawarah RT, yaitu laki-laki dan perempuan. - Melakukan identifikasi permasalahan dan prioritas kegiatan pada forum musyawarah di tingkat RW yang difasilitasi oleh Ketua RW dan anggota DK dari RW bersangkutan, dengan dihadiri oleh Pengurus RRT, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan wilayahnya. Berdasarkan hasil forum tersebut, warga mengajukan usulan kegiatan kepada pelaksana di tingkat RW (TPK RW). - Usulan warga hasil musyawarah diajukan oleh KOMAT yang telah di tunjuk pada musyawarah, dikoreksi/diseleksi/direkomendasi/diketahui oleh RW dan diteruskan/diajukan oleh TPK-RW kepada pelaksana di tingkat kelurahan (UPK-DK). - Usulan tersebut diteliti oleh tim seleksi di tingkat kelurahan yang anggotanya terdiri dari DK (per bidang usulan) dengan melibatkan unsur Aparat Kelurahan (LURAH) dan LSM pendamping diwakili FAKEL, serta dibantu oleh tenaga ahli Technical Assistant. - Usulan yang disetujui diajukan ke pimpro di BAPEKO Kodya Jakarta Timur, untuk selanjutnya dikoreksi, baik kelayakan, kriteria maupun persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam pedoman (JUKLAK). Setelah itu dibuat surat pengantar untuk diajukan penagihan ke Kas Daerah oleh Dewan Kelurahan. - Dewan Kelurahan menunggu hasil transfer dana melalui rekening Bank DKI. DK dapat melakukan konfirmasi kepada Bank DKI jika dana tersebut sudah masuk atau belum. Proses ini biasanya memakan waktu 3-5 hari. Secara simultan DK juga membuat persiapan-persiapan berkenaan dengan pencairan dana kepada masyarakat.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pencairan dana kepada masyarakat dilakukan setelah dipastikan dana tersedia di Rekening Koran. Sebelumnya, DK membuat rencana pencairan dengan melihat pada faktor-faktor kelengkapan administratif TPK RW dalam memberikan pelayanan kepada pemanfaat. Di samping itu, TPK RW (atau DK?) membuat jadwal pencairan untuk masing-masing kegiatan, perjanjian akad kredit, nama-nama peminjam dari lokasi bersangkutan (bidang ekonomi), rencana pelaksanaan kegiatan (bidang fisik serta sosial), waktu penyerahan dan tempat penyerahan, jumlah dana yang harus disiapkan, serta teknis penyerahan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik keamanan maupun resiko lainnya. - Pengembalian dana pinjaman bergulir dari warga ke UPK-DK, melalui TPK RW sebagai juru tagih, yang disetor setiap bulan setelah <i>grace period</i> 1 bulan. - Lama pinjaman rata-rata 10 bulan (10 kali angsur) dengan perhitungan jasa 1% untuk usaha mikro, 1,5% untuk usaha kecil dan menengah, secara tetap. - Penguliran dana tahap ke-2 dan selanjutnya dilakukan dengan mekanisme yang sama. - Laporan seluruh kegiatan pada masing-masing tingkatan RW oleh TPK RW diserahkan kepada Dewan Kelurahan. DK melaporkan seluruh kegiatan, baik kegiatan bulanan maupun progres kegiatan yang juga menyangkut masalah keuangan. Semua tertuang pada format yang telah disediakan, seperti Neraca, R/L, Daftar Pemanfaat dan Penerima Dana, serta Laporan Kegiatan Fisik atau Sosial disertai bukti-bukti pengeluaran uang dan pembelian material atau barang.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima manfaat tahun 2001 dan 2002 adalah sebanyak 2.500 orang pemanfaat yang 40 % pemanfaatnya kaum perempuan. - Total aset secara keseluruhan tahun 2002-2003 mencapai Rp10 milyar lebih (karena mereka memiliki alokasi cadangan modal dari penyisihan jasa yang diterima). - Kelurahan Kelender telah memiliki BLK yang dikelola sendiri untuk kegiatan Komputer (10 unit), menjahit (mesin jahit 10 unit), dan stir mobil (3 unit mobil). - Kelurahan Kampung Melayu dan Kebon Manggis memiliki HT untuk para RW/DK sebagai alat bantu koordinasi keamanan lingkungan. - Kebon Manggis telah melengkapi peralatan kesenian Betawi, yaitu alat-alat Kesenian Marawis di setiap RW. - Dana bergulir terus berjalan untuk pengelolaannya. - Telah ada perangkat komputer di masing-masing kantor DK. <p>Jumlah penerima manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2002 sejumlah 17.375 orang pemanfaat - Jumlah Kredit (Dana Bergulir) Rp14.000.000.000,- - Memasuki tahun kedua akumulasi omzet mencapai Rp17.000.000,
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pelaksana di tingkat kelurahan RW memiliki tingkat kemampuan yang masih minim (potensinya tidak nampak), sehingga perlu pendampingan lebih intensif dalam pengelolaan organisasi. dan pengelolaan keuangan. - Kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengelola dana Rp1 milyar atau lebih. - Perda No. 5/2000 yang mengatur Organisasi Dewan Kelurahan mengundang banyak polemik sehingga posisi DK dilematis dalam pelaksanaan PPMK. - Aturan main yang belum tersusun secara rinci dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap masyarakat kelurahan yang belum jelas. - Masa tugas dan mekanisme pengesahan perangkat organisasi harus berkaitan dengan program yang melalui SK Gubernur. Maka seluruh aktifitas selalu harus ada dasar hukumnya, jika tidak, ada saja pihak-pihak yang mempertanyakan, baik dari masyarakat maupun dari pihak oknum aparat birokrat. Hal ini mematikan potensi kreatifitas tingkat masyarakat lokal, atau bahkan membuat masyarakat selalu berada dalam keraguan dalam melaksanakan kegiatan.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Program ini sebenarnya telah selesai, namun dilanjutkan kembali secara berkala sampai tahun 2007, karena merupakan program strategis bagi DKI Jakarta. Setiap tahun dilakukan monitoring pemantauan dan evaluasi oleh BAPEDA. Tidak ada penambahan dana.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan melalui dana bergulir yang dapat diakses lebih dekat oleh masyarakat. Dana bergulir ini dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan dengan membangun kelembagaan yang mengarah kepada institusi formal yang dikelola secara profesional serta mudah menjalin jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan formal seperti Bank. - Berpotensi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam partisipasi secara aktif dalam pengembangan usaha atau pengelolaan kelembagaan keuangan tersebut. - Meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dengan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat berstatus sosial menengah atas untuk turut berpartisipasi . - Dapat tertanggulangnya persoalan-persoalan kecil tingkat masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, dan mengurangi peran pemerintah dalam teknis operasional kegiatan yang tidak membutuhkan teknologi tinggi/canggih, seperti pembuatan taman, jalan setapak, saluran air buangan rumah tangga, pelatihan dasar keterampilan komputer, jahit menjahit tingkat dasar, dll. - Berpotensi dalam menata lingkungan yang sesuai dengan kondisi lahan yang ada.
8.2	Nama upaya	Community Base Development Dealing with Economic Crisis (CBEC) tahun 1998-2000
	Deskripsi upaya	Lahirnya CBEC dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap penerapan HAM dan demokrasi, serta terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan masyarakat perkotaan mengalami krisis berkepanjangan. Selain itu, kegiatan ini lahir karena gagalnya program JPS yang merupakan inisiatif BAPENAS dan World Bank di antaranya adalah PDMDKE. Ketika itu, kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan kritikan tajam. Karena adanya sisa pinjaman yang disebabkan oleh meningkatnya apresiasi dolar, maka sebagian Anggaran Pemerintah melalui APBN dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan model pendekatan yang sesuai dengan kondisi Jakarta, sekaligus mengikutsertakan LSM. LPPSE termasuk LSM yang direkomendasikan World Bank dari 6 LSM di samping 1 perguruan Tinggi (UI).
	Penanggung jawab	Pemda DKI Jakarta
	Pelaksana	Pendamping Lapangan LPPSE
	Instansi terkait	BAPEDA DKI Jakarta
	Tujuan upaya	Mempercepat usaha pertolongan untuk penanggulangan masalah ekonomi, perbaikan dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat kelurahan, serta kondisi sosial, sarana dan prasarana, dalam rangka menghadapi krisis ekonomi dan moneter.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kelembagaan masyarakat melalui pelatihan, asistensi dan konsultasi dengan pendampingan oleh Fasilitator Kelurahan (personil LPPSE), bagi institusi kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan, antara lain: Karang Taruna, Unit Pemberdayaan Masyarakat (UPM) di tingkat RW. - Pelatihan Pembukuan/Administrasi Keuangan untuk UPM. - Pelatihan Pengembangan Usaha Kecil. - Pendampingan pembuatan proposal dari kegiatan komponen bidang sosial, dan fisik lingkungan. - Pemanfaatan dana bergulir sebagai implementasi bidang ekonomi. - Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
	Wilayah pelaksanaan	Sebanyak 3 Kelurahan di Kodya Jakarta Barat pada tahun 1998.
	Sasaran	Masyarakat miskin (KS dan Pra KS) pada umumnya dan masyarakat di RW Kumuh setelah dilakukan identifikasi.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Rp200.000.000,- rata-rata per kelurahan. Sumber dana: APBN (pinjaman)
	Waktu pelaksanaan	Mei -Desember 1998-2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi. - Identifikasi RW Kumuh, dan merekrut kader lokal di tingkat RW. - Pembentukan institusi pelaksana. - Warga mengajukan usulan kegiatan kepada pelaksana di tingkat RW. - Usulan warga diseleksi LSM Pendamping dan UPM dan diteruskan kepada LSM yang terseleksi dan Lurah beserta LKMD di tingkat kelurahan . - Usulan warga diteliti oleh tim LSM yang terseleksi di tingkat kelurahan dengan melibatkan Lurah dan LKMD . - Usulan yang disetujui oleh LSM yang terseleksi dipantau oleh U.I - Pencairan dana kepada masyarakat pemanfaat melalui UPM RW. - Pengembalian dana pinjaman bergulir dari warga ke UPM RW. - Penguliran dana tahap ke-2 dan seterusnya dilakukan di tingkat RW.
	Pencapaian hasil	<p>Jumlah penerima manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1998 tercapai 150 orang pemanfaat di tiga kelurahan. - Jumlah Kredit (Dana Bergulir) Rp200.000.000,-
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - SDM pelaksana di tingkat RW memiliki tingkat kemampuan yang masih minim (potensinya tidak nampak), sehingga perlu pendampingan lebih intensif untuk pengelolaan keuangan. - Tidak memiliki fasilitas kerja yang memadai, seperti peralatan dan perlengkapan kantor. - Aturan main yang belum tersusun secara rinci atau belum adanya AD/ART seluruh perangkat kerja PPMK. - Unit penanggung jawab pembinaan lanjutan tidak jelas.
	Status saat ini	Program sudah selesai, tetapi di tingkat masyarakat tidak diketahui kelanjutannya, hanya dilakukan pemantauan informal oleh LSM
	Potensi	Berpotensi dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan.
9. Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM)		
9.1	Nama upaya	Pemulihan Keberdayaan Masyarakat
	Deskripsi upaya	<p>Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mempertinggi kemampuan masyarakat yang rentan akibat krisis sosial-ekonomi yang sedang berlangsung, dengan menyalurkan berbagai sumber daya untuk mendukung LSM dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakan program jaring pengaman sosial.</p> <p>Program ini didukung secara teknis dan keuangan oleh lembaga donor multilateral dan bilateral, termasuk Bank Dunia, UNDP, CIDA, DFID, sektor swasta dan pemerintah Indonesia. Dana PKM ditampung dalam sebuah dana perwalian (Trust Fund) yang dikelola oleh UNDP.</p> <p>PKM dibentuk oleh konsorsium yang beranggotakan 27 organisasi di Indonesia, termasuk LSM, forum, jaringan dan asosiasi. Konsorsium berfungsi untuk memantau perkembangan dan perumusan kebijakan program bersama Dewan Pengarah Nasional (DPN).</p> <p>PKM diarahkan oleh Dewan Pengarah Nasional (DPN) yang beranggotakan 12 orang wakil-wakil masyarakat sipil Indonesia, tiga di antaranya berasal dari pemerintah (Bappenas, Departemen Keuangan dan Sekretariat Kabinet). Dewan Pengarah Nasional mengadakan pertemuan secara teratur untuk menyetujui proyek-proyek yang dibantu, memonitor perkembangan program, menyetujui perubahan kebijakan dan anggaran proyek, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan program.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	PKM
	Pelaksana	PKM bersama LSM dan KSM terpilih
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Peningkatan kapasitas kelompok rentan dalam masyarakat yang paling terkena dampak krisis sosial dan ekonomi di Indonesia.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dana kepada LSM dan KSM untuk kegiatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga. - Monitoring kegiatan yang disetujui.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Masyarakat miskin yang paling parah terkena dampak krisis dengan penekanan pada perempuan dan anak-anak yang beresiko tinggi, masyarakat yang lahannya terkena kekeringan atau kebakaran hutan, dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki lahan pertanian. Kegiatan yang dijalankan oleh LSM atau KSM untuk kelompok tersebut sebelumnya diajukan ke PKM.
	Pendanaan	Fase I: US\$28 juta, berasal dari DFID, Belanda, Swedia, NZ dan UNDP.
	Waktu pelaksanaan	1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - LSM atau KSM mengirim proposal ke PKM. - Proposal diperiksa (<i>review</i>) dan diseleksi oleh DPN. - DPN kemudian memberikan proposal tersebut kepada tim penilai (<i>appraisal</i>) - Sebelum proposal direkomendasi oleh tim penilai, tim ini mengunjungi daerah calon proyek. - Setelah itu, tim penilai memberi rekomendasi kepada DPN, untuk menyetujui atau tidak menyetujui proposal tersebut. - Setelah proposal LSM disetujui oleh DPN, PKM lalu membuat kontrak antara PKM dengan LSM/KSM dan mengirimkannya kepada Dana Perwalian UNDP. - Dana Perwalian kemudian mengirim/mentransfer dana proyek ke LSM/KSM yang bersangkutan. <p>Selama kegiatan proyek, PKM melakukan monitoring secara berkala, yaitu setelah menerima laporan dari setiap tahapan pelaksanaan proyek (tiga kali selama masa berlaku proyek).</p>
	Pencapaian hasil	Sejak tahun 1998 hingga sekarang, terdapat 1.960 LSM/KSM yang telah menerima dana.
	Masalah	Kapasitas pelaksana proyek di tingkat KSM/LSM masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Sangat berpotensi membantu usaha pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, karena menggunakan pendekatan partisipatif.
10. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)		
10.1	Nama upaya	Baithul Maal Wat Tamwil (BMT)
	Deskripsi upaya	Fakta menunjukkan bahwa 93 % struktur ekonomi Indonesia diwarnai oleh kesulitan modal yang dialami oleh UKM. Oleh karena itu PINBUK terpanggil untuk mengembangkan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang disingkat dengan BMT, yang juga merupakan padanan nama dari Baithul Maal Wat Tamwil, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan BMT terdiri atas Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Kegiatan Baitut Tamwil berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi melalui kegiatan menabung dan menyediakan dana bantuan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Baitul Maal dimaksudkan sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam UU NO. 29/1999. Lembaga ini menerima titipan zakat, infaq, sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi Islam. Saat ini PINBUK telah mengembangkan 3037 BMT dengan total aset 300 miliar. BMT tersebar di 150 kabupaten/kota di hampir seluruh propinsi di Indonesia.
	Penanggung jawab	PINBUK

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	BMT dan dampingan
	Instansi terkait	Departemen Transmigrasi, Departemen Koperasi, Departemen Sosial, Deperindag, Depnaker dan Pemda - Pemda di mana PINBUK berada.
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendampingan dan fasilitasi kegiatan usaha ekonomi produktif. - Menyediakan layanan keuangan bagi UKM yang selama ini kurang mendapat perhatian dari perbankan. - Mengembangkan swadaya masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menggunakan pendekatan kemitraan dan pendampingan antara kelompok yang saling membutuhkan . - Memberantas praktek-praktek eksploitatif para rentenir/pelepas uang.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Kredit - Pendampingan - Simpan pinjam
	Wilayah pelaksanaan	<p>Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.</p> <p>Tahun 2003 telah dilaksanakan di 150 Kabupaten/kota, lebih tinggi dibanding dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 dilaksanakan di 145 kabupaten/kota, tahun 2001 di 142 kabupaten/kota, tahun 2000 di 135 kabupaten/kota, tahun 1999 di 120 kabupaten/kota, tahun 1998 di 90 kabupaten/kota dan tahun 1997 di 60 kabupaten/kota..</p>
	Sasaran	<p>Sasaran penerima BMT adalah : pedagang kecil, pengusaha kecil, pengrajin, petani dan peternak. Peserta BMT terdiri atas dua kelompok . Kelompok <i>pertama adalah</i> para pemodal awal yang memelopori BMT. Mereka dijaring melalui survey, sosialisasi dan identifikasi peserta. Kriterianya adalah masyarakat lokal yang berjumlah 20 orang dan mampu serta bersedia menanamkan modal pendirian BMT. Kelompok <i>kedua adalah</i> anggota biasa yang ikut bergabung. Cara menjaringnya melalui kegiatan sosialisasi BMT dan fasilitas yang dimilikinya. Kriterianya antara lain : bersedia mengisi formulir pendaftaran dan membayar simpanan pokok dan sukarela. Banyak diantaranya yang telah memiliki usaha sebelum bergabung dengan BMT.</p>
	Pendanaan	<p>Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dana saat ini (2003) telah mencapai jumlah tertinggi yakni sebesar Rp800 miliar belum termasuk nilai aset sebesar Rp300 miliar yang tersebar di 3037 BMT. Tahun 2002, total nilai dana hanya mencapai 97% dari total tahun 2003, tahun 2001 sebesar 95%, tahun 2000 sebesar 90%, tahun 1999 sebesar 80%, tahun 1998 sebesar 70% dan tahun 1997 sebesar 60%. Dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan bersifat saham. Modal awal masing-masing MBT berkisar dari Rp10 – 25 juta.</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1995-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Motivator (pendamping dari PINBUK dan masyarakat) akan memprakarsai penyelenggaraan musyawarah anggota masyarakat, lalu membentuk panitia persiapan berdirinya BMT. Jumlah anggota minimal 20 orang di setiap BMT dengan modal awal sebesar Rp10 - 25 juta. Selain itu motivator (BMT) juga akan bertugas mencari tambahan modal awal, menentukan pengurus dan calon pengelola, memberikan pelatihan dan kesempatan magang, mengelola dan mengembangkan aset serta secara berkala menginformasikan setiap perkembangan kepada PINBUK. Sedangkan <i>mekanisme pengelolaannya tidak berbeda dengan</i> BMT lainnya yaitu dengan sistem bagi hasil. Uji kelayakan usaha dan analisa usaha oleh BMT akan menentukan jumlah pinjaman dan prosentase bagi hasilnya. Jumlahnya pun sangat variatif tergantung pada usaha yang bersangkutan</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Total asset saat ini telah mencapai Rp800 miliar dan dengan jumlah BMT 3037 serta jumlah dampingan 468 ribu unit tersebar di berbagai wilayah Enem puluh tiga BMT telah memiliki asset di atas Rp1 miliar seperti (Aceh 2m, Sumut 1m, Sumbar 1m Riau 2m, Jambi 1m, Sumsel 1m, Lampung 1m, Jakarta 5m, Jabar 7m, Jateng 15 m, Yogyakarta 3m, Jatim 5m, Bali 1m, Kaltim 2m, Kalsel 3m, Sulteng 2m, Sulsel 10m, dan NTB 1m). - Tingkat pengembalian 90 %.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya <i>rush</i> di masa – masa tertentu terutama menjelang hari raya. Pembentukan asosiasi BMT adalah jalan keluar yang terbaik di mana BMT dapat saling membantu bila terjadi <i>rush</i>. - Keretakan hubungan antara pengurus dan pengelola.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi koperasi karena banyak di antara BMT yang beraset melampaui Rp50 juta dan banyak juga yang sudah diatas 50 juta. - Menjadi BPR (saat ini sudah ada 1 BMT yang menjadi BPR yaitu di Sopeng Sulawesi Selatan, dengan nama BPR Syariah Al Ikhtihaj dengan aset Rp23 miliar)
11. Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW)		
11.1	Nama upaya	Program Kredit Mikro PPSW
	Definisi upaya	<p>Pusat Pengembangan Sumber daya Sumber daya Wanita (PPSW) berdiri tahun 1986 dan bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar ikut serta menciptakan tatanan sosial masyarakat yang lebih adil.</p> <p>Pengembangan ekonomi merupakan salah satu pintu masuk untuk mencapai tujuan tersebut, karena kelompok sasaran PPSW adalah masyarakat dari strata ekonomi sosial rendah dalam masyarakat. Dengan demikian program kredit mikro PPSW menjadi alternatif upaya pemberdayaan perempuan.</p>
	Penanggung jawab	PPSW
	Pelaksana	PPSW, Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun dan mengembangkan dana simpanan masyarakat dalam rangka pemupukan modal sendiri; - Mendorong dan mengarahkan masyarakat khususnya perempuan untuk mengembangkan usaha; - Mendampingi kelompok dan anggotanya untuk meningkatkan potensi dan rasa percaya diri yang dimiliki; - Mendampingi anggota dan pengurus kelompok dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekitarnya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin; - Membantu kelompok dan koperasi serta anggotanya mengatasi kekurangan modal dalam memulai dan mengembangkan usaha - Membuka akses terhadap kredit dan sumber daya lainnya bagi perempuan.
	Jenis kegiatan	<p><u>Simpan pinjam</u> Jenis kredit yang disalurkan kepada anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit usaha untuk modal kerja dan investasi - Kredit non-usaha diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan <p>Kredit yang diberikan PPSW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit komersial - Kredit darurat untuk mengatasi krisis <p><u>Pelatihan</u> Pelatihan pembukuan, cash flow, manajemen pemasaran, usaha kecil, dsb</p> <p><u>Pendampingan</u></p>

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta, Banten (Pandeglang), Jawa Barat (Sukabumi, Karawang, dan Cianjur), Kalimantan Barat (Pontianak), Riau (Rokan Hilir).
	Sasaran	<p>Program kredit mikro dilaksanakan pada dua tingkat yaitu di tingkat kelompok dan di tingkat PPSW.</p> <p><u>Sasaran di tingkat kelompok:</u> Masyarakat akar rumput (grassroot) khususnya perempuan yang tergabung dalam kelompok dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan sosial ekonomi , berada dibawah garis kemiskinan - Berada pada usia produktif (15-60 tahun) <p><u>Sasaran di tingkat PPSW:</u> Kelompok dampingan PPSW dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah berdiri selama 6 bulan - Memiliki kegiatan simpan pinjam - Kredit dipergunakan untuk memenuhi kredit anggotanya dan pengembangan usaha kelompok - Kelompok menggunakan sistem tanggung renteng
	Pendanaan	<p>Modal kredit mikro di tingkat kelompok berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan anggota - Pendapatan kelompok dari bunga kredit - Pinjaman dana bergulir dari PPSW - Pinjaman dari luar <p>Modal program ini berasal dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga donor (Funding agency) - Pendapatan yang berasal dari bunga dan provisi kredit - Pinjaman lembaga keuangan formal - Pinjaman dari lembaga lain (inter lending)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1986-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Di tingkat kelompok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pinjaman dari kelompok ke anggotanya bervariasi tergantung kesepakatan masing-masing kelompok. Jasa kredit dibedakan menurut usaha dan non usaha secara umum dengan kisaran jasa dikelompokkan antara 2,5%-5% per bulan - Jangka waktu pinjaman berkisar 3-12 bulan <p><u>Di tingkat PPSW</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit komersial sebesar 18% tetap pertahun atau 1,5% tetap perbulan - Kredit darurat adalah tanpa bunga. - Jangka waktu kredit mikro berkisar antara 3-10 bulan, tergantung kemampuan masing-masing peminjam
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya wadah atau organisasi untuk menghimpun dan mengembangkan dana simpan pinjam masyarakat, yaitu berupa 1 koperasi sekunder, 20 koperasi primer, dan 177 kelompok yang tersebar di 13 kabupaten/kota di 5 provinsi - Meningkatnya jumlah perempuan pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 30% - Berkembangnya usaha yang dikelola perempuan dengan meningkatnya modal, omzet dan keuntungan usaha - Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya - Meningkatnya kesadaran kritis dan rasa percaya diri perempuan karena bertambahnya pengetahuan dan keterampilan - Meningkatnya kontribusi kelompok atau organisasi perempuan dalam penanganan masalah di wilayahnya seperti masalah pengangguran - Tingkat pengangguran menurun dan apresiasi terhadap kelompok dan anggotanya dari masyarakat dan institusi lain di luar lingkup PPSW terus meningkat - Pemupukan modal swadaya kelompok per Oktober 2003 sebesar Rp1.845.684.687 dan jumlah yang dipinjamkan kepada anggota mencapai Rp6.523.571.228.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kendala dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di PPSW maupun di masyarakat (kelompok dan koperasi) - Kurangnya kapasitas pendamping lapangan PPSW untuk perempuan pengusaha, terutama terkait dengan isu ekonomi - Masih perlunya optimalisasi pendamping dan kader dalam pengembangan kewirausahaan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengembangkan lembaga keuangan alternatif untuk perempuan - Lembaga tersebut dapat menjadi <i>pressure group</i> dalam menyuarakan kepentingan perempuan - Lembaga tersebut bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayahnya seperti masalah pengangguran
12. YDBP (Yayasan Dharma Bakti Parasahabat)		
12.1	Nama upaya	Penyediaan Modal Kerja untuk Usaha Mikro
	Deskripsi upaya	Upaya penyediaan modal dari YDBP (berdiri pada 21 April 1999 oleh TB.Rachmat, B.Subianto, dan Palgunadi T.Setiawan) dengan menggunakan metode Grameen Bank Micro Financing –sebuah metode kredit mikro yang pertama kali diterapkan di Bangladesh pada tahun 1976.
	Penanggung jawab	YDBP (Yayasan Dharma Bakti Parasahabat)
	Pelaksana	YDBP (Yayasan Dharma Bakti Parasahabat)
	Instansi terkait	Grameen Trust, Cashpoor, BI, dan beberapa bank
	Tujuan upaya	<p>Tujuan umum : meningkatkan taraf hidup masyarakat pra sejahtera yang memiliki keinginan dan kemampuan utk bekerja keras guna meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>Tujuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan taraf hidup masyarakat pra sejahtera dengan memfasilitasi kegiatan usaha mikro masyarakat - menjadi lembaga keuangan yg mandiri dan dapat beroperasi secara berkesinambungan; - menjadi grameen bank replika terbaik di Indonesia
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pinjaman modal kerja kepada wanita pengusaha mikro - Mengadakan pembinaan tentang kemandirian usaha (materi lainnya: kebersihan lingkungan, kesehatan keluarga, dan kerohanian)
	Wilayah pelaksanaan	<p>11 Kabupaten yang terdiri dari 5 kabupaten di Jawa Barat dan 6 kabupaten di Jawa Tengah.</p> <p>Di Jawa Barat terdapat 18 cabang pelayanan, yaitu: Bungin, Sukatani, Cikarang, Pebayuran, Jonggol (Bekasi), Batu Jaya, Pedes, Cilamaya (Karawang), Ciomas (Bogor), Cicurug, Cisaat (Sukabumi), Ciamis, Pangandaran, Parigi (Ciamis), Anjawinangun, Babakan, Cileduk, Losari (Cirebon).</p> <p>Di Jawa Tengah terdapat 6 cabang pelayanan, yaitu: Adiwerna (Tegal), Wonopringgo (Pekalongan), Kroya (Cilacap), Mandireja (Banjarnegara), Sokaraja (Banyumas), Cilongok (Tegal).</p> <p>Pemilihan lokasi didasarkan pada data BPS dan BKKBN, yaitu daerah yang mempunyai banyak keluarga prasejahtera dan sekitar 20% keluarga mempunyai kegiatan ekonomi produktif</p>

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Peminjam adalah wanita pedesaan yang tergolong keluarga pra sejahtera dan memiliki usaha mikro, baik diusahakan sendiri maupun oleh suaminya (memiliki cashflow harian: pedagang, pengusaha <i>home industry</i>, penyedia jasa, dan nelayan)</p> <p>Cara menjangkau sasaran : YDBP mengundang masyarakat dan membuka pendaftaran anggota melalui pertemuan umum yang biasanya dilakukan di kantor kelurahan atau desa. Kemudian akan dilakukan uji kelayakan sesuai kriteria yang ditentukan yaitu didasarkan pada perhitungan indeks tanah, indeks rumah, indeks harta, indeks penghasilan, dengan variabel yang sudah ditentukan.</p>
	Pendanaan	<p>Bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grameen Trust sebesar US\$ 100.000 (Nopember 2001), pinjaman dengan bunga tetap 2% per tahun - Cashpoor sebesar US\$ 100.000 (Agustus 2002), pinjaman dengan bunga tetap 15% per tahun yang bisa menjadi hibah bila memenuhi ketentuan tertentu - BNI utk program Kukesra Mandiri BKKBN Rp11 milyar yang saat ini tinggal Rp3 M, pinjaman dengan bunga 15% per tahun - Pinjaman komersil dari beberapa bank (Bank Mega, Bank Tugu, BII), namun masih dalam proses
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Prinsip dan syarat pinjaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wanita pengusaha mikro - Pinjaman diberikan untuk kegiatan produktif - Tanpa jaminan dengan prosedur yang sederhana - Jumlah pinjaman: pertama Rp500.000 (sejak thn 2003, sebelumnya lebih kecil), kedua Rp750.000, ketiga Rp1 juta, keempat Rp1,5 juta, dan kelima Rp2 juta - Jangka waktu pinjaman setahun dan diangsur setiap minggu (selama 48 minggu) - Biaya administrasi atau bunga 2,5% per bulan - Peminjam diorganisasikan dalam kelompok yang terdiri dari lima anggota/peminjam - Sistem pencairan 2-2-1 (satu kelompok terdiri dari 5 orang 2 orang diantaranya menjadipeminjam pertama). Setelah dilakukan pembayaran angsuran pertama, 2 anggota lain bisa langsung meminjam, kemudian ketika peminjam kedua berikutnya mengangsur maka satu anggota terakhir bisa meminjam. - Transparan dan tanggung gugat (transparent and accountable) - Disiplin dan pengawasan kredit yang ketat - Jika ada anggota yang meninggal dunia, pinjaman anggota tersebut dihapuskan. <p>Setiap minggu diadakan rebug pusat bersama (4 – 8 kelompok) dengan agenda pencairan pinjaman, pengajuan pinjaman, tabungan, pembinaan, dsb.</p> <p>Tabungan anggota terdiri dari empat jenis: tabungan wajib (Rp 1.000 per hari selama 5 hari pada awal pembentukan kelompok), tabungan wajib 5% dari jumlah pinjaman, tabungan mingguan Rp 1.000 per minggu, dan tabungan sukarela. Tabungan tersebut dikelola oleh YDBP. Disamping itu, di masing-masing kelompok terdapat tabungan swadaya yang dikelola oleh mereka sendiri yang dimaksudkan untuk membayar dahulu tunggakan cicilan pinjaman anggota.</p>
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Per Juli 2003 telah terdaftar 41.000 anggota yang tergabung dalam ± 8.200 kelompok, - Per Juni 2003, akumulasi pinjaman mencapai Rp 32.445 milyar, dana pinjaman yang beredar Rp 13.522 milyar, dan jumlah dana yang dihimpun dari tabungan anggota Rp 3.690 milyar - Akuisisi BPR untuk kepentingan kelembagaan dan akses ke Bank telah dimulai di Cirebon..

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Keterbatasan kapasitas petugas lapangan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan usaha anggota, - Meningkatkan kedudukan perempuan dalam keluarga - Kaum perempuan lebih tegas dalam mengemukakan pendapat, khususnya dalam kegiatan kelompok
13 Yayasan Mitra Usaha		
13.1.	Nama upaya	Replikasi Grameen Bank (Mitra Usaha Mandiri)
	Deskripsi upaya	Program Replikasi Grameen Bank (Mitra Usaha Mandiri) adalah program pengembangan institusi keuangan masyarakat khususnya perempuan miskin dengan sistem Grameen Bank. Melalui program ini setiap wilayah dampingan Yayasan Mitra Usaha (YMU) diorganisir dalam wadah lembaga replikasi Grameen Bank yang dinamakan Mitra Usaha Mandiri (MUM). Pendirian MUM adalah sebagai alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin khususnya perempuan dalam mengakses dana/modal usaha yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Sebagian besar saham lembaga MUM ini akan menjadi milik nasabah/anggota.
	Penanggung jawab	Yayasan Mitra Usaha
	Pelaksana	Mitra Usaha Mandiri di masing-masing wilayah dampingan YMU
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<p><u>Tujuan umum</u> Memberdayakan perempuan miskin</p> <p><u>Tujuan khusus</u> Meningkatkan akses dan pelayanan permodalan bagi perempuan miskin melalui wadah/institusi keuangan yang akan dimiliki bersama dengan sistem replikasi Grameen Bank yang diberi nama Mitra Usaha Mandiri (MUM)</p>
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan modal usaha (kredit) dengan sistem Grameen Bank - Memberikan pendampingan dalam upaya peningkatan sumber daya (yang buta huruf menjadi bisa baca tulis, dsb) - Memberikan pelatihan baik untuk kelompok maupun untuk ketua rembug, seperti pelatihan motivasi berkelompok, pelatihan kesehatan lingkungan, pelatihan gender, pelatihan kesehatan reproduksi, pelatihan dan pembukuan kelompok.
	Wilayah pelaksanaan	<p><u>Jawa Barat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Babelan, Bekasi, sejak tahun 1998-sekarang - Losarang, Indramayu, sejak tahun 2000-sekarang - Harapan Jaya, Bekasi, Blanakan-Subang Utara, sejak tahun 2001-sekarang - Taruma Jaya, Bekasi, Jatiragas, Kerawang, sejak tahun 2002-sekarang <p><u>Jawa Tengah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Batangan- Pati, sejak tahun 2001-sekarang - Sulang - Rembang, sejak tahun 2002-sekarang - Bayat, Klaten, sejak tahun 2003-sekarang
	Sasaran	<p>Masyarakat termiskin (terutama perempuan) di suatu wilayah tertentu, yang didasarkan pada standar yang ada pada MUM, meliputi indeks rumah, pendapatan per capita, dll.</p> <p>Cara menjangkau sasaran melalui survai, pertemuan umum, uji kelayakan dan pelatihan calon anggota (standar grameen)</p> <p>Kriteria sasaran adalah perempuan termiskin dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi rumah sederhana, ukuran rumah kecil, dinding rumah maksimal separuh tembok, maksimal indeks 15, index income maksimal US\$ 2,- per hari, indeks asset produktif maksimal Rp1 juta - Mempunyai kegiatan yang memungkinkan untuk memperoleh pendapatan.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	<p>Jumlah dana yang disalurkan ke MUM sampai dengan akhir bulan Juni 2003 adalah sebesar Rp3.931.163.365,- yang bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKM Rp128.028.000 sifatnya hibah - DKP Rp212.000.000,- sifatnya hibah - Mercy Corps Rp200.000.000,- sifatnya hibah, - Grameen Trust, US \$30.000 terdiri dari US \$26.100,- untuk dana bergulir sifatnya pinjaman dengan bunga 2 % per tahun; US \$3.900 untuk operasional MUM sifatnya pinjaman lunak tanpa bunga dengan grace period 4 tahun. - Cashpoor US \$ 750.000 sifatnya pinjaman dengan bunga 15 % dengan grace period 3 tahun. - BNI/BKKBN Rp1.901.823.777,- sifatnya pinjaman dengan bunga 15 % pertahun menurun dengan grace period 1 bulan. - YMU Rp900.000.000,- sifatnya pinjaman dengan bunga 1 % per bulan <p>Semua dana di atas pertamakali masuk ke rekening YMU dan kemudian disalurkan lagi ke masing-masing cabang. Jadi YMU hanya sebagai perantara karena MUM merupakan salah satu program YMU. Yang membedakan MUM dengan YMU lainnya adalah bahwa MUM sudah mempunyai pembukuan tersendiri.</p>
	Waktu pelaksanaan	Sejak 1998 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (sampai MUM dimiliki oleh anggota).
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Proses awal pendirian MUM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan Calon Karyawan MUM - Inventarisasi Potensi Wilayah - Tahap Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Umum masyarakat sasaran - Uji Kelayakan - Latihan Wajib Kumpulan - Ujian Pengesahan Kumpulan - Rapat Mingguan Rembug Pusat - Pelaksanaan Pemberian Pinjaman - Tahap Monitoring <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lingkup monitoring dan evaluasi - Persiapan bahan dan alat monitoring & evaluasi <p>Proses menjadi anggota dan mendapatkan pinjaman dari MUM :- Mendirikan kumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdiri dari 5 orang (sistem tanggung renteng) - Perempuan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab - Tidak ada hubungan darah - Lulus uji kelayakan <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti latihan wajib kumpulan (LWK) <ul style="list-style-type: none"> - Selama 5 hari, masing-masing 1 jam - Memahami dan menyetujui peraturan dan persyaratan MUM - Membentuk rembug pusat (Center) <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan gabungan antara 2-8 kumpulan - Wajib berkumpul seminggu sekali <p>Sebagai tempat semua kegiatan MUM (pinjaman, tabungan, pengambilan, penyuluhan, diskusi dll)</p>

No.	Item	Penjelasan																																	
		<p>Prinsip pemberian kredit MUM antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanpa jaminan dan penjamin - Berkelompok masing-masing 5 orang - Pinjaman dikenakan bunga pasar - Pinjaman diangsur selama 50 minggu <p>Proses asistensi (proses pelatihan dan pendampingan) Setelah terbentuk kumpulan dan rebug pusat, maka dilakukan pelatihan-pelatihan untuk ketua-ketua rebug dalam rangka memperkuat koordinasi antar kelompok. Setelah berjalan cukup lama, baru disusul program pelatihan lainnya seperti pelatihan gender, pelatihan kesehatan reproduksi dll.</p>																																	
	Pencapaian hasil	<p>Sampai dengan 30 Juni 2003 realisasi pencapaian hasilnya adalah:</p> <table border="1" data-bbox="576 757 1409 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 757 906 853">Cabang MUM</th> <th data-bbox="906 757 1098 853">Jumlah Anggota</th> <th data-bbox="1098 757 1409 853">Akumulasi Pinjaman</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 853 906 898">Muara Bakti, Babelan</td> <td data-bbox="906 853 1098 898">2.085 orang</td> <td data-bbox="1098 853 1409 898">Rp777.262.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 898 906 931">Indramayu</td> <td data-bbox="906 898 1098 931">1.789 orang</td> <td data-bbox="1098 898 1409 931">Rp 630.805.500,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 931 906 965">P. Harapan Jaya, Bekasi</td> <td data-bbox="906 931 1098 965">602 orang</td> <td data-bbox="1098 931 1409 965">Rp385.574.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 965 906 999">Pati, Rembang</td> <td data-bbox="906 965 1098 999"></td> <td data-bbox="1098 965 1409 999"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 999 906 1032">Subang</td> <td data-bbox="906 999 1098 1032">1.450 orang</td> <td data-bbox="1098 999 1409 1032">Rp489.979.600,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1032 906 1066">Taruma Jaya, Bekasi</td> <td data-bbox="906 1032 1098 1066">1.495 orang</td> <td data-bbox="1098 1032 1409 1066">Rp473.333.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1066 906 1099">Sulang, Rembang</td> <td data-bbox="906 1066 1098 1099">1.604 orang</td> <td data-bbox="1098 1066 1409 1099">Rp 482.539.400,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1099 906 1133">Jatiragas, Karawang</td> <td data-bbox="906 1099 1098 1133">861 orang</td> <td data-bbox="1098 1099 1409 1133">Rp213.612.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1133 906 1167">Bayat, Klaten</td> <td data-bbox="906 1133 1098 1167">764 orang</td> <td data-bbox="1098 1133 1409 1167">Rp208.827.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1167 906 1200"></td> <td data-bbox="906 1167 1098 1200">365 orang</td> <td data-bbox="1098 1167 1409 1200">Rp112.830.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Profesi anggota: petani, nelayan, petani garam, pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, buruh.</p> <p>Tingkat pengembalian pinjaman diatas 90 %.</p>	Cabang MUM	Jumlah Anggota	Akumulasi Pinjaman	Muara Bakti, Babelan	2.085 orang	Rp777.262.000,-	Indramayu	1.789 orang	Rp 630.805.500,-	P. Harapan Jaya, Bekasi	602 orang	Rp385.574.000,-	Pati, Rembang			Subang	1.450 orang	Rp489.979.600,-	Taruma Jaya, Bekasi	1.495 orang	Rp473.333.000,-	Sulang, Rembang	1.604 orang	Rp 482.539.400,-	Jatiragas, Karawang	861 orang	Rp213.612.000,-	Bayat, Klaten	764 orang	Rp208.827.000,-		365 orang	Rp112.830.000,-
Cabang MUM	Jumlah Anggota	Akumulasi Pinjaman																																	
Muara Bakti, Babelan	2.085 orang	Rp777.262.000,-																																	
Indramayu	1.789 orang	Rp 630.805.500,-																																	
P. Harapan Jaya, Bekasi	602 orang	Rp385.574.000,-																																	
Pati, Rembang																																			
Subang	1.450 orang	Rp489.979.600,-																																	
Taruma Jaya, Bekasi	1.495 orang	Rp473.333.000,-																																	
Sulang, Rembang	1.604 orang	Rp 482.539.400,-																																	
Jatiragas, Karawang	861 orang	Rp213.612.000,-																																	
Bayat, Klaten	764 orang	Rp208.827.000,-																																	
	365 orang	Rp112.830.000,-																																	
	Masalah	<p>Masalah utama adalah dana, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat bunga dari sumber dana keuangan cukup tinggi - Grace period dari lembaga keuangan sangat pendek (1 tahun). - Tidak adanya lembaga yang khusus menyediakan pendanaan bagi lembaga keuangan mikro - Masih sedikit lembaga dana yang khusus men-support lembaga keuangan mikro <p>Masalah persaingan dengan program lain dengan sasaran yang sama yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak program pemerintah yang dilaksanakan tidak serius - Mulai tertariknya lembaga keuangan formal khususnya perbankan untuk bermain di mikro kredit. 																																	
	Status saat ini	Masih berjalan.																																	
	Potensi	<p>Berpotensi untuk berkembang dan mengembangkan usaha perempuan miskin dengan indikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya peminat di setiap lokasi. - Belum ada lembaga yang melayani perempuan miskin 																																	

No.	Item	Penjelasan
14. Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Pekerti)		
14.1.	Nama upaya	Pengembangan Produksi (Product Development)
	Deskripsi upaya	Upaya ini dilatarbelakangi pada realitas produk kerajinan para pengrajin kecil yang masih kalah bersaing dengan produk industri besar karena kualitasnya relatif lebih rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai jual produk - produk pengrajin kecil. Demi membantu para pengrajin meningkatkan kualitas produksi dan harga jualnya maka Pekerti menginisiasi program Pengembangan Produksi (Product Development). Program ini menawarkan asistensi pengembangan produk kepada para pengrajin rotan dan kayu di Sukabumi, Cirebon, Pati dan Jepara..
	Penanggung jawab	Pekerti
	Pelaksana	Pekerti dan pengrajin dampingan
	Instansi terkait	Departemen Perdagangan dan Perindustrian
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan para pengrajin dalam melakukan produksi agar kualitasnya lebih baik. - Membantu pengrajin untuk mengembangkan desain - desain produk yang sedang diminati pasar. - Meningkatkan daya saing produk dan pendapatan pengrajin .
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan. - Pemberian pinjaman modal tanpa bunga.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Sukabumi, Cirebon) dan Jawa Tengah (Pati, Jepara)
	Sasaran	<p>Pengrajin kecil yang berkonsentrasi pada pengolahan kayu (dakon, ukir, produk rumah tangga) dan rotan (mebel dan pernik). Penjaringan peserta diawali studi peninjauan tentang produk – produk apa yang dibuat para pengrajin di empat wilayah tersebut, kemudian para pengrajin ditawarkan untuk mengikuti program. selanjutnya mereka akan dilatih dan jika ada yang kesulitan modal akan diberikan dalam bentuk kredit tanpa bunga. Pembayaran kredit akan dilakukan ketika pengrajin menyetero barang kerajinannya yang dipesan oleh pembeli melalui Pekerti.</p> <p>Adapun kriteria yang digunakan untuk menjaring peserta adalah termasuk wilayah binaan (empat wilayah seperti yang telah disebutkan di atas), merupakan mitra (pengrajin yang menjual produhnya ke Pekerti), untuk dikembangkan secara ekonomis dan sumberdayanya .</p>
	Pendanaan	Bersifat hibah dan bersumber dari Oxfam. Jumlah dana yang dialokasikan untuk upaya ini sebesar Rp30 juta.
	Waktu pelaksanaan	1997-1998
	Mekanisme pelaksanaan	Pada awalnya dilakukan studi peninjauan untuk mengetahui kebutuhan di lapangan, kemudian mencari ahli (desainer) yang dapat dan bersedia melatih, menseleksi dan mengajak pengrajin untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kriteria di atas. Di samping itu juga diadakan pelatihan, asistensi atau pendampingan terhadap para pengrajin. Contoh produk hasil pengembangan para pengrajin akan ditawarkan kepada pembeli di luar negeri oleh Pekerti. Jika ada pembelian, Pekerti akan menjadi perantara. Bila pengrajin kekurangan modal maka Pekerti akan meminjamkannya dan dibayar dengan memotong hasil penjualan produk pengrajin.
	Pencapaian hasil	Para pengrajin yang mengikuti program pengembangan produksi masih terus melakukan produksi dan telah dipercaya untuk mensuplai pasar ekspor di Eropa. Sayangnya data tentang nilai ekspor dan jumlah produk yang diekspor oleh para pengrajin tidak tersedia.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengrajin sulit untuk menerima teknologi baru dalam produksi. - Pengrajin tidak mampu untuk mengukur kebutuhan dan kemampuannya. - Keterbatasan dana. Jika tersedia cukup dana, upaya ini dapat kembali dikembangkan dengan wilayah kerja yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pengrajin kecil.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
14.2	Nama upaya	Koperasi Pekerti (Kredit Koperti)
	Deskripsi upaya	Koperti lahir sebagai salah satu upaya untuk menjawab kesulitan modal yang dialami oleh pengrajin kecil dalam mengembangkan usahanya. Dalam koperasi yang didirikan bersama Pekerti dan pengrajin telah dilakukan kegiatan simpan pinjam dan pemberian kredit kepada anggotanya. Kredit yang diberikan Koperti meliputi kredit usaha, kredit konsumsi, kredit pendidikan, dan kebutuhan mendesak (emergency). Anggota Koperti terdiri atas pengrajin yang merupakan binaan Pekerti dan para karyawan Pekerti.
	Penanggung jawab	Koperti
	Pelaksana	Pekerti (Koperti)
	Instansi terkait	Departemen Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu para pengrajin kecil untuk mendapat kredit modal bagi pengembangan usaha dan kebutuhan mendesak. - Mendidik pengrajin untuk bisa mengatur keuangannya agar dapat memenuhi produksi dan tanggung jawabnya untuk membayar utang.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Simpan pinjam - Pemberian kredit
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Tengah
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengrajin kecil binaan Pekerti - Karyawan Pekerti - Pengrajin mitra Pekerti (bukan binaan tetapi pengrajin yang menjual produknya ke Pekerti)
	Pendanaan	Besarnya modal awal Rp180 juta, berasal dari Pekerti, sifatnya pinjaman yang akan dikembalikan dengan jalan mencicil jika kondisi Koperti sudah memungkinkan.
	Waktu pelaksanaan	1999-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Koperti merupakan koperasi primer. Model kredit yang disalurkan menggunakan sistem bunga rendah yang skimnya ditetapkan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Skim di bawah Rp5 juta bunganya 1,5 %, Rp5-10 juta bunganya 1,25 %, di atas Rp10 juta 1 %. Kredit diberikan kepada perorangan maupun kelompok dengan masa pengembalian maksimal 4 tahun.
	Pencapaian hasil	Pada awal berdirinya, Koperti beranggotakan 20 orang dan kini sudah 40 orang, sedangkan aset yang mulanya berjumlah Rp180 juta sekarang meningkat menjadi Rp190 juta. Tingkat pengembalian 95 %.
	Masalah	Ada anggota yang mengundurkan diri padahal masih harus mencicil modal yang dipinjam dari Pekerti.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dikembangkan menjadi koperasi sekunder. - Bertambahnya anggota.
14.3	Nama upaya	Pelatihan Marketing Plan
	Deskripsi upaya	Adanya tuntutan dari pembeli agar para pengrajin lebih profesional menjadi dasar yang melatarbelakangi pelatihan marketing plan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin dalam memasarkan produknya. Pelaksanaan program dilakukan oleh Pekerti dengan mitra kerjanya yaitu SIMPATI (Asosiasi Pengrajin Pati) dan ASPERA (Asosiasi Pengrajin Jepara).
	Penanggung jawab	Pekerti
	Pelaksana	Pekerti bekerjasama dengan SIMPATI dan ASPERA
	Instansi terkait	Departemen Perdagangan dan Perindustrian
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membekali para pengrajin tentang ketrampilan pemasaran. - Meningkatkan profesionalisme pengrajin khususnya ketika berhadapan dengan para pembeli luar negeri.
	Jenis kegiatan	Pelatihan

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kabupaten Pati dan Jepara)
	Sasaran	Para pengrajin kecil yang merupakan anggota dari SIMPATI dan ASPERA. Cara penjangkaran sama dengan upaya pertama yaitu dilihat dari peserta produk, omzet, tingkat seni dan desain produknya.
	Pendanaan	Sifat dana hibah dan bersumber dari Oxfam dengan besarnya dana Rp30 juta.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999
	Mekanisme pelaksanaan	Pelaksanaan dilakukan melalui kemitraan dengan SIMPATI dan ASPERA. Kedua lembaga ini bertanggung jawab terhadap perekrutan peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Materi yang diberikan pada pelatihan seputar prinsip-prinsip marketing yang profesional dan cara mendongkrak penjualan.
	Pencapaian hasil	Hasil penjualan produk relatif baik khususnya penjualan ke Oxfam yaitu 77.132,58 US dollar.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Minat untuk mengikuti pelatihan cukup besar namun daya tampung dan dana terbatas. - Terhentinya pembelian langsung produk oleh Oxfam tidak lama setelah pelatihan (2001) karena Oxfam mengalami kerugian.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Pelatihan dapat dilakukan dengan skala yang lebih kecil dan dengan mitra yang lain (namun sampai saat ini Pekerti belum mengupayakannya).
14.4	Nama upaya	Kredit Modal Kerja dan Investasi untuk Pengrajin Kecil
	Deskripsi upaya	Program ini dirancang untuk membantu pengrajin yang memiliki modal terbatas dalam mengembangkan usahanya. Bantuan modal tersebut akan diberikan dalam bentuk uang sebagai modal kerja dan pembelian barang modal.
	Penanggung jawab	Pekerti
	Pelaksana	Pekerti dan Koperti
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pengrajin dalam mengatasi kesulitan modal usaha. - Mendidik pengrajin untuk disiplin dalam pengelolaan keuangan.
	Jenis kegiatan	Pemberian kredit.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Cirebon)
	Sasaran	<p>Para pengrajin kecil di Cirebon.</p> <p>Penjangkaran dilakukan dengan cara kombinasi antara menjemput bola dan keaktifan dari pengrajin.</p> <p>Kriterianya: Pengrajin kecil yang potensial untuk dikembangkan dan telah menjadi pengrajin sebelum mengajukan kredit.</p>
	Pendanaan	Sifat dana hibah dan bersumber dari Oxfam dengan jumlah dana sebesar Rp25 juta.
	Waktu pelaksanaan	2000-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Pemberian kredit dilakukan melalui Koperti, dengan mekanisme standar Pemberian kredit tanpa bunga menjadi keistimewaannya.
	Pencapaian hasil	Jumlah pengrajin yang mendapatkan kredit pada tahun 2000 hanya 3 orang tapi sekarang meningkat menjadi 7 orang. Adapun tingkat pengembaliannya sebesar 60%.
	Masalah	Kebijakan pendanaan (Policy of funding) yang berubah-ubah akibat pergantian pejabat terkait (program officer).
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Bertambahnya modal dan nasabah.

No.	Item	Penjelasan
14.5	Nama upaya	Pengembangan Masyarakat Pengrajin Marginal
	Deskripsi upaya	Program ini lahir menyusul dimulainya pasar bebas dan adanya perubahan kebijakan (policy) dari Oxfam yang tidak lagi melakukan pembelian produk - produk pengrajin Pekerti, serta adanya kesadaran bahwa pasar bebas menurunkan daya saing pengrajin kecil. Program ini sebenarnya bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan yang terjadi pasca perubahan kebijakan oxfam dan pemberlakuan pasar bebas.
	Penanggung jawab	Pekerti
	Pelaksana	Pekerti
	Instansi terkait	-
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme Pekerti dan pengrajin mitra dalam upaya mempersiapkan diri memasuki pasar mainstream. - Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk perajin mitra Pekerti - Mengembangkan produk - produk Pekerti dan Pengrajin mitra dalam upaya meningkatkan omset dan pesanan barang yang diminta oleh pembeli. - Mewujudkan kemandirian lembaga pekerti dan perajin mitra.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kredit - Pelatihan (manajemen organisasi dan ISO 9001) - Penyusunan <i>strategic planing</i> bersama - Peningkatan kultur bisnis - Pembuatan website.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Sukabumi), Jawa Tengah (Solo, Jepara, dan Pati)
	Sasaran	Pengrajin kecil di keempat wilayah yang merupakan mitra kerja Pekerti. Penjaringan dilakukan melalui need assessment ,dan meminta kepada asosiasi pengrajin di daerah untuk mengirimkan peserta dengan kriteria utama sebagai mitra kerja Pekerti dan dengan syarat dapat memasarkan produknya ke Oxfam. .
	Pendanaan	Jumlah dana yang dialokasikan sebesar 78 juta berasal dari Oxfam dan Pekerti. Sifatnya hibah.
	Waktu pelaksanaan	2000 – 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Bekerja sama dengan mitra baik dengan lembaga dana maupun mitra daerah untuk penyelenggaraan program.
	Pencapaian hasil	Para pengrajin yang menjadi peserta program sampai sekarang masih tetap berkiprah meski Oxfam sudah tidak membeli produknya .
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Tampilan website belum optimal. - Pemanfaatan web site untuk pemasaran belum optimal.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Tersedianya ajang promosi kerajinan kecil melalui media elektronik dengan biaya murah dan mudah diakses oleh calon pembeli di mancanegara.
14.6	Nama upaya	Program Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEPUK)
	Deskripsi upaya	Krisis moneter telah meningkatkan angka pengangguran dan menambah kesulitan keuangan keluarga. Hal ini tentu berimplikasi pada tambahnya beban bagi perempuan yang harus mengelola keuangan keluarga. Untuk itu dipandang perlu untuk mendorong kaum perempuan terlibat dalam produksi sehingga dapat menambah sekaligus membantu keuangan keluarga. Program ini dititikberatkan di Jakarta .
	Penanggung jawab	Pekerti
	Pelaksana	Pekerti
	Instansi terkait	-
	Tujuan upaya	Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha serta mewujudkan keberlangsungan kelompok –kelompok swadaya ekonomi masyarakat agar lebih kuat dan efektif.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lapangan - Workshop - Sosialisasi - Asistensi - Pemberian bantuan modal kerja (masing – masing kelompok Rp2,5 juta) - Membantu pemasaran melalui pameran lokal
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Rawa Terate, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, Prumpung , Jelambar Baru, Angke, Kalianyer, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Keagungan dan Muara Baru)
	Sasaran	Ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang belum menjadi pelaku usaha namun mempunyai minat, motivasi, dan berpotensi menjadi pengrajin. Penjaringan dilakukan melalui need assestment dengan mengidentifikasi ibu - ibu yang berminat dan kemudian dikelompokan berdasarkan minatnya.
	Pendanaan	Berasal dari Mercy Corps, dengan nilai total Rp116 juta.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002 – 2003
	Mekanisme pelaksanaan	Dilakukan melalui model pendampingan. Asistensi dan modal diberikan kepada kelompok berdasarkan kebutuhannya .
	Pencapaian hasil	Saat ini terdapat 22 kelompok dampingan dengan berbagai jenis usaha keterampilan dari tas monte sampai usaha sablon.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga pendamping (hanya ada 2 tenaga pendamping yang bertanggung jawab atas seluruh daerah dampingan). - Kesulitan bahan baku sehingga terjadi perubahan usaha dalam waktu yang cepat
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Tumbuhnya pengrajin-pengrajin baru yang mandiri - Dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar pengrajin sehingga mengurangi angka pengangguran.
15. Yayasan Permata Hati		
15.1	Nama upaya	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan dan Pemberian Modal
	Deskripsi upaya	Yayasan Permata Hati adalah sebuah LSM yang bersifat nirlaba, yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengembangan masyarkat terutama melalui pembentukan sifat usaha (<i>enterpreneur</i>) Upaya ini adalah satu di antara berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Permata Hati. Pelatihan sudah dilakukan beberapa kali dengan topik, peserta dan jumlah dana yang berbeda. Dalam narasi, pelatihan-pelatihan ini digabungkan menjadi satu upaya dan merupakan satu paket dengan pemberian modal usaha, dimana para peserta terlebih dahulu dilatih baru kemudian diberikan modal usaha .
	Penanggung jawab	Yayasan Permata Hati
	Pelaksana	Yayasan Permata Hati
	Instansi terkait	Yayasan Permata Hati, Dinas Pertanian beberapa daerah, dan IPB
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan (income) keluarga.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan beternak itik - Pelatihan budidaya cacing lumbricus dan beternak jangkrik - Pelatihan industri pakan ternak - Pelatihan cara pengolahan dan pengawetan ikan dalam rangka pemberdayaan perempuan - Pelatihan budidaya beternak ayam kampung dan entog - Pelatihan dan pengembangan kambing - Pelatihan pengembangan budidaya tik-tok - Pelatihan inseminasi buatan/IB ayam - Pemberian bantuan ternak itik dan ayam buras

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	<p>Sebagian besar pelatihan dilakukan di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat), dan di 4 Kabupaten/kota (Tangerang, Cirebon, dan kotamadya Jakarta Utara) dengan perincian kecamatan sebagai berikut: (sesuai dengan urutan jenis pelatihan dan bantuan sarana di atas)</p> <p>Pelatihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinggir Rawa Cipondoh Tangerang - Kampung Mencong Kec. Ciledug - Kec. Cibogo Kabupaten Cirebon - Kamal Muara Jakarta Utara - Kec. Mauk dan Sepatan, Kabupaten Tangerang - Kampung Kunciran Tangerang - Kab. Tangerang - Kec. Pinang Tangerang <p>Pemberian bantuan; Kampung Prigi, Kabupaten Tangerang</p>
	Sasaran	<p>Sasaran pelatihan adalah masyarakat yang memiliki kemauan untuk berusaha, biasanya di satu wilayah tertentu (kelurahan atau desa). Peserta untuk setiap pelatihan (sesuai urutan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.15 keluarga - 2.75 peserta - 3.10 peserta - 5.100 peserta - 6. 20 peternak - 7.25 peternak - 8.40 orang - 9.25 remaja <p>Sedangkan untuk bantuan itik diberikan kepada 20 peserta; bantuan ayam buras kepada 30 peserta.</p>
	Pendanaan	<p>Pendanaan untuk masing-masing pelatihan (sesuai urutan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp30.000.000 (PDF Jakarta); - Rp5.000.000 (dana swadaya); - Rp20.000.000 (dana swadaya); - Rp90.000.000 (Dep. Kimpraswil); - Rp8.000.000 (dana swadaya); - Rp10.000.000 (dana swadaya); - Rp5.000.000 (dana swadaya); - Rp3.000.000 (dana swadaya). <p>Untuk bantuan sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Itik : Rp6.000.000 (dana swadaya) - Ayam buras : 1125 ekor (Dinas Pertanian Kota Tangerang)
	Waktu pelaksanaan	<p>Waktu pelaksanaan pelatihan umumnya berkisar antara satu sampai tujuh hari, kemudian upaya berlanjut dengan praktek langsung dengan diberi pinjaman modal (berupa ternak dan modal usaha lainnya). Kesepuluh proyek tersebut dilaksanakan mulai dari tahun 1997-2003 (urutan di atas menunjukkan urutan waktu pelaksanaan).</p>
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Umumnya usulan pelatihan datang dari masyarakat, baik yang sudah memiliki usaha, maupun yang berminat untuk memulai usaha. Yayasan Permata Hati hanya memfasilitasi dan mencarikan dana. Sumber dana umumnya berasal dari swadaya (dari anggota yang sudah mandiri, maupun dari infaq warga). Setelah diberi pelatihan (misalnya cara memelihara kambing), peserta diberi pinjam modal usaha dalam bentuk kambing, itik, yang kemudian akan dikembalikan atau digulirkan lagi ke anggota lainnya dalam bentuk yang sama.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Berupa peningkatan ekonomi anggota yang sudah dilatih dan diberi modal
	Masalah	Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan program antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - pasar yang tidak jelas, - kemauan berusaha bersifat musiman (seperti pelatihan budidaya cacing lumbricus). - Adanya program JPS (Jaring Pengaman Sosial) menyebabkan masyarakat enggan mengembalikan dana, karena mengira dana tersebut adalah dana JPS.
	Status saat ini	Pelatihannya sendiri berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan sebagian modal telah bergulir sementara sebagiannya lagi mengalami kemacetan.
	Potensi	Sistem ini memiliki potensi ke depan yang lebih baik karena bantuan pemberdayaan yang diberikan berupa modal usaha yang tidak berbentuk uang melainkan hewan/barang sesuai dengan jenis usaha mikro yang akan dilakukan
15.2.	Nama upaya	Jasa Keuangan Simpan Pinjam Syariah
	Deskripsi upaya	Upaya ini dirintis pada tahun 1987. Saat ini upaya tersebut diwadahi dalam Koperasi Simpan Pinjam Insan Kamil.
	Penanggung jawab	Yayasan Permata Hati
	Pelaksana	Yayasan Permata Hati
	Instansi terkait	Yayasan Permata Hati
	Tujuan upaya	Membebaskan pedagang dari jeratan rentenir
	Jenis kegiatan	Simpan Pinjam
	Wilayah pelaksanaan	Tersebar di Banten (Kabupaten/Kota Tangerang)
	Sasaran	Pedagang kecil/mikro seperti: pedagang mie ayam, siomay, bakso, ketoprak, es campur, gorengan, dan warteg. Jumlah anggota saat ini mencapai 1500 anggota. Cara penjangkaran anggota adalah berdasarkan referensi dari anggota yang sudah terbina. Biasanya sebelum diberikan bantuan/pinjaman dilakukan survey ke rumah calon anggota.
	Pendanaan	Dana awal berasal dari 5 orang pedagang dengan nilai total Rp50.000. Dana ini kemudian digulirkan (revolving). Dana tambahan lain bersumber dari swadaya anggota yang sudah terbantu sebesar Rp50 juta (Rp500.0000 x100), dan dari PKM sebesar Rp10 juta.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1987 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Dana yang digunakan untuk simpan pinjam semula berasal dari uang yang dikumpulkan dari 5 pedagang, masing-masing Rp10.000. Dana Rp50.000 ini kemudian dipinjamkan kepada pedagang yang terjerat rentenir, dengan cicilan pengembalian sebesar Rp 2.000/hari selama 1 bulan, dengan nilai total mencapai Rp60.000. Kemudian uang ini kembali dipinjamkan ke pedagang lainnya. Dana lainnya dikumpulkan juga dari jamaah pengajian dan terkumpul Rp500.000 untuk modal. Mekanisme simpan pinjam yang dijalankan adalah dengan menggunakan sistem Mudlhorobah (bagi hasil) dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Peminjam menentukan sendiri (berdasarkan kesepakatan dan kerelaan) jumlah bagi hasil yang dapat diberikan jika usahanya berhasil. - Selain itu sepuluh orang peminjam wajib mengangkat 1 anak asuh dengan beban Rp20.000/anak/bulan atau Rp2.000/bulan/peminjam. - Cicilan dapat dilakukan harian, bulanan maupun mingguan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Yayasan Permata Hati menjadi penjamin pinjaman anggota sebesar Rp10-25 juta ke bank. - Anggota sudah banyak yang mengikuti DPLK (Dana Pensiunan Lembaga Keuangan) dari BNI Syariah - Jumlah anggota binaan mencapai 1500 orang

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Pengembalian pinjaman tidak lancar karena; <ul style="list-style-type: none"> - Dagangannya tidak laku atau karena ditipu (sekitar 10%) - Adanya dana JPS pada saat yang bersamaan yang menyebabkan kerancuan sumber dana, sehingga masyarakat merasa pinjaman tidak perlu dikembalikan.
	Status saat ini	Masih berjalan (upaya simpan pinjam)
	Potensi	Berpotensi dalam mengembangkan anggota binaan yang bukan pedagang sehingga bisa menjadi suplier/pemasok bagi para pedagang.
15.3	Nama upaya	Realokasi Pedagang Kaki Lima Sektor Informal di Perkotaan
	Deskripsi upaya	Upaya ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan sektor informal di wilayah Tangerang dengan semakin menjamurnya pedagang kaki lima di berbagai wilayah kota. Akan tetapi pertumbuhan pada sektor tersebut agaknya masih kurang dapat diantisipasi sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas karena badan jalan digunakan sebagai tempat jualan. Upaya penataan yang dilakukan Yayasan Permata Hati bertujuan menekan dampak buruk dari pedagang kaki lima tersebut, meski demikian di sisi lain keberadaan mereka merupakan suatu peluang bagi pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya. .
	Penanggung jawab	Yayasan Permata Hati
	Pelaksana	Yayasan Permata Hati bekerja sama dengan kelompok masyarakat sasaran
	Instansi terkait	PKM
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatasi masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja di sektor informal. - Meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan - Melindungi dan mengangkat eksistensi pedagang sektor informal - Mencegah bertambahnya masyarakat miskin di perkotaan dan sekaligus mengurangi atau menanggulangi kemiskinan perkotaan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Realokasi dan pengusahaan legalitas lokasi; realokasi dilakukan dengan mencari suatu lokasi tempat kelompok pedagang menggelar dagangannya. - Pengadaan tenda dan gerobak; sebagai sarana untuk menjalankan usaha. Sebagian pedagang mendapatkan bantuan berupa gerobak dan tenda. Pengadaan tenda dikoordinasi oleh Yayasan Permata Hati, sedangkan gerobak diserahkan pembuatannya kepada masing-masing pedagang sesuai dengan jenis dagangannya. - Pemberian Kredit Peningkatan Usaha (KPU). Pemberian kredit ini dimaksudkan sebagai fasilitas penambahan modal guna meningkatkan daya beli dan ketersediaan bahan baku yang akan dijual serta pengadaan sarana peralatan yang lebih baik. - Pendampingan dan pembinaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kelompok yang dibentuk menurut lokasi berdagang bagi pedagang yang menetap, dan menurut wilayah tempat tinggal bagi pedagang keliling.
	Wilayah pelaksanaan	Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
	Sasaran	<p>Para pedagang kecil sektor informal di wilayah Kota Tangerang dan kelompok masyarakat yang memiliki kemauan untuk dibina dan dikembangkan dalam usaha ini. Program ini diprioritaskan bagi keluarga miskin yang berpendapatan kurang dari Rp200.000/bulan, para pedagang kaki lima yang terkena musibah dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998., serta para korban PHK yang berminat untuk menjalani usaha.</p> <p>Pendataan awal terdaftar sekitar 600 orang yang memenuhi kriteria di atas. Mereka terdiri dari pedagang dengan bermacam-macam jenis dagangan antara lain: mie ayam, es, bakso sayuran, nasi, ketoprak, siomay. Di akhir program, jumlah peserta mencapai 100 orang.</p>
	Pendanaan	Sumber dana berasal dari Yayasan PKM sebesar Rp124 juta
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme upaya dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dengan pihak yayasan sebagai pelaksana program. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan wadah bagi kerja sama antara pedagang dalam satu kelompok agar dapat memecahkan berbagai masalah yang ada demi peningkatan usaha mereka. - Pengembalian kredit diangsur tiap hari melalui ketua kelompok atau koordinator kelompok, selanjutnya dikembangkan/digulirkan lagi kepada kelompok yang masih membutuhkan
	Pencapaian hasil	Program ini berhasil memenuhi jadwal yang telah direncanakan, dan indikasinya terlihat pada jumlah pemohon kredit yang terus bertambah, dan mereka yang sudah memperoleh kredit dapat dengan lancar mencicil pinjamannya.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit mendapatkan legalitas resmi dari pihak pemda. Hal ini berdampak buruk bagi para pedagang karenaketenangan usahanya terganggu. - Krisis ekonomi yang tidak pernah berujung mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Hal ini akhirnya berdampak buruk pada perguliran dana yang mekanismenya menjadi lebih lambat. - Praktek pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan bagi peningkatan pelayanan terhadap pelanggan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena tanpa praktek langsung, tidak akan diperoleh manfaat, padahal pengadaan fasilitas dan alat-alat bagi pelayanan terhadap pelanggan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit.
	Status saat ini	Upaya ini sudah selesai, namun perguliran dana masih tetap berlangsung di masyarakat.
	Potensi	Berpotensi untuk diarahkan pada pedagang-pedagang yang menjual produk-produk yang sifatnya lebih pokok, seperti pedagang sayur dan kebutuhan dapur serta sektor peternakan.
16. YPM Kesuma Multiguna		
16.1	Nama upaya	Kredit Mikro
	Deskripsi upaya	<p>Lembaga YPM Kesuma Multiguna bermula dari kelompok ibu-ibu arisan di RT 15 dan 18 RW 08 Kelurahan Kemanggisan, Jakarta. Pada Bulan Mei 1999, modal awal (milik perorangan) sebesar Rp2 juta dipinjamkan kepada 20 orang masing-masing Rp100 ribu dengan perjanjian akan dicicil 5 bulan.</p> <p>Pada Juli 1999, 90 orang (di Kelurahan Kemanggisan) dan modal Rp15 juta membentuk Koperasi Kesuma Tiara. Pada saat bersamaan digagas organisasi nir laba yang dapat membantu perumusan program pemberdayaan masyarakat dengan nama Yayasan Kesuma.</p>
	Penanggung jawab	YPM Kesuma Multi Guna
	Pelaksana	YPM Kesuma Multi Guna, dan pengurus di 5 wilayah
	Instansi terkait	YPWI, BRI, MCI, CIDA, dan AusAid
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menjauhkan masyarakat dari rentenir - Meningkatkan ekonomi keluarga agar dapat memecahkan permasalahan PHK suami dan anak putus sekolah - Memberdayakan para ibu/perempuan melalui pemberian modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
	Jenis kegiatan	Pemberian pinjaman kepada anggota
	Wilayah pelaksanaan	<p>Meliputi lima wilayah kelurahan di DKI Jakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah (354 anggota) - Kel. Pasar Minggu, Kec. Jati Padang (190 anggota) - Kel. Pasar Rebo, Kec. Gedong (202 anggota) - Kel. Kramat Senin, Kec. Senin (202 anggota) - Kel. Kamal Muara (20 anggota)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Kaum ibu yang tinggal di 5 wilayah binaan dan menjadi anggota YPM Kesuma Multi Guna untuk mengembangkan usaha mikro/kecil,</p> <p><u>Kriteria anggota:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai usaha (mencakup semua usaha mikro) - Diutamakan kaum ibu (- Memiliki identitas KTP/KK - Meski usahanya di tempat lain, para anggota tinggal di wilayah setempat, dimana kelompok tersebut berada (satu RT). - Memperoleh dukungan dari calon anggota yang lain - Membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000 (anggota temporer hanya membayar simpanan pokok saja, dan sudah dapat mengajukan pinjaman) - Membayar simpanan wajib (untuk anggota tetap) Rp2000 – Rp3000 per bulan dan uang kas Rp1000 per bulan. - Mematuhi AD dan ART. <p>Sampai saat ini total anggota berjumlah 986 orang</p>
	Pendanaan	<p>Total dana yang beredar di antara anggota saat ini adalah Rp744 juta, yang bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - YPWI, Oktober 1999, pinjaman lunak Rp120 juta, - AUSAID, April 2000, hibah, Rp100 juta, - MCI Tahap I, Juli 2000, hibah, Rp24 juta, - MCI Tahap II, Januari 2001, hibah, Rp200 juta, - CIDA, November 2000, hibah Rp100 juta, - BRI, Mei 2002, pinjaman komersil, Rp100 juta, dan - Tabungan anggota <p>Dana-dana tersebut telah disalurkan kepada semua kelompok yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemanggisan: YPWI (Rp120 juta), AUSAID (Rp130 juta), BRI (Rp100 juta), Simpanan Anggota (Rp100 juta) - Kramat Senen: CIDA (Rp100 juta) - Kamal Muara: MCI (Rp24 juta) - Pasar Minggu: MCI (Rp100 juta) - Pasar Rebo: MCI (Rp100 juta)
	Waktu pelaksanaan	Mei 1999 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Proses penjaringan calon anggota:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey calon anggota , melalui wawancara dan identifikasi kelompok lokal (arisan, pengajian, paguyuban) - Memilih calon anggota sesuai syarat di atas - Sosialisasi program kepada calon anggota - Pemilihan ketua kelompok - Penjelasan kepada ketua kelompok tentang tugas dan tanggung jawabnya - Penjelasan kepada calon anggota tentang hak dan kewajibannya - Komitmen waktu pertemuan - Pengumpulan data calon anggota

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Mekanisme perguliran dana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - Anggota mengajukan pinjaman ke ketua kelompok dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyertakan identitas - Ketua kelompok kemudian mengajukannya ke petugas lapangan - Petugas lapangan mencatat dan memprosesnya - Sebelum dana diberikan dalam pertemuan kelompok, terlebih dahulu dilakukan pengecekan data hasil seleksi dengan anggota secara langsung - Setelah menandatangani akad perjanjian pinjaman dan mengisi daftar hadir, dana dapat langsung diterima. - Tahapan pinjaman : <ul style="list-style-type: none"> - Tahap I (<i>resque</i>) adalah kredit yang diberikan kepada mereka yang baru memulai usaha. Jumlah pinjaman Rp200.000 dan lama pinjaman 5 bulan, dana jaminan Rp10.000, dan besar angsuran Rp46.000 (angsuran pokok Rp40.000, jasa Rp4.000, dana sosial Rp1.500, dan dana tanggung renteng Rp500); - Tahap II (<i>recovery</i>) adalah kredit yang diberikan kepada mereka yang mengalami keterpurukan akibat krisis dan mereka telah membuka usahanya kembali: jumlah pinjaman Rp400.000, lama pinjaman 8 bulan, dana jaminan Rp20.000, besar angsuran Rp62.000 (angsuran pokok Rp50.000, jasa Rp8.000, dana sosial Rp3.000, dana tanggung renteng Rp1.000); - Tahap III (<i>development</i>) adalah kredit yang diberikan kepada mereka yang terentah dan akan mengembangkan usahanya: Jumlah pinjaman Rp600.000, lama pinjaman 10 bulan, dana jaminan Rp30.000, besar angsuran Rp78.000 (angsuran pokok Rp60.000, jasa Rp12.000, dana sosial Rp4.500, dana tanggung renteng Rp1.500); - Tahap IV (<i>entreprenur</i>) adalah kredit yang diberikan kepada mereka yang usahanya relatif stabil dan diharapkan mampu mengakses kredit perbankan: besar pinjaman Rp1 juta, lama pinjaman 10 bulan, jaminan Rp50.000, besar angsuran Rp130.000 (angsuran pokok Rp100.000, jasa Rp20.000, dana sosial Rp7.500, dana tanggung renteng Rp2.500). - Untuk pertama kali anggota memperoleh pinjaman pada tahap I (<i>Resque</i>) sebesar Rp200.000 - Setelah melunasi pinjaman tahap ini, anggota bisa mengajukan tahap berikutnya. - Untuk mendapat pinjaman tahap berikutnya anggota disurvei terlebih dahulu tentang prestasi pengembalian dan kelayakan usahanya. <p>- Proses angsuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota mengangsur setiap bulan pada ketua kelompok sebesar jumlah angsuran yang telah disepakati. - Petugas lapangan mengambil angsuran pada ketua kelompok saat pertemuan kelompok - Petugas lapangan menyetor ke kasir wilayah - Kasir wilayah menyetor ke bank berdasarkan jenis anggaran <p>- Penggunaan Dana Jasa, Dana Tanggung Renteng (DTR) dan Dana Sosial Selain membayar angsuran pokok, anggota juga diharuskan membayar uang jasa 2%, dana sosial 0,75%, serta DTR 0,25% per bulan. Dana Jasa digunakan untuk kegiatan operasional (BOP), DTR digunakan sebagai dana cadangan bilamana ada anggota yang meninggal dunia, usahanya bangkrut, atau melarikan diri. Sedangkan Dana Sosial dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro kredit YPM Kesuma Multi Guna sudah berkembang di 5 wilayah dengan 80 kelompok dan 986 anggota - Uang yang beredar mencapai Rp744 juta - Sebagian besar anggota sudah terlepas dari jeratan rentenir yang menetapkan suku bunga yang tinggi (biasanya sekitar 30% per 40 hari kerja) - Usaha anggota berkembang, misalnya yang dulunya berjualan di rumah sudah bisa membuka usaha di pasar dan yang awalnya hanya mempunyai satu gerobak sekarang memiliki dua gerobak. - Ekonomi keluarga anggota meningkat sehingga pembayaran biaya sekolah anak dan sewa rumah kontrakan menjadi lancar - Karena memiliki usaha sendiri ibu-ibu/wanita menjadi lebih berperan dalam keluarga. Mereka sudah berani terbuka untuk mengungkapkan pinjaman yang mereka lakukan.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana telah menghambat perkembangan (termasuk dana untuk operasional) - Minimnya pengalaman kemampuan administrasi keuangan pengurus, karena sebagian besar pengurus adalah ibu-ibu yang hanya tamat SMA. - Adanya tunggakan pembayaran anggota dengan beragam alasan seperti usaha bangkrut, masalah keluarga, bencana alam, dsb. - Ketua kelompoknya kurang bertanggung jawab, angsuran dari anggota tidak disetorkan kepada petugas lapangan - Anggota/ketua kelompok meminjam atas nama orang lain
	Status saat ini	Masih berjalan berkembang di lima wilayah (kelurahan)
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengembangkan usaha dan ekonomi keluarga sebagian anggota - Mampu meningkatkan peran ibu-ibu/wanita dalam keluarga. - Kegiatan di lima wilayah binaan dapat menjadi lembaga kredit mikro yang mandiri, baik dalam bentuk koperasi, seperti yang dimiliki di wilayah Kemanggisan, maupun dalam bentuk lembaga simpan pinjam - Pengembangan ke wilayah lain, terutama wilayah sekitar. Saat ini sudah mulai dilakukan penjajagan dan sudah banyak yang berminat, akan tetapi masih terbentur pada dana .
16.2	Nama upaya	Pelatihan Dasar-Dasar Koperasi dan Pembukuan Sederhana serta Managemen Usaha.
	Deskripsi upaya	Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi YPM Kesuma Multiguna, khususnya kegiatan kredit mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
	Penanggung jawab	YPM Kesuma Multiguna
	Pelaksana	YPM Kesuma Multiguna
	Instansi terkait	Mercy Corps International dan CIDA sebagai penyandang dana.
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan pembukuan sederhana kepada anggota supaya dapat memisahkan keuangan usaha dan rumahtangga. - Meningkatkan pengetahuan anggota tentang pemasaran dan peningkatan usaha. - Mengenalkan kepada masyarakat tentang koperasi. - Meningkatkan kedisiplinan dalam mengatur keuangan.
	Jenis kegiatan	Pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Lima kelurahan binaan YPM Kesuma Multiguna di DKI Jakarta (Kemanggisan, Kramat Senen, Kamal Muara, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo)
	Sasaran	Semua anggota YPM Kesuma Multiguna (usaha mikro/kecil, diutamakan kaum ibu yang tinggal di lima wilayah binaan dan dikelompokkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga (RT)).

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Rp10 juta dari Mercy Corps International dan CIDA yang sifatnya hibah
	Waktu pelaksanaan	Oktober – Nopember 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Pelatihan dilakukan secara bergantian di setiap RW (Rukun Warga) daerah binaan YPM Kesuma Multiguna. Satu RW mendapat pelatihan selama satu hari. Semua anggota YPM Kesuma Multiguna di RW yang bersangkutan diundang untuk mengikuti pelatihan dengan tingkat kehadiran anggota berkisar antara 70 – 80%.
	Pencapaian hasil	Karena singkatnya pelatihan dan beratnya pekerjaan tambahan tersebut bagi anggota, maka manfaat pelatihan tersebut menjadi tidak maksimal.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelatihan terlalu singkat - Kurangnya kemauan anggota untuk menerapkan materi pelatihan dalam praktek usaha mereka
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	Usaha mikro/kecil yang menjadi anggota dapat menguasai dan menerapkan pembukuan sederhana serta dapat memisahkan manajemen usaha dengan manajemen rumah tangga.

**Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003
Kelompok Organisasi Non-Pemerintah**

No.	Item	Penjelasan
1. Care International – Indonesia (Ornop Internasional)		
1.1	Nama upaya	Program Kredit Mikro
	Deskripsi upaya	Care International Indonesia memberikan kredit mikro kepada pengusaha mikro melalui lembaga keuangan mikro lokal (BPR, Koperasi, LSM, dan BMT).
	Penanggung jawab	Care International Indonesia
	Pelaksana	Care International Indonesia
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan akses terhadap kredit bagi pengusaha mikro.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kredit - Pelatihan - Pendampingan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat, Banten, dan Jabotabek. Pada saat laporan ini disusun, kegiatan awal sudah dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Barat.
	Sasaran	Pengusaha mikro yang merupakan nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terpilih. Cara penjarangan dan kriteria pengusaha mikro yang akan diberi kredit diserahkan kepada LKM yang terpilih sesuai dengan profil umum yang ditetapkan oleh CARE.
	Pendanaan	Proyek ini bernilai US\$1 Juta yang berasal donor internasional (USA).
	Waktu pelaksanaan	Tahap Pertama: 2003 – 2005.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - CARE, bekerja sama dengan BISMA, yang memberikan jasa konsultasi manajemen, mensosialisasikan proyek ini ke LKM. - LKM kemudian mengirimkan proposal untuk mendapatkan dana pinjaman yang akan diberikan kepada pengusaha mikro. - Setelah melalui proses seleksi, LKM-LKM yang telah disetujui mendapat dana pinjaman dan pendampingan. - Pinjaman yang diberikan kepada LKM besarnya disesuaikan dengan daya serap LKM bersangkutan dengan mempertimbangkan bahwa penempatan dana pada LKM tidak sempat menganggur (<i>idle</i>) pada LKM melebihi 2 bulan. - Bunga tetap berkisar 15-20% per tahun. Jangka waktu pinjaman kepada LKM 1 tahun dan dapat diperpanjang. - Seluruh (100%) dana yang dipinjamkan kepada LKM harus disalurkan sebagai kredit mikro. - Pinjaman dari LKM ke pengusaha mikro maksimum Rp5 juta dengan rata-rata Rp3 juta per pengusaha. Bunga pinjaman dari LKM ke pengusaha disesuaikan dengan kebijaksanaan masing-masing LKM dengan memperhatikan kondisi pasar setempat. - Jangka waktu dari mengirim proposal sampai kredit tersebut disetujui atau tidak disetujui berkisar satu bulan. - LKM terpilih harus melaporkan pencairan kredit yang bersumber pada dana CARE setiap bulan disertai dengan laporan keuangan LKM bersangkutan.
	Pencapaian hasil	Sampai akhir Juni 2003 telah dikeluarkan dana sebesar kurang lebih Rp1,5 milyar melalui tujuh (7) LKM di empat (4) kabupaten di Jawa Barat.
	Masalah	Tidak mudah mendapatkan LKM yang layak menjadi mitra. Sampai saat ini proyek ini masih bermitra dengan BPR, dan sedang merintis kemitraan dengan jenis LKM lainnya seperti Koperasi, LSM, BMT agar dapat membantu pengusaha mikro yang di daerahnya tidak mempunyai BPR.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha mikro yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan BPR pada proyek ini mempunyai potensi untuk bisa berhubungan dengan bank lain. - Program ini juga direncanakan akan dikembangkan bagi kelompok simpan pinjam yang tidak mendapat akses kredit melalui BPR.

No.	Item	Penjelasan
1.2.	Nama upaya	Samba Project (The Silk and Micro-Enterprises Development in Bandung Raya Project)
	Deskripsi upaya	CARE bekerja sama dengan Universitas Bandung Raya melakukan upaya penguatan kemampuan (<i>capacity building</i>) bagi <i>Business Development Service Providers</i> yang bergerak di industri sutera alam di Jawa Barat serta bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi di wilayah yang berdekatan dengan industri sutera di Jawa Barat.
	Penanggung jawab	Care International Indonesia
	Pelaksana	Care International Indonesia dan Universitas Bandung Raya
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Dephut - Dinas Kehutanan Kab. Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Tasikmalaya, Majalengka, dan Kuningan. - Dinas Pertanian Kab. Bandung - Dinas Kehutanan Prop. Jabar - Dephut Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, BPDAS Cimanuk-Citanduy - Disperindag Kab. Garut, Tasikmalaya - Dinas KUKM Prop. Jabar - DEKOPINWIL Jabar - BAPPEDA - BPEN
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BDS persuteraan kepada pengusaha kecil/mikro industri sutera di bidang budidaya dan teknologi sutera. - Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh LKM kepada pengusaha kecil/mikro secara umum termasuk pengusaha kecil/mikro di bidang budidaya sutera.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknologi persuteraan kepada BDSP dan petani sutera. - Pemberian kredit kepada pengusaha mikro melalui LKM.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Majalengka dan Kuningan)
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Petani sutera dan pengusaha mikro/kecil sutera di Jawa Barat. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani, koperasi, dan BDS persuteraan, dengan difasilitasi Dinas Kehutanan dan asosiasi persuteraan setempat. - LKM di wilayah Jawa Barat. Sosialisasi program dilakukan kepada LKM yang beroperasi di wilayah yang berdekatan dengan sentra pertanian sutera.
	Pendanaan	USAID menjadi penyandang dana utama dengan dana pendamping dari CARE serta UNBAR.
	Waktu pelaksanaan	2002-2004
	Mekanisme pelaksanaan	<p>SAMBA Project memberikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOT kepada BDSP bidang persuteraan yang selanjutnya akan memberikan pelatihan kepada petani sutera - Pelatihan manajemen kredit mikro kepada LKM.
	Pencapaian hasil	Per 30 Juni 2003 telah dilakukan empat (4) event TOT bidang <i>moriculture</i> dan <i>sericulture</i> di empat kabupaten di Jawa Barat. Keseluruhan TOT tersebut diikuti oleh 121 orang peserta yang mewakili 47 BDSP terdiri dari: 6 (enam) LSM, 2 (dua) Yayasan, 23 (dua puluh tiga) Kelompok Tani, 3 (tiga) Koperasi, 6 (enam) Perusahaan, 5 (lima) PPL Dishut, 1 (satu) Lembaga Desa, 1 (satu) perguruan Tinggi di bidang Pertanian/persuteraan. Dua (2) BDSP yang telah mengikuti TOT kemudian telah memberikan pelatihan kepada petani dengan subsidi dari SAMBA Project (melalui mekanisme voucher program), yaitu PT Prima Ekspindo Utama dan CV. Bayu Putra Utama. TOT dan pelatihan petani akan terus berlangsung sampai November 2003.
	Masalah	Di samping pelatihan teknologi persuteraan dan manajemen BDSP, industri sutera di Jawa Barat juga membutuhkan intervensi di bidang pemasaran karena struktur yang ada bersifat monopsoni. Di sisi lain, keterbatasan dana para petani atau kelompok tani tidak memungkinkan petani sutera untuk memasuki tahapan proses produksi lanjutan yang memberi nilai tambah lebih tinggi.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Beberapa propinsi lain di luar Jawa Barat telah menyampaikan minatnya untuk mendapatkan replikasi model pelatihan SAMBA, seperti Lampung, Sulawesi Selatan melalui Meneg PPKTI, Yayasan Sagu Swaka Alam Papua, LPSE NTB, dan Diskopkar Maluku.

No.	Item	Penjelasan
2. Catholic Relief Servs (CRS) Indonesia (Ornop Internasional)		
2.1	Nama upaya	Small Enterprise Development (SED) Sequel Matching Grant
	Deskripsi upaya	CRS Indonesia bekerja sama dengan 12 LSM lokal melakukan kegiatan keuangan mikro bagi kelompok perempuan yang disebut kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama (UBSP)
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS bersama LSM lokal ; Yayasan Cinta Sesama, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Yayasan Sosial Bina Sejahtera, Lembaga Karya Bhakti, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya , Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Kupang , Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka, Yayasan Usaha Baik, Yayasan Sosial Keuskupan Atambua , Yayasan Usaha Sejahtera, Yayasan Swadaya Membangun, Sekretariat Pelayanan Tani.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memperbaiki pendapatan 30.000 KK masyarakat miskin (75% perempuan) dan memberdayakan mereka agar dapat mengelola kehidupan dan kesejahteraan keluarga mereka sendiri.
	Jenis kegiatan	- Menyediakan kredit untuk kelompok UBSP - Pelatihan bagi Ketua kelompok UBSP dan staf lokal LSM
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab. Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah); Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Klaten); Yogyakarta; Kalimantan Barat (Kab. Ketapang); NTB (Kab. Lombok Timur, Barat, dan Tengah); NTT (Kota Kupang, Kab. TTU, TTS, Sikka, Flores Timur dan Ende)
	Sasaran	- Masyarakat miskin perempuan dan aktif secara ekonomi. - Kelompok ibu-ibu posyandu dibentuk menjadi kelompok simpan pinjam dengan sistim tanggung renteng
	Pendanaan	CRS: \$495,000 (Private Fund) USAID: \$300,000 (USAID Grant) Proyek ini membiayai kegiatan operasional, bantuan dana pinjaman dan biaya pelatihan. Untuk bantuan dana pinjaman dari CRS ke Ornop lokal dari tahun 1993-1996 bersifat hibah, namun sejak tahun 1997 dana tersebut bersifat pinjaman dengan bunga 6% per tahun. Dari Ornop lokal ke kelompok bersifat pinjaman dengan bunga yang berbeda besarnya tergantung kesepakatan masing-masing Ornop lokal dengan kelompok binaannya.
	Waktu pelaksanaan	1993-1998
	Mekanisme pelaksanaan	- CRS memberikan pelatihan tentang UBSP kepada staf lapangan Ornop mitra. - Ornop mitra membentuk kelompok ibu-ibu posyandu menjadi kelompok UBSP, namun ada juga bapak-bapak yang ikut bergabung dalam kelompok ini. - Ornop mitra memberikan pelatihan tentang UBSP kepada ketua kelompok UBSP. - Kelompok UBSP melakukan kegiatan simpan pinjam dengan anggota, setelah 6 bulan boleh mengajukan pinjaman ke Ornop mitra yang membinanya. Gabungan pinjaman kelompok Ornop mitra merupakan ajuan permintaan dana ke CRS. - Kegiatan ini secara berkala dilaporkan oleh Ornop mitra kepada CRS.
	Pencapaian hasil	- Pada akhir September 1998, terdapat 2 LSM lokal di Ketapang dan Ende yang dihentikan bantuannya. - Proyek ini telah melibatkan 12.916 orang anggota kelompok yang aktif. - Satu LSM mitra (YSBS dari Cilacap) telah mampu mengembalikan pinjaman dari CRS sebesar Rp26,5 juta rupiah beikut bunga sebesar 6% per tahun. - Beberapa Ornop mitra bekerja sama dengan beberapa instansi terkait memberikan pelatihan keterampilan jenis usaha mikro kepada anggota kelompok binaan.
	Masalah	Sebagian besar LSM mitra tetap menganggap dana bantuan modal sebagai dana hibah sehingga mereka tidak mengelola dana tersebut dengan baik. Hal ini membuat menurunnya <i>port folio</i> dana bantuan modal yang dikelola oleh Ornop mitra.
	Status saat ini	Proyek ini ditutup pada September 1998. Sisa dana bantuan telah diberikan sebagai dana hibah. Setelah proyek ditutup, CRS tidak lagi meminta laporan kegiatan dari LSM mitra dan tidak ada lagi supervisi dari CRS.
	Potensi	Kelompok simpan pinjam berpotensi menjadi koperasi (beberapa LSM mitra sudah membantu menyiapkan kelompok untuk membentuk koperasi).

No.	Item	Penjelasan
2.2	Nama upaya	Proyek Village Banking/Kelompok Swadaya Wanita (KSW)
	Deskripsi upaya	CRS bekerja sama dengan 2 LSM, yakni mitra Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) dari Cilacap dan Yayasan Cinta Sesama (YCS) dari Maumere, untuk membentuk lembaga keuangan mikro untuk kelompok perempuan.
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS bersama YSBS dan YCS
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menyediakan pelayanan keuangan mikro (simpan pinjam) kepada 1.400 perempuan miskin yang mempunyai usaha produktif untuk meningkatkan pendapatannya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bantuan modal - Bantuan biaya operasional proyek - Biaya kegiatan pelatihan untuk pengurus kelompok dan ketua kelompok tanggung renteng
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Banyumas, Purbalingga) dan NTT (Kab Sikka)
	Sasaran	Perempuan miskin yang punya usaha mikro. Dibentuk kelompok simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, kelompok tersebut diberi nama Kelompok Swadaya Wanita (KSM). Satu kelompok terdiri dari minimal 20 orang anggota yang dibagi dalam 4 kelompok tanggung renteng.
	Pendanaan	<p>CRS: \$116.500 USAID: \$139.500 Cordaid (Belanda): \$46.000</p> <p>Dana penyertaan modal, baik dari CRS ke LSM mitra maupun dari LSM mitra ke kelompok binaannya adalah bersifat pinjaman. Bunga pinjaman dari CRS ke LSM mitra adalah 0.5% per tahun. Namun setelah pinjaman tersebut dikembalikan ke CRS dalam jangka waktu 2 tahun, dana penyertaan modal tersebut beserta bunganya dikembalikan lagi oleh CRS ke LSM mitra sebagai dana hibah.</p>
	Waktu pelaksanaan	Januari 1999-September 2000
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - CRS memberikan bantuan dana penyertaan modal kepada YSBS dan YCS masing-masing sebesar Rp150 juta dan Rp100 juta dengan cara bertahap. - Staf YSBS dan YCS menghimpun perempuan yang mempunyai usaha dan berminat ikut dalam proyek ini dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut Kelompok Swadaya Wanita (KSW). - Masing-masing KSW dibagi dalam 4 kelompok tanggung renteng. Arti tanggung renteng adalah apabila salah seorang peminjam tidak dapat membayar kreditnya, anggota lainnya dalam satu kelompok tanggung renteng yang harus membayar hutang temannya. <p><u>Mekanisme kegiatan di YSBS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap kelompok yang terbentuk diminta untuk mengadakan pertemuan sebanyak empat kali (periode pertemuan adalah setiap bulan). - Dalam pertemuan tersebut LSM mitra memberikan pelatihan informal tentang simpan pinjam kelompok dan setiap kali pertemuan semua anggota diminta menabung sesuai dengan kesepakatan bersama. - Setelah lima kali pertemuan, anggota boleh mengajukan pinjaman kepada YSBS. - Pinjaman pertama kali maksimum sebesar Rp200.000,- per orang yang dicicil selama 4 bulan dengan bunga tetap 2%. Pinjaman tersebut atas nama kelompok tanggung renteng. - Setelah putaran pinjaman berakhir, kelompok dan YSBS membuat peraturan pinjaman baru sesuai dengan kesepakatan bersama seperti jumlah maksimal pinjaman, besar tabungan, lama cicilan (ada 3 periode cicilan: 4 bulan; 6 bulan dan 8 bulan).

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p><u>Mekanisme kegiatan di YCS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seperti halnya di YSBS, perempuan pengusaha produktif dikelompokkan dalam kelompok Swadaya Wanita (KSW). - Kelompok diharuskan menabung, setelah 3 bulan kegiatan menabung berjalan, kelompok boleh mengajukan pinjaman ke YCS dengan perbandingan 3:1 (bila kelompok mempunyai simpanan 1 bagian, kelompok dapat mengajukan pinjaman 3 bagian). - Bunga pinjaman tetap dari YCS ke kelompok sebesar 2% per bulan. Dari Kelompok ke anggota sebesar 2.5% per bulan. Dengan jangka waktu pinjaman 8 bulan. <p>Saat ini Jangka waktu pinjaman dari Kelompok ke LSM mitra adalah 8-12 bulan.</p> <p><u>Pelatihan:</u></p> <p>LSM mitra juga memberikan pelatihan formal tentang simpan pinjam dan pembukuan kepada KSW. Peserta yang ikut pelatihan adalah Ketua Pengurus, Sekretaris, Bendahara dan empat ketua kelompok tanggung renteng.</p> <p>Tidak ada pelatihan formal untuk staf LSM mitra.</p>
	Pencapaian hasil	<p>Sampai September 2000, sejumlah 1.912 perempuan di wilayah binaan LSM mitra yang terlibat dalam KSM.</p> <p>YSBS dengan kegiatan ini telah mempunyai koperasi simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Kasih Ibu, dengan jumlah modal sebesar Rp609 juta rupiah.</p>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesulitan pengembalian pinjaman kelompok pada putaran yang ketiga di Kabupaten Sikka. - Masih lemahnya kemampuan LSM mitra - Terbatasnya kesempatan usaha di Kab. Sikka.
	Status saat ini	Proyek tersebut telah selesai
	Potensi	Memiliki potensi untuk membangun koperasi simpan pinjam. Ketika proyek ini berhenti, satu LSM mitra (YSBS) mampu membiayai kegiatan secara swadaya
2.3	Nama upaya	Institutional Transformation for Scale and Self-Sufficiency
	Deskripsi upaya	CRS Indonesia bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank (PT. Ukabima) menyediakan pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin melalui (Bank Perkreditan Rakyat) BPR setempat
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS bersama PT. Ukabima
	Instansi terkait	Bank Indonesia, Dept Kehakiman dan USAID
	Tujuan upaya	Membantu terbentuknya BPR melalui Ukabima agar dapat memastikan pelayanan keuangan formal yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.
	Jenis kegiatan	Menyediakan dana pinjaman kepada Ukabima yang akan memberikan pinjaman kepada BPR mitra.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa, Bali, NTB
	Sasaran	BPR-BPR di wilayah pelaksanaan proyek yang akan memberikan kredit mikro kepada masyarakat miskin di pedesaan, terutama perempuan.
	Pendanaan	Dana ini berasal dari USAID Grant. Dana untuk penyertaan modal dari CRS ke Ukabima bersifat pinjaman.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1995-2000
	Mekanisme pelaksanaan	CRS mendanai: biaya operasional proyek, dana penyertaan modal dan biaya pelatihan dan bantuan teknik untuk staf Ukabima dan BPR.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai akhir September 2002, Ukabima telah bermitra dengan 20 BPR dan telah menginvestasi dana bantuan modal sebesar Rp4,886 milyar. - Salah satu LSM mitra telah berubah menjadi BPR - Satu LSM mitra (YSBS) ketika proyek ini berhenti sudah mampu membiayai kegiatan ini sendiri.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - PT Ukabima baru mulai beroperasi dan belum mampu berekspansi ke luar Jawa. - Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang kenaikan kapitalisasi BPR dari Rp 50 juta menjadi Rp500 juta. Hal ini menghambat pembentukan BPR. - Pendaftaran pembentukan BPR memerlukan proses yang sangat lama.
	Status saat ini	Proyek sudah selesai. PT. Ukabima dan BPR masih bermitra dalam kegiatan ini, namun dari dana yang berbeda.

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk BPR-BPR di tempat lain yang mempunyai visi mempromosikan keuangan mikro untuk masyarakat miskin. - PT Ukabima dapat melayani lembaga pelayanan keuangan mikro yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin.
2.4	Nama upaya	Program Bantuan Koperasi (Cooperative Assistance Program)
	Deskripsi upaya	CRS bekerja sama dengan LSM internasional ACDI-VOCA sebagai <i>sub-grantee</i> untuk menyediakan pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin melalui koperasi mitra dengan mendistribusikan tepung gandum.
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS, ACDI-VOCA Indonesia
	Instansi terkait	Dep. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi Perkreditan Indonesia
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui distribusi tepung gandum. - Menyediakan lembaga keuangan mikro melalui koperasi yang dapat memberi pelayanan kredit mikro kepada masyarakat miskin.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan modal berbentuk komoditi; tepung gandum dari CRS ke ACDI-VOCA; bersifat hibah. - Pelatihan dan bantuan teknik bagi ACDI-VOCA dan koperasi mitra.
	Wilayah pelaksanaan	Jabotabek, Kota Surabaya dan Makassar
	Sasaran	Pengusaha mikro yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan dasar usahanya.
	Pendanaan	USDA Grant (monetization) Distribusi tepung gandum dari CRS ke ACDI-VOCA bersifat hibah.
	Waktu pelaksanaan	Oktober 2000-2001
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - CRS memberikan bantuan tepung gandum kepada ACDI-VOCA yang akan diberikan kepada koperasi mitra sebagai pinjaman yang berbentuk komoditi. - Koperasi mitra memberikan kredit tepung gandum kepada pengusaha mikro yang menggunakan tepung sebagai bahan dasar usaha. Pengembalian pinjaman berupa uang tunai. - Koperasi membangun dana bergulir dari hasil pengembalian pinjaman tepung gandum, yang akan memperkuat modal koperasi untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro lainnya. - CRS membiayai pelatihan dan memberikan bantuan teknik kepada staf ACDI-VOCA dan koperasi mitra.
	Pencapaian hasil	Bantuan tepung gandum untuk proyek ini sejumlah 5,5.000 ton.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek ini di buat hanya untuk 1 tahun. Pelaksanaannya terlambat karena kesukaran dalam mendapatkan kesepakatan dan penentuan perencanaan akhir dari para pelaku proyek. - Proyek juga mempunyai masalah kesalahan manajemen yang menyebabkan kerugian dana yang cukup besar.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.5	Nama upaya	Program Penguatan BPR (monetization)
	Deskripsi upaya	CRS bekerja sama dengan PT. Ukabima menyediakan pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin melalui BPR.
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS dan PT. Ukabima
	Instansi terkait	Bank Indonesia, USAID
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan Ukabima dan Jaringan BPR melalui penyediaan dana, penyertaan modal, pelatihan dan bantuan teknis. - Melengkapi BPR agar dapat menyediakan pelayanan keuangan maupun non keuangan sehingga mampu menjadi lembaga keuangan yang secara operasional menguntungkan dan berkelanjutan.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dana bantuan penyertaan modal untuk Ukabima yang akan dipinjamkan kepada BPR. - Pelatihan - Bantuan teknis bagi Ukabima dan PBR mitra
	Wilayah pelaksanaan	Jawa, Bali, Sumatra, dan NTB
	Sasaran	BPR mitra Ukabima
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - USDA Grant - Dana dari CRS ke Ukabima bersifat pinjaman - Dana dari Ukabima ke BPR bersifat pinjaman
	Waktu pelaksanaan	Oktober 2000-September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - CRS memberikan dana bantuan modal kepada Ukabima yang akan di pinjamkan kepada BPR mitra. - CRS memfasilitasi pelatihan dan bantuan teknis bagi staf Ukabima dan BPR mitra
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir Juni 2003, Ukabima telah bermitra dengan 40 BPR. Salah satu BPR tersebut dimiliki oleh Ukabima. Investasi kepada BPR mencapai Rp23.2 milyar. - Sejumlah 165.000 orang pengusaha mikro berpartisipasi pada proyek ini. - BPR yang ke dua akan dimiliki oleh Ukabima dan akan diresmikan pada bulan September 2003
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembentukan BPR memerlukan waktu yang panjang. - Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru bahwa kapitalisasi modal BPR meningkat dari Rp50 juta menjadi Rp500 juta, menghambat pembentukan BPR. - Banyak program keuangan mikro dari pemerintah yang memberi bunga pinjaman lebih kecil dari Ukabima.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	BPR-BPR di bawah binaan Ukabima mendapat bantuan teknik yang cukup baik. Hal ini membuat BPR tersebut mempunyai ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis finansial.
2.6	Nama upaya	Program Kredit Khusus untuk Masyarakat Miskin Tanpa Agunan (Kusuma)
	Deskripsi upaya	CRS bekerja sama dengan PT. Ukabima menyediakan pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin melalui BPR.
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS dan PT. Ukabima
	Instansi terkait	Bank Indonesia, USAID
	Tujuan upaya	Mengembangkan, menguji dan melaksanakan metode kredit untuk orang miskin tanpa agunan (Program Kusuma) melalui BPR mitra.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan modal - Pelatihan - Bantuan teknis
	Wilayah pelaksanaan	Jawa
	Sasaran	Perempuan yang mempunyai usaha produktif dan merupakan nasabah BPR mitra Ukabima.
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - USAID - Dari CRS ke Ukabima dan dari Ukabima bersifat pinjaman
	Waktu pelaksanaan	Oktober 1999-September 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan pengusaha mikro binaan BPR mitra Ukabima dibentuk dalam beberapa kelompok. Setelah itu, mereka boleh mengajukan pinjaman dengan jaminan kelompok. - CRS memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada staf Ukabima, BPR dan nasabah yang ikut dalam kegiatan ini.
	Pencapaian hasil	Pada akhir Juni 2003, Ukabima telah bermitra dengan 5 BPR. Investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp1.2 milyar. Sebanyak 5.307 pengusaha mikro berpartisipasi dalam kegiatan ini.
	Masalah	Program Kusuma sulit berkembang karena di lapangan banyak program yang memberikan pelayanan kredit tanpa agunan dengan jumlah yang besar, lebih fleksibel dan biaya yang lebih murah.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kusuma menggunakan metode yang mampu mencapai orang miskin sekaligus memberi keuntungan bagi mereka. Program ini berpotensi untuk dikembangkan di daerah lain. - Program ini juga dapat mendorong pengembangan masyarakat, seperti pemberdayaan perempuan dan partisipasi masyarakat.
7.	Nama upaya	Proyek Ulut Sutera
	Deskripsi upaya	CRS bekerja sama dengan 2 LSM lokal, diantaranya YSBS untuk mengembangkan proyek ulat sutera melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani ulat sutera di Banyumas.
	Penanggung jawab	CRS Indonesia
	Pelaksana	CRS dan YSBS Banyumas Sutera Alam
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di kabupaten Banyumas melalui transfer teknologi budidaya ulat sutera.
	Jenis kegiatan	Pelatihan petani ulat sutera
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Banyumas)
	Sasaran	Petani ulat sutera
	Pendanaan	Dana berasal dari Cordaid (Belanda) sebesar Rp243.799.600,- bersifat hibah dari CRS ke YSBS
	Waktu pelaksanaan	Juni 1999-September 2001
	Mekanisme pelaksanaan	Petani ulat sutera yang terpilih diberi pelatihan budidaya ulat sutera
	Pencapaian hasil	YBS telah melatih 978 petani, hanya 317 dari mereka yang melakukan usaha budidaya ulat sutera. Dari 317 petani tersebut, sekarang hanya tinggal 68 petani yang tetap membudidayakan ulat sutera
	Masalah	Sesungguhnya budidaya ulat sutera adalah usaha yang menguntungkan. Kegiatan ini gagal karena petani tidak mengikuti metode yang telah diberikan pada saat pelatihan seperti memelihara kualitas telur, kebersihan dan sterilisasi tempat telur dan alat-alat.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3. Christian Children Fund (CCF)		
3.1	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampungan
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan proyek yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal
	Instansi terkait	Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Dilaksanakan di 8 propinsi
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan:	Sumber : CCF; Sifat dana: hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening, sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra memiliki pekerja sosial yang profesional dan handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.1	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Belitang Buay Madang
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Belitang Buay Madang yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Belitang Buay Madang untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Belitang Buay Madang)

No.	Item	Penjelasan												
	Instansi terkait	Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian												
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 												
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 												
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kab Ogan Komering Ilir (OKI) I, Kec Belitang, Buay Madang, dan Madang Suku I, Desa Rejosari, Rejodadi, dan Pandansari)												
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Belitang Buay Madang yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>												
	Pendanaan:	<p>Nilai bantuan/dana:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">89.215.649</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">31.296.500</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">190.638.600</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">175.698.600</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">37.624.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF; Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	89.215.649	1998	31.296.500	1999	190.638.600	2000	175.698.600	2002	37.624.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1997	89.215.649													
1998	31.296.500													
1999	190.638.600													
2000	175.698.600													
2002	37.624.000													
	Waktu pelaksanaan	<p>Tahun 1997-2000</p> <p>Tahun 2002-2003</p>												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Belitang Buay Madang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Belitang Buay Madang. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Belitang Buay Madang, sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Belitang Buay Madang akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Belitang Buay Madang berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 												
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp524.473.349 yang disalurkan saat ini telah meningkat menjadi Rp638.818.849. - Jumlah sasaran yang masih aktif dari 1298 keluarga (105 kelompok) berkembang menjadi 1458 keluarga (3 kelompok) 												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.												
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Belitang Buay Madang memiliki pekerja sosial yang profesional dan handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 												

No.	Item	Penjelasan								
3.1.2	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Rahayu Kasih								
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Rahayu Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan NGO lokal dalam Proyek Rahayu Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama NGO Lokal (Proyek Rahayu Kasih)								
	Instansi terkait	Dinas Peternakan								
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh NGO mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja social/staf pProyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh sStaf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang, Kec Amarasi, Desa Oebesi, Pakubaun, dan Oenani)								
	Sasaran	Keluarga dampingan NGO mitra/Proyek Rahayu Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)								
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>39.592.134</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>69.250.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>91.000.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	39.592.134	2000	69.250.000	2001	91.000.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
1998	39.592.134									
2000	69.250.000									
2001	91.000.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998, 2000, 2001								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada NGO mitra/Proyek Rahayu Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Rahayu Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Rahayu Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - NGO mitra/Proyek Rahayu Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - NGO mitra/Proyek Rahayu Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp199.842.134 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp501.500.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 514 keluarga (31 kelompok) menjadi 199 keluarga (15 kelompok) 								

No.	Item	Penjelasan												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.												
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - NGO mitra/Proyek Rahayu Kasih memiliki pekerja sosial yang untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar NGO-NGO mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan NGO-NGO mitra. 												
3.1.3	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Tunas Kasih												
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Tunas Kasih yang menderita akibat kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Tunas Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual dan kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>												
	Penanggung jawab	CCF Indonesia												
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Tunas Kasih)												
	Instansi terkait													
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 												
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 												
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat, Kec Cengkareng, Kel Tegal Alur)												
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Tunas Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)												
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>46.800.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>33.000.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>10.800.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>16.210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF; Sifat dana : hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	15.000.000	1998	46.800.000	1999	33.000.000	2002	10.800.000	2003	16.210.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1997	15.000.000													
1998	46.800.000													
1999	33.000.000													
2002	10.800.000													
2003	16.210.000													

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-1999, 2002-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Tunas Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Tunas Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Tunas Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja (time table) yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Tunas Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Tunas Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp121.810.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp287.270.950 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2017 keluarga (3 kelompok) menjadi 867 keluarga (1 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Tunas Kasih memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra
3.1.4	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Warga Upadaya
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Warga Upadaya yang menderita akibat kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Warga Upadaya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual dan kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Warga Upadaya)
	Instansi terkait	BK3D
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.

No.	Item	Penjelasan														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kota Bogor, Kec Bogor Tengah dan Bogor Timur, Kel Sukasari, Babakan Pasar, dan Paledang)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Warga Upadaya yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">22.625.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">6.810.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">98.400.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">13.566.300</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">37.700.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">17.250.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	22.625.000	1998	6.810.000	1999	98.400.000	2000	13.566.300	2001	37.700.000	2002	17.250.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	22.625.000															
1998	6.810.000															
1999	98.400.000															
2000	13.566.300															
2001	37.700.000															
2002	17.250.000															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2002														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Warga Upadaya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Warga Upadaya. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Warga Upadaya sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Warga Upadaya akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran dan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. 														
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp196.351.300 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp435.073.138 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 989 keluarga (5 kelompok) menjadi 811 keluarga 														
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 														
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.														
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Warga Upadaya memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra 														
3.1.5	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Lembaga Dana Atmaja														
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Lembaga Dana Atmaja yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Lembaga Dana Atmaja untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.														

No.	Item	Penjelasan																
	Deskripsi upaya (lanjutan)	Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.																
	Penanggung jawab	CCF Indonesia																
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Lembaga Dana Atmaja)																
	Instansi terkait	BK3D Propinsi Lampung																
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai - Membantu para petani untuk mendapatkan pinjaman sarana produksi pertanian yang dapat dibayar setelah panen. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 																
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 																
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab Lampung Tengah dan Lampung Selatan, Kec Gedong Tatakan, Probolinggo, Rumbia, dan Tanjung Bintang, Desa Tirahayu, Tegalyoso, Rantau Jaya, Wonodadi, Bangunsari, Wawasan, dan Sidomukti)																
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Lembaga Dana Atmaja yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)																
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">10.700.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">41.171.450</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">270.500.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">127.335.350</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">470.649.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">179.087.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">74.038.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	10.700.000	1998	41.171.450	1999	270.500.000	2000	127.335.350	2001	470.649.000	2002	179.087.000	2003	74.038.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)																	
1997	10.700.000																	
1998	41.171.450																	
1999	270.500.000																	
2000	127.335.350																	
2001	470.649.000																	
2002	179.087.000																	
2003	74.038.000																	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2002																
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Lembaga Dana Atmaja dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Lembaga Dana Atmaja. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Lembaga Dana Atmaja, sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Lembaga Dana Atmaja akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Lembaga Dana Atmaja berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 																

No.	Item	Penjelasan								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp1.173.480.800 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp2.323.241.958 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 7702 keluarga (203 kelompok) menjadi 1455 keluarga (169 kelompok) 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Lembaga Dana Atmaja memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra 								
3.1.6	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Santa Elizabeth								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Santa Elizabeth yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Santa Elizabeth untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya bagi terutama kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Santa Elizabeth)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Flores Timur, Kec Larantuka dan Tanjungbunga, Desa Riangkotek, Wailolong, Painapang, dan Bantala)								
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Santa Elizabeth, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana:</p> <table> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999</td> <td>77.382.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>215.500.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>196.467.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1999	77.382.000	2000	215.500.000	2001	196.467.500
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
1999	77.382.000									
2000	215.500.000									
2001	196.467.500									

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2001
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Santa Elizabeth dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Santa Elizabeth. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Santa Elizabeth sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Santa Elizabeth akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Santa Elizabeth berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp489.349.500 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp389.125.850 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1254 keluarga (33 kelompok) menjadi 943 keluarga (15 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Santa Elizabeth memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra
3.1.7	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Kusa Bakti
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Kusa Bakti yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Kusa Bakti untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia dan ORNOP Lokal (Proyek Kusa Bakti)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.

No.	Item	Penjelasan																
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 																
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Malaka Timur, Desa Nurobo dan Aubau)																
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Kusa Bakti, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>																
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">35.008.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">77.911.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">7.064.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">95.717.500</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">194.665.700</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">230.513.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">48.593.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	35.008.000	1998	77.911.000	1999	7.064.000	2000	95.717.500	2001	194.665.700	2002	230.513.000	2003	48.593.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)																	
1997	35.008.000																	
1998	77.911.000																	
1999	7.064.000																	
2000	95.717.500																	
2001	194.665.700																	
2002	230.513.000																	
2003	48.593.000																	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003																
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Kusa Bakti dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Kusa Bakti. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Kusa Bakti sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Kusa Bakti akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Kusa Bakti berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 																
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp689.472.200 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp774.843.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 3939 keluarga (206 kelompok) menjadi 3153 keluarga (162 kelompok) 																
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 																
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.																
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Kusa Bakti memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra 																

No.	Item	Penjelasan
3.1.8	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Mambait Jaya
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Mambait Jaya yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Mambait Jaya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Mambait Jaya)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang, Kec Kupang Barat, Desa Oemasi dan Oben)
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Mambait Jaya, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan	Nilai bantuan: Rp288.394.500 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Mambait Jaya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Mambait Jaya. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Mambait Jaya sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Mambait Jaya akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Mambait Jaya berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	Usaha penggemukan sapi berkembang dari dana Rp288.394.500 menjadi Rp666.215.420 dan jumlah anggota yang aktif tetap sebanyak 12 kelompok (400 KK)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.

No.	Item	Penjelasan												
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Mambait Jaya memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra 												
3.1.9	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Megu Wiit												
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Megu Wiit yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Megu Wiit untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>												
	Penanggung jawab	CCF Indonesia												
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Megu Wiit)												
	Instansi terkait													
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 												
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 												
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Sika, Kec Talibura, Desa Darat Gunung, Talibura, Nangahale)												
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Megu Wiit yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)												
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah(Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">14.580.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">74.000.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">134.950.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">224.950.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">115.550.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah(Rupiah)	1997	14.580.000	2000	74.000.000	2001	134.950.000	2002	224.950.000	2003	115.550.000
Tahun	Jumlah(Rupiah)													
1997	14.580.000													
2000	74.000.000													
2001	134.950.000													
2002	224.950.000													
2003	115.550.000													
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997, 2000-2003												

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Megu Wiit dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Megu Wiit. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Megu Wiit sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Megu Wiit akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Megu Wiit berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan Rp564.030.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 630.550.000 - Jumlah sasaran yang aktif dari 1434 keluarga (61kelompok) berkembang menjadi 1455 keluarga (25 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Megu Wiit memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra
3.1.10	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Temu Kasih
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Temu Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Temu Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama dengan ORNOP Lokal (Proyek Temu Kasih)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia

No.	Item	Penjelasan														
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur, Kec Waingapu Kota dan Rindi Umalu, Desa Temu, Kamala Putih, Patawang, dan Matawai Atu)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Temu Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>149.770.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>369.597.500</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>194.683.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>73.947.250</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>384.752.700</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>147.744.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF; Sifat dana : hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	149.770.000	1999	369.597.500	2000	194.683.000	2001	73.947.250	2002	384.752.700	2003	147.744.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1998	149.770.000															
1999	369.597.500															
2000	194.683.000															
2001	73.947.250															
2002	384.752.700															
2003	147.744.000															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2003														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Temu Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Temu Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Temu Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Temu Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Temu Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 														
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan Rp1.320.494.450 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp1.366.148.350 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2326 keluarga (15 kelompok) menjadi 2033 keluarga (14 kelompok) 														
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Sebagian besar masyarakat masih lebih memprioritaskan kepentingan adat daripada kegiatan peningkatan pendapatan. 														
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.														
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Temu Kasih memiliki pekerja sosial yang handal untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra 														
3.1.11	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Kawangu Sejahtera														
	Deskripsi upaya (lanjutan)	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Kawangu Sejahtera yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Kawangu Sejahtera untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.														

No.	Item	Penjelasan														
	Deskripsi upaya	Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Kawangu Sejahtera)														
	Instansi terkait	Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian														
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Menyiapkan kemandirian keluarga dan masyarakat sehingga pada tahun 2004 mereka dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga tanpa bantuan dari CCF lagi. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur, Kec Pendawai, Desa Kawangu)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Kawangu Sejahtera, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>52.650.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>93.500.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>75.900.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>51.888.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>247.435.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>251.362.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	52.650.000	1999	93.500.000	2000	75.900.000	2001	51.888.000	2002	247.435.000	2003	251.362.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1998	52.650.000															
1999	93.500.000															
2000	75.900.000															
2001	51.888.000															
2002	247.435.000															
2003	251.362.000															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2003														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Kawangu Sejahtera dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Kawangu Sejahtera. - Dalam pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Kawangu Sejahtera sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Kawangu Sejahtera akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Kawangu Sejahtera berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 														
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dari dana bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp772.735.000 telah berkembang menjadi Rp861.476.000. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1.657 keluarga (23 kelompok) menjadi 1.487 keluarga 1487 (23 kelompok). 														

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Adanya kesalahan manajemen di tingkat ORNOP mitra/ pelaksana proyek (pengurus lama dan sekarang telah diganti). - Adanya bencana alam (hama belalang) yang sangat merugikan usaha peternakan dan pertanian. - ORNOP mitra tidak memiliki jaringan pasar yang luas sehingga perkembangan usaha sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat setempat saja.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Kawangu Sejahtera memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.12	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Siwi Waluyo Jaya
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Siwi Waluyo Jaya yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Siwi Waluyo Jaya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Siwi Waluyo Jaya)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan & Dinas Koperasi
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab Lampung Tengah, Kecamatan Jabung, Desa Gunung Pasir Jaya, Pugung Raharjo, Gunung Agung)
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Siwi Waluyo Jaya, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).

No.	Item	Penjelasan																
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>8.730.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>167.104.300</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>288.925.650</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>22.000.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>31.329.950</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>116.105.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>11.232.300</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	8.730.000	1998	167.104.300	1999	288.925.650	2000	22.000.000	2001	31.329.950	2002	116.105.000	2003	11.232.300
Tahun	Jumlah (Rupiah)																	
1997	8.730.000																	
1998	167.104.300																	
1999	288.925.650																	
2000	22.000.000																	
2001	31.329.950																	
2002	116.105.000																	
2003	11.232.300																	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003																
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Siwi Waluyo Jaya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Siwi Waluyo Jaya. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Siwi Waluyo Jaya sesuai dengan rencana dan agendakerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Siwi Waluyo Jaya akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Siwi Waluyo Jaya berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 																
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp645.427.200 telah berkembang menjadi Rp1.196.128.478 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 5.345 keluarga (25 kelompok) menjadi 2.355 keluarga (7 kelompok) 																
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Kelompok tidak terbiasa dengan pembukuan dan administrasi. 																
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program peningkatan pendapatan yang dikembangkan oleh Proyek Siwi Waluyo Jayaini.																
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 																
3.1.13	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Muri Mada																
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Muri Mada Jaya yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Muri Mada Jaya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.																

No.	Item	Penjelasan														
	Deskripsi upaya (lanjutan)	Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Muri Mada)														
	Instansi terkait															
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan Evaluasi oleh Staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur, Kec Pendawai, Desa Palakahembi)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Muri Mada, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">50.400.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">129.154.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">84.405.500</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">519.659.500</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">314.848.500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">318.530.250</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	50.400.000	1998	129.154.000	1999	84.405.500	2000	519.659.500	2001	314.848.500	2002	318.530.250
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	50.400.000															
1998	129.154.000															
1999	84.405.500															
2000	519.659.500															
2001	314.848.500															
2002	318.530.250															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2002														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Muri Mada dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Muri Mada. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Muri Mada sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Muri Mada akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Muri Mada berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 														
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 1.731.846.250 telah menjadi Rp1.220.875.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2.388 keluarga (93 kelompok) menjadi 1.470 keluarga (72 kelompok). 														

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Usaha yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada (lahan pertanian yang luas) banyak mengalami kegagalan karena hama belalang.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program peningkatan pendapatan yang dikembangkan oleh Proyek Muri Mada.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Muri Mada memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - Keluarga dampingan memiliki lahan yang cukup yang dapat dimanfaatkan untuk usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.14	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Ruku Ramba
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Ruku Ramba yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Ruku Ramba untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Ruku Ramba)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Ende, Kec Ende, Desa Ruku Ramba)
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Ruku Ramba, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>

No.	Item	Penjelasan																
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>11.751.775</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>141.574.200</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>143.137.800</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>132.896.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>99.659.900</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>244.816.200</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>54.622.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	11.751.775	1998	141.574.200	1999	143.137.800	2000	132.896.000	2001	99.659.900	2002	244.816.200	2003	54.622.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)																	
1997	11.751.775																	
1998	141.574.200																	
1999	143.137.800																	
2000	132.896.000																	
2001	99.659.900																	
2002	244.816.200																	
2003	54.622.000																	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003																
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Ruku Ramba dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Ruku Ramba. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Ruku Ramba sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Ruku Ramba akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Ruku Ramba berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 																
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp 828.457.875 telah berkembang menjadi Rp 1.944.826.325. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2.494 keluarga (19 kelompok) menjadi 1.740 keluarga (14 kelompok). 																
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Lokasi warga dampingan terpencar-pencar di dusun-dusun yang terpencil sehingga menyulitkan pendampingan. 																
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.																
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Ruku Ramba memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 																
3.1.15	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Taloitan Anah																
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Taloitan Anah Yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Taloitan Anah untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>																

No.	Item	Penjelasan										
	Penanggung jawab	CCF Indonesia										
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Taloitan Anah)										
	Instansi terkait	Dinas Peternakan										
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 										
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 										
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang, Kec Kupang Tengah dan Kupang Barat, Desa Manulai I, Manulai II, Oeltua)										
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Taloitan Anah, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).</p>										
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">55.800.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">170.709.750</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">261.393.500</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">97.737.550</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	55.800.000	2001	170.709.750	2001	261.393.500	2003	97.737.550
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
1998	55.800.000											
2001	170.709.750											
2001	261.393.500											
2003	97.737.550											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998, 2001-2003										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Taloitan Anah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Taloitan Anah. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Taloitan Anah sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Taloitan Anah akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Taloitan Anah berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp585.640.800 telah berkembang menjadi Rp765.179.375. - Jumlah sasaran yang tetap aktif sebanyak 622 keluarga (52 kelompok). 										
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 										
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.										

No.	Item	Penjelasan														
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Taloitan Anah memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 														
3.1.16	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Dula Luri														
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Dula Luri yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Dula Luri untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia dan Ornop lokal (Proyek Dula Luri)														
	Instansi terkait	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan														
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur, Kec Haharu, Desa Kuta, Hambapraing, Kahiri, dan Praipaha)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Dula Luri, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: Telah telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">55.932.500</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">32.021.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">190.694.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">197.325.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">159.980.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">43.556.995</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	55.932.500	1998	32.021.000	1999	190.694.000	2000	197.325.000	2001	159.980.000	2002	43.556.995
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	55.932.500															
1998	32.021.000															
1999	190.694.000															
2000	197.325.000															
2001	159.980.000															
2002	43.556.995															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2002														

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Dula Luri dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Dula Luri. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Dula Luri sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Dula Luri akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Dula Luri berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp679.509.495 telah berkurang menjadi Rp 276,875,000. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1.566 keluarga (40 kelompok) menjadi 266 keluarga (16 kelompok).
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Usaha yang telah disesuaikan dengan sumber daya yang ada (pertanian dan peternakan) banyak mengalami kegagalan karena serangan hama belalang dan kemarau panjang.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program peningkatan ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Dula Luri memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.17	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bina Lestari
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Bina Lestari yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Bina Lestari untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.
	Deskripsi upaya (lanjutan)	Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Bina Lestari)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.

No.	Item	Penjelasan								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab Tanggamus, Kec Pringsewu, Desa Waluyojati)								
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Bina Lestari, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : Telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)								
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">197.429.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">78.889.950</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">3.,175.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1999	197.429.000	2000	78.889.950	2001	3.,175.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
1999	197.429.000									
2000	78.889.950									
2001	3.,175.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2001								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Bina Lestari dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Bina Lestari. - CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Bina Lestari, untuk pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan agendakerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Bina Lestari akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Bina Lestari berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp307.493.950 telah berkurang menjadi Rp112.754.795 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2265 keluarga (116 kelompok) menjadi keluarga 1412 (69 kelompok) 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Bina Lestari memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								
3.1.18	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Kinasih								
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Kinasih yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Kinasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.								

No.	Item	Penjelasan												
	Deskripsi upaya (lanjutan)	Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.												
	Penanggung jawab	CCF Indonesia												
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Kinasih)												
	Instansi terkait													
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 												
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf Proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 												
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab Tanggamus, Kec Pagelaran, Desa Candiretno dan Bandungbaru)												
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Kinasih, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).												
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">8.730.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">167.104.300</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">463.854.150</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">211.546.900</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">15.514.500</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	8.730.000	1998	167.104.300	1999	463.854.150	2000	211.546.900	2003	15.514.500
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1997	8.730.000													
1998	167.104.300													
1999	463.854.150													
2000	211.546.900													
2003	15.514.500													
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999, 2000, 2003												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Kinasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Kinasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Kinasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Kinasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Kinasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 												
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp866.749.850 telah berkembang menjadi Rp1.060.241.296 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 4.244 keluarga (11 kelompok) menjadi 4.221 keluarga (11 kelompok) 												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												

No.	Item	Penjelasan														
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program.														
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Kinasih memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 														
3.1.19	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Marsudi Siwi														
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Marsudi Siwi yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Marsudi Siwi untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Marsudi Siwi)														
	Instansi terkait															
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Boyolali, Kec Sambu, Desa Kepoh)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Marsudi Siwi, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">24.810.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">126.534.100</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">254.365.100</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">35.196.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">14.001.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">172.199.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	24.810.000	1999	126.534.100	2000	254.365.100	2001	35.196.000	2002	14.001.000	2003	172.199.700
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1998	24.810.000															
1999	126.534.100															
2000	254.365.100															
2001	35.196.000															
2002	14.001.000															
2003	172.199.700															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2002, 2003														

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Marsudi Siwi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Marsudi Siwi. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Marsudi Siwi sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Marsudi Siwi akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Marsudi Siwi berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp627.105.900 telah berkurang menjadi Rp443.360.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 3.066 keluarga (280 kelompok) menjadi 1.816 keluarga (111 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Marsudi Siwi memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.20	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Gelekat Lewo
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Gelekat Lewo yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan Ornop lokal dalam Proyek Gelekat Lewo untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama Ornop lokal (Proyek Gelekat Lewo)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia

No.	Item	Penjelasan										
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kabupaten:Flores Timur, Kecamatan: Larantuka, Desa:Ile Padung, Sinar Hading)										
	Sasarana	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Gelekat Lewo, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).										
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>13.020.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>14.250.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>35.750.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>17.500.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	13.020.000	1999	14.250.000	2000	35.750.000	2001	17.500.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
1998	13.020.000											
1999	14.250.000											
2000	35.750.000											
2001	17.500.000											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2001										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Gelekat Lewo dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Gelekat Lewo. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Gelekat Lewo sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Gelekat Lewo akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Gelekat Lewo berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp 80.,520.,000 telah berkembang menjadi Rp 116.250.,000. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 239 keluarga (18 kelompok) menjadi 189 keluarga (15 kelompok). 										
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 										
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program.										
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Gelekat Lewo memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 										
3.1.21	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Masyarakat Sangup										
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Masyarakat Sangup yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Masyarakat Sangup untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.										

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ornop Lokal (Proyek Masyarakat Sangup)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.

No.	Item	Penjelasan										
	Penanggung jawab	CCF Indonesia										
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ornop Lokal (Proyek Masyarakat Sangup)										
	Instansi terkait											
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 										
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 										
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Boyolali, Kec Musuk, Desa Sangup)										
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Masyarakat Sangup yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>										
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">35.998.723</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">201.626.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">46.616.100</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">58.808.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	35.998.723	1998	201.626.000	2000	46.616.100	2001	58.808.400
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
1997	35.998.723											
1998	201.626.000											
2000	46.616.100											
2001	58.808.400											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997, 1998, 2000, 2002										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Masyarakat Sangup dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Masyarakat Sangup. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Masyarakat Sangup untuk pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Masyarakat Sangup akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Masyarakat Sangup berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp343.049.223 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp296.836.450 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1154 keluarga (69 kelompok) menjadi 474 keluarga (27 kelompok) 										
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Lemahnya kepengurusan kelompok menyusul dihentikannya kegiatan pendampingan oleh CCF mengakibatkan usaha ini kurang berkembang. 										

No.	Item	Penjelasan								
	Status saat ini	Bantuan modal dan pendampingan dari CCF dilakukan sampai tahun 2002 dan selanjutnya dikembangkan sendiri oleh BPOT (Badan Perwakilan Orang Tua) sebagai wakil keluarga dan masyarakat dampingan.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Masyarakat Sangu memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								
3.1.22	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Tunas Harapan Mandiri								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Tunas Harapan Mandiri yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Tunas Harapan Mandiri untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ornop lokal (Proyek Tunas Harapan Mandiri)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Cilacap, Kec Gandrungmangu, Desa Cisumur)								
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Tunas Harapan Mandiri yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">91.552.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">25.560.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">20.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1999	91.552.000	2002	25.560.000	2002	20.000.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
1999	91.552.000									
2002	25.560.000									
2002	20.000.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999-2003								

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Tunas Harapan Mandiri dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Tunas Harapan Mandiri. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Tunas Harapan Mandiri sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Tunas Harapan Mandiri akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Tunas Harapan Mandiri berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan Rp137.112.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 60.576.300 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2106 keluarga (8 kelompok) menjadi 1250 keluarga (2 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Tunas Harapan Mandiri memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.23	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bina Mitra Tulakadi
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Bina Mitra Tulakadi yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Bina Mitra Tulakadi untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Bina Mitra Tulakadi)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. . - Meningkatkan kemampuan keluarga untuk mencegah terjadinya rawan pangan.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia

No.	Item	Penjelasan						
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Tasifeto Timur, Desa Silawan dan Tulakadi)						
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Bina Mitra Tulakadi, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak), memiliki tenaga kerja produktif, serta memiliki lahan/pakan ternak.						
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>153.535.750</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>10.933.650</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	153.535.750	2002	10.933.650
Tahun	Jumlah (Rupiah)							
2001	153.535.750							
2002	10.933.650							
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2002						
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Bina Mitra Tulakadi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Bina Mitra Tulakadi. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Bina Mitra Tulakadi, sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Bina Mitra Tulakadi akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Bina Mitra Tulakadi berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 						
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp164.469.400 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp54.750.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 563 keluarga (20 kelompok) menjadi 129 keluarga (1 kelompok) 						
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok masih rendah. - Solidaritas warga/kelompok terhadap warga/kelompok lain masih rendah sehingga mereka tidak merasa perlu untuk menggulirkan dana kepada warga/kelompok lain. 						
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.						
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. - Sebagian besar warga dampingan memiliki lahan yang cukup untuk usaha pertanian atau ternak. 						
3.1.24	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Tetus Manekat						
	Deskripsi Usaha	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Tetus Manekat yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Tetus Manekat untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.						

No.	Item	Penjelasan								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Tetus Manekat)								
	Instansi terkait	Dinas Peternakan								
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang, Kec Kupang Tengah, Desa Oeletsala dan Kuaklalo)								
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Tetus Manekat yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)								
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">11.650.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">43.850.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">26.775.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana : hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	11.650.000	2002	43.850.000	2003	26.775.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	11.650.000									
2002	43.850.000									
2003	26.775.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Tetus Manekat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Tetus Manekat. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Tetus Manekat sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Tetus Manekat akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Tetus Manekat berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp82.275.000 yang telah disalurkan sebesar Rp 82,275,000 telah berkembang menjadi Rp 104.,019.,550 - Jumlah sasaran yang aktif tetap, yaitu 117 keluarga (7 kelompok) 								
	Masalah	CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil.								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Tetus Manekat memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								

No.	Item	Penjelasan										
2.1.25	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampungan Proyek Wesak Welan										
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Wesak Welan yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Wesak Welan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.										
	Penanggung jawab	CCF Indonesia										
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Wesak Welan)										
	Instansi terkait											
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampungan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampungan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 										
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 										
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Ngada, Kec Riung, Desa Benteng Tawa)										
	Sasaran	Keluarga dampungan ORNOP mitra/Proyek Wesak Welan yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampungan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampungan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)										
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">24.855.700</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">16.500.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">10.687.500</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">2.400.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2000	24.855.700	2001	16.500.000	2002	10.687.500	2003	2.400.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
2000	24.855.700											
2001	16.500.000											
2002	10.687.500											
2003	2.400.000											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000-2003										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampungan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Wesak Welan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Wesak Welan. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Wesak Welan sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Wesak Welan akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Wesak Welan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										

No.	Item	Penjelasan								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp54.443.200 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 78.774.000 - Jumlah sasaran yang aktif tetap, yaitu 724 keluarga (13 kelompok) 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Wesak Welan memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								
2.1.26	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bhakti Kasih								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Bhakti Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Bhakti Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Bhakti Kasih)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Klaten, Kec Karangangka, Desa Jiwan)								
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Bhakti Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)</p>								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan</p> <table> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>55.348.950</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>49.965.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>36.632.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	55.348.950	2002	49.965.000	2003	36.632.400
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	55.348.950									
2002	49.965.000									
2003	36.632.400									

No.	Item	Penjelasan
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Bhakti Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Bhakti Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Bhakti Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Bhakti Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Bhakti Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp141.946.350 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 206.055.164 - Jumlah sasaran yang aktif tetap, yaitu 1078 keluarga (51 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D dalam pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Bhakti Kasih memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
2.1.27	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Citra Kasih
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Citra Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Citra Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Citra Kasih)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia

No.	Item	Penjelasan												
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Magelang, Kec Pakis, Sawangan, dan Dukun, Desa Ngablak, Gejagan, Kenalan, Butuh, Sumber, dan Mangunsari)												
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Citra Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).												
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>65.681.550</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>22.719.400</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>213.325.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>10.600.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>65.150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	65.681.550	1998	22.719.400	2000	213.325.000	2001	10.600.000	2002	65.150.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1997	65.681.550													
1998	22.719.400													
2000	213.325.000													
2001	10.600.000													
2002	65.150.000													
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-1998, 2000-2003												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Citra Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Citra Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Citra Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Citra Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran.. 												
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Citra Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut 												
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp377.475.950 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp375.525.307 - Jumlah sasaran yang aktif tetap, yaitu 1728 keluarga (9 kelompok) 												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.												
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Citra Kasih memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 												
2.1.28	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek K.K. Soegijapranata												
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek K.K. Soegijapranata yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek K.K. Soegijapranata untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>												
	Penanggung jawab	CCF Indonesia												

No.	Item	Penjelasan										
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ornop lokal (Proyek K.K. Soegijapranata)										
	Instansi terkait	Yayasan Purba Danarta										
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 										
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 										
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kota Semarang, Kec Semarang Barat, Kel Sukorejo dan Bongsari)										
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek K.K. Soegijapranata yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)										
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>173.869.800</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>19.000.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>94.458.849</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>269.314.450</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	173.869.800	1998	19.000.000	2000	94.458.849	2001	269.314.450
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
1997	173.869.800											
1998	19.000.000											
2000	94.458.849											
2001	269.314.450											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek K.K. Soegijapranata dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek K.K. Soegijapranata. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek K.K. Soegijapranata sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek K.K. Soegijapranata akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek K.K. Soegijapranata berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp556.643.099 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp625.713.430 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 4824 keluarga (6 kelompok) menjadi 2312 keluarga (4 kelompok) 										
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomisnya. 										
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.										
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek K.K. Soegijapranata memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 										

2.1.29	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bina Kasih																
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Bina Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Bina Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.																
	Penanggung jawab	CCF Indonesia																
	Pelaksana	CCF Indonesia bersma ORNOP Lokal (Proyek Bina Kasih)																
	Instansi terkait																	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 																
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 																
	Wilayah pelaksanaan	Banten (Kota Tangerang, Kec Batuceper dan Tangerang, Kel Neglasari, Mekarsari dan Karangari)																
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Bina Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)																
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>47.006.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>259.287.500</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>111.914.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>100.671.900</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>169.509.500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>85.979.500</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>71.263.650</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF; Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	47.006.000	1998	259.287.500	1999	111.914.000	2000	100.671.900	2001	169.509.500	2002	85.979.500	2003	71.263.650
Tahun	Jumlah (Rupiah)																	
1997	47.006.000																	
1998	259.287.500																	
1999	111.914.000																	
2000	100.671.900																	
2001	169.509.500																	
2002	85.979.500																	
2003	71.263.650																	
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2003																
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Bina Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Bina Kasih. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Bina Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Bina Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Bina Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 																

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp845.632.050 yang telah disalurkan telah berkembang menjadi Rp2.331.190.850 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2545 keluarga menjadi 1298 keluarga
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Keluarga dampingan bersifat sangat individualistis sehingga sulit diorganisir dalam kelompok-kelompok usaha.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Bina Kasih memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.30	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Marga Sejahtera
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Marga Sejahtera yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Marga Sejahtera untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Marga Sejahtera)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan, Kec Pasar Minggu, Kel Srengseng Sawah, Jati Padang, dan Pejaten Timur)
	Sasaran kriterianya	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Marga Sejahtera yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak). Keluarga memiliki ketrampilan dan atau pengalaman usaha di bidang yang sama.

No.	Item	Penjelasan												
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>93.000.000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>28.000.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>119.475.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>22.500.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>15.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF; Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	93.000.000	2000	28.000.000	2001	119.475.000	2002	22.500.000	2003	15.000.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1998	93.000.000													
2000	28.000.000													
2001	119.475.000													
2002	22.500.000													
2003	15.000.000													
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998, 2000-2003												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Marga Sejahtera dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Marga Sejahtera. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Marga Sejahtera sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Marga Sejahtera akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Marga Sejahtera berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 												
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp277.975.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 314.475.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 697 keluarga (14 kelompok) menjadi 403 keluarga (7 kelompok) 												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D dalam pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional atau cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.												
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Marga Sejahtera memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 												
3.1.31	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Warga Bahagia												
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Warga Bahagia yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Warga Bahagia untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>												

No.	Item	Penjelasan												
	Penanggung jawab	CCF Indonesia												
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Warga Bahagia)												
	Instansi terkait													
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 												
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 												
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Barat (Kab Bogor, Kec Cibinong, Desa Nanggewer Mekar dan Pakansari)												
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Warga Bahagia, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).</p>												
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">76.040.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">88.200.150</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">26.382.400</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">74.991.750</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">78.153.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	76.040.000	1999	88.200.150	2000	26.382.400	2001	74.991.750	2002	78.153.500
Tahun	Jumlah (Rupiah)													
1998	76.040.000													
1999	88.200.150													
2000	26.382.400													
2001	74.991.750													
2002	78.153.500													
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2002												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Warga Bahagia dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Warga Bahagia. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Warga Bahagia sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Warga Bahagia akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Warga Bahagia berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 												
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp343.767.800 telah berkembang menjadi Rp 1.446.800.560. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1.390 (4 kelompok) menjadi 1.292 (1 kelompok). 												
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 												

No.	Item	Penjelasan								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Warga Bahagia memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								
2.1.32	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Vincentius								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Vincentius Yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Vincentius untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Vincentius)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Lampung (Kab Tanggamus, Kec Pringsewu, Desa Bumiarum, Podomoro, Banjarejo, Sidoharjo)								
	Sasaran dan kriterianya	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Vincentius, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: left;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1998</td> <td>208.032.350</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>225.290.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>77.826.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1998	208.032.350	1999	225.290.000	2003	77.826.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
1998	208.032.350									
1999	225.290.000									
2003	77.826.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2003								

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Vincentius dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Vincentius. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Vincentius sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Vincentius akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Vincentius berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dari dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp511.148.350 telah berkembang menjadi Rp617.847.190 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1.969 keluarga (45 kelompok) menjadi 1.727 keluarga (39 kelompok).
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Vincentius memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
2.1.33	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bina Pendidikan
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Bina Pendidikan yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Bina Pendidikan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Bina Pendidikan)
	Instansi terkait	Puskopdit Jawa Tengah
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia

No.	Item	Penjelasan										
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Cilacap, Kec Majenang, Desa Bener)										
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).										
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>173,874,300</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>77,149,400</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>26,250,000</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>26,495,000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	173,874,300	1998	77,149,400	1999	26,250,000	2000	26,495,000
Tahun	Jumlah (Rupiah)											
1997	173,874,300											
1998	77,149,400											
1999	26,250,000											
2000	26,495,000											
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2000										
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Bina Pendidikan. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Bina Pendidikan sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 										
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp303.768.700 telah berkurang menjadi Rp220.655.137. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2.643 keluarga (5 kelompok) menjadi 916 keluarga (1 kelompok). 										
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 										
	Status saat ini	Saat ini CCF sudah tidak memberikan bantuan dana maupun pendampingan terhadap program ini.										
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - ORNOP mitra/Proyek Bina Pendidikan memiliki jaringan kerja yang kuat dengan Puskopdit Jawa Tengah. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 										
3.1.34	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Kincir										
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Kincir yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Kincir untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.										

No.	Item	Penjelasan														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Kincir)														
	Instansi terkait	BK3D, Dinas Kesehatan														
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat, Kec Cengkareng, Kel Cengkareng Timur dan Pegadungan)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Kincir, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>155.126.450</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>21.000.000</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>37.450.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>46.517.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>18.095.700</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>14.350.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	155.126.450	1998	21.000.000	1999	37.450.000	2001	46.517.000	2002	18.095.700	2003	14.350.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	155.126.450															
1998	21.000.000															
1999	37.450.000															
2001	46.517.000															
2002	18.095.700															
2003	14.350.000															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-1999 Tahun 2001-2003														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Kincir dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Kincir. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Kincir sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Kincir akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Kincir berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 														
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp 292.539.150 berkembang menjadi Rp 731.761.235. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 1.706 keluarga (2 kelompok) menjadi 1.236 keluarga. 														
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 														

No.	Item	Penjelasan														
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.														
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Kincir memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - ORNOP mitra/Proyek Kincir memiliki jaringan kerja yang cukup luas. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 														
3.1.35	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Suko Siwi-Yakkum														
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Suko Siwi-Yakkum yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Suko Siwi-Yakkum untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Suko Siwi-Yakkum)														
	Instansi terkait															
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Wonogiri dan Sukoharjo, Kec Eromoko, Tawang Sari, Wuryantoro, dan Weru, Desa Eromoko, Sumberejo, Tegalsari, Puloharjo, dan Pundungrejo)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Suko Siwi-Yakkum, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td style="text-align: right;">45.282.000</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td style="text-align: right;">120.996.775</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td style="text-align: right;">261.164.700</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td style="text-align: right;">10.304.250</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">12.904.500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">177.758.700</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat ana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	45.282.000	1998	120.996.775	1999	261.164.700	2000	10.304.250	2001	12.904.500	2002	177.758.700
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	45.282.000															
1998	120.996.775															
1999	261.164.700															
2000	10.304.250															
2001	12.904.500															
2002	177.758.700															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-2002														

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Suko Siwi-Yakkum dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Suko Siwi-Yakkum. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Suko Siwi-Yakkum sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Suko Siwi-Yakkum akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Suko Siwi-Yakkum berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp 628.410.925 telah berkembang menjadi Rp1.066.622.668 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 9.521 keluarga (12 kelompok) menjadi 3.758 keluarga (5 kelompok).
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Kepengurusan di tingkat kelompok kurang kuat sehingga pada saat ORNOP mitra tidak mendampinginya, beberapa usaha menjadi macet/tidak berkembang.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Suko Siwi-Yakkum memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.36	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Panti Nugeraha
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Panti Nugeraha yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Panti Nugeraha untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Panti Nugeraha)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.

No.	Item	Penjelasan								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan, Kec Cipete, Kel Cipete dan Pondok Labu)								
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Panti Nugeraha, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).</p>								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: left;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>4.849.500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>24.104.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>1.575.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	4.849.500	2002	24.104.000	2003	1.575.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	4.849.500									
2002	24.104.000									
2003	1.575.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Panti Nugeraha dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Panti Nugeraha. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Panti Nugeraha sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Panti Nugeraha akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Panti Nugeraha berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dari dana bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp30.528.500 berkembang menjadi Rp83.966.660. - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 410 keluarga (1 kelompok) menjadi 305 keluarga (1 kelompok). 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan ekonomis. 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Panti Nugeraha memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								

No.	Item	Penjelasan														
3.1.37	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Mino Martani														
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Mino Martani yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Mino Martani untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.														
	Penanggung jawab	CCF Indonesia														
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Mino Martani)														
	Instansi terkait	Dinas Peternakan														
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 														
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 														
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Banyumas, Kec Kalibagor, Desa Kaliori, Karangnans dan Wiradadi)														
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Mino Martani, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).														
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1997</td> <td>120.898.500</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>310.399.600</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>183.234.750</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>257.615.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>358.506.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>181.300.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	1997	120.898.500	1998	310.399.600	2000	183.234.750	2001	257.615.000	2002	358.506.000	2003	181.300.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)															
1997	120.898.500															
1998	310.399.600															
2000	183.234.750															
2001	257.615.000															
2002	358.506.000															
2003	181.300.000															
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1997-1998, 2000-2003														
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Mino Martani dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Mino Martani. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Mino Martani sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Mino Martani akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Mino Martani berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 														

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp1.411.953.850 telah berkurang menjadi Rp1.341.775.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 4.521 keluarga menjadi 2.934 keluarga.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Mino Martani memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.38	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Nak Suko Nian
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Nak Suko Nian yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Nak Suko Nian untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Nak Suko Nian)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kec Kemuning, Desa Pipareja)
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Nak Suko Nian, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).</p>

No.	Item	Penjelasan								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>35.500.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>7.804.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>2.170.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : CCF Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	35.500.000	2002	7.804.000	2003	2.170.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	35.500.000									
2002	7.804.000									
2003	2.170.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Nak Suko Nian dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Nak Suko Nian. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Nak Suko Nian sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Nak Suko Nian akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Nak Suko Nian berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp45.474.000 telah berkembang menjadi Rp65.943,057. - Jumlah sasaran yang tetap aktif, yaitu 226 keluarga. 								
	Masalah	<p>CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil.</p> <p>Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.</p>								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF terus masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Nak Suko Nian memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 								
3.1.39	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Cai Kahirupan								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Cai Kahirupan Yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Cai Kahirupan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Cai Kahirupan)								

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Cilacap, Kec Karang Pucung, Desa Ciruyung)
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Cai Kahirupan, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).</p>
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana: Rp87.900.000</p> <p>Sumber: CCF</p> <p>Sifat dana: hibah</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Cai Kahirupan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Cai Kahirupan. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Cai Kahirupan sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Cai Kahirupan akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Cai Kahirupan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp87.900.000 telah berkembang menjadi Rp95.000.000. - Jumlah sasaran yang tetap aktif, yaitu 435 keluarga (16 kelompok).
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Cai Kahirupan memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.

No.	Item	Penjelasan								
3.1.40	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampungan Proyek Moris Diak								
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Moris Diak yang menderita kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Moris Diak untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang memobilisasi sumber dayanya bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP lokal (Proyek Moris Diak)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampungan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampungan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Membantu keluarga dampungan untuk mendapatkan pinjaman lunak/modal bergulir. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Atambua Kota, Desa Haliwen, Beirafu, Fatubena dan Tulamale)								
	Sasaran	Keluarga dampungan ORNOP mitra/Proyek Moris Diak, yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampungan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampungan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak).								
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">4.250.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">11.561.000</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td style="text-align: right;">14.020.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	4.250.000	2002	11.561.000	2003	14.020.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	4.250.000									
2002	11.561.000									
2003	14.020.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampungan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Moris Diak dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Moris Diak. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Moris Diak sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Moris Diak akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Moris Diak berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp29.831.000 telah berkembang menjadi Rp30.197.769. - Jumlah sasaran yang aktif meningkat dari 154 keluarga (23 kelompok) menjadi 192 keluarga (23 kelompok).
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha ini masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - ORNOP mitra dan warga dampingan belum memiliki keahlian dalam pemasaran hasil usaha.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Moris Diak memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.41	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Karunia
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Karunia yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Karunia untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan keluarga dan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Infonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Karunia)
	Instansi terkait	Dinas Peternakan dan PPL Pertanian
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Kobalima & Malaka Tengah, Desa Rainawe, Lakekun, Litamali, Wehali, dan Kamanasa)
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Karunia dan diprioritaskan untuk para pengungsi asal Timor Timur.</p> <p>Kriteria: telah menjadi warga yang telah memutuskan untuk tinggal di Timor Barat (tidak akan kembali ke Timor Timur lagi)</p>

No.	Item	Penjelasan								
	Pendanaan	<p>Nilai bantuan/dana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>22.795.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>32.814.400</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>55.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: CCF; Sifat dana: hibah</p>	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	22.795.000	2002	32.814.400	2003	55.000.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2001	22.795.000									
2002	32.814.400									
2003	55.000.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2003								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampungan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Karunia dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Karunia. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Karunia sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Karunia akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Karunia berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp110.609.400 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp137.500.535 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 2332 (5 kelompok) menjadi 2315 keluarga (4 kelompok) 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolannya seringkali kurang profesional atau cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Kondisi psikologis (Temperamen) para pengungsi yang tidak stabil dan mudah diprovokasi. 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.								
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Karunia memiliki pekerja sosial yang untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampungan ORNOP-ORNOP mitra. 								
3.1.42	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampungan Proyek Laran Luan								
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Laran Luan yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Laran Luan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Laran Luan)								
	Instansi terkait									
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampungan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampungan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 								

No.	Item	Penjelasan						
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 						
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Tasifeto Timur, Desa Naekasa)						
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Laran Luan yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)						
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">7.000.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">12.425.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	7.000.000	2002	12.425.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)							
2001	7.000.000							
2002	12.425.000							
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2002						
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Laran Luan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Laran Luan. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Laran Luan sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Laran Luan akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Laran Luan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 						
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp19.425.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 26.200.000 - Jumlah sasaran yang aktif dari 53 keluarga (4 kelompok) menjadi 52 keluarga 						
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional atau cenderung mengabaikan aspek ekonomis. 						
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.						
	Potensi	CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.						
3.1.43	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Fajar Kasih						
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Fajar Kasih yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Fajar Kasih untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.						

No.	Item	Penjelasan								
	Penanggung jawab	CCF Indonesia								
	Pelaksana	CCF Indonesai bersama ORNOP Lokal (Proyek Fajar Kasih)								
	Instansi terkait	PPL Pertanian Tingkat Kecamatan dan Dinas Perindustrian								
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. 								
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 								
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang, Kec Kupang Tengah dan Kupang Timur, Desa Tuapukan, Noelbaki, Matani dan Kaniti)								
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Fajar Kasih yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak). Khusus untuk usaha kios dan tenun ikat diprioritaskan untuk keluarga pengungsi asal Timor Timur.								
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: left;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>7.200.000</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>10.701.000</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>24.131.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2000	7.200.000	2001	10.701.000	2002	24.131.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)									
2000	7.200.000									
2001	10.701.000									
2002	24.131.000									
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000-2002								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Fajar Kasih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Fajar Kasih. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Fajar Kasih sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Fajar Kasih akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Fajar Kasih berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp42.032.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 10.200.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 347 keluarga (7 kelompok) menjadi 298 keluarga 								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Adanya mismanagement yang dilakukan oleh Staf Pelaksana di tingkat orsos mitra yang lama (sekarang telah diganti). 								
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini dan unit-unit usaha yang lain. .								

No.	Item	Penjelasan						
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. 						
3.1.44	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Nek Matulun						
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Nek Matulun yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Nek Matulun untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.						
	Penanggung jawab	CCF Indonesia						
	Pelaksana	CCF Indonesia bersama ORNOP Lokal (Proyek Nek Matulun)						
	Instansi terkait							
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya.						
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia 						
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Timor Tengah Utara, Kec Miomafo Timur, Desa Eban, Noemuti, Nifuboke dan Fatumuti)						
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Nek Matulun yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)						
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tahun</th> <th style="text-align: right;">Jumlah (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td style="text-align: right;">16.953.500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td style="text-align: right;">21.030.000</td> </tr> </tbody> </table> Sumber : CCF; Sifat dana: hibah	Tahun	Jumlah (Rupiah)	2001	16.953.500	2002	21.030.000
Tahun	Jumlah (Rupiah)							
2001	16.953.500							
2002	21.030.000							
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001-2002						
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Nek Matulun dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Nek Matulun. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Nek Matulun sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Nek Matulun akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Nek Matulun berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 						

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp37.983.500 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 34.232.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 551 keluarga menjadi 346 keluarga
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Nek Matulun memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.45	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Sinar Harapan
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Sinar Harapan yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Sinar Harapan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	CCF Indonesai bersama ORNOP Lokal (Proyek Sinar Harapan)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu, Kec Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur, Desa Duadalus, Jenilu, Kenebibi dan Silawan)
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Sinar Harapan yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan	Nilai bantuan/dana: Rp9.553.000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Sinar Harapan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Sinar Harapan. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Sinar Harapan sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Sinar Harapan akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Sinar Harapan berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp 9.553.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 7.725.000 - Jumlah sasaran yang aktif tetap yaitu 18 keluarga (3 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Sinar Harapan memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra. - Sebagian besar warga dampingan memiliki halaman yang cukup untuk usaha.
3.1.46	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Sidomulyo
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Sidomulyo yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Sidomulyo untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	ORNOP Lokal (Proyek Sidomulyo)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Semarang, Kec Bergas, Desa Gondoriyo)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Sidomulyo yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan	Nilai bantuan: Rp23.290.000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Sidomulyo dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Sidomulyo. - Dalam rangka pelaksanaan program, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Sidomulyo sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Sidomulyo akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Sidomulyo berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp23.290.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 20.731.000 - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 31 keluarga menjadi 27 keluarga
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan mengabaikan aspek ekonomis. - ORNOP mitra belum memiliki jaringan distribusi/pemasaran produk usaha kelompok (batako/paving)
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Sidomulyo memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.47	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Anak Musi
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Anak Musi yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Anak Musi untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	ORNOP Lokal (Proyek Anak Musi)
	Instansi terkait	Puskopdit Palembang

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja sosial/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kec Bukit Kecil dan Plaju, Kel 24 Ilir dan Tegal Binangun)
	Sasaran	Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Anak Musi yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria : telah menjadi warga dampingan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan	Nilai bantuan: Rp 10.000.000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampingan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Anak Musi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Anak Musi. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Anak Musi sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Anak Musi akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Anak Musi berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp10.000.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp 21.771.000 (termasuk dana swadaya) - Jumlah sasaran yang aktif tetap yaitu 6 keluarga (1 kelompok)
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih terus memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Anak Musi memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan antar ORNOP-ORNOP mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan proyek yang satu dengan yang lainnya. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.

No.	Item	Penjelasan
3.1.48	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampungan Proyek Sriwijaya
	Deskripsi upaya	Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Sriwijaya yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Sriwijaya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	ORNOP Lokal (Proyek Sriwijaya)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampungan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampungan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial. - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja social/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kec Gandus, Kel Karang Anyar)
	Sasaran	Keluarga dampungan ORNOP mitra/Proyek Sriwijaya yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampungan) telah siap untuk mengembangkan usaha. Kriteria: telah menjadi warga dampungan proyek kurang lebih 2 tahun dan telah melewati masa kritis (masalah kelangsungan hidup anak)
	Pendanaan	Nilai bantuan: Rp 8.240.000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok sasaran (keluarga dampungan) mengusulkan program kepada ORNOP mitra/Proyek Sriwijaya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Sriwijaya. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin setiap bulan ke rekening Proyek Sriwijaya sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Sriwijaya akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada kelompok sasaran. - ORNOP mitra/Proyek Sriwijaya berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp8.240.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 6.127.600 (termasuk dana swadaya) - Jumlah sasaran yang aktif menurun dari 20 keluarga (4 kelompok) menjadi 15 keluarga (3 kelompok)

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Masih berjalan. Sampai saat ini CCF masih memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Sriwijaya memiliki pekerja sosial untuk mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.49	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Ngudi Makmur
	Deskripsi upaya	<p>Banyaknya anak di wilayah pelayanan Proyek Ngudi Makmur yang menderita karena kemiskinan telah mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Ngudi Makmur untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak.</p> <p>Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya nanti (setelah 5-7 tahun mendapatkan bantuan CCF) keluarga dan masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk melanjutkan sendiri program-program kesejahteraan anak dan keluarga secara berkelanjutan.</p>
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	ORNOP Lokal (Proyek Ngudi Makmur)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya.
	Jenis kegiatan	Bantuan modal usaha
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kab Jepara, Kec Bangsri, Desa Bondo)
	Sasaran	75 orang pengurus kelompok dampingan ORNOP mitra/Proyek Ngudi Makmur. Kriteria: Pengurus aktif dalam kegiatan ORNOP mitra/Proyek.
	Pendanaan sumber, sifatnya	Nilai bantuan: 45,000,000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Ngudi Makmur merencanakan pemberian modal bagi pengurus dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Proyek Ngudi Makmur. - Dalam rangka pelaksanaannya, CCF akan mentransfer dana secara rutin/bulanan ke rekening Proyek Ngudi Makmur sesuai dengan rencana dan agenda kerja yang telah disetujui oleh CCF. - ORNOP mitra/Proyek Ngudi Makmur akan mencairkan dana dan memberikannya langsung kepada setiap pengurus. - Dana dimanfaatkan oleh masing-masing pengurus sebagai modal usaha yang mereka kelola secara individual. - Monitoring oleh CCF hanya untuk memastikan apakah dana telah diterima secara utuh oleh kelompok sasaran.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp 45.000.000 yang disalurkan telah berkurang menjadi Rp 37.200.000 - Jumlah sasaran yang aktif berkurang dari 75 keluarga menjadi 62 keluarga

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis.
	Status saat ini	Saat ini CCF sudah tidak memberikan bantuan dana untuk kelompok sasaran ini, karena bantuan akan lebih diarahkan untuk mendukung usaha-usaha yang dikelola secara kelompok.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Ngudi Makmur memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan ORNOP-ORNOP mitra.
3.1.50	Nama upaya	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Pansos Bodronoyo
	Deskripsi upaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak anak di Kodya Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir menderita karena kemiskinan menyusul krisis ekonomi yang mendorong beberapa industri di Palembang untuk mem-PHK-kan para karyawan dan buruhnya dan semakin sulitnya kehidupan para petani akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil panennya. ▪ Kondisi ini mendorong CCF bekerja sama dengan ORNOP lokal dalam Proyek Pansos Bodronoyo untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manajerial ataupun permodalan dan kemampuan menjalankan usaha individual maupun kolektif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi CCF untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber dayanya terutama bagi kepentingan anak. ▪ Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mencapai kemandirian secara finansial dan mampu memanfaatkan hasil usaha tersebut untuk mengangkat kesejahteraan anak dan keluarga terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. ▪ Agar program ini dapat dinikmati oleh warga masyarakat luas, orsos mitra diberi kesempatan untuk mengelola bantuan ini melalui pola dana bergulir (revolving fund) dimana semua kelompok akan mendapat kesempatan yang sama.
	Penanggung jawab	CCF Indonesia
	Pelaksana	ORNOP Lokal (Proyek Pansos Bodronoyo)
	Instansi terkait	Dinas Pertanian
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan keluarga dampingan agar mampu mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. - Melatih keluarga dampingan untuk mengembangkan usaha kelompok agar hasilnya terus meningkat dan kemajuan usaha bersama dapat tercapai. - Meningkatkan akses keluarga terhadap fasilitas simpan pinjam yang dapat melayani kegiatan menabung dan penyediaan kredit/pinjaman usaha. - Memfasilitasi orsos mitra dalam pengembangan kelembagaan sehingga orsos mitra mampu melayani masyarakat secara luas.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan biaya untuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh ORNOP mitra bekerja sama dengan instansi terkait/ lembaga lain dan biaya pendampingan (untuk gaji tenaga pekerja social/staf proyek). - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi oleh staf CCF Indonesia
	Wilayah pelaksanaan	Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir)
	Sasaran	<p>Keluarga dampingan ORNOP mitra/Proyek Pansos Bodronoyo yang dinilai oleh Panitia Program (perwakilan klien/keluarga dampingan) telah siap untuk mengembangkan usaha.</p> <p>Kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga miskin yang memiliki anak sekolah - Tidak memiliki pekerjaan atau korban PHK, gagal panen dan atau usahanya bangkrut akibat krisis ekonomi. - Khusus untuk usaha ikan patin diprioritaskan untuk ex penderita kusta yang tinggal di luar asrama Rumah Sakit Kusta Sungai Kendur.

No.	Item	Penjelasan			
	Pendanaan	Nilai bantuan: Rp119.650.000 Sumber : CCF Sifat dana : hibah dari CCF dan oleh orsos mitra diberikan kepada kelompok sasaran secara bergulir (revolving fund)			
	Waktu pelaksanaan	Januari 2001- Desember 2002			
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Orsos mitra/Proyek Pansos Bodronoyo mengajukan proposal kepada CCF. - CCF mentransfer dana hibah secara rutin sesuai proposal program yang disetujui oleh CCF. - Sebagian dana dimanfaatkan oleh orsos mitra untuk biaya pelatihan, pendampingan, supervisi dan monitoring dan sebagian lagi diberikan kepada kelompok sasaran sebagai pinjaman lunak. Kelompok sasaran wajib mengembalikan pinjaman kepada orsos mitra selama 10-12 bulan dengan bunga 2,5% per bulan (1% untuk pemupukan modal dan 1,5% untuk tambahan biaya operasional) - ORNOP mitra/Proyek Pansos Bodronoyo berkewajiban mendampingi keluarga/kelompok sasaran dalam mengembangkan usahanya dan melaporkan perkembangan usaha tersebut kepada CCF. - Minimal 2 kali dalam setahun staf CCF Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terhadap unit-unit usaha tersebut. 			
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bantuan sebesar Rp119.650.000 yang disalurkan telah berkembang menjadi Rp552.839.555 - Jumlah sasaran yang aktif meningkat dari 674 keluarga menjadi 2566 keluarga 			
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - CCF tidak memiliki tenaga khusus yang ahli di bidang R&D untuk pengembangan usaha kecil. - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional dan cenderung mengabaikan aspek ekonomis. - Usaha-usaha pertanian mengalami kegagalan karena kekeringan dan hama belalang sehingga para petani mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. - Pengelolaan dana secara bergulir ini (revolving) tidak sesuai dengan kebijakan CCF Pusat (Amerika) sehingga CCF Indonesia harus mencari sumber-sumber lain di luar dana rutin dari kantor pusat untuk mendukung program ini. 			
	Status saat ini	Saat ini CCF tidak lagi memberikan bantuan modal untuk mendukung program ini.			
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - ORNOP mitra/Proyek Pansos Bodronoyo memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - ORNOP mitra/Proyek Pansos Bodronoyo memiliki tenaga pendamping yang ahli di bidangnya (pertanian, perikanan, dsb). 			
4. Mercy Corps (Ornop Internasional)					
4.1	Nama upaya	Program Pengembangan Institusi Keuangan Mikro (MFIDP)			
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan salah satu kegiatan dari sektor ekonomi Mercy Corps Indonesia yang ada di bawah Grants Program dan bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan untuk menjadi mitra yang lebih aktif dan efektif bagi pembangunan negara.			
	Penanggung jawab	Mercy Corps.			
	Pelaksana	LSM lokal:			
		LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah
		Yayasan Paluma	Maret -September 2000	Hibah Rp 35.000.000	Jakarta
		Women in Social Solidarity of Indonesia (WISS)	Maret – Juli 2002	Hibah Rp 184.950.000	Jakarta

No.	Item	Penjelasan			
		LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah
		Youth Ending Hunger (YEH)	Mei - Desember 2000	Hibah Rp34.796.000	Jakarta
		Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM)	Juni 2000 - Januari 2001	Hibah Rp 41.095.000	Jawa Barat
		Y. Bina Swadaya Bogor-Bekasi	Mei - November 2002	Hibah Rp 134.670.000	Jawa Barat (Kab Bogor-Bekasi)
		Kop. Pokmas Teratai	Mei 2000-Agustus 2002.	Hibah Rp 85.330.000	Jawa Barat
		Y. Srikandi Sejati	Oktober 2000-Juni 2001	Hibah Rp21.500.000	Jakarta
		YPM Kesuma Multiguna	April 2000-April 2002	Hibah Rp 305.000.000	DKI Jakarta
		Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia	Mei -November 2000	Hibah Rp 34.680.000	Jakarta
		Yayasan Ridho Mukti Farm	Februari 2002-Februari 2003	Hibah Rp128.300.000	Jawa Tengah
		BMT Mardlotillah	Maret 2002-Juni 2003	Hibah Rp153.550.000	Jawa Barat
		Yayasan Pumma Indonesia	Agustus 2001-Agustus 2002	Hibah Rp 93.000.000	Sumatera Selatan
		KSU BMT Muamalah Pacitan	November 2001-Februari 2003	Hibah Rp129.642.000	Jawa Timur
		Kiat Bumi Mandiri Ponorogo	November 2001-November 2002	Hibah Rp71.601.000	Jawa Timur (Kab Ponorogo)
		Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap	Agustus 2001-Agustus 2002	Hibah Rp204.900.000	Jawa Tengah
		Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Februari 2002-Februari 2003	Hibah Rp118.835.000	Jakarta
		Yayasan Islam Miftahul Huda (YASMIDA)	September 2001-Desember 2002	Hibah Rp220.850.000	Lampung
		Yayasan Bina Potensi Masyarakat (YAPIM)	Agustus 2001-Agustus 2002	Hibah Rp73.110.700	Jawa Timur
		Yayasan Citra Ummat	Agustus 2002-Agustus 2003	Hibah Rp151.150.000	Jawa Timur
		Koperasi BMT "Binna Ummat"	Oktober 2001-Mei 2002	Hibah Rp 99.531.000	Jawa Timur
		PUSKOPDIT "Bekatigade"	Juli 2001-Juli 2002	Hibah Rp345.550.000	Yogyakarta
		PUSKOPDIT "Bekatigade"			Jawa Tengah
		Social Analysis and Research Institute (SAR)	Juli 2001-Juli 2002	Hibah Rp169.509.000	Jawa Tengah
		Lembaga Pengembangan Usaha Kecil	September 2001-Juni 2002	Hibah Rp 88.990.000	Jawa Tengah
		Yayasan Mitra Usaha	Mei 2001-Juli 2002	Hibah Rp 257.600.000	Jawa Tengah

No.	Item	Penjelasan			
		LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah
		BMT Assalam	Agustus 2001- November 2002	Hibah Rp 476.2000.000	Jawa Barat
		Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia (YPSI)	Maret 2000 – Juli 2002	Hibah Rp 222.338.000	Jakarta
		Suara Ibu Peduli	Desember 2000- November 2001	Hibah Rp 93.772.500	Jakarta
		Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSW)	Desember 2000- Desember 2001	Hibah Rp 84.220.000	Jawa Barat
		Alisa Khadijah / Sahabat Usaha Alisa (SUA)	Oktober 2000- Agustus 2002	Hibah Rp 324.450.000	Jawa Barat
		Yayasan Bina Sumber Daya Mitra (BISMI)	Desember 2000- Desember 2001	Hibah Rp134.800.000	Jakarta
		Yayasan Tirta Guna	Agustus 2001- April 2002	Hibah Rp 72.600.000	Banten
		Yayasan Setia Kawan Mandiri (SEKAM)	Agustus 2001- Agustus 2002	Hibah Rp 103.895.000	Jakarta
		Yayasan Iqbal Abieza Mahardhika	Oktober 2001- Agustus 2002	Hibah Rp 72.550.000	Jawa Barat
		LSM Airmas	Maret 2001- Maret 2003	Hibah Rp 112.498.000	Jakarta
		Tiasa-Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya (SNT)	Desember 2000- Juni 2002	Hibah Rp 130.000.000	Jawa Barat
		Wanita Islam	Desember 2000- Juni 2001	Hibah Rp 45.465.000	Jakarta
		Yayasan Ar-Rufi	Desember 2000- Desember 2001	Hibah Rp 84.783.500	Jawa Barat
		Yaysan PUKAS	Desember 2000- Mei 2003	Hibah Rp 159.700.000	Jawa Barat
		BMT Imarotul Muslimin-YGAS	Desember 2000- Desember 2001	Hibah Rp 61.200.000	Jakarta
		Yayasan Pembinaan Pengembangan SDM & Lingkungan (DIALOG)	Agustus 2001- November 2002	Hibah Rp 150.237.500	Jawa Timur
		LPSP	Juli 2001-Juli 2002	Hibah Rp 139.220.000	Jawa Timur
		Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI)	September 2001- Desember 2002	Hibah Rp 173.995.000	Jawa Timur
		Lembaga Penelitian UNDIP	Januari 2002- Januari 2003	Hibah Rp 145.850.000	Jawa Tengah
		Kelompok Tani Hutan Agrowilis	Juli 2001-Juli 2002	Hibah Rp 104.775.000	Jawa Tengah
		Yayasan Bina Vitalis Cabang Bengkulu	September 2001- September 2002	Hibah Rp 112.200.000	Bengkulu
		Yayasan Cakrawala Timur	November 2000- Agustus 2002	Hibah Rp 99.805.000	Jawa Timur
		Koperasi Ngesti Rahayu	Maret 2002- Maret 2003	Hibah Rp 102.900.000	Jawa Timur

No.	Item	Penjelasan			
		LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah
		Yayasan PERAMU	April 2002-April 2003	Hibah Rp 124.600.000	Jawa Barat
		BMT Ibadurrahman	Maret 2002-Maret2003	Hibah Rp 131.300.000	Jawa Barat
		Yayasan SkeMa	Agustus 2002-Agustus 2003	Hibah Rp 76.300.000	Jawa Barat
		KBMT Dana Ukhuwah	Februari 2002-Agustus 2004	Hibah Rp 409.800.000	Jawa Barat
		Yayasan Setia Kawan Raharja (SEKAR)	Maret 2002-Maret 2003	Hibah Rp 73.480.000	Jakarta
		Yayasan Pekerti	April 2003-April 2004	Hibah Rp 214.674.000	Jakarta
		Koperasi Serba Usaha BMT Ar-Ridwan	Mei 2003-Juli 2004	Hibah Rp 282.775.000	Jawa Barat
		KSM Yekti Insan Sejahtera			Jawa Tengah
		Koperasi BMT Fajar			Lampung
	Instansi terkait	BMT Baskara			
	Tujuan upaya	Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada institusi keuangan mikro di Indonesia.			
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi dukungan kepada penyedia jasa MFI dan kegiatan yang mempromosikan praktek-praktek terbaik. - Merumuskan kebijakan yang kondusif bagi MFI dan mengajukan inisiatif-inisiatif bagi penguatan industri keuangan mikro. 			
	Wilayah pelaksanaan	Jawa, Sumatera bagian Selatan, Maluku, dan Sulawesi Tengah			
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi - LSM - Koperasi yang menggunakan sistem perbankan Islam (BMT) - Credit union - Institusi Apex - LKM - Penyedia Jasa LKM (MFI Service Providers) - BEKATIGADE <p><u>Cara menjangar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi melalui berbagai surat kabar seperti KOMPAS - Menyeleksi proposal yang masuk - Melakukan verifikasi-pengecekan ke lapangan - Melakukan audit keuangan - Untuk LKM, audit yang dilakukan lebih detail, dan harus mempunyai "standard report" untuk bisa mendapatkan bantuan. <p><u>Kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria utama: dana yang diberikan oleh Mercy Coprs harus dialokasikan untuk usaha mikro - Sedikitnya 30% dari portfolio harus diberikan untuk lapisan/kelompok terbawah-yang paling lemah dari usaha mikro 			
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah dari USDA - Hibah dari USAID untuk program pengembangan lembaga keuangan mikro di Ambon dan Sulawesi 			
	Waktu pelaksanaan	1999-sekarang.			

No.	Item	Penjelasan																																								
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan kerja sama yang erat dengan institusi lokal - Pemilihan mitra lokal - Menerapkan strategi yang berbeda untuk daerah yang berbeda - Keputusan strategis ada di tangan pelaksana - Kerja sama dengan Mercy akan dihentikan jika LKM yang bersangkutan sudah mampu memperoleh akses ke kredit perbankan atau <i>credit worthy</i> (terjadi upgrading) 																																								
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mendukung lebih dari 100 LKM di daerah yang telah disebut di atas dan telah melayani lebih dari 18000 klien - Hampir 64% peserta program adalah perempuan (di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih dari 80% penerima manfaatnya adalah perempuan) 																																								
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Berkaitan dengan sifat pendanaan yang berupa grant/ hibah, di satu pihak bisa meningkatkan "outreach" tetapi di pihak lain hibah ini kurang efisien karena sifatnya yang tidak mengikat. - Sulit untuk mendorong dan menjadikan kriteria di atas (bantuan diprioritas untuk usaha mikro) menjadi kebijakan LKM yang bersangkutan. - Pada tingkatan yang lebih luas lagi, yaitu di skala nasional, perlu adanya pengakuan akan keberadaan LKM melalui UU LKM untuk meningkatkan kinerjanya. - Berkaitan dengan status sebagai Ornop Internasional, diperlukan adanya kebebasan untuk menetapkan kebijakan serta adanya fleksibilitas untuk menjalin kerja sama dengan bank. 																																								
	Status saat ini	Sudah terdapat 30 LKM/MFI yang aktif di Jawa (target yang ingin dicapai adalah sebanyak 50 MFI/LKM per Januari 2004.)																																								
	Potensi																																									
4.2	Nama upaya	Jasa Pengembangan Usaha (Business Development Services – BDS)																																								
	Deskripsi upaya	Merupakan salah satu kegiatan dari sektor ekonomi Mercy Corps berupa bantuan teknis, pelatihan keterampilan, kegiatan infrastruktur ekonomi dan pertanian.																																								
	Penanggung jawab	Mercy Corps																																								
	Pelaksana	LSM lokal																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>LSM Lokal</th> <th>Waktu</th> <th>Jumlah Dana (Rp)</th> <th>Wilayah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yayasan Kalpataru Nusa Lestari</td> <td></td> <td></td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>Yayasan Gamping Sumber Rejeki</td> <td></td> <td>Hibah Rp 86.115.000</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>Yayasan Genta Lingkungan</td> <td>Desember 2000-Desember 2001</td> <td>Hibah Rp 70.225.000</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>Koperasi Agromadani</td> <td></td> <td>Hibah Rp 125.000.000</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>PUPUK</td> <td></td> <td>Hibah Rp 21.650.000</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td>PINBUK JATIM</td> <td>Maret-Juni 2001</td> <td>Hibah Rp 33.060.000</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal</td> <td>Mei-Juni 2003</td> <td>Hibah Rp 9.000.000</td> <td>Jakarta</td> </tr> <tr> <td>Asosiasi Keuangan Mikro (AKM)</td> <td>Januari 2003-Januari 2004</td> <td>Hibah Rp 237.000.000</td> <td>Jakarta</td> </tr> <tr> <td>BMT Al Husna</td> <td>Oktober 2000-April 2001</td> <td>Hibah Rp 86.981.750</td> <td>Banten</td> </tr> </tbody> </table>	LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah	Yayasan Kalpataru Nusa Lestari			Jawa Barat	Yayasan Gamping Sumber Rejeki		Hibah Rp 86.115.000	Jawa Barat	Yayasan Genta Lingkungan	Desember 2000-Desember 2001	Hibah Rp 70.225.000	Jawa Barat	Koperasi Agromadani		Hibah Rp 125.000.000	Jawa Barat	PUPUK		Hibah Rp 21.650.000	Jawa Barat	PINBUK JATIM	Maret-Juni 2001	Hibah Rp 33.060.000	Jawa Timur	Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal	Mei-Juni 2003	Hibah Rp 9.000.000	Jakarta	Asosiasi Keuangan Mikro (AKM)	Januari 2003-Januari 2004	Hibah Rp 237.000.000	Jakarta	BMT Al Husna	Oktober 2000-April 2001	Hibah Rp 86.981.750	Banten
LSM Lokal	Waktu	Jumlah Dana (Rp)	Wilayah																																							
Yayasan Kalpataru Nusa Lestari			Jawa Barat																																							
Yayasan Gamping Sumber Rejeki		Hibah Rp 86.115.000	Jawa Barat																																							
Yayasan Genta Lingkungan	Desember 2000-Desember 2001	Hibah Rp 70.225.000	Jawa Barat																																							
Koperasi Agromadani		Hibah Rp 125.000.000	Jawa Barat																																							
PUPUK		Hibah Rp 21.650.000	Jawa Barat																																							
PINBUK JATIM	Maret-Juni 2001	Hibah Rp 33.060.000	Jawa Timur																																							
Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal	Mei-Juni 2003	Hibah Rp 9.000.000	Jakarta																																							
Asosiasi Keuangan Mikro (AKM)	Januari 2003-Januari 2004	Hibah Rp 237.000.000	Jakarta																																							
BMT Al Husna	Oktober 2000-April 2001	Hibah Rp 86.981.750	Banten																																							
	Instansi terkait																																									
	Tujuan upaya	Mengembangkan jasa pengembangan usaha dengan mempertemukan penyedia jasa pengembangan usaha dengan konsumen akan jasa ini.																																								

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan pengembangan ekonomi lokal model KPEL di Madura sebagai proyek perintis (pilot project). - Mendirikan konsorsium yang terdiri atas 10 BDS untuk melakukan <i>need assessment</i> (penelitian pasar) mengenai permintaan akan BDS oleh UKM di Jawa Tengah dan Yogyakarta. - Pembudidayaan jamur merang di Karawang yang bersifat padat karya.
	Wilayah pelaksanaan	Karawang, Madura, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.
	Sasaran	<p>UKM dan penyedia jasa pengembangan usaha.</p> <p><u>Cara menjangar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mercy Corps menerima proposal-proposal dari berbagai BDS. - Mempelajari proposal-proposal tersebut dengan memfokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Accountability lembaga atau struktur lembaga. - Sistem. - Keberadaan in-house expertise. - Apakah jasa yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan setempat. - Jika proposal tersebut tidak memenuhi syarat, Mercy Corps mensosialisasikan program pengembangan BDS tersebut melalui iklan di surat kabar untuk menjangar lebih banyak proposal.
	Pendanaan	Hibah USDA .
	Waktu pelaksanaan	Dimulai 2003.
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit untuk mengembangkan BDS (jasa pengembangan usaha) bagi para pengusaha mikro. - Pelatihan-pelatihan juga lebih mudah diberikan kepada usaha kecil daripada usaha mikro.
	Status saat ini	Pelatihan-pelatihan masih berlanjut, tetapi bantuan dana (subsidi) dikurangi.
	Potensi	

Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003 Kelompok Perusahaan

No.	Item	Penjelasan
1. PT Astra International Tbk.		
1.1	Nama upaya	Modal Ventura
	Deskripsi upaya	Modal ventura merupakan kegiatan usaha dari PT Astra Mitra Ventura, salah satu perusahaan kelompok PT.Astra International, yang didirikan pada tahun 1991.
	Penanggung jawab	PT Astra Mitra Ventura
	Pelaksana	PT Astra Mitra Ventura
	Instansi terkait	Yayasan Dana Bhakti Astra (YDBA) dan anak perusahaan Astra lain
	Tujuan upaya	Menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi usaha yang maju, mandiri, modern dan tangguh.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan modal untuk modal kerja dan investasi - Pembinaan/pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pasar, dan manajemen.
	Wilayah pelaksanaan	Di 8 propinsi yaitu: Jawa Barat (Kota Bandung, Kab Bogor, Kab. Bekasi, Kota Sukabumi), DKI Jakarta, Jawa Tengah (Kab. Klaten), Sumatera Barat (Kota Padang), Jawa Timur (Kota Surabaya, Kab. Pacitan), Lampung (Kota Bandar Lampung), Jambi (Kota Jambi), dan D.I. Yogyakarta (Kota Yogyakarta).
	Sasaran	<p>Usaha kecil dan menengah yang berbadan hukum. Pada awal pelaksanaan hanya terbatas pada usaha yang terkait dengan bisnis PT. Astra International, tetapi sejak tahun 1997 diperluas ke usaha lain yang tidak mesti harus terkait dengan PT Astra.</p> <p><u>Syarat mitra:</u> Berbentuk PT, mempunyai potensi ekonomi yang baik untuk jangka panjang, bersedia menerima kerjasama dalam bentuk penyertaan modal dan menerima peran serta Perusahaan Modal Ventura (PMV) di bidang manajemen, serta melengkapi dokumen-dokuman yang dibutuhkan (profil usaha dan data pendukung lainnya). Mitra diseleksi oleh AMV atas rekomendasi Yayasan Dana Bhakti Astra (YDBA) yang diambil dari mitra YDBA. Mitra AMV adalah Mitra YDBA dan mitra YDBA adalah calon mitra AMV tetapi tidak semuanya dapat bermitra dengan AMV.</p>
	Pendanaan	Seluruh pendanaan berasal dari PT Astra Mitra Ventura (AMV). Sifat dana: pinjaman melalui penyertaan modal yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1992 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Pembiayaan yang disediakan oleh AMV adalah untuk investasi dan/atau modal kerja (pada awalnya dikhususkan untuk investasi tetapi sejak tahun 2002 keduanya diperbolehkan).</p> <p>Pola pembiayaan yang diterapkan adalah: penyertaan langsung (<i>Equity</i>), obligasi konversi (OK), dan pola bagi hasil (PBH).</p> <p>Penyertaan modal bersifat sementara dan dapat dilakukan selama jangka waktu 5 tahun serta dapat diperpanjang sampai 10 tahun. Jangka waktu satu periode penyertaan modal bervariasi tergantung pada kesepakatan, dan realisasi pada saat ini bervariasi antara 0,5 – 3 tahun.</p> <p>Dana penyertaan tidak boleh menjadi mayoritas, maksimal 49% dari total aset perusahaan pasangan usaha. Realisasi saat ini berkisar antara Rp75 juta – Rp450 juta, disesuaikan dengan kebutuhan. Dana tersebut dikembalikan dalam bentuk bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, biasanya lebih tinggi dibanding bunga bank. Melalui penyertaan modal yang sejak tahun 2000 mensyaratkan adanya jaminan ini, PT AMV mempunyai hak untuk memeriksa pembukuan.</p> <p>Selain memperoleh penyertaan modal, perusahaan pasangan usaha memperoleh pembinaan manajemen langsung dari PT AMV. Pembinaan diberikan secara terus menerus, baik melalui kunjungan langsung ke perusahaan maupun melalui telepon.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Pada tahun 2003, jumlah perusahaan pasangan usaha PT AMV adalah 38 UKM. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding tahun 1997 yang mencapai 120 UKM. Penurunan tersebut merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan pasangan usaha yang mengalami kebangkrutan.
	Masalah	Karakter khusus usaha kecil dan menengah adalah kurang transparan dalam pengelolaan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Perkembangan usaha dari UKM yang dibina oleh PT. AMV relatif berhasil. Dengan demikian diharapkan semakin banyak yang mendapatkan pembiayaan maka akan meningkatkan kualitas UKM yang ada.
1.2	Nama upaya	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
	Deskripsi upaya	Sesuai dengan falsafah Astra, yaitu "Sejahtera Bersama Bangsa", maka didirikan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) pada tanggal 2 Mei 1980. Tugas YDBA adalah untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai salah satu komitmen nyata "tanggung jawab sosial" (<i>social responsibility</i>) Astra kepada masyarakat.
	Penanggung jawab	PT Astra International Tbk
	Pelaksana	Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA)
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anak perusahaan yang tergabung dalam kelompok Astra antara lain: PT. Toyota Astra Motor, PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Pantja Motor (Isuzu), PT United Tractor, PT Komatsu Indonesia, PT Astra Agro Lestari, PT Astra Otoparts, dsb. - Departemen terkait: Kementerian Kop & UKM, Dept. Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Kementerian BUMN. - BUMN: PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Jasa Raharja, Pertamina, PT Krakatau Steel - Bank : Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, Bank Danamon, Bank Niaga
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan UKM di bidang manajemen, teknologi dan pasar. - Meningkatkan kemampuan UKM terhadap akses kredit. - Meningkatkan kelas UKM dari potensial menjadi unggulan.
	Jenis kegiatan	Penyediaan program pelatihan, pendampingan, pameran, dan temu usaha untuk meningkatkan kemampuan di bidang: teknologi, manajemen, pemasaran, serta akses terhadap informasi dan pembiayaan.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia dengan prioritas 7 wilayah kerja Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)-Astra, yaitu: Jakarta, Bandung, Tegal, Yogyakarta, Sidoarjo, Mataram, dan Batam. Sedang dipersiapkan 2 LPB baru, yaitu di Kupang -NTT dan Tabalong- Kalsel.
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sasarannya: UKM dengan omset tidak lebih dari 5 miliar per tahun, aset tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), memiliki izin, milik WNI, mempunyai produk potensi pasar, dan bersedia untuk dibina oleh YDBA. - Bidang usaha: manufaktur (logam), kerajinan/<i>furnicraft</i>, jasa bengkel (roda 4 dan roda 2), agrobisnis, dan lain-lain termasuk perdagangan. - Cara menjangkau: UKM mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi binaan, atau staf YDBA/LPB mengajukan calon UKM yang telah dinilai memenuhi persyaratan di atas.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	<p>- Program pelatihan, pendampingan, pameran, dan temu usaha: Tahun 1999: Rp 1.713.800.000,- Sumber: seluruhnya dari Astra Sifat: hibah Tahun 2000: Rp 1.815.897.000,- Sumber: seluruhnya dari Astra Sifat : hibah Tahun 2001: Rp 2.761.333.000,- Sumber: dari Astra Rp 1.366.932.000,- dari mitra terkait (BUMN, Pemda, dsb) Rp 1.394.401.000,- Sifat: hibah Tahun 2002: Rp 2.670.632;000,- Sumber: dari Astra Rp 1.427.972.000,- dari mitra Rp 1.242.660.000,- Sifat : hibah Th 2003 → Rp 3.074.700.000,- Sumber: dari Astra Rp 1.577.700.000,- dari mitra Rp 1.497 .000 ,- Sifat : hibah</p> <p>- Untuk Modal Usaha (fasilitasi pembiayaan): Tahun 2000: Rp 4.070.500.000 untuk 62 UKM Tahun 2001: Rp 4.850.000.000 untuk 178 UKM Tahun 2002: Rp 8.746.250.000 untuk 69 UKM Tahun 2003 per Juni: Rp 4.203.100.000 untuk 16 UKM Sumber : seluruhnya dari mitra YDBA (BUMN dan perbankan) Sifat: pinjaman lunak (tingkat bunga 6%) dan Pinjaman komersial tingkat bunga 18-22%</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1980 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Melalui Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) yang tersebar di tujuh wilayah kerja, YDBA melakukan identifikasi dan seleksi terhadap UKM yang mendaftarkan diri menjadi binaan. UKM yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi akan memperoleh pembinaan paling lama 2 tahun. Pembinaan diberikan dalam bentuk pelatihan/pendampingan, konsultasi melalui Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), fasilitasi pembiayaan dan pengembangan pasar, layanan informasi, serta monitoring dan evaluasi. Dalam memberikan pelatihan dan pengembangan pasar (misal, mengikutsertakan UKM binaan dalam pameran), YDBA menerapkan sistem subsidi biaya. UKM binaan dikenakan biaya 20% dari total biaya sedangkan sisanya (80%) akan ditanggung oleh YDBA dan sponsor lain. Sistem demikian sengaja diberlakukan agar UKM binaan lebih menghargai upaya penguatan yang diberikan. Khusus untuk upaya pembiayaan, YDBA hanya memberikan fasilitasi dalam bentuk pemberian rekomendasi dan mempertemukan UKM binaan dengan lembaga pemberi dana yang menaruh perhatian terhadap pengembangan UKM seperti BUMN dan lembaga perbankan.</p>
	Pencapaian hasil	<p>Selama 5 tahun terakhir telah dibina sebanyak 2.904 UKM dengan rincian sbb : Tahun 1999: 372 UKM Tahun 2000: 456 UKM Tahun 2001: 539 UKM Tahun 2002: 626 UKM Tahun 2003: 911 UKM Keterangan : pencapaian tiap tahun melebihi target yang ditetapkan: 300 UKM potensial Mayoritas UKM adalah di bidang manufaktur dan kerajinan (<i>furnicraft</i>). Jumlah tenaga kerja dari seluruh UKM mitra YDBA 10 1.640 orang</p>

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Karakter SDM UKM yang bermental pedagang bukan industriawan. - Lingkungan ekonomi makro yang cepat berubah berdampak pada bisnis UKM.
	Status saat ini	Kegiatan pemberdayaan UKM masih terus berjalan
	Potensi	Pemberdayaan UKM semakin meningkat karena meningkatnya alokasi pendanaan untuk kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran berbagai pihak terkait bahwa UKM merupakan harapan bangkitnya perekonomian nasional masa depan.
2. PT Bahana Artha Ventura (BAV)		
2.1	Nama upaya	Pembiayaan Mikro (<i>Micro Investment</i>)
	Deskripsi upaya	<p>Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang ditujukan bagi para pengusaha/perusahaan mikro tradisional.</p> <p>Produk-produk pembiayaan tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan saham (bagi Perusahaan Pasangan Usaha/PPU berbadan hukum PT) - Obligasi konversi (bagi PPU berbadan hukum PT) - Bagi hasil <p>Modal ventura adalah alternatif pembiayaan bagi para pengusaha/perusahaan mikro tradisional tersebut, berupa penyertaan modal kepada PPU dalam jangka waktu tertentu dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan usaha dan pengusahanya.</p> <p>Modal ventura memiliki karakteristik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat <i>risk capital</i>, yaitu memiliki tingkat resiko atas modal yang ditanamkan karena penyedia modal ventura berperan sebagai investor, bukan <i>lender</i>. - Merupakan <i>active investment</i>, yaitu melibatkan diri dalam pengelolaan PPU jika dipandang perlu. - Investasi bersifat sementara (tidak permanen), sekitar 3-6 tahun. - Dapat membiayai usaha dalam berbagai tingkat pertumbuhan. - Mengharapkan <i>capital gain</i>/bagi hasil atas investasi yang ditanamkan.
	Penanggung jawab	PT Bahana Artha Ventura
	Pelaksana	Cabang PT Bahana Artha Ventura
	Instansi terkait	Kementerian Negara Koperasi dan UKM
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi ketergantungan pengusaha mikro tradisional kepada bank plecit/renternir - Membiasakan pengusaha mikro tradisional berhubungan dengan lembaga keuangan yang resmi - Mengembangkan usaha produktif/perusahaan mikro - Meningkatkan kesejahteraan pengusaha/perusahaan mikro
	Jenis kegiatan	Pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil. Produk bagi hasil ini diupayakan berupa bagi hasil murni. Untuk tahap awal dan dalam rangka menyederhanakan perhitungan ditetapkan bagi hasil minimum yang besarnya ditentukan oleh Direksi PT BAV setempat. Jumlah pinjaman antara Rp 500 ribu s/d Rp 5 juta per PPU dengan jangka waktu 3-6 bulan dan dapat diperpanjang hingga masa pembinaan dilakukan minimal 12 bulan.
	Wilayah pelaksanaan	Di 26 provinsi di mana terdapat Kantor cabang PT Bahana Artha Ventura.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Pengusaha mikro tradisional seperti usaha warung, bakul, pedagang asongan, kios di pasar-pasar, usaha kaki lima, usaha kereta dorong, dan toko-toko kecil. Cara menjangkau: Calon debitur mengajukan permohonan langsung ke kantor cabang</p> <p><u>Ketentuan umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha sudah berjalan dengan baik minimal 1 tahun - Merupakan usaha milik sendiri - Memiliki tempat usaha yang tetap - Memiliki surat izin penempatan lokasi usaha - Calon debitur telah menginjak usia dewasa - Berkelakuan baik - Tidak pernah memiliki pinjaman yang macet dengan kreditur lain - Memiliki KTP dan KK - Mengajukan surat permohonan - Menyertakan surat referensi dari fasilitator <p><u>Fasilitator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai integritas dan reputasi yang baik - Mempunyai pengalaman yang memadai dalam membina pengusaha/perusahaan mikro tradisional - Mempunyai pengetahuan di bidang perkreditan/pembiayaan - Bersedia bekerja keras - Mempunyai relasi yang cukup luas - Mempunyai sarana untuk operasi yang memadai (kantor, SDM, kendaraan dll.) - Bersedia memberikan jaminan kepada PT BAV setempat - Memenuhi legalitas sebagai lembaga seperti akta pendirian, struktur organisasi, surat izin dll.
	Pendanaan	<p>Sumber dana: PT BAV Pusat yang berasal dari pemegang saham, bantuan luar negeri (Japan Exim) Total nilai pinjaman: Pinjaman dari Japan Exim sebesar Rp1,2 triliun dengan bunga 14% per tahun dan <i>grace period</i> 3 tahun. Bunga yang diterapkan mulai tahun 2001 adalah 8,5% per tahun.</p>
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1994 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Hubungan antara perusahaan modal ventura (PMV) dengan dengan usaha/pengusaha yang menjadi kliennya (PPU atau <i>investee company</i>) bersifat individual atau <i>one-on-one</i>. Seorang <i>venture capital officer</i> akan menangani PPU secara komprehensif sejak calon PPU datang menghubungi PMV tempatnya bekerja, mengembangkan PPU, sampai dengan saatnya PMV melepaskan investasinya di PPU yang bersangkutan (divestasi).</p> <p>Ada dua pola pembiayaan oleh PT BAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) oleh PT BAV: - PT BAV memberikan dana kepada PPU - PT BAV bekerjasama dengan pihak ketiga (jasa profesional dan institusi terkait) untuk membantu memberikan jasa (audit, pelatihan, hukum, manajemen dll) kepada PPU. - Pola pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha oleh Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD): - PT BAV meneruskan dana kepada PMVD - PMVD memberikan dana kepada PPU - PMVD bekerjasama dengan ketiga (jasa profesional dan institusi terkait) untuk membantu memberikan jasa (audit, pelatihan, hukum, manajemen dll) kepada PPU.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Per 31 Agustus 2003: <ul style="list-style-type: none"> - Akumulasi investasi (yang sudah dan sedang dibiayai) sejak tahun 1994 sebesar Rp 1,889 miliar - <i>Outstanding</i> investasi per tahun 2003 sebesar Rp760 miliar - Jumlah PPU per tahun 2003 sebanyak 10.329 PPU Secara terperinci, realisasi PMVD sampai dengan 31 Agustus 2003 di daerah adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Modal Awal Padanan (MAP) tahap I (Jateng, Jatim, Lampung, Sumut): Rp5 miliar - MAP tahap II (Jambi, Kalsel, Sumut, Sulut): Rp5 miliar - MAP tahap III (Jateng, Jatim, Lampung, Sumut, Yogya, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Sulteng, Sultra, Kaltim, Kalbar, Papua, NTB, NTT: Rp24,5 miliar - Total PMVD penerima program MAP: Rp34,5 miliar
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum tidak terdapat masalah di tingkat peminjam karena jumlah pinjamannya kecil. - Adapun masalah di tingkat daerah yang terjadi di Yogyakarta baru-baru ini adalah akibat dari buruknya pengelolaan. - Ada kesenjangan antara peminjam yang terdidik (<i>educated</i>) dan yang kurang terdidik (<i>less educated</i>) sehingga pola pembinaan harus disesuaikan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Potensi sangat besar karena bank belum mampu melayani semua usaha kecil
3. Koperasi Bina Masyarakat Mandiri		
3.1	Nama upaya	Pelayanan Pinjaman untuk Usaha Mikro
	Deskripsi upaya	Upaya pelayanan pinjaman ini dilakukan oleh Bina Masyarakat Mandiri, sebuah lembaga keuangan mikro non bank yang berbadan hukum koperasi dan anggotanya berasal dari golongan menengah ke atas. Lembaga ini menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina oleh Lembaga Pendampingan Usaha Mikro (LPUM).
	Penanggung jawab	Koperasi Bina Masyarakat Mandiri
	Pelaksana	Koperasi Bina Masyarakat Mandiri
	Instansi terkait	Bina Swadaya
	Tujuan upaya	Meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dengan cara memperkuat permodalan usaha anggota KSM yang dibina LPUM.
	Jenis kegiatan	Pemberian pinjaman modal kerja
	Wilayah pelaksanaan	Di 24 wilayah di 10 provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat (Bogor-Bekasi, Kab Indramayu, Kab Subang, Bandung, Kab Garut), Jawa Tengah (Pekalongan, Kab Kebumen, Kab Boyolali, Kab Sragen, Kab Klaten, Kab Magelang), D.I. Yogyakarta, Jawa Timur (Kab Lamongan, Kab Banyuwangi, Kab Ngawi, Kab Gresik), Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya), Irian Jaya (Wamena), Sulawesi Selatan (Kab Takalar), NTT (Kefamenanu, Soe)
	Sasaran	Penerima manfaat adalah anggota KSM (usaha mikro) yang telah dibina LPUM tanpa membedakan jenis kelamin. <u>Kriteria:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tekun dalam usahanya - Pinjaman didasarkan pada kelayakan usaha dan kondisi ekonomi rumah tangga yang memadai - Pernah mendapatkan fasilitas pinjaman dari kelompok minimal 1 (satu) kali, dengan pengembalian yang baik Penambahan jumlah anggota di setiap KSM akan ditentukan dalam rapat anggotanya.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran (lanjutan)	<p><u>Kriteria pinjaman untuk KSM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal sudah didampingi selama 6 bulan terakhir - Pertemuan anggota bulanan minimal telah dilakukan secara rutin pada 3 bulan terakhir - Telah mengadakan kegiatan simpan-pinjam - Secara teratur menerapkan administrasi keuangan yang transparan - Sanggup menerapkan sistem “Tanggung Renteng” untuk menjamin pengembalian pinjaman BMM <p><u>Kriteria pinjaman untuk LPUM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai status kelembagaan yang jelas, misalnya yayasan, unit kerja suatu lembaga dan lainnya. - Mempunyai visi pemberdayaan masyarakat dan program kerja pendampingan. - Mempunyai kepengurusan minimal seorang koordinator dengan 3 (tiga) orang staf pendamping kelompok - Telah mendampingi kelompok minimal 12 bulan terakhir, dengan jumlah minimal 10 kelompok. - Telah menerapkan administrasi keuangan dan administrasi kelembagaan yang lain secara konsisten. - Mempunyai aset tidak termasuk tanah dan bangunan, minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) <p><u>Realisasi:</u> Diperkirakan sekitar 60% dana untuk usaha perempuan telah dikucurkan dengan kisaran pinjaman Rp 25.000 – Rp 1 juta</p>
	Pendanaan	<p>Pendanaan didapat dari anggota koperasi BMM yang berjumlah 118 orang. Jumlah dana yang dipinjamkan sampai 30 April 2003 adalah Rp. 19.786.095.000 Saldo yang beredar di KSM sebesar Rp 5.426.969.493 Dana yang dikeluarkan oleh koperasi BMM bersifat pinjaman dengan bunga yang disepakati.</p>
	Waktu pelaksanaan	Oktober 1998 – Sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Prosedur memperoleh pinjaman BMM sebagai berikut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - anggota KSM membuat usulan sederhana mengenai kebutuhan modal kerja dan perhitungan kelayakan serta jadwal pengembaliannya, - pertemuan kelompok untuk diskusi mengenai isu “tanggung renteng” dan evaluasi kebutuhan dana tersebut, - KSM mengajukan usulan pinjaman dari kelompok ke BMM yang akan dievaluasi oleh LPUM, - koperasi BMM akan mempertimbangkan ajuan masing-masing kelompok dengan pertimbangan khusus, - BMM akan mentransfer dana ke masing-masing LPUM disertai pemberitahuan bagi anggota yang diterima atau ditolak. - LPUM wajib mencairkan dana serta menyampaikannya kepada kelompok bersangkutan, - setelah menerima dari LPUM, setiap kelompok wajib membuat akad kredit dan dikirimkan ke BMM untuk disetujui oleh pengurus BMM. <p><u>Besarnya pinjaman:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pinjaman yang diberikan kepada KSM disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) - Pengajuan kedua dan berikutnya dimungkinkan untuk bertambah, tergantung dari kesediaan dana di BMM. - Suku bunga yang diberikan kepada KSM adalah 2% perbulan flat (tetap) atau 3,6% perbulan efektif (menurun), sedangkan dari KSM ke anggota KSM perlu ditambah untuk pemupukan modal kelompok yang besarnya disepakati bersama. - Jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, maksimal 12 bulan

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Sebagian besar dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan ke BMM dengan lancar. Kredit macet sekitar 0.6% Per 30 April 2003, jumlah KSM yang dilayani mencapai 1.364 KSM dengan 24.627 anggota.
	Masalah	Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu tingkat pengembalian yang tertunda karena beberapa alasan seperti usaha gagal, panen tertunda, dll. Selain itu, jumlah dana yang ada belum dapat memenuhi semua permintaan sehingga perlu dicarikan alternatif untuk mendapatkan dana tambahan.
	Status saat ini	Kegiatan masih terus berjalan
	Potensi	Pengembangan BMM akan semakin berdampak positif dilihat dari permintaan dana yang terus meningkat. Sebagian besar mereka yang telah menyelesaikan masa kredit akan mengajukan kembali pinjaman ke BMM. Dengan menggunakan parameter jumlah dana kredit yang dikembalikan (hampir 100%) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi bagi usaha mikro.
4. PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)		
4.1	Nama upaya	Program Pengembangan Masyarakat
	Deskripsi upaya	Program Pengembangan Masyarakat PT.CPI mempunyai tiga bidang sasaran utama, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Bidang yang terkait dengan pengembangan usaha mikro/kecil adalah pendidikan, khususnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan bidang peningkatan pendapatan. Oleh karena itu paparan selanjutnya dititikberatkan pada ke dua bidang tersebut
	Penanggung jawab	PT. Caltex Pacific Indonesia
	Pelaksana	PT. Caltex Pacific Indonesia
	Instansi terkait	Instansi pemerintah setempat dan perguruan tinggi
	Tujuan upaya	Membantu masyarakat sekitar mencapai kemandirian dan taraf hidup yang lebih baik dengan dilandasi filosofi "Tumbuh dan Berkembang Bersama Masyarakat".
	Jenis kegiatan	- Pemberian pelatihan dan pembinaan - Bantuan sarana produksi
	Wilayah pelaksanaan	Provinsi Riau, khususnya sekitar empat distrik utama operasi PT. CPI di Provinsi Riau, yaitu Rumbai (Kota Pekanbaru), Minas (Kab.Siak), Duri/Besakap (Kab.Bengkalis), dan Dumai (Kota Dumai)
	Sasaran	Sasaran: Masyarakat sekitar, baik yang sudah memiliki usaha maupun tidak dan tidak membedakan jenis kelamin.
	Pendanaan	<u>Sumber dana:</u> - Anggaran operasional Pertamina- PT.CPI - YSCTI (Yayasan Sosial Chevron dan Texaco Indonesia), yang didirikan pemegang saham PT.CPI tahun 1995 - YDBKC (Yayasan Dharma Bhakti Karyawan Caltex), yang didirikan pegawai PT.CPI tahun 1995 <u>Jumlah Dana:</u> - Untuk seluruh bidang Program Pengembangan Masyarakat - Anggaran operasional Pertamina- PT.CPI, rata-rata US\$ 3 – 5 juta per tahun - YSCTI, tahun 1993 – Juli 2000 sekitar US \$2,8 juta <u>Sifat dana:</u> hibah
	Waktu pelaksanaan	Program pengembangan masyarakat secara umum dimulai sejak tahun 1950-an.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Pelaksanaan program pengembangan masyarakat bidang peningkatan masyarakat, seperti juga bidang pendidikan dan kesehatan diselaraskan dengan kebutuhan (<i>needs</i>) masyarakat terkait. Untuk memperoleh program pengembangan yang efektif, sejak tahun 1999 PT.CPI membentuk Majelis Penasehat Kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, kalangan akademis dan manajemen PT.CPI. Pembinaan dan pelatihan untuk kegiatan usaha, baik pertanian, perikanan maupun industri kecil dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan kalangan universitas. Jenis pembinaan/pelatihan yang diberikan antara lain adalah: pengembangan berbagai jenis usaha seperti: industri pisang, ikan keramba patin, tambak udang, industri batik, agribisnis, dsb. Beberapa pelatihan dilakukan di lembaga pelatihan seperti di Pusdiklat Pertanian Terpadu Karya Nyata, Bogor, Jawa Barat. Beberapa peserta pelatihan yang berhasil mengembangkan usahanya kemudian diminta membina masyarakat sekitar yang memiliki usaha sejenis Bantuan sarana produksi diberikan sebagai modal awal untuk memotivasi pengembangan usahanya.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Meningkatkan pengetahuan dan pendapatan masyarakat sasaran, sekaligus menjadikannya teladan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat lainnya.
4.2	Nama upaya	<i>Local Business Development</i> (LBD) (Pengembangan Usaha Lokal)
	Deskripsi upaya	LBD termasuk salah satu bentuk baru dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan PT. CPI
	Penanggung jawab	PT. Caltex Pacific Indonesia
	Pelaksana	PT. Caltex Pacific Indonesia
	Instansi terkait	-
	Tujuan upaya	Membina dan meningkatkan profesionalisme pengusaha setempat agar bisa bersaing dalam usaha
	Jenis kegiatan	Pemberian paket usaha dengan nilai maksimal Rp.200 juta.
	Wilayah pelaksanaan	Provinsi Riau, khususnya sekitar empat distrik utama operasi PT.CPI di Provinsi Riau, yaitu Rumbai (Kota Pekanbaru), Minas (Kab.Siak), Duri/Besakap (kab.Bengkalis), dan Dumai (Kota Dumai)
	Sasaran	Usaha kecil dan menengah setempat yang memiliki kegiatan usaha (<i>output</i>) yang sesuai dengan kebutuhan PT. CPI
	Pendanaan	Total dana untuk pada program LBD meningkat dari tahun ke tahun: - Tahun 2001 = Rp 13.2 miliar - Tahun 2002 = Rp 28.6 miliar - Tahun 2003 = Rp 40.0 miliar (<i>target</i>)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	LBD adalah program pengembangan masyarakat PT. CPI yang berciri: - syarat pendaftaran sederhana, - tersedia fasilitas bimbingan teknis, - akses informasi peluang bisnis lebih mudah, - kompetisi yang relatif ringan, dan - waktu pembayaran relatif singkat. Kriteria-kriteria proyek LBD adalah sebagai berikut: - nilai satu paket proyek maksimal Rp 200 juta, - resiko rendah terhadap operasi PT.CPI, - keahlian dan teknologi yang diperlukan sederhana sampai sedang, barang/material tersedia dan mudah didapat di pasaran lokal/dalam negeri

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Contoh komoditi yang dimasukkan dalam proyek LBD adalah penyediaan pakaian seragam karyawan. Sebelumnya komoditi ini disediakan dalam skala besar oleh satu perusahaan. Setelah diterapkan LBD pesanan dipecah kepada beberapa perusahaan kecil dan menengah dengan batas nilai kontrak masing-masing sesuai dengan ketentuan. Perusahaan yang ingin ikut LBD harus melalui tahapan-tahapan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - mendaftarkan perusahaan/koperasi, - mengikuti workshop, - menentukan pilihan bidang bisnis (jasa/barang), - mengikuti proses tender dalam ruang lingkup LBD, - melaksanakan proyek secara langsung, - mencapai target LBD - menjadi rekanan umum
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi komoditi untuk rekanan LBD mencapai lebih dari 100 item - Jumlah rekanan binaan LBD meningkat dari 200-an kontraktor kecil pada tahun 2001 menjadi 813 pada akhir Desember 2002 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - yang hadir dalam pelatihan/kursus dan bersertifikat 366 - yang mengikuti tender tetapi belum menang 103 - yang menang tender (Rp5 juta – Rp100 juta) 161 - yang menang tender (Rp100 juta – Rp500 juta) 93 - yang menang tender (lebih dari Rp500 juta) 16
	Masalah	Minimnya informasi tentang kondisi dan potensi masyarakat
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Memberi kesempatan UKM setempat untuk bersaing dalam bisnis sekaligus mendorong keberlanjutan usahanya
5. PT. ISM Bogasari Flour Mills		
5.1	Nama upaya	Program Kemitraan Usaha dengan Usaha Kecil dan Menengah
	Deskripsi upaya	Upaya PT ISM Bogasari Flour Mills ini merupakan wujud dari pelaksanaan “Tanggung Jawab Sosial Bogasari” (<i>Bogasari Social Responsibilities</i>) yang diterapkan melalui Pancabakti Bogasari, yang terdiri dari (1) membangun sumber daya manusia (<i>building human resources</i>), (2) memelihara lingkungan (<i>protecting the environment</i>), (3) mendorong pengelolaan perusahaan yang bersih dan sehat (<i>encouraging good corporate governance</i>), (4) melakukan upaya kajian soliditas sosial (<i>assessing social cohesion</i>), dan (5) memperkuat ekonomi (<i>strengthening economies</i>)
	Penanggung jawab	PT. ISM Bogasari Flour Mills
	Pelaksana	PT. ISM Bogasari Flour Mills
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui kegiatan kemitraan dengan menggunakan prinsip “tumbuh bersama” .
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pelatihan (melalui <i>baking school</i>: roti, mie, kue kering, manajemen usaha kecil, lokakarya) - Penyediaan informasi (melalui media dwi mingguan Wacana Mitra berupa informasi pasar, produk, kuis, kiat/tips dan safari pers) - Pemberian dukungan keuangan (kredit investasi, kredit modal kerja) - Pemberian motivasi usaha kepada UKM melalui lomba, studi banding, plant tour, pameran dan MASKUM show di TVRI untuk merangsang minat berwiraswasta (<i>entrepreneurship</i>) dan inspirasi usaha makanan berbasis tepung skala kecil dan menengah

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dukungan pemasaran melalui: <ul style="list-style-type: none"> - pemberian nama produk, sertifikat halal, hak paten dan memperbaiki kemasan - pembentukan hubungan melalui program kunjungan, arisan, membuat BMC (Bogasari Mitra Card) - promosi, publikasi melalui radio, koran, TV dan MCB - Penyediaan konsultasi kegiatan pemasaran, teknik produksi, dan peluang usaha - Pembentukan jaringan pasokan bahan baku - Pembentukan koperasi dan paguyuban usaha kecil dan menengah sesuai bidang usaha - Penyediaan alat
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta, Banten (Tangerang), Jawa Barat (Bandung, Cirebon) Jawa Tengah (Semarang, Surakarta, Cilacap, Magelang, Wonogiri), DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Sleman) , Jawa Timur (Surabaya, Malang, Madiun, Tulungagung, Pasuruan), Lampung, Sumatera Selatan (Kota Palembang), Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
	Sasaran	Usaha kecil (termasuk mikro), menengah dan koperasi yang mempunyai kaitan bisnis dengan PT ISM Bogasari Flour Mills, tanpa membedakan jenis kelamin. Kriteria: memiliki jenis usaha yang sama dan berasal dari daerah yang sama Cara Menjaring: dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan daerah asal yang sama, para pengusaha tersebut dikumpulkan untuk membentuk paguyuban pengusaha
	Pendanaan	Hibah dan pinjaman. <u>Sumber pendanaan:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta training yang mendaftar untuk kegiatan training. - PT ISM Bogasari Flour Mills, untuk kegiatan lainnya. <u>Sifat dana:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah untuk kegiatan yang bersifat pelatihan, penyediaan informasi, pemasaran, promosi sampai penyediaan konsultasi dan networking. - Pinjaman untuk bantuan modal usaha.
	Waktu pelaksanaan	Sejak tahun 1981 – sekarang: <ul style="list-style-type: none"> - 1981 : sebelum kegiatan kemitraan dicanangkan oleh pemerintah tahun 1995, Bogasari telah melakukan kegiatan kemitraan usaha dengan pengrajin tekstil di Majalaya dan penjahit kantong terigu di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat - 1995 – sekarang: melakukan kegiatan kemitraan secara mandiri dan mulai memperluas kemitraan dengan bidang lain yang masih memiliki keterkaitan usaha dengan PT ISM Bogasari Flour Mills
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat training pembuatan kue (BBC = Bogasari Baking Center) menyediakan kegiatan pelatihan secara terprogram dengan peserta usaha kecil dan masyarakat umum, dan dikenakan biaya yang relatif terjangkau, - Kegiatan pelatihan dan bimbingan usaha dilakukan secara berkala, baik secara khusus maupun disertakan pada pertemuan paguyuban usaha kecil dan menengah, - Media informasi usaha kecil menengah makanan berbasis tepung diberikan secara gratis setiap dua minggu dalam bentuk bulletin (<i>newsletter</i>). - Tayangan televisi, MASKUM Show, disiarkan melalui TVRI nasional setiap hari Minggu pukul 11.00 – 12.00 WIB sebagai upaya pengembangan kewirausahaan - Pembentukan paguyuban usaha dilakukan sesuai bidang usaha dan lokasi, misalnya paguyuban mie ayam atau roti di kota tertentu. Proses pembentukan paguyuban tersebut berawal dari inisiatif pengusaha lokal yang kemudian diresmikan oleh PT ISM Bogasari Flour Mills. - Pemberian pinjaman modal usaha dilakukan dengan memberi pinjaman modal kerja dan investasi. Pinjaman diberikan tanpa agunan dengan jasa pinjaman atau penganti inflasi 10% per tahun selama jangka waktu 3 tahun. Jumlah pinjaman bervariasi, tergantung kebutuhan usaha kecil dan menengah, dengan realisasi antara Rp10 juta – Rp75 juta. - Disamping memberi pinjaman, PT ISM Bogasari Flour Mills juga menyediakan akses bagi UKM terhadap sumber dana lain, seperti perbankan, dengan cara memberikan rekomendasi, dan alat

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 26 pusat training pembuatan kue (BBC) yang tersebar di berbagai daerah di Jawa. - Terbentuk 13 paguyuban pengusaha mie yang beranggotakan 274 pengusaha kecil, 12 diantaranya terdapat di Jawa dan 1 paguyuban di Kalimantan Tengah (Banjarmasin) - Terdapat 13 kelompok pengusaha roti mitra yang beranggotakan 568 pengusaha kecil - Terdapat 100 KUD peternak mitra
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya PT. ISM Bogasari dibandingkan dengan jumlah mitra yang besar dan menyebar. - Masih kurangnya wawasan bisnis dari perusahaan mitra
	Status saat ini	Program masih terus berlangsung
	Potensi	Program ini cukup berpotensi untuk berkembang dan untuk mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi yang bermitra karena pemberdayaannya dilakukan untuk seluruh aspek usaha, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, teknik produksi, manajemen, dan aspek pemasaran, bantuan permodalan hingga memberikan kepastian pasokan bahan baku.
6. Pertamina		
6.1	Nama upaya	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
	Deskripsi upaya	Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994, yang kemudian diganti dengan Kepmen BUMN No.236/MBU/2003, BUMN termasuk Pertamina diwajibkan melakukan Program Kemitraan -terhadap usaha kecil- dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang pada peraturan sebelumnya dikenal dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).
	Penanggung jawab	Pertamina
	Pelaksana	PUKK Pertamina
	Instansi terkait	Kantor Menteri Negara BUMN, Departemen keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan struktur sosial - Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap - Memperkokoh tata hubungan dan kerja sama saling menguntungkan antara Pertamina dengan badan usaha koperasi dan unit usaha kecil dan swasta
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman dana untuk modal kerja dan investasi - Pemberian pendidikan/pelatihan, pengkajian/penelitian dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen dan keterampilan teknis produksi - Pemasaran dan promosi hasil produksi
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia, dengan prioritas daerah sekitar operasi Pertamina (di 23 lokasi) : NAD (Kab Aceh Timur), Sumatera Utara (Berastagi, Pangkalan Brandan, Kota Medan), Sumatera Selatan (Kota Prabumulih, Plaju, Kota Palembang), Riau (Kota Dumai), Jambi (Kota Jambi), DKI Jakarta (Kota Jakarta Pusat), Jawa Barat (Kota Cirebon, Kab. Garut, Kab Indramayu), Jawa Tengah (Cepu, Kab Cilacap: Lomanis, Kota Semarang), Jawa Timur (Kota Surabaya), Kalimantan Timur (Kota Balikpapan - 2 unit), Sulawesi Selatan (Kota Ujung Pandang), Sulawesi Utara (Kab Minahasa), Irian Jaya Barat (Kota Sorong, Jayapura)

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p>Usaha kecil (dalam realisasi, ada yang tergolong usaha mikro) dan koperasi yang dievaluasi dan diseleksi oleh Pertamina sendiri atau dibantu pihak lain dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan kegiatan usaha minimal 2 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar. - Lebih diutamakan usaha kecil dan koperasi primer yang belum memiliki kemampuan mengakses perbankan atau tidak mempunyai jaminan yang cukup untuk memiliki kredit perbankan. - Milik warga negara Indonesia. - Bersedia untuk penyertaan dana sebesar 25% dari kebutuhan dana pengembangan usaha. - Bersedia menyerahkan agunan/jaminan atas pinjaman (dalam pelaksanaan tidak mengikat dan tergantung kondisi masyarakat daerah setempat, namun bagi peminjam lebih dari Rp 50 juta, ketentuan ini bersifat wajib). - Belum pernah dan tidak sedang mendapat bantuan pembinaan dari BUMN dan/atau institusi sejenis yang lain. <p>Penentuan usaha kecil dan koperasi yang mendapatkan hibah untuk pendidikan/pelatihan dan kegiatan promosi hasil produksi adalah tanggung jawab Unit PUKK Daerah. Setiap Unit PUKK mempunyai kriteria masing-masing. PUKK Pusat hanya menentukan proporsi alokasi dana untuk pinjaman dan hibah (dana pembinaan).</p>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman: Posisi bantuan pinjaman per 31 Mei 2003 Rp179,3 miliar Sumber dana: 1 – 3% laba Pertamina Sifat dana: pinjaman - Pemberian pendidikan/pelatihan serta pemasaran dan promosi hasil produksi: Akumulasi dana per 31 Mei 2003 Rp27,53 miliar Sumber dana: 1 – 3% laba Pertamina Sifat dana: hibah
	Waktu pelaksanaan	Sejak 1993 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Tata cara pemberian bantuan:</p> <p>Usaha kecil dan koperasi mengajukan surat permohonan dilampiri rencana pengembangan usahanya dan menyerahkannya kepada ketua pelaksana PUKK Unit Operasi Pertamina terdekat. Rencana pengembangan tersebut sekurang-kurangnya berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan saat ini <ul style="list-style-type: none"> - Data perusahaan (badan usaha/koperasi/perorangan) : nama, alamat, pimpinan/pemilik dan nomor telepon/faksimile. - Uraian usaha : tempat usaha, izin usaha (bila ada), lama usaha dan jenis barang/jasa. - Organisasi : jumlah tenaga kerja, administrasi dan hubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan. - Produksi : prasarana/sarana jenis dan sumber bahan baku - Pemasaran : tempat/daerah, penjualan/omzet dan strategi/cara - Keuangan : laba/rugi (bulanan/tahunan), neraca dan cash flow. - Jumlah bantuan yang diharapkan dan rencana pengembalian pinjaman - Keadaan yang diharapkan setelah mendapat bantuan (dibandingkan dengan keadaan saat ini) - Rekomendasi dari instansi terkait (bila perlu)

No.	Item	Penjelasan																					
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p>UKK terpilih akan menjadi UKK mitra binaan yang akan memperoleh bantuan pinjaman seperti tertuang dalam surat perjanjian/kontrak.</p> <p>Bantuan dana disalurkan secara langsung kepada UKK tanpa biaya administrasi. Lama pembinaan untuk setiap usaha adalah 5 tahun</p> <p>Jumlah pinjaman sebesar 75% dari jumlah kebutuhan dana dan maksimum Rp100 juta (dalam realisasi, jumlah ini bervariasi mulai dari Rp1 juta sampai Rp 100 juta) Pertamina memberikan target pinjaman sebanyak mungkin di bawah Rp25 juta.</p> <p>Jangka waktu pinjaman adalah 1 – 3 tahun dan boleh diperpanjang maksimal sampai 5 tahun. Suku bunga pinjaman bervariasi antara 4 – 6% flat (tetap) per tahun, antara lain tergantung pada jumlah pinjaman -semakin besar pinjaman semakin tinggi suku bunga.</p> <p>Pendidikan/pelatihan diberikan kepada usaha kecil dan koperasi binaan, baik atas dasar permintaan binaan maupun atas pertimbangan PUKK Pertamina.</p>																					
	Pencapaian hasil	<p>Posisi mitra binaan dan saldo pinjaman per 31 Mei 2003:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Jumlah mitra binaan:</u></th> <th><u>Saldo pinjaman:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Koperasi</td> <td>762</td> <td>Rp 20,14 miliar</td> </tr> <tr> <td>- KUD</td> <td>1.082</td> <td>Rp 23,08 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Perusahaan</td> <td>651</td> <td>Rp 11,84 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Perorangan</td> <td>14.035</td> <td>Rp118,73 miliar</td> </tr> <tr> <td>- Lain-lain</td> <td>338</td> <td>Rp 5,52 miliar</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>16.868</td> <td>Rp179,30 miliar</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Jumlah mitra binaan:</u>	<u>Saldo pinjaman:</u>	- Koperasi	762	Rp 20,14 miliar	- KUD	1.082	Rp 23,08 miliar	- Perusahaan	651	Rp 11,84 miliar	- Perorangan	14.035	Rp118,73 miliar	- Lain-lain	338	Rp 5,52 miliar	Total	16.868	Rp179,30 miliar
	<u>Jumlah mitra binaan:</u>	<u>Saldo pinjaman:</u>																					
- Koperasi	762	Rp 20,14 miliar																					
- KUD	1.082	Rp 23,08 miliar																					
- Perusahaan	651	Rp 11,84 miliar																					
- Perorangan	14.035	Rp118,73 miliar																					
- Lain-lain	338	Rp 5,52 miliar																					
Total	16.868	Rp179,30 miliar																					
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran seringkali terhambat akibat kemacetan usaha dan tidak ada kemauan baik untuk membayar. - Jumlah dana terbatas dan belum mampu memenuhi semua permintaan pembinaan. 																					
	Status saat ini	Sampai sekarang masih terus berjalan.																					
	Potensi	Menumbuhkembangkan kegiatan usaha, baik usaha kecil maupun koperasi agar menjadi lebih tangguh dan mandiri (dalam realisasi masih di bawah target Pertamina).																					
7. PT Pos Indonesia (Persero)																							
7.1	Nama upaya	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)																					
	Deskripsi upaya	Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994, terakhir diubah dengan Kepmen BUMN No.236/MBU/2003, BUMN termasuk PT. Pos Indonesia diwajibkan melakukan Program Kemitraan –terhadap usaha kecil- dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang pada peraturan sebelumnya dikenal dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi																					
	Penanggung jawab	PT.Pos Indonesia (Persero)																					
	Pelaksana	PUKK PT Pos Indonesia (Persero)																					
	Instansi terkait	PT Indosat, PT Telkom (mulai tahun 2000 melaksanakan program PUKK sendiri), Kantor Menteri Negara BUMN, Departemen Keuangan																					
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha - Mengembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat - Mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil serta koperasi 																					

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal kerja dan investasi - Pemantauan perkembangan usaha - Mengikutsertakan mitra dalam pameran - Penyediaan studi banding pembuatan produk - Pemberian pelatihan
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh provinsi di Indonesia
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> usaha kecil yang berbentuk badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) atau perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga), tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam realisasi sebagian besar sasaran merupakan usaha mikro.</p> <p><u>Kriteria sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) atau perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang, jasa, dsb) yang telah melakukan kegiatan usaha; - Mempunyai omzet setinggi-tingginya Rp1 miliar per tahun; - Mempunyai aktiva setinggi-tingginya Rp200 juta (di luar tanah dan bangunan yang ditempati); - Mempunyai penyertaan dana (equity) sebesar 25% dari kebutuhan dana; - Belum pernah dan atau tidak sedang dibina oleh BUMN lain; - Lebih ditujukan kepada usaha kecil dan koperasi primer yang belum memiliki kemampuan akses perbankan (bankable) dan mempunyai aset/omzet di bawah Rp50 juta; - Khusus untuk koperasi yang melaksanakan kredit program pemerintah, yang diperhitungkan dalam omzet hanya nilai imbalan (fee) yang diperoleh dari penggunaan kredit program tersebut. <p><u>Cara menjangkau Mitra Binaan :</u> Usaha kecil dan koperasi mengajukan proposal yang dilengkapi data yang dipersyaratkan oleh Kepala Wilayah Pos (propinsi) dan kepala Kantor Pos (ibukota propinsi) melalui kepala UPT. Setelah diseleksi, dilakukan survei calon mitra binaan dengan memperhatikan prinsip "5C" yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Character</i> : watak dan sifat calon mitra binaan baik dalam kehidupan pribadi sosial dan lingkungan usahanya. - <i>Capacity</i> : penilaian terhadap kemampuan calon mitra binaan untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tsb menjadi kenyataan, termasuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan - <i>Capital</i> : dana/modal yang dimiliki calon mitra binaan untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. - <i>Condition</i> : kondisi atau keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon mitra binaan - <i>Collateral</i> : bila dianggap perlu, mitra binaan diminta untuk memberikan jaminan kredit berupa agunan. Misalnya, untuk pinjaman modal kerja/investasi sebesar Rp 10 juta, diperlukan agunan dengan nilai minimal 80% dari besar bantuan yang diajukan
	Pendanaan	<p>Hingga tahun 2002 dana dari alokasi laba PT.Pos mencapai Rp 219,612 miliar</p> <p><u>Sumber dana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa dana pembinaan tahun lalu, - Bagian laba PT.Pos Indonesia, PT Indosat, PT.Telkom 1 – 3% (PT. Pos Indonesia sejak tahun 1995 menjadi pelaksana PUKK dari tiga perusahaan tetapi sejak tahun 2002 PT.Telkom melakukan program PUKK sendiri. Meski demikian dana sebelumnya tetap dikelola PT.Pos Indonesia) - Pengembalian pinjaman mitra binaan

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan (lanjutan)	Sifat dana: untuk kegiatan bantuan modal sifatnya pinjaman, sedangkan kegiatan pembinaan lain hibah. Peruntukkan dana: <ul style="list-style-type: none"> - usaha kecil minimal 50%; koperasi/KUD maksimal sebesar 50% yang diantaranya maksimal 5% untuk koperasi karyawan BUMN Pembina; - alokasi dana pembinaan per propinsi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. - Besarnya hibah maksimal 75% dari kebutuhan dan dana hibah ditetapkan maksimal 30% dari dana yang disediakan untuk pembinaan tiap tahun
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1993 - sampai sekarang.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal kerja dan investasi: - Besar pinjaman maksimal 75% dari kebutuhan (realisasi antara Rp 5 juta - Rp 35 juta), jasa pinjaman 6% per tahun dengan perhitungan menurun (sliding), dan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan dengan tenggang waktu grace period selama 3 bulan terhitung dari perjanjian kemitraan ditandatangani. - Pemantauan perkembangan usaha dilakukan dua kali setahun oleh PUKK wilayah. Diutamakan pada usaha kecil dan koperasi yang melakukan tunggakan - Mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran: umumnya pameran dilakukan oleh instansi lain, PUKK PT.Pos hanya mengikutsertakan mitra binaan dengan menanggung biayanya. Mitra binaan yang dipilih adalah yang mempunyai produk yang bagus dan bisa dipamerkan ("unik" dalam arti produk dan kualitasnya, seperti kerajinan tangan) serta lancar membayar cicilan pinjaman. - Penyediaan studi banding pembuatan produk: Studi banding dilakukan di daerah industri bagi mitra kerja yang usahanya mempunyai prospek untuk berkembang tetapi membutuhkan peningkatan kualitas produk. - Pemberian pelatihan: Pelatihan hanya diberikan kepada calon mitra binaan yang sudah dinyatakan layak memperoleh kredit. Materi pelatihan meliputi: manajerial dasar, pembukuan, cara promosi produk, dan mengelola pegawai.
	Pencapaian hasil	Sampai akhir tahun 2002 mitra binaan dari dana alokasi laba PT. Pos mencapai 31.113 mitra, terdiri dari 28.438 usaha kecil dan 2.675 koperasi (<i>data Meneg BUMN</i>). Membantu memberikan tambahan modal bagi mitra binaan sampai lebih dari 50% modal yang diperlukan. Membantu penyerapan tenaga kerja, yang rata-rata meningkat sekitar 4% per tahun. Mitra binaan menyerap 232.782 tenaga kerja. Tahun 2003 mitra binaan ditargetkan bertambah menjadi 36.211, terdiri dari 32.752 usaha kecil dan 3.459 koperasi
	Masalah	<p>Dari sisi PT. Pos :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Keterbatasan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kemampuan. untuk melaksanakan seluruh mekanisme pembinaan -Keterbatasan dana yang dialokasikan, terutama untuk pelatihan, studi banding dan pemantauan. <p>Dari sisi Mitra Binaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alamat tidak jelas, kadang-kadang pindah alamat tanpa memberi tahu pada PT. Pos sehingga menyulitkan pemantauan. -Kewajiban untuk membuat laporan tiap triwulan tidak terpenuhi -Adanya kredit macet/tunggakan. -Kondisi makro masyarakat yang membentuk persepsi keliru bahwa dana bersifat hibah dari pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Memajukan usaha kecil (termasuk mikro) dan koperasi. - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

No.	Item	Penjelasan
8. PT Pupuk Kaltim Tbk.		
8.1	Nama upaya	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
	Deskripsi upaya	<p>Dasar pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 2. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. <p>Program ini terdiri atas dua kegiatan utama: program kemitraan dan program bina lingkungan. Narasi ini hanya membahas program kemitraan karena program bina lingkungan tidak terkait dengan usaha mikro.</p>
	Penanggung jawab	PT Pupuk Kaltim Tbk
	Pelaksana	Biro Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebelumnya bernama Biro PUKK; atas dasar Kepmen BUMN diubah menjadi PKBL.
	Instansi terkait	Bank/lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman, Disperindagkop, pemda setempat.
	Tujuan upaya	Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat
	Jenis kegiatan	<p>Program Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman permodalan - Hibah dalam bentuk <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan - Bantuan pemasaran produk mitra binaan - Bantuan pengembangan teknik produksi
	Wilayah pelaksanaan	Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Seluruh usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.</p> <p><u>Kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- - Milik Warga Negara Indonesia - Berdiri sendiri: bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar - Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi - Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. - Tidak mempunyai hutang jangka panjang dengan bank atau pihak ketiga - Belum pernah menjadi mitra binaan dari BUMN lain <p><u>Cara menjaring mitra binaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitra binaan mengajukan surat permohonan atau proposal yang isinya: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan menjadi Mitra Binaan - Laporan Laba (Rugi) usaha 1 bulan terakhir - Rencana Pengembangan Usaha - Data perusahaan berisi: nama, pimpinan usaha, alamat usaha, alamat, rumah, nomor telepon, jenis usaha, izin usaha, pendidikan, aset, jumlah tenaga kerja dan upah, keuntungan, daerah pemasaran, data keluarga

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat persetujuan suami/istri - Surat pernyataan kepemilikan jaminan (kriteria pemberian jaminan adalah mutlak, kecuali untuk calon mitra binaan yang berafiliasi dengan PT Pupuk Kaltim dan/atau yang sudah dikenal oleh PT Pupuk Kaltim. Ini dilakukan dengan sangat selektif. Penambahan kriteria ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap program terdahulu berupa program pinjaman < Rp. 1 juta tanpa jaminan yang ternyata gagal karena dana tidak dikembalikan). - denah lokasi tempat usaha - foto kopi: KTP, Kartu Keluarga, izin usaha, jaminan - foto tempat usaha dan jaminan <p>- Evaluasi lapangan dan wawancara langsung.</p> <p>- Evaluasi kelayakan usaha dengan membuat proyeksi cash flow, laba (rugi), neraca.</p> <p>Untuk Program Bina Lingkungan usulan program bisa diajukan dari 2 arah: (1) dari PKBL sendiri yang berasal dari hasil survei serta evaluasi di lapangan dan (2) usulan dari masyarakat yang membutuhkan dengan cara mengajukan proposal.</p> <p>Sejalan dengan meningkatnya jumlah mitra binaan maka seleksi dilakukan dengan lebih selektif dan yang terpilih hanya mitra yang mempunyai prospek yang baik. Hal yang sama juga dilakukan oleh instansi/BUMN lain. Dengan demikian semua harus berbagi pangsa.</p>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aset per Agustus 2003: Rp 51.069.843.836,- - Jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan Agustus 2003: Rp 165.866.902.000,- dengan perincian : <ul style="list-style-type: none"> - pinjaman permodalan sebesar Rp 121.267.623.000,- terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - pinjaman usaha kecil Rp 107.423.846.000,- - pinjaman koperasi Rp 13.843.777.000,- - hibah sebesar Rp 17.117.722.000,- - Bina Lingkungan sebesar Rp 4.508.602.000,- Sumber dana: PKBL. Sifat: hibah, namun ditujukan hanya untuk masyarakat umum di sekitar PT Pupuk Kaltim di Bontang. - subsidi bunga dan tunggakan sebesar Rp 18.569.874.000,-. Sumber dana: PKBL. Sifat: hibah. Disebutkan sumber dananya adalah PKBL karena merupakan hasil olahan dari dana deposito PT Pupuk Kaltim di bank untuk menjamin pinjaman-pinjaman mitra binaan di bank. Bunga yang diperoleh dari deposito ini 10%/ tahun. <u>Subsidi bunga</u>: PKBL menanggung beban bunga mitra binaan karena pinjaman mitra binaan dikenakan bunga 12%/ tahun oleh bank dan yang dibayar oleh mitra binaan hanya 8%; sisanya sebanyak 4% dibayar oleh PKBL sebagai subsidi bunga. Dengan demikian PKBL masih memperoleh laba berupa selisih bunga 6% sebagai pendapatan PKBL. <u>Tunggakan</u>: terjadi karena adanya perbedaan kriteria antara bank dan PKBL di mana menurut bank, bila mitra binaan tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka statusnya dianggap tunggakan; sementara kriteria PKBL adalah 6 (enam) bulan. Bila terjadi tunggakan yang dilakukan oleh mitra binaan PKBL maka bank akan memotong dana deposito yang dijamin dan bank mempunyai kewajiban untuk menagihkan tunggakan tersebut kepada mitra binaan. - Biaya operasional Rp 4.403.081.000,-. Sumber: dana pembinaan PKBL (dalam Kepmen BUMN ditetapkan besarnya antara 70-80% dari pendapatan bunga atas deposito, rekening koran, dll). Sifat: hibah. - Sumber dana: <ul style="list-style-type: none"> - Program Kemitraan: alokasi laba PT Pupuk Kaltim Tbk sebesar 1% – 3% dari total laba setelah pajak - Program Bina Lingkungan: alokasi laba PT Pupuk Kaltim Tbk sebesar 1% dari total laba setelah pajak

No.	Item	Penjelasan												
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1989 - sekarang												
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Permodalan <ul style="list-style-type: none"> - Setelah dinilai layak dilakukan akad kredit antara mitra binaan dengan PKT baik langsung maupun melalui bank yang ditunjuk sebagai penyalur. Mitra tidak dikenakan biaya administrasi. - Suku bunga pinjaman adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Langsung: 5% rata (<i>flat</i>) - Pinjaman Tidak Langsung: 9% menurun - Pinjaman Khusus: 12% menurun - Jangka waktu pinjaman dibagi menjadi: <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Investasi: 3 tahun - Pinjaman Modal Kerja: 2 tahun - Pinjaman Khusus: maksimal 1 tahun - Pembinaan diberikan sebanyak 3 kali pinjaman permodalan - Pemberian pinjaman permodalan maksimal 75% dari kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh mitra - Hibah <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan, Pendidikan, Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> - Mitra binaan yang memenuhi ketentuan direkrut untuk disertakan dalam pelatihan. Setelah melakukan pendidikan/pelatihan akan dievaluasi untuk direkomendasikan pada pelatihan tingkat lanjutan. - Mitra tidak dikenakan biaya administrasi, tetapi diberikan uang transpor - Pelatihan dapat dilaksanakan oleh Biro PKBL atau pengajuan dari mitra binaan - Bantuan fisik baik sarana maupun prasarana. Misalnya: alat pertanian, jembatan antarkeramba. <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan ini diperuntukkan bagi mitra binaan - Setelah dilakukan survey lapangan dan perhitungan keuangan dilaksanakan penunjukkan pelaksana proyek (yang diutamakan pengusaha yang telah menjadi mitra) dari beberapa pengusaha yang telah mengajukan penawaran - Penyerahan hasil proyek dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima - Pameran <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan penjualan produk, mitra binaan diikutsertakan dalam pameran baik pameran lokal, nasional maupun internasional - Mitra yang diikutsertakan adalah mitra binaan yang mempunyai produk – produk unggulan dan mempunyai prospek yang bagus. - Seluruh biaya yang timbul menjadi beban PKBL-PKT. - Bina Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Bina Lingkungan diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar perusahaan - Masyarakat dapat mengajukan permohonan permintaan bantuan atau berdasarkan survei yang dinilai layak untuk dibantu - Pemberian bantuan ditekankan pada prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. 												
	Pencapaian hasil	<p>Jumlah mitra binaan dan saldo pinjaman sampai per Agustus 2003:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;"><u>Jumlah mitra binaan</u></th> <th style="width: 50%; text-align: center;"><u>Saldo pinjaman</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Koperasi</td> <td style="text-align: center;">197 mitra</td> <td style="text-align: center;">Rp. 541,5 juta</td> </tr> <tr> <td>- Perorangan</td> <td style="text-align: center;"><u>15.675 mitra</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Rp. 42.541 miliar</u></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">15.872 mitra</td> <td style="text-align: center;">Rp. 43,083 miliar</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Jumlah mitra binaan</u>	<u>Saldo pinjaman</u>	- Koperasi	197 mitra	Rp. 541,5 juta	- Perorangan	<u>15.675 mitra</u>	<u>Rp. 42.541 miliar</u>	Jumlah	15.872 mitra	Rp. 43,083 miliar
	<u>Jumlah mitra binaan</u>	<u>Saldo pinjaman</u>												
- Koperasi	197 mitra	Rp. 541,5 juta												
- Perorangan	<u>15.675 mitra</u>	<u>Rp. 42.541 miliar</u>												
Jumlah	15.872 mitra	Rp. 43,083 miliar												

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan semakin banyaknya sumber dana dan program pembinaan yang ada untuk setiap daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain di samping dana yang berasal dari pembagian laba BUMN, maka di dalam pelaksanaan pembinaan dapat terjadi tumpang tindih/duplikasi dengan instansi lain, di mana seorang mitra binaan mendapatkan pinjaman dana dari lebih dari 1 instansi/BUMN. Hal ini dapat dideteksi dari beberapa cara: (a) PT Pupuk Kaltim Tbk merupakan koordinator pembinaan PUKK se Kalimantan Timur sehingga dapat melakukan tukar-menukar informasi dalam rapat koordinasi antarBUMN dan koordinasi dengan Disperindagkop serta Pemda setempat; (b) Laporan dari bank; (c) Jika terjadi tunggakan (biasanya hal ini terjadi karena mitra binaan tidak mampu membayar angsuran ke > 1 sumber dana) maka akan ditelusuri penyebab terjadinya tunggakan. Untuk mengatasinya dilakukan tindakan pencegahan yang maksimal antara lain dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan penyuluhan kepada mitra binaan. Dalam hal terjadi duplikasi yang baru terdeteksi setelah mitra binaan melakukan akad kredit maka diadakan koordinasi dengan instansi terkait dan kepada mitra binaan diminta untuk memilih satu sumber dana. Kasus duplikasi ini terjadi pada 5% dari jumlah mitra binaan. - Nilai tunggakan yang cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini diatasi dengan mengasuransikan pinjaman tersebut sehingga bila terjadi tunggakan maka PKBL dapat mengajukan klaim sebanyak 75% dari total tunggakan. Cara lain adalah dengan melakukan penagihan melalui aparat pemda setempat atau dengan sedikit ancaman akan dilaporkan ke polisi atau ancaman bahwa jaminannya akan dilelang (PKBL mempunyai kuasa jual atas jaminan), namun ancaman ini jarang direalisasikan. Kerugian terbesar terjadi setelah adanya kerusuhan etnis di Kalimantan sehingga pengusaha pendatang yang terusir ke Madura tidak bisa kembali, roda perekonomian terganggu dan kegiatan usaha lumpuh. Sampai saat ini permintaan penghapusan hutang (<i>write-off</i>) untuk tunggakan ini belum bisa dipenuhi. - Biaya penagihan dan evaluasi keberhasilan serta pembinaan sangat tinggi mengingat lokasi binaan yang tersebar dan minimnya sarana prasarana transportasi.
	Status saat ini	<ul style="list-style-type: none"> - Poin 1 (pinjaman permodalan) masih berjalan. - Dilakukan penanganan tunggakan lebih intensif dan mencegah peningkatan tunggakan dengan mengasuransikan pinjaman mitra binaan - Diprioritaskan pada daerah–daerah yang dapat diakses oleh instansi terkait dan pengaturan jadwal penyaluran, penagihan, monitor dan pelaksanaan hibah untuk menekan biaya operasional.
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Komoditi mitra binaan berorientasi ekspor, seperti hasil kerajinan daerah, produk makanan khas daerah Kalimantan, hasil laut, dll. - Terdapat produk–produk baru yang mempunyai prospek cukup bagus untuk dikembangkan, seperti pengolahan tanaman lidah buaya, pembuatan kerajinan–kerajinan kulit pisang dan tanaman lain. - Terbentuknya sentra–sentra kerajinan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan komoditi ekspor Indonesia. - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan timbulnya jiwa <i>entrepreneurship</i> (kewiraswastaan) di kalangan masyarakat, sehingga dapat membuka peluang kerja yang lebih besar.

No.	Item	Penjelasan
9. PT. Sucofindo		
9.1	Nama upaya	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
	Deskripsi upaya	Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 yang isinya lebih rinci dan lebih memperhatikan kesulitan BUMN dalam menangani usaha kecil dan koperasi dibanding dengan SK Menkeu No. 316/KMK.016/1994 yang isinya lebih bersifat umum.
	Penanggung jawab	PT Sucofindo (Persero)
	Pelaksana	Unit PUKK PT Sucofindo
	Instansi terkait	Kementerian BUMN, Departemen Keuangan
	Tujuan Upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkecil jurang pemisah antara usaha kecil dan usaha besar - Berperan sebagai pengganti bank bagi usaha kecil dan koperasi yang umumnya tidak mempunyai akses dengan perbankan - Memberikan konsultasi manajemen melalui pelatihan - Membuka akses pasar melalui pameran, promosi, dan billboard - Memperkenalkan standar mutu bagi UKM atau sertifikasi UKM
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman dana untuk modal kerja dan investasi - Pemberian bantuan konsultasi manajemen yang kegiatannya berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pendampingan - Bantuan pemasaran dan promosi
	Wilayah pelaksanaan	NAD, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> semua usaha kecil, koperasi dan/atau perorangan (pengrajin, industri rumah tangga, perdagangan)</p> <p><u>Kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Milik WNI (dengan melampirkan KTP) - Omzet maksimal Rp. 1 miliar - Mempunyai asset maksimal Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) - Telah melakukan usaha ini selama minimal 2 tahun - Belum pernah dan/atau tidak sedang dibina oleh BUMN lain - Mempunyai surat ijin usaha dari Pemda setempat (atau sekurang-kurangnya surat rekomendasi dari RT/RW setempat) <p><u>Cara menjangkau mitra binaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon mitra binaan mengajukan surat permohonan atau proposal yang berisi: data perusahaan (nama, alamat, nomor telepon, izin usaha – jika ada - jumlah tenaga kerja, jenis dan sumber bahan baku, daerah pemasaran produk, laporan laba/rugi, neraca dan <i>cash flow</i>) dan estimasi kondisi usaha setelah mendapat bantuan pinjaman. - Seleksi dilakukan dengan memperhatikan, misalnya, prinsip “5C” kecuali point aguna (<i>collateral</i>) dan survei ke lokasi usaha. <p>Bantuan untuk konsultasi manajemen berupa pelatihan, pendampingan dan promosi usaha bisa dipenuhi dengan 2 cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh SUCOFINDO yang melihat, misalnya, ditemukan sebagian besar pengusaha kurang mampu mempertahankan kualitas produknya sehingga pemasarannya menurun. Dalam keadaan demikian SUCOFINDO dapat mengusulkan diadakannya pelatihan mengenai cara mempertahankan kualitas produk. - Berdasarkan permintaan pengusaha, misalnya karena lokasi usaha sekelompok pengusaha yang terpencil dan sulit dijangkau akses pasar maka kelompok pengusaha ini bisa mengajukan permohonan bantuan untuk mempromosikan produknya.

No.	Item	Penjelasan										
	Pendanaan	Dana yang tersedia ditentukan untuk: - Investasi Rp. 25 juta - Modal kerja Rp. 60 juta - Konsultasi manajemen Rp. 15 juta Sampai dengan triwulan I tahun 2003: - Pemberian pinjaman: nilai Rp 95,68 miliar; sumber dana: 1-3% dari laba perusahaan setelah pajak; sifat dana: pinjaman dengan bunga 6% anuitet. - Pemberian konsultasi manajemen berupa pelatihan, pendampingan dan promosi Rp. 18,91 miliar. Sumber dana: 1% dari laba perusahaan setelah pajak; sifat dana: hibah.										
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1991 - sekarang										
	Mekanisme pelaksanaan	Mitra binaan yang memenuhi kriteria kemudian dievaluasi di atas kertas dan dilakukan survei ke lokasinya. Jika terpilih selanjutnya diikat dengan kontrak yang disebut Memorandum of Agreement (MoA) tanpa biaya administrasi. Lama pembinaan untuk tiap usaha 3 tahun (khusus sektor pertanian ditentukan per musim tanam) yang dapat diperpanjang sampai 5 tahun (dalam Kepmen BUMN hal ini tidak ditentukan sehingga pembinaan bisa dilakukan sampai dengan mitra binaan dapat mandiri).										
	Pencapaian hasil	Realisasi program kemitraan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2003 adalah sebesar Rp. 114,59 miliar untuk 3.473 unit yang terdiri dari: <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Jumlah mitra binaan</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Saldo pinjaman</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Penyaluran dana pinjaman</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- usaha kecil 3122 unit</td> <td>Rp. 81,36 miliar</td> </tr> <tr> <td>- koperasi 351 unit</td> <td>Rp. 14,32 miliar</td> </tr> <tr> <td>2. Penyaluran dana konsultasi manajemen</td> <td>Rp. 18,91 miliar</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Jumlah mitra binaan</u>	<u>Saldo pinjaman</u>	1. Penyaluran dana pinjaman		- usaha kecil 3122 unit	Rp. 81,36 miliar	- koperasi 351 unit	Rp. 14,32 miliar	2. Penyaluran dana konsultasi manajemen	Rp. 18,91 miliar
<u>Jumlah mitra binaan</u>	<u>Saldo pinjaman</u>											
1. Penyaluran dana pinjaman												
- usaha kecil 3122 unit	Rp. 81,36 miliar											
- koperasi 351 unit	Rp. 14,32 miliar											
2. Penyaluran dana konsultasi manajemen	Rp. 18,91 miliar											
	Masalah	Sisi internal: Tingginya biaya operasional dan banyaknya waktu yang tersita untuk monitoring dan survei lapangan akibat makin bertambahnya mitra binaan seringkali menghambat pekerjaan utama Sucofindo Hal ini dapat terpecahkan dengan adanya kerjasama dengan BUMN-BUMN lain melalui penunjukkan koordinator di tiap daerah/wilayah. Sisi UKM: - Berkaitan dengan karakter pengusaha antara lain ketidakdisiplinan dalam menggunakan dana pinjaman. - Petugas pajak sering menarik pajak untuk papan nama usaha mitra binaan (papan nama ini dibuat untuk menghindari duplikasi program dan pendanaan dengan BUMN lain).										
	Status saat ini	Masih berjalan										
	Potensi	Meningkatnya kualitas produk telah memberikan indikasi kuat akan potensi positif dari program ini. Hal ini juga tergambar melalui keberhasilan program untuk mengangkat pengusaha kecil menjadi pengusaha besar.										
10. PT Unilever Indonesia												
10.1	Nama upaya	Pembangunan SME Berkelanjutan (<i>Sustainable SME Development</i>)										
	Deskripsi upaya	Upaya yang dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk (ULI) untuk bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan sistem saling menguntungkan (<i>mutual benefit</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>). Latar belakang upaya adalah agar ULI tetap memusatkan perhatian pada bisnis intinya yaitu produksi dan pemasaran barang-barang konsumsi. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung seperti suplai, distribusi maupun proses produksi yang sederhana, diserahkan kepada pihak ketiga sebagai mitra yang sebagian besar merupakan UKM.										

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	PT Unilever Indonesia Tbk
	Pelaksana	PT Unilever Indonesia Tbk
	Instansi terkait	Lembaga pendidikan/pelatihan seperti LPPM
	Tujuan upaya	Melibatkan UKM dalam setiap aktivitas bisnis Unilever agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menumbuhkan jiwa wiraswasta (<i>entrepreneurs</i>) dengan prinsip “ Kita Tumbuh Bersama”
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kesempatan dan dorongan berusaha (<i>encouragement</i>). - Pelatihan pada UKM yang baru berdiri untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik usaha (<i>skills</i>). - Pinjaman modal kerja dan investasi serta bantuan akses pada lembaga keuangan lain (<i>access to finance</i>). - Pemberian bantuan akses pasar melalui pengenalan kondisi pasardan sistem bisnis (<i>connection to market</i>)
	Wilayah pelaksanaan	Secara umum sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Pada saat ini sedang dilakukan pengembangan program di Jawa Timur (Kab.Trenggalek, Kab. Blitar & Kab. Nganjuk); Yogyakarta (Kab. Sleman & Kab. Bantul); Jawa Barat (Kab.Subang).
	Sasaran	Semua UKM yang mempunyai kaitan bisnis dengan PT. Unilever tanpa membedakan jenis kelamin. Pemilihan UKM didasarkan pada arah pengembangan bisnis PT Unilever. Kriteria UKM secara spesifik tidak ada kecuali beberapa hal pokok, yaitu kemauan kuat untuk berusaha, memiliki modal (seperti pengetahuan bisnis, jejaring, lokasi, aset), dan usahanya mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkelanjutan.
	Pendanaan	Sumber: bagian laba PT.Unilever. Sifat: pinjaman dengan jasa pinjaman yang relatif rendah.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1980 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan perkembangan bisnis PT.Unilever dengan mengacu pada prinsip tumbuh bersama. Apabila PT.Unilever mengembangkan bisnis di suatu daerah maka PT.Unilever akan bekerja sama dengan usahawan lokal yang berada di daerah tersebut.</p> <p><u>Kegiatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dorongan</i>: memberi kesempatan, - <i>Keahlian</i> : memberi pelatihan, - <i>Koneksi ke Pasar</i> : membantu mengenali pasar, dilakukan dengan memberi pelatihan secara reguler kepada supervisor lapangan yang selanjutnya akan disampaikan kepada para UKM. Nama produk Unilever yang sudah dikenal luas juga menjadi akses untuk pengembangan usaha dan koneksi pasar. - <i>Akses pada keuangan/pembiayaan</i>, dilakukan dengan memberi pinjaman modal kerja dan investasi melalui Yayasan Uli Peduli (sebuah yayasan yang dibentuk PT.Unilever Indonesia pada tahun 2000 untuk kegiatan pengembangan UKM). <p>Prosedur peminjaman, baik jasa, besar pinjaman maupun lamanya, bervariasi tergantung pada pertimbangan Yayasan (PT.Unilever) dan kesepakatan dengan UKM. Dari pinjaman yang sudah terrealisasi, jasa pinjaman bervariasi antara 0% hingga 5%, sedangkan besarnya pinjaman antara beberapa hingga ratusan juta rupiah. Disamping memberikan pinjaman, PT.Unilever juga menyediakan akses bagi UKM terhadap sumber dana lain, seperti perbankan, dengan cara menyediakan rekomendasi</p>
	Pencapaian hasil	UKM yang terlibat dalam kegiatan kemitraan ini berjumlah sekitar 2.131, yang terdiri dari 1.882 distributor, 239 pemasok, 4 logistik, dan 6 unit produksi. Karena pelaksanaan upaya ini, pada tahun 1988 PT.Unilever memperoleh penghargaan Upakarti.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Lemahnya kemauan mitra dalam mengembangkan bisnis.
	Status saat ini	Masih berjalan dan akan terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya perusahaan.
	Potensi	Semakin banyak usaha kecil dan menengah yang terlibat dan tumbuh bersama dengan Unilever.

Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003 Kelompok Perbankan

No.	Item	Penjelasan
1. Bank Indonesia (BI)		
1.1	Nama upaya	Kredit Program
	Deskripsi upaya	Kredit Program adalah kredit khusus yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah dan koperasi. Kredit ini meliputi 17 jenis kredit program yang dilaksanakan oleh bank umum dan koperasi, antara lain KUT, KKPA, Kkop, KPRS, KPRSS dan lain-lain.
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	Bank Umum dan Koperasi
	Instansi terkait	Depkeu dan Bappenas
	Tujuan upaya	Menyediakan akses kredit bagi golongan ekonomi lemah dan koperasi untuk mendorong kegiatan usahanya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan staf perbankan/counterpart; - Penelitian - Informasi
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Golongan ekonomi lemah dan koperasi
	Pendanaan	Dana berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Sifat dana adalah dana program yang bersubsidi.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1978-1999
	Mekanisme pelaksanaan	Pemerintah menunjuk bank umum yang menjadi pelaksana
	Pencapaian hasil	Posisi pada saat Kredit Program ini dihentikan mencapai Rp 22,96, yang pengelolaannya selanjutnya diserahkan kepada BRI mencapai Rp 9,5 triliun, BTN Rp 3,06 triliun dan PNM Rp 10,4 triliun.
	Masalah	Karena merupakan Kredit Program yang dananya berasal dari pemerintah, sebagian nasabah menganggap bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan Terdapat tunggakan lainnya yang disebabkan oleh kegagalan panen dan hasil ternak, dsb.
	Status saat ini	Sejak keluarnya UU BI No. 23 Tahun 1999, BI tidak lagi menyediakan KLBI. Dana KLBI yang telah disalurkan atau masih diberi kelonggaran tarik pengelolaannya diserahkan kepada BRI untuk KUT, KKPA dan Kkop, BTN untuk KPRS dan KPRSS, serta PNM untuk kredit program sisanya, sampai dana tersebut dalam periode 5 tahun ditarik kembali ke BI. Setelah 1999 kredit program dihentikan agar tidak ada lagi kredit bersubsidi dan yang ada hanya kredit komersial biasa.
	Potensi	
1.2	Nama upaya	PHBK (Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat)
	Deskripsi upaya	PHBK merupakan program BI yang dilakukan dalam upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuangan bagi pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkan antara tiga unsur yang berbeda, yaitu bank umum, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). <u>Prinsip PHBK:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pendekatan kelompok - Menyeleksi partisipan PHBK - Menghargai otonomi lembaga partisipan - Mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungan dengan kredit - Mengenakan tingkat bunga pasar - Mengembangkan dana menerima agunan alternatif - Menyediakan bantuan teknis.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	Bank umum, BPR dan LPSM
	Instansi terkait	Bappenas, dan Pemerintah Jerman melalui GTZ
	Tujuan upaya	Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan keuangan mikro yang mudah diakses oleh pengusaha golongan ekonomi lemah.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas jangkauan pelayanan bank kepada pengusaha mikro melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dan Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) dan KSM. - Meningkatkan efisiensi proses hubungan dengan KSM melalui pelatihan dan pembinaan. - Pengikatan kerjasama dengan bank-bank umum melalui penandatanganan MoU. - Meningkatkan kerjasama dengan BPR melalui pelatihan untuk petugas BPR. - Mendorong fungsi LPSM pada pembinaan dan pelatihan, dan tidak sebagai perantara keuangan. - Membentuk forum LPSM partisipan PHBK yang disebut ALTRABAKU (Asosiasi LPSM Mitra Bank Umum). - Meningkatkan kerjasama dengan program lain, seperti penyaluran dana bergulir, bekerja sama dengan 15 BPD dan Bank Bukopin, melalui program pelatihan. - Membentuk satuan tugas yang dikenal dengan nama National Task Force (NTF) yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah (Bappenas, BI), perbankan (BRI, Bukopin) dan LPSM (YBS, BK3I dan LP3ES). - Melakukan pengkajian terhadap Pokmas di 11 propinsi, bekerjasama dengan Pusat P3R-YAE.
	Wilayah pelaksanaan	Di 14 Propinsi, yaitu DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumbar, Lampung, Bali, Sulsel, Sulut, Kalbar, NTB, NTT dan Irian Jaya.
	Sasaran	<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengusaha Mikro -Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) -Kelompok Simpan Pinjam, dan -Kelompok Pengusaha Mikro (KPM). <p><u>Cara menjaring:</u> Bank dapat langsung menjaring KSM, atau melalui LPSM dan BPR.</p>
	Pendanaan	Bantuan dari Pemerintah Jerman melalui GTZ untuk bantuan teknis dan pembinaan. Dana untuk pembinaan dan bantuan teknis bersifat hibah (<i>grant</i>), sedang untuk kredit merupakan dana komersial dari Bank Pelaksana.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1989 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<p>PHBK menerapkan tiga model pelayanan:</p> <p><u>Model I:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank langsung memberikan kredit kepada KSM - LPSM memberikan pembinaan kepada KSM - Resiko kredit berada pada bank pemberi kredit. - Mekanisme model ini adalah sbb: <ul style="list-style-type: none"> - ajuan kredit dilakukan oleh KSM melalui LPSM - LPSM meneruskan kepada bank; - Bank dan LPSM melakukan evaluasi kelayakan kredit KSM - Pencairan kredit di kantor bank oleh KSM - lama proses 5-10 hari

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<p><u>Model II:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank memberikan kredit melalui LPSM. - LPSM memberikan pembinaan kepada KSM. - Resiko kredit pada LPSM. - Mekanisme model ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - ajuan kredit ditujukan kepada LPSM; - LPSM melakukan evaluasi kelayakan kredit dari KSM; - LPSM mengajukan kredit tersebut ke bank; - bank bersama LPSM melakukan klarifikasi ke KSM; - pencairan kredit di kantor bank oleh LPSM; - pencairan ke KSM dilakukan di kantor LPSM atau KSM; - lama proses 5-10 hari. <p><u>Model III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank mengidentifikasi sendiri dan memberikan kredit langsung ke KSM, dan sekaligus membina kelompok-kelompok tersebut, tanpa keterlibatan LPSM. - Resiko kredit berada pada bank pemberi kredit. - Mekanisme model ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Ajuan kredit dilakukan oleh KSM ke bank pelaksana. - Akad kredit dilakukan antara bank dengan ketua atau pengurus kelompok yang memperoleh kuasa dari para anggotanya; - lama proses 3-5 hari.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan September 2001 PHBK telah melibatkan sekitar 360 bank umum dengan 831 BPR, 257 LPSM dan 34.227 KSM. - Dana kumulatif yang disalurkan mencapai Rp 330,568 dengan saldo kredit sebesar Rp 68,15 miliar dari 11.245 nasabah. - Tingkat pengembalian kredit mencapai 97,3% - Tabungan KSM mencapai Rp29,5 miliar dari 10.066 rekening.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan dan bank yang tutup. - Setelah krisis moneter, program PHBK menurun, karena banyak bank tidak mampu lagi menyalurkan kredit.
	Status saat ini	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah tahun 1999 bantuan teknis BI hanya dilakukan melalui PUKM (Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro. - PHBK masih berjalan tetapi tanpa pembinaan dan bantuan teknis dari BI.
	Potensi	
1.3	Nama upaya	PPUK (Program Pengembangan Usaha Kecil)
	Deskripsi upaya	<p>PPUK adalah program kemitraan antara usaha kecil dan usaha besar dengan melibatkan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keterikatan usaha; - saling menguntungkan; - ada unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil; - ada komitmen dan rasa kebersamaan; - hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan. <p>Bentuk kemitraan dapat berupa (a) inti plasma, (b) subkontrak, (c) hubungan dagang, (d) pemasokan, (e) waralaba, (f) keagenan, dan (g) bentuk-bentuk lainnya.</p>
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	Bank umum
	Instansi terkait	Bappenas

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	- <i>Jangka pendek</i> : meningkatkan kemampuan staff perkreditan perbankan agar mampu mempersiapkan program perkreditan yang sehat untuk menunjang pengembangan usaha kecil, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pemberian kredit kecil oleh perbankan. - <i>Jangka panjang</i> : mengubah cara pendekatan <i>commercial banking</i> menjadi <i>development banking</i> . Pemberian kredit tidak semata-mata didasarkan tersedianya agunan yang mencukupi, tetapi lebih kepada layakan usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan staf perbankan/<i>counterpart</i>. - Survei dalam rangka mengidentifikasi peluang usaha dalam sub sektor usaha tertentu (SPID). - Membentuk Tim Proyek Pengembangan Pengusaha Kecil (P3K), yang anggotanya dari unsur bank-bank pelaksana dan BI (1979). - Memperluas jaringan kepada Unit Pengembangan Usaha Kecil (UPUK) seperti koperasi, KSM, KSP dan LPSM. - Melakukan pendekatan <i>runway cases</i>, atau Proyek Kemitraan Usaha Kecil Terpadu (PKUKT) antara usaha besar dan usaha kecil, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas anggota koperasi dalam memperoleh KKPA. - Melakukan <i>Counterpart Training</i> kepada pejabat pemberi kredit dibawah bimbingan konsultan PPUK, yang kemudian disempurnakan menjadi Kursus Pejabat Pemberi Kredit Kecil (KPPKUK). - Membuat pola pinjaman untuk PKUKT, yang merupakan pola pinjaman jangka panjang untuk komoditas/sub sektor tertentu untuk usaha inti-plasma. - Memfokuskan pada identifikasi dan pembinaan Program Kemitraan Terpadu (PKT), terutama dalam pola pinjaman dan pembuatan Laporan Penilaian dan Permohonan Kredit (LP2K).
	Wilayah pelaksanaan	Kalsel, Sulsel, Bali, NTB, Jabar, Sumut, DIY, Sumsel, Sulut, dan wilayah Jabotabek. Sejak 1 April 1997 PPUK hanya memiliki 7 koordinator yaitu untuk daerah Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Padang, Ujung Pandang dan Banjarmasin.
	Sasaran	Usaha kecil dan usaha besar yang memiliki hubungan kemitraan, serta bank sebagai pemberi kredit.
	Pendanaan	Bantuan dari Bank Dunia dan Masyarakat Ekonomi Eropa melalui lembaga donor, dalam bentuk bantuan teknis dan komponen dana bagi pemberian KIK/KMKP Dana ditujukan untuk bantuan teknis dan merupakan <i>grant</i> , sedangkan komponen dana untuk KIK/KMKP merupakan pinjaman lunak.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1978-1999
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Usaha Kecil</u>:</p> <p>(a) memenuhi persyaratan dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, (b) bersedia bekerjasama dengan usaha besar yang menjadi mitra, (c) memiliki watak yang baik dan jiwa wirausaha yang mandiri</p> <p><u>Usaha besar</u>:</p> <p>(a) perusahaan sudah berjalan baik dan memiliki pasar yang teratur, (b) mampu melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi mitra usaha</p> <p><u>Bank</u>:</p> <p>(a) mempunyai kepedulian terhadap pembinaan usaha kecil, (b) bersedia memberi kredit kepada usaha kecil dalam PKT, baik langsung maupun melalui usaha besar yang menjadi mitra.</p>
	Pencapaian hasil	Hingga Juni 1997 PPUK telah mengidentifikasi 4.612 proyek, dan sekitar 1.810 telah diimplementasikan oleh bank dengan nilai kredit Rp1.506,4 miliar, melibatkan 280.160 pengusaha kecil. Pejabat bank yang dilatih 2.440 orang dan 9.887 staf UPUK.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	- <u>Bank</u> : kesulitan dalam penyaluran KUK karena sulit memperoleh usaha kecil yang layak, biaya transaksi tinggi, dan terbatasnya jaringan kantor cabang bank. - <u>Calon nasabah</u> : sulit membuat kelayakan usaha karena keterbatasan aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, jaminan, dan perizinan.
	Status saat ini	Setelah tahun 1999, PPUK dirubah menjadi PUKM.
	Potensi	Setelah 1999, PPUK dirubah menjadi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM) dan hanya difokuskan ke sektor perbankan. Peran BI sekarang hanya terbatas pada kebijakan kredit perbankan, pengembangan kelembagaan, dan pemberian bantuan teknis.
1.4	Nama upaya	PKM (Proyek Kredit Mikro)
	Deskripsi upaya	Proyek Kredit Mikro adalah proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. <i>Usaha mikro</i> adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, menggunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, dan lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan. Sedang <i>kelompok pengusaha mikro</i> adalah mereka yang masing-masing atau secara bersama-sama memiliki usaha mikro dengan jumlah anggota antara 8 sampai dengan 10 orang.
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	- Pelaksana di kantor pusat adalah Unit Pelaksana Proyek (UPP) di BI. - Pelaksana di daerah adalah kantor Bank Indonesia di 15 propinsi. - BPR adalah pelaksana penyaluran kredit kepada usaha mikro, sedangkan BPD melakukan penguatan LPSM oleh BPD melalui LDKP binaannya. - Pendampingan terhadap calon nasabah dilakukan oleh LPSM.
	Instansi terkait	BPD, BPR dan LDKP
	Tujuan upaya	- Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan peranan perempuan dalam aktivitas pembangunan serta penanggulangan kemiskinan. - Mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok.
	Jenis kegiatan	- Bantuan teknis berupa pelatihan, pendampingan, konsultasi dan penyediaan materi pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga peserta dan pengusaha mikro - Bantuan keuangan berupa: - pemberian kredit kepada pengusaha mikro untuk pengembangan usahanya - pemberian kredit kepada LDKP, LPSM dan BPR untuk pembelian komputer dan sepeda motor guna meningkatkan kemampuan administrasi dan jangkauan pelayanan mereka. - Ada tiga jenis kredit dalam proyek ini: - Kredit dari BI kepada BPR untuk usaha mikro dengan jangka waktu 18 bulan. - Kredit dari BI kepada BPR, dengan jangka waktu 5 tahun. - Kredit dari BPD kepada LPSM dengan jangka waktu 5 tahun. - Plafon kredit untuk usaha mikro pertama kali diberikan sebesar Rp 2 juta per nasabah, dan nasabah ulangan sampai Rp 5 juta.
	Wilayah pelaksanaan	Di 15 propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, DI Aceh, DIY, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Lampung.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Kelompok sasaran adalah rakyat miskin dan mendekati miskin di pedesaan, khususnya tuna wisma, penganggur, buruh tani dan kaum perempuan, yang akan dibina agar dapat menjalankan usaha mikro. Kaum perempuan dijadikan kelompok sasaran karena mereka masih mengalami dalam lingkungan kerja.</p> <p><u>Target sasaran adalah</u> pemberian kredit kepada 300.000 nasabah mikro akan, terdiri dari 70% nasabah perorangan dan 30% nasabah kelompok. Sepertiga nasabah adalah nasabah yang hidup di garis kemiskinan, dan selebihnya yang mendekati miskin. Diharapkan sepertiga dari jumlah tersebut adalah kaum perempuan.</p> <p><u>Kriteria untuk BPR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesehatan minimum cukup sehat selama 3 bulan terakhir. - CAR minimum 8%. - Kualitas aktiva produktif dan manajemen minimum cukup sehat. - Porsi debitor Rp 1 juta ke bawah minimum 5%. - Rasio dana masyarakat dengan jumlah kredit minimum 10%. - Mempunyai misi untuk ikut mengembangkan usaha mikro. <p><u>Kriteria untuk LPSM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar minimum 2 tahun. - Memiliki pengalaman minimum 2 tahun dalam kegiatan mobilisasi simpanan kelompok, dan penyaluran kredit mikro. - Memiliki kantor dan fasilitas yang memadai. - Menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk pengembangan usaha mikro.
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana proyek seluruhnya berjumlah USD 42,5 juta, yang berasal dari pinjaman lunak Asian Development Bank (ADB), hibah pemerintah Norwegia, dan dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar USD 30 juta merupakan kredit kepada pengusaha mikro. - Sejak keluarnya UU Perbankan No. 23 Tahun 1999, BI tidak lagi ikut mendanai proyek ini. Pendanaan selanjutnya berasal dari sisa pinjaman ADB serta sisa dana hibah dari pemerintah Norwegia.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1995 samapi dengan 2001.
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah individu atau kelompok mengajukan kredit ke bank pelaksana dengan membawa kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan. - Bank melakukan evaluasi permohonan kredit yang diajukan - Bank memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian kredit. - Penyaluran kredit kepada pengusaha mikro dilakukan melalui BPR, baik secara individual maupun kelompok. - Penguatan BPR dilakukan melalui bank penyediaan kredit disertai pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro - Penguatan LPSM dilakukan dengan penyediaan kredit dari BPR melalui LDKP, dan pemberian pelatihan agar LPSM dapat meningkatkan kemampuan dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin; menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai; dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan Juni 2003 jumlah lembaga peserta telah mencapai 1.140 lembaga, terdiri dari 6 BPD, 843 BPR, 226 LDKP dan 65 LPSM. - Jumlah nasabah perorangan mencapai 815.276 orang, terdiri dari 462.824 nasabah baru dan 352.452 nasabah ulangan. - Jumlah nasabah kelompok mencapai 147.068 kelompok, terdiri dari 105.112 nasabah baru dan 41.965 nasabah ulangan. - Jumlah nasabah perempuan sebanyak 460.965 orang dan laki-laki 501.379 orang. - Total kredit yang disalurkan mencapai Rp.649,25 miliar. - Jumlah peserta pelatihan PKM sebanyak 3.535 orang.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	Proyek berakhir dan dananya harus dikembalikan ke BI sampai masa jatuh tempo.
	Status saat ini	Proyek telah berakhir sejak 31 Desember 2001 dan BI tidak lagi memberikan kredit kepada lembaga peserta.
	Potensi	Potensi terhadap upaya peningkatan ekonomi kaum perempuan cukup besar. Sekitar separuh (49%) dari jumlah nasabah merupakan nasabah perempuan.
1.5	Nama upaya	Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SI-PUK)
	Deskripsi upaya	SI-PUK adalah kumpulan sistem informasi usaha kecil berbasis internet, yang disusun BI secara terpadu/terintegrasi antara satu sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, sehingga dapat menyajikan informasi yang mudah diakses oleh pengguna. SI-PUK terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB) - Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE) - Sistem Informasi Pola Pembiayaan/Lending Model Usaha Kecil (SI-LMUK) - Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI) - Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SI-PMK).
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	BI
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan akses perbankan melalui penyediaan informasi, antara lain yang berasal dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan BI bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian perguruan tinggi dan lainnya.
	Jenis kegiatan	Menyediakan jaringan informasi dan <i>database</i> berbasis internet, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB) - Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE) - Sistem Informasi Pola Pembiayaan/Lending Model Usaha Kecil (SI-LMUK) - Sistem Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) - Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SI-PMK).
	Wilayah pelaksanaan	Dapat diakses lewat internet di seluruh Indonesia
	Sasaran	Usaha kecil dan masyarakat umum yang ingin melakukan usaha mikro.
	Pendanaan	BI Dana program
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1999 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Siapa saja dapat mengakses lewat internet komputer.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang digunakan dalam penyusunan SI-PUK meliputi: BLS di 26 propinsi, 16 jenis komoditi dan 500 produk turunannya, pola pembiayaan untuk 47 jenis usaha, dan 47 jenis komoditi yang telah memiliki model kelayakan. - Sejak 14 Pebruari 2002 s/d 15 Agustus 2003, SI-PUK telah dikunjungi sekitar 45.482 pengunjung.
	Masalah	Banyak usaha kecil dan mikro yang tidak memiliki pengetahuan tentang komputer dan mampu mengakses informasi melalui internet.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
1.6	Nama upaya	Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM)
	Deskripsi upaya	PUKM adalah program bantuan teknis dari BI yang ditujukan bagi pengembangan usaha kecil dan mikro.
	Penanggung jawab	BI
	Pelaksana	BI

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Bank umum, BPR
	Tujuan upaya	Memberikan bantuan teknis kepada sektor perbankan dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan mikro.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan kepada perbankan - Penelitian - Penyediaan Sistem Informasi
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Sektor perbankan yang membutuhkan bantuan bagi upaya pengembangan usaha kecil dan mikro.
	Pendanaan	Dana diperoleh dari BI dan bank terkait, serta dana operasional bank.
	Waktu pelaksanaan	1999 – sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Bank yang membutuhkan dapat mengajukan ke kantor cabang BI setempat
	Pencapaian hasil	- Telah dilakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil. - Telah diberikan berbagai pelatihan kepada staf BPR dan bank umum.
	Masalah	Masalah keterbatasan alokasi dana.
	Status saat ini	Masih berjalan
2. Bukopin		
2.1	Nama upaya	Swamitra
	Deskripsi upaya	Swamitra adalah suatu konsep kemitraan antara bank dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen, sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku Melalui kerjasama kemitraan Swamitra ini, anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota Swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan penerapan teknologi modern.
	Penanggung jawab	Bukopin
	Pelaksana	Kantor Cabang Bukopin
	Instansi terkait	-Depkop/Dinas Koperasi -Meneg UKMK -Pemda (Pekanbaru)
	Tujuan upaya	- Dengan sistem manajemen Swamitra diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota kepada koperasi untuk menghimpun dana - Anggota Swamitra dapat melakukan transaksi keuangan secara <i>on-line</i> di seluruh kantor Swamitra se-Indonesia - Memberikan dukungan pada penyediaan informasi dan komunikasi bisnis agar produksi dan pemasaran dapat dilakukan dengan baik - Penyajian laporan keuangan beserta perubahannya dapat dilakukan secara cepat dan akurat - Sistem manajemen dan teknologi Swamitra dapat menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk menempatkan dana dengan tujuan membantu peningkatan usaha kecil dan mikro. Misi: - Menyediakan pelayanan transaksi keuangan - Dapat berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi bisnis - Memberi dukungan pada terlaksananya transaksi jual beli barang dan jasa.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Swamitra yang merupakan kerjasama dengan koperasi untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada usaha kecil dan mikro berupa: simpanan, simpanan berjangka, pinjaman harian, pinjaman berulang, pinjaman fleksible, pinjaman insidentil, dan program penjaminan - Memberikan bimbingan teknis dan sistem manajemen kepada Swamitra - Menyediakan modal investasi dan modal kerja bagi Swamitra yang dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil & mikro
	Wilayah pelaksanaan	237 gerai Swamitra di 19 provinsi, 71 kabupaten/kota
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Koperasi dan lembaga keuangan mikro –LKM (secara tidak langsung usaha mikro/kecil menjadi sasaran sebagai nasabah Swamitra)</p> <p><u>Cara menjanging:</u> Calon mengajukan diri untuk menjadi anggota Swamitra atau menawarkan kepada koperasi atau LKM yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Swamitra.</p> <p><u>Persyaratan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akta/anggaran dasar koperasi. - Untuk KSP/KSU yang telah memiliki USP, kegiatan simpan pinjam telah dikelola dengan tertib dan otonom. - Usaha simpan pinjam tersebut tidak dalam kondisi menanggung kerugian yang cukup material. - Susunan pengurus sah dan masih berlaku. - Foto kopi KTP para pengurus. - Tidak terjadi perselisihan kepengurusan. - Pengurus berkarakter baik. - Fotocopy NPWP dan izin usaha. - Administrasi dan laporan keuangan tertib. - Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik. - Memiliki sarana dan prasarana kerja yang memadai - Memiliki kemampuan modal sendiri dan modal kerja usaha dalam Swamitra.
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan berasal dari dana Bank Bukopin, koperasi/ LKM, simpanan anggota, serta dana dari pihak ketiga seperti PNM, Yayasan Danamandiri, dana pemda, dsb. - Sifat dana adalah dana komersial dan dana lunak, tergantung dari sumber dananya. - Untuk kredit program yang disalurkan lewat Swamitra besarnya bunga tergantung sumber dana.
	Waktu pelaksanaan	1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Swamitra - Memenuhi segala persyaratan yang ditentukan diatas - Analisis kelayakan - Analisis keuangan - Menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama. - Bersedia menaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan Juni 2003, telah didirikan 237 outlet Swamitra - Total asset Rp225,673 miliar - Total pinjaman mencapai Rp 193,15 miliar dan simpanan Rp 99,245 miliar. - Jumlah nasabah peminjam sebanyak 28.290 orang dan penyimpan 97.260 orang.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Modal dari pihak ketiga yang dapat disalurkan kepada Swamitra masih terbatas - Aspek pemantauan yang belum mampu menjangkau semua nasabah - Infstruktur yang tidak selalu tersedia di Swamitra, seperti sarana telepon.
	Status saat ini	Berjalan baik

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sangat baik karena jaringan Swamitra semakin berkembang. - Mulai menjalin kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan pemda (Pekanbaru) untuk penjaminan kredit dengan menggunakan pola Swamitra serta dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Pernah mendapat penghargaan dalam <i>Asian Banking Award 1999</i> untuk Kategori Produk Kredit Komersial atau Kredit Program (Swamitra).
2.2	Nama upaya	Kredit Sudara
	Deskripsi upaya	Kredit Sudara adalah kredit modal kerja yang disediakan untuk menambah barang dagangan bagi keluarga Pra KS, KS-I, keluarga miskin dan atau keluarga lain yang semula keluarga miskin, khususnya ibu/perempuan secara berkelompok atau perorangan yang memiliki usaha eceran kios/warung/kedai yang menetap. Kredit Sudara ini dapat disalurkan langsung oleh Bank Bukopin, melalui Swamitra, LKM, BPR, dan koperasi.
	Penanggung jawab	Bukopin
	Pelaksana	Kantor Cabang Bukopin, atau melalui Swamitra, LKM, BPR dan koperasi.
	Instansi terkait	Yayasan INDRA (Yayasan Indonesia Damai Sejahtera)
	Tujuan upaya	Menyediakan kredit modal kerja.
	Jenis kegiatan	Kredit modal kerja, yang besarnya antara Rp350 ribu s/d Rp 5 juta.
	Wilayah pelaksanaan	Semarang.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Keluarga Pra Sejahtera, KS-I, keluarga miskin, dan atau keluarga lain yang semula keluarga miskin, khususnya ibu/perempuan secara berkelompok atau perorangan yang memiliki usaha eceran kios/warung/kedai yang menetap.</p> <p><u>Cara menjanging:</u> Mendapat rekomendasi dari BKKBN.</p> <p><u>Persyaratan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi anggota kelompok - Punya usaha produktif - Punya pengalaman usaha - Memiliki tempat usaha (tempat tinggal) - Pinjaman s/d Rp 2 juta perlu membuat proposal singkat.
	Pendanaan	Yayasan INDRA (Yayasan Indonesia Damai Sejahtera) Sifat dana merupakan dana program berbunga lunak.
	Waktu pelaksanaan	2001-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Swamitra mendapat bantuan untuk disalurkan kepada anggota. - Anggota mengajukan permohonan kredit tentang kebutuhan dana. - Menyampaikan gambaran tentang usahanya, kinerja di masa lalu, omzet per hari, dsb. - Swamitra akan mengevaluasi kelayakan usaha (memenuhi kriteria 5 C). - Pinjaman disetujui atau ditolak. - Jika disetujui, dana dapat dicairkan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan Juni 2003, telah didirikan 237 outlet Swamitra - Total asset Rp225.673 miliar - Total pinjaman mencapai Rp193.15 miliar dan simpanan Rp99.245 miliar. - Jumlah nasabah peminjam sebanyak 28.290 orang dan penyimpan 97.260 orang.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah keterbatasan dana. - Aspek pemantauan yang belum mampu menjangkau ke semua nasabah. - Infrastruktur seperti sarana telepon yang tidak memadai.
	Status saat ini	Berjalan baik
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi program dilihat dari kelancaran pelaksanaan cukup baik, tetapi terbentur pada keterbatasan dana. - Potensi untuk pemberdayaan perempuan sangat tinggi karena program ditujukan untuk kaum perempuan.

No.	Item	Penjelasan
2.3	Nama upaya	Kredit Sudara Perluasan
	Deskripsi upaya	Kredit Sudara Perluasan adalah kredit modal kerja yang disediakan untuk menambah barang dagangan bagi Keluarga Pra KS, KS-I, Keluarga Miskin dan atau Keluarga lain yang semula Keluarga Miskin, khususnya ibu/perempuan secara berkelompok atau perorangan yang memiliki usaha eceran kios/warung/kedai yang menetap. Kredit Sudara ini dapat disalurkan langsung oleh Bank Bukopin, melalui Swamitra, LKM, BPR, dan koperasi.
	Penanggung jawab	Bukopin
	Pelaksana	Kantor Cabang Bukopin, atau melalui Swamitra, LKM, BPR dan koperasi.
	Instansi terkait	Yayasan DAMANDIRI (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri)
	Tujuan upaya	Menyediakan kredit modal kerja.
	Jenis kegiatan	Kredit modal kerja, yang besarnya antara Rp350 ribu s/d Rp 7 juta.
	Wilayah pelaksanaan	Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Karawang, dan Cilegon.
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Keluarga Pra Sejahtera, KS-I, keluarga yang semula miskin, TKI, dan pemilik usaha kecil yang mempekerjakan tenaga kerja keluarga miskin yang memiliki usaha produktif dan yang telah tumbuh dan sedang berkembang. <u>Jenis usaha yang dibiayai adalah</u> usaha perdagangan, jasa, agrobisnis meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta bidang usaha lainnya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. <u>Cara menjanging:</u> Mendapat rekomendasi dari BKKBN. <u>Persyaratan:</u> - Menjadi anggota kelompok - Memiliki usaha produktif - Memiliki pengalaman usaha - Memiliki tempat usaha (tempat tinggal) - Pinjaman s/d Rp 2 juta perlu membuat proposal singkat.
	Pendanaan	Yayasan INDRA (Yayasan Indonesia Damai Sejahtera) Sifat dana merupakan dana program berbunga lunak.
	Waktu pelaksanaan	2001-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Swamitra mendapat bantuan untuk disalurkan kepada anggota. - Anggota mengajukan permohonan kredit tentang kebutuhan dana. - Menyampaikan gambaran tentang usahanya, kinerja di masa lalu, omzet per hari, dsb. - Evaluasi tentang kelayakan usaha (memenuhi kriteria 5 C). - Pinjaman disetujui atau ditolak. - Pencairan dana.
	Pencapaian hasil	- Sampai dengan Juni 2003, telah didirikan 237 outlet Swamitra - Total asset Rp225.673 miliar - Total pinjaman mencapai Rp193.15 miliar dan simpanan Rp99.245 miliar. - Jumlah nasabah peminjam sebanyak 28.290 orang dan penyimpan 97.260 orang.
	Masalah	- Masalah keterbatasan dana. - Aspek pemantauan yang belum mampu menjangkau ke semua nasabah. - Infrastruktur seperti sarana telepon kurang memadai.
	Status saat ini	Masih berjalan baik
	Potensi	- Potensi baik, tetapi terbatas pada ketersediaan modal usaha kredit. - Potensi untuk pemberdayaan perempuan sangat tinggi karena program ditujukan untuk kaum perempuan.

No.	Item	Penjelasan
	Deskripsi upaya	Kredit Pundi adalah fasilitas modal kerja dan atau investasi yang diberikan bank kepada usaha kecil produktif yang memiliki keluarga miskin, keluarga yang semula miskin, kelompok Taskin, kelompok usaha kecil, dan atau usaha kecil yang mempekerjakan tenaga kerja berasal dari keluarga miskin untuk pengembangan usaha kecil produktif.
	Penanggung jawab	Bukopin
	Pelaksana	Kantor cabang di seluruh Indonesia
	Instansi terkait	Yayasan DAMANDIRI (Yayasan Dana Sejahtera Mandiri)
	Tujuan upaya	Membantu golongan ekonomi lemah akan kebutuhan investasi dan modal kerja untuk usaha produktif.
	Jenis kegiatan	- Kredit modal kerja - Kredit investasi
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh wilayah Indonesia
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Keluarga Pra Sejahtera, KS-I, keluarga yang semula miskin, TKI, dan pemilik usaha kecil yang mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga miskin yang memiliki usaha produktif yang telah tumbuh dan sedang berkembang. <u>Jenis usaha yang dibiayai adalah</u> usaha perdagangan, jasa, agrobisnis meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta bidang usaha lainnya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. <u>Cara menjangkau:</u> Mendapat rekomendasi dari BKKBN. <u>Persyaratan:</u> - Menjadi anggota kelompok - Memiliki usaha produktif - Memiliki pengalaman usaha - Memiliki tempat usaha (tempat tinggal) - Pinjaman s/d Rp 2 juta perlu membuat proposal singkat.
	Pendanaan	Dari Yayasan Danamandiri
	Waktu pelaksanaan	2001-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Swamitra mendapat bantuan untuk disalurkan kepada anggota. - Anggota mengajukan permohonan kredit tentang kebutuhan dana untuk. - Menyampaikan gambaran tentang usahanya, kinerja di masa lalu, omzet per hari, dsb. - Evaluasi tentang kelayakan usaha (memenuhi kriteria 5 C). - Pinjaman disetujui atau ditolak. - Jika disetujui, dana dicairkan.
	Pencapaian hasil	- Sampai dengan Juni 2003, telah didirikan 237 outlet Swamitra - Total asset Rp225.673 miliar - Total pinjaman mencapai Rp193.15 miliar dan simpanan Rp99.245 miliar. - Jumlah nasabah peminjam sebanyak 28.290 orang dan penyimpan 97.260 orang.
	Masalah	- Masalah keterbatasan dana. - Aspek pemantauan yang belum mampu menjangkau ke semua nasabah. - Infrastruktur seperti sarana telepon kurang memadai.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	- Potensi baik, tetapi terbatas pada ketersediaan modal usaha kredit. - Potensi untuk pemberdayaan perempuan sangat tinggi karena program ditujukan untuk kaum perempuan.
2.5	Nama upaya	Kukesra Mandiri
	Deskripsi upaya	Kredit yang disediakan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kelompok (UPPKS) dalam rangka upaya pemberdayaan dan pembinaan oleh BKKBN.

No.	Item	Penjelasan
	Penanggung jawab	BKKBN dan BUKOPIN
	Pelaksana	Kantor cabang
	Instansi terkait	Yayasan Danamandiri dan BKKBN
	Tujuan upaya	Membantu memberdayakan golongan pra sejahtera yang tergabung dalam kelompok UPPKS.
	Jenis kegiatan	Kredit modal kerja
	Wilayah pelaksanaan	Cilegon, Bandung, Cirebon, Karawang, Cibinong, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Kupang, Makassar, Medan, Padang, dan Palembang.
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Kelompok UPPKS yang telah dibina dan direkomendasi oleh BKKBN untuk mendapatkan fasilitas Kukesra Mandiri. <u>Cara menjanging:</u> Sesuai rekomendasi dari BKKBN <u>Kriteria:</u> Sesuai kriteria BKKBN
	Pendanaan	Yayasan Danamandiri Sifat dana adalah dana program dengan bunga lunak.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – 2002
	Mekanisme pelaksanaan	- Menjadi anggota kelompok UPPKS - Direkomendasi oleh BKKBN
	Pencapaian hasil	Sekarang sudah lunas, dan dana ditarik kembali oleh Yayasan.
	Masalah	- Masalah keterbatasan dana. - Aspek pemantauan yang belum mampu menjangkau ke semua nasabah. - Infrastruktur, seperti sarana telepon yang belum memadai.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	- Potensi baik, tetapi terbatas pada ketersediaan modal usaha kredit. - Potensi untuk pemberdayaan perempuan sangat tinggi karena program ditujukan untuk kaum perempuan.
3. Bank Central Asia (BCA)		
3.1	Nama Upaya	Program Kredit Peduli Usaha Mikro BCA
	Deskripsi Upaya	Program Kredit Peduli Usaha Mikro BCA adalah program kredit yang disediakan bagi usaha kecil dan mikro yang penyalurannya dilakukan melalui program kemitraan dengan BPR.
	Penanggung jawab	BPR
	Pelaksana	BPR
	Instansi terkait	
	Tujuan Upaya	Menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan dana maksimal Rp 10 juta.
	Jenis Kegiatan	Kredit modal kerja
	Wilayah Pelaksanaan	Jawa, Bali, NTB, Sulsel, Sulut, Sumut dan Sumsel.
	Sasaran	Pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan kredit modal kerja maksimal Rp 10 juta. Nasabah dijaring melalui BPR Pelaksana sesuai dengan kriteria yang berkaju di BPR pelaksana.
	Pendanaan	Dana berasal dari BCA. Sifat dana adalah dana komersial yang paling lunak (BCA menetapkan bunga sekitar 15,5% dan bunga kepada nasabah ditentukan oleh BPR pelaksana)
	Waktu Pelaksanaan	Maret 2002 – sekarang

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	Kerja sama dengan BPR didasarkan pada penilaian terhadap kinerja BPR yang dikeluarkan oleh BI. Bila penilaiannya baik, maka kemudian dilakukan kesepakatan kerjasama. Sedangkan mekanisme untuk calon nasabah peminjam mengikuti mekanisme yang berlaku di masing-masing BPR pelaksana.
	Pencapaian hasil	- Sampai saat ini BCA sudah melakukan kerjasama dengan sekitar 90 BPR. - Realisasi kredit yang diberikan mencapai sekitar Rp 50 miliar.
	Masalah	Masalah umum yang biasa dihadapi oleh nasabah adalah pemenuhan persyaratan perbankan, meskipun untuk kredit ini jaminan tidak diperlukan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia bagian Timur.
3.2	Nama Upaya	Program Kemitraan dengan Perum Pegadaian
	Deskripsi Upaya	Program Kemitraan dengan Perum Pegadaian adalah program kemitraan dalam rangka ikut membiayai nasabah yang membutuhkan dana secara gadai melalui Perum Pegadaian.
	Penanggung jawab	Perum Pegadaian
	Pelaksana	Perum Pegadaian
	Instansi terkait	
	Tujuan Upaya	Menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan gadai yang besarnya maksimal Rp 50 juta.
	Jenis Kegiatan	Gadai
	Wilayah Pelaksanaan	Jakarta
	Sasaran	Nasabah Perum Pegadaian yang membutuhkan dana maksimal Rp 50 juta. Nasabah dijangkau melalui Kantor Cabang Perum Pegadaian Pelaksana. Kriteria sesuai dengan kriteria yang berlaku di Kantor Cabang Perum Pegadaian Pelaksana.
	Pendanaan	Dana berasal dari BCA. Sifat dana adalah dana komersial BCA yang tingkat bunganya paling lunak (15,5%), sedang untuk bunga kepada nasabah ditentukan oleh Perum Pegadaian Pelaksana.
	Waktu Pelaksanaan	Maret 2002 s/d sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- BCA melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kantor Cabang Perum Pegadaian setempat. - Penyaluran dana kepada calon nasabah mengikuti mekanisme yang berlaku di masing-masing Perum Pegadaian Pelaksana.
	Pencapaian hasil	- Realisasi penyaluran dana gadai mencapai sekitar Rp 15 miliar. - Sebagian besar peminjam gadai adalah perempuan.
	Masalah	Hampir tidak ada masalah karena gadai dilakukan dengan jaminan barang bergerak yang nilainya lebih besar.
	Status saat ini	Masih berjalan.
	Potensi	Berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia Timur.
4. Bank Mandiri		
4.1	Nama upaya	Kredit Usaha Kecil (KUK)
	Deskripsi upaya	KUK adalah kredit modal kerja dan kredit investasi yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimal Rp500 juta untuk membiayai usaha produktif.
	Penanggung jawab	Bank Mandiri
	Pelaksana	Kantor Cabang Bank Mandiri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu pengusaha kecil akan kebutuhan modal kerja dan investasi dalam mengembangkan usaha produktif.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja (termasuk KMK Kontraktor)
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh kantor cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Usaha kecil dan mikro. <u>Cara menjangkau:</u> Calon debitur mengajukan permohonan langsung ke Kantor Cabang. <u>Ketentuan Umum:</u> - Usaha kecil peorangan atau badan usaha baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum, termasuk koperasi. - Berdiri sendiri atau tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau usaha besar - Milik WNI - Kekayaan bersih maksimal Rp200 juta - Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar - Share dana sendiri minimal 20%
	Pendanaan	Dana berasal dari dana bank dan tabungan masyarakat Sifat dana adalah dana komersial sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan mengacu pada suku bunga efektif untuk segmen <i>small business</i> (per September 2003 suku bunga 16-17% per tahun)
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Mengajukan permohonan kredit. - Mengisi formulir aplikasi kredit - Melengkapi persyaratan yang diperlukan - Penyerahan dokumen - Konfirmasi data/dokumen - Analisis kredit kelayakan 5-C - Analisis keuangan - Persetujuan kredit - Dimasukkan dalam program asuransi/penjaminan kredit.
	Pencapaian hasil	Sampai Juni 2003 realisasi KUK untuk usaha mikro (plafond sampai Rp 50 juta)mencapai Rp 254,67 miliar. KUK untuk usaha kecil (plafon sampai Rp 500 juta) mencapai Rp 2.078,66 miliar.
	Masalah	- Masalah dalam pemberian jaminan dan penjaminan. - BUMN dibatasi untuk menjadi avalist (penjamin) - Kurangnya pemantauan - Persyaratan minimal untuk usaha kecil yang tidak selalu bisa dipenuhi, misalnya KTP, NPWP, Ijin Usaha - Menganggap sumber dana dari pemerintah sebagai hibah.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	- Potensi sangat besar, karena bank belum mampu melayani semua usaha kecil. - Pemerintah telah mendesak agar usaha kecil bisa bekerja sama dengan bank dalam usahanya.
4.2	Nama upaya	Kredit Program: Kredit Ketahanan Pangan (KKP) - KKP Eks KUT (untuk petani dan kelompok tani) - KKP non KUT (untuk petani, kelompok tani dan koperasi)

No.	Item	Penjelasan
	Deskripsi upaya	Kredit Program adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada: <ul style="list-style-type: none"> - petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar. - peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik. - petani ikan, dalam rangka usaha penangkapan ikan, penunjang perikanan, dan budidaya ikan dan/atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras. - petani/koperasi, dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai.
	Penanggung jawab	Bank Mandiri
	Pelaksana	Kantor Cabang
	Instansi terkait	Departemen Pertanian, Departemen Keuangan
	Tujuan upaya	Membantu usaha kecil akan kebutuhan modal kerja guna membiayai usahanya yang produktif, terutama di sektor agrobisnis.
	Jenis kegiatan	Kredit investasi Kredit modal kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Anggota petani, peternak, dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan. <u>Cara menjangkau:</u> Melalui kelompok tani atau koperasi. <u>Ketentuan Umum:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai usaha yang layak dibiayai. - Khusus untuk koperasi, usaha ini merupakan koperasi primer dan memiliki izin usaha serta pengurus yang aktif. - Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah memperoleh fasilitas kredit dengan kriteria lancar atau tidak dalam kondisi bermasalah. - Maksimum jangka waktu kredit 1 tahun. - Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank terkait diperlukan. <u>Bunga:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga untuk eks. KUT dalam rangka intensifikasi sebesar 9% per tahun. - Suku bunga kredit untuk non-KUT dalam rangka pengadaan pangan, peternakan dan budidaya tebu sebesar 13% per tahun (posisi per Agustus 2003).
	Pendanaan	Sumber dana KKP berasal dari Bank Mandiri, yang dalam pelaksanaannya mendapat bantuan subsidi bunga dari Departemen Keuangan.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 – 2005
	Mekanisme pelaksanaan	Mekanisme pelaksanaan mengikuti pedoman pelaksanaan KKP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian.
	Pencapaian hasil	Per Juli 2003: <ul style="list-style-type: none"> - KKP eks KUT untuk intensifikasi: 20% dari plafond Rp 50 miliar - KKP non-KUT untuk pengadaan pangan, peternakan dan budidaya tebu 32% dari plafond Rp 141,4 miliar.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak koperasi atau kelompok tani yang masih menunggak kredit program dimasa lalu. - Kurang memadainya kegiatan pemantauan. - Persepsi masyarakat yang keliru karena menganggap kredit program dari pemerintah sebagai hibah. - Koperasi belum memenuhi syarat bank teknis.
	Status saat ini	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan kurang lancar karena banyak koperasi atau petani yang masih menunggak kredit program. - Legalitas usaha belum lengkap.

No.	Item	Penjelasan
	Potensi	Kurang berpotensi karena kredit program bunga lunak (bersubsidi) tidak mendidik dan penerima program seringkali bukan orang yang berhak
4.3	Nama upaya	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
	Deskripsi upaya	<ul style="list-style-type: none"> - KKPA adalah kredit bunga lunak yang dibiayai dana Kredit Likuiditas guna disalurkan kepada koperasi primer untuk anggotanya. - Besarnya kredit maksimum adalah Rp 50 juta per anggota untuk investasi dan modal kerja. - Kredit ini khusus untuk pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan dan jasa, maksimum sebesar Rp10 juta.
	Penanggung jawab	Bank Mandiri
	Pelaksana	Kantor Cabang
	Instansi terkait	PNM dan BI
	Tujuan upaya	Kredit investasi dan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Anggota koperasi primer yang membutuhkan dana maksimal Rp 50 juta.</p> <p><u>Cara menjangkau:</u> Melalui koperasi primer.</p> <p><u>Ketentuan Umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi sudah berbadan hukum dan bukan koperasi karyawan. - Kredit digunakan untuk seluruh sektor ekonomi. - Bunga 16% per tahun efektif, termasuk fee untuk koperasi 2% pada masa tenggang bunga 14%. - Plafon kredit maksimum Rp50 juta, dan khusus untuk KMK jasa dan perdagangan maksimal Rp 10 juta.
	Pendanaan	Dana bersumber dari sisa dana eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PNM. Suku bunga dari PNM 9%, dan disalurkan kepada nasabah dengan sukubunga 16%, termasuk fee koperasi 2%.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi mengajukan plafon induk pada awal tahun anggaran kepada bank. - Bank menanyakan ke PNM apakah masih ada kelonggaran dana untuk KKPA. - Pengajuan permohonan pinjaman dilakukan oleh koperasi atau anggota melalui koperasi dimana pengusaha mikro menjadi anggota. - Koperasi menilai kelayakan usaha anggota yang mengajukan kredit - Koperasi mengajukan permohonan kepada bank terdekat secara kolektif. - Melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. - Bank melakukan analisa kredit dan keuangan (5C). - Bila bank menyetujui diajukan plafon individual permohonan kredit kepada PNM. - Permohonan disetujui atau ditolak oleh PNM - Resiko kredit ditanggung oleh bank pelaksana.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Dana terbatas, namun peminatnya banyak. - Pergantian pengurus/masalah intern koperasi. - Masalah pemenuhan kriteria - Setiap kredit harus memiliki jaminan. - Nasabah sering menolak bunga yang berbeda.

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Sejak 1999 dana eks KLBI dicabut dan pengelolaannya dialihkan ke PNM.
	Potensi	Kurang berpotensi karena kredit program bunga lunak (bersubsidi) tidak mendidik dan penerima program seringkali bukan orang yang berhak
4.4	Nama upaya	PUKK
	Deskripsi upaya	PUKK adalah program pembinaan yang bertujuan membantu usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses perbankan (<i>bankable</i>) dalam bentuk pinjaman dan hibah.
	Penanggung jawab	Bank Mandiri
	Pelaksana	Kantor cabang bank Mandiri
	Instansi terkait	Meneg BUMN
	Tujuan upaya	Membantu usaha kecil/mikro dan koperasi akan kebutuhan modal kerja dan investasi atau hibah untuk mengembangkan usaha produktif.
	Jenis kegiatan	- Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Usaha kecil dan mikro yang belum <i>bankable</i> dan perlu pembinaan. <u>Ketentuan:</u> - Memenuhi kriteria usaha kecil, khususnya yang memiliki aset/omzet per tahun dibawah Rp 50 juta atau tidak mempunyai jaminan yang cukup - Usaha kecil perorangan atau badan usaha dan koperasi tersebut belum memiliki akses perbankan - Untuk memulai usaha baru yang mempunyai prospek untuk dikembangkan dan/atau untuk membiayai usaha yang telah ada - Menyediakan penyertaan dana sebesar 25% dari kebutuhan dana yang diperlukan. - Pinjaman tidak diberikan kepada mitra binaan yang telah mendapat fasilitas kredit dari bank Mandiri atau bank lain atau pinjaman dana program PUKK dari BUMN lain.
	Pendanaan	Dana berasal dari penyisihan 1-3% keuntungan perusahaan untuk membantu usaha mikro dan kecil. Sifat dana adalah dana program bunga lunak mulai dari 6% sampai 15% pada tahun kelima.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1990 s/d sekarang.
	Mekanisme pelaksanaan	- Mengajukan permohonan pinjaman. - Mengisi formulir aplikasi kredit - Melengkapi persyaratan yang diperlukan (laporan keuangan dan izin-izin) - Penyerahan dokumen - Konfirmasi data/dokumen - Analisa kelayakan 5-C - Analisa keuangan - Persetujuan kredit
	Pencapaian hasil	Jumlah dana bantuan PUKK selama periode 1990- Juni 2003 mencapai Rp.204 miliar, terdiri dari Rp 24,7 miliar berupa hibah, Rp 176,2 untuk pinjaman, dan Rp 3,1 miliar untuk bina lingkungan.
	Masalah	- Jumlah dana terbatas. - Dana murah, sehingga banyak orang yang .memanfaatkan.
	Status saat ini	Masih berjalan.
	Potensi	- Potensi kurang karena jumlah dana tergantung dari penyisihan laba bank. - Kredit bunga lunak sebaiknya ditiadakan karena tidak mendidik.

No.	Item	Penjelasan
5. Bank BNI		
5.1	Nama upaya	Kredit Mikro
	Deskripsi upaya	Pemberian bantuan kredit kepada masyarakat kecil, baik yang membutuhkan tambahan modal kerja, investasi usaha maupun untuk keperluan pribadi lainnya dengan batas pinjaman maksimal 50 juta.
	Penanggung jawab	BNI
	Pelaksana	Unit Layanan Mikro (ULM) pada BNI Cabang
	Instansi terkait	BPR dan LKM (untuk pola tidak langsung)
	Tujuan upaya	Pemberian bantuan kredit untuk masyarakat kecil, baik yang membutuhkan tambahan modal kerja, dan investasi usaha maupun untuk keperluan pribadi.
	Jenis kegiatan	- Kredit investasi - Kredit modal kerja
	Wilayah pelaksanaan	Pada 151 unit ULM di Kantor Cabang BNI di seluruh Indonesia
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Masyarakat kecil yang memiliki usaha. <u>Cara menjaring:</u> Mereka dijaring di wilayah kerja ULM yang rata-rata memiliki radius pelayanan sekitar 5-10 km ² , baik dengan cara mendatangi langsung maupun 'jemput bola' ke pasar-pasar, industri rumah tangga, dsb. <u>Persyaratan Umum</u> - Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun - Usaha telah berjalan minimal 2 tahun (kredit produktif) - Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan: -fotokopi KTP suami/istri -fotokopi Kartu Keluarga -fotokopi Surat Nikah -fotokopi pembayaran tagihan listrik/ telepon -keterangan usaha/domisili
	Pendanaan	Dana bank dan masyarakat umum (simpanan) Sifat dana adalah dana komersial
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Pengusaha kecil mengajukan permohonan kredit serta mengisi formulir aplikasi kredit mikro - Usaha yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan - ULM melakukan analisis kredit kelayakan 5-C - ULM kemudian melakukan analisis keuangan - Berdasarkan analisis di atas, dikeluarkan persetujuan/penolakan kredit - Pencairan dana
	Pencapaian hasil	Realisasi sampai dengan 31 Juli 2003 mencapai Rp479 miliar, dengan 38.985 debitur.
	Masalah	- Masalah aksesibilitas dalam pembukaan unit ULM, karena terbentur kebijakan BI, yaitu ULM dianggap sebagai Kantor Cabang/Capem. - Masalah kelayakan usaha seperti lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, dan legalitas usaha. - Masalah pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, seperti KTP, agunan dsb.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Potensi besar karena: - jumlah usaha mikro lebih besar dibanding usaha menengah dan besar, - pengembangan pendekatan kepada nasabah dengan menggunakan konsep mikro, - menetapkan batas rayon pembinaan usaha mikro, dengan menggunakan orang setempat.

No.	Item	Penjelasan
5.2	Nama upaya	Kredit kepada Koperasi (Kkop)
	Deskripsi upaya	Pemberian kredit untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada koperasi.
	Penanggung jawab	BNI
	Pelaksana	BNI Cabang dengan sistem <i>channeling</i>
	Instansi terkait	PNM
	Tujuan upaya	Membantu koperasi akan kebutuhan modal kerja dan investasi untuk: <ul style="list-style-type: none"> - pengadaan padi, palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura - distribusi beras, gula pasir, minyak goreng, dan kedelai - usaha agrobisnis lainnya yang secara langsung mendukung kelancaran usaha anggota koperasi.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan kredit sampai dengan Rp 350 juta
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	Koperasi/LSM yang memiliki usaha sebagaimana disebutkan diatas.
	Pendanaan	Dana bersumber dari sisa dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Suku bunga KLBI 10%, dan disalurkan kepada nasabah dengan bunga 16% per tahun termasuk <i>fee</i> 1% bagi koperasi sekunder.
	Waktu pelaksanaan	1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi/LSM membuat rencana pengajuan dana - Koperasi/LSM mengajukan permohonan kredit ke cabang terdekat - Koperasi/LSM melengkapi seluruh data dan dokumen yang disyaratkan - Bank melakukan analisa kelayakan - Bank kemudian melakukan analisa keuangan - Jika disetujui, akan diikuti dengan realisasi (pencairan kredit)
	Pencapaian hasil	Per April 2003 realisasi kredit mencapai Rp.76,4 miliar, pengembalian 34,95 miliar dan sisa kredit (<i>outstanding</i>) Rp.40,64 miliar.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah kelayakan usaha koperasi, seperti lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, legalitas dan agunan - Masalah dalam penyaluran kredit sebelumnya, seperti masih besarnya tunggakan. - Skim kredit program dinilai sudah tidak tepat lagi, serta tidak mendidik dan terlalu birokratis.
	Status saat ini	Tinggal meneruskan sisa dana eks KLBI yang masih ada, sampai seluruh dana ditarik oleh PNM dan BI.
	Potensi	
5.3	Nama upaya	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
	Deskripsi upaya	<ul style="list-style-type: none"> -KKPA adalah kredit berbunga lunak yang dibiayai dana KLBI guna disalurkan kepada koperasi primer untuk anggotanya. -Besarnya kredit maksimum Rp 50 juta per anggota untuk investasi dan modal kerja. Khusus untuk pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan dan jasa, maksimum sebesar Rp10 juta.
	Penanggung jawab	BNI
	Pelaksana	BNI Cabang
	Instansi terkait	Koperasi
	Tujuan upaya	Kredit investasi dan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.
	Jenis kegiatan	Kredit investasi Kredit modal kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Anggota koperasi primer yang membutuhkan dana maksimal Rp 50 juta.</p> <p><u>Cara menjanging:</u> Melalui koperasi yang telah menjadi nasabah bank atau calon nasabah koperasi lainnya yang dianggap layak.</p> <p><u>Ketentuan Umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi sudah berbadan hukum. - Kredit digunakan untuk sektor agribisnis, perdagangan dan jasa. - Bunga 16% per tahun efektif, termasuk fee untuk koperasi 2% (<i>executing</i>) atau 1% (<i>chanelling</i>). - Plafon kredit maksimum Rp50 juta.
	Pendanaan	Dana bersumber dari sisa dana eks KLBI. Suku bunga KLBI 9%, dan disalurkan kepada nasabah dengan sukubunga 16%, termasuk fee koperasi 2%.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi mengajukan plafon induk untuk 1 tahun kepada Bank. - Pengajuan permohonan pinjaman dilakukan oleh anggota melalui koperasi dimana pengusaha mikro menjadi anggota. - Koperasi menilai kelayakan usaha anggota yang mengajukan kredit - Koperasi mengajukan permohonan kepada kantor cabang bank terdekat secara kolektif. - Koperasi melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. - Bank melakukan analisis kredit dan keuangan (5C). - Bila bank menyetujui diajukan permohonan kredit kepada PNM. - Permohonan disetujui atau ditolak oleh PNM - Resiko kredit ditanggung oleh bank pelaksana (<i>executing</i>) atau koperasi (<i>chanelling</i>).
	Pencapaian hasil	Realisasi sampai dengan Desember 2002 mencapai Rp339,5 miliar, dan per Maret 2003 turun menjadi 269,4 miliar, karena secara berangsur dananya ditarik oleh BI. Jumlah debitur per akhir Desember 2002 mencapai 88.165 orang.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan akses memperoleh kredit bank. - Lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, legalitas dan agunan/penjaminan. - Program kredit berbunga lunak tidak mendidik dan sering tidak tepat sasaran, sebaiknya tidak dilanjutkan
	Status saat ini	Sejak 1999 dana eks KLBI ditarik dan pengelolaannya dialihkan ke PNM.
	Potensi	
5.4	Nama upaya	Kukesra Mandiri
	Deskripsi upaya	Pemberian bantuan kredit untuk golongan ekonomi lemah dengan menggunakan pendekatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
	Penanggung jawab	BKKBN dan BNI
	Pelaksana	BNI Cabang dengan sistem <i>channeling</i>
	Instansi terkait	Yayasan Danamandiri
	Tujuan upaya	Memberdayakan golongan ekonomi lemah.
	Jenis kegiatan	Pemberian bantuan kredit yang besarnya antara Rp 320 ribu sampai dengan Rp 2 juta
	Wilayah pelaksanaan	Cabang-cabang tertentu di Jawa dan Sulawesi Selatan
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Kelompok UPPKS</p> <p><u>Persyaratan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Melalui kelompok UPPKS dan POKJANIS -Direkomendasi oleh BKKBN.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Dana bersumber dari Yayasan Danamandiri. Sifatnya sebagai dana program bunga lunak.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2001 sampai dengan sekarang.
	Mekanisme pelaksanaan	-Kredit diberikan melalui kelompok UPPKS
	Pencapaian hasil	Realisasi sampai dengan Maret 2003 mencapai Rp24,8 miliar, dari dengan sekitar 24.000 anggota
	Masalah	- Terlalu birokratis - Pembinaan dari BKKBN terhadap kelompok UPPKS kurang - Program kredit bunga lunak tidak mendidik dan sering tidak tepat sasaran, sebaiknya tidak dilanjutkan.
	Status saat ini	Masih berjalan.
	Potensi	Dari segi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan cukup baik potensinya mengingat peserta program ini umumnya perempuan.
6. Bank Niaga		
6.1	Nama Upaya	Kredit program - Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA-Umum) - Kredit Ketahanan Pangan (KKP) - KKPA-TKI
	Deskripsi Upaya	Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada koperasi untuk membiayai kegiatan usaha anggotanya.
	Penanggung jawab	Bank Niaga – di bawah Direktorat Commercial Banking
	Pelaksana	Bank Niaga Desk UKM.
	Instansi terkait	Dep. Pertanian (untuk KKP) dan/atau Permodalan Nasional Madani (untuk KKPA).
	Tujuan Upaya	Membantu membiayai usaha anggota melalui pemberian fasilitas kredit modal kerja dan investasi.
	Jenis Kegiatan	- Kredit investasi - Kredit modal kerja
	Wilayah Pelaksanaan	Seluruh wilayah Indonesia melalui desk Lampung, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Bali dan Makassar.
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Penerima manfaat adalah anggota koperasi dengan kegiatan usaha yang produktif, bersifat massal dan seragam; kebanyakan bergerak di sektor agribisnis. <u>Cara menjangkau:</u> Bank menawarkan kerjasama dengan koperasi untuk membiayai kegiatan anggota koperasi dan ditetapkan dalam PK. <u>Ketentuan umum:</u> - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan koperasi setempat. Kemudian bank melakukan evaluasi serta bila perlu, menambah persyaratan lain. - Plafon kredit ditetapkan di dalam MoU. - Teknis pencairan melalui <i>reimbursement</i> . - Jangka waktu rata-rata 3 tahun (untuk modal kerja dan investasi) - Bunga tergantung pada sumber dananya: - Dana bank sendiri = 18-19% - Dana bank sendiri yang disubsidi (KKP-Deptan) mengikuti aturan instansi terkait - PNM: ± 14% (dari PNM ± 9%) - Sebagai jaminan: sertifikat tanah atau TBS-nya (untuk petani plasma perkebunan kelapa sawit)

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Ada tiga sumber dana: <ul style="list-style-type: none"> - Dana bank sendiri yang berasal dari tabungan masyarakat - Dana bank sendiri yang disubsidi (KKP-Deptan) mengikuti aturan instansi terkait - Dana dari PNM (eks Kredit Lilitas Bank Indonesia): $\pm 14\%$ (dari PNM $\pm 9\%$) Besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan komoditi yang diusahakan. Misalnya: maksimal plafon untuk tebu = Rp. 7,5 juta/ha; jagung = Rp 2,5 juta/ha; padi = Rp 2,5 juta/ha.
	Waktu Pelaksanaan	Sejak awal tahun 2000 sampai sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Mengikuti aturan yang ditentukan oleh Deptan atau PNM.
	Pencapaian hasil	Total perputaran sudah mencapai \pm Rp 200 miliar dengan tingkat pengembalian mencapai hampir 100%.
	Masalah	Mayoritas pengguna jasa (<i>end user</i>) terdiri dari petani dan/atau peternak yang: <ul style="list-style-type: none"> - sulit menerima jika terjadi perubahan (misalnya tingkat bunga atau besarnya biaya administrasi) sehingga segala sesuatu harus dibicarakan sebelumnya secara transparan dan dalam pelaksanaannya harus konsisten dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya, - tanda tangan sering berubah atau tidak sesuai dengan kartu identitas (KTP).
	Status saat ini	Masih berjalan dan semakin berkembang. Bahkan dalam waktu dekat wilayah jangkauannya akan diperluas.
	Potensi	<i>More promising than corporate banking</i>
6.2	Nama Upaya	Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: Bank Perkreditan Rakyat dan <i>Multifinance</i>
	Deskripsi Upaya	Memberikan kredit modal kerja dan investasi kepada BPR dan lembaga multifinance untuk membiayai kegiatan usaha nasabahnya.
	Penanggung jawab	Bank Niaga
	Pelaksana	Bank Niaga desk UKM
	Instansi terkait	Bank Indonesia
	Tujuan Upaya	Membantu membiayai usaha anggota melalui pemberian fasilitas kredit modal kerja dan investasi.
	Jenis Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit investasi - Kredit modal kerja
	Wilayah Pelaksanaan	Seluruh wilayah Indonesia melalui desk Lampung, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Bali dan Makassar.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Penerima manfaat adalah nasabah BPR dengan kegiatan usaha yang produktif, bersifat massal dan beragam, bergerak di sektor perdagangan.</p> <p><u>Cara menjangkau:</u> Bank menawarkan kerjasama dengan BPR untuk membiayai kegiatan nasabah BPR dan ditetapkan dalam MoU.</p> <p><u>Ketentuan umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan BPR setempat. Kemudian bank melakukan evaluasi dan bila perlu menambah persyaratan. - Plafon kredit ditetapkan di dalam MoU. - Pola pembiayaan: <i>executing</i> dan <i>chanelling</i>, tergantung jenis usaha dan produknya dengan teknis pencairan: <i>reimbursement</i> - Jangka waktu rata-rata 3 tahun (untuk modal kerja dan investasi) - Bunga tergantung pada sumber dananya - Dana bank sendiri = 18-19% dan PNM: $\pm 16\%$
	Pendanaan	Ada dua sumber dana: <ul style="list-style-type: none"> - Dana bank sendiri yang berasal dari tabungan masyarakat - PNM: $\pm 16\%$ (dari PNM $\pm 10\%$)

No.	Item	Penjelasan
	Waktu Pelaksanaan	Sejak awal tahun 2000 sampai sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Bank Niaga mengevaluasi BPR berdasarkan laporan Bank Indonesia tentang kredibilitas BPR yang bersangkutan. Jika memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan dengan MoU.
	Pencapaian hasil	<i>Outstanding</i> masing-masing BPR mencapai Rp 3 miliar dengan tingkat pengembalian mencapai hampir 100%.
	Masalah	Relatif tidak ada masalah.
	Status saat ini	Sampai saat ini jumlah BPR yang terlibat sekitar 30 BPR dan akan semakin berkembang, bahkan dalam waktu dekat wilayah jangkauannya akan diperluas.
	Potensi	Sangat potensial untuk dikembangkan
6.3	Nama Upaya	Program Kemitraan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Commercial forward linkage</i> - <i>Commercial backward linkage</i>
	Deskripsi Upaya	Bekerjasama dengan sebuah perusahaan besar guna membantu membiayai modal kerja pengusaha yang mensuplai produknya ke sebuah perusahaan besar (<i>backward linkage</i>) dan pengusaha yang mendistribusi produk perusahaan besar tersebut (<i>forward linkage</i>).
	Penanggung jawab	Bank Niaga
	Pelaksana	Bank Niaga desk UKM
	Instansi terkait	
	Tujuan Upaya	Program ini bertujuan untuk membiayai kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar/korporasi dengan memberikan kredit modal kerja kepada perorangan yang melakukan kegiatan usaha dengan sebuah perusahaan besar/korporasi.
	Jenis Kegiatan	Kredit modal kerja untuk usaha komersial/perdagangan
	Wilayah Pelaksanaan	Seluruh wilayah Indonesia melalui desk Lampung, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Bali dan Makassar.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Penerima manfaat adalah pengusaha kecil dengan kegiatan usaha yang produktif, bersifat massal dan seragam; bergerak di sektor perdagangan.</p> <p><u>Cara menjangkau:</u> Bank menawarkan kerjasama dengan sebuah perusahaan besar untuk membiayai kegiatan para supplier dan distributornya dalam mengantisipasi tenggang waktu pembayaran invoice oleh perusahaan.</p> <p><u>Ketentuan umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan perusahaan besar terkait kemudian bank melakukan evaluasi dan bila perlu menambah persyaratan. - Plafon kredit ditetapkan di dalam MoU, antara lain uang muka sebesar 20% sebagai <i>self-financing</i> perusahaan. - Teknis pencairan adalah dengan reimbursement - Sebagai jaminannya: invoice kepada perusahaan <p>Bunga bank tergantung pada sumber dananya: Dana bank sendiri = 18-19% dan PNM: ± 16%</p>
	Pendanaan	Ada dua sumber dana: <ul style="list-style-type: none"> - Dana bank sendiri yang berasal dari tabungan masyarakat - PNM: ± 16% (dari PNM ± 10%)
	Waktu Pelaksanaan	Sejak awal tahun 2000 sampai sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> -Permohonan pinjaman diajukan dengan penjamin perusahaan yang menjadi mitra; -Bank menilai kelayakan usaha dan finansial dari usaha mikro; -Pencairan dana dilakukan berdasarkan invoice dari perusahaan, sebelum dana tersebut dapat dicairkan untuk perusahaan.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Tingkat pengembalian mencapai hampir 100%.
	Masalah	Relatif tidak ada masalah.
	Status saat ini	Semakin berkembang bahkan dalam waktu dekat wilayah jangkauannya akan diperluas.
	Potensi	Sangat potensial untuk dikembangkan.
7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)		
7.1	Nama upaya	Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)
	Deskripsi upaya	-Kupedes adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit (bukan oleh Kantor Cabang) untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil dan mikro yang layak (<i>eligible</i>). -Fasilitas ini diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro (<i>microfinancing</i>) di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. -Besarnya kredit maksimum Rp50 juta per nasabah, dengan jangka waktu kredit untuk Kupedes Modal Kerja maksimal 24 bulan, Kupedes Investasi maksimal 36 bulan dan Golongan Berpenghasilan Tetap 60 bulan.
	Penanggung jawab	BRI
	Pelaksana	BRI Unit
	Instansi terkait	Pemerintah tingkat kecamatan
	Tujuan upaya	Membantu anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembiayaan usaha mikro, baik yang bersifat modal kerja, investasi, maupun keperluan lainnya.
	Jenis kegiatan	- Kupedes investasi - Kupedes modal kerja - Kupedes golongan berpenghasilan tetap (golbertap) <u>Sektor yang dibiayai:</u> - Sektor Pertanian - Perindustrian - Perdagangan - Jasa lainnya - Golongan berpenghasilan tetap.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia melalui 3.942 Kantor BRI Unit
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Seluruh masyarakat pedesaan, meliputi pengusaha kecil, usaha rumah tangga dan golongan berpenghasilan tetap (golbertap) yang memerlukan tambahan pembiayaan s/d 50 juta rupiah. <u>Cara menjangkau:</u> Calon nasabah datang sendiri ke Kantor BRI Unit atau dengan cara "jemput bola" terhadap calon nasabah potensial. <u>Kriteria:</u> Pengusaha kecil dan rumah tangga yang telah memiliki usaha dengan karakteristik berikut: - kegiatannya banyak - tidak terorganisasi dengan baik - tidak mempunyai catatan keuangan - tidak berbadan hukum. <u>Persyaratan:</u> -WNI -Memiliki pengalaman usaha minimal 1 tahun -Fotocopy KTP/SIM -Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari desa -Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari desa (bila diperlukan) -Agunan: petok, girik, <i>letter C</i> , SHM, BPKB (hanya untuk kredit di atas Rp 2 juta) -Wajib membuka rekening tabungan Simpedes atau Simaskot.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	-Pendanaan berasal dari dana bank dan simpanan nasabah, terutama dari Simpedes. -Sifat dana adalah dana komersial -Sifat kredit adalah kredit komersial dengan bunga 1,5 sampai 2% per bulan flat.
	Waktu pelaksanaan	Sejak 1984 s/d sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Plafon sampai dengan Rp 50 juta - Dilayani berdasarkan domisili tempat tinggal - Putusan kredit maksimal 7 hari kalender untuk putusan Ka Unit dan 14 hari untuk putusan Kanca BRI - Jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Kupedes Modal Kerja, 36 bulan untuk Kupedes Investasi dan 60 bulan untuk Golongan Berpenghasilan Tetap. - Diikutkan program Asuransi Jiwa dengan beban biaya BRI. Diberikan PBTW (Pendapatan Bunga Tepat Waktu) bagi nasabah yang mengangsur secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar 1/4 bagian dari suku bunga.
	Pencapaian hasil	- Realisasi kredit sampai bulan Juni 2003 mencapai Rp 80,5 triliun untuk sekitar 31,5 juta nasabah. - <i>Outstanding</i> kredit per Juni 2003 mencapai Rp13,175 triliun dari 3.028.633 nasabah. - Jumlah pinjaman baru (Jan-Juni 2003) mencapai Rp7,84 triliun untuk 1.150.525 debitur.
	Masalah	-Minimnya infrastruktur wilayah, seperti jalan, pasar, sarana kendaraan umum seringkali menghambat usaha kecil dan mikro. - Sikap kurang terpuji dari sebagian anggota masyarakat yang ditunjukkan, antara lain, dengan kelalaian membayar pinjaman.
	Status saat ini	-Masih berjalan dan tingkat pengembalian kredit mencapai 98,4%.
	Potensi	Potensi Kupedes kedepan sangat baik, dan BRI merencanakan membuka sekitar 100 unit baru setiap tahun. Potensi terhadap penguatan usaha mikro sangat besar mengingat sekitar 80% dari jumlah nasabah adalah mereka yang memiliki pinjaman rata-rata sekitar Rp3 juta, yang berarti merupakan usaha mikro. Potensi untuk upaya peningkatan ekonomi perempuan juga cukup besar karena sekitar 30-45% nasabah adalah perempuan. Meski demikian, penandatanganan <i>akad</i> kredit harus dilakukan oleh suami isteri, baik untuk pinjaman oleh isteri ataupun suami.
7.2	Nama upaya	Simpanan Pedesaan (Simpedes)
	Deskripsi upaya	Simpedes adalah simpanan bagi masyarakat pedesaan yang aman, mudah, berhadiah, menguntungkan, dan berpeluang untuk memenangkan undian. Hadiah diundi setiap 6 bulan sekali di setiap Kantor Cabang BRI di seluruh Indonesia.
	Penanggung jawab	BRI
	Pelaksana	BRI Unit
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendorong masyarakat untuk rajin menabung demi masa depan yang lebih baik.
	Jenis kegiatan	Memobilisasi dana masyarakat lewat Simpedes
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia, melalui 3.942 kantor BRI Unit
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Seluruh anggota masyarakat pedesaan. <u>Cara menjangkau:</u> Calon nasabah dijaring dari para nasabah Kupedes, calon nasabah datang sendiri ke kantor BRI Unit terdekat, atau dengan cara "jemput bola" terhadap calon nasabah potensial.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Dana berasal dari simpanan masyarakat, baik yang merupakan milik individu, kelompok atau badan usaha. Sifat dana adalah simpanan dengan bunga komersial. yang dapat diambil setiap saat. Bunga simpanan dapat berubah mengikuti bunga pasar yang berlaku.
	Waktu pelaksanaan	Sejak 1984 s/d sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penjangkaran. Mereka yang dijangar harus berstatus WNI dan harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM. - Setelah memenuhi persyaratan tersebut, kemudian mereka akan diberikan buku Simpedes. Melalui Simpedes, mereka dapat menyimpan dan mengambil setiap saat diperlukan.
	Pencapaian hasil	Sampai dengan Juni 2003 jumlah simpanan mencapai Rp 24,68 triliun dari 29.201.210 nasabah
	Masalah	Minimnya infrastruktur wilayah seperti jalan, pasar, sarana kendaraan umum seringkali menghambat usaha kecil dan mikro.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	Potensi kedepan sangat baik. Potensi terhadap penguatan usaha mikro sangat besar karena hampir semua dana yang disalurkan lewat Kupedes berasal dari Simpedes.
7.3	Nama upaya	Kredit Mitra
	Deskripsi upaya	Kredit Mitra adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) berdasarkan kerjasama antara pengusaha besar mitra BRI dengan UKM.
	Penanggung jawab	BRI
	Pelaksana	Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membantu UKM yang bisnisnya berhubungan dengan mitra BRI dan membutuhkan tambahan modal kerja.
	Jenis kegiatan	Kredit Modal Kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI (pengusaha besar) yang memerlukan tambahan modal kerja s/d Rp 500 juta.</p> <p><u>Cara menjangar:</u> Calon nasabah diperoleh dari informasi daftar pengusaha kecil dan menengah yang merupakan mitra BRI.</p> <p><u>Persyaratan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai usaha yang layak dibiayai dan kegiatan bisnisnya berhubungan dengan pengusaha besar mitra BRI. - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pinjaman macet BI. - Mempunyai reputasi yang baik dan dikenal masyarakat luas. - Mempunyai perizinan usaha yang lengkap.
	Pendanaan	-Dana berasal dari dana pihak ketiga. -Sifat dana adalah dana komersial
	Waktu pelaksanaan	Sejak 23 Juli 2002 s/d sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat PKS antara Kantor Cabang BRI dengan mitra BRI. - Calon debitur mengajukan Permohonan kredit kepada BRI - Calon debitur melengkapi persyaratan/dokumen yang diperlukan. - Permohonan kredit diproses sesuai prosedur yang berlaku. - Realisasi kredit apabila disetujui.
	Pencapaian hasil	Realisasi kredit dimasukkan dalam portofolio Kredit Ritel Komersial BRI di bawah Rp 500 juta.
	Masalah	-Kelayakan usaha dari usaha mikro maupun perusahaan yang menjadi mitra

No.	Item	Penjelasan
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	-Adanya dukungan pemerintah untuk lebih mengembangkan UKM. -Jumlah UKM di Indonesia yang semakin bertambah.
7.4	Nama upaya	Kredit Candak Kulak
	Deskripsi upaya	Kredit Candak Kulak adalah kredit tanpa jaminan, yang jumlahnya relatif kecil dan dapat dijangkau oleh masyarakat desa.
	Penanggung jawab	Kepala Desa
	Pelaksana	Bank Kredit Desa (BKD)
	Instansi terkait	BI dan BRI selaku pembina
	Tujuan upaya	- Mendorong perkembangan ekonomi masyarakat desa. - Mendidik masyarakat agar terbiasa berhubungan dengan bank - Meningkatkan pendapatan masyarakat desa. - Mendidik masyarakat pedesaan agar gemar menabung.
	Jenis kegiatan	- Memberikan pinjaman kepada anggota/masyarakat desa untuk usaha produktif. - Menerima simpanan dari anggota/masyarakat desa berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela/ tabanas BKD. <u>Skim kredit yang diberikan berupa:</u> - Kredit mingguan dengan jangka waktu 12 minggu - Kredit bulanan dengan jangka waktu 10 bulan - Kredit musiman dengan jangka waktu 6 bulan
	Wilayah pelaksanaan	-Jawa dan Madura, meliputi 4 Kanwil dan 60 Kantor Cabang BRI.
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Masyarakat kecil di desa yang memiliki usaha. <u>Cara menjanging:</u> Calon nasabah datang sendiri ke Kantor BKD, atau petugas mendatangi calon nasabah potensial. <u>Persyaratan:</u> - WNI - Fotocopy KTP - Surat Keterangan dari desa. - Telah memiliki usaha produktif.
	Pendanaan	- Berasal dari dana sendiri: dana kas desa, simpanan wajib anggota, dan laba yang ditahan. - Berasal dari pihak luar: pinjaman dari BRI, pinjaman antar BKD, dan tabanas BKD/simpanan sukarela. - Sifat dana adalah dana komersial.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1987 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	- Mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan - Permohonan ditinjau dan diperikkas oleh petugas bank - Bila disetujui, pinjaman dicairkan - Diikuti oleh kewajiban untuk menyimpan.
	Pencapaian hasil	▪ Sampai dengan Juni 2003 jumlah BKD mencapai 5.345 unit, dengan 4.518 yang masih aktif. ▪ Realisasi kredit dalam tahun 2002 mencapai Rp533,452 miliar dari 1.179.645 nasabah, dan tahun 2003 s/d Juni mencapai Rp.288,411 miliar dari 578.894 nasabah. ▪ <i>Outstanding</i> kredit mencapai Rp189,896 miliar dengan 436.044 nasabah (Juni 2003) ▪ Jumlah tabungan mencapai Rp.38,913 miliar dari 506.957 penabung (Juni 2003).

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan modal - Status hukum/legalitas usaha lembaga yang masih belum jelas - Kredit macet karena adanya program2 pemerintah yang bersifat hibah/amal (<i>charity</i>). - Pemberian bantuan permodalan terbentur aturan tentang ketentuan kehati-hatian bank.
	Status saat ini	<ul style="list-style-type: none"> -Masih berjalan -Pengembalian kredit diatas 95%.
	Potensi	<p><u>Potensi sangat baik karena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak daerah yang meminta didirikan BKD, tetapi terbentuk masalah legalitas/status badan hukum yang belum jelas. - Diperkirakan sekitar 60-70% peminjam adalah kaum perempuan.
7.5	Nama upaya	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K)
	Deskripsi upaya	P4K merupakan suatu upaya khusus dalam membina dan membantu keluarga-keluarga miskin di pedesaan, agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	Departemen Pertanian
	Pelaksana	BRI
	Instansi terkait	Dinas Pertanian setempat
	Tujuan upaya	Membangun sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu penduduk miskin memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, melalui pencapaian kemandirian, guna mengantarkan mereka keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; - Membantu pembentukan kelompok swadaya (KPK); - Menyediakan pengembangan ketrampilan dan pelatihan dalam berbagai aktivitas peningkatan pendapatan serta mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang tersedia, khususnya bagi kaum perempuan; - Membantu kelompok swadaya menyusun rencana usaha; - Menyediakan akses kepada fasilitas-fasilitas tabungan dan kredit; - Menyediakan nasehat (saran), pelatihan dan dukungan lainnya sesuai perkembangan kelompok swadaya.
	Wilayah pelaksanaan	Di 12 propinsi, 122 kabupaten, 1.043 kecamatan dan 6.5542 desa. Ke-12 Propinsi tersebut meliputi propinsi di Pulau Jawa, Sulsel, Sumsel, Kalsel, Bali, NTB, Lampung Riau, Bengkulu.
	Sasaran	Keluarga miskin di pedesaan.
	Pendanaan	Dari ADB dan IFAD sebesar Rp300 miliar. BRI menyediakan 5% dari dana.
	Waktu pelaksanaan	Fase I : 1979-1985 Fase II: 1989-1998 Fase III: 1998-2005
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Sampai Mei 2002, P4K telah memfasilitasi 70.444 kelompok swadaya, terdiri 21% KPK laki-laki, 37,8% KPK perempuan dan 41,2% KPK campuran. Realisasi kredit mencapai Rp 394 miliar dan tabungan Rp.21,1 miliar. Tunggalan kecil mencapai Rp9,3 miliar atau sekitar 2,36% dari total kredit atau 6,6% dari <i>outstanding</i> kredit. Sebanyak 104 gabungan atau asosiasi kelompok petani-nelayan kecil di 6 propinsi (Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali dan NTB) telah menjalankan mekanisme simpan pinjam sebagai cikal-bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan modal - Status hukum/legalitas usaha lembaga yang masih belum jelas - Kredit macet karena adanya program2 pemerintah yang bersifat hibah/amal (<i>charity</i>). - Pemberian bantuan permodalan terbentur aturan tentang ketentuan kehati-hatian bank.
	Status saat ini	<ul style="list-style-type: none"> -Masih berjalan -Pengembalian kredit diatas 95%.
	Potensi	<p><u>Potensi sangat baik karena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak daerah yang meminta didirikan BKD, tetapi terbentuk masalah legalitas/status badan hukum yang belum jelas. - Diperkirakan sekitar 60-70% peminjam adalah kaum perempuan.
7.5	Nama upaya	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K)
	Deskripsi upaya	P4K merupakan suatu upaya khusus dalam membina dan membantu keluarga-keluarga miskin di pedesaan, agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
	Penanggung jawab	Departemen Pertanian
	Pelaksana	BRI
	Instansi terkait	Dinas Pertanian setempat
	Tujuan upaya	Membangun sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu penduduk miskin memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, melalui pencapaian kemandirian, guna mengantarkan mereka keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; - Membantu pembentukan kelompok swadaya (KPK); - Menyediakan pengembangan ketrampilan dan pelatihan dalam berbagai aktivitas peningkatan pendapatan serta mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang tersedia, khususnya bagi kaum perempuan; - Membantu kelompok swadaya menyusun rencana usaha; - Menyediakan akses kepada fasilitas-fasilitas tabungan dan kredit; - Menyediakan nasehat (saran), pelatihan dan dukungan lainnya sesuai perkembangan kelompok swadaya.
	Wilayah pelaksanaan	Di 12 propinsi, 122 kabupaten, 1.043 kecamatan dan 6.5542 desa. Ke-12 Propinsi tersebut meliputi propinsi di Pulau Jawa, Sulsel, Sumsel, Kalsel, Bali, NTB, Lampung Riau, Bengkulu.
	Sasaran	Keluarga miskin di pedesaan.
	Pendanaan	Dari ADB dan IFAD sebesar Rp300 miliar. BRI menyediakan 5% dari dana.
	Waktu pelaksanaan	Fase I : 1979-1985 Fase II: 1989-1998 Fase III: 1998-2005
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	Sampai Mei 2002, P4K telah memfasilitasi 70.444 kelompok swadaya, terdiri 21% KPK laki-laki, 37,8% KPK perempuan dan 41,2% KPK campuran. Realisasi kredit mencapai Rp 394 miliar dan tabungan Rp.21,1 miliar. Tunggalan kecil mencapai Rp9,3 miliar atau sekitar 2,36% dari total kredit atau 6,6% dari <i>outstanding</i> kredit. Sebanyak 104 gabungan atau asosiasi kelompok petani-nelayan kecil di 6 propinsi (Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali dan NTB) telah menjalankan mekanisme simpan pinjam sebagai cikal-bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan (P4K Tahap III, 1998-2005)
	Potensi	Tingkat pengembalian kredit yang dikelola kelompok swadaya tersebut sangat baik dan memenuhi unsur kelayakan dari perspektif perbankan. Potensi yang besar dari keluarga-keluarga miskin untuk sanggup keluar dari lingkaran kemiskinan dengan kekuatan sendiri. P4K memberikan contoh empirik dalam skala proyek tentang bagaimana membangun sistem dan mekanisme partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan.
7.6	Nama upaya	Kredit Program: KKP <ul style="list-style-type: none"> - KKP Intensifikasi - KKP Peternakan - KKP Pangan - KKP Tebu Rakyat (penyempurnaan dari KUT, KKPA dan KKOP-Pangan)
	Deskripsi upaya	KKP adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank BRI kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. - Peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik. - Petani ikan, dalam rangka usaha penangkapan ikan, penunjang perikanan, dan budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras. - Koperasi, dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai.
	Penanggung jawab	BANK BRI
	Pelaksana	Kantor Cabang BRI
	Instansi terkait	Departemen/Dinas Pertanian
	Tujuan upaya	Membantu para petani, peternak dan koperasi akan kebutuhan modal kerja guna membiayai usahanya yang produktif.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia
	Sasaran	<u>Sasaran:</u> Anggota petani, peternak, dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan. <u>Cara menjangkau:</u> Melalui kelompok tani atau koperasi. <u>Ketentuan Umum:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai usaha tersebut diatas yang layak dibiayai. - Khusus untuk Koperasi merupakan Koperasi Primer dan memiliki izin usaha serta pengurus yang aktif. - Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah memperoleh fasilitas kredit dengan kriteria lancar atau tidak dalam kondisi bermasalah. - Maksimal jangka waktu kredit 1 tahun. - Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan. <u>Bunga:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga untuk pertanian sebesar 12% per tahun dan untuk peternakan 16% per tahun. - Suku bunga kredit untuk Koperasi dalam rangka pengadaan pangan sebesar 16% per tahun.
	Pendanaan	Sumber dana KKP berasal dari BRI, yang dalam pelaksanaannya mendapat bantuan subsidi bunga dari BI dalam 3 tahun pertama.
	Waktu pelaksanaan	2001-sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	Mekanisme pelaksanaan mengikuti Pedoman Pelaksanaan KKP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak koperasi atau kelompok tani yang masih menunggak kredit program dimasa lalu, sehingga program berjalan kurang lancar. - Masalah pemantauan yang tidak memadai. - Persepsi masyarakat yang menganggap kredit program dari Pemerintah tidak perlu dikembalikan.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> -Berpotensi besar karena sebagian besar penduduk adalah petani. -Potensial berkembang karena menerapkan pola kemitraan dan konvensional.
7.7	Nama upaya	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
	Deskripsi upaya	PUKK adalah program penyisihan laba usaha BUMN guna membantu penguatan golongan ekonomi lemah (UKMK).
	Penanggung jawab	BRI dan Meneg BUMN
	Pelaksana	BRI Cabang
	Instansi terkait	Instansi sektoral
	Tujuan upaya	Membantu penguatan usaha golongan ekonomi lemah, khususnya usaha mikro yang masih memerlukan bantuan modal dan pembinaan usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> -Pemberian bantuan kredit modal kerja. -Pembinaan usaha (manajerial, produksi, pemasaran). -Pelatihan, Pemasaran kepada UKMK
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh Indonesia.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u> Golongan ekonomi lemah yang belum mampu melakukan akses kredit dengan bank.</p> <p><u>Cara menjanging:</u> Umumnya dijanging lewat perusahaan atau koperasi yang telah menjadi nasabah BRI, yang memiliki sistem bapak angkat atau kemitraan. Juga pendekatan proaktif pada usaha perorangan atau kelompok.</p> <p><u>Persyaratan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -WNI -Bukan anak perusahaan -Perseorangan -Punya usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun -Usahanya punya prospek untuk berkembang -Kesediaan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan -Memberikan laporan.
	Pendanaan	Pendanaan berasal dari sekitar 1-3% dari keuntungan yang diperoleh BRI. Sifat dana adalah dana berbunga lunak antara 6-12% per tahun, dan tanpa agunan.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1996 - sekarang
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> -Calon pemohon mengajukan pinjaman dengan mendapat rekomendasi dari bapak angkat atau mitra usahanya, atau mengajukannya secara langsung. -Memenuhi persyaratan bank. -Bank mengadakan penilaian usaha maupun keuangan (prosesnya sama dengan pengajuan kredit biasa). -Pencairan dana diajukan ke Kantor Pusat. -Pinjaman maksimal hanya sampai 5 tahun, setelah itu harus lepas dan masuk ke program kredit biasa.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	Pencapaian hasil sampai dengan bulan Juni 2003 tersalur Rp 60,4 miliar, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kepada usaha kecil Rp 34,3 miliar atau 9.948 unit - Kepada koperasi Rp 9,7 miliar atau 373 unit. - Hibah Rp 15,7 miliar berupa pelatihan kepada hampir 1.500 mitra binaan, pemasaran/promosi dagang hampir 200 mityra binaan, dll. - Biaya operasional sejumlah Rp 679 juta
	Masalah	-Prospek usaha dari mitra binaan (kelayakan usaha) -BUMN yang membina mengumpul di wilayah binaan yang sama.
	Status saat ini	Masih berjalan.
	Potensi	-Potensi terbatas karena tergantung alokasi keuntungan dana yang diperoleh. -Proses penciptaan embrio nasabah komersial

**Narasi Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat tahun 1997-2003
Kelompok Lembaga Internasional**

No.	Item	Penjelasan
1. Asian Development Bank – IRM (ADB-IRM)		
1.1	Nama upaya	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) Phase III/Rural Income Generation Project (RIGP) 1997/Loan No 1583-INO
	Deskripsi upaya	Proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang akan membantu sekitar 800.000 keluarga mengatasi kemiskinan. Proyek ini akan membantu mereka menaikkan pendapatan ke atas garis kemiskinan. Hal tersebut akan dicapai melalui pembentukan dan pelatihan <i>self-help group</i> (SHG), lalu pembentukan rencana usaha kelompok. Setelah disetujui, rencana usaha akan menjadi dasar pinjaman kecil. Kelompok tersebut akan didukung dan dipantau secara cermat dan menyeluruh.
	Penanggung jawab	Departemen Pertanian
	Pelaksana	ADB dan BRI
	Instansi terkait	<i>Executing agencies:</i> - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian (<i>Agency for Agricultural Education and Training</i>) - BRI
	Tujuan upaya	- Arah Membangun sistem yang partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu masyarakat miskin memperbaiki kehidupan mereka dan kesejahteraan keluarganya sehingga mencapai kemandirian (<i>self-reliance</i>) di atas garis kemiskinan. - Tujuan Membangun mekanisme pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui dukungan terhadap SHG yang dibentuk oleh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan akan dicapai melalui tiga komponen yang saling terkait: pengembangan SHG, jasa keuangan mikro, institusionalisasi dan pembangunan kapasitas manajemen.
	Jenis kegiatan	- Identifikasi kelompok sasaran. - Membantu pembentukan <i>self-help group</i> (SHG). - Penyediaan pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan <i>income-generating</i> dan kesempatan yang tersedia, terutama bagi perempuan. - Membantu <i>self-help group</i> memformulasikan dan mempresentasikan rencana usaha. - Menyediakan akses ke fasilitas tabungan dan kredit. - Menyediakan <i>ongoing advice</i> , pelatihan dan dukungan sejalan dengan berkembangnya kelompok.
	Wilayah pelaksanaan	Pada 12 propinsi, 122 kabupaten, 1.043 kecamatan dan 6.552 desa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan.
	Sasaran	Masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan.
	Pendanaan	Pinjaman: - ADB: US\$78.6 juta. - International Fund for Agricultural Development: US\$24.9 juta. - Pemerintah: US\$25.2 juta. - BRI: US\$8.3 juta.
	Waktu pelaksanaan	Tahap III: Juli 1998-September 2005. (Tahap I: 1979-1985; Tahap II: 1989-1998).

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian akan bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan staf pengelola dan lapangan, - identifikasi keluarga berpenghasilan rendah, - pembentukan SHG, - pemilihan usaha, - pelatihan keterampilan, - dukungan aplikasi pinjaman, - pemantauan pengembalian kredit. <p>Lembaga ini juga mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara informasi manajemen pemantauan dan evaluasi dan sistem penilaian dampak.</p> <p>Di bawah pengawasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Unit Implementasi Proyek Penciptaan Pendapatan Pedesaan akan didirikan dengan manajer proyek dengan tingkat yang sesuai. Unit Implementasi Proyek propinsi berada di bawah manajer proyek propinsi dan unit kabupaten berada di bawah manajer proyek kabupaten (dengan satu atau dua staff dinas pertanian kabupaten). Kedua unit tersebut didirikan untuk menyediakan manajemen operasional setempat. Namun, langkah ini mungkin perlu dimodifikasi dengan adanya desentralisasi.</p> <p>BRI akan bertanggung jawab atas penerimaan tabungan kelompok, penilaian pinjaman, pencairan dan pembayaran kredit, serta resiko kredit.</p> <p>Komite pengarah proyek yang diketuai oleh BAPPENAS akan terdiri dari perwakilan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, BRI dan Departemen Keuangan. Komite ini akan memiliki peran pengawasan menyeluruh atas pelaksanaan proyek dan akan menjadi penghubung dengan instansi-instansi pemerintah lainnya.</p>
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek ini menargetkan terbentuknya sebanyak 74000 SHG pada tahun 2005, tetapi sampai bulan Juni 2002 telah terbentuk sebanyak 70.914 SHG (dari tahap I –III), 60% diantaranya adalah perempuan. - Proyek ini menargetkan 800.000 keluarga di 12 propinsi. - Pada 30 Maret 2001, telah berdiri 7.814 gabungan KPK, 44 di antaranya telah mempunyai status resmi sebagai koperasi simpan pinjam juga sebagai koperasi lainnya. Sebanyak 22 koperasi berlokasi di Jawa Tengah. Sementara yang lainnya sedang mencari sertifikat sebagai Institusi Keuangan Mikro pedesaan.
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
1.2	Nama upaya	Technical Assistance for the Rural Income Generation Project Phase III/TA 2634
	Deskripsi upaya	Upaya ini merupakan salah satu komponen pendukung Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) Fase III.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	ADB dan Departemen Pertanian
	Instansi terkait	<i>Executing agency:</i> Departemen Pertanian. Departemen Pertanian akan mengimplementasikan kegiatan ini melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Pedesaan dan BRI.
	Tujuan upaya	Membantu pemerintah mempersiapkan proposal terperinci proyek penciptaan pendapatan (<i>income-generating</i>).

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi masyarakat miskin pedesaan dalam membentuk dan memperkuat <i>self-help group</i> (SHG). - Mendorong mobilisasi tabungan di antara anggota SHG. - Menyediakan dukungan keuangan dan kelembagaan untuk menjalankan berbagai kegiatan penciptaan pendapatan (<i>income-generating</i>). - Memperkuat perantara informal untuk melengkapi lembaga keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat berpenghasilan rendah dan peminjam tanpa agunan di tempat terpencil.
	Wilayah pelaksanaan	15 propinsi
	Sasaran	Kelompok miskin di pedesaan di 15 propinsi dengan desa-desa IDT sebagai prioritas. Selain <i>poverty incidence</i> , kriteria pemilihan kabupaten dan desa di propinsi target akan mencakup ketiadaan akses ke jasa dan lembaga keuangan. Faktor lain adalah prospek kegiatan yang akan intensif tenaga kerja, membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, menggunakan teknologi sederhana, serta memanfaatkan bahan mentah setempat. Pengembangan prospek SHG juga akan dipertimbangkan. Segmen khusus masyarakat miskin pedesaan yang akan menjadi target dalam proyek ini akan ditentukan dalam persiapan proyek.
	Pendanaan	Biaya total US\$764.000 (US\$503.000 dalam mata uang asing dan dalam rupiah setara US\$261.000). Semua biaya dalam mata uang asing dan dalam rupiah nilainya setara US\$201.000 dengan total US\$704.000 dibiayai bersama oleh ADB (US\$493.000) dan FAO (US\$211.000). TA yang dibiayai oleh ADB akan berupa hibah. Pemerintah Indonesia akan membiayai sisanya dalam rupiah senilai US\$60.000.
	Waktu pelaksanaan	Bantuan teknis ini diimplementasikan dalam 4,5 bulan selama tahun 1997-1998, sebelum pelaksanaan P4K tahap III.
	Mekanisme pelaksanaan	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pertanian akan menunjuk <i>senior counterpart officer</i> yang akan bertanggung jawab atas pengawasan harian dan koordinasi kegiatan bantuan teknis ini, termasuk pemantauan kemajuan dan pemecahan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Komite pengarah, yang diketuai oleh pejabat senior Bappenas dan terdiri atas perwakilan dari Departemen Pertanian, BRI, Bank Indonesia dan lainnya, akan mengawasi implementasi kegiatan ini.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	
	Potensi	
1.3	Nama upaya	Micro Credit Program (MCP) –Program Kredit Mikro (PKM)/Loan No 1327 – INO
	Deskripsi upaya	Proyek ini menempatkan usaha mikro sebagai salah satu cara yang efektif dan berbiaya kecil dalam penciptaan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan kepada usaha mikro menjadi sangat penting dan diperlukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - ADB - Bank Indonesia (<i>executing agency</i>) - BPD (Bank Pembangunan Daerah) - BPR (Bank Perkreditan Rakyat) - LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) - NGO
	Instansi terkait	Bank Indonesia
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa. - Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<p>Proyek ini terdiri dari empat komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan pinjaman kepada penduduk miskin dan hampir miskin untuk mengembangkan usaha kecil, sederhana, dan berbiaya kecil, melalui penyediaan kredit dari anggota SFI (<i>Small Financial Institution</i>); - memperkuat SFIs atau lembaga keuangan mikro-kecil dalam menyediakan jasa keuangan skala kecil yang layak dan efisien, untuk mendukung pengembangan dan mekanisme usaha yang berkelanjutan dari usaha mikro melalui penyediaan kredit dan pelatihan; - memperkuat NGO untuk dapat mengelola dan melayani SHGs (<i>Self Help Group</i>) dengan pelatihan yang tepat dan untuk dapat memberikan jasa-jasa lain yang diperlukan dalam kegiatan penciptaan pendapatan, di antaranya melalui seleksi usaha yang tepat, formulasi rencana usaha kelompok, serta pengelolaan kegiatan simpan pinjam, - memperkuat kemampuan BI dalam melaksanakan, memonitor, dan mengawasi SFIs dan NGO dalam menyediakan jasa keuangan dan pengembangan usaha mikro.
	Wilayah pelaksanaan	<p>Proyek ini pada awalnya dilaksanakan di 5 propinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan NTB. Namun krisis ekonomi telah menyebabkan jumlah kredit ADB meningkat sebanyak empat kali. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, maka jumlah daerah penerima ditambah menjadi 15 propinsi yaitu: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.</p> <p>Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah SFI yang kuat secara finansial serta memiliki kapasitas yang mencukupi untuk ikut serta di dalam proyek; - Kemampuan dari BPD setempat untuk mengawasi dan mendukung lembaga keuangan bukan bank (LDKPs) dan ketersediaan cabang Bank Indonesia untuk mengawasi BPD dan BPR di daerah tersebut;. - Kemiskinan yang tinggi (<i>high poverty incidence</i>) di daerah tersebut.
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk miskin di desa termasuk perempuan, yang berada di garis kemiskinan, terdapat di daerah-daerah yang tidak termasuk dalam program IDT serta tidak memiliki akses kepada lembaga kredit. - Sasaran proyek ini adalah 300.000 peminjam, 33% diantaranya adalah penduduk miskin di beberapa sektor: perdagangan: 49%, pertanian: 27% dan manufaktur: 24%.
	Pendanaan	<p>Total dana sebesar USD42,5 juta, dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman dari ADB: SDR17.469.000 atau sama dengan USD25,7 juta. - Hibah dari pemerintah Norwegia: USD1 juta, untuk pelatihan dan konsultasi. - Dana pemerintah Indonesia: USD16,8 juta.
	Waktu pelaksanaan	<p>Menurut kesepakatan awal, program akan berlangsung dari tanggal 21 Juli 1995-30 Juni 2000. Namun program ini sempat terhenti selama 1 tahun, menyusul diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat serta ketidakpastian menyangkut peran BI, yakni apakah BI masih bisa menjalankan fungsinya sebagai <i>executing agency</i>. Oleh karena itu, untuk tetap bisa melaksanakan program di 10 propinsi tambahan, maka atas kesepakatan antara pemerintah Indonesia, BI, dan ADB, program ini diperpanjang 1 tahun, sampai dengan 31 Desember 2001.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman diberikan baik kepada kelompok maupun individu melalui KSP (Kelompok Simpan Pinjam) dan KPM (Kelompok Pengusaha Mikro) dengan tingkat suku bunga 2,5%-3% per bulan (<i>market rate</i>), dengan jumlah pinjaman berkisar antara Rp2 juta- Rp5 juta per nasabah. - Kredit diberikan kepada BPD (Bank Pembangunan Daerah), yang akan disalurkan lagi kepada lembaga keuangan mikro-kecil (<i>SFIs</i>, terdiri dari 226 LDKP dan 843 BPR). - <i>SFI</i> kemudian akan menyalurkan dana tersebut ke sub-peminjam (<i>sub borrowers</i>), yaitu kepada kelompok pengusaha mikro. <i>SFI</i> memilih <i>sub-borrowers</i> berdasarkan kriteria: kemampuan mereka secara finansial, <i>performance</i> peminjaman terdahulu (<i>past borrowing performance</i>), rekomendasi dari NGO atau pemimpin masyarakat, besarnya jumlah tabungan di <i>SFIs</i> dan tersedianya jaminan dengan nilai yang lebih besar daripada Rp500.000,- - Kredit dari <i>SFIs</i> tersebut, yaitu sebesar 70% akan diberikan kepada individu, sedangkan sisanya, 30% akan diberikan kepada kelompok. <p><u>Dalam proyek ini BI berperan dalam:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - memilih <i>SFIs</i>, NGO, konsultan, dan BPD yang akan terlibat dalam proyek ini; BI memilih <i>SFIs</i> yang kuat secara finansial, - mengawasi dan memonitor kinerja <i>SFIs</i> dan NGO dalam mencapai tujuan program. <p><u>Peran NGO adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - membantu pembentukan kelompok, - membantu mempersiapkan rencana usaha, - membantu kelompok dalam menyiapkan formulir pinjaman kepada <i>SFIs</i>, - membantu kelompok dalam pengembalian pinjaman, - memobilisasi dana. <p><u>Dasar pemilihan NGO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam kegiatan mobilisasi dana dalam kelompok dan dalam membantu <i>SFIs</i> dengan kredit mikro di daerah yang bersangkutan; - mempunyai kapasitas yang memadai dalam hal tenaga lapangan, administrasi, dan keuangan untuk mendukung proyek; - mempunyai kapasitas dan kemauan untuk membantu pembentukan kelompok.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pendapatan keluarga. Rata-rata pendapatan keluarga peminjam individu maupun kelompok meningkat lebih tinggi daripada target, yaitu sebesar Rp 633.000. - Walaupun tidak berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan (berkaitan dengan karakteristik usaha mikro yang kebanyakan tidak mempekerjakan karyawan), namun proyek ini memberikan kontribusi pada stabilnya usaha mikro dan meningkatkan jumlah hari kerja mereka dalam setahun. - Jumlah peminjam perempuan lebih besar daripada target (di beberapa provinsi hal ini ditunjang tradisi setempat bahwa perempuan telah memainkan peran yang penting dalam usaha mikro sejak dulu, contohnya di Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, Sumatra Utara dan Jawa Timur). Namun demikian, meskipun jumlah peminjam perempuan lebih besar dari target (33%), tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan di hampir setiap usaha mikro tetap sama, tidak ada peningkatan, baik sebelum atau sesudah menggunakan kredit. Hal ini karena secara tradisi perempuan telah memainkan peranan yang penting dalam usaha mikro, seperti yang telah disebutkan diatas. - Terdapat peningkatan kualitas dan kapasitas <i>SFIs</i> setelah terlibat dalam proyek ini. Jumlah <i>Sfi</i> yang kredibel meningkat dari 47,44% menjadi 73,07%.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuk 9000 SHG, dengan jumlah anggota sebanyak 90.000 orang. - Telah melatih 4500 SFIs dan 121 supervisor. - Realisasi program ini lebih besar dari target; dari total 801.103 peminjam, 57% diantaranya mengalami peningkatan pendapatan, 49% adalah perempuan, dengan komposisi: 484.625 adalah nasabah baru dan 316.478 adalah nasabah lama (<i>repeated borrowers</i>) - Dari total tersebut, 40% adalah nasabah miskin, 36% adalah mereka yang "hampir miskin" dan 52% nya adalah perempuan. - Sampai bulan November 2001, sebanyak 65 NGO berpartisipasi aktif dalam membantu orang miskin. Mereka berhubungan dengan 147.148 anggota SHGs dan SFIs: 47% atau 69.188 adalah laki-laki 53% atau 77.959 adalah perempuan. <p>Program ini bisa dikatakan sukses, karena BI sebagai <i>executing agency</i> benar-benar mengawasi BPR-BPR mana saja yang layak untuk diberikan kredit.</p>
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - <i>High rate of interest (tingkat suku bunga yang tinggi)</i> di masa krisis yang mencapai 60% di tahun 1998, menyebabkan kondisi yang sangat tidak kondusif bagi BPR untuk mengambil kredit. Sebagian BPR mengembalikan pinjamannya kepada Bank Indonesia untuk menghindari kewajiban membayar bunga yang tinggi, sementara yang lain menunda mengambil kredit yang telah dialokasikan kepada mereka. Perilaku BPR tersebut memperlambat proses <i>disbursement</i> atau penyaluran dana kredit. - Kriteria dari peserta SFIs (LKM) yang ditetapkan oleh ADB untuk berpartisipasi dalam program ini terlalu sederhana, sehingga memperbesar resiko dalam penyaluran dana. Namun, hal ini telah ditindaklanjuti oleh BI dengan menetapkan kriteria yang baru.
	Status saat ini	Di tingkat pusat program sudah selesai, tetapi di daerah masih berjalan.
	Potensi	
1.4	Nama upaya	Community Empowerment for Rural Development Project (CERD) /Loan No. 1765/1766
	Deskripsi upaya	<p>Proyek ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dari sekitar 425.000 orang atau 85.000 keluarga. Melalui proyek ini diharapkan terjadi peningkatan ke atas garis kemiskinan pada 370.000 orang atau 74.000 keluarga miskin, di 11 kabupaten di 6 propinsi.</p> <p>Proyek ini mempunyai empat komponen, salah satunya adalah keuangan mikro yang mendukung terbentuknya kelompok/organisasi simpan pinjam pada tingkat komunitas (<i>Community Based Savings and Loan Organisation-CBSLO</i>) di 750 desa di Kalimantan dan Sulawesi.</p>
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	ADB, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
	Instansi terkait	<i>Executing agency</i> : Departemen Dalam Negeri.
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan masyarakat pedesaan dengan memperkuat kapasitas mereka untuk merencanakan dan mengatur kegiatan pembangunan sendiri. - Mendukung investasi, menjembatani hubungan desa-kota, membangun infrastruktur di desa untuk mengembangkan produktivitas pertanian dan usaha nonpertanian. - Mendukung program pemerintah dalam mendelegasikan sumber daya pembangunan ke pemerintah daerah. - Memperkuat kapasitas institusional dan sumber daya manusia, sehingga memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya (lanjutan)	<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan kendala-kendala pada jasa keuangan formal. - Mengatasi kurangnya dukungan institusional dari kabupaten dan kelompok pengusaha di perkotaan. - Mendukung proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, mendelegasikan sumber-sumber daya pembangunan pada pemerintah daerah dan masyarakat. - Mendukung pelatihan formal-informal serta proses pengambilan keputusan yang akan memberikan kapasitas yang dibutuhkan kepada masyarakat lokal dan pemerintah untuk dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan.
	Jenis kegiatan	<p><u>Program ini mempunyai empat komponen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan kapasitas (<i>capacity buiding</i>) dalam mendesentralisasikan proses perencanaan pembangunan; - mengembangkan institusi keuangan pedesaan, mendukung berdirinya kelompok simpan pinjam (<i>CBSLOs-Community Based Saving Landing Organisations</i>) di 750 komunitas pedesaan di Kalimantan dan Sulawesi, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usaha mikro. <p>Jenis kegiatan dalam komponen ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan pelatihan kepada 2250 warga di 750 desa untuk dapat membuat proposal usaha mikro yang layak secara finansial, - Mobilisasi tabungan, - Menyalurkan pinjaman lunak kepada 750 kelompok simpan pinjam masyarakat untuk mengembangkan usaha; - perbaikan infrastruktur pedesaan, mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan untuk kelompok masyarakat tertentu dalam upaya menghubungkan masyarakat miskin dengan pasar; - Menyediakan dukungan dalam pengelolaan dan pemantauan proyek. <p><u>Kegiatan lainnya adalah:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan pelatihan untuk mendukung usaha mikro dan usaha kecil. - Memberikan bantuan dan pelatihan kepada BPD untuk meningkatkan kapasitas mereka.
	Wilayah pelaksanaan	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.
	Sasaran	<p><u>Umum:</u> Meningkatkan pendapatan 370. 000 orang atau 74. 000 keluarga miskin ke atas garis kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro dan usaha kecil di pedesaan serta memperbaiki infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan akses ke pasar dan jasa sosial dan kesehatan.</p> <p><u>Khusus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari program pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat lokal dan jasa keuangan bagi usaha mikro (sebagian besar diharapkan dimiliki oleh perempuan). - Program ini diharapkan akan memberi manfaat kepada sekitar 550.000 orang dari 110.000 keluarga atau setara dengan 4% dari jumlah populasi melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan usaha dan ketenagakerjaan. - Sekitar 1,1 juta orang atau 220.000 keluarga akan mendapatkan manfaat dari program perbaikan infrastruktur pedesaan. <p><u>Target program lembaga keuangan desa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekitar 2.250 penduduk desa di 750 desa akan dilatih untuk membuat proposal usaha mikro yang layak secara finansial. - Memobilisasi dana. - Menggulirkan pinjaman kecil kepada 750 CBSLOs untuk disalurkan ke usaha mikro.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Pinjaman dari ADB sebesar US\$115 juta, dengan perincian US\$65 juta kontribusi ADB dan US\$50 juta dana ADF. Kontribusi pemerintah Indonesia sebesar US\$55,2 juta, yang disetujui pada tahun 2000. Total pendanaan adalah US\$170,2 juta.
	Waktu pelaksanaan	
	Mekanisme pelaksanaan	<p><u>Mekanisme pengembangan institusi keuangan desa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok simpan pinjam (CBSLOs) yang akan dilatih untuk mendukung usaha mikro dan usaha kecil serta menyediakan infrastruktur di pedesaan untuk mengembangkan hubungan desa-kota. - Menyalurkan kredit sebesar US\$15 juta melalui <i>subsidiary loan agreement</i> kepada 6 BPD. - BPD-BPD tersebut kemudian akan menyalurkannya lagi kepada kelompok simpan pinjam (CBSLOs) yang telah terbentuk dengan bunga SBI ditambah maksimum 8 % poin (kira-kira sebesar 20%). - KSP/CBSLO yang bersangkutan kemudian akan meminjamkannya kepada anggota mereka dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan sendiri (30%-33%). - Pinjaman yang dikembalikan ke BPD oleh KSP/CBSLO akan digulirkan kepada KSP/ CBSLO yang lain. - Dirjen PMD bertanggung jawab dalam pelaksanaan program secara keseluruhan dan berkoordinasi dengan lembaga pelaksana lainnya. <p><u>Mekanisme pemilihan kecamatan untuk program pengembangan lembaga keuangan desa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpenduduk minimal 1500 keluarga. - Desa yang dituju adalah desa IDT, agar dapat mencapai penduduk miskin sebanyak-banyaknya. - Memiliki hubungan yang potensial dengan pusat pertumbuhan daerah. - Mempunyai akses yang memadai sepanjang tahun. - Tidak terlibat dalam program infrastruktur desa yang dilaksanakan oleh World Bank atau JBIC pada saat yang bersamaan. <p><u>Mekanisme kegiatan lainnya:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi sosial. - Pelatihan sumber daya manusia. - Perencanaan desa; setiap desa akan membuat rencana pembangunannya sendiri sesuai dengan kebutuhan. - Mengorganisasi perempuan dengan membentuk kelompok-kelompok.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
1.5	Nama upaya	Technical Assistance to The Republic of Indonesia for Preparing The Development of Rural Urban Linkage Project /TA 3088 INO
	Deskripsi upaya	Bantuan teknis (<i>technical assistance</i>) merupakan komitmen ADB kepada pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan proyek investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	ADB dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negri.
	Instansi terkait	Departemen Dalam Negri.

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<u>Umum:</u> Mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. <u>Khusus</u> - Menyediakan infrastruktur pedesaan. - Memobilisasi tabungan dan memberikan kredit kepada anggota kelompok simpan pinjam yang akan terbentuk. - Menyediakan tambahan pinjaman kepada usaha mikro dan usaha kecil dengan bunga pasar melalui BRI atau bank lokal lainnya. - Memperkuat lembaga lokal lainnya di pedesaan seperti LKMD. - Mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi model usaha mikro dan kecil yang layak sebagai bentuk dukungan kepada KSP.
	Jenis kegiatan	Proyek ini meliputi kegiatan kredit mikro, yang melibatkan bank dan kelompok masyarakat sebagai perantara dalam menyalurkan dana ke pengusaha-pengusaha di desa. Selain itu, proyek ini juga mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan. Kegiatan lainnya meliputi: - Mengkaji strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. - Mengkaji ulang hasil-hasil penelitian, proyek dan program yang didukung oleh lembaga-lembaga asing. - Mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan. - Mempersiapkan acuan profil sosial ekonomi dan melakukan survey <i>needs assessment</i> pada para penerima program. - Mengusulkan/mengajukan metodologi pelatihan yang tepat. - Memformulasikan secara rinci ruang lingkup dan komponen program. - Melakukan pengujian awal pada lingkungan proyek dan pada kegiatan ekonomi yang diusulkan. - Melakukan penilaian pada kemampuan Dirjen PMD sebagai <i>executing agency</i> .
	Wilayah pelaksanaan	Pada 6 provinsi di Indonesia Timur, meliputi 72 kecamatan di 11 kabupaten.
	Sasaran	Sebanyak 750 desa miskin di 6 provinsi di Indonesia Timur.
	Pendanaan	Pinjaman sebesar US\$1,11 juta.
	Waktu pelaksanaan	May 1999-November 1999
	Mekanisme pelaksanaan	Desa dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan, kedekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan (kota) dan ketersediaan produk dan jasa yang potensial untuk diberikan kepada pusat pertumbuhan tersebut.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
ADB-TA		
1.6	Nama upaya	ADB SME Development Technical Assistance No. 3417 – INO
	Deskripsi upaya	Merupakan program ADB dalam memberikan bantuan teknis nonfinansial.
	Penanggung jawab	ADB-TA.
	Pelaksana	ADB-TA, Consortium of GFA Management dan Swisscontact Services for Asian Development Bank.
	Instansi terkait	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Depperindag.
	Tujuan upaya	Merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja serta membuat usulan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.
	Jenis kegiatan	- Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator usaha. - Peningkatan efisiensi pasar jasa pengembangan usaha (<i>Business Development Service</i>). - Peningkatan akses usaha kecil ke kredit komersial. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara memberikan rekomendasi kebijakan, mengkaji berbagai peraturan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan UKM.

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Selatan (Kabupaten Pare-pare dan Kabupaten Bulukumba) dan Jawa Tengah (Kabupaten Pati dan Kabupaten Sragen).
	Sasaran	Pemerintah, penyedia BDS dan UKM.
	Pendanaan	Pinjaman program
	Waktu pelaksanaan	Februari 2001- 2004
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Sebagian kegiatan masih berjalan.
	Potensi	
2.The Asia Foundation		
2.1	Nama upaya	Konferensi Nasional (Konas) III
	Deskripsi upaya	Upaya ini merupakan forum bagi usaha kecil dan menengah untuk menyuarakan isu-isu yang relevan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah dari sudut pandang kebijakan publik.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	The Asia Foundation, Forum Daerah (Forda) UKM Yogyakarta, bekerja sama dengan Swisscontact, Asiagateway.com, Mitra Ventura Indonesia, dan Bahana Artha Ventura.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Agar pemilik usaha kecil dan menengah dapat mengembangkan jaringan usaha yang mempunyai kemampuan melakukan advokasi kebijakan usaha dan menciptakan jaringan usaha sesama usaha kecil dan menengah. - Untuk menggali kesempatan usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Konferensi/rapat bidang - Pameran - Temu bisnis
	Wilayah pelaksanaan	Yogyakarta
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - LSM yang tertarik pada advokasi usaha - UKM anggota Forum Daerah
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp300.000.000 dari USAID melalui The Asia Foundation.
	Waktu pelaksanaan	29-30 Agustus 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<p>Konferensi Nasional yang diikuti oleh beberapa peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 Forda UKM dari 14 propinsi, - 5 propinsi peninjau (PUPUK Sumbar, NTB, Suloh Aceh, Riau, Kaltim). - 79 pengusaha dari 14 Forda, - 11 peserta dari 14 mitra lokal pendamping Forda, - 32 pengusaha nonForda, - 10 peserta dari LSM.
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.2	Nama upaya	Survey of Barriers on Trade/Investment in Central Java
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	The Asia Foundation, Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED), dan Universitas Kristen Satya Wacana.
	Instansi terkait	Pemerintah propinsi Jawa Tengah
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data empiris mengenai hambatan perdagangan dan investasi pada tingkat propinsi. - Membuat rekomendasi mengenai bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan bagi perdagangan dan investasi di Jawa Tengah. - Menghapus peraturan yang menghambat usaha kecil dan menengah. - Mempermudah perizinan bagi usaha kecil dan menengah.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Survei - Seminar - Workshop regional - Kebijakan advokasi
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kota Semarang dan Kabupaten Salatiga)
	Sasaran	
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp211.000.000 dari USAID melalui The Asia Foundation.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000-2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil/Realisasi Target	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
2.3	Nama upaya	Survey of Barriers on Trade/Investment in West Kalimantan and Borders Near Serawak
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	The Asia Foundation dan Center for Agricultural Policy Studies (CAPS) bekerja sama dengan Center for Economic and Social Studies (CESS), Yayasan Madanika (Pontianak), Forda UKM Kalimantan Barat dan Serawak Development Institute
	Instansi terkait	Pemerintah provinsi Kalimantan Barat
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data empiris mengenai hambatan perdagangan dan investasi pada tingkat provinsi. - Membuat rekomendasi mengenai bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan bagi perdagangan dan investasi di Kalimantan Barat dan Perbatasan Serawak. - Menghapus peraturan yang menghambat usaha kecil dan menengah. - Mempermudah perizinan bagi usaha kecil dan menengah.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Survei - Seminar - Workshop regional - Kebijakan advokasi
	Wilayah pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Barat - Perbatasan Serawak
	Sasaran	
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp274.000.000 dari USAID melalui The Asia Foundation.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2000-2001
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
3. Australian Agency for International Development (AusAID)		
3.1	Nama upaya	Community Development Program through Bee-Raising Activities
	Deskripsi upaya	Kegiatan ini merupakan alih pengetahuan tentang beternak lebah kepada LSM dan masyarakat setempat di Dompu dengan tujuan meningkatkan keterampilan mereka.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Pengembangan Usaha Mandiri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak lebah.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan dan alih pengetahuan - Pembentukan lima kelompok petani - Penyediaan dana bergulir dalam bentuk koloni lebah
	Wilayah pelaksanaan	NTB (Kabupaten Dompu)
	Sasaran	- LSM - Masyarakat setempat
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp246.322.150
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998 Juli 1999-Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	Setelah pelatihan dan alih pengetahuan selesai dilakukan, kemudian dibentuk lima kelompok petani dan disediakan dana bergulir dalam bentuk koloni lebah kepada setiap kelompok.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.2	Nama upaya	Empowerment for Small Trader and Home Industry Activities
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Fatayat NU.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberdayakan pedagang kecil dan industri rumahan.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan lima 5 hari mengenai pengelolaan usaha kecil. - Penyediaan dana bergulir sebesar Rp 5.000.000 untuk 10 kelompok sasaran.
	Wilayah pelaksanaan	Nusa Tenggara Barat
	Sasaran	- Pedagang kecil - Industri rumah tangga
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp74.442.800.
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.3	Nama upaya	Women Income Generation through Duck Breeding
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Bina Mandiri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	- Pendirian pusat pengembangbiakan bebek dengan sistem penetasan. Pusat pembudidayaan bebek ini kemudian berperan sebagai pemasok bebek di NTT. - Penyediaan dana bergulir pada tahun kedua dalam bentuk paket bebek.
	Wilayah pelaksanaan	NTT dan Kupang (Kabupaten Oenesu)
	Sasaran	Kelompok perempuan
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp80.250.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.4	Nama upaya	Local Resources Management for Income Generation
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Lembaga Bina Sakti Masyarakat (LEBBMAS)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memperkenalkan pemanfaatan sumber daya setempat yang ramah lingkungan.
	Jenis kegiatan	- Penyediaan modal bagi kelompok nelayan. - Penyediaan modal bagi kelompok perempuan untuk pengembangbiakan bebek.
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari)
	Sasaran	- Kelompok nelayan - Kelompok perempuan peternak bebek
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp35.000.000.
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.5	Nama upaya	Income Generation for Women and Family in Kendari
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID, Yayasan Pendidikan Muslimat NU, dan Bina Bakti Perempuan Pusat.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	- Pelatihan pengelolaan dana bergulir. - Penyediaan modal sebesar Rp20.000.000.
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari)
	Sasaran	Kader kelompok
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp 35.000.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
3.6	Nama upaya	Home Industry Development for Production of Coconut Oil
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Hijau Sejahtera
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menciptakan pendapatan melalui peningkatan keterampilan perempuan dalam memproduksi minyak kelapa.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Penyediaan modal awal - Penyediaan peralatan
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari)
	Sasaran	Kelompok perempuan
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp42.370.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juni 1998
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
	3.7	Nama upaya
Deskripsi upaya		
Penanggung jawab		
Pelaksana		AusAID dan Yayasan Citra Desa.
Instansi terkait		
Tujuan upaya		Meningkatkan pendapatan perempuan korban pelaksanaan DOM.
Jenis kegiatan		Pengembangbiakan kambing dan bebek.
Wilayah pelaksanaan		Aceh (Desa Rinti)
Sasaran		Perempuan korban operasi DOM
Pendanaan		Hibah sebesar Rp88.700.000
Waktu pelaksanaan		Juli 1998-Juni 1999
Mekanisme pelaksanaan		
Pencapaian hasil		
Masalah		
Status saat ini	Selesai	
Potensi		
3.8	Nama upaya	Income Generation and Productive Employment Creation
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Dian Desa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menciptakan lapangan kerja bagi 1.100 rumah tangga.
	Jenis kegiatan	Pelatihan pemanfaatan kepompong liar dan sisa kulit ikan.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa
	Sasaran	1.100 rumah tangga
	Pendanaan	Hibah Rp493.250.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1998-Juni 1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	

No.	Item	Penjelasan
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3.9	Nama upaya	Silk Worm Farming in Banyumas
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Sosial Bina Sejahtera
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Pelatihan bagi peternak ulat sutera mengenai penanaman daun murbai dan pengembangbiakan ulat sutera ke tahap produksi kepompong.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Tengah (Kabupaten Banyumas)
	Sasaran	Peternak ulat sutera
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp341.464.811
	Waktu pelaksanaan	Juli 1998-Juni 1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai.
	Potensi	
3.10	Nama upaya	Women Capability Strengthening through Small-Scale Economic Activity
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Karya Mandiri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Kabupaten Pacitan)
	Sasaran	Perempuan
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp350.000.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1998-Juni 1999
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	
	Potensi	
3.11	Nama upaya	Community-Based Agribusiness Development
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan PAKTA
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan keterampilan dan kapasitas LSM dan masyarakat setempat dalam menerapkan dan mengembangkan kegiatan agribisnis berbasis lokal.
	Jenis kegiatan	Pelatihan dalam mengembangkan kegiatan agribisnis.
	Wilayah pelaksanaan	NTT (Kabupaten Sumba Barat)
	Sasaran	- LSM - Masyarakat setempat

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp556.960.000.
	Waktu pelaksanaan	Juli 1999-Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3.12	Nama upaya	Improvement of Hand Woven Production
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Tunas Jaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kualitas produk tenunan tangan.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan - Pembentukan skema simpan-pinjam bagi industri tenunan tangan
	Wilayah pelaksanaan	NTT (Kabupaten Ruteng)
	Sasaran	Pengrajin tenunan tangan
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp 38.180.000.
	Waktu pelaksanaan	Juli 1999-Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3.13	Nama upaya	Strengthening Basic Economic Structure to Alleviate Poverty
	Deskripsi upaya	Bekerja sama dengan tiga LSM lokal, upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha kecil.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAid dan Yayasan Duta Bina Bhuana
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kualitas hidup.
	Jenis kegiatan	Penyediaan modal awal bagi usaha kecil.
	Wilayah pelaksanaan	- Kupang - Sumba Barat - Ujung Pandang
	Sasaran	LSM lokal
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp399.820.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1999-Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.14	Nama upaya	Integrated Agriculture
	Deskripsi upaya	Upaya ini memperkenalkan beberapa teknik pertanian lahan kering untuk meningkatkan kualitas kesuburan tanah.
	Penanggung jawab	

No.	Item	Penjelasan
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Ayo Indonesia
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan kualitas kesuburan tanah.
	Jenis kegiatan	- Pelatihan teknik pertanian lahan kering. - Pengembangbiakan ternak dengan sistem bergulir.
	Wilayah pelaksanaan	NTT
	Sasaran	Petani
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp197.078.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1999-Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.15	Nama upaya	Income Generating
	Deskripsi upaya	Pemberian kredit mikro secara bergulir bagi masyarakat miskin kota di Jakarta Barat.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Kesuma
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Penyediaan kredit mikro secara bergulir.
	Wilayah pelaksanaan	Jakarta Barat
	Sasaran	Masyarakat miskin kota Jakarta Barat
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp150.000.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 1999 - Juni 2000
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan.
	Potensi	
3.16	Nama upaya	Sustainable Income Generating
	Deskripsi upaya	Perluasan <i>pilot project</i> pembudidayaan tanaman murbai dan pengembangbiakan ulat sutera.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Dian Desa
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	
	Jenis kegiatan	Budidaya tanaman murbai dan pengembangbiakan ulat sutera.
	Wilayah pelaksanaan	NTT (Kab Maumere)
	Sasaran	- Petani - Peternak
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp 451.392.150
	Waktu pelaksanaan	Juli 2001-Juni 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
3.17	Nama upaya	Development of Wamena Office as Micro Credit Institution
	Deskripsi upaya	Pembangunan kantor lembaga keuangan mikro.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Bina Swadaya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Membangun fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kegiatan kredit mikro.
	Jenis kegiatan	Bantuan sarana (pembangunan kantor)
	Wilayah pelaksanaan	- Jayapura - Jayawijaya - Papua
	Sasaran	LKM
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp 250.800.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 2001-Juni 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3.18	Nama upaya	Economic Improvement for Traditional Fishermen
	Deskripsi upaya	Kegiatan penciptaan pendapatan bagi nelayan tradisional, melalui penyediaan bantuan teknis dan peralatan.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP)
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan nelayan tradisional.
	Jenis kegiatan	- Penyediaan peralatan - Penyediaan bantuan teknis, termasuk pemasaran
	Wilayah pelaksanaan	Sulawesi Utara (Kota Manado)
	Sasaran	Nelayan tradisional
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp173.905.000
	Waktu pelaksanaan	Juli 2001-Juni 2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
3.19	Nama upaya	Goat Breeding
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	AusAID dan Yayasan Sambangdiri
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan pendapatan komunitas.
	Jenis kegiatan	Perbaikan pengembangbiakan ternak kambing.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur
	Sasaran	Peternak kambing
	Pendanaan	Hibah sebesar Rp202.230.000
Waktu pelaksanaan	Juli 2001-Juni 2002	
Mekanisme pelaksanaan		

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
4. Bank Dunia (World Bank)		
4.1	Nama upaya	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Kecamatan Development Project (KDP)
	Deskripsi upaya	Program ini dibuat ketika Indonesia sedang memasuki masa transisi politik dan proses desentralisasi. Prinsip utama program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - partisipasi masyarakat, - transparansi, - keberlanjutan program, - kesederhanaan, - kompetisi.
	Penanggung jawab	Departemen Dalam Negeri dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Dunia. - Pelaksana di tingkat pusat adalah Departemen Dalam Negeri, Ditjen PMD, dan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat. - Pelaksana di tingkat daerah adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan UPKD (Unit Pengelolaan Keuangan Desa).
	Instansi terkait	Departemen Dalam Negeri
	Tujuan upaya	<p><u>Umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. - Meningkatkan kemampuan dan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif. - Pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di pedesaan. <p><u>Khusus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. - Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan. - Menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. - Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat (pemerintah lokal) di desa dan kecamatan dengan membuatnya lebih inklusif, terpercaya dan efektif dalam mempertemukan kebutuhan pembangunan dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. - Mendukung dan merencanakan pembangunan yang partisipatif di tingkat desa. - Mendukung "good governance".
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan modal usaha produktif, terbuka untuk semua jenis kegiatan yang menguntungkan, yang melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. - Pembangunan prasarana/sarana yang menunjang perekonomian desa.
	Wilayah pelaksanaan	<p>Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.</p> <p>Agustus 1998-Agustus 1999: Pada 20 propinsi, 105 kabupaten, dan 501 kecamatan.</p> <p>September 1999-Agustus 2000: Penambahan 269 kabupaten, meliputi 727 kecamatan dengan total 12.269 desa</p> <p>Desember 2001: meliputi 22 propinsi, 130 kabupaten, 984 kecamatan, 15.481 desa, dan mencapai 35 juta penduduk miskin.</p>

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Sasaran utama adalah penduduk miskin. Sedangkan sasaran lokasi penerima adalah kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal dan jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak.
	Pendanaan	<p>Pinjaman Bank Dunia - IBRD (Loan No 4330-IND)</p> <p><u>Tahap I</u> WB: USD225 juta, ditambah USD48,2 juta dana tambahan. Dari 1998-2002 jumlah dana yang disediakan oleh proyek ini sebesar Rp1,6 triliun (USD1,78 juta), dengan perincian: 73% untuk pembangunan infrastruktur, 23% untuk kegiatan ekonomi, 1% untuk bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p><u>Tahap II</u> Total USD421,5 juta, dengan perincian: IBRD USD208.9 juta, WB USD111.3 juta, GOI USD101.3 juta.</p> <p>Jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk tiap kecamatan berkisar antara Rp350 juta– Rp1 miliar, sesuai dengan jumlah penduduk. Setiap kecamatan mendapat bantuan maksimal tiga kali.</p>
	Waktu pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap I, Agustus 1998-2002 - Tahap II, 2002-2006
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan sasaran dimulai dengan desa yang telah diklasifikasikan sebagai “desa tertinggal” oleh program IDT, dengan mengacu pada data-data Podes. - Data Podes kemudian dikombinasikan dengan data Susenas untuk menentukan desa yang layak serta daftar kecamatan yang mendapatkan prioritas untuk menerima program bantuan tersebut. - Dana untuk masyarakat diterima melalui LKMD, yang disalurkan melalui BRI cabang/unit atau lembaga keuangan setempat lainnya. - Rekening kolektif LKMD ini dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan), yang berada di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab dalam mengatur masalah keuangan di pedesaan, mulai dari memeriksa/menyeleksi proposal pinjaman kelompok, menggulirkan dana pinjaman, mengawasi penggunaan pinjaman dan mengumpulkan pengembalian pinjaman. - Pinjaman dikenakan jasa pinjaman yang dihitung dari sisa pinjaman (perhitungan jasa pinjaman menurun). Besarnya jasa pinjaman minimal sama dengan bunga pasar (bunga pasar BRI) pada saat usulan diverifikasi. - Untuk mengelola program ini pemerintah menyediakan biaya operasional untuk UPK, pelaksana di desa, dan untuk kegiatan pembinaan, serta administrasi. - Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat disepakati dalam musyawarah secara berjenjang. Sanksi terhadap kecamatan secara keseluruhan, adalah tidak diberikannya dana KDP. - Untuk menunjang program ini, di tingkat kecamatan disediakan seorang fasilitator kecamatan yang dibantu oleh fasilitator desa yang berjumlah 2 orang di setiap desa. - Setiap desa dapat mengajukan paling banyak dua usulan kegiatan, satu di antaranya harus terbukti benar berasal dari perempuan. Setiap usulan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan yang berasal dari masyarakat. Nilai satu usulan minimal Rp35 juta dan maksimal Rp150 juta.

No.	Item	Penjelasan
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sebesar USD 40 juta disalurkan lewat kegiatan kelompok simpan pinjam, peternakan, perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga. - Sebanyak 12.000 desa miskin berpartisipasi dalam program ini dengan hampir 10 juta orang sebagai pemanfaatnya. - Lebih dari 18.000 kelompok dari 280.000 desa menerima pinjaman tersebut.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat masalah dalam proses pengembalian pinjaman yang kurang lancar. Pada bulan Maret 2002, pengembalian di tingkat nasional hanya sebesar 45% - 55%. - Mekanisme kurang transparan. - Terjadi penyalahgunaan uang pinjaman. - Terjadi kekeliruan dalam pengelolaan pinjaman - Ada persepsi di masyarakat desa bahwa pinjaman pemerintah adalah hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. - Program ini mempunyai masalah dalam hal pengelolaan dan KKN. - Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat. - Fungsi tenaga ahli/konsultan yang kurang memuaskan serta persiapan yang tidak terencana dalam meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan. - Mengingat berbagai masalah yang muncul di atas, maka mengadopsi konsep kredit sebagai bagian dari pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati. <p><u>Pengalaman:</u> Ada kebutuhan peningkatan kualitas pelatihan dan <i>capacity building</i> dari pemanfaat KDP, yaitu dalam hal penggunaan pendekatan "open-menu", perbaikan sasaran, peningkatan partisipasi masyarakat, dan merancang ulang komponen pinjaman untuk menjamin tercapainya keberlanjutan program.</p>
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
4.2	Nama upaya	Sulawesi Agriculture Area Development Project (SAADP)/Loan No. 4007 IND
	Deskripsi upaya	<p>Program SAADP di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berawal pada tahun 1996. Pada tahap awal, program ini dirancang untuk mengembangkan wilayah berbasis pertanian yang antara lain meliputi distribusi ternak, pemberian bantuan sarana pertanian seperti bibit tanaman, sapi atau babi, replikasi teknologi lahan kering, intensifikasi lahan pekarangan, pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dengan didukung penguatan kelembagaan dan komponen pengembangan sistem usaha tani terpadu yang dikelola oleh BPPT Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jenis bantuan yang diberikan tergantung pada kebutuhan dan pada instansi terkait.</p> <p>Namun setelah beberapa tahun berjalan (sampai tahun anggaran 1998/1999) ternyata pelaksanaan program kurang efektif, sehingga manfaatnya kurang dirasakan oleh kelompok sasaran. Selain itu di antara kegiatan yang ada, hanya pemberian kredit mikro yang diminati masyarakat. Sedangkan kegiatan lainnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan antara Ditjen Bangda dan Bank Dunia, fokus kegiatan program ini berubah, menjadi program dengan menggunakan pendekatan Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS). Pendekatan baru ini menekankan pada pengelolaan kredit bergulir dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan masyarakat secara intensif dengan didampingi oleh fasilitator dan tenaga lapangan.</p>
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Dunia - Di tingkat pusat adalah Departemen Dalam Negeri dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. - Di tingkat daerah adalah Bappeda Tingkat I dan II.
	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Departemen Dalam Negeri - Bappeda

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kejadian kemiskinan di Sulawesi Tengah dan Tenggara; - Meningkatkan produktivitas dan pendapatan; - Mempromosikan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; - Memperkuat institusi lokal; - Meningkatkan partisipasi penerima dana dalam perencanaan dan pelaksanaan.
	Jenis kegiatan	<p>Sebelum terjadi perubahan pendekatan, kegiatan program terbagi dalam 3 komponen utama, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Usaha Tani (SUTA) terpadu - Pengembangan wilayah berbasis pertanian - Pemantapan jasa pendukung dan administrasi proyek <p>Sedangkan setelah menggunakan pendekatan IMS, perubahan yang terjadi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggabungan beberapa komponen kegiatan yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam komponen IMS, yaitu SUTA, Penggaduhan Ternak (PT), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang dikelola dengan sistem kredit bergulir. - Perubahan pada manajemen proyek; dana proyek IMS disalurkan langsung ke desa dan menjadi aset desa. Dana tersebut dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). Unit ini dibentuk oleh masyarakat desa dengan tugas untuk menyalurkan dan mengelola dana simpan pinjam masyarakat. <p>Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, program ini menjadi terdiri dari 4 komponen kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUTA, baik SUTA lahan kering, lahan beririgasi, hortikultura, pengadaan pupuk, pestisida, pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan, pengepakan, serta tataniaga hasil pertanian. - IMS penggaduhan ternak sapi dan kerbau. - IMS Usaha Ekonomi Produktif (UEP), antara lain pertukangan, kerajinan rumah tangga, perdagangan, warung/kios, jasa pengangkutan, bengkel, penjahit, penggemukan sapi dan kerbau, kegiatan sub sektor pertanian dll. - Pembangunan Pendukung Program IMS (P4-IMS); meliputi pembangunan prasarana jalan usaha tani, pembangunan/rehabilitasi prasarana air bersih, irigasi, kios dll.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
	Sasaran	<p>Keluarga atau kelompok masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, di desa lokasi proyek yang berusaha dalam kegiatan ekonomi desa, khususnya berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, serta pelaku kegiatan ekonomi produktif lainnya seperti pedagang, pengrajin kecil, industri rumah tangga, pengrajin rumah tangga dll. Setiap keluarga/kepala keluarga hanya dibenarkan ikut serta dalam satu paket kegiatan IMS pada satu tahun anggaran.</p> <p>Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa secara umum, pemberian prioritas malah tidak efektif.</p> <p><u>Prioritas bantuan diberikan kepada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok penduduk atau petani miskin yang tidak mempunyai sumber penghasilan. - Kelompok wanita dan pemuda. - Mereka yang tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan proyek lain yang masih berjalan <p><u>Cara menjangkau peserta:</u></p> <p>Pihak yang berminat (petani, peternak, pedagang dll) diminta untuk membuat proposal yang berisi tentang usulan kegiatan, informasi jenis usaha yang dilakukan, rencana penggunaan uang pinjaman dengan dibantu oleh fasilitator (LSM lokal)</p> <p><u>Proposal yang masuk akan dipilih berdasarkan beberapa kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kemiskinan. - Keterangan tempat tinggal (harus penduduk asli setempat) - Informasi tentang ada/tidaknya pinjaman/tunggakan di tempat lain.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis usaha yang diusulkan (merupakan usaha lama atau baru; prioritas diberikan kepada usaha lama) serta sesuai dengan musimnya. - Kemampuan membayar (apakah pihak yang bersangkutan memiliki pendapatan sampingan atau tidak) <p><u>Desa yang terpilih adalah desa miskin yang ditentukan oleh pelaksana kegiatan di tingkat propinsi dan kabupaten dengan kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. - Mempunyai potensi lahan kering/pasar yang dapat dikembangkan. - Berada dalam satu kawasan. - Memiliki keterbatasan infrastruktur ekonomi desa
	Pendanaan	Pinjaman Bank Dunia sebesar USD23,1 juta.
	Waktu pelaksanaan	1999/2000-2002/2003 (Desember 2003)
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana program di tingkat desa terutama dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh UPKD. UPKD dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan disahkan oleh kepala desa. - Tugas-tugas UPKD antara lain mensosialisasikan program, membuka rekening tabungan di bank terdekat, misalnya di BRI Unit Desa, Bank Pos bersama-sama dengan fasilitator (LSM pendamping), dan menyalurkan pinjaman melalui POKMAS . - Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan inisiatif anggota masyarakat yang hendak melakukan usaha dengan mendapat pembiayaan dari UPKD. Pokmas dibentuk berdasarkan kesamaan jenis usaha, atau berdasarkan kesamaan tempat tinggal. Tujuan pembentukan Pokmas adalah sebagai sarana pembinaan dan upaya membangun kerjasama antar anggota masyarakat dalam berusaha. Pokmas biasanya diorganisir dan digerakkan oleh ketua kelompok dan sekretaris kelompok. - UPKD bersama-sama dengan pengurus Pokmas, fasilitator dan aparat desa lainnya menyebarkan informasi tentang program ini kepada masyarakat melalui berbagai cara. Diantaranya dengan memasang papan pengumuman, poster atau brosur di beberapa tempat seperti di balai desa, pasar, halaman rumah ibadah dll. Mereka juga bekerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam memperkenalkan program IMS ini. - UPKD meminta pihak yang berminat (petani, peternak, pedagang) untuk membuat proposal usulan kegiatan dengan dibantu oleh fasilitator. - Setelah itu UPKD akan menyeleksi proposal yang masuk, kemudian memberikannya kepada tim verifikasi di tingkat desa dan tim seleksi di tingkat kabupaten yang selanjutnya akan melakukan pengecekan ke lapangan. - Tahap berikutnya UPKD akan membiayai proposal kelompok yang layak dan telah mendapatkan persetujuan dari tim verifikasi. - Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana bergulir dan disalurkan melalui Pokmas. - Jumlah dana yang digulirkan berkisar antara Rp 50 juta-Rp 100 juta per desa, atau berkisar antara Rp 1,5 juta-Rp 2 juta per orang. Untuk usaha peternakan, jumlah dana yang diberikan maksimal Rp 3 juta. Jika melebihi jumlah tersebut, maka peternak yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank. - Pinjaman berjangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 15% per tahun. Periode angsuran bervariasi tergantung jenis usaha. Angsuran untuk usaha dagang dilakukan sebulan sekali, usaha tani tergantung musim panen, sedangkan untuk usaha penggemukan sapi dilakukan secara sekaligus dalam 1 tahun, atau setelah ternak terjual. - Penalti diberlakukan setelah 12 bulan.

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Dana yang terkumpul dari bunga pinjaman digunakan sebagai dana sosial atau disimpan sebagai modal desa. - Pengembalian pinjaman dilakukan melalui Pokmas. UPKD bertanggung jawab dalam mengawasi proses pengembalian pinjaman dan pengumpulan pengembalian kelompok. - Pihak yang telah selesai mengembalikan pinjaman, masih dapat mengajukan pinjaman lagi tergantung pada banyaknya peminjam di daftar tunggu. Perimbangan pemberian kredit adalah 50%-50% antara peminjam lama dengan peminjam baru.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui program ini telah terbentuk 11.937 pokmas dengan anggota sebanyak 94.125 KK, terdiri dari 52.656 KK di Sultra dan 41.469 KK di Sulteng. Jumlah dana yang terserap oleh pokmas tersebut sampai Oktober 2003 adalah Rp100.622.988.547,- dengan tingkat pengembalian Rp49.542.186.970 atau sebesar 70,73% dari target berjalan sejumlah Rp70.043.105.194. - Pengembangan institusi UPKD dan Pokmas dengan pola pendampingan secara program telah cukup baik, meskipun dalam implementasinya masih ditemui kekurangan. - Terdapat kecenderungan peningkatan kualitas dalam mobilisasi kelompok
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan di tingkat pokmas belum optimal, aspek pemasaran belum mendapatkan penanganan yang baik dari aspek pendampingan oleh fasilitator. - Kondisi UPKD di lapangan masih rapuh, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk membina dan mendampingi setelah team manajemen proyek selesai masa tugasnya. - Pengembalian pinjaman yang tersendat terutama oleh petani. - Rendahnya serapan dana terutama di Sulawesi Tengah karena sering terjadi pergantian LSM pendamping dan proses tender yang sering terlambat.
	Status saat ini	Selesai (berlangsung sampai Desember 2003)
	Potensi	Potensi program ini cukup besar dalam membantu kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, program ini rencananya akan dilanjutkan dengan program lain dengan fokus pada kredit mikro. Berdasarkan pengalaman, kredit mikro merupakan satu-satunya kegiatan yang diminati masyarakat sehingga tetap berlangsung sampai sekarang.
4.3	Nama upaya	IMS-Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (NTAADP)/ Loan No. 3984-IND
	Deskripsi upaya	<p>Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS-NTAADP) merupakan kelanjutan dari proyek NTAADP yang dimulai pada tahun 1996/1997. Pada awal kegiatan, NTAADP lebih ditujukan pada pemberian bantuan sarana pertanian seperti bibit tanaman, sapi atau babi yang diikuti oleh pembangunan infrastruktur, serta pemberian kredit mikro. Jenis bantuan yang diberikan tergantung kebutuhan dan keputusan instansi terkait.</p> <p>Setelah berjalan beberapa tahun dan sesuai dengan kesepakatan antara Ditjen Bangda dan Bank Dunia, fokus kegiatan proyek ini berubah. Perubahan tersebut dilakukan setelah krisis dan setelah melihat bahwa di antara kegiatan yang ada, hanya pemberian kredit mikro yang berjalan dan diminati masyarakat. Sedangkan kegiatan lainnya tidak berjalan sesuai harapan. Program ini akhirnya dikenal sebagai kegiatan Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS), dengan kegiatan utama berupa pemberian kredit mikro.</p>
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Di tingkat pusat adalah Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Departemen Dalam Negeri. - Di tingkat daerah adalah Bappeda tingkat I & II, NGO, universitas, lembaga penelitian, dan IFAD.

No.	Item	Penjelasan
	Instansi terkait	Departemen Dalam Negeri dan Bappeda
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan sistem pertanian dan kegiatan ekonomi produktif. - Membina praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. - Mendukung pemerintah daerah dan perbaikan desa miskin melalui kegiatan penciptaan pendapatan (<i>income-generating</i>). - Meningkatkan kemampuan instansi-instansi lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan pertanian. - Membangun infrastruktur pedesaan dengan inisiatif masyarakat lokal. - Menyediakan bantuan untuk pembangunan regional. - Membina partisipasi berbasis luas pada tingkat masyarakat. - Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal kerja kepada tiga kelompok usaha di bidang: <ul style="list-style-type: none"> - pertanian (SUTA= Sistem Usaha Tani), - pengaduan ternak; sapi atau kerbau (<i>Live Stock Fattening</i>), - kegiatan ekonomi produktif nonpertanian, meliputi usaha perdagangan seperti warung, kios, industri rumah tangga dan kerajinan, dan kegiatan jasa; - melakukan analisis kemiskinan; - memberdayakan dan mengorganisasi masyarakat miskin; - memberikan akses informasi dan modal kepada penduduk miskin; - memberikan bantuan teknis dan strategi pemasaran untuk mendukung kegiatan orang miskin.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh kabupaten di NTB dan NTT.
	Sasaran	<p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para anggota kelompok IDT (Pokmas) yang merupakan masyarakat miskin dan termiskin di daerah tersebut dan berjumlah 10.820 orang sampai dengan Juni 2002. Mereka tergabung dalam kelompok perempuan dan pemuda/pemudi yang belum menjadi peserta proyek lain dan berada dalam daerah yang mempunyai potensi pengembangan wilayah. - Para petani, peternak dan pelaku kegiatan ekonomi produktif lainnya seperti pedagang, pengrajin kecil dan industri rumah tangga, tanpa membedakan jenis kelamin. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberian prioritas terkadang tidak efektif. <p><u>Cara menjangar:</u> Pihak yang berkepentingan (petani, peternak, pedagang, dll.) diminta untuk membuat proposal, yang di dalamnya berisi tentang informasi jenis usaha yang dilakukan, rencana penggunaan uang pinjaman, dll.</p> <p><u>Proposal yang masuk akan dipilih berdasarkan beberapa kriteria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tingkat kemiskinan, - keterangan tempat tinggal (harus penduduk asli setempat), - informasi ada/tidaknya pinjaman/tunggakan di tempat lain, - kemampuan membayar (apakah pihak yang bersangkutan memiliki pendapatan sampingan atau tidak), - jenis usaha yang diusulkan (merupakan usaha lama atau baru; prioritas diberikan kepada usaha lama).
	Pendanaan	Pinjaman Bank Dunia USD22,1 juta.
	Waktu pelaksanaan	1996- September 2003

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Menerapkan mekanisme yang sama dengan program di Sulawesi. Strategi yang diterapkan adalah IMS (Inisiatif Masyarakat setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMS merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan SHG (<i>self-help groups</i>) dengan bantuan UPKD dan institusi lain di tingkat kecamatan. - UPKD dibentuk dan keanggotannya dipilih sendiri oleh warga setempat dan berfungsi sebagai institusi perantara dalam mengelola dana bergulir. - UPKD akan menyeleksi, serta membiayai proposal-proposal kelompok yang layak setelah mendapat persetujuan dari tim verifikasi dan evaluasi di tingkat kecamatan. - Dana bantuan disalurkan oleh KPKM melalui rekening di bank-bank terdekat (BRI unit, Bank Pos). - Pihak yang berminat diminta untuk membuat proposal yang berisi tentang informasi jenis usaha yang dilakukan serta rencana penggunaan kredit. - Jumlah dana yang digulirkan berkisar antara Rp50 juta-Rp100 juta per desa, atau berkisar antara Rp1,5 juta-Rp2 juta per orang melalui mekanisme kelompok. Untuk usaha peternakan, jumlah maksimal adalah Rp3 juta. Jika melebihi jumlah tersebut, maka dianggap peternak yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank. - UPKD bertanggung jawab dalam mengawasi proses pengembalian pinjaman dan pengumpulan pengembalian kelompok. - Jika sudah selesai, dimungkinkan untuk mengajukan pinjaman lagi, tergantung banyaknya peminjam di daftar tunggu. Perimbangan pemberian kredit adalah 50%-50% antara peminjam lama dengan peminjam baru. - Pinjaman berjangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 15% per tahun. Periode angsuran bervariasi tergantung jenis usaha. Angsuran untuk usaha dagang dilakukan sebulan sekali, usaha tani tergantung musim panen, sedangkan untuk usaha penggemukan sapi dilakukan secara sekaligus dalam 1 tahun, atau setelah ternak terjual. Kelompok ibu-ibu di NTB mengembalikan pinjaman mereka setiap hari. Ada bonus bagi mereka yang bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. - Penalti diberlakukan setelah 12 bulan. - Dana yang terkumpul dari bunga pinjaman digunakan sebagai dana sosial atau disimpan sebagai modal desa. - Dalam melaksanakan kegiatannya, UPKD didampingi oleh NGO lokal yang dikontrak oleh Bappeda.
	Pencapaian hasil	<p><u>Mei 2000:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NTT: proyek ini telah melayani 551 kelompok dengan 11 000 keluarga anggota kelompok. - NTB: melayani 874 kelompok dengan 21.000 keluarga anggota kelompok. <p><u>Akhir 2001:</u> proyek ini melayani 6.816 Pokmas dengan 84.372 keluarga. Jumlah pinjaman yang telah dicairkan sampai dengan Juni 2002 adalah Rp41.923 juta dan sudah dikembalikan sebesar Rp22.219 juta. Jumlah peminjam: 58.646 orang. Dana bergulir dikelola oleh 214 UPKD. Terjadi peningkatan usaha, terlihat dari jumlah pinjaman yang makin lama makin banyak, pasar yang semakin luas dan kemampuan keuangan yang lebih tinggi.</p>
	Masalah	<p>Pada awalnya, dana pinjaman banyak diberikan kepada petani, tetapi petani sering menemui kesulitan dalam mengembalikan pinjaman karena berbagai sebab, terutama kondisi cuaca yang buruk, sehingga diadakan penjadwalan ulang. Akibatnya, dana pinjaman yang dialokasikan untuk usaha pertanian hanya tinggal 40%-50%. UPKD lebih cenderung untuk memberikan pinjaman kepada kegiatan ekonomi produktif nonpertanian karena pengembaliannya yang selalu tepat waktu.</p>
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	<p>Program ini cukup diminati oleh masyarakat setempat. Alasannya tingkat suku bunga 15% per tahun dianggap cukup ringan, serta tidak mensyaratkan adanya agunan. Sementara itu, jenis kredit lain tidak mudah diakses oleh mereka.</p>

No.	Item	Penjelasan
4.5	Nama upaya	Bengkulu Regional Development Project (BRDP) / Loan No. 4290-IND
	Deskripsi upaya	Komponen program ini hampir sama dengan program IMS di Sulawesi dan Nusa Tenggara, namun di dalamnya masih terdapat komponen pembangunan infrastruktur sebesar 25%.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Departemen Dalam Negeri
	Instansi terkait	Departemen Dalam Negeri
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan sistem pertanian dan kegiatan ekonomi produktif. - Membina praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. - Mendukung pemerintah daerah dan perbaikan desa miskin melalui kegiatan penciptaan pendapatan (<i>income-generating</i>). - Meningkatkan kemampuan instansi-instansi lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan pertanian. - Membangun infrastruktur pedesaan dengan inisiatif masyarakat lokal. - Menyediakan bantuan untuk pembangunan regional. - Membina partisipasi berbasis luas pada tingkat masyarakat. - Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kredit kepada tiga kelompok usaha di bidang pertanian, pengaduan ternak dan kegiatan ekonomi produktif nonpertanian. - Melakukan analisis kemiskinan. - Memberdayakan dan mengorganisasi masyarakat miskin. - Memberikan akses informasi dan modal kepada penduduk miskin. - Memberikan bantuan teknis dan strategi pemasaran untuk mendukung kegiatan orang miskin. - Membangun sarana dan prasarana desa.
	Wilayah pelaksanaan	Seluruh kabupaten di Bengkulu, kecuali kota Bengkulu.
	Sasaran	Para pelaku kegiatan pertanian, peternakan, pengaduan ternak dan kegiatan ekonomi produktif lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin.
	Pendanaan	Pinjaman Bank Dunia USD15,5 juta.
	Waktu pelaksanaan	Maret 1998-Agustus 2004
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk UPKD atas dasar inisiatif dan keinginan masyarakat setempat. - Membuka rekening di bank terdekat, misalnya di BRI unit atau Bank Pos. - Setiap individu yang ingin mendapatkan pinjaman harus membuat proposal (formatnya sudah tersedia), yang isinya mengenai jenis usaha apa yang dilakukan, rencana penggunaan uang pinjaman, dan kemampuan membayar pinjaman, yang ditunjukkan oleh ketersediaan sumber pendapatan sampingan. - Proposal yang masuk akan diseleksi dan diverifikasi oleh UPKD. - UPKD menggulirkan dana kepada individu melalui mekanisme kelompok. - Tingkat suku bunga mengikuti ketentuan pasar. Bunga pinjaman nantinya digunakan sebagai dana sosial dan menjadi modal desa. - Bappeda memberikan tugas tanggung jawab kepada NGO lokal untuk bertindak sebagai fasilitator dan pendamping UPKD pada saat pelaksanaan di lapangan. - Jangka waktu pengembalian pinjaman bervariasi tergantung jenis usahanya.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
5. The European Union		
5.1	Nama upaya	Small and Micro Scale Enterprise Development as Instrument for Strengthening Self-Help Capabilities and Long Term Development Perspectives in West Java (Project number ONG/PVD/1998/27/FRG)
	Deskripsi upaya	Proyek ini merupakan kerja sama antara The European Union sebagai penyandang dana, FNS (Friedrich Naumann Stiftung) mewakili NGO internasional dan PUPUK Bandung.
	Penanggung jawab	FNS dan PUPUK
	Pelaksana	European Union bersama FNS dan PUPUK
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Memberikan kontribusi pada pembangunan sosial ekonomi usaha mikro-kecil di Jawa Barat dengan mendorong potensi produktif dan kemandirian mereka.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - FNS bersama dengan PUPUK menyediakan bantuan teknis untuk usaha mikro-kecil di Jawa Barat, khususnya yang bergerak pada empat sektor yaitu: agrobisnis, tekstil, kertas, dan logam. - Di tingkat mikro, proyek ini akan membuat "model usaha kecil" - Di tingkat meso, proyek ini memfasilitasi pertemuan antara para pengusaha kecil untuk bekerja sama dan berbagi pengalaman. - Di tingkat makro, fokus dari proyek ini adalah pada kegiatan penelitian dan perumusan kebijakan. - Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pelayanan informasi, konsultasi, kegiatan lapangan, serta memfasilitasi berbagai seminar dan diskusi politik. - Menciptakan pendapatan yang tetap bagi lebih dari 100 rumah tangga, terutama yang bergerak di bidang usaha pengolahan kertas. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi yang sulit, sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan.
	Wilayah pelaksanaan	Pada 3 kecamatan di Jawa Barat
	Sasaran	Pengusaha mikro dan kecil khususnya yang bergerak di empat sektor yaitu: agrobisnis, tekstil, kertas, dan logam.
	Pendanaan	Kontribusi dari European Commission berupa hibah sebesar 500.000 euro dari total anggaran sebesar 1000. 000 euro.
	Waktu pelaksanaan	16 Desember 1998 - Juni 2004
	Mekanisme pelaksanaan	Untuk menciptakan pendapatan yang tetap bagi lebih dari 100 rumah tangga yang bergerak di bidang usaha pengolahan kertas, diberikan kertas bekas untuk diolah lebih lanjut.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
5.2	Nama upaya	Community Based Economic Development through Capacity Building and Income Generation for Marginalized Farmers and Small Scale Entrepreneurs in West Timor and Bali (Project Number: ONG/PVD/019-846/02/ID)
	Deskripsi upaya	Proyek ini didanai oleh The European Commission bekerja sama dengan NGO Eropa, yaitu Evangelische Zentralstelle fuer Entwicklungshilfe E.V beserta LSM mitra lokal, yaitu Yayasan Dana Pertiwi.
	Penanggung jawab	Evangelische Zentralstelle fuer Entwicklungshilfe E.V dan Yayasan Dana Pertiwi
	Pelaksana	European Union bersama Evangelische Zentralstelle fuer Entwicklungshilfe E.V dan Yayasan Dana Pertiwi
	Instansi terkait	

No.	Item	Penjelasan
	Tujuan upaya	<p><u>Tujuan Umum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki kedudukan sosial-ekonomi petani kecil. - Mengurangi ketidakseimbangan internal dan antarregional sehingga dapat tercipta suatu masyarakat yang lebih egaliter. - Meningkatkan kesempatan. - Memberi kontribusi pada organisasi kelompok sasaran agar dapat lebih berperan dalam proses pembangunan. <p><u>Tujuan khusus:</u> Meningkatkan kinerja yang berkelanjutan pada kegiatan ekonomi petani kecil.</p>
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi pelatihan teknik dan manajemen. - Menyediakan dukungan pasar. - Melakukan survei untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pembangunan prasarana. - Menyediakan dana bergulir. - Melakukan kegiatan monitoring program. - Menyediakan bibit yang bermutu kepada para petani. - Melakukan pemantauan, perawatan, dan analisis finansial. - Menjadi jaring penghubung antara pengusaha kecil, menengah, dan besar - Mengadakan seminar.
	Wilayah pelaksanaan	Timor Barat dan Bali
	Sasaran	Usaha kecil dan menengah
	Pendanaan	Kontribusi EU sebesar 750 000 euro
	Waktu pelaksanaan	2002-2005 (proyek ini baru mulai dan akan berjalan paling sedikit selama 3 tahun).
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
5.3	Nama upaya	Small Scale Enterprise Development (Project Number ONG/PVD/1998/180/BE)
	Deskripsi upaya	Proyek ini merupakan kerjasama antara NGO Eropa (NCOS) dengan Yayasan Daya Pertiwi (Indonesia)
	Penanggung jawab	NCOS dan Yayasan Daya Pertiwi (YDP)
	Pelaksana	European Union bersama NCOS (Belgium) dan Yayasan Daya Pertiwi (Jawa Timur).
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan serta keahlian para pengusaha mikro, kecil dan menengah. - Meningkatkan kesejahteraan pengusaha beserta keluarganya.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelatihan manajemen dan teknik produksi. - Menyelenggarakan konsultasi di lapangan. - Menyediakan jasa penghubung bagi usaha mikro dan kecil dengan pelaku ekonomi lainnya. - Membangun hubungan antara pengusaha mikro-kecil dengan bank. - Mendirikan pusat pengembangan dan promosi usaha kecil dan menengah untuk wilayah Indonesia bagian timur.
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Blitar, Malang) dan Bali (Singaraja, Tabanan, Bangli, Klungkung, Gianyar dan Badung).
	Sasaran	Pengusaha mikro, kecil, dan menengah
	Pendanaan	Total biaya sebesar 656.728 euro. Kontribusi EU adalah sebesar 328.365 euro.
	Waktu pelaksanaan	1998-Oktober 2001

No.	Item	Penjelasan
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - YDP memberitahukan kegiatan pelatihan yang mereka lakukan melalui iklan di koran-koran lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas tentang tujuan dari pelatihan tersebut, serta kualifikasi peserta yang diminta, untuk menghindari pelamar yang tidak relevan. - Setelah menyeleksi proposal kegiatan yang masuk, maka YDP bersama mitra lokal melakukan verifikasi ke lapangan.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keahlian dan kemampuan berusaha para pengusaha kecil. - Meningkatnya kerja sama antara usaha mikro dan usaha kecil. - Terbangunnya jaringan yang efektif antara pengusaha, perusahaan besar, pemerintah, dan pihak swasta. - Terjadi perubahan sikap pegawai pemerintah dan pihak swasta dalam melihat UKM. - Kualitas dan keberlangsungan pelayanan yang diberikan oleh YDP meningkat.
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6. International Labour Organization (ILO)		
6.1	Nama upaya	Expansion of Employment Opportunities for Women (Proyek Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan)
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan program spesifik gender dalam pengembangan usaha kecil, kerja sama antara ILO dengan pemerintah Jepang.
	Penanggung jawab	ILO
	Pelaksana	ILO; NGO lokal sebagai <i>Working Group</i>
	Instansi terkait	BAPPENAS, BAPPEDA
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. - Mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial. - Meningkatkan kondisi kerja. - Meningkatkan status perempuan secara keseluruhan. - Membangun kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender di instansi-instansi pemerintah provinsi dan organisasi-organisasi nonpemerintah.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan lapangan pekerjaan, terutama bagi perempuan. - Penyaluran kredit mikro sebagai modal awal dalam bentuk dana bergulir. - Membentuk kelompok-kelompok koperasi, untuk melaksanakan program bisnis selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kegiatan ini juga menggunakan prinsip dana bergulir. - Memberikan pelatihan <i>capacity building</i>. - Advokasi.
	Wilayah pelaksanaan	Sumatra Selatan, (1999-2001) Jawa Barat (Banten), (1998-2001) Kalimantan Tengah, (2000-2001) Sulawesi Tenggara, (1999-2001) Sulawesi Tengah (1999-2001) Lokasi dipilih berdasarkan tingkat meratanya kemiskinan dan berdasarkan luasnya kegiatan ekonomi untuk bisa menghasilkan <i>multiplier effect</i> di lokasi proyek.
	Sasaran	<u>Langsung:</u> Sasarannya adalah penciptaan kesempatan kerja bagi 6.000 perempuan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - perempuan miskin kepala rumah tangga (sasaran utama); - perempuan pekerja mandiri (<i>self-employed</i>) yang miskin di sektor informal di desa maupun kota; - pekerja perempuan di sektor formal perkotaan. <u>Tidak langsung:</u> Lembaga-lembaga tingkat menengah, termasuk lembaga pemerintah dan nonpemerintah di tingkat pusat dan daerah.

No.	Item	Penjelasan
	Pendanaan	Didanai oleh Japan Asian Regional Program bekerja sama dengan ILO.
	Waktu pelaksanaan	Tahun 1998-2001
	Mekanisme pelaksanaan	<p>Untuk kegiatan penciptaan pendapatan (IGA), mekanismenya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memilih kelompok, - memberikan pelatihan (keterampilan, manajemen bisnis, dll.), - menyediakan modal awal (<i>seed fund</i>), - memulai usaha, - memberikan bantuan teknis dalam bidang pemasaran, dll., - Pengembangan selanjutnya. <p>Mekanisme penyaluran dana bergulir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana dari ILO diberikan kepada NGO sebagai <i>working group</i>. - Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada <i>target group</i>.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Program ini bisa dikatakan relatif berhasil. Melalui program ini didapatkan pengetahuan/pemahaman bagaimana mengakses dana/ keuangan melalui bank atau LKM (Lembaga Keuangan Masyarakat). - Program ini berjalan sesuai dengan target, proporsi perempuan penerima manfaat lebih besar daripada laki-laki. Selain itu, sebagian besar penerima manfaat adalah pekerja di sektor informal atau mereka yang tidak mempunyai pekerjaan pada waktu menjadi anggota proyek. - Terjadi peningkatan penghasilan melalui program ini sampai dengan 50%. Kenaikan sebagai hasil dari peningkatan produktivitas tersebut bervariasi di setiap daerah menurut jenis usaha yang dilakukan. - Terjadi peningkatan keterampilan berusaha dan menjalankan koperasi.
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlangsungan proyek (<i>sustainability of project</i>) kurang terjamin karena keterbatasan pengetahuan NGO mitra tentang pola dana bergulir dan keterbatasan kemampuan penerima manfaat (perempuan pengusaha) sehingga setelah dana proyek ditarik, banyak yang usahanya mengalami kesulitan. - Terjadi kesalahan di lapangan dalam menentukan penerima manfaat. Perempuan penerima manfaat tidak selalu perempuan miskin dan tidak adanya bukti tentang penciptaan kesempatan kerja yang ditujukan khusus pada perempuan kepala rumah tangga, walaupun mereka ditetapkan sebagai kelompok sasaran utama.
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
6.2	Nama upaya	Children in Jermal Fishing Platform (Pekerja Anak di Jermal)
	Deskripsi upaya	Dalam upaya menghapuskan pekerja anak di jermal, pada tahun 2004 ILO-IPEC bersama dengan pemerintah daerah Sumatra Utara menandatangani surat perjanjian yang akan ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penyelamatan pekerja anak di jermal.
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	ILO-IPEC
	Instansi terkait	Pemda Sumatra Utara
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pendidikan dan kesempatan lainnya kepada pekerja anak supaya mereka tidak lagi bekerja di jermal yang berbahaya. - Melaksanakan upaya pencegahan, pemantauan, penyelamatan, dan rehabilitasi. - Mendorong perubahan sikap masyarakat dan keluarga mengenai pekerja anak serta mendorong strategi serupa di wilayah-wilayah lain.

No.	Item	Penjelasan
	Jenis kegiatan	<p>Ada empat kegiatan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan dokumentasi - Pemantauan pekerja anak - Perlindungan sosial - Pembangunan kapasitas dan peningkatan wawasan <p>Proyek ini juga mencakup kegiatan preventif sampai rehabilitasi yang bertujuan untuk melindungi para pekerja anak dari pekerjaan yang berbahaya, sekaligus meningkatkan kondisi kerja anak dan orang dewasa.</p> <p>Sebagai pengganti sumber pendapatan yang hilang dan untuk mendukung keluarga anak, maka program ini mengadakan <i>technical program</i> (bekerja sama dengan ITB dan USU untuk bekas pekerja anak tersebut. Kegiatan lainnya adalah <i>sustainable livelihood program</i> bekerja sama dengan NGO lokal. Dalam hal ini, NGO berperan dalam mencari tahu jenis pekerjaan apa yang ingin dilakukan oleh penduduk setempat, bagaimana kondisi pasar dan kondisi persediaan barang, serta cara memasarkan produk, untuk kemudian mengembangkan kegiatan penciptaan pendapatan yang sesuai dengan minat mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga anak-anak yang sudah tidak lagi bekerja di jermal.</p>
	Wilayah pelaksanaan	Sumatra Utara, yaitu di Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan Simalungun.
	Sasaran	Para pekerja anak di jermal
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	Mulai Desember 1999
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melaksanakan programnya, proyek ini menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja maupun organisasi pengusaha. - Metodologi yang digunakan adalah SYB (<i>Start Your Business</i>) dan IYB (<i>Improve Your Business</i>).
	Pencapaian hasil	Sebanyak 300 anak telah berhasil diselamatkan dan 1.200 anak dapat dicegah bekerja di jermal.
	Masalah	
	Status saat ini	
	Potensi	Melalui program ini diharapkan jermal akan terbebas dari pekerja anak pada akhir fase kedua tahun 2004
7. Swisscontact		
7.1	Nama upaya	Business Development Centre (BDC)
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan salah satu kegiatan dari SMEP (<i>Small Medium Enterprise Promotion Project</i>).
	Penanggung jawab	Swisscontact
	Pelaksana	Swisscontact bersama penyedia jasa pengembangan usaha (BDS Provider) di tingkat lokal.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mendirikan pusat pengembangan usaha (BDC) di daerah-daerah, sekaligus membantu penyedia jasa pengembangan usaha (BDS) terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang di Indonesia untuk memasarkan produknya dan menawarkan jasa pendukung sesuai dengan kebutuhan UKM.
	Jenis kegiatan	Mendirikan BDC bekerja sama dengan penyedia BDS di tingkat lokal.

No.	Item	Penjelasan
	Wilayah pelaksanaan	Jawa (Jakarta, Jawa Barat, Semarang, Jepara, Jawa Timur), dan Sulawesi Selatan.
	Sasaran	Penyedia BDS di tingkat lokal.
	Pendanaan	Merupakan gabungan antara dana Swisscontact dengan dana dari penyedia BDS (menerapkan prinsip "sharing" saham).
	Waktu pelaksanaan	1997-2002
	Mekanisme pelaksanaan	Dalam melaksanakan program ini, Swisscontact menerapkan prinsip "sharing" saham, artinya Swisscontact mempunyai <i>share</i> pada saham kegiatan tersebut dengan porsi yang lebih kecil daripada pemilik kegiatan (49:51). Jika kegiatan tersebut gagal, maka <i>share</i> Swisscontact pada usaha tersebut akan hilang, tetapi jika berhasil maka <i>share</i> tersebut akan berubah menjadi aset pemilik kegiatan.
	Pencapaian hasil	Program ini telah berhasil mendirikan 20 BDC (antara tahun 1997-2002) di 6 daerah. Dari 20 BDC tersebut ada yang mampu bertahan ada pula yang tidak.
	Masalah	
	Status saat ini	Selesai
	Potensi	
7.2	Nama upaya	SHARE Program
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan salah satu kegiatan dari SMEP (<i>Small Medium Enterprise Promotion Project</i>).
	Penanggung jawab	Swisscontact
	Pelaksana	Swisscontact bekerja sama dengan The Asia Foundation.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Menciptakan lingkungan makro yang kondusif bagi perkembangan usaha.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama dengan The Asia Foundation memfasilitasi terbentuknya 70 asosiasi kelompok UKM di Indonesia- FORDA (Forum Daerah). - Memfasilitasi dialog kebijakan antara UKM, penyedia BDS, lembaga pemerintah maupun <i>stake holder</i> lainnya (seperti organisasi donor, lembaga perbankan dan media) melalui seminar, lokakarya, diskusi dll. - Memfasilitasi studi-studi yang berkaitan dengan lingkungan usaha, misalnya UU anti monopoli, privatisasi, dan perizinan usaha. - Melakukan "Ten City Survey" pada tahun 1999-2001 bersama The Asia Foundation, serta "Trading House" pada tahun 2001-2002. - Mempersiapkan Dewan Usaha Kecil (<i>Small Business Council</i>), sebuah organisasi yang diharapkan dapat menjembatani UKM dengan pemerintah, serta berfungsi sebagai "Pusat Penerima Keluhan". <i>Pilot project</i> ini dilakukan di daerah Yogyakarta dan Salatiga sejak tahun 2002.
	Wilayah pelaksanaan	Berbagai daerah di Indonesia, di antaranya di Yogyakarta, Salatiga, Jakarta, dll.
	Sasaran	Para <i>stakeholder</i> yang terkait dengan UKM
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	1997-2002
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Telah berdiri 70 FORDA UKM - Merumuskan <i>policy paper</i> - Melaksanakan penelitian
	Masalah	
	Status saat ini	Program ini sebenarnya telah selesai pada tahun 2002, tetapi dilanjutkan kembali tahun 2003.
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
7.3	Nama upaya	Voucher Program
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan bagian dari kegiatan SMEP (<i>Small Medium Enterprise Promotion</i>) yang merupakan bentuk intervensi-subsidi dari sisi permintaan (<i>demand</i>).
	Penanggung jawab	Swisscontact
	Pelaksana	Swisscontact
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk mendorong UKM agar lebih memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pengembangan usaha (BDS) dengan potongan harga.
	Jenis kegiatan	Memberikan <i>voucher</i> (potongan harga) pada UKM yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh penyedia BDS tertentu (penyediaan kartu diskon untuk mengikuti pelatihan).
	Wilayah pelaksanaan	Jawa Timur (Tahun 1999) Jabotabek (Tahun 2001)
	Sasaran	Para penyedia BDS dan UKM.
	Pendanaan	Swisscontact memberikan bantuan dana/subsidi berupa <i>grant</i> pada setiap jenis layanan yang disediakan oleh penyedia BDS. Bantuan yang diberikan tersebut sebesar 50% dari harga layanan atau maksimal sebesar Rp100.000.
	Waktu pelaksanaan	1999-2001
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap awal, Swisscontact menyeleksi para penyedia BDS yang masuk dalam program ini. - Daftar penyedia BDS serta informasi terkait lainnya tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan bersama-sama dengan lembaran <i>voucher</i>. - Kumpulan informasi tersebut lalu didistribusikan pada 47 wartel di Jakarta. - Informasi tentang keberadaan <i>voucher</i> dan lokasi wartel tersebut diberitahukan melalui radio RRI Pro 2 FM. - Bagi pihak yang berminat, terutama UKM dapat membeli <i>voucher</i> tersebut dengan harga Rp2.500.
	Pencapaian hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 10.000 UKM dan 100 penyedia BDS ikut berpartisipasi dalam program ini (85% dari UKM yang berpartisipasi dalam program ini belum pernah menggunakan BDS sebelumnya). - Secara kualitatif, hasil yang dicapai melalui program ini adalah mulai terciptanya transparansi di masyarakat tentang pasar BDS, di mana setiap orang akan tahu siapa penyelenggara pelatihan, jenis kegiatan, lokasi, dan harga pelatihan.
	Masalah	Secara kuantitatif daya serap program ini kecil.
	Status saat ini	Program ini sudah selesai dilaksanakan (karena hanya dimaksudnya sebagai <i>pilot program</i>).
	Potensi	Menambah pengetahuan pengusaha kecil tentang keberadaan BDS, jenis layanan, dan pihak-pihak penyelenggaranya.
7.4	Nama upaya	Quality Improvement (Peningkatan Kualitas Penyedia BDS)
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan kelanjutan dari program BDC yang berakhir tahun 2002 lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyedia BDS.
	Penanggung jawab	Swisscontact
	Pelaksana	Swisscontact
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Untuk meningkatkan kualitas penyedia BDS yang ada, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar, serta mampu meningkatkan daya saingnya di pasar melalui berbagai inovasi dalam penawaran jasa ataupun produk baru.
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan beberapa program pelatihan yang dapat diikuti oleh penyedia BDS yang terpilih. - Menyelenggarakan lokakarya. - Fasilitasi pembentukan jaringan kerja. - Penyediaan jasa konsultasi.
	Wilayah pelaksanaan	Jabotabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Sulawesi.

No.	Item	Penjelasan
	Sasaran	Para penyedia BDS
	Pendanaan	Menerapkan sistem <i>cost sharing</i> .
	Waktu pelaksanaan	Tahun 2002
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan sistem pembagian biaya (<i>cost sharing</i>), program ini ditawarkan melalui tender umum. - Penyedia BDS akan diundang untuk mengirim proposal usaha mereka. - Seleksi dan penilaian terhadap proposal-proposal tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti bukti kinerja yang stabil, pengalaman yang luas, kemampuan berkembang yang menjanjikan, serta daya jual yang baik. - Berdasarkan kriteria tersebut para penyedia BDS yang terdaftar akan dipilih untuk mengikuti program Pengembangan Kualitas BDS. <p>Ada dua pendekatan dalam peningkatan kualitas ini, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Product transfer</i>, dimana lembaga jasa yang ingin mengembangkan produknya mendapat <i>product knowledge</i> dari lembaga lain. - <i>Product development</i>, yakni Swisscontact memberikan bantuan finansial kepada sebuah lembaga jasa untuk dapat mengembangkan sendiri jasa baru.
	Pencapaian hasil	Swisscontact telah berhasil menyelesaikan satu siklus program di Jabotabek, yang menghasilkan produk baru dari sembilan peserta.
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
7.5	Nama upaya	The Information Platform (Sarana Pertukaran Informasi)
	Deskripsi upaya	Program ini merupakan kelanjutan dari program BDC yang berakhir tahun 2002 lalu, di mana pertukaran informasi dianggap sangat penting untuk menunjang pengembangan usaha.
	Penanggung jawab	Swisscontact
	Pelaksana	Swisscontact sebagai fasilitator pertukaran informasi antara penyedia BDS dan UKM.
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan penyediaan informasi tentang <i>supply</i> dan <i>demand</i> .
	Jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang situs www.jasakami.com - Melakukan disseminasi informasi melalui majalah, surat kabar, stasiun radio atau media lain.
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Para penyedia BDS dan UKM
	Pendanaan	
	Waktu pelaksanaan	Mulai tahun 2003
	Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Situs ini memberikan kesempatan bagi penyedia BDS untuk menampilkan informasi mengenai organisasi dan jasa yang ditawarkannya secara terperinci. - Berfungsi sebagai forum bagi UKM untuk menuliskan pendapat dan mengirimkan pertanyaan seputar usahanya.
	Pencapaian hasil	Terciptanya situs www.jasakami.com
	Masalah	Terbatasnya akses para pengusaha kecil dan menengah tersebut pada layanan internet, membuat jasa ini tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka. Sebagai solusinya digunakan sarana lain, seperti radio, media, surat kabar, dan majalah.
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
8. United State Agency for International Development (USAID)		
8.1	Nama upaya	Pengembangan Kelembagaan BRI Unit Desa
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	USAID dan BRI
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Meningkatkan informasi BRI Unit Desa.
	Jenis kegiatan	- Melatih personil Unit Desa - Melakukan penelitian
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	Personil BRI Unit Desa
	Pendanaan	Hibah
	Waktu pelaksanaan	Juli 2000-Juli 2003
	Mekanisme pelaksanaan	BRI Unit Desa dipilih atas dasar kinerja yang baik dalam memberikan kredit dan menyediakan fasilitas simpan pinjam kepada masyarakat.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	
	Potensi	Selesai
8.2	Nama upaya	Dukungan pada UKM dalam Mengakses Kredit dan Layanan Berusaha
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	USAID dan The Asia Foundation
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UKM (usaha kecil dan menengah) dalam mengakses kredit dan pelayanan usaha, dengan cara: - memberi dukungan pada forum regional untuk UKM; - mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat); - mendukung reformasi kebijakan yang menguntungkan UKM. Reformasi kebijakan diharapkan mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu yang dapat menghambat perkembangan UKM, selain meningkatkan alih teknologi dan arus informasi kepada UKM.
	Jenis kegiatan	- Penelitian - Pembentukan forum regional UKM - Advokasi kebijakan
	Wilayah pelaksanaan	
	Sasaran	- UKM - BPR
	Pendanaan	Hibah
	Waktu pelaksanaan	Juli 1997-Juli 2004
	Mekanisme pelaksanaan	Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, The Asia Foundation bekerja sama dengan beberapa institusi lainnya, seperti LSM lokal dan universitas yang banyak melakukan kegiatan advokasi dan penelitian, seperti CESS, CEMSED, Akatiga, dan PKPEK.
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	

No.	Item	Penjelasan
8.3	Nama upaya	SAMBA (Silk and Micro-enterprise Development in Bandung Raya)
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	USAID dan Universitas Bandung Raya
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pengusaha mikro dan menengah ke jasa keuangan dan jasa nonkeuangan. - Membantu memperbaiki kebijakan yang kondusif bagi industri sutera.
	Jenis kegiatan	Mengembangkan pasar jasa keuangan dan nonkeuangan dengan cara meningkatkan kinerja 40 lembaga keuangan mikro dan 50 penyedia jasa pengembangan usaha dalam menyediakan jasa keuangan dan nonkeuangan baik kepada pengusaha sutera berskala mikro maupun kecil.
	Wilayah pelaksanaan	Pada 3 daerah di Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> - Bandung-Sumedang-Cianjur-Sukabumi - Garut-Tasikmalaya - Kuningan-Majalengka
	Sasaran	Sebanyak 20.000 pengusaha mikro dan menengah sektor industri sutera.
	Pendanaan	Hibah
	Waktu pelaksanaan	Januari 2002-Januari 2004
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	
8.4	Nama upaya	The Maluku Economic Opportunity
	Deskripsi upaya	
	Penanggung jawab	
	Pelaksana	USAID dan Mercy Corps International
	Instansi terkait	
	Tujuan upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kapasitas LSM mitra lokal dalam menyediakan bantuan kepada masyarakat untuk pulih dari dampak konflik. - Menyediakan pemulihan ekonomi bagi 500 keluarga melalui proyek-proyek pembangunan ekonomi dengan kredit mikro. - Mengumpulkan informasi mengenai efektivitas bantuan pada tingkat mitra dan kelompok sasaran.
	Jenis Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kapasitas LSM mitra lokal (<i>capacity building</i>). - Penyaluran kredit mikro. - Pengumpulan informasi tentang efektivitas bantuan.
	Wilayah pelaksanaan	Maluku
	Sasaran	Masyarakat korban konflik Maluku
	Pendanaan	Hibah
	Waktu pelaksanaan	April 2003-Maret 2004
	Mekanisme pelaksanaan	
	Pencapaian hasil	
	Masalah	
	Status saat ini	Masih berjalan
	Potensi	